



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025**



Nomor : 26.A/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/05/2026

Tanggal : 22 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Udayana Nomor 22, Mataram**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025**

Nomor : 26.A/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/05/2026

Tanggal : 22 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Udayana Nomor 22, Mataram**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
Laporan ini memuat:
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.

- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	ii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	iv
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 26.B/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Mataram, 22 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Suparwadi S.E., M.M., Ak., ERMAP, CSFA

Register Negara Akuntan No. RNA 15611

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 31 BLUD, dan 12 Kecamatan.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2025;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2025;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;

- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu

ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap selama 80 hari kalender yang terdiri dari:

- a. Pemeriksaan interim dilakukan selama 45 hari mulai tanggal 28 Januari s.d. 13 Maret 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 17/T/ST/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/01/2026 tanggal 22 Januari 2026; dan
- b. Pemeriksaan terinci selama 35 hari mulai tanggal 1 April s.d. 5 Mei 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 116/T/ST/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/03/2026 tanggal 31 Maret 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun, pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN KEUANGAN



BUPATI LOMBOK TENGAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Praya, 22 Mei 2026

Bupati Lombok Tengah



[Handwritten signature]
He Lulu Pathul Bahri, S.IP., M.AP.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA.....	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
NERACA	4
LAPORAN OPERASIONAL	6
LAPORAN ARUS KAS	8
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I Pendahuluan	11
BAB II Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan Dan Entitas Akutansi	19
BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD.....	36
BAB IV Kebijakan Akutansi	63
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	75
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	130
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca	132
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	212
5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	241
5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	251
BAB VI Penutup	256

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Lombok Tengah per Kecamatan Tahun 2025.....	20
Tabel 2.2 Wilayah Administrasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.....	20
Tabel 2.3 Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Tengah per Kecamatan Tahun 2024.....	22
Tabel 2.4 Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dan 2024	22
Tabel 2.5 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025.....	23
Tabel 2.6 Data Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan (ha) di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024.....	25
Tabel 2.7 Perkembangan Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024.....	25
Tabel 2.8 Luas Areal dan Potensi Lestari Sumberdaya Perikanan Tangkap di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.....	27
Tabel 2.9 Produksi dan Nilai Produksi Penangkapan Ikan di Laut Menurut Jenis Ikan Tahun 2025.....	27
Tabel 2.10 Produksi dan Nilai Produksi Ikan Perairan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	29
Tabel 2.11 Jumlah Alat Tangkap yang Digunakan Disetiap Armada Penangkapan Ikan diPerairan Umum - Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.....	29
Tabel 2.12 Nama Obyek dan Daya Tarik Tujuan Wisata di Kabupaten Lombok Tengah.....	31
Tabel 2.13 Jumlah PNS di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Golongan Tahun 2025.....	35
Tabel 2.14 Jumlah PNS di Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	35
Tabel 3.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah	37
Tabel 3.2 Tingkat Kedalam Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah	37
Tabel 3.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah	37
Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lombok Tengah.....	38
Tabel 3.5 Gini Ratio Kabupaten Lombok Tengah	38
Tabel 3.6 Indeks Pembangunan Manusia	39
Tabel 3.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota.....	39
Tabel 3.8 Tingkat Inflasi Kota Mataram	40
Tabel 3.9 PDRB Seri 2024 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dalam Milyar Rupiah.....	41

Tabel 3.10	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	48
Tabel 5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan.....	75
Tabel 5.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	76
Tabel 5.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	76
Tabel 5.4	Anggaran dan Realisasi Jenis Pendapatan Retribusi Daerah.....	80
Tabel 5.5	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	83
Tabel 5.6	Rincian Realisasi Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	84
Tabel 5.7	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85
Tabel 5.8	Tabel Rincian Pendapatan Jasa Giro	85
Tabel 5.9	Tabel Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja	86
Tabel 5.10	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer	88
Tabel 5.11	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	88
Tabel 5.12	Anggaran dan Realisasi Saldo Dana Perimbangan.....	89
Tabel 5.13	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil.....	89
Tabel 5.14	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum	90
Tabel 5.15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik.....	91
Tabel 5.16	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik.....	92
Tabel 5.17	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan	93
Tabel 5.18	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak.....	93
Tabel 5.19	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi	94
Tabel 5.20	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang sah	95
Tabel 5.21	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah.....	95
Tabel 5.22	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	96
Tabel 5.23	Anggaran dan Realisasi Belanja.....	97
Tabel 5.24	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	97
Tabel 5.25	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	98
Tabel 5.26	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	101
Tabel 5.27	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa	103
Tabel 5.28	Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025	105
Tabel 5.29	Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga	106
Tabel 5.30	Tabel Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	107

Tabel 5.31	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah	108
Tabel 5.32	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	109
Tabel 5.33	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial	110
Tabel 5.34	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	111
Tabel 5.35	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Tanah	111
Tabel 5.36	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin.....	112
Tabel 5.37	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan.....	115
Tabel 5.38	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117
Tabel 5.39	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-aset Tetap lainnya	118
Tabel 5.40	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-aset lainnya	120
Tabel 5.41	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga	121
Tabel 5.42	Tabel Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga	121
Tabel 5.43	Anggaran dan Realisasi Transfer Daerah	121
Tabel 5.44	Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil.....	122
Tabel 5.45	Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan	123
Tabel 5.46	Rincian Belanja Bantuan Keuangan Umum dan Khusus	123
Tabel 5.47	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah	124
Tabel 5.48	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan.....	124
Tabel 5.49	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2025.....	125
Tabel 5.50	Penerimaan Pinjaman Daerah.....	125
Tabel 5.51	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.....	126
Tabel 5.52	Pengeluaran Pembiayaan.....	126
Tabel 5.53	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	127
Tabel 5.54	Pembayaran Utang Daerah.....	127
Tabel 5.55	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA/(SiKPA).....	128
Tabel 5.56	Rincian SILPA Terikat dan SILPA Non-Terikat	128
Tabel 5.57	Rincian keberadaan SILPA	129
Tabel 5.58	Saldo Anggaran Lebih Awal	130
Tabel 5.59	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	130
Tabel 5.60	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	131
Tabel 5.61	Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	131
Tabel 5.62	Rincian Aset	132
Tabel 5.63	Rincian Aset Lancar	133
Tabel 5.64	Rincian Kas dan Setara Kas	133
Tabel 5.65	Rincian Saldo Kas di Kas Daerah	134
Tabel 5.66	Selisih Saldo Kas di Kas Daerah pada	134
Tabel 5.67	Pelimpahan Saldo Kas BOSP ke RKUD	135
Tabel 5.68	Kas di Bendahara Penerimaan.....	136

Tabel 5.69	Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan ke RKUD.....	136
Tabel 5.70	Rincian Kas di BLUD	136
Tabel 5.71	Rincian Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun 2025	137
Tabel 5.72	Rincian Pemungutan dan Penyetoran PFK pada BLUD Tahun 2025	138
Tabel 5.73	Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD Praya.....	140
Tabel 5.74	Rincian Kas di BLUD Puskesmas.....	140
Tabel 5.75	Rincian Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) Dana JKN.....	141
Tabel 5.76	Rincian Kas Lainnya	142
Tabel 5.77	Rincian Penyetoran Kas Lainnya	142
Tabel 5.78	Rincian Sisa Kas di Bendahara Dana BOS	143
Tabel 5.79	Rincian Kas Dana BOK Puskesmas (FKTP).....	143
Tabel 5.80	Daftar Piutang Pajak Daerah	144
Tabel 5.81	Rincian Piutang Pajak Menurut Umur Piutang	146
Tabel 5.82	Piutang PBB-P2 Tahun 2025.....	146
Tabel 5.83	Daftar Piutang Retribusi	147
Tabel 5.84	Rincian Piutang Retribusi Menurut Umur Piutang.....	148
Tabel 5.85	Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	148
Tabel 5.86	Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis.....	149
Tabel 5.87	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Tanah	150
Tabel 5.88	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	151
Tabel 5.89	Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Pendapan BLUD)	153
Tabel 5.90	Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis.....	154
Tabel 5.91	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.....	154
Tabel 5.92	Rincian Piutang Lainnya	155
Tabel 5.93	Rincian Penyisihan Piutang.....	156
Tabel 5.94	Beban dibayar dimuka.....	157
Tabel 5.95	Persediaan.....	159
Tabel 5.96	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	160
Tabel 5.97	Investasi Jangka Panjang.....	161
Tabel 5.98	Daftar Investasi Non Permanen.....	161
Tabel 5.99	Daftar Investasi Permanen / Penyertaan Modal	162
Tabel 5.100	Nilai Investasi pada PDAM Tirta Ardia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah.....	163
Tabel 5.101	Daftar Modal di Setor.....	163
Tabel 5.102	Daftar Nilai Aset Tetap	164
Tabel 5.103	Daftar Nilai Aset Tetap Tanah	165
Tabel 5.104	Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2025.....	166

Tabel 5.105 Penambahan Aset Tetap Tanah dari Nilai Appraisal.....	166
Tabel 5.106 Penambahan Aset Tetap Tanah dari Mutasi Antar SKPD.....	167
Tabel 5.107 Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Hibah.....	167
Tabel 5.108 Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi.....	168
Tabel 5.109 Aset Tetap Tanah dalam status sengketa.....	168
Tabel 5.110 Rincian Aset Tetap Tanah yang Dipinjam Pakaikan.....	169
Tabel 5.111 Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	169
Tabel 5.112 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025.....	170
Tabel 5.113 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun/Mutasi antar SKPD 2025.....	170
Tabel 5.114 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Reklas antar KIB Tahun 2025.....	171
Tabel 5.115 Rincian Reklasifikasi Barang/Jasa Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	171
Tabel 5.116 Rincian Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang sebelumnya di catat sebagai aset Gedung dan Bangunan atas nilai perolehan Tahun 2023 dan 2024.....	172
Tabel 5.117 Rincian Reklasifikasi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Belanja Barang Jasa Tahun 2025	173
Tabel 5.118 Rincian Reklasifikasi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomtable Tahun 2025.....	174
Tabel 5.119 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dihibahkan Tahun 2025.....	174
Tabel 5.120 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi ke KIB Lainnya Tahun 2025.....	175
Tabel 5.121 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Dipinjam Pakaikan	176
Tabel 5.122 Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	177
Tabel 5.123 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	177
Tabel 5.124 Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Mutasi antar SKPD Tahun 2025.....	178
Tabel 5.125 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi antar KIB Tahun 2025.....	178
Tabel 5.126 Mutasi Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari penerimaan hibah Tahun 2025	179
Tabel 5.127 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Penghapusan Tahun 2025.....	179
Tabel 5.128 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan extracomtable Tahun 2025.....	180
Tabel 5.129 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Reklasifikasi antar aset tetap Tahun 2025.....	180

Tabel 5.130 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Kekurangan Volume Pekerjaan Tahun 2025	181
Tabel 5.131 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Kesalahan Pengakuan dan lebih saji Tahun 2025	182
Tabel 5.132 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	183
Tabel 5.133 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025	184
Tabel 5.134 Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Mutasi antar KIB	185
Tabel 5.135 Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dari koreksi kesalahan pengakuan tahun sebelumnya	185
Tabel 5.136 Pengurangan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Reklasifikasi antar aset tetap Tahun 2025	186
Tabel 5.137 Aset Tetap Lainnya	186
Tabel 5.138 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	187
Tabel 5.139 Pengurangan Aset Tetap Lainnya Berupa reklas antar KIB Tahun 2025	187
Tabel 5.140 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	188
Tabel 5.141 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2025	188
Tabel 5.142 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025	189
Tabel 5.143 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025	189
Tabel 5.144 Properti Investasi	190
Tabel 5.145 Daftar Dana Cadangan	192
Tabel 5.146 Daftar Aset Lainnya	192
Tabel 5.147 Daftar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	193
Tabel 5.148 Daftar Mutasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	193
Tabel 5.149 Daftar Aset Tidak Berwujud	194
Tabel 5.150 Daftar Aset Lain-Lain	194
Tabel 5.151 Daftar Aset Lain-lain Rusak Ringan/Berat	195
Tabel 5.152 Daftar Aset Lain-lain Rusak Ringan/Berat per SKPD	195
Tabel 5.153 Daftar Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	196
Tabel 5.154 Daftar Detail Engineering Design (DED)	197
Tabel 5.155 Kas yang dibatasi Penggunaannya	199
Tabel 5.156 Daftar Dana Transfer-Dana Bagi Hasil TDF	199
Tabel 5.157 Rincian Kewajiban	199
Tabel 5.158 Rincian Kewajiban Jangka Pendek	200
Tabel 5.159 Daftar Utang PFK per SKPD Tahun 2025	201
Tabel 5.160 Daftar Penyetoran Utang PFK Tahun 2025	201

Tabel 5.161 Daftar Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank-Jangka Pendek	202
Tabel 5.162 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).....	202
Tabel 5.163 Pendapatan Diterima Dimuka.....	203
Tabel 5.164 Rincian Utang Belanja.....	205
Tabel 5.165 Rincian Utang Belanja Pegawai	205
Tabel 5.166 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa.....	206
Tabel 5.167 Rincian Utang Belanja Modal	208
Tabel 5.168 Rincian Utang DBH Ke Desa.....	209
Tabel 5.169 Daftar Utang Jangka Panjang pada PT SMI-PEN	210
Tabel 5.170 Daftar Penarikan Utang Jangka Panjang pada PT SMI-PEN	210
Tabel 5.171 Mutasi Utang Jangka Panjang	211
Tabel 5.172 Nilai Ekuitas	211
Tabel 5.173 Rincian Pendapatan – LO.....	212
Tabel 5.174 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO.....	212
Tabel 5.175 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO	213
Tabel 5.176 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah – LO.....	215
Tabel 5.177 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO.....	215
Tabel 5.178 Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah – LO	218
Tabel 5.179 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	219
Tabel 5.180 Penjelasan Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.....	220
Tabel 5.181 Rincian Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO.....	221
Tabel 5.182 Penjelasan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	222
Tabel 5.183 Rincian Pendapatan Transfer – LO	223
Tabel 5.184 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO.....	223
Tabel 5.185 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO.....	224
Tabel 5.186 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO.....	224
Tabel 5.187 Penjelasan Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	225
Tabel 5.188 Rincian Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	225
Tabel 5.189 Rincian Pendapatan Hibah – LO	226
Tabel 5.190 Penjelasan Selisih Pendapatan Hibah LO.....	227
Tabel 5.191 Rincian Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan LO.....	227
Tabel 5.192 Rincian Beban Tahun 2025 dan 2024	228
Tabel 5.193 Rincian Beban Operasional – LO.....	228
Tabel 5.194 Rincian Beban Pegawai LO.....	229
Tabel 5.195 Penjelasan Selisih Beban Pegawai – LO	230

Tabel 5.196 Rincian Beban Barang dan Jasa – LO	230
Tabel 5.197 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa LO.....	231
Tabel 5.198 Rincian Beban Bunga LO.....	232
Tabel 5.199 Rincian Penambahan/Pengurangan Beban Bunga LO	232
Tabel 5.200 Rincian Beban Hibah – LO	233
Tabel 5.201 Penjelasan Selisih Beban Hibah	234
Tabel 5.202 Rincian Beban Bantuan Sosial – LO.....	234
Tabel 5.203 Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO	235
Tabel 5.204 Penjelasan Selisih Penyisihan Piutang – LO	236
Tabel 5.205 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	236
Tabel 5.206 Rincian Beban Transfer LO.....	237
Tabel 5.207 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil – LO.....	237
Tabel 5.208 Penjelasan Selisih Beban Transfer bagi Hasil Pendapatan – LO	238
Tabel 5.209 Rincian Transfer Bantuan Keuangan – LO	238
Tabel 5.210 Surplus Non – Operasional LO	239
Tabel 5.211 Defisit Non–Operasional	239
Tabel 5.212 Pos Luar Biasa – LO	240
Tabel 5.213 Rincian Surplus/(Defisit) – LO	240
Tabel 5.214 Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	241
Tabel 5.215 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	241
Tabel 5.216 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	243
Tabel 5.217 Aktivitas Investasi	244
Tabel 5.218 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	244
Tabel 5.219 Aktivitas Pendanaan	245
Tabel 5.220 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	246
Tabel 5.221 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	246
Tabel 5.222 Aktivitas Transitoris	246
Tabel 5.223 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	247
Tabel 5.224 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	247
Tabel 5.225 Kenaikan/(Penurunan) Kas.....	248
Tabel 5.226 Saldo Awal Kas	248
Tabel 5.227 Koreksi SiLPA Tahun Lalu	249
Tabel 5.228 Saldo Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD)	249
Tabel 5.229 Saldo Akhir Kas	249
Tabel 5.230 Ekuitas Awal-LO.....	251
Tabel 5.231 Surplus/(Defisit)-LO	251
Tabel 5.232 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar	251
Tabel 5.233 Rincian Koreksi Ekuitas Piutang.....	252

Tabel 5.234 Koreksi Ekuitas–Investasi Jangka Panjang	252
Tabel 5.235 Koreksi Ekuitas Aset Tetap	253
Tabel 5.236 Koreksi Ekuitas Aset Tetap Tanah	254
Tabel 5.237 Koreksi Ekuitas Aset Peralatan dan Mesin.....	254
Tabel 5.238 Koreksi Ekuitas Aset Gedung dan Bangunan	254
Tabel 5.239 Rincian Koreksi Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek.....	255
Tabel 5.240 Rincian Ekuitas Akhir	255

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Pendapatan Berdasarkan Jenis sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025
Lampiran 2	Rekapitulasi Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025
Lampiran 3a	Rekap Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Niralaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2025
Lampiran 3b	Rekap Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Niralaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun Anggaran 2025
Lampiran 3c	Rekap Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Niralaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025
Lampiran 3d	Rekap Belanja Hibah Kepada Koperasi Tahun Anggaran 2025
Lampiran 3e	Rekap Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Tahun Anggaran 2025
Lampiran 3f	Rekap Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025
Lampiran 4a	Rekapitulasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Ke Desa Tahun Anggaran 2025
Lampiran 4b	Rekapitulasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Ke Desa Tahun Anggaran 2025
Lampiran 5a	Rakapitulasi Belanja Alokasi Dana Desa dan Siltap Tahun Anggaran 2025
Lampiran 5b	Rakapitulasi Belanja Trantib Tahun Anggaran 2025
Lampiran 5c	Rakapitulasi Belanja Marbot Tahun Anggaran 2025
Lampiran 5d	Rakapitulasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2025
Lampiran 6	Rekapitulasi Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Perkuatan Modal Koperasi Per 31 Desember 2025
Lampiran 7	Rincian Sisa Kas BOSP Per 31 Desember 2025
Lampiran 8a	Daftar Piutang Pajak Daerah dan Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2025
Lampiran 8b	Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2025
Lampiran 8c	Daftar Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2025
Lampiran 8d	Mutasi Piutang BLUD RSUD Per 31 Desember 2025
Lampiran 8e	Daftar Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Per 31 Desember 2025
Lampiran 8f	Daftar Piutang Lainnya Per 31 Desember 2025
Lampiran 9	Daftar Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025

Lampiran 10	Daftar Persediaan Masing-Masing SKPD Per 31 Desember 2025
Lampiran 11	Daftar Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir Per 31 Desember 2025
Lampiran 12	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Per 31 Desember 2025
Lampiran 13a	Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025
Lampiran 13b	Daftar Bantuan Program Digitalisasi Pendidikan Per 31 Desember 2025
Lampiran 13c	Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025
Lampiran 13d	Daftar Rincian Penerima Dana Revitalisasi Pendidikan Yang Diterima Satuan Pendidikan Per 31 Desember 2025
Lampiran 13e	Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025
Lampiran 13f	Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025
Lampiran 13g	Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025
Lampiran 13h	Daftar Mutasi Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025
Lampiran 14	Daftar Properti Investasi Tahun 2025
Lampiran 15a	Data Kerugian Daerah Per 31 Desember 2025
Lampiran 15b	Data Kerugian Daerah PNS Non Bendahara Per 31 Desember 2025
Lampiran 15c	Data Kerugian Daerah Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025
Lampiran 16a	Daftar Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025
Lampiran 16b	Aset dalam Proses TGR Per 31 Desember 2025
Lampiran 16c	Aset dalam Proses Penghapusan Per 31 Desember 2025
Lampiran 16d	Daftar Detail Engineering Design (DED) Per 31 Desember 2025
Lampiran 16e	Daftar Aset dalam Kondisi Rusak Berat Per 31 Desember 2025
Lampiran 17	Daftar Utang PFK Per 31 Desember 2025
Lampiran 18	Daftar Utang Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bank (LBK) BUMN Jangka Pendak Per 31 Desember 2025
Lampiran 19	Daftar Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2025
Lampiran 20a	Daftar Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024
Lampiran 20b	Daftar Utang Belanja Barang Per 31 Desember 2025
Lampiran 20c	Daftar Utang Belanja Barang Jasa Per 31 Desember 2025
Lampiran 20d	Daftar Utang Belanja Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025
Lampiran 20e	Daftar Utang Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 2024
Lampiran 20f	Daftar Utang Bagi Hasil Ke Desa Per 31 Desember 2025
Lampiran 20g	Mutasi Utang Belanja BLUD RSUD Per 31 Desember 2025
Lampiran 20h	Rekap Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa Tahun Anggaran 2025
Lampiran 21	Daftar Mutasi Utang Jangka Panjang Per 31 Desember 2025

Lampiran 22	Daftar Realisasi Pendapatan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025
Lampiran 23	Daftar Realisasi Beban Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	2.825.991.771.625,49	2.901.498.807.255,48	102,67	2.729.660.115.585,25
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	504.607.362.379,49	545.831.803.384,48	108,17	331.059.847.831,25
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	276.329.157.274,00	330.687.312.272,95	119,67	182.328.157.865,50
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	25.964.886.316,89	40.497.442.500,00	155,97	31.058.523.271,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	13.183.615.297,00	13.183.615.297,00	100,00	12.741.149.852,00
Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	189.129.703.491,60	161.463.433.314,53	85,37	104.932.016.842,75
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	2.294.757.887.953,00	2.329.206.611.378,00	101,50	2.289.284.360.966,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	2.180.462.176.000,00	2.207.886.324.056,00	101,26	2.165.107.290.050,00
Dana Desa	5.1.1.2.1.1	176.357.457.000,00	162.209.204.800,00	91,98	185.021.712.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.2	7.888.237.000,00	7.888.237.000,00	100,00	23.708.776.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.3	179.123.616.000,00	177.896.979.100,00	99,32	132.877.850.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.4	1.334.314.435.000,00	1.375.586.130.050,00	103,09	1.248.441.289.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.5	482.778.431.000,00	484.305.773.106,00	100,32	575.057.663.050,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	114.295.711.953,00	121.320.287.322,00	106,15	124.177.070.916,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	114.141.711.953,00	121.166.287.322,00	106,15	124.177.070.916,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	154.000.000,00	154.000.000,00	100,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	26.626.521.293,00	26.460.392.493,00	99,38	109.315.906.788,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	302.000.000,00	135.871.200,00	44,99	266.910.500,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00	109.048.996.288,00
BELANJA DAERAH	5.1.2	2.925.202.177.429,25	2.814.274.649.088,89	96,21	2.617.596.128.124,98
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.175.322.200.460,91	2.109.729.193.164,29	96,98	1.978.538.947.668,32
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.308.876.185.400,60	1.275.806.131.204,38	97,47	1.156.476.918.161,76
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	793.214.912.805,31	760.945.163.861,91	95,93	715.146.946.996,56
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	9.817.569.753,00	9.817.569.753,00	100,00	11.302.707.488,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	62.657.532.502,00	62.533.928.345,00	99,80	95.072.375.022,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	756.000.000,00	626.400.000,00	82,86	540.000.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	361.992.972.794,03	345.144.760.255,60	95,35	283.920.793.925,66
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	1.270.016.600,00	1.261.109.152,00	99,30	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	104.694.908.450,31	95.235.979.101,00	90,97	91.727.573.671,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	148.501.231.866,77	145.657.436.123,60	98,09	142.704.330.558,54
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	91.394.793.044,12	89.360.624.558,00	97,77	38.965.281.078,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	14.260.692.984,00	13.629.611.321,00	95,57	10.513.658.618,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	1.871.329.848,83	0,00	0,00	9.950.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	19.556.796.096,12	8.959.925.740,00	45,81	8.838.353.947,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	19.556.796.096,12	8.959.925.740,00	45,81	8.838.353.947,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	368.330.208.078,19	350.440.769.929,00	95,14	346.298.032.584,00
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	34.913.665.518,19	32.475.195.796,00	93,02	20.838.360.124,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1.1	32.352.050.223,29	30.644.055.037,00	94,72	18.146.089.922,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.1.2	2.561.615.294,90	1.831.140.759,00	71,48	2.692.270.202,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	333.416.542.560,00	317.965.574.133,00	95,37	325.459.672.460,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.2.1	333.416.542.560,00	317.965.574.133,00	95,37	325.459.672.460,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(99.210.405.803,76)	87.224.158.166,59	(87,92)	112.063.987.460,27

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3	99.210.405.803,76	107.254.792.727,67	108,11	23.277.432.983,49
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	153.840.110.633,76	161.879.283.656,67	105,23	44.064.564.543,49
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	135.341.420.443,76	135.342.372.466,67	100,00	39.084.647.243,49
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	18.498.690.190,00	26.526.811.190,00	143,40	4.950.317.300,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.3	0,00	10.100.000,00	0,00	29.600.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	54.629.704.830,00	54.624.490.929,00	99,99	20.787.131.560,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.2.1	54.629.704.830,00	54.624.490.929,00	99,99	20.787.131.560,00
PEMBIAYAAN DAERAH NETTO		99.210.405.803,76	107.254.792.727,67	108,11	23.277.432.983,49
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA) SEBELUM KOREKSI	5.1.4	0,00	194.478.950.894,26	0,00	135.341.420.443,76
KOREKSI SILPA		0,00	0,00	0,00	0,00
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA)	5.1.4	0,00	194.478.950.894,26	0,00	135.341.420.443,76

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	135.341.420.443,76	39.084.647.243,49
PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	135.342.372.466,67	39.084.647.243,49
Subtotal		(952.022,91)	0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.2.3	194.478.950.894,26	135.341.420.443,76
Subtotal		194.477.998.871,35	135.341.420.443,76
KOREKSI KESALAHAN +/- PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	952.022,91	0,00
LAIN-LAIN		0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.5	194.478.950.894,26	135.341.420.443,76

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP., M.AP



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ASET	5.3.1	4.299.349.984.627,88	4.162.915.996.549,77
ASET LANCAR	5.3.1.1	273.976.931.323,51	239.380.450.241,04
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	195.529.698.613,26	136.084.271.909,53
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	180.928.348.923,69	118.820.191.873,99
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	31.772.500,00	20.473.794,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	3.000.000,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	9.268.276.507,69	9.005.264.738,26
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	0,00	1.861.379.536,80
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	1.050.747.719,00	742.851.465,77
Setara Kas	5.3.1.1.1.8	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.9	944.187.940,88	644.439.673,71
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.10	3.303.365.022,00	4.989.670.827,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	106.470.878.979,67	86.378.017.612,07
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	2.594.492.319,33	3.069.377.869,33
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.2.3	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	6.596.726.833,59	22.042.086.208,59
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.5	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.6	2.496.646.967,00	12.616.953.084,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.2.7	63.712.000,00	177.749.000,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.3	(73.006.461.914,92)	(54.161.634.997,02)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	519.293.141,58	397.901.932,53
Persediaan	5.3.1.1.5	32.711.944.384,00	32.775.727.622,01
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	132.544.721.354,00	143.047.444.147,13
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	132.544.721.354,00	143.047.444.147,13
ASET TETAP	5.3.1.3	3.822.556.646.979,25	3.712.625.425.091,81
Tanah	5.3.1.3.1	913.138.402.492,66	913.866.030.409,53
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	940.402.560.377,57	848.040.000.440,25
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	2.084.771.565.762,88	1.828.258.831.779,79
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	2.477.057.338.389,62	2.357.145.716.776,02
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	100.329.155.550,23	97.256.168.835,23
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	4.155.951.000,00	7.528.505.993,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.697.298.326.593,71)	(2.339.469.829.142,01)
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4	25.202.062.730,00	25.386.152.486,00
Properti Investasi Tanah	5.3.1.4	7.232.668.000,00	6.969.516.000,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.4	24.057.725.381,00	24.057.725.381,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	5.3.1.4	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4	(6.088.330.651,00)	(5.641.088.895,00)
DANA CADANGAN	5.3.1.5	0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.6	45.069.622.241,12	42.476.524.583,79
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.6.1	11.990.417.737,16	9.529.420.079,83
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.6.2	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.6.3	143.600.000,00	0,00
Aset Lain-lain	5.3.1.6.4	32.889.604.503,96	32.901.104.503,96
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.6.5	46.000.000,00	46.000.000,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.6.6	0,00	0,00
JUMLAH ASET		4.299.349.984.627,88	4.162.915.996.549,77

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
KEWAJIBAN	5.3.2	202.656.889.026,12	234.004.897.217,79
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	100.139.639.216,12	100.306.950.067,79
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	1.050.747.719,00	742.851.465,77
Utang Pinjaman Jangka Pendek	5.3.2.1.2	8.028.121.000,00	4.950.317.300,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	31.180.697.340,00	31.180.697.340,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	1.179.355.749,99	738.647.818,00
Utang Belanja	5.3.2.1.5	58.654.717.407,13	62.648.436.144,02
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	46.000.000,00	46.000.000,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	102.517.249.810,00	133.697.947.150,00
Utang kepada Pemerintah Pusat	5.3.2.2	102.517.249.810,00	133.697.947.150,00
EKUITAS	5.3.3	4.096.693.095.601,76	3.928.911.099.331,98
EKUITAS	5.3.3	4.096.693.095.601,76	3.928.911.099.331,98
Ekuitas	5.3.3	4.096.693.095.601,76	3.928.911.099.331,98
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.299.349.984.627,88	4.162.915.996.549,77

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


 BUPATI LOMBOK TENGAH
 H. LALU FATHIL BAHRI, S.IP, M.AP



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
PENDAPATAN DAERAH-LO	5.4.1	2.861.097.452.957,72	2.473.405.880.687,43	387.691.572.270,29	15,67
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1	535.832.457.139,72	322.125.333.930,16	213.707.123.209,56	66,34
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	335.782.630.171,29	190.681.563.492,75	145.101.066.678,54	76,10
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	39.495.599.933,33	29.210.384.887,66	10.285.215.045,67	35,21
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	15.544.738.125,00	2.745.795.422,00	12.798.942.703,00	466,13
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	145.009.488.910,10	99.487.590.127,75	45.521.898.782,35	45,76
PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2	2.156.877.100.461,00	2.073.944.463.028,00	82.932.637.433,00	4,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1	2.045.677.119.256,00	1.947.658.744.050,00	98.018.375.206,00	5,03
Dana Perimbangan-LO	5.4.1.2.1	0,00	1.923.949.968.050,00	(1.923.949.968.050,00)	(100,00)
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	5.4.1.2.1	177.896.979.100,00	0,00	177.896.979.100,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	5.4.1.2.1	1.375.586.130.050,00	0,00	1.375.586.130.050,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	5.4.1.2.1	484.305.773.106,00	0,00	484.305.773.106,00	0,00
Insentif Fiskal-LO	5.4.1.2.1	7.888.237.000,00	23.708.776.000,00	(15.820.539.000,00)	(66,73)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2	111.199.981.205,00	126.285.718.978,00	(15.085.737.773,00)	(11,95)
Pendapatan Bagi Hasil-LO	5.4.1.2.2	111.045.981.205,00	126.285.718.978,00	(15.239.737.773,00)	(12,07)
Bantuan Keuangan-LO	5.4.1.2.2	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.3	168.387.895.357,00	77.336.083.729,27	91.051.811.627,73	117,74
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	142.063.374.064,00	21.914.611.961,60	120.148.762.102,40	548,26
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	26.324.521.293,00	55.421.471.767,67	(29.096.950.474,67)	(52,50)
BEBAN DAERAH	5.4.2	2.634.726.814.068,82	2.374.975.289.936,60	259.751.524.132,22	10,94
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	2.443.914.808.658,61	2.213.696.685.382,91	230.218.123.275,70	10,40
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	1.273.914.067.410,77	1.132.436.367.267,50	141.477.700.143,27	12,49
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	792.222.763.474,17	728.873.016.825,94	63.349.746.648,23	8,69
Beban Bunga	5.4.2.1.3	9.811.821.142,95	11.302.707.488,00	(1.490.886.345,05)	(13,19)
Beban Subsidi	5.4.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	5.4.2.1.5	67.020.375.362,00	107.746.181.707,47	(40.725.806.345,47)	(37,80)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.6	626.400.000,00	540.000.000,00	86.400.000,00	16,00
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.7	5.798.456.155,41	13.012.698.219,00	(7.214.242.063,59)	(55,44)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.8	294.520.925.113,31	219.785.713.875,00	74.735.211.238,31	34,00
BEBAN TRANSFER	5.4.2.2	190.812.005.410,21	161.278.604.553,69	29.533.400.856,52	18,31
Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	35.055.636.077,21	20.840.644.093,69	14.214.991.983,52	68,21
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	155.756.369.333,00	140.437.960.460,00	15.318.408.873,00	10,91
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		226.370.638.888,90	98.430.590.750,83	127.940.048.138,07	129,98
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	5.4.3	203.757.406,00	976.835.821,48	(773.078.415,48)	(79,14)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.4.3	203.757.406,00	976.835.821,48	(773.078.415,48)	(79,14)
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	5.4.4	2.318.961.441,97	365.201.283,00	1.953.760.158,97	534,98
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.4.4	2.318.961.441,97	365.201.283,00	1.953.760.158,97	534,98
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(2.115.204.035,97)	611.634.538,48	(2.726.838.574,45)	(445,83)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		224.255.434.852,93	99.042.225.289,31	125.213.209.563,62	126,42
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA-LO	5.4.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa-LO	5.4.5	0,00	0,00	0,00	0,00

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
BEBAN LUAR BIASA	5.4.5	8.959.925.740,00	2.069.890.667,00	6.890.035.073,00	332,87
Beban Luar Biasa	5.4.5	8.959.925.740,00	2.069.890.667,00	6.890.035.073,00	332,87
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.4.6	215.295.509.112,93	96.972.334.622,31	118.323.174.490,62	122,02

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.1	2.901.498.807.255,48	2.729.660.115.585,25
Pajak Daerah	5.5.1.1	330.687.312.272,95	182.328.157.865,50
Retribusi Daerah	5.5.1.1	40.497.442.500,00	31.058.523.271,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1	13.183.615.297,00	12.741.149.852,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1	161.463.433.314,53	104.932.016.842,75
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1	2.207.886.324.056,00	2.165.107.290.050,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1	121.320.287.322,00	124.177.070.916,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1	135.871.200,00	266.910.500,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1	26.324.521.293,00	109.048.996.288,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.2	2.469.129.888.833,29	2.333.675.334.199,32
Belanja Pegawai	5.5.1.2	1.275.806.131.204,38	1.156.476.918.161,76
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2	760.945.163.861,91	715.146.946.996,56
Belanja Bunga	5.5.1.2	9.817.569.753,00	11.302.707.488,00
Belanja Hibah	5.5.1.2	62.533.928.345,00	95.072.375.022,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2	626.400.000,00	540.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	5.5.1.2	8.959.925.740,00	8.838.353.947,00
Belanja Bagi Hasil	5.5.1.2	32.475.195.796,00	20.838.360.124,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2	317.965.574.133,00	325.459.672.460,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		432.368.918.422,19	395.984.781.385,93
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.1	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.2	345.144.760.255,60	283.920.793.925,66
Belanja Modal Tanah	5.5.2.2	1.261.109.152,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	95.235.979.101,00	91.727.573.671,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.2	145.657.436.123,60	142.704.330.558,54
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.2.2	89.360.624.558,00	38.965.281.078,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	13.629.611.321,00	10.513.658.618,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.5.2.2	0,00	9.950.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(345.144.760.255,60)	(283.920.793.925,66)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.1	26.536.911.190,00	4.979.917.300,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.3.1	26.526.811.190,00	4.950.317.300,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.1	10.100.000,00	29.600.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.2	54.624.490.929,00	20.787.131.560,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.5.3.2	54.624.490.929,00	20.787.131.560,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	(28.087.579.739,00)	(15.807.214.260,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.1	279.078.109.723,76	292.455.063.321,54
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1	118.445.070.551,00	136.771.898.553,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	5.5.4.1	156.735.544.296,00	155.305.693.569,20
Kiriman Uang Masuk	5.5.4.1	3.897.494.876,76	377.471.199,34
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.2	279.820.961.189,53	292.246.310.306,28
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2	119.187.922.016,77	136.771.898.553,00
Pemberian Uang Persediaan kepada Bend.	5.5.4.2	156.738.544.296,00	155.293.023.158,00
Kiriman Uang Keluar	5.5.4.2	3.894.494.876,76	181.388.595,28
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	(742.851.465,77)	208.753.015,26
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS	5.5.5	58.393.726.961,82	96.465.526.215,53

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
SALDO AWAL KAS	5.5.6	136.084.271.909,53	38.875.894.228,23
KOREKSI SILPA TAHUN LALU	5.5.7	952.022,91	0,00
KAS LAINNYA DI BENDAHARA (SELAIN BUD)	5.5.8	1.050.747.719,00	742.851.465,77
SALDO AKHIR KAS	5.5.9	195.529.698.613,26	136.084.271.909,53

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI LOMBOK TENGAH



H.LALU FATHUL BAHRI, S.IP, M.AP



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	3.928.911.099.331,98	3.816.068.873.789,83
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.6.2	215.295.509.112,93	96.972.334.622,31
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.3	(47.513.512.843,15)	15.869.890.919,84
Koreksi Ekuitas-Aset Lancar	5.6.3.1	1.856.733.908,36	2.000.000,00
Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang	5.6.3.2	(12.863.845.621,13)	142.742.206,00
Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	5.6.3.3	(36.555.809.021,38)	10.281.812.861,77
Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	5.6.3.4	10.627.891,00	(51.437.139,93)
Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek	5.6.3.5	38.780.000,00	5.494.772.992,00
EKUITAS AKHIR	5.6.4	4.096.693.095.601,76	3.928.911.099.331,98

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP., M.AP



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama Tahun Anggaran (TA) 2025. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Adapun tujuan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan rincian:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan Arus Kas suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial dan catatan atas laporan keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/(defisit);
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL menyajikan pos-pos sebagai berikut.

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, tahun berjalan, serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam Aset Lancar dan Non-Lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang dalam Neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos Aset dan Kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut :

- a. Kas dan setara Kas;
- b. Investasi Jangka Pendek;
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak;
- d. Persediaan;
- e. Investasi Jangka Panjang;
- f. Aset Tetap;
- g. Kewajiban Jangka Pendek;
- h. Kewajiban Jangka Panjang; dan
- i. Ekuitas Dana.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari:

- a. Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b. Beban dari Kegiatan Operasional;
- c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional; dan
- d. Pos Luar Biasa dari Kegiatan Operasional.

Keempat unsur Laporan Operasional di atas pada akhirnya akan membentuk Surplus/(Defisit) LO yang merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional dan Pos Luar Biasa.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Laporan Arus Kas terdiri dari:

- a. Penerimaan kas, yaitu semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah; dan
- b. Pengeluaran kas, yaitu semua aliran yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut.

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/(defisit) LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan
- d. Ekuitas Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut.

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, namun tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan; dan
- e. Pengungkapan informasi untuk pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian angka dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagaimana telah di cabut dengan Undang-Undang nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah di cabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) yang telah di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara republik Indonesai Nomor 6757)



10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) sebagaimana telah di ganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah di cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025; dan

24. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

I. Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

II. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- A. Gambaran Umum Kondisi Daerah; dan
- B. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

III. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- A. Ekonomi Makro;
- B. Kebijakan Keuangan Daerah; dan
- C. Pencapaian Target Kinerja APBD.

IV. Kebijakan Akuntansi

- A. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- C. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan.

V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari:

- 1) Pendapatan;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/(Defisit)-LRA;
- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

- B. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- C. Penjelasan Pos-pos Neraca terdiri dari:

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban; dan
- 3) Ekuitas.

- D. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional terdiri dari:

- 1) Pendapatan-LO;
- 2) Beban;
- 3) Kegiatan Non Operasional;



- 4) Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa;
- 5) Pos Luar Biasa; dan
- 6) Surplus/(Defisit)-LO.

E. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas terdiri dari:

- 1) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi;
- 2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi;
- 3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan;
- 4) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris;
- 5) Kenaikan/(Penurunan) Kas selama Periode; dan
- 6) Saldo Akhir Kas.

F. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) terdiri dari:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus / Defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan
- 4) Ekuitas Akhir.

VI. Penutup





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PE LAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum daerah meliputi paparan tentang sejarah Kabupaten Lombok Tengah, kondisi geografis daerah, gambaran umum demografi, dan kondisi ekonomi Kabupaten Lombok Tengah. Secara rinci mengenai hal-hal tersebut dipaparkan sebagai berikut.

1. Sejarah Kabupaten Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Tengah terbentuk menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah-Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Undang-undang tersebut di sahkan pada tanggal 14 Agustus 1958.

Sebelum terbentuk sebagai wilayah pemerintah, entitas Lombok Tengah telah ada jauh sebelum nya, ditandai dengan beberapa momentum bersejarah seperti dikeluarkan nya *Staadblad* Nomor 248 Tahun 1898 tentang *onder afdeling* Lombok Timur, Lombok tengah, Lombok Barat oleh Gubernur Hindia Belanda.

Pasca Proklamasi, Kabupaten Lombok Tengah secara integral menjadi bagian dari NKRI di tandai dengan pelantikan secara formal kepala daerah setempat pada tanggal 15 Oktober 1945.

Kabupaten Lombok Tengah telah mengalami perjalanan pemerintahan yang berlangsung selama 76 tahun, dipimpin oleh 11 kepala daerah dan wakil kepala daerah.p

2. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu wilayah dari 10 wilayah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencakup dua pulau, yaitu Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa.

Dari segi letak geografis, Kabupaten Lombok Tengah diapit oleh dua kabupaten lain yakni Kabupaten Lombok Barat yang berada disebelah barat dan utara serta Kabupaten Lombok Timur disebelah timur dan utara, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Lombok tengah berada ditengah-tengah Pulau Lombok yang membentang dari Selatan ke Utara, terletak pada posisi diantara 116°05'-116°24' Bujur Timur dan 8°24 -8°57' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.168,13 km².

Secara administrasi Kabupaten Lombok Tengah terbagi menjadi dua belas kecamatan, dengan seratus lima puluh empat desa, dua belas kelurahan. Luas wilayah administrasi kecamatan, desa/kelurahan, dan dusun/lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 adalah seperti tertera dalam Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Lombok Tengah per Kecamatan Tahun 2025

(dalam km²)

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Praya	51,08	4,37
2	Jonggat	67,23	5,76
3	Pujut	238,12	20,38
4	Kopang	54,33	4,65
5	Batukliang	52,19	4,47
6	Janapria	67,38	5,77
7	Pringgarata	44,52	3,81
8	Praya Barat	146,98	12,58
9	Praya Timur	86,52	7,41
10	Praya Tengah	62,8	5,38
11	Praya Barat Daya	131,66	11,27
12	Batukliang Utara	165,32	14,15
JUMLAH		1.168,13	100

Sumber : Lombok Tengah Dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 2.2 Wilayah Administrasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

(dalam km²)

No	Kecamatan	Pembagian Wilayah Administrasi			
		Desa	Kelurahan	Dusun	Lingkungan
1	Praya	15	9	88	62
2	Jonggat	13	0	136	0
3	Pujut	18	0	280	0
4	Kopang	13	0	117	0
5	Batukliang	11	0	155	0
6	Janapria	16	0	227	0
7	Pringgarata	11	0	117	0
8	Praya Barat	10	0	145	0
9	Praya Timur	14	0	186	0
10	Praya Tengah	13	3	115	19
11	Praya Barat Daya	12	0	134	0
12	Batukliang Utara	8	0	98	0
JUMLAH		154	12	1.797	81

Sumber : Lombok Tengah Dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Lombok Tengah

Batas-batas wilayah Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur.

Letak Kabupaten Lombok Tengah yang berada ditengah-tengah antara Kabupaten/Kota se-NTB dengan jarak dan waktu tempuh yang relatif singkat dan mudah dijangkau baik dari Pulau Sumbawa maupun Pulau Lombok menjadi demikian strategis di Provinsi NTB bahkan di wilayah Indonesia Bagian Timur, karena didukung oleh keberadaan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM) yang merupakan pintu gerbang masuk bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan asing yang hendak mengunjungi dan menikmati keindahan serta keunikan ragam destinasi wisata budaya, wisata bahari, wisata alam, dan wisata religi.

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Lombok Tengah terbagi menjadi tiga wilayah dengan karakteristik yang berbeda, yaitu:

a. Bagian Utara

Wilayah ini meliputi Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Kopang, dan Kecamatan Pringgarata. Sebagian besar wilayah ini merupakan dataran tinggi karena merupakan bagian dari kaki Gunung Rinjani (3.726 m). Curah hujan di wilayah ini relatif tinggi sehingga sangat sesuai untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan perikanan). Wilayah utara ini terdapat aset wisata terutama pariwisata alam pegunungan dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk.

b. Bagian Tengah

Wilayah ini meliputi Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Janapria, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan daerah dataran rendah. Potensi yang dimiliki antara lain adalah pertanian padi dan palawija, yang didukung oleh lahan persawahan yang luas dan sarana irigasi yang memadai.

c. Bagian Selatan

Wilayah ini meliputi Kecamatan Pujut, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, serta sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat. Sebagian besar wilayah ini berupa daerah perbukitan dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan pengembangan wisata budaya dan wisata bahari yang mempesona dengan didukung oleh keberadaan Bandara Internasional Lombok. Potensi wisata bahari dengan keunikan tradisi masyarakat setempat telah menjadi perhatian pemerintah sehingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika pada tanggal 30 Juni 2014, dan pada tanggal 17 Oktober 2014 ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Gambaran Umum Demografi

Berdasarkan data Kabupaten Lombok Tengah dalam angka Tahun 2025, penduduk Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 1.142.173 jiwa yang terdiri dari 567.487 jiwa penduduk laki-laki dan 574.686 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin Tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99.

Seperti telah disebutkan terdahulu bahwa luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah adalah 1.168,13km², maka tercatat kepadatan penduduk di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 mencapai 945,20 jiwa/km². Kepadatan penduduk pada 12 kecamatan beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Praya dengan kepadatan sebesar 2.664 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Batukliang Utara sebesar 398 jiwa/km².

Tabel 2.3 Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Tengah per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk Sesuai Jenis Kelamin (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Praya	68.386	69.270	137.656
2	Jonggat	57.514	58.425	115.939
3	Pujut	63.941	65.492	129.433
4	Kopang	50.945	51.605	102.550
5	Batukliang	48.888	48.891	97.779
6	Janapria	46.817	46.995	93.812
7	Pringgarata	41.567	41.871	83.438
8	Praya Barat	45.196	45.903	91.099
9	Praya Timur	38.415	39.487	77.902
10	Praya Tengah	40.217	40.543	80.760
11	Praya Barat Daya	32.172	32.780	64.952
12	Batukliang Utara	33.429	33.424	66.853
JUMLAH		567.487	574.686	1.142.173

Sumber : Disdukcapil kab. Lombok Tengah dan Lombok Tengah Dalam Angka 2025- BPS Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan (*sex ratio*) adalah sebesar 99,93, sehingga dengan informasi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya pemberdayaan perempuan secara masif.

Kondisi demografi berupa kepadatan, sebaran serta komposisi penduduk merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini sangatlah disadari mengingat peranan perempuan pada khususnya dalam kiprah membangun karakter mental keluarga dan lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh bagi kemajuan daerah.

Tabel 2.4 Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dan 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (Jiwa)	
		2025	2024
1	Praya	45.470	44.835
2	Jonggat	40.166	39.684
3	Pujut	43.028	42.306
4	Kopang	34.920	34.422
5	Batukliang	33.723	33.209
6	Janapria	33.081	32.545
7	Pringgarata	27.965	27.561
8	Praya Barat	30.544	30.026
9	Praya Timur	27.233	26.855
10	Praya Tengah	26.861	26.455
11	Praya Barat Daya	23.034	22.674
12	Batukliang Utara	22.797	22.376
JUMLAH		3888.822	382.948

Sumber : Lombok Tengah Dalam Angka 2024, BPS Kabupaten Lombok Tengah

Dengan melihat Tabel 4 dapat diketahui bahwa bahwa jumlah kepala keluarga terbesar terdapat di Kecamatan Praya yaitu sebanyak 44.835 jiwa, sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Batukliang Utara, yaitu sebanyak 22.797 jiwa.

Adapun komposisi penduduk Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Kelompok Umur pada Tahun 2024 dijabarkan dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 2.5 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		(jiwa)	(jiwa)	(jiwa)
1	00 – 04	34.482	32.377	66.859
2	05 – 09	58.206	54.256	112.462
3	10 – 14	56.070	52.760	108.830
4	15 – 19	43.874	42.350	86.224
5	20 – 24	41.691	39.682	81.373
6	25 – 29	42.604	43.212	85.816
7	30 – 34	41.177	42.241	83.418
8	35 – 39	44.395	47.199	91.594
9	40 – 44	43.936	46.711	90.647
10	45 – 49	42.169	45.239	87.408
11	50 – 54	34.000	32.944	66.944
12	55 – 59	28.536	31.022	59.558
13	60 – 64	18.390	20.518	38.908
14	65 – 69	16.601	19.178	35.779
15	70 – 74	8.414	9.523	17.937
16	≥75	12.942	15.474	28.416
JUMLAH		567.487	574.686	1.142.173

Sumber: *Lombok Tengah Dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Lombok Tengah*

Dilihat dari Tabel 5 di atas, didapat informasi bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada usia produktif 15–64 tahun terbilang sangat tinggi yaitu sebanyak 771.890 jiwa. Hal ini tentu menjadi salah satu potensi sumber daya yang harus dimaksimalkan dalam rangka menggerakkan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

Kondisi demografi dengan komposisi usia ini akan menjadi modal pembangunan yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, apabila komposisi penduduk tidak dikelola dengan baik akan berpotensi menjadi permasalahan meningkatnya angka pengangguran.

Tentu saja sumberdaya manusia produktif yang ada ini memerlukan sentuhan pembinaan dan pengelolaan yang baik dan sungguh-sungguh secara berkelanjutan agar secara nyata menjadi sumber daya produktif yang memberikan nilai kemanfaatan bagi pembangunan daerah, khususnya pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam rangka pengejawantahan visi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah 2021-2025, yakni “Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya.”, maka fokus pembangunan Kabupaten Lombok Tengah diarahkan kepada tiga sektor pembangunan, di antaranya sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata atau yang dikenal dengan sebutan ATM (*Agribusiness, Tourism, and Marine*). Dengan pendekatan pembangunan berbasis kawasan dan memperhatikan potensi lokal yang dapat dikembangkan secara optimal,

pemerintah Kabupaten Lombok Tengah membagi wilayah ke dalam tiga zona pengembangan dalam wilayah itu, yaitu:

a. Zona I disebut dengan Zona Aik Meneng

Meliputi wilayah kecamatan-kecamatan yang berada di bagian utara yaitu Kopang, Batukliang, Batukliang Utara, dan Janapria, yang direncanakan sebagai wilayah pengembangan agrobisnis dan agrowisata;

b. Zona II disebut dengan Zona Tunjung Tilah

Meliputi wilayah kecamatan-kecamatan yang berada di bagian tengah yaitu Praya, Praya Tengah, Jonggat, dan Pringgarata, yang direncanakan sebagai wilayah pusat pemerintahan, industri, perdagangan dan jasa, dan pengembangan pertanian tanaman pangan; dan

c. Zona III disebut dengan Zona Empak Bau

Meliputi wilayah kecamatan-kecamatan yang berada di bagian selatan yaitu Praya Timur, Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya, yang direncanakan sebagai wilayah pengembangan pariwisata dan perikanan kelautan.

4. Kondisi Ekonomi

Secara umum perekonomian masyarakat Kabupaten Lombok Tengah bertumpu pada sektor-sektor pertanian (*agribisnis*), pariwisata (*tourism*), dan perikanan kelautan (*marine*). Sektor-sektor dimaksud menjadi potensi unggulan yang telah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

a. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Lombok Tengah dengan luas wilayahnya sebesar 1.168,13 ha, 79% di antaranya digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk sawah, tegal/kebun, ladang/huma, tambak, kolam/empang, hutan, dan perkebunan, sisanya sebesar 21% digunakan untuk bangunan dan pekarangan, padang rumput, dan lainnya.

Dari 79% atau 95.214 ha lahan yang digunakan untuk pertanian, lebih dari separuhnya atau 54% adalah lahan sawah, sisanya terbagi menjadi masing - masing 23% hutan, 19% ladang dan kebun, kolam/empang 2% dan terakhir tambak dibawah 1%.

Luas areal persawahan di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2025 mencapai 54.562 ha yang terdiri dari 42,230 hektar adalah sawah irigasi, 11,332 ha adalah sawah tadah hujan. Sedangkan luas lahan kering diperkirakan mencapai 66,277 ha. Angka penyusutan setiap tahun rata-rata 16,7 ha. Penyusutan lahan pertanian di Loteng ini tidak bisa dihindarkan dalam beberapa tahun terakhir. Terutama seiring dengan perkembangan pembangunan yang terjadi di Lombok Tengah saat ini.

Menyadari penyusutan lahan pertanian yang terjadi setiap tahun, maka pemerintah Lombok Tengah mulai menerapkan pertanian modern agar dengan lahan yang semakin berkurang tapi bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi.

Pada Tahun 2015, Kabupaten Lombok Tengah menargetkan luas areal persawahan yang mencakup berbagai jenis tanaman perkebunan. Berikut adalah beberapa data mengenai luas areal persawahan di Kabupaten Lombok Tengah padat Tahun 2025.

Luas tanaman padi sebesar 32 ribu hektar pada musim tanam kedua, dengan total luas tanaman padi mencapai 52 ribu hektar pada musim tanam pertama.

Luas tanaman padi musim tanam kedua sebesar 32 ribu hektar, dengan target luas tanaman padi mencapai 96 ribu hektar per tahun.

Data ini menunjukkan komitmen Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui pertanian yang berkelanjutan dan penggunaan lahan yang optimal.

b. Potensi Pertanian

Kebutuhan pangan bagi masyarakat merupakan salah satu komoditas strategis, karena erat kaitannya dengan upaya stabilitas Ketahanan Nasional. Pengadaan pangan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, serta sesuai persyaratan gizi, selalu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat sesuai UU Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Beberapa komoditas tanaman pangan yang umum dikembangkan di lahan sawah selain padi adalah palawija (kedelai, jagung, kacang hijau, kacang tanah, dan tanaman semusim lainnya). Melalui upaya-upaya peningkatan mutu intensifikasi maupun peningkatan penerapan teknologi, produktifitas beberapa komoditas tersebut masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan.

Lombok Tengah juga merupakan salah satu produsen tembakau. Pada Tahun 2024 produksi tembakau Lombok Tengah mencapai 26.929,77 ton yang terdiri dari tembakau rakyat sebanyak 26.358,66 ton dan tembakau Virginia sebanyak 571,11 ton. Selain tembakau produksi kelapa juga mendominasi hasil perkebunan Kabupaten Lombok Tengah. Pada Tahun 2024 produksi kelapa mencapai 10.847,49 ton.

**Tabel 2.6 Data Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan (ha)
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024**

Jenis/Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Padi Sawah	68.760	65.825	64.963	68.721	69.155
Padi Ladang	3.646	6.072	5.301	3.693	1.601
Jagung	14.439	12.509	14.976	14.151	16.028
Kedelai	5.367	5.104	5.949	8.870	3.725
Kacang Hijau	840	1.213	1.316	1.107	187
Kacang Tanah	2.496	2.467	2.367	2.168	1.559
Ubi Kayu	152	152	67	58	85
Ubi Jalar	247	99	162	141	180

Sumber: Kabupaten Lombok Tengah dalam Data 2024

Tabel 2.7 Perkembangan Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak/Unggas	Populasi (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	179.189	183.656	173.303	177.071	144.075
2	Kerbau	21.772	22.728	18.128	14.955	5.368
3	Kuda	1.567	1.142	340	575	215
4	Kambing	110.202	114.324	116.468	91.603	65.682
5	Domba	438	325	153	136	1.508
6	Babi	1.768	2.199	157	1.014	691

No	Jenis Ternak/Unggas	Populasi (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
7	Ayam Buras	2.273.969	3.693.440	3.894.376	3.494.825	556.954
8	Ayam Ras Pedaging (Broiler)	3.195.190	3.387.000	3.534.000	5.589.578	2.457.461
9	Ayam Ras Petelur	352.560	371.350	334.163	636.871	475.864
10	Itik	283.950	313.525	331.103	215.630	163.742

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024

c. Potensi Perikanan (*marine*)

Lombok Tengah memiliki luas daratan 1.168,13 km² dan luas perairan laut sebesar ± 975 km² dengan panjang garis pantai 99,69 km merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi pengembangan kelautan dan perikanan yang cukup besar baik itu potensi penangkapan ikan maupun potensi perikanan budidaya.

d. Penangkapan Ikan

Aktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh aktivitas penangkapan ikan di laut. Meski demikian terdapat juga aktivitas penangkapan ikan di perairan umum yang terdapat di bendungan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Bendungan Batujai dan Bendungan Pengga. Pada umumnya kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan tradisional dengan kapal perikanan berupa perahu tanpa motor, dengan motor tempel, dengan kapal motor ukuran 0-5 GT, Kapal Motor 5-10 GT, dan Kapal Motor ≥10 GT.

Potensi wilayah perairan laut untuk usaha penangkapan ikan di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar dengan luas areal penangkapan sebesar 11.937 km² dan potensi lestari (*Maximum Sustainable Yield; MSY*) sumber daya ikan sebesar 40.623 ton/tahun. Sumber daya ikan yang terkandung didalamnya terdiri dari jenis-jenis ikan permukaan (*pelagis*) dan ikan dasar (*demersal*). Selain itu terdapat pula jenis-jenis ikan karang, *crustacea* (udang, lobster) dan *mollusca* (cumi-cumi dan gurita).

Berdasarkan data produksi ikan di Kabupaten Lombok Tengah, komposisi hasil penangkapan ikan di laut didominasi oleh jenis palagis besar yaitu tuna, tongkol, cakalang, dan lemadang. Palagis kecil yaitu lemuru, layang dan selar dan untuk ikan dasar (*demersal*) didominasi oleh ikan kuwe, kakap, kurisi dan untuk jenis ikan karang didominasi oleh jenis ikan baronang dan jenis kerapu.

Perairan Lombok Tengah berada di sebelah selatan termasuk ke dalam perairan laut Samudera Hindia. Luas area penangkapan ikan laut di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 11.937 Km² dengan potensi lestari (MSY) sumber daya ikan sekitar 40.605 ton/tahun. Sumber daya ikan yang terkandung di dalamnya terdiri dari jenis-jenis ikan dasar (*demersal*) dan jenis-jenis ikan permukaan (*pelagis*). Selain itu, terdapat pula jenis-jenis ikan karang, udang, lobster, dan cumi-cumi. Berdasarkan data produksi ikan di Kabupaten Lombok Tengah, komposisi hasil penangkapan ikan didominasi oleh ikan lemuru, tongkol, layang, cakalang, lemadang, dan tuna sebagai kelompok ikan permukaan (*pelagis*) dan untuk ikan dasar (*demersal*) didominasi oleh ikan baronang, kerapu, kurisi, dan Kakap Merah.

Tabel 2.8 Luas Areal dan Potensi Lestari Sumberdaya Perikanan Tangkap di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

Perairan	Luas Areal (Km ²)	Potensi Lestari		
		(ton/th)		
		Pelagis	Demersal	Total
Lombok Tengah 4 mil	975	4.051	4.503	8.554
a. Perairan pantai	670	1.367	1.487	2.854
b. Perairan lepas pantai	617	1.259	1.370	2.629
c. ZEEI	675	12.720	13.866	26.568
JUMLAH	2.937	19.397	21.226	40.605

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2024

Untuk daerah penangkapan Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP 573 (Laut Selatan/Samudera Hindia) dan WPP 713 (Laut Utara), untuk Lombok Tengah sendiri aktivitas penangkapan ikan dominan dilakukan di WPP 573.

Tabel 2.9 Produksi dan Nilai Produksi Penangkapan Ikan di Laut Menurut Jenis Ikan Tahun 2025

No	Ikan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
1	Alu-alu Besar; Barakuda Besar (Sphyrna barracuda)	6,6	147.122,00
2	Baronang (Siganus canaliculatus)	25,2	537.333,00
4	Belanak (Mugil cephalus)	51,8	1.665.042,00
6	Cakalang (Katsuwonus pelamis)	1013,222	13.778.651,00
7	Cendro (Lestrolepis japonica)	9,8	226.100,00
9	Cumi-cumi (Loligo chinensis)	90,242	4.970.965,00
10	Ekor Kuning (Paracaesio brevidentata)	1,4	49.000,00
11	Gurita (Octopus aegina)	23,4	1.023.750,00
12	Julung-julung (Hemiramphus far)	25,1	379.750,00
13	Kakap Merah (Lutjanus bitaeniatus)	60,1	2.198.083,00
14	Kakap Putih Japanese - Lateolabrax Japonicus	49	1.346.542,00
16	Kembung (Rastrelliger faughni)	102,75	1.730.235,00
18	Kerapu Karang (Chephalopholis boenack)	63,9	1.690.825,00
19	Kerapu Sunu (Plectropomus areolatus)	2,5	87.500,00
20	Kerong-kerong (Terapon jarbua)	7,9	158.000,00
21	Kuniran; Biji Nangka (Upeneus sulphureus)	1,8	63.000,00
22	Kurisi (Pentapodus setosus)	42,1	1.483.417,00
24	Kuro; Senangin (Polydactylus microstomus)	4,4	152.600,00
25	Kuwe - Carangoides Armatus	55,1	1.621.767,00
28	Layang Biru (Decapterus macarellus)	1002,015	13.830.831,00
29	Layaran (Istiophorus platypterus)	0,2	4.800,00
30	Layur (Trichiurus lepturus)	212,3	5.378.400,00
31	Lemadang (Coryphaena hippurus)	16,938	369.792,00
33	Lemuru (Sardinella lemuru)	434,821	4.701.537,00
34	Lencam (Lethrinus amboinensis)	10,6	305.167,00
35	Lolosi Biru - Caesio Caerulaurea	0,1	4.000,00
37	Marlin Hitam (Istiompax indica)	18,958	519.776,00

No	Ikan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
38	Pari Kembang (<i>Neotrygon kuhlii</i>)	1,1	34.900,00
39	Peperek - <i>Leiognathus</i> Spp	28,8	596.875,00
40	Pinjalo (<i>Pinjalo lewisi</i>)	0,9	35.000,00
41	Rajungan (<i>Portunus pelagicus</i>)	52,6	2.241.967,00
42	Selar Bentong (<i>Selar crumenophthalmus</i>)	8,2	91.577,00
43	Selar Hijau (<i>Atule mate</i>)	5,7	153.900,00
44	Sotong (<i>Pharaoh cuttlefish</i>)	7,4	377.500,00
45	Talang Talang - <i>Scomberoides Tala</i>	28,5	889.400,00
47	Tembang (<i>Sardinella gibbosa</i>)	109,5	1.848.510,00
48	Tenggiri (<i>Scomberomorus commerson</i>)	8,3	299.000,00
49	Teri - <i>Stolephorus Indicus</i>	129,2	3.534.899,00
50	Tongkol (<i>Auxis thazard</i>)	932,188	10.898.279,00
51	Tongkol Abu-abu (<i>Thunnus tonggol</i>)	0,4	7.600,00
52	Tongkol Banyar (<i>Euthynnus lineatus</i>)	5,2	82.942,00
54	Tuna Mata Besar (<i>Thunnus obesus</i>)	7,54	113.858,00
55	Tuna Sirip Kuning; Madidihang (<i>Thunnus albacares</i>)	319,13	5.746.414,00
56	Udang Putih; Udang Api-api (<i>Metapenaeus eboracensis</i>)	39	3.730.000,00
57	Sunglir - <i>Elagatis Bipinnulata</i>	4,3	123.700,00
58	Tongkol Komo - <i>Euthynnus Affinis</i>	0,4	6.000,00
59	Kenyar - <i>Sarda Orientalis</i>	1,3	26.000,00
60	Albakora - <i>Thunnus Alalunga</i>	1,408	28.160,00
61	Lobster Bambu - <i>Panulirus Versicolor</i>	0,2	60.000,00
Total		5.023,51	89.350.466,00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah 2025

Produksi Perikanan Tangkap untuk Perairan Laut di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 mencapai 5.023.51 ton dengan nilai produksi senilai Rp89.350.466,00.

Kegiatan penangkapan ikan untuk perairan laut lokasinya pada empat kecamatan pesisir yakni Kecamatan Praya Timur, Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya. Kegiatan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Lombok Tengah seluruhnya dilakukan oleh nelayan dengan jumlah nelayan sebanyak 8.101 orang, jumlah alat penangkap ikan yang digunakan pada Tahun 2025 sebanyak 908 unit dengan jumlah armada penangkapan ikan sebanyak 908 unit serta jumlah kelompok sebanyak 169 KUB. Hingga Tahun 2025 belum ada perusahaan penangkapan ikan yang berinvestasi di Kabupaten Lombok Tengah.

Potensi perairan Kabupaten Lombok Tengah belum dimanfaatkan secara optimal dimana masih terkonsentrasi pada penangkapan di wilayah perairan pantai, sedangkan perairan lepas pantai dan perairan ZEEI belum dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan armada penangkapan ikan dan alat penangkap ikan masih tergolong skala kecil, sehingga jumlah produksi yang diperoleh tidak optimal. Dengan demikian, peningkatan produksi bergantung pada peningkatan penerapan teknologi dan peningkatan sarana penangkapan ikan yang tentunya berimplikasi pada nilai investasi yang cukup besar.

1) Penangkapan Ikan di Perairan Umum

Selain penangkapan ikan di laut, Kabupaten Lombok Tengah juga memiliki potensi penangkapan di perairan umum yang tersebar pada 12 kecamatan, terkonsentrasi di Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, dan Praya Barat Daya. Areal penangkapan meliputi Bendungan Batujai dengan luas genangan 890 ha, Bendungan Pengga luas genangan 1700 ha, embung-embung dan perairan umum lainnya. Jumlah Produksi penangkapan di perairan umum pada Tahun 2025 sebesar 591,9 ton dengan nilai produksi senilai Rp12.928.117,00. Jenis ikan tangkapan seperti gabus, nila, tawes, dan udang danau.

Jumlah nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan umum sebanyak 1.178 orang, jumlah alat penangkap ikan yang digunakan pada Tahun 2025 sebanyak 903 unit dengan jumlah armada penangkapan ikan sebanyak 669 unit.

**Tabel 2.10 Produksi dan Nilai Produksi Ikan Perairan Umum
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024**

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai (Rp. 000)
1	Gabus (<i>Channa striata</i>)	5,8	145.000,00
2	Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)	452	9.946.609,00
3	Tawes (<i>Barbodes gonionotus</i>)	37,5	385.650,00
4	Udang Danau (<i>Palaemon paucidens</i>)	96,6	2.450.858,00
JUMLAH		591,9	12.928.117,00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah 2025

**Tabel 2.11 Jumlah Alat Tangkap yang Digunakan Disetiap Armada
Penangkapan Ikan di Perairan Umum - Kabupaten Lombok Tengah Tahun
2025**

No	Armada Kapal	Jumlah Alat Tangkap	Jumlah R.T.P.
1	Tanpa perahu	218	218
2	Perahu		
	· Jukung	203	203
	· Kecil	473	473
	· Sedang		
	· Besar		
3	Motor tempel	14	14
4	Kapal motor		
	· 0 – 5 GT		
	· 5 – 10 GT		
	· ≥ 10 GT		
Jumlah		908	908

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah 2025

2) Perikanan Budi daya

Potensi perikanan budi daya di Kabupaten Lombok Tengah meliputi budidaya laut, budi daya air payau dan budi daya air tawar. Produksi perikanan budidaya Tahun 2025 mencapai 43.816,38 ton dengan nilai senilai Rp405.136.052.850,00. Komoditi yang dikembangkan antara lain rumput laut, udang vanamei, dan beberapa jenis ikan air tawar. Dibandingkan dengan Tahun 2024, terjadi peningkatan produksi sebesar 3,29 %.

e. Potensi Pertambangan (*Mining*)

Potensi pertambangan dan penggalian di Kabupaten Lombok Tengah sampai saat ini memang belum memperlihatkan hasil yang optimal. Hal ini karena beberapa jenis potensi yang ada yang sesungguhnya memiliki nilai ekonomis tinggi masih dalam proses eksplorasi. Pencarian potensi-potensi pertambangan dan penggalian lainnya tentu saja menjadi tugas berat dan menuntut kejelian serta kegesitan aparat yang berkecimpung disektor pertambangan.

Potensi yang ada yang sudah tergarap dan ikut memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah adalah potensi bahan galian golongan C, seperti batu bangunan, batu apung, pasir sirtu, tras, tanah urug, batu gamping/batu kapur, posfat, zeolit, oker, gypsun, kalsedon, tufa/batu paras, lempung ilit, kaolin, batu silika, dan bentonit. Beberapa di antaranya bahkan tersedia secara hampir merata diseluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah.

Potensi-potensi yang sudah eksis, khususnya bahan galian golongan C kedepan perlu mendapat perhatian serius dalam hal pengelolaannya, karena pengelolaan yang salah dapat berakibat fatal bagi sektor lainnya, termasuk sektor lingkungan hidup. Perlu dilakukan berbagai upaya koodinasi lintas sektor dalam pengelolaan bahan galian golongan C tersebut, termasuk di dalamnya menyangkut amdal dan sejenisnya. Potensi pertambangan dan penggalian di Kabupaten Lombok Tengah sampai saat ini memang belum memperlihatkan hasil yang optimal. Hal ini karena beberapa jenis potensi yang ada yang sesungguhnya memiliki nilai ekonomis tinggi masih dalam proses eksplorasi. Pencarian potensi-potensi pertambangan dan penggalian lainnya tentu saja menjadi tugas berat dan menuntut kejelian serta kegesitan aparat yang berkecimpung disektor pertambangan.

Potensi pertambangan mineral logam di Kabupaten Lombok Tengah tersebar di Kecamatan Praya Barat Daya yang meliputi Desa Pelambik, Desa Serage, sebagian Desa Darek, sebagian kecil desa Montong sapah, Desa Batu Jangkikh, Desa Kabul, desa Pandan Indah, Desa Ranggagata, Desa Ungga serta Kecamatan Pujut yang meliputi: Desa Rembitan, Desa Kuta, Desa Sukadana, Mertak, Pengengat, Truwai dan di Kecamatan Pujut yang terdiri dari Desa Rembitan, Desa Kuta, Desa Sukadana, Desa Mertak, Desa Pengengat, dan Desa Teruwai.

Pertambangan mineral bukan logam serta batuan tersebar di Kecamatan Praya Barat (Desa Selong Belanak), Kecamatan Pujut (Desa Rembitan, Desa Teruwai, Desa Sukadana), Kecamatan Praya Timur (Desa Bilelando, Desa Mujur), Kecamatan Praya Barat Daya (Desa Pandang Indah, Desa Pelambik), Kecamatan Batukliang Utara (Desa Karang Sidemen, Desa Lantan), Kecamatan Pringgarata (Desa Pemepek), dan Kecamatan Kopang (Desa Wajageseng).

Potensi bahan galian tambang yang sudah dieksplotasi dan ikut memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah adalah potensi bahan galian batuan, seperti batu bangunan, batu apung, pasir sirtu, tras, tanah urug, zeolit, oker, kalsedon, tufa/batu paras, lempung ilit, kaolin, batu silika, dan bentonit. Beberapa di antaranya bahkan tersebar hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lombok Tengah, untuk Tahun 2013 terdapat 5 (lima) perusahaan yang

memprakarsai usaha pertambangan bahan galian batuan berupa sirtu, silika, batu andesit dan batu bangunan dengan areal seluas 0,630 ha.

f. Potensi Pariwisata (*tourism*)

Sektor pariwisata (*tourism*) merupakan salah satu sektor utama pembangunan Kabupaten Lombok Tengah, selain pertanian, dan perikanan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk mengembangkan sektor pariwisata yang memiliki *multiplier effect* yang sekaligus akan mampu mendorong perekonomian daerah menjadi makin tinggi.

Obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, terutama obyek wisata bahari menjadi andalan utama dalam pengembangan pariwisata, terlebih lagi dengan telah ditetapkannya kawasan Mandalaika Kuta Kecamatan Pujut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak Tahun 2014.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pariwisata adalah meningkatnya angka kunjungan wisatawan, baik domestik/nusantara maupun mancanegara/asing. Oleh sebab itu dampak dari bertambahnya kunjungan wisatawan ini akan menguntungkan bagi daerah untuk meraup keuntungan finansial.

Telah diketahui bahwa obyek dan daya tarik wisata (ODTW) Kabupaten Lombok Tengah yang beraneka ragam mulai dari ODTW alam seperti air terjun, ODTW Budaya seperti seni musik, teater, bau nyale, kerajinan songket, dan adat tradisional hingga ODTW religi seperti kemalik makam nyatoq, makam ketak, dan lain-lain merupakan khasanah yang mengundang keingintahuan masyarakat luar untuk mengunjungi daerah Lombok Tengah.

Segala potensi yang bervariasi dan memiliki keunikan tersendiri ini tentu menjadi modal yang berharga dalam menunjang percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 12 berikut ini menjadi gambaran potensi ODTW yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2.12 Nama Obyek dan Daya Tarik Tujuan Wisata di Kabupaten Lombok Tengah

NO	NAMA ODTW	LOKASI
I	Wisata Bahari	
1	Pantai Awang	Pujut
2	Pantai Bumbang	Pujut
3	Pantai Aan	Pujut
4	Pantai Gerupuk	Pujut
5	Pantai Serenting	Pujut
6	Pantai Dondon	Pujut
7	Pantai Kuta	Pujut
8	Pantai Mawun	Pujut
9	TWA Gunung Tunak	Pujut
10	TWA Tanjung Tampa	Pujut
11	Pantai Are Guling	Praya Barat
12	Pantai Tampah	Praya Barat
13	Pantai Rowok	Praya Barat
14	Pantai Mawi	Praya Barat
15	Pantai Selong Belanak	Praya Barat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA ODTW	LOKASI
16	Pantai Tomang-Omang	Praya Barat
17	Pantai Serangan	Praya Barat
18	Pantai Torok Aiq Berik	Praya Barat
19	Pantai Pengantap	Praya Barat
II	Wisata Alam	
1	Pemandian alam Aik Bukak	Batukliang Utara
2	Air Terjun Benang Setokel	Batukliang Utara
3	Air Terjun Benang Kelambu	Batukliang Utara
4	Tracking Gunung Rinjani	Batukliang Utara
5	Bukit Jabon	Praya Barat
6	Sekedeq	Batukliang Utara
7	Air Terjun Nyeredep	Kopang
8	Bual	Kopang
9	TWA Gunung Bumbang	Pujut
III	Wisata Adat	
1	Dusun Tradisional Sade	Pujut
2	Dusun Tradisional 'Nde	Pujut
IV	Wisata Religi dan Sejarah	
1	Goa Gerupuk	Pujut
2	Goa Bangkang	Pujut
3	Dusun Tansang-Ansang	Pujut
4	Makam Betara Guru	Pujut
5	Makam Nyatoq	Pujut
6	Masjid Kuno Rembitan	Pujut
7	Masjid Kuno Gunung Pujut	Pujut
8	Situs Batu Rijang	Praya Barat
9	Makam Ketapak	Praya Barat
10	Makam Sempiak	Praya Barat
11	Gunung Mareje	Praya Barat Daya
12	Makam Seriwe	Praya Tengah
13	Makam Ketaq	Kopang
14	Makam Kuno Sumbek	Kopang
15	Makam Embung Puntik	Praya Timur
16	Makam Prabu Sridane	Jonggat
V	Wisata Seni dan Kerajinan	
1	Tenun Songket Desa Sukarara	Jonggat
2	Gerabah Desa Penujak	Praya Barat
3	Anyaman Bambu Loang Make	Janapria
4	Ukiran Kayu dan Tulang Pendem	Janapria
5	Anyaman Ketak Beleka	Janapria
6	Kerajinan Perak Ungga	Praya Barat Daya
7	Anyaman Pandan Labulia	Jonggat
VI	Wisata Tirta/Air	
1	Bendungan Batujai	Praya Barat
2	Bendungan Pengga	Praya Barat Daya

Sumber: Selayang Pandang Kab. Lombok Tengah 2024, Bag.Humas & Protokol

B. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

1. Organisasi Perangkat Daerah

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang merupakan entitas

akuntansi sehingga wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun serta menyampaikan laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari 48 entitas akuntansi. Dengan demikian produk yang dihasilkan oleh entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasian yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah merupakan unit yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut OPD Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.;
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Dinas Sosial;
 - 6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 8) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 12) Dinas Perhubungan;
 - 13) Dinas Komunikasi, dan Informatika;
 - 14) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
 - 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 16) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 18) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 19) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 20) Dinas Pertanian;
 - 21) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 22) Dinas Pemadam kebakaran; dan

23) Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Badan terdiri dari:

- 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
- 2) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
- 4) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Kecamatan, terdiri dari:

- 1) Kecamatan Praya;
- 2) Kecamatan Praya Tengah;
- 3) Kecamatan Praya Barat;
- 4) Kecamatan Praya Barat Daya;
- 5) Kecamatan Praya Timur;
- 6) Kecamatan Pujut;
- 7) Kecamatan Janapria;
- 8) Kecamatan Kopang;
- 9) Kecamatan Batukliang;
- 10) Kecamatan Batukliang Utara;
- 11) Kecamatan Pringgarata; dan
- 12) Kecamatan Jonggat.

g. UPT dinas daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT).

2. Aparatur Sipil Negara

Sampai dengan Desember Tahun 2025, PNS dan P3K Daerah Kabupaten Lombok Tengah sejumlah 11.845 orang dengan jumlah CPNS 5 orang, PNS 6631 orang dan P3K 5209 orang dari jumlah tersebut laki-laki PNS 3454 orang, Perempuan PNS 3182 orang sedangkan P3K laki-laki 2230 orang dan perempuan sejumlah 2979 orang.

Menurut golongan, mayoritas PNS dan P3K di Kabupaten Lombok Tengah adalah PNS Golongan III sebanyak 4201 orang, kemudian Golongan IV sebanyak 1809 orang, Golongan II sebanyak 612 orang dan Golongan I sebanyak 28 orang dan P3K Golongan V sebanyak 607 orang, golongan VII sebanyak 612 orang, golongan IX sebanyak 3754 orang, golongan X sebanyak 222 orang.

Sedangkan menurut tingkat pendidikan, PNS dan P3K Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh PNS dengan tingkat pendidikan D-IV/S-1 sebanyak 8487 orang, SLTA sebanyak 1338 orang, Diploma I-III sebanyak 1262 orang, Strata II dan III sebanyak 375 orang, SLTP ke bawah sebanyak 83 orang. Adapun rincian PNS berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.13 Jumlah PNS di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Golongan
Tahun 2025**

No.	Golongan	PNS	P3K	Jumlah
1.	I	14	14	28
2.	II	612	0	612
3.	III	4201	0	4201
4.	IV	1809	0	1809
5.	V	0	607	607
6.	VII	0	612	612
7.	IX	0	3754	3754
8.	X	0	222	222
Jumlah		6636	5209	11845

Sumber: BKPSDM Kab. Lombok Tengah, 2025

**Tabel 2.14 Jumlah PNS di Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025**

No.	Tingkat Pendidikan	PNS dan P3K
1.	Strata II-III	675
2.	D-IV/S-1	8487
3.	Diploma I-III	1262
4.	SLTA	1338
5.	SLTP/SD	83
Jumlah		11845

Sumber: BKPSDM Kab. Lombok Tengah, 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB III
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN
KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemda Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, yaitu (minimal):

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 10,68%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,78%;
3. *Gini Ratio* sebesar 0,38 %;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,19 (Tahun 2024);
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,77%; dan
6. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp22,60 triliun Rupiah.

Penjelasan lebih lanjut indikator sosial ekonomi yang menjadi acuan meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, gini ratio, indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebagai berikut.

1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai Rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	12,07	10,68	(1,39)
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	122,32	109,25	(13,07)
3	Provinsi (%)	13,6	11,78	(1,82)
4	Nasional (%)	8,57	8,25	(0,32)
5	Peringkat Provinsi	12	9	3
6	Peringkat Nasional	12	12	0

Sumber dokumen: <https://www.bps.go.id>

Persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2025 sebesar 10,68% mengalami penurunan sebesar 1,39% dibandingkan Tahun 2024 dan diharapkan pada tahun tahun selanjutnya akan terus menurun. Persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah di bawah provinsi dan di atas nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 3.2 Tingkat Kedalam Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	1,56	1,51	(0,05)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	2,38	2,44	0,06
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,75	1,47	(0,28)
4.	Peringkat Provinsi	2	3	1
5	Peringkat Nasional	366	308	(58)

Sumber dokumen: <https://www.bps.go.id>

Tabel 3.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,27	0,31	0,04
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,59	0,61	0,02
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,35	(0,03)
4.	Peringkat Provinsi	1	3	2
5	Peringkat Nasional	364	260	(104)

Sumber dokumen: <https://www.bps.go.id>

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang

sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 adalah sebesar 3,06%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lombok Tengah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,3	3,06	(0,24)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	2,73	3,06	0,33
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	4,91	4,85	(0,06)

Sumber dokumen: <https://www.bps.go.id>

TPT di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,06%, sedangkan TPT pada Tahun 2024 adalah sebesar 3,3%. Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan angka TPT jika dibandingkan dengan angka TPT pada tahun sebelumnya sebesar 0,24%.

3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, di mana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 adalah sebesar 0,38 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Gini Ratio Kabupaten Lombok Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2025
1	Tingkat Kab/Kota	0,380
2	Tingkat Provinsi	0,369
3	Tingkat Nasional	0,375

Sumber dokumen: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent*

standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 adalah sebesar 71,19 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	71,19	71,19	0
2	Provinsi	73,1	73,97	0,87
3	Indonesia/Nasional	75,02	75,90	0,88
4	Peringkat Provinsi	8	8	0
5	Peringkat Nasional	382	382	0

Sumber dokumen: <https://www.bps.go.id> 2025

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Lombok Tengah di Tahun 2024 adalah sebesar 71,19 poin, ada kenaikan sebesar 0,78 dari Tahun 2023. Naik nya IPM tersebut disebabkan oleh meningkat nya pembangunan disektor pariwisata, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mampu memberikan daya dorong kuat dalam hal peningkatan IPM, IPM Kabupaten Lombok Tengah pada saat ini berada pada urutan 8 dari 10 Kab/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berada pada urutan 382 untuk peringkat nasional (Indonesia).

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 3.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Juta Rp)	11.57 triliun	21,25 triliun	22,6 triliun	46,97 triliun	22.130,0 triliun

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2023
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,07	5,77	3,34	5,7	5,03
3	Peringkat Provinsi	8	8	8	8	8
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	449	449	449	449	449

Sumber dokumen: <https://www.bps.go.id>

Selama kurun waktu Tahun 2024 Peningkatan sektor transportasi di kabupaten Lombok Tengah mengalami perkembangan signifikan didorong oleh meningkatnya sektor pariwisata dan jumlah kendaraan yang terdaftar.

6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Karena Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah tidak menghitung inflasi, maka didekati dengan inflasi Kota Mataram. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tingkat Inflasi Kota Mataram Tahun 2025 adalah sebesar 3,21% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Tingkat Inflasi Kota Mataram

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	3,04	2,47	3,21
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,66	1,91	3,01
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	1,57	2,92

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tingkat inflasi di Kota Mataram Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,04%, tingkat inflasi pada Tahun 2024 adalah sebesar 2,47% dan tingkat inflasi Tahun 2025 sebesar 3,21%. Inflasi Kota Mataram pada Tahun 2025 yang sebesar 3,21%

masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebesar 3,01%.

7. Struktur Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah

Struktur perekonomian Kabupaten Lombok Tengah dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 PDRB Seri 2024 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dalam Milyar Rupiah

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	4.823,81	5.326,81	5.653,75
2	Pertambangan dan Penggalian	896,29	980,00	1.023,50
3	Industri Pengolahan	886,45	955,44	1.048,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,61	16,51	17,98
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,36	22,27	22,52
6	Konstruksi	3.119,69	3.456,90	3.555,86
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.356,10	2.636,39	2.861,55
8	Transportasi dan Pergudangan	2.230,95	2.635,61	2.849,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	241,44	269,34	302,94
10	Informasi dan Komunikasi	321,98	346,26	363,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	540,44	574,44	608,40
12	Real Estate	745,96	788,67	830,13
13	Jasa Perusahaan	29,10	32,58	34,96
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.136,31	1.179,14	1.260,50
15	Jasa Pendidikan	945,67	1.021,49	1.086,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	488,98	525,78	565,19
17	Jasa lainnya	443,19	482,03	521,23
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		19.243,33	21.250,62	22.604,87

Sumber dokumen: <https://www.bps.go.id>

B. Kebijakan Keuangan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2011-2031 Kabupaten Lombok Tengah, yang memasuki tahap ke-2. Arah Kebijakan Keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah guna mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Oleh karenanya penyusunan APBD harus pula memperhatikan peran dan fungsi APBD sebagai instrumen otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Secara umum kebijakan pengembangan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan

sektor publik, sehingga alokasi anggaran pada Program dan kegiatan SKPD diarahkan agar lebih realistis, terukur serta akuntabel.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

Karena pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat, maka penerimaan daerah yang dapat dipacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah guna melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tuntutan peningkatan PAD semakin besar. Strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai berikut.

- 1) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya;
- 3) Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak dan retribusi;
- 4) Meminimalkan kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan;
- 5) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak PBB yang merupakan komponen pendapat daerah yang mulai tahun ini merupakan kewenangan daerah;
- 6) Mencari obyek bagi sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan. Dalam pemungutan obyek baru tersebut diupayakan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional; dan
- 7) Menumbuhkembangkan iklim yang sehat di BUMD sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan bagi hasil pendapatan (*revenue sharing policy*). Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Terhadap dana perimbangan ini maka strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan adalah dengan melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

Berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional, penerimaan pendapatan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Tahun Anggaran 2025 ini mengalami kenaikan dibandingkan pada Tahun Anggaran 2024 dikarenakan adanya Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada salinan V, salinan Perpres Nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Transfer ke Daerah.

Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 secara total mengalami penurunan dibanding DAK Tahun 2024, DAK Fisik turun signifikan namun DAK Nonfisik naik (Kebijakan penyesuaian rincian Transfer ke Daerah (TKD) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Strategi, arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

2. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan, target pendapatan TA 2025 dalam RKPD 2025, realisasi penerimaan pendapatan TA 2024 dan target penerimaan pendapatan TA 2025 maka penerimaan Pendapatan Daerah pada TA 2025 direncanakan sebesar Rp2.825.991.771.625,49. Rencana upaya yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan tersebut adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan di Tahun 2025 adalah senilai Rp504.607.362.379,49. Upaya pemerintah daerah dalam upaya pencapaian target tersebut ditempuh melalui:

- 1) Melakukan penataan sistem dan prosedur pemungutan Pendapatan Asli Daerah, termasuk di dalamnya melakukan penyesuaian kerangka regulasi.
- 2) Meningkatkan intensitas monitoring, evaluasi, dan pengendalian pemungutan PAD;
- 3) Meningkatkan intensitas uji petik obyek PAD;
- 4) Menambah tenaga juru pungut PBB-P2; dan
- 5) Melakukan penilaian kembali Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 potensial.

b. Pendapatan Transfer

Upaya dalam rangka pencapaian target dana perimbangan meliputi:

- 1) Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan kementerian teknis dan pemerintah provinsi terkait dengan pembagian atas alokasi dana Bagi Hasil Bukan Pajak seperti Bagi Hasil Pertambangan Umum (*royalty*), *landrent* dan bagi hasil perikanan.
- 2) Meningkatkan peran pengendalian dan monev atas proses waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar penyaluran dananya dapat tepat waktu.

Target pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 senilai Rp2.294.757.887.953,00 meliputi:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

- (1) Dana Perimbangan senilai Rp0,00;
- (2) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp179.123.616.000,00;
- (3) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.334.314.435.000,00; dan
- (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp482.778.431.000,00.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

- (1) Dana Desa Rp176.357.457.000,00; dan
- (2) Insentif fiskal Rp7.888.237.000,00.

c) Pendapatan Transfer Antar Daerah

- (1) Dana Bagi Hasil Rp114.141.711.953,00; dan
- (2) Bantuan Keuangan senilai Rp154.000.000,00.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Upaya pencapaian realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi:

- 1) Menyusun *database* potensi daerah yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dengan domisili di Kabupaten Lombok Tengah untuk menetapkan bagian daerah sebagai hasil PKB, BBNKB dan PBBKB;
- 2) Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (KPPRD) untuk melakukan *sweeping* atas kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan; dan
- 3) Melakukan inventarisasi ijin pemakaian air bawah tanah dan atas permukaan sebagai dasar alokasi Bagi Hasil Pajak Pemakaian Air Bawah Tanah dan Atas

Permukaan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 yang telah ditetapkan senilai Rp26.626.521.293,00 meliputi:

- a) Pendapatan Hibah senilai Rp302.000.000,00; dan
- b) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp26.324.521.293,00.

3. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan besaran Belanja Daerah senilai Rp2.925.202.177.429,25 yang terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp2.175.322.200.460,91, Belanja Modal senilai Rp361.992.972.794,03, Belanja Tidak Terduga senilai Rp19.556.796.096,12, dan Belanja Transfer senilai Rp368.330.208.078,19.

Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian target tahun kelima RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2025 dan mendukung pencapaian target-target yang belum tercapai pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2021.

Pembangunan Tahun 2025 difokuskan pada pencapaian target tahun pertama RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2025. Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- a. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
- b. Pengembangan dan peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- c. Penguatan struktur ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam disektor pariwisata;
- d. Asuransi Pertanian; dan
- e. Peningkatan nilai tambah produk unggulan.

Untuk mendukung pencapaian fokus pembangunan diatas, arah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun 2025 adalah:

- a. Pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat;
- b. Mengalokasikan belanja daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi NTB dalam kerangka otonomi daerah Negara kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah;
- d. Menitikberatkan alokasi Belanja Daerah pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah; dan
- e. Mengalokasikan belanja pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan UU Nomor 62 Tahun 2024.

4. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan masing-masing jenis belanja pada Belanja Operasi dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Operasi

Penyediaan belanja pegawai diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNSD, pembayaran gaji kepala daerah, dan penghasilan DPRD, yang dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2025 dengan tetap menyediakan akres fluktuatif dengan besaran di kisaran 1% (satu persen) dalam rangka mengantisipasi adanya kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penerimaan CPNSD dan P3K. Untuk Tahun 2025 ini Belanja Pegawai pada Belanja Operasi dianggarkan senilai Rp1.308.876.185.400,60, dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan senilai Rp793.214.912.805,31

b. Belanja Bunga

Kebijakan penganggaran belanja bunga di APBD TA 2025 dianggarkan senilai Rp9.817.569.753,00 yang diarahkan untuk pembayaran bunga atas pinjaman kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang sekarang telah beralih ke PT SMI dan pembayaran bunga atas pinjaman Rumah Sakit Umum Daerah kepada Bank Syariah Indonesia (BSI).

c. Hibah

Kebijakan belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Penetapan besaran hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, untuk Tahun 2025 ini dialokasikan senilai Rp62.657.532.502,00. Sedangkan belanja bantuan Partai Politik pada Tahun 2025 ini dialokasikan senilai Rp1.002.532.502,00.

d. Bantuan Sosial

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Mekanisme penganggaran bantuan sosial ditempuh melalui proses evaluasi oleh SKPD untuk selanjutnya mendapat rekomendasi Kepala Daerah melalui TAPD. Pada Tahun 2025 pemerintah daerah menganggarkan bantuan sosial senilai Rp756.000.000,00.

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa sebesar sepuluh perseratus

dari penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi daerah sehingga pada Tahun 2025 dialokasikan Belanja Bagi Hasil kepada pemerintah desa senilai Rp34.913.665.518,19 yang dialokasikan untuk 154 desa/kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan rincian untuk Bagi Hasil Pajak adalah Rp32.352.050.223,29,00 sedangkan Bagi Hasil Retribusi kepada pemerintah desa senilai Rp2.561.615.294,90,00.

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD tersebut merupakan Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah yang dialokasikan sebesar sepuluh perseratus setelah dikurangi dana alokasi khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut Tahun 2024, Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa di anggarkan sebesar Rp333.416.542.560,00. Sedangkan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa dianggarkan sebesar Rp11.244.076.000,00.

g. Belanja Tak Terduga

Penyediaan anggaran belanja tidak terduga senilai Rp19.556.796.096,12 yang diperuntukan bagi:

- 1) kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
- 2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- 3) Keadaan darurat bencana;
- 4) Keperluan mendesak;
- 5) Bencana sosial; dan/atau
- 6) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja operasi dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja operasi dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut diatas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Sedangkan jumlah belanja yang dialokasikan pada masing-masing SKPD pada Tahun Anggaran 2025 dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.10 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Nilai Plafon Anggaran
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	980.752.770.832,17
1.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	980.752.770.832,17
1.01	BELANJA DAERAH	980.752.770.832,17
1.01	BELANJA OPERASI	875.558.828.008,17
1.01	BELANJA MODAL	105.193.942.824,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	649.072.266.644,72
1.02	Dinas Kesehatan	339.640.553.133,92
1.02	BELANJA DAERAH	339.640.553.133,92
1.02	BELANJA OPERASI	285.458.418.258,27
1.02	BELANJA MODAL	54.182.134.875,65
1.02	Puskesmas Teratak	4.152.583.853,00
1.02	BELANJA DAERAH	4.152.583.853,00
1.02	BELANJA OPERASI	3.650.944.301,00
1.02	BELANJA MODAL	501.639.552,00
1.02	Puskesmas Darek	4.022.111.159,00
1.02	BELANJA DAERAH	4.022.111.159,00
1.02	BELANJA OPERASI	3.717.118.109,00
1.02	BELANJA MODAL	304.993.050,00
1.02	Puskesmas Batujai	2.061.548.678,00
1.02	BELANJA DAERAH	2.061.548.678,00
1.02	BELANJA OPERASI	1.881.473.798,00
1.02	BELANJA MODAL	180.074.880,00
1.02	Puskesmas Tanak Beak	2.312.716.741,00
1.02	BELANJA DAERAH	2.312.716.741,00
1.02	BELANJA OPERASI	2.118.281.057,00
1.02	BELANJA MODAL	194.435.684,00
1.02	Puskesmas Wajegeseng	2.300.089.929,00
1.02	BELANJA DAERAH	2.300.089.929,00
1.02	BELANJA OPERASI	2.179.965.186,00
1.02	BELANJA MODAL	120.124.743,00
1.02	Puskesmas Mantang	4.895.126.193,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Nilai Plafon Anggaran
1.02	BELANJA DAERAH	4.895.126.193,00
1.02	BELANJA OPERASI	4.354.281.548,00
1.02	BELANJA MODAL	540.844.645,00
1.02	Puskesmas Praya	7.001.421.377,55
1.02	BELANJA DAERAH	7.001.421.377,55
1.02	BELANJA OPERASI	6.263.471.561,55
1.02	BELANJA MODAL	737.949.816,00
1.02	Puskesmas Mangkung	3.660.603.284,00
1.02	BELANJA DAERAH	3.660.603.284,00
1.02	BELANJA OPERASI	3.474.118.625,00
1.02	BELANJA MODAL	186.484.659,00
1.02	Puskesmas Mujur	3.663.268.786,00
1.02	BELANJA DAERAH	3.663.268.786,00
1.02	BELANJA OPERASI	3.355.504.424,00
1.02	BELANJA MODAL	307.764.362,00
1.02	Puskesmas Pengadang	4.961.339.331,00
1.02	BELANJA DAERAH	4.961.339.331,00
1.02	BELANJA OPERASI	4.097.161.917,00
1.02	BELANJA MODAL	864.177.414,00
1.02	Puskesmas Ubung	4.906.601.129,00
1.02	BELANJA DAERAH	4.906.601.129,00
1.02	BELANJA OPERASI	4.415.537.238,00
1.02	BELANJA MODAL	491.063.891,00
1.02	Puskesmas Bagu	4.479.339.007,00
1.02	BELANJA DAERAH	4.479.339.007,00
1.02	BELANJA OPERASI	4.179.935.619,00
1.02	BELANJA MODAL	299.403.388,00
1.02	Puskesmas Pringgarata	4.175.274.703,00
1.02	BELANJA DAERAH	4.175.274.703,00
1.02	BELANJA OPERASI	3.733.236.666,00
1.02	BELANJA MODAL	442.038.037,00
1.02	Puskesmas Aik Darek	5.385.580.541,65
1.02	BELANJA DAERAH	5.385.580.541,65
1.02	BELANJA OPERASI	4.933.213.428,65
1.02	BELANJA MODAL	452.367.113,00
1.02	Puskesmas Aik Mual	6.144.114.096,56
1.02	BELANJA DAERAH	6.144.114.096,56
1.02	BELANJA OPERASI	4.939.959.932,56
1.02	BELANJA MODAL	1.204.154.164,00
1.02	Puskesmas Sengkol	5.873.335.339,60
1.02	BELANJA DAERAH	5.873.335.339,60
1.02	BELANJA OPERASI	5.214.544.808,60
1.02	BELANJA MODAL	658.790.531,00
1.02	Puskesmas Batu Jangkih	2.248.318.860,00
1.02	BELANJA DAERAH	2.248.318.860,00
1.02	BELANJA OPERASI	2.116.566.160,00
1.02	BELANJA MODAL	131.752.700,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Nilai Plafon Anggaran
1.02	Puskesmas Puyung	4.665.795.824,81
1.02	BELANJA DAERAH	4.665.795.824,81
1.02	BELANJA OPERASI	4.042.877.655,00
1.02	BELANJA MODAL	622.918.169,81
1.02	Puskesmas Penujak	3.316.437.085,00
1.02	BELANJA DAERAH	3.316.437.085,00
1.02	BELANJA OPERASI	3.079.107.256,00
1.02	BELANJA MODAL	237.329.829,00
1.02	Puskesmas Ganti	4.078.589.896,00
1.02	BELANJA DAERAH	4.078.589.896,00
1.02	BELANJA OPERASI	3.516.900.909,00
1.02	BELANJA MODAL	561.688.987,00
1.02	Puskesmas Batunyala	3.986.513.110,00
1.02	BELANJA DAERAH	3.986.513.110,00
1.02	BELANJA OPERASI	3.544.624.335,00
1.02	BELANJA MODAL	441.888.775,00
1.02	Puskesmas Langko	3.916.801.417,80
1.02	BELANJA DAERAH	3.916.801.417,80
1.02	BELANJA OPERASI	3.528.872.862,80
1.02	BELANJA MODAL	387.928.555,00
1.02	Puskesmas Bonjeruk	4.482.833.366,00
1.02	BELANJA DAERAH	4.482.833.366,00
1.02	BELANJA OPERASI	4.078.261.290,00
1.02	BELANJA MODAL	404.572.076,00
1.02	Puskesmas Teruwai	3.267.264.453,00
1.02	BELANJA DAERAH	3.267.264.453,00
1.02	BELANJA OPERASI	2.876.145.049,00
1.02	BELANJA MODAL	391.119.404,00
1.02	Puskesmas Muncan	4.001.594.681,00
1.02	BELANJA DAERAH	4.001.594.681,00
1.02	BELANJA OPERASI	3.782.619.100,00
1.02	BELANJA MODAL	218.975.581,00
1.02	Puskesmas Janapria	5.975.262.027,00
1.02	BELANJA DAERAH	5.975.262.027,00
1.02	BELANJA OPERASI	5.259.375.301,00
1.02	BELANJA MODAL	715.886.726,00
1.02	Puskesmas Kuta	3.464.279.257,00
1.02	BELANJA DAERAH	3.464.279.257,00
1.02	BELANJA OPERASI	3.351.064.972,00
1.02	BELANJA MODAL	113.214.285,00
1.02	Puskesmas Kopang	5.245.268.117,00
1.02	BELANJA DAERAH	5.245.268.117,00
1.02	BELANJA OPERASI	4.413.006.230,00
1.02	BELANJA MODAL	832.261.887,00
1.02	Rumah Sakit Umum Daerah Praya	187.693.025.457,83
1.02	BELANJA DAERAH	187.693.025.457,83
1.02	BELANJA OPERASI	155.779.201.264,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Nilai Plafon Anggaran
1.02	BELANJA MODAL	31.913.824.193,83
1.02	Puskesmas Pelabuhan Awang	463.239.218,00
1.02	BELANJA DAERAH	463.239.218,00
1.02	BELANJA OPERASI	463.239.218,00
1.02	UPTD. Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah (BLUD)	2.631.436.592,00
1.02	BELANJA DAERAH	2.631.436.592,00
1.02	BELANJA OPERASI	2.385.545.156,00
1.02	BELANJA MODAL	245.891.436,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	202.043.182.520,15
1.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	202.043.182.520,15
1.03	BELANJA DAERAH	202.043.182.520,15
1.03	BELANJA OPERASI	92.630.190.973,15
1.03	BELANJA MODAL	109.412.991.547,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	58.361.623.574,95
1.04	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	58.361.623.574,95
1.04	BELANJA DAERAH	58.361.623.574,95
1.04	BELANJA OPERASI	54.507.881.842,95
1.04	BELANJA MODAL	3.853.741.732,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	30.357.945.015,09
1.05	Satuan Polisi Pamong Praja	14.718.669.684,00
1.05	BELANJA DAERAH	14.718.669.684,00
1.05	BELANJA OPERASI	14.511.020.401,00
1.05	BELANJA MODAL	207.649.283,00
1.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.701.654.354,59
1.05	BELANJA DAERAH	5.701.654.354,59
1.05	BELANJA OPERASI	4.642.775.461,59
1.05	BELANJA MODAL	1.058.878.893,00
1.05	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.937.620.976,50
1.05	BELANJA DAERAH	9.937.620.976,50
1.05	BELANJA OPERASI	8.260.056.810,50
1.05	BELANJA MODAL	1.677.564.166,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.876.498.544,49
1.06	Dinas Sosial	7.876.498.544,49
1.06	BELANJA DAERAH	7.876.498.544,49
1.06	BELANJA OPERASI	7.411.972.584,49
1.06	BELANJA MODAL	464.525.960,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	159.030.636.026,40
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	11.125.235.834,12
2.07	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.125.235.834,12
2.07	BELANJA DAERAH	11.125.235.834,12
2.07	BELANJA OPERASI	10.643.468.002,12



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Nilai Plafon Anggaran
2.07	BELANJA MODAL	481.767.832,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.964.476.226,50
2.08	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	4.964.476.226,50
2.08	BELANJA DAERAH	4.964.476.226,50
2.08	BELANJA OPERASI	4.717.914.521,50
2.08	BELANJA MODAL	246.561.705,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.251.627.060,50
2.09	Dinas Ketahanan Pangan	6.251.627.060,50
2.09	BELANJA DAERAH	6.251.627.060,50
2.09	BELANJA OPERASI	5.714.457.378,50
2.09	BELANJA MODAL	537.169.682,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.519.634.979,00
2.10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.519.634.979,00
2.10	BELANJA DAERAH	1.519.634.979,00
2.10	BELANJA OPERASI	249.618.379,00
2.10	BELANJA MODAL	1.270.016.600,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	13.190.610.009,00
2.11	Dinas Lingkungan Hidup	13.190.610.009,00
2.11	BELANJA DAERAH	13.190.610.009,00
2.11	BELANJA OPERASI	12.596.308.665,00
2.11	BELANJA MODAL	594.301.344,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.554.881.022,84
2.12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.554.881.022,84
2.12	BELANJA DAERAH	6.554.881.022,84
2.12	BELANJA OPERASI	5.945.816.593,84
2.12	BELANJA MODAL	609.064.429,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.157.154.695,90
2.13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.157.154.695,90
2.13	BELANJA DAERAH	9.157.154.695,90
2.13	BELANJA OPERASI	8.876.275.263,90
2.13	BELANJA MODAL	280.879.432,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.683.594.506,00
2.14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	10.683.594.506,00
2.14	BELANJA DAERAH	10.683.594.506,00
2.14	BELANJA OPERASI	10.061.394.506,00
2.14	BELANJA MODAL	622.200.000,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	22.474.914.166,75
2.15	Dinas Perhubungan	22.474.914.166,75
2.15	BELANJA DAERAH	22.474.914.166,75
2.15	BELANJA OPERASI	21.322.086.279,75
2.15	BELANJA MODAL	1.152.827.887,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Nilai Plafon Anggaran
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.241.541.969,92
2.16	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.241.541.969,92
2.16	BELANJA DAERAH	8.241.541.969,92
2.16	BELANJA OPERASI	7.268.636.867,92
2.16	BELANJA MODAL	972.905.102,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	14.016.402.040,90
2.17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	14.016.402.040,90
2.17	BELANJA DAERAH	14.016.402.040,90
2.17	BELANJA OPERASI	13.928.661.995,90
2.17	BELANJA MODAL	87.740.045,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.739.395.645,00
2.18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.739.395.645,00
2.18	BELANJA DAERAH	5.739.395.645,00
2.18	BELANJA OPERASI	5.082.225.302,00
2.18	BELANJA MODAL	657.170.343,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	21.668.195.249,11
2.19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	21.668.195.249,11
2.19	BELANJA DAERAH	21.668.195.249,11
2.19	BELANJA OPERASI	20.065.814.944,11
2.19	BELANJA MODAL	1.602.380.305,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	50.149.818,96
2.21	Dinas Komunikasi dan Informatika	50.149.818,96
2.21	BELANJA DAERAH	50.149.818,96
2.21	BELANJA OPERASI	25.579.868,96
2.21	BELANJA MODAL	24.569.950,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	15.055.913.742,00
2.22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.055.913.742,00
2.22	BELANJA DAERAH	15.055.913.742,00
2.22	BELANJA OPERASI	15.042.773.742,00
2.22	BELANJA MODAL	13.140.000,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	8.083.329.836,90
2.23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.083.329.836,90
2.23	BELANJA DAERAH	8.083.329.836,90
2.23	BELANJA OPERASI	6.911.866.447,90
2.23	BELANJA MODAL	1.171.463.389,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	253.579.223,00
2.24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	253.579.223,00
2.24	BELANJA DAERAH	253.579.223,00
2.24	BELANJA OPERASI	208.347.223,00
2.24	BELANJA MODAL	45.232.000,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	123.639.784.427,88



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Nilai Plafon Anggaran
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.373.827.840,55
3.25	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.373.827.840,55
3.25	BELANJA DAERAH	10.373.827.840,55
3.25	BELANJA OPERASI	10.189.742.746,55
3.25	BELANJA MODAL	184.085.094,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8.166.410.344,00
3.26	Dinas Pariwisata	8.166.410.344,00
3.26	BELANJA DAERAH	8.166.410.344,00
3.26	BELANJA OPERASI	7.839.645.876,00
3.26	BELANJA MODAL	326.764.468,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	81.022.277.903,45
3.27	Dinas Pertanian	81.022.277.903,45
3.27	BELANJA DAERAH	81.022.277.903,45
3.27	BELANJA OPERASI	79.457.003.205,45
3.27	BELANJA MODAL	1.565.274.698,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.963.690.997,00
3.30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.963.690.997,00
3.30	BELANJA DAERAH	2.963.690.997,00
3.30	BELANJA OPERASI	2.832.049.797,00
3.30	BELANJA MODAL	131.641.200,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	21.098.207.344,88
3.31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.098.207.344,88
3.31	BELANJA DAERAH	21.098.207.344,88
3.31	BELANJA OPERASI	16.025.239.821,88
3.31	BELANJA MODAL	5.072.967.523,00
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	15.369.998,00
3.32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.369.998,00
3.32	BELANJA DAERAH	15.369.998,00
3.32	BELANJA OPERASI	15.369.998,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	102.188.443.129,99
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	38.844.932.052,99
4.01	Sekretariat Daerah	38.844.932.052,99
4.01	BELANJA DAERAH	38.844.932.052,99
4.01	BELANJA OPERASI	32.636.828.230,99
4.01	BELANJA MODAL	6.208.103.822,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	63.343.511.077,00
4.02	Sekretariat DPRD	63.343.511.077,00
4.02	BELANJA DAERAH	63.343.511.077,00
4.02	BELANJA OPERASI	60.184.172.353,00
4.02	BELANJA MODAL	3.159.338.724,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	523.566.443.178,18
5.01	PERENCANAAN	11.553.873.905,35
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	11.553.873.905,35
5.01	BELANJA DAERAH	11.553.873.905,35
5.01	BELANJA OPERASI	11.103.599.605,35



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Nilai Plafon Anggaran
5.01	BELANJA MODAL	450.274.300,00
5.02	KEUANGAN	501.886.643.948,83
5.02	Badan Keuangan dan Aset Daerah	471.427.769.783,41
5.02	BELANJA DAERAH	471.427.769.783,41
5.02	BELANJA OPERASI	81.545.566.998,10
5.02	BELANJA MODAL	1.995.198.611,00
5.02	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.556.796.096,12
5.02	BELANJA TRANSFER	368.330.208.078,19
5.02	Badan Pendapatan Daerah	30.458.874.165,42
5.02	BELANJA DAERAH	30.458.874.165,42
5.02	BELANJA OPERASI	27.755.464.241,42
5.02	BELANJA MODAL	2.703.409.924,00
5.03	KEPEGAWAIAN	7.740.148.727,00
5.03	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.740.148.727,00
5.03	BELANJA DAERAH	7.740.148.727,00
5.03	BELANJA OPERASI	7.149.802.471,00
5.03	BELANJA MODAL	590.346.256,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.153.331.076,00
5.04	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.153.331.076,00
5.04	BELANJA DAERAH	1.153.331.076,00
5.04	BELANJA OPERASI	1.153.331.076,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.232.445.521,00
5.05	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.232.445.521,00
5.05	BELANJA DAERAH	1.232.445.521,00
5.05	BELANJA OPERASI	1.232.445.521,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	20.772.903.343,04
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	20.772.903.343,04
6.01	Inspektorat	20.772.903.343,04
6.01	BELANJA DAERAH	20.772.903.343,04
6.01	BELANJA OPERASI	16.872.274.904,04
6.01	BELANJA MODAL	3.900.628.439,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	59.625.179.051,19
7.01	KECAMATAN	59.625.179.051,19
7.01	Kantor Camat Pujut	3.532.496.554,00
7.01	BELANJA DAERAH	3.532.496.554,00
7.01	BELANJA OPERASI	3.356.661.130,00
7.01	BELANJA MODAL	175.835.424,00
7.01	Kantor Camat Pringgarata	3.057.603.331,25
7.01	BELANJA DAERAH	3.057.603.331,25
7.01	BELANJA OPERASI	2.805.396.027,25
7.01	BELANJA MODAL	252.207.304,00
7.01	Kantor Camat Praya	11.066.615.554,80
7.01	BELANJA DAERAH	11.066.615.554,80
7.01	BELANJA OPERASI	11.022.638.147,80



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Nilai Plafon Anggaran
7.01	BELANJA MODAL	43.977.407,00
7.01	Kantor Camat Praya Tengah	5.409.006.963,00
7.01	BELANJA DAERAH	5.409.006.963,00
7.01	BELANJA OPERASI	5.285.619.873,00
7.01	BELANJA MODAL	123.387.090,00
7.01	Kantor Camat Praya Barat	2.873.182.313,00
7.01	BELANJA DAERAH	2.873.182.313,00
7.01	BELANJA OPERASI	2.784.950.241,00
7.01	BELANJA MODAL	88.232.072,00
7.01	Kantor Camat Praya Barat Daya	2.962.729.763,68
7.01	BELANJA DAERAH	2.962.729.763,68
7.01	BELANJA OPERASI	2.571.041.706,68
7.01	BELANJA MODAL	391.688.057,00
7.01	Kantor Camat Praya Timur	2.796.559.134,00
7.01	BELANJA DAERAH	2.796.559.134,00
7.01	BELANJA OPERASI	2.499.663.376,00
7.01	BELANJA MODAL	296.895.758,00
7.01	Kantor Camat Kopang	3.157.121.484,00
7.01	BELANJA DAERAH	3.157.121.484,00
7.01	BELANJA OPERASI	3.105.263.324,00
7.01	BELANJA MODAL	51.858.160,00
7.01	Kantor Camat Batukliang	2.281.313.429,00
7.01	BELANJA DAERAH	2.281.313.429,00
7.01	BELANJA OPERASI	2.190.900.283,00
7.01	BELANJA MODAL	90.413.146,00
7.01	Kantor Camat Batukliang Utara	2.372.400.656,00
7.01	BELANJA DAERAH	2.372.400.656,00
7.01	BELANJA OPERASI	2.118.436.744,00
7.01	BELANJA MODAL	253.963.912,00
7.01	Kantor Camat Jonggat	2.854.525.937,24
7.01	BELANJA DAERAH	2.854.525.937,24
7.01	BELANJA OPERASI	2.784.950.166,24
7.01	BELANJA MODAL	69.575.771,00
7.01	Kantor Camat Janapria	2.853.532.261,00
7.01	BELANJA DAERAH	2.853.532.261,00
7.01	BELANJA OPERASI	2.644.062.480,00
7.01	BELANJA MODAL	209.469.781,00
7.01	Kelurahan Gonjak	1.272.098.655,00
7.01	BELANJA DAERAH	1.272.098.655,00
7.01	BELANJA OPERASI	1.077.134.896,00
7.01	BELANJA MODAL	194.963.759,00
7.01	Kelurahan Semayan	1.244.984.009,00
7.01	BELANJA DAERAH	1.244.984.009,00
7.01	BELANJA OPERASI	977.694.866,00
7.01	BELANJA MODAL	267.289.143,00
7.01	Kelurahan Tiwugalih	1.285.958.682,48
7.01	BELANJA DAERAH	1.285.958.682,48



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Nilai Plafon Anggaran
7.01	BELANJA OPERASI	1.031.602.639,48
7.01	BELANJA MODAL	254.356.043,00
7.01	Kelurahan Prapen	1.250.555.285,00
7.01	BELANJA DAERAH	1.250.555.285,00
7.01	BELANJA OPERASI	1.216.096.716,00
7.01	BELANJA MODAL	34.458.569,00
7.01	Kelurahan Leneng	1.230.274.171,00
7.01	BELANJA DAERAH	1.230.274.171,00
7.01	BELANJA OPERASI	989.681.735,00
7.01	BELANJA MODAL	240.592.436,00
7.01	Kelurahan Gerunung	1.183.727.577,74
7.01	BELANJA DAERAH	1.183.727.577,74
7.01	BELANJA OPERASI	1.071.826.089,00
7.01	BELANJA MODAL	111.901.488,74
7.01	Kelurahan Praya	1.170.293.992,00
7.01	BELANJA DAERAH	1.170.293.992,00
7.01	BELANJA OPERASI	1.082.438.515,00
7.01	BELANJA MODAL	87.855.477,00
7.01	Kelurahan Panjisari	1.037.017.885,00
7.01	BELANJA DAERAH	1.037.017.885,00
7.01	BELANJA OPERASI	880.897.293,00
7.01	BELANJA MODAL	156.120.592,00
7.01	Kelurahan Renteng	1.144.739.844,00
7.01	BELANJA DAERAH	1.144.739.844,00
7.01	BELANJA OPERASI	976.547.204,00
7.01	BELANJA MODAL	168.192.640,00
7.01	Kelurahan Jontlak	1.329.051.461,00
7.01	BELANJA DAERAH	1.329.051.461,00
7.01	BELANJA OPERASI	1.017.686.480,00
7.01	BELANJA MODAL	311.364.981,00
7.01	Kelurahan Sasake	1.103.762.380,00
7.01	BELANJA DAERAH	1.103.762.380,00
7.01	BELANJA OPERASI	1.001.838.788,00
7.01	BELANJA MODAL	101.923.592,00
7.01	Kelurahan Gerantung	1.155.627.728,00
7.01	BELANJA DAERAH	1.155.627.728,00
7.01	BELANJA OPERASI	1.063.140.458,00
7.01	BELANJA MODAL	92.487.270,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.914.501.141,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.914.501.141,00
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.914.501.141,00
8.01	BELANJA DAERAH	7.914.501.141,00
8.01	BELANJA OPERASI	7.404.949.138,00
8.01	BELANJA MODAL	509.552.003,00
Jumlah		2.925.202.177.429,25

Plafon anggaran pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan (baik program maupun kegiatan) berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

5. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dialokasikan senilai Rp153.840.110.633,76 pada Tahun 2025, merupakan Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2025 meliputi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo yang merupakan utang ke PT SMI dan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI)

c. Pencapaian Target Kinerja APBD

Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah relatif lebih baik dibanding kinerja tahun lalu. Capaian kinerja APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat secara utuh dalam rincian komponen pendapatan daerah dan belanja daerah, sebagai berikut.

1) Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2025 anggaran Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah senilai Rp2.825.991.771.625,49,00 dan terealisasi senilai Rp2.901.498.807.255,48 atau 102,67 % dari target pendapatan daerah.

Pada Tahun 2025 anggaran Pendapatan Asli Daerah senilai Rp504.607.362.379,49 dengan realisasi senilai Rp545.831.803.384,48 atau 108,17% dari target yang ditetapkan. Total realisasi Pendapatan Asli Daerah senilai Rp545.831.803.384,48 terdiri dari:

- a) Realisasi Pajak Daerah senilai Rp303.687.312.272,95 atau 119,67% dari anggaran senilai Rp276.329.157.274,00;
- b) Realisasi Retribusi Daerah senilai Rp40.497.442.500,00 atau 155,97% dari anggaran senilai Rp25.964.886.316,89;
- c) Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan senilai Rp13.183.615.297,00 atau 100% dari anggaran senilai Rp13.183.615.297,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp161.463.433.314,53 atau 85,37% dari anggaran senilai Rp189.129.703.491,60.

Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang lainnya bersumber dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana perimbangan antara lain bagi hasil yang dibagi menjadi dua, yaitu bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam).

Realisasi sumber Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp177.896.979.100,00 atau 99,32% dari anggaran senilai Rp179.123.616.000,00. Sedangkan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1.375.586.130.050,00 atau 103,09% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.334.314.435.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)–Fisik terealisasi senilai Rp46.250.980.209,00 atau 98,57% dari anggaran senilai Rp46.919.753.000,00 dan Realisasi DAK - Nonfisik senilai Rp438.054.792.897,00 atau 100,50% dari anggaran senilai Rp435.858.678.000,00. Realisasi Dana Insentif Fiskal senilai Rp7.888.237.000,00 dan realisasi Dana Desa senilai Rp162.209.204.800,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu berupa Pendapatan Hibah terealisasi senilai Rp135.871.200,00 atau 44,99% dari anggaran senilai Rp302.000.000,00. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terealisasi senilai Rp26.324.521.293,00 atau 100% dari anggaran senilai Rp26.324.521.293,00. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi terealisasi senilai Rp121.320.287.322,00 atau 106,15% dari anggaran senilai Rp114.295.711.953,00.

2) Belanja dan Tranfer

Jumlah Anggaran Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp2.925.202.177.429,25 dan terealisasi senilai Rp2.814.274.649.088,89 atau 96,21% yang terdiri dari.

a) Belanja Operasi

Dari anggaran senilai Rp2.175.322.200.460,91 dapat direalisasikan senilai Rp2.109.729.193.164,29 atau 96,98%, terdiri dari:

- (1) Belanja Pegawai direalisasikan senilai Rp1.275.806.131.204,38 atau 97,47% dari anggaran senilai Rp1.308.876.185.400,60;
- (2) Belanja Barang dan Jasa direalisasikan senilai Rp760.945.163.861,91 atau 95,93% dari anggaran senilai Rp793.214.912.805,31;
- (3) Belanja Bunga direalisasikan senilai Rp9.817.569.753,00 atau 100% dari anggaran senilai Rp9.817.569.753,00;
- (4) Belanja Hibah direalisasikan senilai Rp62.533.928.345,00 atau 99,80% dari anggaran senilai Rp62.657.532.502,00; dan
- (5) Belanja Bantuan Sosial direalisasikan senilai Rp626.400.000,00 atau 82,86% dari anggaran senilai Rp756.000.000,00.

b) Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal senilai Rp361.992.972.794,03 dapat direalisasikan senilai Rp345.144.760.255,60 atau 95,35%, terdiri dari:

- 1) Belanja Modal Tanah direalisasikan senilai Rp1.261.109.152,00 atau 99,29% dari anggaran senilai Rp1.270.016.600,00
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin direalisasikan senilai Rp95.235.979.101,00 atau 90,97% dari anggaran senilai Rp104.694.908.450,31;
 - 3) Belanja Bangunan dan Gedung direalisasikan senilai Rp145.657.436.123,60 atau 98,09% dari anggaran senilai Rp148.501.231.866,77
 - 4) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi direalisasikan senilai Rp89.360.624.558,00 atau 97,77% dari anggaran senilai Rp91.394.793.044,12;
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya direalisasikan senilai Rp13.629.611.321,00 atau 95,57% dari anggaran senilai Rp14.260.692.984,00; dan
 - 6) Belanja Aset Lainnya direalisasikan senilai Rp0,00 atau 0% dari anggaran senilai Rp1.871.329.848,83.
- c) Belanja Tidak Terduga
- Anggaran Belanja Tidak terduga senilai Rp19.556.796.096,12 dapat direalisasikan senilai Rp8.959.925.740,00 atau 45,81%.
- d) Belanja Transfer
- Belanja Transfer sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp350.440.769.929,00 atau 95,14% dari anggaran senilai Rp368.330.208.078,19 yang terdiri dari realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan senilai Rp32.475.195.796,00 dan Transfer Bantuan Keuangan senilai Rp317.965.574.133,00.

6. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Anggaran Penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp153.840.110.633,76 terealisasi senilai Rp161.879.283.656,76 atau 105,23%. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah terealisasi senilai Rp54.624.490.929,00 atau 99,99% dari anggaran senilai Rp54.629.704.830,00.

7. Permasalahan dan Solusi

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar 102,67% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah melampaui target, masih terdapat beberapa sumber pendapatan daerah yang belum mencapai target penerimaan. Kelompok pendapatan daerah yang tidak mencapai target tersebut adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah dengan tingkat realisasi sebesar 85,37% dari target yang dianggarkan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 antara lain:

- a. Pengelolaan administrasi Pendapatan Asli Daerah pada SKPD relatif masih belum terlaksana sebagaimana sistem dan prosedur (Sisdur) yang ada sehingga berpotensi

untuk terjadinya penyimpangan oleh aparat/petugas pengelola Pendapatan Asli Daerah;

- b. Masih rendahnya kinerja pengelola sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga berdampak pada rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang telah ditargetkan di beberapa SKPD. Rendahnya kinerja ini disebabkan oleh masih kurangnya kuantitas dan kualitas pengawasan serta tingkat kesejahteraan aparat atau petugas yang relatif masih rendah;
- c. Tata kelola pasar belum optimal yang menyebabkan pendapatan daerah dari retribusi pasar belum maksimal;
- d. Keterbatasan jumlah pasar yang mampu menyumbang PAD serta adanya kendala dalam sistem pungutan;
- e. Kurangnya koordinasi lintas OPD untuk memastikan pengelolaan lebih baik dan efisien;
- f. Belum diterapkannya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap wajib retribusi yang tidak patuh membayar retribusi daerah. Akibatnya wajib retribusi tersebut tetap laai untuk memenuhi kewajibannya membayar retribusi;
- g. Tingkat kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi daerah relatif masih rendah sehingga mereka masih merasa berat atau enggan untuk membayar retribusi daerah; dan

h. Penurunan drastis jumlah kunjungan wisatawan lokal, nasional maupun internasional. Berdasarkan permasalahan di atas maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu menempuh berbagai upaya untuk memecahkan masalah yang ada sehingga permasalahan yang ada dapat teratasi. Beberapa kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- a. Melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala atau rutin terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang bersifat internal maupun pengawasan yang bersifat eksternal. Melalui upaya ini diharapkan tidak terjadi penyimpangan atau kebocoran dalam pengelolaan PAD dan para petugas atau aparat pengelola PAD akan lebih termotivasi dalam bekerja;
- b. Melakukan penyuluhan dan himbauan kepada wajib retribusi melalui pertemuan/rapat, spanduk, media cetak maupun melalui papan reklame untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak/wajib retribusi daerah sehingga mereka akan lebih patuh atau taat dalam membayar kewajibannya;
- c. Memberikan penghargaan kepada perusahaan/lembaga atau perseorangan yang memiliki kesadaran tinggi dalam membayar retribusi dan juga memberikan penghargaan kepada institusi atau petugas yang berprestasi dalam memungut retribusi daerah. Melalui upaya ini diharapkan para wajib pajak akan termotivasi dalam membayar kewajibannya begitu pula kepada petugas pemungut retribusi diharapkan dapat meningkatkan motivasinya dalam bekerja;

- d. Meningkatkan sarana mobilitas sehingga operasional penagihan retribusi daerah dapat berjalan lancar. Dengan adanya dukungan sarana mobilitas yang memadai diharapkan pemungutan retribusi daerah dapat terlaksana secara intensif;
- e. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap obyek dan subyek retribusi yang baru sehingga jumlah obyek dan subyek retribusi akan meningkat;
- f. Melakukan penilaian atau uji petik terhadap obyek retribusi sehingga diperoleh target yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melalui kegiatan ini diharapkan target obyek retribusi akan bisa meningkat;
- g. Melakukan revisi terhadap beberapa peraturan daerah tentang Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga diharapkan target penerimaan daerah dapat meningkat;
- h. Mencari potensi retribusi yang baru dengan membuat peraturan daerah baru sebagai landasan atau dasar hukumnya sehingga sumber pendapatan daerah dapat meningkat; dan
- i. Membangun dan merehabilitasi infrastruktur seperti pasar, rumah sakit dan lainnya sehingga akan menambah dan meningkatkan sumber dan target Pendapatan Asli Daerah dari jenis Retribusi Daerah.

Permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bahwa kondisi riil beban Belanja Daerah masih didominasi oleh besarnya alokasi Belanja Pegawai (Belanja Aparatur), sehingga alokasi belanja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara efisien dan efektifitas mulai dari Perencanaan (*Planning*), Pelaksanaan (*Actuating*), Pengorganisasian (*Organizing*) hingga pengawasan (*Controlling*) sesuai dengan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing dinas satuan kerja. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Tanpa pelimpahan ini, otonomi daerah menjadi tidak bermakna. Salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan adalah Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur keuangan daerah, dan begitu pula sebaliknya. Tetapi mengharapkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai.

Untuk mengatasi masalah keterbatasan pendanaan tersebut maka program pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 diarahkan pada program-program prioritas dengan melakukan penghematan terhadap pendanaan masing-masing kegiatan pada SKPD.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Asumsi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Kemandirian Entitas, seluruh SKPD sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;
2. Kesenambungan Entitas, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai entitas pelaporan, maupun SKPD di lingkungannya akan berlanjut keberadaannya; dan
3. Keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan dalam mata uang Rupiah.

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah basis akrual, di mana pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Utang, dan Ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

1. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan;
2. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar; dan
3. Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas karena anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, berarti bahwa:



- a. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan atau oleh entitas akuntansi; dan
- b. Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus untuk pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, ditandai dengan diberikannya pengganti uang persediaan yakni dengan diterbitkannya SP2D GU, SP2D TU Nihil, dan SP2D GU Nihil.

B. Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab BUD. Termasuk PFK yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca dan kas lainnya yang merupakan dana pihak ketiga yang belum dicairkan.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari para wajib pajak/retribusi/lain-lain PAD yang sah yang per tanggal Neraca belum disetorkan ke Kas Daerah.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan/Uang Persediaan (UYHD/UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk PFK yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran berdasarkan nilai nominal uang.

4. Kas di BLUD RSUD

Kas di BLUD merupakan kas yang berada dalam tanggung jawab Bendahara BLUD, baik yang ada di Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran BLUD per tanggal Neraca. Kas ini tidak disetorkan ke Kas Daerah dan tetap diakui sebagai saldo kas di Bendahara BLUD RSUD dan merupakan bagian dari SiLPA yang dilaporkan pada LKPD Kabupaten Lombok Tengah.



5. Setara Kas

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Investasi disebut setara kas kalau investasi yang dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Setara Kas berupa simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari tiga bulan.

6. Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)

Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) adalah seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Puskesmas (FKTP), baik berupa saldo kas dana JKN maupun dana BLUD Puskesmas, termasuk PFK yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.

7. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas yang berada dalam tanggung jawab Bendahara BOS yang berada di SD dan SMP lingkup Kabupaten Lombok Tengah.

8. Kas Lainnya

Kas Lainnya adalah seluruh kas yang tidak memenuhi kriteria kas yang telah diuraikan sebelumnya.

9. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

10. Piutang

Piutang dinyatakan dalam Neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Pos-pos Piutang, antara lain:

- a. Piutang Pajak, yaitu Piutang yang diakui atas Pajak Jasa Perhotelan, Pajak Jasa Makanan dan atau Minuman, dan pajak lainnya;
- b. Piutang Retribusi yaitu piutang yang diakui atas Piutang pelayanan kesehatan, pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir pertokoan, dan jasa umum;
- c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah Piutang yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan seperti deviden dari BUMD yang belum tertagih sampai dengan akhir periode pelaporan;
- d. Piutang lain-lain PAD yang sah adalah Piutang yang timbul dari pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan antara lain penjualan aset yang tidak dipisahkan, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemerintah daerah dan sebagainya yang belum tertagih sampai dengan akhir periode laporan keuangan; dan
- e. Piutang transfer pemerintah daerah lainnya adalah Piutang yang timbul akibat adanya pendapatan dari Pemerintah Provinsi NTB yang sampai dengan tanggal pelaporan belum seluruhnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Piutang ini terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik

nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;

f. Piutang Lainnya terdiri dari:

- 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo ke bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
- 2) Bagian Lancar TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan reklasifikasi lain-lain aset berupa TGR ke bagian lancar TGR Bagian lancar tuntutan perbendaharaan;
- 3) Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi; dan
- 4) Piutang Lain-lain Lainnya adalah piutang yang tidak memenuhi kriteria Piutang yang telah diuraikan sebelumnya.

11. Persediaan

Pada akhir periode akuntansi, Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dimasukan sebagai Persediaan. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.

12. Investasi Non Permanen

Investasi Nonpermanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk Dana Bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Nilai investasi dalam bentuk Dana Bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

13. Investasi Permanen

Investasi Permanen, yaitu Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk Investasi Permanen antara lain; Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan Negara/Daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis Investasi Permanen yang tidak tercakup di atas.

Investasi Permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila Investasi Permanen

diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Pengeluaran untuk memperoleh Investasi Permanen diakui sebagai pengeluaran pembiayaan Investasi Permanen diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dinilai dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan prosentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

14. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan Aset Lainnya. Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Pengukuran Aset Tetap terdiri dari:

- a. Aset Tetap yang diperoleh melalui pengadaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah Belanja Modal yang telah diakui dalam periode berjalan;
- b. Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah;
- c. Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
- d. Aset Tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian Aset Tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan;
- e. Pelepasan Aset Tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan Aset Tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset Tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar Aset Tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset yang diserahkan, mana yang lebih mudah;
- f. Aset Tetap dihapuskan dari Neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang, misalnya karena Aset Tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan Aset Tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- g. Perubahan nilai Aset Tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama;
- h. Aset Tetap terdiri dari:
 - 1) Tanah
Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga

pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin diakui berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian/biaya/instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

Peralatan dan Mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun Gedung dan Bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

5) **Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua Aset Tetap Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam Aset Tetap yang telah diuraikan sebelumnya. Misalnya bukuperpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hewan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hewan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

6) **Konstruksi dalam Pengerjaan**

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut secara substansi dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

15. Kewajiban jangka pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan. Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar.

16. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal Neraca.

17. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

18. Koreksi Periode Akuntansi Sebelumnya

- a. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;

- c. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;
- d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait;
- e. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain;
- f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar;
- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- h. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut; dan
- i. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

19. Pendapatan

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sesuai hasil rekonsiliasi Rekening Koran Bank dengan Buku kas Umum Daerah dan pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD. Khusus untuk unit Badan Layanan Umum Daerah (Rumah Sakit Umum Daerah Praya) pengakuannya sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD dan pendapatannya dapat digunakan langsung untuk menutup kebutuhan belanja demi menjaga kelangsungan operasional pelayanan kepada masyarakat;
- c. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;

- d. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, antara lain penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi;
- e. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- f. Pengembalian yang bersifat normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan dan atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar;
- h. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima; dan
- i. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

20. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja).
- d. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti dana bagi hasil dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- e. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi tersebut dibukukan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- f. Pengukuran belanja menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan; dan
- g. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

21. Pembiayaan

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
- b. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci menurut sumber pembiayaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dirinci menurut jenis pengeluaran pembiayaan;
- c. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil divestasi, pinjaman dan penerimaan kembali pinjaman;
- d. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pemberian pinjaman kepada entitas lain;
- e. Pembiayaan diakui selama periode berjalan, untuk penerimaan pembiayaan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan untuk pengeluaran pembiayaan pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- f. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan dikeluarkan;
- g. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan;
- h. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah;
- i. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
- j. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto; dan
- k. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

22. Laporan Arus Kas

- a. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- b. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya, di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
 - 1) Arus kas masuk dari aktivitas operasi diperoleh dari:
 - a) Penerimaan Pajak Daerah;
 - b) Penerimaan Retribusi Daerah;
 - c) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;



- d) Penerimaan Lain-lain PAD yang sah;
 - e) Transfer masuk;
 - f) Penerimaan Hibah;
 - g) Penerimaan Sumbangan Pihak III; dan
 - h) Penerimaan Pengembalian atas Aktivitas Operasi Tahun berjalan.
- 2) Arus kas keluar dari aktivitas operasi digunakan untuk:
- a) Pembayaran Pegawai;
 - b) Pembayaran Barang;
 - c) Pembayaran Bunga;
 - d) Pembayaran Subsidi;
 - e) Pembayaran Hibah;
 - f) Pembayaran Bantuan Sosial;
 - g) Pembayaran Tak Terduga; dan
 - h) Transfer keluar.
- c. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- 1) Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- a) Penjualan Aset Tetap;
 - b) Penjualan Aset Lainnya; dan
 - c) Penerimaan Pengembalian atas Aktivitas Investasi Tahun berjalan.
- 2) Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- a) Perolehan Aset Tetap;
 - b) Perolehan Aset Lainnya; dan
 - c) Penyertaan Modal Pemda.
- d. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau Penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi pihak lain di masa yang akan datang.
- 1) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- a) Penerimaan Pinjaman;
 - b) Penerimaan Hasil Penjualan Surat Kewajiban Negara
 - c) Penerimaan dari Divestasi;
 - d) Penerimaan Kembali Pinjaman; dan
 - e) Pencairan Dana Cadangan.
- 2) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- a) Pembayaran Pokok Pinjaman;
 - b) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
 - c) Pembentukan Dana Cadangan.

- e. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan pemerintah, Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan kiriman uang PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dan Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untu pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Kas Daerah.
- 1) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan atas pengembalian saldo uang persediaan SKPD tahun sebelumnya, penerimaan PFK, dan kiriman uang ; dan
 - 2) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi, pengeluaran atas pembayara uang muka kerja/uang persediaan SKPD, pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.
- f. Pelaporan
- Penyajian laporan arus kas dilakukan dengan metode langsung yaitu penerimaan dan pengeluaran disajikan secara bruto.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB V

PENJELASAN POS-POS

LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2025 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas anggaran untuk realisasi Pendapatan Daerah, persentase capaian realisasi Tahun 2025 dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	504.607.362.379,49	545.831.803.384,48	108,17	331.059.847.831,25
Pendapatan Transfer	2.294.757.887.953,00	2.329.206.611.378,00	101,50	2.289.284.360.966,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	26.626.521.293,00	26.460.392.493,00	99,38	109.315.906.788,00
Jumlah	2.825.991.771.625,49	2.901.498.807.255,48	102,67	2.729.660.115.585,25

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini.



Rincian saldo Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***LRA Lampiran 1. Rekapitulasi Pendapatan Berdasarkan Jenis sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025.***

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	276.329.157.274,00	330.687.312.272,95	119,67	182.328.157.865,50
Pendapatan Retribusi Daerah	25.964.886.316,89	40.497.442.500,00	155,97	31.058.523.271,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.183.615.297,00	13.183.615.297,00	100,00	12.741.149.852,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	189.129.703.491,60	161.463.433.314,53	85,37	104.932.016.842,75
Jumlah	504.607.362.379,49	545.831.803.384,48	108,17	331.059.847.831,25

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LRA untuk pos Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	261.843.932,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	673.886.229,91
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	3.806.500,00
Pajak Reklame	2.200.000.000,00	2.027.571.880,00	92,16	1.947.094.265,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	176.927.675,00
Pajak Air Tanah	361.085.293,75	413.652.807,00	114,56	487.944.413,00
Pajak Sarang Burung Walet	4.867.500,00	500.000,00	10,27	4.350.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.991.234.820,49	4.770.677.876,75	95,58	3.549.329.804,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	22.082.761.379,00	16.871.275.735,00	76,40	16.013.894.795,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	41.500.000.000,00	61.896.234.001,00	149,15	35.702.051.083,00
PBJT – Pajak Barang dan	127.183.118.280,76	164.996.438.197,20	129,73	123.507.029.168,59



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jasa Tertentu				
PBJT- Makanan dan/atau Minuman	43.267.383.724,53	61.216.195.443,76	141,48	40.558.956.651,69
PBJT-Tenaga Listrik	31.555.863.711,83	31.951.028.651,00	101,25	31.282.324.551,00
PBJT-Jasa Perhotelan	46.336.116.863,77	64.230.328.659,04	138,62	45.255.519.994,40
PBJT-Jasa Parkir	1.762.629.507,45	1.612.445.039,00	91,48	1.449.087.453,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	4.261.124.473,18	5.986.440.404,40	140,49	4.961.140.518,50
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	38.333.255.000,00	36.450.538.450,00	95,09	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	39.672.835.000,00	43.260.423.326,00	109,04	0,00
Jumlah	276.329.157.274,00	330.687.312.272,95	119,67	182.328.157.865,50

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut.

1. Realisasi Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur jenis Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disahkan pada 19 Januari 2024.
Sehubungan dengan hal tersebut, penerimaan pajak yang diterima pada periode 1 Januari sampai dengan 18 Januari 2024 masih dicatat pada akun Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. Sementara itu, penerimaan pajak yang diterima pada periode 19 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dicatat pada akun pendapatan dengan nomenklatur baru, yaitu PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, dan PBJT atas Jasa Parkir;
2. Pendapatan Pajak Reklame mengalami kenaikan sebesar Rp80.477.615,00 atau 4,13% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.947.094.265,00. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah pemasangan reklame baru baik berupa papan iklan, spanduk atau media digital dan meningkatnya efektivitas dalam pemungutan pajak oleh pemerintah daerah;
3. Pendapatan Pajak Air Tanah mengalami penurunan sebesar Rp74.291.606,00 atau 15,23% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp487.944.413,00. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya volume penggunaan air tanah pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, antara lain karena adanya penutupan usaha serta peralihan sebagian pengguna ke sumber air lainnya, seperti jaringan air bersih milik pemerintah daerah;
4. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet mengalami penurunan sebesar Rp3.850.000,00 atau 88,51% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp4.350.000,00. Hal ini disebabkan:

- a. Penurunan realisasi pendapatan disebabkan karena penurunan produksi walet di Tahun 2025; dan
 - b. Rendahnya kesadaran pengusaha sarang burung walet dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran terhadap wajib pajak, para pengusaha sarang burung walet menyatakan bahwa tidak terdapat burung walet yang bersarang pada bangunan milik mereka sehingga tidak terdapat hasil produksi yang dapat dikenakan pajak.
5. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami kenaikan sebesar Rp1.221.348.072,75 atau 34,41% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp3.549.329.804,00. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya SKK (Surat Kuasa Khusus) dengan Kejaksanaan Negeri Lombok Tengah sejak Tahun 2024, sehingga Bapenda memperoleh dukungan dalam pelaksanaan penagihan Pajak MBLB. Pemberian SKK tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pada Tahun 2025;
 6. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) mengalami kenaikan sebesar Rp857.380.940,00 atau 5,35% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp16.013.894.795,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kinerja kepala dusun dan kepala lingkungan dalam menerapkan pola penagihan PBB, sehingga penagihan pajak PBBP2 di wilayah masing-masing lebih optimal. Meski demikian, nilai realisasi penerimaan PBBP2 tersebut tidak hanya merupakan nilai pembayaran atas pokok ketetapan PBBP2 melainkan juga penerimaan atas denda keterlambatan pembayaran pajak PBBP2. Dari nilai realisasi tersebut, Bapenda tidak dapat memilah antara nilai penerimaan pokok dengan nilai penerimaan denda.
 7. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami kenaikan sebesar Rp26.194.182.918,00 atau 73,37% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp35.702.051.083,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah peralihan hak atas tanah dan bangunan pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024. Selain itu, perkembangan ekonomi dan pembangunan yang pesat di KEK Mandalika turut mendorong kenaikan harga tanah dan bangunan, sehingga nilai Pendapatan BPHTB juga meningkat;
 8. Jumlah Realisasi PBJT Makanan dan/atau Minuman Tahun 2024 sebesar Rp40.558.956.651,69 di tambah dengan pendapatan Pajak Restoran Tahun 2024 sebesar Rp673.886.229,91 menjadi Rp41.232.842.881,60. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan PBJT Makanan dan/atau Minuman Tahun 2025 sebesar Rp61.216.195.443,76 maka mengalami kenaikan sebesar Rp19.983.352.562,16 atau 48,46%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kunjungan wisata ke Lombok Tengah. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata RI, pada bulan Mei 2025 terjadi lonjakan kunjungan wisatawan Nusantara yang sangat tinggi, yaitu mencapai 89,57% dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2024;
 9. Pendapatan PBJT Tenaga Listrik mengalami kenaikan sebesar Rp668.704.100,00 atau 2,14% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp31.282.324.551,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan listrik serta pertumbuhan konsumsi listrik di Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, optimalisasi koordinasi dengan PLN, khususnya melalui peningkatan sosialisasi dan pemantauan kepatuhan pembayaran pajak, turut mendorong peningkatan realisasi penerimaan;
 10. Realisasi Pendapatan PBJT Jasa Perhotelan Tahun 2024 sebesar Rp45.255.519.994,40 ditambah dengan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2024 sebesar

Rp261.843.932,00 sehingga menjadi Rp45.517.363.926,40. Jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan PBJT Jasa Perhotelan Tahun 2025 sebesar Rp64.230.328.659,04, maka terjadi kenaikan sebesar Rp18.712.964.732,64 atau 41,11%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kunjungan wisata, pelaksanaan pendataan secara periodik melalui pembentukan satgas dan evaluasi berkala, serta pelaksanaan uji petik dan pemeriksaan yang dilakukan bekerja sama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penagihan pajak;

11. Jumlah Realisasi Pendapatan PBJT Jasa Parkir Tahun 2024 sebesar Rp1.449.087.453,00 ditambah dengan Realisasi Pajak Parkir Tahun 2024 sebesar Rp176.927.675,00 menjadi Rp1.626.015.128,00, jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan PBJT Jasa parkir Tahun 2025 sebesar Rp1.612.445.039,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.570.089,00 atau 0,83%. Penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan tarif pajak daerah, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Perda tersebut, tarif Pajak Parkir yang sebelumnya sebesar 30% mengalami penurunan menjadi 10%;
12. Jumlah Realisasi Pendapatan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2024 sebesar Rp4.961.140.518,50 ditambah dengan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2024 sebesar Rp3.806.500,00 menjadi Rp4.964.947.018,50. Jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 sebesar Rp5.986.440.404,40 mengalami kenaikan sebesar Rp1.021.493.385,90 atau 20,57%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, jumlah penonton pada event MotoGP Tahun 2025 juga mengalami peningkatan sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dibandingkan Tahun 2024;
13. Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami kenaikan sebesar Rp36.450.538.450,00 atau 100% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan oleh adanya objek pajak baru yang menjadi sumber pendapatan daerah, yaitu pendapatan opsen PKB. Penambahan objek pajak tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun peraturan pendukung telah mulai berlaku pada Tahun 2024, penyesuaian teknis pengelolaan dan penganggarannya baru terimplementasi secara penuh dalam APBD Tahun 2025; dan
14. Pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami kenaikan sebesar Rp43.260.423.326,00 atau 100% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan adanya objek pajak baru yang menjadi sumber pendapatan daerah yaitu pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penambahan objek pajak baru tersebut merupakan implementasi dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun peraturan pendukung mulai berlaku di Tahun 2024, penyesuaian teknis baru terimplementasi penuh dalam APBD Tahun 2025.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Jenis Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	17.343.130.694,89	29.374.355.652,00	169,37	23.439.213.656,00
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.565.688.091,89	26.704.768.652,00	230,90	21.230.856.048,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	394.074.000,00	756.456.000,00	191,96	431.945.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	671.100.000,00	224.391.000,00	33,44	251.980.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	4.712.268.603,00	1.688.740.000,00	35,84	1.494.343.675,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	30.088.933,00
Retribusi Jasa Usaha	4.006.385.400,00	4.573.773.600,00	114,16	4.135.366.500,00
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.770.581.000,00	3.239.058.000,00	116,91	3.101.429.500,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	497.424.000,00	887.879.000,00	178,50	688.364.000,00
• Retribusi Tempat Pelelangan	67.000.000,00	0,00	0,00	0,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	64.240.000,00	15.988.000,00	24,89	19.448.000,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	237.600.000,00	132.200.000,00	55,64	156.600.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	369.540.400,00	298.648.600,00	80,82	169.525.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	4.615.370.222,00	6.549.313.248,00	141,90	3.483.943.115,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.717.486.222,00	5.199.590.376,00	139,87	2.626.981.115,00
• Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	897.884.000,00	1.349.722.872,00	150,32	856.962.000,00
Jumlah	25.964.886.316,89	40.497.442.500,00	155,97	31.058.523.271,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut.

a. Retribusi Jasa Umum

- Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami kenaikan sebesar Rp5.473.912.604,00 atau 25,78% dari Tahun 2024 sebesar Rp21.230.856.048,00 hal ini disebabkan oleh:

- Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas mengalami kenaikan sebesar Rp5.206.851.450,00 atau 34,39% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp15.141.833.150,00.

Kenaikan tersebut terutama disebabkan perubahan klasifikasi pencatatan pendapatan seiring dengan penetapan seluruh puskesmas sebagai BLUD pada Tahun 2025. Pada Tahun 2025, pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan mencakup jasa pelayanan pasien umum sebesar Rp2.959.725.050,00 serta klaim BPJS Non-Kapitasi sebesar Rp17.388.959.550,00. Sementara itu, pada Tahun 2024 realisasi

- pendapatan klaim BPJS Non-Kapitasi masih dicatat pada LLPAD sebagai pendapatan BLUD;
- b) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah mengalami penurunan sebesar Rp662.857.146,00 atau 15,79% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp4.196.741.898,00. Hal ini disebabkan penurunan angka kunjungan pasien dengan status pasien umum sebagai dampak dari pemberlakuan *Universal Healt Coverage* (UHC) pada Kabupaten Lombok Tengah, sehingga sebagian besar pasien yang dilayani oleh RSUD Praya adalah pasien PBI Daerah yang dijamin oleh BPJS Kesehatan; dan
 - c) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis mengalami kenaikan sebesar Rp929.918.300,00 atau 49,14% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.892.281.000,00. Pendapatan retribusi tersebut bersumber dari UPTD Unit Transfusi Darah (UTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan darah dari rumah sakit, baik untuk keperluan operasi, penanganan pasien penyakit kronis, maupun kondisi darurat.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami kenaikan sebesar Rp324.511.000,00 atau 75,13% dari tahun sebelumnya sebesar Rp431.945.000,00. Kenaikan tersebut disebabkan oleh optimalisasi penarikan retribusi kepada perusahaan yang membuang sampah ke TPA, peningkatan pencatatan volume sampah masuk melalui jembatan timbang, serta upaya meminimalkan tunggakan melalui penyampaian surat penagihan kepada pihak ketiga yang menunggak pembayaran retribusi.
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami penurunan sebesar Rp27.589.000,00 atau 10,95% dari tahun sebelumnya sebesar Rp251.980.000,00. Hal ini disebabkan oleh:
- a) Ketidakpatuhan pihak ketiga selaku koordinator parkir di beberapa kecamatan, khususnya Kecamatan Praya, karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah ditetapkan, sehingga realisasi setoran retribusi parkir tidak mencapai target;
 - b) Setoran dari forum kaling dan kelompok masyarakat tidak sepenuhnya disetorkan dan tidak sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan; dan
 - c) Belum tersusunnya regulasi teknis pengelolaan parkir sebagai pedoman operasional dan dasar hukum dalam pengawasan serta penindakan terhadap penyimpangan pengelolaan parkir.
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar mengalami kenaikan sebesar Rp194.396.325,00 atau sebesar 13,01% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.494.343.675,00. Hal ini disebabkan oleh:
- a) Optimalisasi pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan aplikasi yang memudahkan juru pungut untuk melakukan pengecekan jumlah pendapatan harian atas penarikan Retribusi Pelayanan Pasar; dan

- b) Adanya penyesuaian tarif atau pungutan yang dikenakan kepada para pedagang di pasar, yang diiringi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar.
- 5) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi mengalami penurunan sebesar Rp30.088.933,00 atau 100% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp30.088.933,00. Penurunan tersebut terjadi karena sejak Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika tidak lagi melakukan pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Adapun pendapatan yang tercatat pada Tahun 2024 merupakan pembayaran piutang retribusi dari tahun sebelumnya.
- b. Retribusi Jasa Usaha
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp137.628.500,00 atau 4,44% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp3.101.429.500,00, hal ini disebabkan karena:
- a) Rusunawa kembali beroperasi sejak Mei Tahun 2025 setelah dilakukan rehabilitasi dan perbaikan gedung, sehingga retribusi sewa tanah dan bangunan mengalami peningkatan; dan
- b) Pemenuhan kontribusi setoran PT Lombok Capital Ventures sesuai dengan kontrak yang di sepakati yaitu berupa sewa tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian *Point of Presence* (POP) *Container Infrastructure Internet*, Sewa Tanah di Desa Kuta Untuk Pembangunan Vila dan Sewa Kolam Renang Matra.
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan mengalami kenaikan sebesar Rp199.515.000,00 atau 28,98% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp688.364.000,00, hal ini disebabkan karena:
- a) Adanya penyesuaian tarif atau pungutan yang dikenakan kepada para pedagang di pasar grosir maupun pertokoan, kenaikan tersebut diiringi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar; dan
- b) Terdapat aplikasi yang memudahkan juru pungut untuk melakukan pengecekan jumlah pendapatan harian atas penarikan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- 3) Retribusi Rumah Potong Hewan mengalami penurunan sebesar Rp3.460.000,00 atau 17,79% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp19.448.000,00. Hal ini disebabkan oleh:
- a) Sarana dan prasarana Pasar Hewan Gerantung dan Barabali belum memadai, seperti kondisi pasar yang becek dan kotor, drainase minim, area jual beli tidak tertata, serta kurangnya papan informasi tarif retribusi;
- b) Rendahnya kesadaran peternak dalam memenuhi kewajiban pembayaran tiket/karcis masuk ternak sehingga menyulitkan petugas dalam pemungutan retribusi; dan
- c) Aktivitas jagal tidak dilakukan secara rutin, karena pemotongan hewan hanya dilakukan pada waktu tertentu dan berdasarkan pesanan.
- 4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga mengalami penurunan sebesar Rp24.400.000,00 atau 15,58% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp156.600.000,00. Penurunan penerimaan disebabkan oleh belum

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan untuk pengelolaan DTW (Daya Tarik Wisata) serta belum optimalnya pengamanan area DTW, adanya lubang tikus dan belum seluruh area DTW dipagari.

- 5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp129.123.600,00 atau 76,17% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp169.525.000,00. Kenaikan penerimaan disebabkan oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap budidaya perikanan yang didukung kondisi cuaca relatif stabil, optimalisasi pengelolaan unit produksi melalui peningkatan kapasitas dan perbaikan distribusi, serta meningkatnya kualitas dan produktivitas benih/bibit tanaman yang mendorong permintaan dari petani.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung mengalami kenaikan sebesar Rp2.572.609.261,00 atau 97,93% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.626.981.115,00. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya aktivitas usaha yang mendorong lonjakan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk fungsi usaha, khususnya pada sektor akomodasi pariwisata; dan
 - 2) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) mengalami kenaikan sebesar Rp492.760.872,00 atau 57,50% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp856.962.000,00. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja sehingga penerimaan retribusi penggunaan TKA turut meningkat.
2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah diatas telah dilandasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang merupakan pendapatan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.878.960.663,00	12.878.960.663,00	100,00	12.569.394.369,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	59.573.884,00	59.573.884,00	100,00	48.321.978,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	245.080.750,00	245.080.750,00	100,00	123.433.505,00
Jumlah	13.183.615.297,00	13.183.615.297,00	100,00	12.741.149.852,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan, anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut.
 - Pemerintah daerah telah mengeluarkan regulasi terkait dengan pemberian/pembagian dividen dan kontribusi terhadap laba bersih BUMD.
 - Pada Tahun 2025 terdapat penerimaan laba atas penyertaan modal pada Perumdam TIARA Kabupaten Lombok Tengah atas Tahun Buku 2023.
 - Rincian penerimaan atas pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.6 Rincian Realisasi Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Perumdam TIARA Loteng	245.080.750,00	245.080.750,00	100,00	123.433.505,00
PT Bank NTB Syariah	11.363.369.253,00	11.363.369.253,00	100,00	11.301.134.268,00
PD BPR NTB	1.515.591.410,00	1.515.591.410,00	100,00	1.268.260.101,00
PT Jamkrida NTB	59.573.884,00	59.573.884,00	100,00	48.321.978,00
Jumlah	13.183.615.297,00	13.183.615.297,00	100,00	12.741.149.852,00

Pendapatan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal dari:

- Bagian Laba Bersih PDAM Tirta Ardhia Rinjani Tahun Buku 2023 sebesar Rp245.080.750,00 diakui berdasarkan Laporan Keuangan *audited* PDAM Tahun Buku 2023 yaitu sebesar 10% dari laba bersih;
- Pendapatan bagian laba PT Bank NTB Syariah sebesar Rp11.363.369.253,00 diakui berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank NTB Syariah Tanggal 30 Juni 2025 dalam bentuk Akta Notaris;
- Pendapatan bagian laba PT BPR NTB sebesar Rp1.515.591.410,00 diakui berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR NTB (Perseroda) tanggal 25 Juni 2025; dan
- Pendapatan bagian laba PT Jamkrida NTB Bersaing sebesar Rp59.573.884,00 yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban PT Jamkrida NTB Syariah Tahun 2024 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2025 pada 25 Juni 2025.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jasa Giro	1.250.000.000,00	3.491.654.244,90	279,33	1.791.092.003,99
Pendapatan Bunga	1.900.000.000,00	4.414.194.118,83	232,33	2.244.946.521,53
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	3.727.861.506,67	0,00	1.817.049.169,51
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	1.113.784.566,65	0,00	758.893.603,44
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	163.127.564,05	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	969.886.417,13	0,00	795.163.493,55
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	3.363.170.504,26	0,00	906.228.284,37
Pendapatan BLUD	185.979.703.491,60	144.181.369.477,04	77,53	96.618.643.766,36
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	38.384.915,00	0,00	0,00
Jumlah	189.129.703.491,60	161.463.433.314,53	85,37	104.932.016.842,75

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut.
 - Pendapatan Jasa Giro mengalami kenaikan sebesar Rp1.700.562.240,91 atau 94,95% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.791.092.003,99. Hal ini disebabkan oleh frekuensi atau volume transaksi perbankan meningkat, baik itu transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan, atau transaksi lainnya yang melibatkan rekening giro, maka pendapatan dari biaya-biaya transaksi juga akan meningkat. Pendapatan Jasa Giro lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8 Tabel Rincian Pendapatan Jasa Giro

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	Realisasi	
Jasa Giro pada Kas Daerah	3.142.977.798,15	1.411.548.641,75
003.21.00706.00-0 (Bank NTB syariah)	3.134.972.504,11	1.410.036.258,21
161-00-0126379-2 (Bank Mandiri)	8.005.294,04	1.512.383,54
Kas Giro Pada Kas di Bendahara	295.062.575,09	320.413.885,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara Pengeluaran	242.190.382,09	245.901.584,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	Realisasi	
Rekening kas Dana BOK PKM	52.872.193,00	74.512.301,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	53.613.871,66	59.129.477,24
Jasa Giro rekening Dana Bos	53.613.871,66	59.129.477,24
Jumlah	3.491.654.244,90	1.791.092.003,99

- b. Pendapatan Bunga mengalami kenaikan sebesar Rp2.169.247.597,30 atau 96,63% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.244.946.521,53. Hal ini disebabkan oleh dana yang ditempatkan (deposito) meningkat dari tahun sebelumnya sehingga pendapatan bunga juga meningkat;
- c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1.910.812.337,16 atau 105,16% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.817.049.169,51. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penyelesaian kasus kerugian daerah, baik melalui pembayaran langsung maupun angsuran oleh pihak yang bertanggung jawab, serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan dalam penyelesaian kewajiban pengembalian kerugian daerah;
- d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain mengalami kenaikan sebesar Rp354.890.963,21 atau 46,76% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp758.893.603,44. Hal ini disebabkan karena beberapa penerimaan yang masuk ke kas daerah masih banyak yang belum bisa ditelusuri jenis pendapatannya;
- e. Pendapatan Denda Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp174.722.923,58 atau 21,97% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp795.163.493,55. Nilai denda pajak mengalami peningkatan akibat adanya wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak, termasuk wajib pajak restoran yang membayar melebihi jatuh tempo; dan
- f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar Rp2.456.942.219,89 atau 271,12% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp906.228.284,37. Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Belanja lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.9 Tabel Rincian Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	472.405.208,26
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	88.761.942,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	362.360.895,26
	Pengembalian dana bop reguler th 2023 (pendapatan dari pengembalian belanja hibah kesetaraan)	4.000.000,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD	17.282.371,00
2	Dinas Kesehatan	9.331.192,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	9.331.192,00
3	RSUD	5.534.700,00
	Pendapatan pengembalian Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.534.700,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.859.293.458,00
	pendapatan pengembalian kelebihan pembayarann gaji dan tunjangan keluarga dari PT TASPEN (pegawai pensiun)	74.755.431,00

No	Uraian	Realisasi
	Pengembalian dana Hibah Pilkada	2.783.754.019,00
	Pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja hibah kepada Pemerintah Pusat (Bawaslu)	784.008,00
5	Dinas Sosial	16.200.000,00
	pendapatan dari pengembalian belanja BLT-DBHCHT 2025 pada Dinas Sosial	16.200.000,00
6	Kecamatan Jonggat	405.946,00
	pendapatan pengembalian kelebihan pembyarann gaji dan tunjangan keluarga	405.946,00
Jumlah		3.363.170.504,26

g. Pendapatan BLUD mengalami kenaikan sebesar Rp47.562.725.710,68 atau 49,22% jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp96.618.643.766,36, dengan uraian sebagai berikut.

1) Pendapatan BLUD Tahun 2025 sebesar Rp144.181.369.477,04 terdiri atas Pendapatan BLUD Puskesmas sebesar Rp55.789.203.225,66 dan Pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp88.392.166.251,38. Pendapatan BLUD Puskesmas tersebut berasal dari Pendapatan Jasa Layanan yang bersumber dari Kapitasi BPJS sebesar Rp55.785.471.354,66 serta pendapatan Jasa Giro pada rekening Bendahara Pengeluaran BOK Puskesmas sebesar Rp3.731.871,00 yang masih mengendap di rekening Bendahara per 31 Desember 2025 dan telah dilimpahkan ke Rekening Kas Daerah pada Tahun 2026.

2) Sedangkan Pendapatan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp88.392.166.251,38 terdiri dari:

a) Pendapatan jasa layanan berupa BPJS Kesehatan sebesar Rp85.882.185.961,00 dan Jasa Raharja sebesar Rp1.060.200.999,00;

b) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain pada BLUD RSUD adalah pendapatan yang di terima oleh BLUD RSUD Praya dari hasil kerja sama dengan pihak lain dalam hal pemanfaatan aset daerah berupa pengelolaan lahan parkir sebesar Rp335.596.000,00, sewa gedung koperasi sebesar Rp8.000.000,00 serta Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp150.177.100,00;

Dalam hal kerja sama pengelolaan lahan parkir, sejak bulan April Tahun 2025 RSUD sudah tidak bekerja sama dengan Mandiri Teknologi Pratama, saat ini dengan CV Restu Mulia dengan deviden Rp18.000.000,00 per bulan. RSUD telah menerima deviden di muka senilai Rp100.000.000,00;

c) Dalam hal kerja sama sewa gedung koperasi, RSUD Praya melakukan kerja sama sewa menyewa dengan pengurus koperasi karyawan dengan nilai sewa senilai Rp4.000.000,00 per bulan; dan

d) Dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan, kerja sama ini dapat berupa penyelenggaraan pelatihan/seminar, penggunaan RS sebagai wahana pendidikan (klinik pendidikan), atau penelitian ke Perguruan Tinggi khususnya Jurusan Kedokteran dan Kesehatan lainnya (Perawat Bidan).

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.180.462.176.000,00	2.207.886.324.056,00	101,26	2.165.107.290.050,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.295.711.953,00	121.320.287.322,00	106,15	124.177.070.916,00
Jumlah	2.294.757.887.953,00	2.329.206.611.378,00	101,50	2.289.284.360.966,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Desa	176.357.457.000,00	162.209.204.800,00	91,98	185.021.712.000,00
Insentif Fiskal	7.888.237.000,00	7.888.237.000,00	100,00	23.708.776.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	179.123.616.000,00	177.896.979.100,00	99,32	132.877.850.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.334.314.435.000,00	1.375.586.130.050,00	103,09	1.248.441.289.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	482.778.431.000,00	484.305.773.106,00	100,32	575.057.663.050,00
Jumlah	2.180.462.176.000,00	2.207.886.324.056,00	101,26	2.165.107.290.050,00

Penjelasan:

1. Dana Desa yang diterima pada Tahun 2025 sebesar Rp162.209.204.800,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 kemudian di ubah dengan PMK Nomor 81 Tahun 2025 tentang rincian insentif setiap desa Tahun 2025;
2. Insentif Fiskal yang diterima pada Tahun 2025 sebesar Rp7.888.237.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025, dan disesuaikan dengan terbitnya KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

3. Rincian Saldo Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Saldo Dana Perimbangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil	179.123.616.000,00	177.896.979.100,00	99,32	132.877.850.000,00
Dana Alokasi Umum	1.334.314.435.000,00	1.375.586.130.050,00	103,09	1.248.441.289.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	46.919.753.000,00	46.250.980.209,00	98,57	202.489.811.306,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	435.858.678.000,00	438.054.792.897,00	100,50	372.567.851.744,00
Jumlah	1.996.216.482.000,00	2.037.788.882.256,00	102,08	1.956.376.802.050,00

Penjelasan :

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan dengan anggaran serta realisasi tahun sebelumnya pada Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2025 antara lain dipengaruhi oleh kebijakan penetapan dan penyesuaian alokasi Transfer ke daerah yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Besaran alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Nonfisik ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025, serta disesuaikan kembali melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja APBN dan APBD.
- Rincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.887.165.000,00	5.427.083.700,00	92,19	1.558.716.000,00
DBH PPh Pasal 21	9.902.258.000,00	9.180.234.900,00	92,71	9.026.127.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	242.855.000,00	218.569.500,00	90,00	168.940.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	97.252.434.000,00	97.252.434.000,00	100,00	78.496.742.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – Landrent	6.509.000,00	6.509.000,00	100,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – <i>Royalty</i>	64.787.796.000,00	64.787.796.000,00	100,00	42.250.765.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	20.247.000,00	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.024.352.000,00	1.024.352.000,00	100,00	1.376.560.000,00
Jumlah	179.123.616.000,00	177.896.979.100,00	99,32	132.877.850.000,00

Dana Bagi Hasil yang diterima pada Tahun 2025 sebesar Rp177.896.979.100,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025, dan disesuaikan dengan terbitnya KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

- c. Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.145.182.085.000,00	1.188.548.125.000,00	103,79	1.008.515.206.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	100,00	2.400.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	38.680.241.000,00	36.585.896.050,00	94,59	28.956.609.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	93.968.417.000,00	93.968.417.000,00	100,00	108.198.288.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	54.083.692.000,00	54.083.692.000,00	100,00	94.850.184.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	5.521.002.000,00
Jumlah	1.334.314.435.000,00	1.375.586.130.050,00	103,09	1.248.441.289.000,00



Dana Alokasi Umum yang diterima pada Tahun 2025 sebesar Rp1.375.586.130.050,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025, dan disesuaikan dengan terbitnya KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

- d. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD	5.512.957.000,00	5.490.947.649,00	99,60	3.657.503.650,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	798.285.000,00	794.950.000,00	99,58	28.745.809.347,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	429.638.000,00	423.343.428,00	98,53	28.802.010.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	3.235.282.907,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler – KB	502.452.000,00	445.750.000,00	88,71	2.074.731.500,00
DAK Fisik - Bidang Pertanian – Penugasan - Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	29.536.294.000,00
DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan -Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.054.848.775,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	5.468.033.900,00
DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan	0,00	0,00	0,00	13.537.563.000,00
DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler	12.824.869.000,00	12.752.483.000,00	99,44	12.760.463.000,00
DAK Fisik - Bidang Sanitasi – Reguler	0,00	0,00	0,00	10.018.592.000,00
DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan	0,00	0,00	0,00	7.839.024.000,00
DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	2.344.845.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Sistem Kesehatan	26.851.552.000,00	26.343.506.132,00	98,11	52.414.810.227,00
Jumlah	46.919.753.000,00	46.250.980.209,00	98,57	202.489.811.306,00

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada Tahun 2025 sebesar Rp46.250.980.209,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025, dan disesuaikan dengan terbitnya KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik - BOS Reguler	114.029.120.000,00	113.977.167.310,00	99,95	116.036.717.040,00
DAK Non Fisik - BOS Kinerja	3.545.250.000,00	3.545.250.000,00	100,00	3.605.000.000,00
DAK Non Fisik - TPG PNSD	220.584.615.000,00	222.886.305.200,00	101,04	165.611.536.000,00
DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	2.704.750.000,00	2.802.250.000,00	103,60	6.566.750.000,00
DAK Non Fisik - BOP PAUD	24.670.200.000,00	24.565.475.413,00	99,58	25.779.531.000,00
DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	5.949.800.000,00	5.903.402.000,00	99,22	6.765.586.000,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOK	16.613.706.000,00	16.613.706.000,00	100,00	12.182.789.000,00
DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	706.030.000,00	706.030.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas	25.102.100.000,00	25.102.099.974,00	100,00	18.442.861.704,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOKB	9.891.011.000,00	9.891.011.000,00	100,00	9.655.535.000,00
DAK Non Fisik - PK2UKM	0,00	0,00	0,00	612.881.000,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0,00	0,00	0,00	1.449.970.000,00
DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	417.035.000,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	400.660.000,00	100,00	342.000.000,00
DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.476.230.000,00	6.476.230.000,00	100,00	3.126.900.000,00
DAK Non Fisik - Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.525.600.000,00	3.525.600.000,00	100,00	1.972.760.000,00
DAK Non Fisik - Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	909.606.000,00	909.606.000,00	100,00	0,00
Jumlah	435.858.678.000,00	438.054.792.897,00	100,50	372.567.851.744,00

Penjelasan:

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada Tahun 2025 sebesar Rp438.054.792.897,00 telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran

2025, dan disesuaikan dengan terbitnya KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah–LRA Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	114.141.711.953,00	121.166.287.322,00	106,15	124.177.070.916,00
Bantuan Keuangan	154.000.000,00	154.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	114.295.711.953,00	121.320.287.322,00	106,15	124.177.070.916,00

Penjelasan:

1. Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.616.953.084,00	2.105.631.778,00	16,69	21.253.972.468,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	2.743.177.851,00	0,00	26.805.188.548,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	54.278.492.019,00	70.153.037.189,00	129,25	31.146.940.872,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	72.724.255,00	80.204.575,00	110,29	85.826.522,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	47.173.542.595,00	46.084.235.929,00	97,69	44.885.142.506,00
Jumlah	114.141.711.953,00	121.166.287.322,00	106,15	124.177.070.916,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-143 Tahun 2025 tentang Alokasi Definitif dan Triwulan IV (Desember) Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok kepada kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024, terdapat kekurangan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp12.616.953.084,00 per 31 Desember 2024. Kekurangan tersebut telah disalurkan pada Tahun 2025 dan sebelumnya telah dicatat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2024 sebagai Piutang Transfer Antar Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-60 Tahun 2026 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Triwulan IV dan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak untuk Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan sebesar Rp111.045.981.205,00. Sampai dengan Tahun 2025 telah disalurkan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp121.166.287.322,00, termasuk pembayaran piutang Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 sebesar Rp12.616.953.084,00, sehingga realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 sebesar Rp108.549.334.238,00. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan penyaluran sebesar Rp2.496.646.967,00 (Rp111.045.981.205,00 - Rp108.549.334.238,00) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.474.260.094,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp22.386.873,00. Kekurangan tersebut telah dicatat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2025 sebagai Piutang Transfer Antar Daerah.

- b. Terdapat pelampauan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp70.153.037.189,00 atau 129,25% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp54.278.492.019,00. Hal ini disebabkan pada Tahun 2025 terdapat pembayaran piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp13.334.175.496,00 yang disalurkan pada 18 Maret 2025 sebesar Rp5.164.794.372,00 dan 21 Maret 2025 sebesar Rp3.004.586.752,00;
 - c. Terdapat pelampauan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp80.204.575,00 atau 110,29% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp72.724.255,00. Hal ini disebabkan pada Tahun 2025 terdapat pembayaran piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp7.404.426,00 yang disalurkan pada 21 Maret 2025
2. Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	154.000.000,00	154.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	154.000.000,00	154.000.000,00	100,00	0,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 disebabkan pada Tahun 2025 terdapat realisasi terhadap bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi berupa bantuan keuangan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang diperkuat pada Tahun 2025-2026, terutama untuk penguatan ekonomi desa dengan nilai sebesar Rp154.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 100.3.3.1.616 Tahun 2025 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Kabupaten/Kota untuk Biaya Notaris Pemebentukan Akta Pendirian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang sah

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	302.000.000,00	135.871.200,00	44,99	266.910.500,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00	109.048.996.288,00
Jumlah	26.626.521.293,00	26.460.392.493,00	99,38	109.315.906.788,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	302.000.000,00	135.871.200,00	44,99	266.910.500,00
Jumlah	302.000.000,00	135.871.200,00	44,99	266.910.500,00

Penjelasan:

1. Terdapat Sumbangan Pihak Ketiga/sejenis pada Dinas Pertanian sebesar Rp107.871.200,00 yang bersumber dari:
 - a. Sumbangan pihak ketiga melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Djarum atau Djarum Foundation sebagai bentuk dukungan dan komitmen dalam pembangunan daerah sebesar Rp67.871.200,00;

- b. Sumbangan pihak ketiga melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Alliance One Indonesia (AOI) dalam bentuk infrastruktur air bersih untuk masyarakat dan petani mitra sebesar Rp10.000.000,00;
- c. Sumbangan Pihak Ketiga melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Sadhana Arif Nusa di antaranya berupa pembelian tembakau oven dan rajangan dari petani lokal, yang bertindak sebagai pembina/mitra sebesar Rp30.000.000,00; dan
2. Terdapat kontribusi dari Koperasi Usaha Kecil Menengah yang berada di wilayah Lombok Tengah berupa Dana Pembangunan Daerah Kerja (PDK) Koperasi sebesar Rp28.000.000,00.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00	109.048.996.288,00
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	34.759.393.827,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00	74.289.602.461,00
Jumlah	26.324.521.293,00	26.324.521.293,00	100,00	109.048.996.288,00

Penjelasan:

1. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP mengalami penurunan sebesar Rp34.759.393.827,00 atau 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp34.759.393.827,00. Pada Tahun 2025 seluruh puskesmas sudah ditetapkan menjadi BLUD sehingga Pendapatan Dana Kapitasi JKN diakui dan dicatat langsung sebagai pendapatan BLUD (pendapatan jasa layanan), bukan lagi sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan). Dana ini masuk dalam rekening BLUD dan digunakan langsung untuk operasional serta Jasa Pelayanan.
2. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu bara mengalami penurunan sebesar Rp47.965.081.168,00 atau 64,56% dibandingkan dengan Tahun 2024.

Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara merupakan pembayaran bersih izin usaha pertambangan khusus-operasi produksi (IUPK-OP) PT Amman Nusa Tenggara kepada Pemerintah Provinsi NTB masing-masing kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat tahun buku 2024 didasarkan pada

Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PT Amman Nusa Tenggara pada hari Senin 5 Mei 2025. Pada 1 Agustus 2025 PT AMNT melakukan pelimpahan ke RKUD Kabupaten Lombok Tengah senilai 1.597.071 USD atau setara dengan Rp26.324.521.293,00.

5.1.2 BELANJA DAERAH

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Belanja

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	2.175.322.200.460,91	2.109.729.193.164,29	96,98	1.978.538.947.668,32
Belanja Modal	361.992.972.794,03	345.144.760.255,60	95,35	283.920.793.925,66
Belanja Tak Terduga	19.556.796.096,12	8.959.925.740,00	45,81	8.838.353.947,00
Belanja Transfer	368.330.208.078,19	350.440.769.929,00	95,14	346.298.032.584,00
Jumlah	2.925.202.177.429,25	2.814.274.649.088,89	96,21	2.617.596.128.124,98

5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	1.308.876.185.400,60	1.275.806.131.204,38	97,47	1.156.476.918.161,76
Belanja Barang dan Jasa	793.214.912.805,31	760.945.163.861,91	95,93	715.146.946.996,56
Belanja Bunga	9.817.569.753,00	9.817.569.753,00	100,00	11.302.707.488,00
Belanja Hibah	62.657.532.502,00	62.533.928.345,00	99,80	95.072.375.022,00
Belanja Bantuan Sosial	756.000.000,00	626.400.000,00	82,86	540.000.000,00
Jumlah	2.175.322.200.460,91	2.109.729.193.164,29	96,98	1.978.538.947.668,32

Komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 digambarkan dalam bentuk diagram dibawah ini.



Rekapitulasi Belanja operasi, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 2. Rekapitulasi Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025**.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	780.338.966.465,10	771.833.417.891,00	98,91	734.793.209.114,00
Belanja Gaji Pokok ASN	575.854.948.752,38	573.986.235.104,00	99,68	555.623.383.693,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	57.476.311.600,32	57.321.313.917,00	99,73	55.435.105.024,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.746.170.772,00	5.691.520.000,00	99,05	5.934.487.495,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	30.695.623.798,00	30.663.935.299,00	99,90	34.013.916.514,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.664.448.313,00	14.572.896.482,00	99,38	12.869.074.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	33.415.796.554,20	33.339.892.700,00	99,77	31.940.260.280,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.247.255.931,46	3.081.414.296,00	94,89	938.089.394,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.821.797,71	7.406.628,00	68,44	7.776.116,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	48.470.359.377,00	48.462.725.663,00	99,98	33.566.410.514,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.470.000.823,00	1.176.519.450,00	80,04	1.116.176.520,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.362.862.430,04	3.529.558.352,00	65,81	3.348.529.564,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.924.366.315,99	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	403.939.851.816,55	396.770.130.138,88	98,23	112.907.215.219,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	121.954.672.141,93	120.331.773.981,88	98,67	112.907.215.219,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	281.985.179.674,62	276.438.356.157,00	98,03	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	244.890.528.535,56
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	5.576.464.025,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	976.135.753,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	200.766.596.770,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	7.970.625.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	28.741.362.987,56
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	854.544.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.320.200.722,00	26.963.662.691,00	98,69	23.759.407.930,00
Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.094.625.000,00	98,24	1.112.580.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	121.323.510,00	112.070.700,00	92,37	119.443.800,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	139.915.440,00	133.832.160,00	95,65	140.494.800,00
Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	93.712.500,00	98,12	95.340.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.604.677.000,00	1.566.652.500,00	97,63	1.613.241.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	143.967.600,00	136.233.300,00	94,63	120.155.700,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.132.000.000,00	6.111.000.000,00	99,66	6.300.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.545.000.000,00	1.522.500.000,00	98,54	1.039.500.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	794.331.004,00	660.878.134,00	83,20	227.728.004,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	43.374.651,00	23.256.997,00	53,62	24.381.986,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.559.896,00	2.249.100,00	63,18	2.288.160,00
Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.679.776,00	6.747.300,00	63,18	6.864.480,00
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.954.064.000,00	6.929.340.000,00	99,64	5.602.000.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.598.224.940,00	8.567.310.000,00	99,64	6.912.500.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	19.314.905,00	3.255.000,00	16,85	442.890.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	363.578.691,00	333.334.680,00	91,68	168.309.702,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	120.000.000,00	101.400.000,00	84,50	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	22.932.000,00	16.335.342,00	71,23	7.644.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	186.834.315,00	182.520.000,00	97,69	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	13.111.040,00	13.111.040,00	100,00	7.531.680,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14.044.844,00	14.014.526,00	99,78	253.286,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	812,00	812,00	100,00	736,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.503.680,00	5.503.680,00	100,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	288.000,00	112.320,00	39,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	864.000,00	336.960,00	39,00	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	847.800.000,00	826.800.000,00	97,52	791.000.000,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	247.800.000,00	226.800.000,00	91,53	231.000.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	560.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	96.065.787.705,95	79.078.785.803,50	82,32	39.167.247.661,20
Belanja Pegawai BLUD	96.065.787.705,95	79.078.785.803,50	82,32	39.167.247.661,20
Jumlah	1.308.876.185.400,60	1.275.806.131.204,38	97,47	1.156.476.918.161,76

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut.
 - a. Penambahan pegawai melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.641 orang tenaga honorer yang dilaksanakan pada Juli Tahun 2025, sehingga berdampak pada meningkatnya Belanja Pegawai Tahun 2025;
 - b. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi Guru PNSD yang merupakan kewajiban Tahun Anggaran 2024 namun direalisasikan pembayarannya pada Tahun 2025; dan
 - c. Kenaikan pangkat dan/atau golongan pegawai yang berdampak pada peningkatan hak keuangan pegawai.
2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Seiring dengan pemutakhiran klasifikasi dan kodifikasi rekening, pada Tahun Anggaran 2025 belanja tersebut telah diklasifikasikan sebagai rincian objek (level lima) dari rekening Belanja Tambahan Penghasilan ASN, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 masih dicatat sebagai objek belanja (level empat) yang berdiri sendiri dan belum merupakan bagian dari rekening Belanja Tambahan Penghasilan ASN.
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dapat di rincikan sebagai berikut.

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	281.985.179.674,62	276.438.356.157,00	98,03	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	110.000.000,00	75.963.742,00	69,06	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	18.054.264,68	12.467.895,00	69,06	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	243.375,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	249.561.741,03	198.015.126,00	79,35	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.194.823.031,26	421.448.290,00	35,27	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	2.075.000.000,00	1.857.927.198,00	89,54	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bangunan				
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.926.765.913,77	6.475.902.331,00	93,49	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsean Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.825.976.897,68	1.327.837.855,00	72,72	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsean Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.983.641.750,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	19.703.700,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	33.555.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	235.313.430,20	82.464.701,00	35,04	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	121.080.000,00	102.565.000,00	84,71	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	24.871.200,00	14.595.840,00	58,69	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.212.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.880.000,00	4.158.000,00	35,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	18.477.020,00	4.699.000,00	25,43	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	185.874.311,00	163.728.703,00	88,09	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-	44.894.200,00	39.643.000,00	88,30	0,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Perizinan Tertentu- Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)				
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	256.934.103.232,00	256.804.999.140,00	99,95	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.503.750.000,00	3.671.250.000,00	81,52	0,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.458.648.608,00	5.178.290.336,00	94,86	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
Jumlah	281.985.179.674,62	276.438.356.157,00	98,03	0,00

3. Atas realisasi Realisasi Belanja Pegawai tersebut, terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN yang seharusnya dipulihkan senilai Rp309.239.512,79. Sampai dengan tanggal 22 Maret 2026, telah dilakukan pemulihan ke Kas Daerah senilai Rp180.177.733,91, atas:
 - a. kelebihan pembayaran tunjangan anak dan beras senilai Rp270.576.212,79;
 - b. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan atas PNS yang telah pensiun dan mutasi keluar senilai Rp12.824.300,00; dan
 - c. kelebihan pembayaran tunjangan umum dan/atau tunjangan fungsional serta tunjangan jabatan selama masa cuti besar dengan total nilai senilai Rp25.839.000,00.
4. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 dimasing-masing SKPD dapat dilihat pada **lampiran 2. Rekapitulasi Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025.**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	364.081.265.073,89	347.728.722.839,00	95,51	319.198.797.580,50
Belanja Barang Pakai Habis	363.848.305.947,89	347.516.383.403,00	95,51	315.652.987.630,50
Belanja Barang Tak Pakai Habis	14.070.762,00	8.834.800,00	62,79	0,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	218.888.364,00	203.504.636,00	92,97	3.545.809.950,00
Belanja Jasa	240.915.067.427,50	228.869.964.785,00	95,00	197.200.408.855,64
Belanja Jasa Kantor	109.557.725.042,60	99.870.683.870,00	91,16	86.915.330.688,64
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	110.166.088.868,42	109.542.643.349,00	99,43	91.281.377.121,00
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan	3.335.494.975,00	3.113.340.018,00	93,34	3.205.832.068,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Mesin				
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.025.765.000,00	1.743.802.600,00	86,08	1.994.815.076,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	121.064.963,00	119.599.375,00	98,79	31.271.164,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.544.090.228,48	2.500.439.100,00	98,28	2.443.832.600,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	776.783.750,00	622.152.410,00	80,09	346.967.180,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	200.000.000,00	50.000.000,00	25,00	25.290.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.188.054.600,00	11.307.304.063,00	92,77	10.949.692.958,00
Belanja Pemeliharaan	4.666.188.386,00	4.543.906.307,00	97,38	5.067.068.633,83
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.958.001.931,00	3.837.366.552,00	96,95	2.915.280.898,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	683.186.455,00	682.388.755,00	99,88	1.375.474.459,83
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.000.000,00	24.151.000,00	96,60	776.313.276,00
Belanja Perjalanan Dinas	21.228.613.553,00	19.071.847.487,00	89,84	29.717.328.031,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.198.912.983,00	19.047.311.939,00	89,85	29.717.328.031,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	29.700.570,00	24.535.548,00	82,61	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.313.712.260,00	4.237.766.500,00	98,24	25.260.797.478,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.005.712.260,00	3.929.766.500,00	98,10	25.199.750.078,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	308.000.000,00	308.000.000,00	100,00	61.047.400,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	78.134.638.811,72
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	78.134.638.811,72
Belanja Barang dan Jasa BOSP	72.538.809.673,71	76.162.621.892,00	105,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	68.938.809.673,71	75.812.195.792,00	109,97	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	3.000.000.000,00	299.400.100,00	9,98	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesenian	600.000.000,00	51.026.000,00	8,50	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.471.256.431,21	80.330.334.051,91	93,99	60.567.907.605,87
Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.471.256.431,21	80.330.334.051,91	93,99	60.567.907.605,87
Jumlah	793.214.912.805,31	760.945.163.861,91	95,93	715.146.946.996,56

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya di sebabkan terdapat perubahan klasifikasi dan kodefikasi Belanja dari Belanja Barang dan Jasa BOS menjadi Belanja Barang dan Jasa BOSP, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
2. Dari Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP - BOS terdapat pelampauan realisasi sebesar Rp75.812.195.792,00 atau 109,97% dari anggaran sebesar Rp68.938.809.673,71. Hal ini disebabkan dalam anggaran perubahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya memprioritaskan tambahan alokasi Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD. Perencanaan masing-masing Satdik yang telah terekam dalam ARKAS pada awal tahun tidak diakomodir dalam anggaran perubahan. Selain itu, anggaran perubahan juga tidak memperhitungkan perubahan perencanaan belanja Satdik yang direkam dalam ARKAS untuk Semester II karena adanya keterlambatan sekolah dalam menutup Buku Kas Umum (BKU) Semester I (Juni) mengakibatkan perencanaan Semester II melewati batas waktu (*deadline*) usulan perubahan di ARKAS. Atas keterlambatan tersebut, Bidang SD dan SMP tidak memiliki dasar valid untuk mengusulkan revisi anggaran ke Bagian Perencanaan sehingga DPPA tidak mencerminkan kebutuhan senyatanya di lapangan.
3. Terdapat serapan anggaran yang rendah terhadap Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD sebesar Rp299.400.100,00 atau 9,98% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 serta Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan sebesar Rp51.026.000,00 atau 8,50% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00. Hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan dalam pengalokasian anggaran belanja terkait yang di anggarkan pada Belanja Hibah BOSP BOP PAUD dan Belanja Hibah BOSP BOP Kesetaraan . Kondisi ini terjadi karena terdapat sekolah-sekolah yang telah berubah status dari sekolah swasta menjadi sekolah negeri namun pada Aplikasi Dapodik Kemendikbud belum diperbarui dan masih tercatat sebagai sekolah swasta.

Tabel 5.28 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025

No	Jenis Belanja BOSP	Tahap	Jenjang / Satuan	Realisasi (Rp)
A. BOSP – BOS Reguler				
1	BOS Reguler	Tahap 1	SD Negeri	31.045.656.309,00
2	BOS Reguler	Tahap 2	SD Negeri	26.938.933.350,00
3	BOS Reguler	Tahap 1	SMP Negeri	8.372.647.506,00
4	BOS Reguler	Tahap 2	SMP Negeri	7.288.462.277,00
B. BOSP – BOS Kinerja				
1	BOS Kinerja	Tahap 2	SD Negeri	1.606.719.950,00
2	BOS Kinerja	Tahap 2	SMP Negeri	559.776.400,00
C. BOSP – BOP PAUD Reguler				
1	BOP PAUD Reguler	Tahap 1	PAUD Negeri	160.359.000,00
2	BOP PAUD Reguler	Tahap 2	PAUD Negeri	139.041.100,00
D. BOSP – BOP Kesetaraan Reguler				
1	BOP Kesetaraan Reguler	Tahap 1	Kesetaraan Negeri	13.950.000,00
2	BOP Kesetaraan Reguler	Tahap 2	Kesetaraan Negeri	10.885.000,00
E. BOSP – BOP Kesetaraan Kinerja				

No	Jenis Belanja BOSP	Tahap	Jenjang / Satuan	Realisasi (Rp)
1	BOP Kesetaraan Kinerja	Tahap 1	Kesetaraan Negeri	13.950.000,00
2	BOP Kesetaraan Kinerja	Tahap 2	Kesetaraan Negeri	10.885.000,00

4. Atas realisasi Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut, terdapat Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya dipulihkan senilai Rp1.379.186.415,00. Sampai dengan tanggal 22 Maret 2026, telah dilakukan pemulihan ke Kas Daerah senilai Rp848.146.6613,00 atas:
 - a. kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban belanja BPH pada empat SKPD senilai Rp249.952.000,00;
 - b. kelebihan pembayaran pertanggungjawaban Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada empat SKPD sebesar Rp110.154.000,00;
 - c. kekurangan volume pekerjaan atas 28 paket pekerjaan pada empat SKPD senilai Rp100.485.000,00;
 - d. ketidaktepatan pembebanan biaya umum atas tujuh paket pekerjaan senilai Rp8.289.000,00;
 - e. Kelebihan Pembayaran Bimbingan Teknis (Bimtek) Sebesar Rp30.860.704,00;
 - f. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah Sebesar Rp53.260.011,00;
 - g. Belanja BOSP tidak sesuai kondisi sebenarnya senilai Rp692.656.000,00;
 - h. kelebihan pembayaran tersebut ditemukan pada BLUD RSUD Praya dan dua BLUD Puskesmas seluruhnya senilai Rp95.594.000,00; dan
 - i. selisih Belanja Makan dan Minum Pasien pada Puskesmas Puyung senilai Rp22.312.200,00 dan Puskesmas Mantang senilai Rp15.623.500,00.
5. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 2. Rekapitulasi Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025.**

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bunga Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Bunga

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	9.449.712.191,00	9.449.712.191,00	100,00	11.302.707.488,00
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	367.857.562,00	367.857.562,00	100,00	0,00
Jumlah	9.817.569.753,00	9.817.569.753,00	100,00	11.302.707.488,00

Penjelasan:

1. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar Rp9.449.712.191,00 merupakan pembayaran bunga atas pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pembayaran tersebut didasarkan pada Berita Acara Rekonsiliasi Kewajiban Pinjaman Reguler dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Tahun 2021 (PEN APBD Tahun 2021) Kabupaten Lombok Tengah Nomor BA-17/SMI/DPPPP/DPPU1/2024. Pembayaran bunga pinjaman dimaksud dilakukan melalui mekanisme pemotongan langsung atas Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Umum oleh pemerintah pusat.
2. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) BUMN Jangka Pendek sebesar Rp367.857.562,00 merupakan pembayaran bunga atas pinjaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kepada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI) dengan nilai pokok pinjaman sebesar Rp23.443.793.589,00.
Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu tiga bulan untuk setiap kali pencairan, dengan tingkat imbal hasil setara suku bunga sebesar 8,1% yang dibayarkan di muka pada saat realisasi pencairan pinjaman. Pinjaman dimaksud diikat melalui Perjanjian Nomor 04/017.3/SF.BPJS/ACB Denpasar tentang Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah tertanggal 30 Desember 2024.
3. Berikut adalah tabel estimasi nilai total kewajiban pokok dan bunga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan masa pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah terakhir yang disepakati dengan diperhitungkan langsung terhadap tagihan selama Tahun 2025.

Tabel 5.30 Tabel Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat*(dalam Rupiah)*

Tanggal Periode	Kewajiban Pokok	Kewajiban Bunga
31/12/24	2.598.391.445,00	878.848.974,00
31/01/25	2.598.391.445,00	864.998.826,00
29/02/25	2.598.391.445,00	768.779.452,00
31/03/25	2.598.391.445,00	837.298.530,00
30/04/25	2.598.391.445,00	796.885.531,00
31/05/25	2.598.391.445,00	809.598.234,00
30/06/25	2.598.391.445,00	770.078.792,00
31/07/25	2.598.391.445,00	781.897.938,00
31/08/25	2.598.391.445,00	768.047.790,00
30/09/25	2.598.391.445,00	729.868.685,00
31/10/25	2.598.391.445,00	740.347.493,00
30/11/25	2.598.391.445,00	703.061.946,00
Total	31.180.697.340,00	9.449.712.191,00

4. Belanja bunga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selama periode pinjaman, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Kewajiban Pinjaman Reguler dan Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Daerah Tahun 2021 (PEN 2021) Nomor BA-17/SMI/DPPPP/DPPU1/2024.
5. Atas bunga pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) periode bulan Desember Tahun 2025 di

kenakan pada saat pemotongan langsung DAU pada Januari Tahun 2026 sehingga tidak terdapat pengakuan bunga pinjaman pada Laporan Neraca Kabupaten Lombok Tengah.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	28.476.375.550,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	28.476.375.550,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.650.000.000,00	14.520.000.000,00	99,11	16.005.892.500,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.660.000.000,00	6.560.000.000,00	98,50	7.380.892.500,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.240.000.000,00	7.210.000.000,00	99,59	7.950.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	675.000.000,00
Belanja Hibah kepada Koperasi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	325.000.000,00	325.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.002.532.502,00	1.002.532.502,00	100,00	904.086.372,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.002.532.502,00	1.002.532.502,00	100,00	904.086.372,00
Belanja Hibah Dana BOSP	47.005.000.000,00	47.011.395.843,00	100,01	49.686.020.600,00
Belanja Hibah Dana BOSP – BOS	22.400.000.000,00	16.989.818.430,00	75,85	17.140.903.600,00
Belanja Hibah Dana BOSP - BOP PAUD	19.655.200.000,00	24.191.075.413,00	123,08	25.779.531.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP - BOP Kesetaraan	4.949.800.000,00	5.830.502.000,00	117,79	6.765.586.000,00
Jumlah	62.657.532.502,00	62.533.928.345,00	99,80	95.072.375.022,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut.

- a. Terdapat penurunan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp32.538.446.677,00 atau 34,22% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp95.072.375.022,00. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 terdapat pemberian hibah uang kepada Pemerintah Pusat-hibah uang yang diberikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum, untuk dukungan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;
 - b. Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebesar Rp16.989.818.430,00 adalah Realisasi Belanja Hibah untuk Sekolah Swasta untuk jenjang SD tahap 1 dan 2 masing-masing sebesar Rp2.342.710.000,00 dan Rp2.252.710.000,00 sedangkan untuk jenjang SMP tahap 1 dan 2 masing-masing sebesar Rp6.441.180.000,00 dan Rp5.953.218.430,00;
 - c. Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp24.191.075.413 adalah Realisasi Belanja Hibah BOP-PAUD Swasta tahap 1 dan tahap 2 masing-masing sebesar Rp12.141.900.000,00 dan Rp12.049.175.413,00;
 - d. Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp5.830.502.000,00 adalah Realisasi Belanja Hibah BOP-Kesetaraan Swasta tahap 1 dan tahap 2 masing-masing sebesar Rp3.102.719.000,00 dan Rp2.727.783.000,00;
2. Terdapat pelampauan terhadap Realisasi Belanja Hibah BOSP-BOP PAUD dan BOP-Kesetaraan jika di bandingkan dengan masing-masing anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini disebabkan oleh kesalahan penempatan antara Anggaran Belanja Hibah BOP PAUD maupun BOP-Kesetaraan dengan Belanja Barang dan Jasa BOP-PAUD maupun BOP-Kesetaraan yang berstatus sekolah negeri dan swasta. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa satuan pendidikan PAUD dan pendidikan kesetaraan yang sebelumnya berstatus swasta telah berubah menjadi negeri, namun pada aplikasi DAPODIK masih tercatat sebagai sekolah swasta.
 3. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik**

(dalam Rupiah)

Partai Politik	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Gerindra	124.742.552,00	124.742.552,00	100,00	127.552.938,00
Partai Golkar	116.988.781,00	116.988.781,00	100,00	123.768.034,33
Partai Kebangkitan Bangsa	113.027.423,00	113.027.423,00	100,00	104.159.687,67
Partai Keadilan Sejahtera	110.535.082,00	110.535.082,00	100,00	91.878.190,67
Partai Persatuan Pembangunan	110.518.992,00	110.518.992,00	100,00	96.149.549,00
Partai Demokrat	103.888.303,00	103.888.303,00	100,00	92.479.420,33
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	96.564.135,00	96.564.135,00	100,00	70.873.768,00

Partai Politik	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Bulan Bintang	42.385.887,00	42.385.887,00	100,00	54.363.283,00
PDI-P	41.822.737,00	41.822.737,00	100,00	38.307.608,33
Partai Amanat Nasional	40.879.863,00	40.879.863,00	100,00	40.001.349,00
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	25.246.819,00	25.246.819,00	100,00	39.241.901,00
Partai Persatuan Indonesia	42.820.317,00	42.820.317,00	100,00	14.273.439,00
Partai Gelombang Rakyat	33.111.611,00	33.111.611,00	100,00	11.037.203,67
Jumlah	1.002.532.502,00	1.002.532.502,00	100,00	904.086.372,00

4. Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar, dan/atau Menengah selama Tahun 2025 yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No 8/P/2024 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional, Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2025.
5. Terdapat beberapa Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban per 31 Desember 2025 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp3.900.000.000,00 serta kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp80.000.000,00

Rincian belanja hibah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **lampiran 3a-3f Belanja Hibah Tahun Anggaran Tahun 2025**.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	756.000.000,00	626.400.000,00	82,86	540.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	756.000.000,00	626.400.000,00	82,86	540.000.000,00
Jumlah	756.000.000,00	626.400.000,00	82,86	540.000.000,00

Penjelasan:

1. Terjadi kenaikan realisasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp86.400.000,00 atau 16,00% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp540.000.000,00. Kenaikan tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah penerima bantuan sosial dari 300 orang pada Tahun 2024 menjadi 354 orang pada Tahun 2025, dengan nominal bantuan tetap sebesar Rp300.000,00 per bulan. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 tersebut merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada buruh pabrik rokok; dan

2. Pemberian Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 2025.

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Tanah	1.270.016.600,00	1.261.109.152,00	99,30	0,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	104.694.908.450,31	95.235.979.101,00	90,97	91.727.573.671,12
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	148.501.231.866,77	145.657.436.123,60	98,09	142.704.330.558,54
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.394.793.044,12	89.360.624.558,00	97,77	38.965.281.078,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	14.260.692.984,00	13.629.611.321,00	95,57	10.513.658.618,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	1.871.329.848,83	0,00	0,00	9.950.000,00
Jumlah	361.992.972.794,03	345.144.760.255,60	95,35	283.920.793.925,66

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 serta persentase capaian realisasinya dimasing-masing SKPD dapat dilihat pada LRA **Lampiran 2. Rekapitulasi Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025.**

5.1.2.2.1 Belanja Modal – Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal-Tanah Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal-Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Tanah

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Tanah	1.270.016.600,00	1.261.109.152,00	99,30	0,00
Belanja Modal Tanah Persil	1.270.016.600,00	1.261.109.152,00	99,30	0,00
Jumlah	1.270.016.600,00	1.261.109.152,00	99,30	0,00

Penjelasan:

Sebab tingginya capaian realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena Pada Tahun 2024 tidak terdapat pengadaan tanah, sedangkan Tahun 2025 terdapat Realisasi Belanja Modal Tanah senilai Rp1.261.109.152,00 berupa pembebasan Tanah untuk Pembangunan Puskesmas di Desa Pengembur Kecamatan Pujut

seluas 3.000 M² senilai Rp1.140.000.000 dan Pembayaran Ganti Kerugian atas pohon yang berada dalam batas pagar keliling senilai Rp24.292.000,00 serta kerugian non fisik sebesar Rp96.817.152,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal-Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal-Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	1.217.699.392,00	1.191.421.648,00	97,84	5.927.141.139,00
Belanja Modal Alat Bantu	1.217.699.392,00	1.191.421.648,00	97,84	5.927.141.139,00
Belanja Modal Alat Angkutan	14.974.026.070,00	14.595.459.782,00	97,47	9.264.109.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	14.974.026.070,00	14.595.459.782,00	97,47	9.264.109.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	298.135.870,00	286.290.000,00	96,03	22.780.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	8.320.500,00	7.475.000,00	89,84	0,00
Belanja Modal Alat Ukur	289.815.370,00	278.815.000,00	96,20	22.780.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	206.290.108,00	145.822.450,00	70,69	25.815.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	206.290.108,00	145.822.450,00	70,69	25.815.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.457.493.308,50	8.959.077.905,00	94,73	6.380.373.626,00
Belanja Modal Alat Kantor	975.588.103,00	860.725.697,00	88,23	1.051.582.526,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.368.084.599,50	7.990.777.308,00	95,49	5.268.241.100,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	113.820.606,00	107.574.900,00	94,51	60.550.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	705.950.091,00	692.119.400,00	98,04	871.162.505,00
Belanja Modal Alat Studio	575.928.070,00	563.190.650,00	97,79	841.162.505,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	130.022.021,00	128.928.750,00	99,16	30.000.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.747.113.878,00	22.929.053.040,00	96,56	21.304.161.241,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	13.030.006.878,00	12.459.815.858,00	95,62	12.913.749.004,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	10.717.107.000,00	10.469.237.182,00	97,69	8.390.412.237,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	14.305.835.054,00	14.130.409.319,00	98,77	20.449.453.613,00
Belanja Modal Unit Laboratorium	315.282.593,00	254.079.509,00	80,59	549.074.700,00
Belanja Modal Alat Peraga	13.989.527.596,00	13.875.309.810,00	99,18	18.462.805.913,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Praktek Sekolah				
Belanja Modal Alat	1.024.865,00	1.020.000,00	99,53	1.437.573.000,00
Laboratorium Lingkungan Hidup				
Belanja Modal Komputer	8.844.607.536,00	8.597.628.291,00	97,21	9.616.296.715,00
Belanja Modal Komputer Unit	6.072.151.448,00	5.948.736.528,00	97,97	6.783.294.320,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	2.772.456.088,00	2.648.891.763,00	95,54	2.833.002.395,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	17.809.870,00	15.231.000,00	85,52	95.741.640,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	17.809.870,00	15.231.000,00	85,52	95.741.640,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	266.933.955,00	266.532.000,00	99,85	0,00
Belanja Modal Produksi	266.933.955,00	266.532.000,00	99,85	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	41.600.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	41.600.000,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produks	0,00	0,00	0,00	1.137.000.000,00
Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produks	0,00	0,00	0,00	1.137.000.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	139.340.895,00	138.108.087,00	99,12	101.597.218,12
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	139.340.895,00	138.108.087,00	99,12	101.597.218,12
Belanja Modal Peralatan Olahraga	222.642.817,00	220.512.196,00	99,04	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	222.642.817,00	220.512.196,00	99,04	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	14.349.693.120,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	14.349.693.120,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	17.593.000.000,00	13.687.675.999,00	77,80	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	17.193.000.000,00	13.636.166.999,00	79,31	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	0,00	37.200.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	400.000.000,00	14.309.000,00	3,58	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	12.698.029.605,81	9.380.637.984,00	73,87	2.140.648.854,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	12.698.029.605,81	9.380.637.984,00	73,87	2.140.648.854,00
Jumlah	104.694.908.450,31	95.235.979.101,00	90,97	91.727.573.671,12

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut.
 - a. Pada Tahun 2025 terdapat penambahan pengadaan kendaraan dinas roda empat senilai Rp5.331.350.782,00 atau 57,54% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp9.264.109.000,00 guna mendukung operasional kegiatan.
 - b. Terdapat pembelian alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa pengadaan Skrining Antibodi *Automatic* dan alat *Immuno Assay* pada Unit Transfusi Darah, selain itu terdapat pembelian alat kesehatan lainnya berupa *Oxygen Therapy Device*/Tabung Oksigen, *Sphygmomanometer*/Tensimeter.
 - c. Terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal Komputer dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi Belanja Modal Komputer disebabkan oleh pembaruan perangkat keras dan lunak pada beberapa SKPD serta penggantian komputer lama yang sudah tidak mendukung aplikasi perkantoran guna meningkatkan efisiensi kerja, keamanan data, dan pelayanan publik.
 - d. Terdapat perubahan klasifikasi dan kodefikasi terhadap Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS menjadi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP. Perubahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
 - e. Terdapat kenaikan pada realisasi belanja modal alat produksi sebesar Rp266.532.000,00 atau 100% jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada Tahun 2025 terdapat pengadaan peralatan produksi rokok di SIHT (Sentra Industri Hasil Tembakau) dalam rangka percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri.
 - f. Terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp7.239.989.130,00 atau 338,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 2.140.648.854,00. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan melalui penggantian peralatan yang rusak serta pengadaan peralatan baru, seperti alat kesehatan, alat kedokteran gigi, alat pendingin, perangkat komputer, dan mebel.
 - g. Terdapat serapan anggaran yang rendah terhadap belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan, Reguler, dan Kesetaraan Kinerja sebesar Rp14.309.000,00 atau 3,58% dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00 yang disebabkan oleh ketidaktepatan dalam pengalokasian anggaran belanja terkait yang di anggarkan pada Belanja Hibah BOSP-BOP Kesetaraan.

Hal ini juga terjadi pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD yang realisasinya melampaui dari anggarannya yaitu sebesar Rp37.200.000,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp0,00.

Kondisi ini terjadi karena ada beberapa satuan pendidikan PAUD dan Kesetaraan yang mengalami perubahan status dari Swasta menjadi Negeri namun pada Aplikasi Dapodik Kemendikbud belum diperbarui dan masih tercatat sebagai sekolah swasta.

h. Atas realisasi Realisasi Belanja Modal - Peralatan dan Mesin tersebut, terdapat Belanja Peralatan dan Mesin yang seharusnya dipulihkan senilai Rp55.650.546,00. Sampai dengan tanggal 22 Maret 2026, telah dilakukan pemulihan ke Kas Daerah senilai Rp55.650.546,00 atas:

- 1) kekurangan volume pekerjaan atas dua paket pekerjaan pada dua SKPD senilai Rp14.038.000,00; dan
- 2) kelebihan pembayaran atas ongkos kirim atas lima paket pengadaan alat kesehatan senilai Rp41.612.546,00.

2. Rincian saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada LRA **Lampiran 2. Rekapitulasi Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025.**

5.1.2.2.3 Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal-Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal-Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal	146.810.932.068,00	144.698.624.853,60	98,56	
Bangunan Gedung				141.955.915.438,59
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	146.354.219.525,00	144.242.274.310,60	98,56	141.946.265.438,59
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	456.712.543,00	456.350.543,00	99,92	9.650.000,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	532.609.799,77	525.938.270,00	98,75	447.972.931,95
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	532.609.799,77	525.938.270,00	98,75	447.972.931,95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.157.689.999,00	432.873.000,00	37,39	300.442.188,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.157.689.999,00	432.873.000,00	37,39	300.442.188,00
Jumlah	148.501.231.866,77	145.657.436.123,60	98,09	142.704.330.558,54

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal-Gedung dan Bangunan di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut.
 - a. Terdapat kenaikan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp2.268.458.872,01 atau 1,59% dibandingkan dengan Tahun 2024 senilai Rp141.973.815.438,59. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan rehabilitasi dan peningkatan kualitas bangunan gedung tempat kerja di antaranya berupa lanjutan pembangunan Gedung Poliklinik dan Rawat Jalan pada RSUD Praya, Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah (UTD) Lombok Tengah, dan rehab

- pembangunan di beberapa puskesmas seperti Puskesmas Pengadang, Puskesmas Muncan, dan Puskesmas Pengembur;
- b. Realisasi Belanja Modal Bangunan Tempat Tinggal mengalami kenaikan sebesar Rp456.350.543,00 atau 100% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Kenaikan tersebut di sebabkan pada Tahun 2025 terdapat Pekerjaan Rehabilitasi dan biaya konsultan perencanaan atas Wisma Lombok yang berada di Jogjakarta;
 - c. Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti mengalami kenaikan sebesar Rp77.965.338,05 atau 17,40% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp447.972.931,95. Kenaikan tersebut di karenakan adanya Pembuatan Pagar Pembatas pada Taman Makam Pahlawan dan Pembatas Gedung Kantor pada Kelurahan Renteng Kecamatan Praya; dan
 - d. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD mengalami kenaikan sebesar Rp132.430.812,00 atau 44,07% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp300.442.188,00. Hal ini disebabkan adanya pekerjaan Pembangunan Puskesmas Teratak, Puskesmas Puyung, Puskesmas Bagu, dan Penataan Halaman Puskesmas Aik Mual.
 - e. Terdapat serapan anggaran yang rendah terhadap Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp432.873.000,00 atau 37,39% dari anggaran sebesar Rp1.157.689.999,00. Dari nilai anggaran sebesar Rp1.157.689.999,00 terdapat anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD RSUD sebesar Rp600.000.000,00 yang tidak dapat di realisasikan karena berupa pemeliharaan terhadap bangunan Gedung Kantor (pada rekening belanja Barang dan Jasa) , Hal ini terjadi karena ketidaktepatan anggaran dalam mengalokasikan belanja terkait. Selain itu terdapat anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD pada Puskesmas Janapria sebesar Rp115.000.000,00 yang tidak di realisasikan karena adanya perbedaan harga antara Pagu Anggaran dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang didasarkan pada harga pasar saat ini. Terdapat kenaikan harga material bangunan dan upah tenaga kerja secara nasional, sehingga nilai pagu yang direncanakan tidak lagi layak. Hal ini menyebabkan tidak adanya penyedia jasa yang mau menerima penawaran belanja gedung bangunan sesuai dengan pagu yang dimiliki Puskesmas Janapria.
 - f. Atas realisasi Realisasi Belanja Modal - Gedung dan Bangunan tersebut, terdapat Belanja Gedung dan Bangunan yang seharusnya dipulihkan senilai Rp336.388.000,00. Sampai dengan tanggal 22 Maret 2026, telah dilakukan pemulihan ke Kas Daerah senilai Rp262.908.000,00 atas kekurangan volume pekerjaan atas 17 paket pekerjaan pada lima SKPD senilai Rp336.388.000,00.
2. Rincian saldo Belanja Modal-Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 serta persentase capaian realisasinya dimasing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 2. Rekapitulasi Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025.**

5.1.2.2.4 Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal-Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal-Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	68.169.862.082,00	65.556.996.341,00	96,17	20.547.605.759,00
Belanja Modal Jalan	63.231.203.841,00	60.656.681.100,00	95,93	15.064.711.000,00
Belanja Modal Jembatan	4.938.658.241,00	4.900.315.241,00	99,22	5.482.894.759,00
Belanja Modal Bangunan Air	9.730.865.000,00	9.669.984.410,00	99,37	12.609.332.740,00
Belanja Modal Bangunan Air	9.730.865.000,00	9.669.984.410,00	99,37	12.609.332.740,00
Belanja Modal Instalasi	7.687.035.962,12	7.678.694.553,00	99,89	5.596.453.900,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.352.468.791,12	1.351.020.244,00	99,89	337.596.000,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	3.205.435.000,00	3.198.542.750,00	99,78	3.972.857.900,00
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	1.286.000.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	3.129.132.171,00	3.129.131.559,00	100,00	0,00
Belanja Modal Jaringan	708.155.000,00	705.996.398,00	99,70	211.888.679,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	708.155.000,00	705.996.398,00	99,70	211.888.679,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	5.098.875.000,00	5.748.952.856,00	112,75	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	5.098.875.000,00	5.748.952.856,00	112,75	0,00
Jumlah	91.394.793.044,12	89.360.624.558,00	97,77	38.965.281.078,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal-Jalan, Jaringan, dan Irigasi di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya
 - a. Realisasi Belanja Modal Jalan mengalami kenaikan sebesar Rp45.591.970.100,00 atau 302,64% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp15.064.711.000,00. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa pekerjaan penanganan ruas jalan panjang pemeliharaan berkala penyelenggaraa jalan Kabupaten, selain itu terdapat beberapa pekerjaan konsultan perencanaan peningkatan jalan Kabupaten, pekerjaan pembuatan jalan utama di dalam lingkungan SIHT (Sentra Industri Hasil Tembakau) dan terdapat beberapa Pekerjaan Rehabilitasi dan Sedimentasi Drainase dan signage di Kota Praya dalam rangka Penyelenggaraan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) perumahan;
 - b. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Bersih/Baku mengalami kenaikan sebesar Rp1.013.424.244,00 atau 300,18% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp337.596.000,00. Hal ini disebabkan adanya beberapa pekerjaan Pembangunan Sumur Bor di beberapa Puskesmas dalam rangka Pengembangan Fasilitas Kesehatan lainnya . selain itu terdapat pekerjaan Pembangunan Sumur Bor di dalam lingkungan SIHT (Sentra Industri Hasil Tembakau);
 - c. Realisasi Belanja Modal Instalasi Pengaman mengalami kenaikan sebesar Rp3.129.131.559,00 atau 100% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan pada Tahun 2025 terdapat pekerjaan perencanaan,

pembelian, dan pemasangan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada beberapa Puskesmas dalam rangka fasilitasi pelayanan kesehatan.

- d. Terdapat pelampauan realisasi terhadap anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp5.748.952.856,00 atau 112,75% dari anggaran sebesar Rp5.098.875.000,00. Hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan dalam mengalokasikan anggaran belanja terkait, kondisi ini terjadi karena terdapat belanja jaringan AC pada ruangan IBS (Instalasi Bedah sentral) sebesar Rp1.255.000.000,00 yang tercatat pada akun belanja modal jaringan, jalan dan irigasi sedangkan anggarannya teralokasi pada belanja modal aset lainnya. Namun karena output dari pekerjaan tersebut adalah instalasi jaringan pendingin ruangan, sehingga realisasi belanja di reklasifikasi ke belanja Jaringan, Jalan dan Irigasi.
- e. Atas realisasi Realisasi Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi tersebut, terdapat Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang seharusnya dipulihkan senilai Rp636.060.000,00. Sampai dengan tanggal 22 Maret 2026, telah dilakukan pemulihan ke Kas Daerah senilai Rp486.592.000,00 atas:
 - 1) kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume sebesar Rp357.900.000,00 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp234.013.000,00;
 - 2) ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak senilai Rp44.147.000,00.

2. Rincian saldo Belanja Modal-Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 serta persentase capaian realisasinya dimasing-masing SKPD dapat dilihat pada **lampiran 2. Rekapitulasi Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025.**

5.1.2.2.5 Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-aset Tetap lainnya

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.239.500.000,00	1.232.072.500,00	99,40	74.944.600,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.239.500.000,00	1.232.072.500,00	99,40	74.944.600,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	990.434.000,00	980.963.950,00	99,04	374.466.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	990.434.000,00	980.963.950,00	99,04	374.466.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	10.064.248.018,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	10.064.248.018,00
Belanja Modal Aset Tetap	11.702.000.000,00	11.192.224.502,00	95,64	0,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lainnya BOSP				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	11.702.000.000,00	11.146.287.102,00	95,25	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	0,00	38.372.400,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	7.565.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	328.758.984,00	224.350.369,00	68,24	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	328.758.984,00	224.350.369,00	68,24	0,00
Jumlah	14.260.692.984,00	13.629.611.321,00	95,57	10.513.658.618,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya:
 - a. Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak mengalami kenaikan sebesar Rp1.157.127.900,00 atau 1.543,97% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp74.944.600,00. Hal ini disebabkan pada Tahun 2025 terdapat pengadaan alat praktik dan peraga berupa pengadaan buku ensiklopedia anti narkoba untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama dan pengadaan buku keagamaan untuk jenjang Sekolah Dasar serta pengadaan Buku lainnya sebagai penunjang fasilitas pembelajaran di sekolah;
 - b. Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian mengalami kenaikan sebesar Rp606.497.950,00 atau 161,96% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp374.466.000,00. Pada Tahun 2025 terdapat Belanja Pengadaan Alat *Marching Band* untuk SD dan SMP Negeri dalam rangka pengadaan alat praktik dan peraga siswa, selain itu terdapat pengadaan alat musik *Marching Band* pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. Terdapat perubahan klasifikasi dan kodefikasi terhadap Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS menjadi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP. Perubahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
 - d. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD mengalami kenaikan sebesar Rp224.350.369,00 atau 100% dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Pada Tahun 2025 terdapat pengadaan peralatan kesehatan lainnya di antaranya *oxygen concentrator*, kursi roda, *compressor* nebu, tensimeter dan lain-lainnya pada Puskesmas Kopang. Terdapat ketidaktepatan dalam pengalokasian anggaran pada akun Belanja Aset Tetap Lainnya BLUD pada Puskesmas Kopang yang seharusnya berada pada akun Belanja Peralatan dan Mesin BLUD.
 - e. Terdapat pelampauan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan terhadap anggarannya masing-masing sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan oleh

ketidaktepatan dalam mengalokasikan anggaran belanja terkait. Kondisi ini terjadi karena ada beberapa Sekolah yang mengalami perubahan status Sekolah dari Swasta menjadi Negeri namun pada Aplikasi Dapodik Kemendikbud belum diperbarui dan masih tercatat sebagai Sekolah Swasta.

2. Rincian saldo Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 serta persentase capaian realisasinya dimasing-masing SKPD dapat dilihat pada ***lampiran 2. Rekapitulasi Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025.***

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal-Aset Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal-Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-aset lainnya

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud	1.871.329.848,83	0,00	0,00	9.950.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.871.329.848,83	0,00	0,00	9.950.000,00
Jumlah	1.871.329.848,83	0,00	0,00	9.950.000,00

Penjelasan:

1. Tidak tercapainya realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dibandingkan anggaran dan realisasi tahun sebelumnya disebabkan karena ketidaktepatan dalam pengalokasian anggaran pada belanja terkait di mana terdapat anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada BLUD Rumah Sakit berupa Belanja Modal Jaringan AC Ruang IBS sebesar Rp1.255.000.000,00 yang di anggarkan pada Belanja Modal Aset Lainnya seperti penjelasan pada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (poin d) di atas, sedangkan pada Tahun 2024 terdapat pengadaan Aplikasi Pelayanan Perizinan melalui QR Code pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Rincian saldo Belanja Modal-Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***lampiran 2. Rekapitulasi Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025.***

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tak Terduga	19.556.796.096,12	8.959.925.740,00	45,81	8.838.353.947,00
Jumlah	19.556.796.096,12	8.959.925.740,00	45,81	8.838.353.947,00

Penjelasan:

Realisasi Belanja Tidak Terduga 2024 sebesar Rp8.959.925.740,00 rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.42 Tabel Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga

(dalam Rupiah)

Uraian	2025
	Realisasi
Penyesuaian atas potongan salur DAKNF Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang disalurkan atas sisa DAKNF 2024	4.742.440.142,00
Penyesuaian atas potongan salur DAKNF Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas yang disalurkan atas sisa DAKNF 2024	1.356.583.350,00
Penyesuaian atas potongan salur DAKNF Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah dan DAKNF Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	686.831.775,00
Penyesuaian atas potongan salur DAKNF-Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian atas Sisa 2024	73.649.336,00
Penyesuaian potongan salur DAKNF-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang disalurkan atas sisa 2024	17.438.400,00
Penyesuaian atas potongan salur Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang disalurkan atas sisa 2024	247.230.694,00
Penyesuaian potongan salur DAU atas sisa dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP), (PK2UMK), sisa dana pelayanan kepariwisataan, dan sisa dana fasilitasi penanaman modal (FPM) Tahun 2024	179.100.995,00
Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin Non Quota pada RSU Provinsi NTB, Bulan Mei s/d Nopember 2023 dengan rincian terlampir. (Sumber Dana PAD)	1.606.347.481,00
Pembayaran klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin non quota pada RSUD Propinsi NTB	38.407.867,00
Pengembalian atas kesalahan penyetoran Dinas pendidikan Bulan Juli Tahun 2025 An. Abdurrahim dkk	11.895.700,00
Total	8.959.925.740,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah-LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.43 Anggaran dan Realisasi Transfer Daerah

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil	34.913.665.518,19	32.475.195.796,00	93,02	20.838.360.124,00
Transfer Bantuan Keuangan	333.416.542.560,00	317.965.574.133,00	95,37	325.459.672.460,00
Jumlah	368.330.208.078,19	350.440.769.929,00	95,14	346.298.032.584,00

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.44 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	32.352.050.223,29	30.644.055.037,00	94,72	18.146.089.922,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.561.615.294,90	1.831.140.759,00	71,48	2.692.270.202,00
Jumlah	34.913.665.518,19	32.475.195.796,00	93,02	20.838.360.124,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bagi Hasil di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan oleh meningkatnya realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 serta pembayaran utang dana bagi hasil kepada desa Tahun 2024 yang direalisasikan pada Tahun 2025;
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyalurkan dana transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rincian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun 2024 setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah; dan
3. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 127 desa yang didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rincian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah.

Rincian Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dapat dilihat pada Lampiran LRA. **Lampiran 4a-4b. Rekap Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa.**

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan–LRA Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan				
Daerah Provinsi atau				
Kabupaten/Kota kepada Desa				
• Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	322.172.466.560,00	307.682.112.133,00	95,50	316.384.972.460,00
• Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	11.244.076.000,00	10.283.462.000,00	91,46	9.074.700.000,00
Jumlah	333.416.542.560,00	317.965.574.133,00	95,37	325.459.672.460,00

Penjelasan:

1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.46 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Umum dan Khusus

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	Realisasi	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	307.682.112.133,00	316.384.972.460,00
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	102.624.586.400,00	86.776.530.000,00
Alokasi Dana Desa	28.710.163.378,00	35.531.583.670,00
Iuran JKN KIS 1% untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	874.040.883,00	801.988.960,00
Iuran JKN KIS 4% untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.496.163.532,00	0,00
Dana Desa	162.209.204.800,00	185.021.712.000,00
Iuran BPJS Tenaga Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.767.953.140,00	8.253.157.830,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	10.283.462.000,00	9.074.700.000,00
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Trantib	2.994.600.000,00	3.891.600.000,00
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Marbot	3.329.600.000,00	3.331.200.000,00
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Rukun Tetangga	3.358.200.000,00	1.617.300.000,00
kendaraan Operasional Kepala Dusun Desa	0,00	234.600.000,00
BPJS Ketenagakerjaan Badan Keamanan Desa (BKD) dan Rukun Tetangga (RT)	601.062.000,00	0,00
Jumlah	317.965.574.133,00	325.459.672.460,00

2. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bantuan Keuangan di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan di antaranya sebagai berikut.
 - a. Terdapat peningkatan Pendapatan Realisasi Dana Bagi Hasil dibandingkan dengan Tahun 2024 sehingga formasi perhitungan anggaran sekurang-kurangnya 10% dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil juga mengalami peningkatan; dan

- b. Tahun 2025 tidak terdapat bantuan kendaraan operasional kepala dusun pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun sebelumnya.
3. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyalurkan dana Transfer Bantuan Keuangan ke desa didasarkan pada:
 - a. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025;
 - b. Penyaluran Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; dan
 - c. Pembayaran Iuran JKN KIS 1% untuk kepala desa dan Perangkat Desa berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Kepesertaan dan Kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong dengan Kabupaten Lombok Tengah Triwulan III 2025 No. 2177/BA/XI.10/1225.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyalurkan kepada 127 Desa dengan rincian dapat dilihat pada Rincian desa penerima Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dapat dilihat pada ***lampiran 5a–5d. ADD, Trantib, Marbot dan RT Tahun 2025.***

5.1.3 Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang dihitung dengan rincian:

Tabel 5.47 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	153.840.110.633,76	161.879.283.656,67	105,23	44.064.564.543,49
Pengeluaran Pembiayaan	54.629.704.830,00	54.624.490.929,00	99,99	20.787.131.560,00
Jumlah	99.210.405.803,76	107.254.792.727,67	108,11	23.277.432.983,49

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.48 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	135.341.420.443,76	135.342.372.466,67	100,00	39.084.647.243,49
Penerimaan Pinjaman Daerah	18.498.690.190,00	26.526.811.190,00	143,40	4.950.317.300,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	10.100.000,00	0,00	29.600.000,00
Jumlah	153.840.110.633,76	161.879.283.656,67	105,23	44.064.564.543,49

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Penerimaan Pembiayaan di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena terdapat realisasi pinjaman daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun 2025 sebesar Rp26.526.811.190,00 ini merupakan kerja sama pembiayaan antara RSUD BLUD Praya dengan PT BSI.

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp96.257.725.223,18 lebih tinggi 246,28% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp39.084.647.243,49. Uraian Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.49 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	118.820.191.873,99	22.555.286.973,55
Kas di Bendahara Penerimaan	20.473.794,00	271.718.835,30
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	12.670.411,20
Kas di BLUD	9.005.264.738,26	4.652.784.282,97
Kas Dana BOSP	644.439.673,71	647.168.714,71
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.861.379.536,80	11.020.654.257,00
Kas Lainnya- Rekening bendahara pengeluaran di Kelurahan	0,00	363.768,76
Kas Dana BOK	4.989.670.827,00	0,00
Uang titipan berupa uang Jaminan Keberlangsungan Sewa Tanah Pasar Renteng dan Pasar Jelujuk	0,00	(76.000.000,00)
koreksi silpa atas saldo awal kas Dana BOSP Tahun 2024	952.022,91	0,00
Jumlah	135.342.372.466,67	39.084.647.243,49

5.1.3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang merupakan saldo Penerimaan Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.50 Penerimaan Pinjaman Daerah

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	18.498.690.190,00	26.526.811.190,00	143,40	4.950.317.300,00
Jumlah	18.498.690.190,00	26.526.811.190,00	143,40	4.950.317.300,00

Penjelasan:

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah pada Tahun 2025 telah menerima Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank yaitu PT BSI sebesar Rp26.526.811.190,00 yang digunakan untuk biaya Operasional RSUD Praya. Penerimaan pinjaman tersebut diikat dengan Perjanjian Nomor 04/017.3/SF.BPJS/ACB

Denpasar tentang perjanjian *line facility* pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tertanggal 30 Desember 2024.

5.1.3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang merupakan saldo Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.51 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	10.100.000,00	0,00	29.600.000,00
Jumlah	0,00	10.100.000,00	0,00	29.600.000,00

Penjelasan:

Penerimaan kembali Dana Bergulir merupakan pengembalian pokok atas investasi dana bergulir perkuatan modal koperasi sebesar Rp10.100.000,00 yang bersumber dari koperasi usaha kecil dan menengah.

Rincian Penerimaan kembali Dana Bergulir Perkuatan Modal Koperasi dapat dilihat pada **Lampiran 6. Rekapitulasi Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Perkuatan Modal Koperasi Per 31 Desember 2025.**

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.52 Pengeluaran Pembiayaan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23.449.007.490,00	23.443.793.589,00	99,98	0,00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	31.180.697.340,00	31.180.697.340,00	100,00	20.787.131.560,00
Jumlah	54.629.704.830,00	54.624.490.929,00	99,99	20.787.131.560,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pengeluaran Pembiayaan di Tahun 2025 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan terdapat pembayaran pokok pinjaman kepada PT SMI dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan infrastruktur jalan diwilayah Kabupaten Lombok Tengah yang pembayarannya dipotong langsung dari penyaluran Dana Alokasi Umum. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Utang antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan PT SMI untuk periode pembayaran pokok utang dari bulan Desember Tahun 2024 sampai dengan bulan November Tahun 2025 masing-

masing perbulannya senilai Rp2.598.391.445,00 sehingga total pembayaran pokok pinjaman sampai dengan bulan November Tahun 2025 sebesar Rp31.180.697.340,00. Pinjaman ini diakui sesuai dengan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-206/SMI/1221 tanggal 29 Desember Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 16 tanggal 19 Mei Tahun 2022 antara Direktur PT SMI dengan Bupati Lombok Tengah.

Terdapat pembayaran cicilan pokok utang oleh Rumah Sakit Umum Daerah kepada PT BSI senilai Rp23.443.793.589,00 atas pinjaman tahap 1 pada bulan Desember Tahun 2024 senilai Rp4.950.317.300,00 yang telah dilakukan pembayarannya pada 3 Februari 2026 senilai Rp1.650.105.800,00 dan pada 31 Maret 2026 senilai Rp3.300.211.500,00. Selain itu juga terdapat pembayaran cicilan pokok utang kepada PT BSI senilai Rp18.493.476.289,00 atas pinjaman tahap 2 sampai dengan tahap 5 pada Tahun 2026, suku bunga 8,1% dibayar dimuka pada saat realisasi pencairan.

5.1.3.2.1 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang merupakan saldo Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dianggarkan dan direalisasikan pada pada Tahun 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.53 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	23.449.007.490,00	23.443.793.589,00	99,98	0,00
Bantuan Keuangan	31.180.697.340,00	31.180.697.340,00	100,00	20.787.131.560,00
Jumlah	54.629.704.830,00	54.624.490.929,00	99,99	20.787.131.560,00

Penjelasan:

- Merupakan pembayaran terhadap pinjaman Rumah Sakit Umum Daerah kepada PT BSI (Bank Syariah Indonesia) sebesar Rp23.443.793.589,00 dengan jangka waktu pinjaman adalah tiga bulan per kali pencairan, dengan suku bunga 8,1% dibayar dimuka pada saat realisasi pencairan. Pinjaman tersebut di pergunakan untuk menjembatani kebutuhan dana sementara sampai sumber dana permanen tersedia. Pinjaman tersebut diikat dengan Perjanjian Nomor 04/017.3/SF.BPJS/ACB Denpasar tentang perjanjian *line facility* pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tertanggal 30 Desember 2024.
- Pembayaran Utang Daerah

Tabel 5.54 Pembayaran Utang Daerah

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	31.180.697.340,00	31.180.697.340,00	100,00	20.787.131.560,00
Jumlah	31.180.697.340,00	31.180.697.340,00	100,00	20.787.131.560,00

Merupakan program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemik COVID-19 dicatat dan diakui sesuai dengan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-206/SMI/1221 tanggal 29 Desember Tahun 2021 telah dirubah melalui Perjanjian Perubahan Pertama terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 16 tanggal 19 Mei Tahun 2022 antara Direktur PT SMI dengan Bupati Lombok Tengah.

5.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA/(SiKPA) Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.55 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA/(SiKPA)

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➤ Pendapatan Daerah	2.825.991.771.625,49	2.901.498.807.255,48	102,67	2.729.660.115.585,25
✓ Pendapatan Asli Daerah	504.607.362.379,49	545.831.803.384,48	108,17	331.059.847.831,25
✓ Pendapatan Transfer	2.294.757.887.953,00	2.329.206.611.378,00	101,50	2.289.284.360.966,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah	26.626.521.293,00	26.460.392.493,00	99,38	109.315.906.788,00
➤ Belanja Daerah	2.556.871.969.351,06	2.463.833.879.159,89	96,36	2.271.298.095.540,98
✓ Belanja Operasi	2.175.322.200.460,91	2.109.729.193.164,29	96,98	1.978.538.947.668,32
✓ Belanja Modal	361.992.972.794,03	345.144.760.255,60	95,35	283.920.793.925,66
✓ Belanja Tak Terduga	19.556.796.096,12	8.959.925.740,00	45,81	8.838.353.947,00
➤ Transfer Daerah	368.330.208.078,19	350.440.769.929,00	95,14	346.298.032.584,00
✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan	34.913.665.518,19	32.475.195.796,00	93,02	20.838.360.124,00
✓ Transfer Bantuan Keuangan	333.416.542.560,00	317.965.574.133,00	95,37	325.459.672.460,00
➤ Pembiayaan Daerah	99.210.405.803,76	107.254.792.727,67	108,11	23.277.432.983,49
✓ Penerimaan Pembiayaan	153.840.110.633,76	161.879.283.656,67	105,23	44.064.564.543,49
✓ Pengeluaran Pembiayaan	54.629.704.830,00	54.624.490.929,00	99,99	20.787.131.560,00
Jumlah	0,00	194.478.950.894,26	0,00	135.341.420.443,76

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2025 memiliki SiLPA sebesar Rp194.478.950.894,26 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.56 Rincian SILPA Terikat dan SILPA Non-Terikat

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai (Rp)
Dana SiLPA Terikat	23.072.443.249,57
Dana pada Kas di BLUD	9.268.276.507,69
Dana pada Kas Dana BOSP	944.187.940,88
Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	3.303.365.022,00
DAK Fisik Bidang Reguler:	
DAK Fisik Bidang Pendidikan	1.029.272.604,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Nilai (Rp)
DAK Fisik Bidang Kesehatan	74.687.024,00
DAK Fisik penugasan	
DAK Fisik Bidang Pertanian	2.292.000,00
Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
Dana Non Fisik – BOS	
Tunjangan Profesi Guru	5.660.553.960,00
Tambahan Penghasilan Guru	1.250.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)-Dinas	1.267.474.524,00
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	308.340.795,00
BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	9.768.990,00
Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Dearah	3.855.350,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	820.000,00
Dana Pelayanan Ketahanan Pangan	229.222.112,00
Dana Penguatan Kelembagaan Sentra IKM	766.640.630,00
Dana Insentif Daerah	202.435.790,00
Dana SiLPA Non-Terikat	171.406.507.644,69
Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	31.772.500,00
Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi	
Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	
Pelampauan Pajak Daerah	61.801.965.685,24
Pelampauan Retribusi Daerah	369.822.096,80
Sisa Dana Transfer Pusat – DBH Cukai Hasil Tembakau	2.461.209.901,42
Sisa Dana Transfer Pusat – DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi	7.514.327,00
Sisa Dana Transfer Pusat – DAU	100.078.746.567,23
Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	32.367.490,00
Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.309.779.017,00
Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	5.313.330.060,00
Jumlah	194.478.950.894,26

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.57 Rincian keberadaan SiLPA

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	180.928.348.923,69
Kas di Bendahara Penerimaan	31.772.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.000.000,00
Kas di BLUD	9.268.276.507,69
Kas Dana BOK Puskesmas	3.303.365.022,00
Kas Dana BOSP	944.187.940,88
Jumlah	194.478.950.894,26

3. Terdapat selisih antara jumlah SiLPA dengan nilai saldo kas akhir dalam LAK sebesar Rp1.050.747.719,00 yang merupakan saldo kas lainnya di Bendahara selain BUD berupa saldo PFK yang telah di ungkapkan dalam *penjelasan pos-pos LAK pada point 5.5.8.*



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH**

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.58 Saldo Anggaran Lebih Awal

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	118.820.191.873,99	22.555.286.973,55
Kas di Bendahara Penerimaan	20.473.794,00	271.718.835,30
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	12.670.411,20
Kas di BLUD	9.005.264.738,26	4.652.784.282,97
Kas Dana BOSP	644.439.673,71	647.168.714,71
Kas di Dana BOK	4.989.670.827,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.861.379.536,80	11.020.654.257,00
Kas Lainnya- Rekening bendahara pengeluaran di Kelurahan	0,00	363.768,76
Uang titipan berupa uang Jaminan Keberlangsungan Sewa Tanah Pasar Renteng dan Pasar Jelujuk	0,00	(76.000.000,00)
Jumlah	135.341.420.443,76	39.084.647.243,49

Saldo diatas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2024 dan Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.59 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	135.342.372.466,67	39.084.647.243,49
Jumlah	135.342.372.466,67	39.084.647.243,49

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada TA 2024 dan TA 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan TA 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama TA 2025 dan TA 2024.

Terdapat selisih penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan senilai Rp952.022,91. Selisih tersebut merupakan koreksi terhadap SiLPA Tahun 2024 (kurang saji saldo awal kas Dana BOSP Tahun 2025).

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.60 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	194.478.950.894,26	135.341.420.443,76
Jumlah	194.478.950.894,26	135.341.420.443,76

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada TA 2025 dan TA 2024 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2026 dan TA 2025. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada **point 5.1.4**. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada **point 5.2.5** di bawah.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Terdapat koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya senilai Rp952.022,91, yaitu merupakan kurang catat/saji saldo awal kas pada Kas BOSP Tahun 2025.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.61 Saldo Anggaran Lebih Akhir

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	180.928.348.923,69	118.820.191.873,99
Kas di Bendahara Penerimaan	31.772.500,00	20.473.794,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.000.000,00	0,00
Kas di BLUD	9.268.276.507,69	9.005.264.738,26
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	1.861.379.536,80
Kas Dana BOK Puskesmas	3.303.365.022,00	4.989.670.827,00
Kas Dana BOSP	944.187.940,88	644.439.673,71
Jumlah	194.478.950.894,26	135.341.420.443,76

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada **point 5.1.4**. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada **point 5.2.3** di atas.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NERACA

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024.

Gambar: Komposisi Neraca Kab.Lombok Tengah Per 31 Desember 2025



Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk per tanggal 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1 ASET

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut.

Tabel 5.62 Rincian Aset

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Aset Lancar	273.976.931.323,51	239.380.450.241,04	34.596.481.082,47	14,45
2	Investasi Jangka Panjang	132.544.721.354,00	143.047.444.147,13	(10.502.722.793,13)	(7,34)
3	Aset Tetap	3.822.556.646.979,25	3.712.625.425.091,81	109.931.221.887,44	2,96
4	Properti Investasi	25.202.062.730,00	25.386.152.486,00	(184.089.756,00)	(0,73)
5	Aset Lainnya	45.069.622.241,12	42.476.524.583,79	2.593.097.657,33	6,10
Jumlah		4.299.349.984.627,88	4.162.915.996.549,77	136.433.988.078,11	3,28

5.3.1.1 Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut.

Tabel 5.63 Rincian Aset Lancar

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Kas dan setara Kas	195.529.698.613,26	136.084.271.909,53	59.445.426.703,73	43,68
2	Piutang Pajak Daerah	106.470.878.979,67	86.378.017.612,07	20.092.861.367,60	23,26%
3	Piutang Retribusi Daerah	2.594.492.319,33	3.069.377.869,33	(474.885.550,00)	(15,47%)
4	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	6.596.726.833,59	22.042.086.208,59	(15.445.359.375,00)	(70,07%)
6	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Transfer Antar Daerah	2.496.646.967,00	12.616.953.084,00	(10.120.306.117,00)	(80,21%)
8	Piutang Lainnya	63.712.000,00	177.749.000,00	(114.037.000,00)	(64,16%)
9	Penyisihan Piutang	(73.006.461.914,92)	(54.161.634.997,02)	(18.844.826.917,90)	35,79
10	Beban dibayar dimuka	519.293.141,58	397.901.932,53	121.391.209,05	30,51
11	Persediaan	32.711.944.384,00	32.775.727.622,01	(63.783.238,01)	(0,19)
Jumlah		273.976.931.323,51	239.380.450.241,04	34.596.481.082,47	14,45

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.64 Rincian Kas dan Setara Kas

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Kas di Kas Daerah	180.928.348.923,69	118.820.191.873,99	62.108.157.049,70	52,27
2	Kas di Bendahara Penerimaan	31.772.500,00	20.473.794,00	11.298.706,00	55,19
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
4	Kas di BLUD	9.268.276.507,69	9.005.264.738,26	263.011.769,43	2,92
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	1.861.379.536,80	(1.861.379.536,80)	(100,00)
7	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	1.050.747.719,00	742.851.465,77	307.896.253,23	41,45
8	Kas Dana BOSP	944.187.940,88	644.439.673,71	299.748.267,17	46,51
9	Kas Dana BOK Puskesmas	3.303.365.022,00	4.989.670.827,00	(1.686.305.805,00)	(33,80)
Jumlah		195.529.698.613,26	136.084.271.909,53	59.445.426.703,73	43,68

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 yang ditempatkan pada Bank NTB Syariah dan PT Bank Mandiri Cabang Praya dalam bentuk rekening giro dan tabungan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.65 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah

(dalam Rupiah)

No Rekening	Nama Rekening	Bank	31 Desember 2025	31 Desember 2024
003.21.00706.00.0	RKUD Kab. Lombok Tengah	Bank NTB Cabang Praya	180.671.875.770,94	118.567.960.049,14
1610001263792	BENDAHARA UMUM/PEMEGANG KAS DAERAH	Bank Mandiri	187.500,00	252.231.824,85
1610015313369	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH an RKUD	Bank Mandiri	256.285.652,75	0,00
Jumlah			180.928.348.923,69	118.820.191.873,99

- Saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang ditempatkan pada Bank NTB Syariah Cabang Praya per 31 Desember 2025 senilai Rp180.671.875.770,94. Sedangkan Saldo RKUD pada Bank NTB Syariah Cabang Praya menurut Rekening Koran Bank Per 31 Desember 2025 senilai Rp180.750.876.403,94. Oleh karena itu terdapat perbedaan pencatatan antara BUD dengan Bank senilai Rp79.000.633,00, sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.66 Selisih Saldo Kas di Kas Daerah pada PT Bank NTB Syariah Cabang Praya

(dalam Rupiah)

No	Saldo Menurut PT Bank NTB Syariah Cab.Praya	Saldo Menurut BUD Kab. Lombok Tengah	Selisih
1	180.750.876.403,94	180.671.875.770,94	79.000.633,00

Perbedaan senilai Rp79.000.633,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut.

- Outstanding Cheque* senilai Rp33.000.633,00 merupakan nilai SP2D dengan Nomor 52.02/04.0/000960/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR2 /12/2025 pada Dinas Kesehatan atas pengadaan bahan-bahan lainnya (*Cosmomed Medical Oxygen Regulator dll*) an PT Bintang Mandiri yang telah dibayarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) pada 30 Desember 2025, namun baru didebet dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh PT Bank NTB Cabang Praya pada bulan Januari 2026. Nilai tersebut telah diakui sebagai pengeluaran atau belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2025; dan
- Terdapat Uang Pihak Ketiga senilai Rp46.000.000,00 berupa uang jaminan keberlangsungan sewa atas penyewaan tanah areal parkir Pasar Renteng yang telah disetor ke RKUD oleh pihak penyewa sesuai perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Penyetoran uang jaminan sewa ini tidak disajikan sebagai pendapatan dilaporkan realisasi anggaran (LRA) dan disajikan sebagai Aset Lainnya pada Akun Kas yang dibatasi penggunaannya sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dari Kas di Bank NTB Cabang Praya senilai Rp180.671.875.770,94, di dalamnya termasuk dana BOSP yang telah di transfer ke RKUD Kab. Lombok Tengah atas

satuan pendidikan yang ditutup dan dimerger dengan nilai Rp941.138,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.67 Pelimpahan Saldo Kas BOSP ke RKUD

(dalam Rupiah)

No	Nama Satuan Pendidikan	Nilai	Tanggal Transfer
1	SDN 2 Bombas	672.261,00	28-Feb-25
2	SD Negeri 2 Tengari	268.877,00	03-Jan-25
Jumlah		941.138,00	

2. Selain pada Bank NTB Syariah, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menempatkan Rekening Kas Umum Daerah pada PT Bank Mandiri Persero Cabang Praya dalam bentuk rekening Tabungan. Namun, rekening tersebut telah ditutup sesuai dengan Surat BUD Nomor: 900/951/BKAD Tanggal 28 November 2025, dan saldo rekening tabungan tersebut telah dilimpahkan seluruhnya ke RKUD dalam bentuk rekening Giro pada PT Bank Mandiri Persero Cabang Praya. Terdapat Perbedaan Penyajian saldo Kas RKUD Tabungan Bank Mandiri Per 31 Desember 2025 dengan Saldo Rekening Koran Bank sebesar Rp187.500,00. Perbedaan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Pembebanan biaya administrasi bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2024 atas rekening tabungan yang belum di kembalikan oleh pihak Bank Mandiri Cabang Praya sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp100.000,00. Bank Mandiri Cabang Praya melakukan pengembalian ke RKUD Giro Bank Mandiri pada tanggal 24 Februari 2026 senilai Rp100.000,00; dan
 - b. Pembebanan biaya administrasi bulan Juli sampai dengan bulan November Tahun 2025 atas rekening tabungan senilai Rp62.500,00 dan pembebanan biaya saldo minimum pada bulan November 2025 atas rekening tabungan senilai Rp25.000,00 yang belum di kembalikan pihak Bank Mandiri Cabang Praya sampai dengan 31 Desember 2025. Bank Mandiri Cabang Praya melakukan pengembalian ke RKUD Giro Bank Mandiri tanggal 24 Februari 2026 senilai Rp87.500,00 (Rp62.500,00+Rp25.000,00).
3. Rekening Kas Umum Daerah pada PT Bank Mandiri Persero Cabang Praya dalam bentuk Rekening Giro dengan nilai saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp256.285.652,75 sedangkan saldo menurut rekening koran bank senilai Rp256.260.652,75. Terdapat perbedaan pengakuan saldo RKUD Pada Bank Mandiri Giro sebesar Rp25.000,00 (Rp256.285.652,75-Rp256.260.652,75). Perbedaan tersebut disebabkan karena pembebanan biaya pemindahbukuan secara langsung oleh Bank Mandiri Cabang Praya atas pemindahan dana dari RKUD Bank Mandiri Giro sebesar Rp2.541.883.225,27 sementara yang masuk atau diterima di RKUD Bank NTB Syariah Giro sebesar Rp2.541.858.225,27, sehingga terdapat pembebanan biaya pemindahbukuan sebesar Rp25.000. Atas pembebanan biaya tersebut, pihak bank mandiri Cabang Praya telah melakukan pengembalian ke RKUD Giro Bank Mandiri sebesar Rp25.000,00 pada tanggal 19 Februari 2026.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 senilai Rp31.772.500,00 sedangkan saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 seluruhnya telah disetor ke RKUD Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68 Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan	0,00	650.600,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan DPMPSTSP	0,00	19.823.194,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Permukiman	9.120.000,00	0,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.652.500,00	0,00
Jumlah		31.772.500,00	20.473.794,00

Berikut rincian penyeteroran saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 ke RKUD:

Tabel 5.69 Penyeteroran Kas di Bendahara Penerimaan ke RKUD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Tanggal Setor Ke RKUD	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Tanggal Setor Ke RKUD
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	540.000,00	09/01/25
		0,00	0,00	110.600,00	14/03/2025
2	DPMPSTSP	0,00	0,00	19.823.194,00	10/01/2025
3	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Permukiman	9.120.000,00	11/02/2026	0,00	
4	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.976.500,00	02/01/2026	0,00	
		476.000,00	02/01/2026	0,00	
		7.200.000,00	02/01/2026	0,00	
Jumlah		31.772.500,00		20.473.794,00	

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 senilai Rp3.000.000,00 pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan telah disetor ke RKUD sesuai dengan surat tanda setoran nomor STS No.../STS-TU SETDA/2025 tanggal 27 Januari 2026 senilai Rp2.400.000,00 dan STS Nomor 11/STS-TU/SETDA/2025 tanggal 26 Februari 2026 senilai Rp600.000,00.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.268.276.507,69. Rincian saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.70 Rincian Kas di BLUD

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	RSUD Praya	160.492.014,78	5.433.013.896,83
2	Puskesmas Praya BLUD	621.167.695,43	515.572.509,55
3	Puskesmas Puyung BLUD	353.268.544,70	478.409.339,81
4	Puskesmas Aikmual BLUD	763.724.238,50	972.309.096,56
5	Puskesmas Janapria BLUD	820.261.951,09	896.755.553,86



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
6	Puskesmas Aik Darek BLUD	558.536.029,47	709.204.341,65
7	Puskesmas Batunyal	214.805.163,47	0,00
8	Puskesmas Kopang	462.679.337,24	0,00
9	Puskesmas Mantang	282.669.973,70	0,00
10	Puskesmas Sengkol	367.945.986,75	0,00
11	Puskesmas Muncan	361.355.821,52	0,00
12	Puskesmas Pengadang	52.255.004,23	0,00
13	Puskesmas Penujak	164.859.080,53	0,00
14	Puskesmas Kuta	511.577.274,58	0,00
15	Puskesmas Mangkung	590.864.299,05	0,00
16	Puskesmas Teruwai	79.476.838,56	0,00
17	Puskesmas Mujur	251.555.382,43	0,00
18	Puskesmas Bonjeruk	276.156.951,48	0,00
19	Puskesmas Bagu	173.766.655,04	0,00
20	Puskesmas Ganti	169.750.230,25	0,00
21	Puskesmas Darek	238.522.690,16	0,00
22	Puskesmas Ubung	93.849.097,23	0,00
23	Puskesmas Teratak	102.410.400,49	0,00
24	Puskesmas Pringgarata	146.885.244,64	0,00
25	Puskesmas Langko	365.400.703,62	0,00
26	Puskesmas Batu Jangkih	180.312.383,31	0,00
27	Puskesmas Batujai	98.968.069,31	0,00
28	Puskesmas Wajageseng	53.260.975,61	0,00
29	Puskesmas Tanak Beak	224.988.967,85	0,00
30	Puskesmas Awang	57.326.691,02	0,00
31	Labkesda dan UTD	469.182.811,65	0,00
Jumlah		9.268.276.507,69	9.005.264.738,26

1. Saldo Kas di BLUD senilai Rp9.268.276.507,69 merupakan selisih saldo awal kas di BLUD Tahun 2025 ditambah dengan jumlah penerimaan BLUD selama Tahun 2026, dikurangi dengan jumlah belanja BLUD selama Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71 Rincian Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal+Pelimpahan Saldo Awal Saldo Akhir FKTP Menjadi BLUD	Pendapatan BLUD	Belanja BLUD	Saldo Akhir
1	Kas di BLUD RSUD Praya	5.433.013.896,83	118.452.862.193,38	123.725.384.075,43	160.492.014,78
2	Kas di BLUD Puskesmas Praya	515.572.509,55	4.653.501.695,88	4.547.906.510,00	621.167.695,43
3	Kas di BLUD Puskesmas Puyung	478.409.339,81	3.123.197.687,89	3.248.338.483,00	353.268.544,70
4	Kas di BLUD Puskesmas Aikmual	972.309.096,56	3.788.978.371,44	3.997.563.229,50	763.724.238,50



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Saldo Awal+Pelimpahan Saldo Awal Saldo Akhir FKTP Menjadi BLUD	Pendapatan BLUD	Belanja BLUD	Saldo Akhir
5	Kas di BLUD Puskesmas Janapria	896.755.553,86	3.724.998.741,28	3.801.492.344,05	820.261.951,09
6	Kas di BLUD Puskesmas Aik Darek	709.204.341,65	3.197.433.498,74	3.348.101.810,92	558.536.029,47
7	Puskesmas Batunyala	75.885.401,00	2.661.748.614,47	2.522.828.852,00	214.805.163,47
8	Puskesmas Kopang	371.063.117,00	3.344.536.508,24	3.252.920.288,00	462.679.337,24
9	Puskesmas Mantang	111.367.255,00	3.205.040.561,70	3.033.737.843,00	282.669.973,70
10	Puskesmas Sengkol	76.855.569,00	3.967.234.123,75	3.676.143.706,00	367.945.986,75
11	Puskesmas Muncan	54.673.227,00	2.422.015.723,52	2.115.333.129,00	361.355.821,52
12	Puskesmas Pengadang	15.732.313,00	3.080.971.658,23	3.044.448.967,00	52.255.004,23
13	Puskesmas Penujak	53.970.085,00	2.315.814.623,53	2.204.925.628,00	164.859.080,53
14	Puskesmas Kuta	81.141.257,00	2.687.380.552,58	2.256.944.535,00	511.577.274,58
15	Puskesmas Mangkung	82.659.104,00	2.748.065.660,75	2.239.860.465,70	590.864.299,05
16	Puskesmas Teruwai	296.153,00	1.770.522.860,56	1.691.342.175,00	79.476.838,56
17	Puskesmas Mujur	145.970.522,00	2.353.241.572,43	2.247.656.712,00	251.555.382,43
18	Puskesmas Bonjeruk	51.898.216,00	2.585.762.172,68	2.361.503.437,20	276.156.951,48
19	Puskesmas Bagu	30.549.991,00	2.880.179.606,04	2.736.962.942,00	173.766.655,04
20	Puskesmas Ganti	65.215.896,00	1.978.122.448,25	1.873.588.114,00	169.750.230,25
21	Puskesmas Darek	160.922.401,00	2.671.132.196,16	2.593.531.907,00	238.522.690,16
22	Puskesmas Ubung	11.338.193,00	2.939.903.079,23	2.857.392.175,00	93.849.097,23
23	Puskesmas Teratak	71.223.853,00	2.609.993.669,49	2.578.807.122,00	102.410.400,49
24	Puskesmas Pringgarata	106.744.703,00	2.762.891.474,64	2.722.750.933,00	146.885.244,64
25	Puskesmas Langko	116.206.569,80	2.336.731.380,82	2.087.537.247,00	365.400.703,62
26	Puskesmas Batu Jangkih	90.994.894,00	1.470.926.699,31	1.381.609.210,00	180.312.383,31
27	Puskesmas Batujai	20.270.147,00	1.566.114.270,31	1.487.416.348,00	98.968.069,31
28	Puskesmas Wajageseng	31.706.929,00	1.305.141.680,21	1.283.587.633,60	53.260.975,61
29	Puskesmas Tanak Beak	34.693.741,00	1.707.971.228,85	1.517.676.002,00	224.988.967,85
30	Puskesmas Awang	0,00	268.037.119,02	210.710.428,00	57.326.691,02
31	Labkesda dan UTD	0,00	2.828.765.774,66	2.359.582.963,01	469.182.811,65
Jumlah		10.866.644.275,06	197.409.217.448,04	199.007.585.215,41	9.268.276.507,69

2. Dari saldo kas BLUD senilai Rp9.268.276.507,69 belum termasuk kas tunai di Bendahara BLUD dalam bentuk utang PFK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72 Rincian Pemungutan dan Penyetoran PFK pada BLUD Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Pemungutan PFK Tahun 2025	Penyetoran PFK Tahun 2025	Saldo PFK
1	Kas di BLUD RSUD Praya	5.544.277.794,00	4.731.279.430,00	812.998.364,00
2	Puskesmas Praya	274.017.298,03	274.017.298,03	0,00
3	Puskesmas Mujur	16.553.413,00	0,00	16.553.413,00
4	Puskesmas Ganti	61.404.109,00	61.404.109,00	0,00
5	Puskesmas Janapria	170.370.737,89	168.982.112,89	1.388.625,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Keterangan	Pemnugutan PFK Tahun 2025	Penyetoran PFK Tahun 2025	Saldo PFK
6	Puskesmas Wajageseng	47.122.844,00	47.122.844,00	0,00
7	Puskesmas Teruwai	77.805.970,00	77.805.970,00	0,00
8	Puskesmas Bagu	143.550.402,00	143.550.402,00	0,00
9	Puskesmas Batunyalala	142.997.733,00	142.997.733,00	0,00
10	Puskesmas Sengkol	207.569.582,87	207.569.582,87	0,00
11	Puskesmas Aikmual	243.774.491,00	243.774.491,00	0,00
12	Puskesmas Pelabuhan Awang	8.810.397,00	8.810.397,00	0,00
13	Puskesmas Batu Jangkih	56.121.687,00	56.121.687,00	0,00
14	Puskesmas Batujai	62.816.996,00	62.816.996,00	0,00
15	Puskesmas Bonjeruk	112.177.472,00	112.177.472,00	0,00
16	Puskesmas Darek	118.129.197,81	118.129.197,81	0,00
17	Puskesmas Kopang	187.513.538,00	187.513.538,00	0,00
18	Puskesmas Kuta	112.583.524,00	112.583.524,00	0,00
19	Puskesmas Langko	106.906.844,17	105.221.832,17	1.685.012,00
20	Puskesmas Mangkung	68.312.873,00	62.890.899,00	5.421.974,00
21	Puskesmas Mantang	153.100.253,00	153.100.253,00	0,00
22	Puskesmas Muncan	68.356.334,16	68.356.334,16	0,00
23	Puskesmas Pengadang	141.397.084,95	141.397.084,95	0,00
24	Puskesmas Penujak	107.630.096,00	107.630.096,00	0,00
25	Puskesmas Pringgarata	156.047.774,00	156.047.774,00	0,00
26	Puskesmas Puyung	214.235.465,00	214.235.465,00	0,00
27	Puskesmas Tanak Beak	60.080.141,00	60.080.141,00	0,00
28	Puskesmas Teratak	139.095.398,00	139.095.398,00	0,00
29	Puskesmas Ubung	163.995.201,00	163.995.201,00	0,00
30	Puskesmas Aik Darek	160.630.410,04	160.630.410,04	0,00
31	Labkesda dan UTD	234.615.630,59	234.615.630,59	0,00
Jumlah		9.362.000.691,50	8.523.953.303,50	838.047.388,00

- Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan saldo kas di BLUD yang di sebabkan karena perubahan status 24 puskesmas dan 1 UTD Laboratorium dan Unit Transfusi Darah menjadi BLUD sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 446 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2024 Tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium dan Unit Transfusi Darah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah;
- Dari saldo kas BLUD senilai Rp9.268.276.507,69 belum termasuk saldo kas BLUD yang bersumber dari program prolanis BPJS pada BLUD Puskesmas Penujak senilai Rp2.097.100,00. Program prolanis BPJS belum disajikan sebagai bagian dari transaksi keuangan pemerintah daerah karena kegiatan ini belum terkonsolidasi atau disajikan mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Penjelasan posisi Kas di BLUD RSUD Praya per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.73 Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD Praya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nomor Rekening	31 Desember 2025	31 Desember 2024
A	Kas di Bank		138.052.906,78	4.287.543.198,92
1	Bank Mandiri	161-00-0175529-2	6.688.009,00	225.139.397,00
2	Bank NTB Syariah 1	510 02. 02 332016	3.876.800,00	205.835.883,92
3	Bank NTB Syariah 2	510 02.00.239211	73.587.333,11	3.880.800,00
4	Bank Negara Indonesia (BNI)	721241222	1.710.032,00	6.795.558,00
5	Bank Syariah Indonesia (BSI)	7772214477	52.190.732,67	3.845.891.560,00
B	Kas di Bendahara Pengeluaran		22.439.108,00	1.145.470.698,00
1	Kas Tunai		22.439.108,00	12.678.698,00
2	Sisa Panjar kegiatan		0,00	1.132.792.000,00
Jumlah			160.492.014,78	5.433.013.896,92

Komponen Kas di BLUD RSUD Praya terdiri dari kas di bank dan kas di bendahara BLUD. Kas di bank merupakan rekening yang dibentuk dalam rangka pengelolaan penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD Praya. Sedangkan kas di bendahara BLUD merupakan kas tunai yang masih berada pada Bendahara BLUD RSUD Praya baik dalam bentuk kas tunai dan sisa panjar kegiatan. Namun pada Tahun 2025 tidak terdapat sisa panjar kegiatan, artinya seluruh transaksi keuangan BLUD RSUD Praya Tahun 2025 telah di sampaikan surat pertanggungjawabannya kepada pengguna anggaran.

6. Penjelasan Kas di BLUD puskesmas per 31 Desember 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.74 Rincian Kas di BLUD Puskesmas

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025			31 Desember 2024
		Tunai	Bank	Jumlah	
1	Kas di BLUD Puskesmas Praya	45.875.621,00	575.292.074,43	621.167.695,43	515.572.509,55
2	Kas di BLUD Puskesmas Puyung	0,00	353.268.544,70	353.268.544,70	478.409.339,81
3	Kas di BLUD Puskesmas Aikmual	7.816.047,00	755.908.191,50	763.724.238,50	972.309.096,56
4	Kas di BLUD Puskesmas Janapria	8.876.572,71	811.385.378,38	820.261.951,09	896.755.553,86
5	Kas di BLUD Puskesmas Aik Darek	22.342.817,89	536.193.211,58	558.536.029,47	709.204.341,65
6	Puskesmas Batunyala	0,00	214.805.163,47	214.805.163,47	0,00
7	Puskesmas Kopang	34.000,00	462.645.337,24	462.679.337,24	0,00
8	Puskesmas Mantang	9.500.000,00	273.169.973,70	282.669.973,70	0,00
9	Puskesmas Sengkol	9.565.000,00	358.380.986,75	367.945.986,75	0,00
10	Puskesmas Muncan	7.171.000,00	354.184.821,52	361.355.821,52	0,00
11	Puskesmas Pengadang	5.268.232,00	46.986.772,23	52.255.004,23	0,00
12	Puskesmas Penujak	60.000,00	164.799.080,53	164.859.080,53	0,00
13	Puskesmas Kuta	9.963.424,00	501.613.850,58	511.577.274,58	0,00
14	Puskesmas Mangkung	17.876.101,30	572.988.197,75	590.864.299,05	0,00
15	Puskesmas Teruwai	21.547.313,00	57.929.525,56	79.476.838,56	0,00
16	Puskesmas Mujur	115.213.608,00	136.341.774,43	251.555.382,43	0,00



No	Uraian	31 Desember 2025			31 Desember 2024
		Tunai	Bank	Jumlah	
17	Puskesmas Bonjeruk	9.547.842,80	266.609.108,68	276.156.951,48	0,00
18	Puskesmas Bagu	18.318.286,00	155.448.369,04	173.766.655,04	0,00
19	Puskesmas Ganti	53.785.392,00	115.964.838,25	169.750.230,25	0,00
20	Puskesmas Darek	19.838.564,00	218.684.126,16	238.522.690,16	0,00
21	Puskesmas Ubung	13.172.412,00	80.676.685,23	93.849.097,23	0,00
22	Puskesmas Teratak	9.500.000,00	92.910.400,49	102.410.400,49	0,00
23	Puskesmas Pringgarata	10.000.000,00	136.885.244,64	146.885.244,64	0,00
24	Puskesmas Langko	4.778.755,16	360.621.948,46	365.400.703,62	0,00
25	Puskesmas Batu Jangkih	3.322.170,00	176.990.213,31	180.312.383,31	0,00
26	Puskesmas Batujai	16.083.652,00	82.884.417,31	98.968.069,31	0,00
27	Puskesmas Wajageseng	20.725.728,40	32.535.247,21	53.260.975,61	0,00
28	Puskesmas Tanak Beak	15.569.513,00	209.419.454,85	224.988.967,85	0,00
29	Puskesmas Awang	2.914.072,00	54.412.619,02	57.326.691,02	0,00
30	Labkesda dan UTD	409.036,99	468.773.774,66	469.182.811,65	0,00
Jumlah		479.075.161,25	8.628.709.331,66	9.107.784.492,91	3.572.250.841,43

7. BLUD pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kewajaran penyajian laporan keuangan. Untuk BLUD RSUD Praya, audit atas laporan keuangan telah dilaksanakan oleh KAP Fridolinus Peno sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 0000107/2.1449/AU.5/11/1970-2/1/V/2026, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sementara itu, seluruh BLUD Puskesmas telah dilakukan audit oleh KAP Khairunnas. Hasil audit tersebut telah diperoleh sesuai dengan Surat Nomor 22 s.d 28 dan 31 s.d. 53/2/1084/AU.5/11/0799-1/1/V/2026, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOS

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Saldo Kas Dana BOS mulai Tahun 2024 saldo dana BOS disajikan pada akun Kas Dana BOSP;

5.3.1.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki saldo Kas Dana Kapitasi per 31 Desember 2025 pada FKTP sebesar Rp0,00, dan mengalami penurunan dibanding posisi per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2025 seluruh Puskesmas telah beralih status menjadi BLUD Puskesmas sehingga penyajian saldo kas pada FKTP telah di reklasifikasi dan disajikan pada akun saldo kas di Bendahara BLUD. Berikut rincian Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) yang bersumber dari pendanaan Dana JKN sebagai berikut.

Tabel 5.75 Rincian Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) Dana JKN

(dalam Rupiah)

No	FKTP	31 Desember 2025			31 Desember 2024
		Bank	Tunai	Jumlah	
1	Puskesmas Batunyal	0,00	0,00	0,00	75.885.401,00
2	Puskesmas Kopang	0,00	0,00	0,00	371.063.117,00
3	Puskesmas Mantang	0,00	0,00	0,00	111.367.255,00
4	Puskesmas Sengkol	0,00	0,00	0,00	76.855.569,00
5	Puskesmas Muncan	0,00	0,00	0,00	54.673.227,00
6	Puskesmas Pengadang	0,00	0,00	0,00	15.732.313,00

No	FKTP	31 Desember 2025			31 Desember 2024
		Bank	Tunai	Jumlah	
7	Puskesmas Penujak	0,00	0,00	0,00	53.970.085,00
8	Puskesmas Kuta	0,00	0,00	0,00	81.141.257,00
9	Puskesmas Mangkung	0,00	0,00	0,00	82.659.104,00
10	Puskesmas Teruwai	0,00	0,00	0,00	296.153,00
11	Puskesmas Mujur	0,00	0,00	0,00	145.970.522,00
12	Puskesmas Bonjeruk	0,00	0,00	0,00	51.898.216,00
13	Puskesmas Bagu	0,00	0,00	0,00	30.549.991,00
14	Puskesmas Ganti	0,00	0,00	0,00	65.215.896,00
15	Puskesmas Darek	0,00	0,00	0,00	160.922.401,00
16	Puskesmas Ubung	0,00	0,00	0,00	11.338.193,00
17	Puskesmas Teratak	0,00	0,00	0,00	71.223.853,00
18	Puskesmas Pringgarata	0,00	0,00	0,00	106.744.703,00
19	Puskesmas Langko	0,00	0,00	0,00	116.206.569,80
20	Puskesmas Batu Jangkih	0,00	0,00	0,00	90.994.894,00
21	Puskesmas Batujai	0,00	0,00	0,00	20.270.147,00
22	Puskesmas Wajageseng	0,00	0,00	0,00	31.706.929,00
23	Puskesmas Tanak Beak	0,00	0,00	0,00	34.693.741,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	1.861.379.536,80

5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp1.019.811.509,00 dan Rp742.851.465,77. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 merupakan Utang Jangka Pendek Lainnya dalam bentuk utang PFK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Rincian Kas Lainnya

(dalam Rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	212.700.331,00	52.423.942,77
2	Dinas Kesehatan	25.049.024,00	13.180.433,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	812.998.364,00	677.247.090,00
Jumlah		1.050.747.719,00	742.851.465,77

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 merupakan Utang Jangka Pendek Lainnya dalam bentuk utang PFK telah disetor seluruhnya ke RKUN pada Tahun 2025 sedangkan Kas Lainnya dalam bentuk utang PFK per 31 Desember 2025 senilai Rp1.050.747.719,00 dengan rincian penyetoran sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rincian Penyetoran Kas Lainnya

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Di Setor Sebelum Tanggal 15 Januari 2026	Di Setor Setelah Tanggal 15 Januari 2026	Belum Disetor	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	TK Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
	SD Negeri	17.169.161,00	66.426.047,00	0,00	83.595.208,00
	SMP Negeri	32.438.989,00	96.666.134,00	0,00	129.105.123,00
2	BLUD Puskesmas	0,00	25.049.024,00	0,00	25.049.024,00
3	BLUD RSUD	0,00	812.998.364,00	0,00	812.998.364,00
Jumlah		49.608.150,00	1.001.139.569,00	0,00	1.050.747.719,00

5.3.1.1.1.8 Setara Kas

Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2025 telah membentuk deposito pada PT Bank NTB Syariah Cabang Praya senilai Rp100.000.000.000,00, namun per 31 Desember 2025 dana deposito tersebut telah di cairkan/dilimpahkan ke RKUD Kabupaten Lombok Tengah.

5.3.1.1.1.9 Kas Dana BOSP

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki saldo Dana BOSP per 31 Desember 2025 senilai Rp944.187.940,88 yang tersebar pada 669 sekolah negeri se-Kabupaten Lombok Tengah baik pada tingkat Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN) maupun Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Berikut rincian posisi Kas di Bendahara Dana BOSP per 31 Desember 2025:

Tabel 5.78 Rincian Sisa Kas di Bendahara Dana BOS

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025			31 Desember 2024
		Bank	Tunai	Jumlah	
1	Kas Dana BOSP TKN	960.879,31	0,00	960.879,31	0,00
2	Kas Dana BOSP SDN	809.681.127,06	50.000,00	809.731.127,06	535.809.471,08
3	Kas Dana BOSP SMPN	131.906.934,51	1.589.000,00	133.495.934,51	108.630.202,63
Jumlah		942.548.940,88	1.639.000,00	944.187.940,88	644.439.673,71

Rincian Sisa Kas di Bendahara Dana BOS untuk masing-masing satuan pendidikan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 7. Rincian Saldo Kas BOSP Per 31 Desember 2025**.

5.3.1.1.1.10 Kas Dana BOK Puskesmas

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 senilai Rp3.303.365.022,00 yang tersebar pada 29 FKTP dan tersimpan pada Bank BNI Cabang Praya sesuai dengan instruksi dari Kementerian Kesehatan bahwa penyaluran dana puskesmas harus melalui Bank BNI. Berikut rincian Kas Dana BOK Puskemas per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.79 Rincian Kas Dana BOK Puskesmas (FKTP)

(dalam Rupiah)

No	FKTP	Nomor Rekening	31 Desember 2025			31 Desember 2024
			Bank	Tunai	Jumlah	
1	Puskesmas Praya	1590056406	76.350.915,00	0,00	76.350.915,00	303.469.830,00
2	Puskesmas Puyung	1590056166	200.505.592,00	0,00	200.505.592,00	118.128.246,00
3	Puskesmas Aikmual	1590056371	133.446.525,00	0,00	133.446.525,00	306.492.658,00
4	Puskesmas Janapria	1590056304	50.693.572,00	0,00	50.693.572,00	148.098.490,00
5	Puskesmas Aik Darek	1590056360	54.327.574,00	0,00	54.327.574,00	111.453.502,00
6	Puskesmas Batunyala	1590056257	86.995.278,00	0,00	86.995.278,00	209.509.347,00
7	Puskesmas Kopang	1590056224	183.244.948,00	0,00	183.244.948,00	30.885.205,00
8	Puskesmas Mantang	1590056326	223.219.990,00	0,00	223.219.990,00	271.928.309,00
9	Puskesmas Sengkol	1590056382	190.862.578,00	0,00	190.862.578,00	395.792.598,00
10	Puskesmas Muncan	1590056235	220.713.611,00	0,00	220.713.611,00	308.881.796,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	FKTP	Nomor Rekening	31 Desember 2025			31 Desember 2024
			Bank	Tunai	Jumlah	
11	Puskesmas Pengadang	1590056348	137.129.278,00	0,00	137.129.278,00	252.601.600,00
12	Puskesmas Penujak	1590056315	115.110.633,00	0,00	115.110.633,00	112.136.435,00
13	Puskesmas Kuta	1590056246	78.744.075,00	0,00	78.744.075,00	154.184.404,00
14	Puskesmas Mangkung	1590056393	140.408.822,00	0,00	140.408.822,00	535.645.658,00
15	Puskesmas Teruwai	1590056133	30.370.999,00	0,00	30.370.999,00	234.966.032,00
16	Puskesmas Mujur	1590056279	94.947.444,00	0,00	94.947.444,00	165.168.388,00
17	Puskesmas Bonjeruk	1590056122	199.485.588,00	0,00	199.485.588,00	126.202.938,00
18	Puskesmas Bagu	1590056155	18.826.015,00	0,00	18.826.015,00	58.333.803,00
19	Puskesmas Ganti	1590056213	59.748.386,00	0,00	59.748.386,00	132.956.515,00
20	Puskesmas Darek	1590056268	237.251.806,00	0,00	237.251.806,00	102.781.206,00
21	Puskesmas Ubung	1590056291	91.171.204,00	0,00	91.171.204,00	136.149.136,00
22	Puskesmas Teratak	1590056337	219.599.174,00	0,00	219.599.174,00	79.363.979,00
23	Puskesmas Pringgarata	1590056280	98.220.488,00	0,00	98.220.488,00	50.091.794,00
24	Puskesmas Langko	1590056359	234.123.285,00	0,00	234.123.285,00	61.716.238,00
25	Puskesmas Batu Jangkih	1590056202	38.495.088,00	0,00	38.495.088,00	202.375.250,00
26	Puskesmas Batujai	1590056199	21.749.268,00	0,00	21.749.268,00	21.224.250,00
27	Puskesmas Wajageseng	1590056177	30.531.758,00	0,00	30.531.758,00	197.464.799,00
28	Puskesmas Tanak Beak	1590056188	29.755.739,00	0,00	29.755.739,00	155.078.822,00
29	Puskesmas Awang	1808707027	7.335.389,00	0,00	7.335.389,00	6.589.599,00
Jumlah			3.303.365.022,00	0,00	3.303.365.022,00	4.989.670.827,00

Dari saldo dana BOK sebesar Rp3.303.365.022,00 terdapat jasa giro dari pengelolaan rekening dana BOK senilai Rp3.731.871,00 yang belum dilimpahkan ke rekening Kas Daerah per 31 Desember 2025.

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Pajak Daerah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Pajak Daerah sebagai berikut.

Tabel 5.80 Daftar Piutang Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Reklame	35.731.666,67	33.693.750,00	2.037.916,67	6,05
2	Piutang Pajak Air Tanah	102.000,00	22.596.200,00	(22.494.200,00)	(99,55)
3	Piutang PBB-P2	106.435.045.313,00	86.321.727.662,07	20.113.317.650,93	23,30
Jumlah		106.470.878.979,67	86.378.017.612,07	20.092.861.367,60	23,26

Penjelasan:

1. Pengakuan piutang pajak terjadi pada saat penerbitan surat ketetapan piutang pajak, artinya piutang pajak diakui pada saat di terbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan terhadap pajak yang belum di lunasi sampai dengan batas yang ditentukan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Pengakuan piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi, dan piutang pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
3. Seluruh piutang pajak yang dimiliki per 31 Desember 2025 masih dalam pengurusan dan penguasaan pemerintah daerah, artinya belum ada yang diserahkan atau dilimpahkan pengurusan penagihannya kepada instansi lain;
4. Terdapat penambahan Piutang Pajak Reklame pada Tahun 2025 senilai Rp17.787.916,67 dan pembayaran Piutang Pajak Reklame selama Tahun 2025 senilai Rp15.750.000,00;
5. Nilai Piutang Pajak Air Tanah terjadi penurunan sebesar Rp22.494.200,00 atau sebesar 99,55% hal ini disebabkan karena wajib pajak telah melakukan pembayaran tagihan piutang pajaknya sedangkan atas sisa Piutang Pajak Air Tanah Per 31 Desember 2025 senilai Rp102.000,00 telah di bayarkan di Tahun 2026 sesuai dengan SSPD Nomor Seri 017141 tanggal 06 Maret 2026;
6. Nilai Piutang Pajak PBB-P2 Per 31 Desember 2025 terjadi peningkatan sebesar 23,30% bila dibandingkan dengan nilai piutang PBB-P2 Tahun 2024, peningkatan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pada Tahun 2025 Bapenda melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data PBB-P2. Hasil pemutakhiran dilakukan perekaman dalam Aplikasi E-PAD/Smartgov baik oleh vendor Cartenz, PT Data Bumi, dan Tim pengelola pajak PBB-P2 di Bapenda. Namun, atas proses perekaman data tersebut, ditemukan data ganda pada tabel “Subjek Pajak” untuk NIK yang sama yang merupakan residu dari proses migrasi data. Sehingga menyebabkan nilai penerimaan pada fitur Evaluasi Penerimaan sebagai pengurang nilai pokok piutang Neraca mencantumkan nilai lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini baru diketahui pada saat pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2025 dan Cartenz telah menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan pembersihan data residu migrasi pada tabel “Subjek Pajak”;
 - b. Terdapat kekeliruan dalam pengambilan data untuk penyajian Nilai Piutang pada Neraca per 31 Desember 2025. Sehingga Bapenda melakukan perhitungan ulang atas nilai Piutang PBB-P2 dengan memanfaatkan informasi nilai ketetapan PBB-P2 yang diterbitkan tiap tahun dari fitur Evaluasi Penerimaan. Sedangkan data pembayaran piutang memanfaatkan informasi dari fitur Daftar Penerimaan. Hasil pemeriksaan dengan menyandingkan per tahun antara perhitungan ulang nilai Piutang PBB-P2 oleh Bapenda dengan nilai Piutang PBB-P2 pada Neraca (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 menunjukkan terdapat selisih Saldo Piutang PBB-P2 sebesar Rp15.453.288.447,93. Atas hal ini, nilai piutang yang seharusnya disajikan pada Neraca *Unaudited* sebesar Rp106.435.045.313,00. Nilai tersebut dapat ditelusuri *by name by address*;
 - c. Selain itu, terdapat selisih sebesar Rp90.379.243,00 antara nilai penerimaan PBB-P2 pada LRA *Unaudited* senilai Rp16.871.275.735,00 dengan Aplikasi E-PAD/Smartgov senilai Rp16.780.896.492,00. Kepala Bapenda menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan Aplikasi E-PAD/Smartgov hanya merekam secara

otomatis WP yang melakukan pembayaran melalui Tokopedia, Indomaret, Alfamart, QRIS, dan *Virtual Account*. Sedangkan pembayaran WP melalui transfer antar bank belum secara otomatis terekam dalam Aplikasi tersebut. Namun, atas selisih sebesar Rp90.379.243,00, Bapenda tidak dapat menjelaskannya. Sehingga terdapat potensi nilai Piutang PBB-P2 yang sudah terbayar namun belum tercatat dalam Aplikasi E-PAD/Smartgov atas penerimaan PBB-P2 melalui transfer bank.

7. Berikut rincian piutang pajak daerah berdasarkan umur piutang pajak untuk mengetahui tingkat kolektabilitas piutang sebagai berikut:

Tabel 5.81 Rincian Piutang Pajak Menurut Umur Piutang

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Piutang Per 31 Desember 2025	Kategori Piutang Pajak Tahun 2025				Jumlah Nilai penyisihan
			Lancar (<1 th)	Kurang Lancar (1 s.d. 3 th)	Diragukan s.d. 5 th)	Macet (>5 th)	
			1%	10%	50%	100%	
1	Piutang Pajak Reklame	35.731.666,67	132.908,33	915.000,00	0,00	0,00	1.047.908,33
2	Piutang Pajak Air Tanah	102.000,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
3	Piutang PBB-P2	106.435.045.313,00	89.065.569,46	869.697.501,30	10.054.613.831,50	59.815.728.745,00	70.829.105.647,26
Jumlah		106.470.878.979,67	89.198.987,79	870.612.501,30	10.054.613.831,50	59.815.728.745,00	70.830.154.065,59

8. Berikut rincian Piutang PBB tak tertagih berdasarkan tahun timbulnya piutang:

Tabel 5.82 Piutang PBB-P2 Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-25			31-Des-24
		Saldo Piutang	Penyisihan	NRV	
1	Tahun 2011	0,00	0,00	0,00	-
2	Tahun 2012	4.282.953.777,00	4.282.953.777,00	0,00	2.685.481.286,00
3	Tahun 2013	4.984.167.777,00	4.984.167.777,00	0,00	3.031.710.354,00
4	Tahun 2014	3.590.107.309,00	3.590.107.309,00	0,00	2.236.275.583,00
5	Tahun 2015	6.007.163.565,00	6.007.163.565,00	0,00	3.503.422.827,00
6	Tahun 2016	8.376.096.258,00	8.376.096.258,00	0,00	7.843.634.040,00
7	Tahun 2017	7.843.569.810,00	7.843.569.810,00	0,00	6.683.341.943,00
8	Tahun 2018	7.852.142.610,00	7.852.142.610,00	0,00	7.641.442.445,59
9	Tahun 2019	7.750.761.448,00	7.750.761.448,00	0,00	7.416.957.746,83
10	Tahun 2020	9.128.766.191,00	9.128.766.191,00	0,00	9.025.582.463,13
11	Tahun 2021	11.238.420.296,00	5.619.210.148,00	5.619.210.148,00	8.854.422.140,74
12	Tahun 2022	8.870.807.367,00	4.435.403.683,50	4.435.403.683,50	8.514.681.844,78
13	Tahun 2023	8.696.975.013,00	869.697.501,30	7.827.277.511,70	9.015.428.907,00
14	Tahun 2024	9.003.391.769,00	45.016.958,85	8.958.374.810,16	9.869.346.081,00
15	Tahun 2025	8.809.722.123,00	44.048.610,62	8.765.673.512,39	-
Jumlah		106.435.045.313,00	70.829.105.647,26	35.605.939.665,74	86.321.727.662,07

Rincian mutasi Piutang Pajak Daerah dan klasifikasi umur atas Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 8a. Daftar Piutang Pajak Daerah dan Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2025**

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Retribusi Daerah per tanggal Nnraca yaitu rincian nilai

kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut.

Tabel 5.83 Daftar Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	570.394.800,00	997.436.350,00	(427.041.550,00)	(42,81)
	BPJS Non Kapitasi	296.958.800,00	551.044.350,00	(254.085.550,00)	(46,11)
	UTD Unit Laboratorium Dinas Kesehatan	273.436.000,00	446.392.000,00	(172.956.000,00)	(38,75)
2	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	293.247.045,00	293.247.045,00	0,00	0,00
	PT STP	36.993.379,42	36.993.379,42	0,00	0,00
	PT Pr	25.917.764,83	25.917.764,83	0,00	0,00
	PT XLA	63.696.184,58	63.696.184,58	0,00	0,00
	PT SSKP	13.113.317,92	13.113.317,92	0,00	0,00
	PT TB	26.034.306,50	26.034.306,50	0,00	0,00
	PT GT	32.653.762,50	32.653.762,50	0,00	0,00
	PT EBT	8.596.838,00	8.596.838,00	0,00	0,00
	PT IL	71.159.552,92	71.159.552,92	0,00	0,00
	PT MLP	15.081.938,33	15.081.938,33	0,00	0,00
3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	505.890.983,33	522.940.983,33	(17.050.000,00)	(3,26)
	Retribusi Sewa Tanah	473.415.983,33	473.415.983,33	0,00	0,00
	Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan	32.475.000,00	49.525.000,00	(17.050.000,00)	(34,43)
4	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	20.466.000,00	51.260.000,00	(30.794.000,00)	(60,07)
	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan UTD Persampahan	20.466.000,00	51.260.000,00	(30.794.000,00)	(60,07)
5	Piutang Retribusi Pasar Grosir Pertokoan	1.204.493.491,00	1.204.493.491,00	0,00	0,00
	Retribusi Sewa Kios	1.204.493.491,00	1.204.493.491,00	0,00	0,00
Jumlah		2.594.492.319,33	3.069.377.869,33	(474.885.550,00)	(15,47)

Penjelasan:

1. Pengakuan piutang retribusi terjadi pada saat penerbitan surat ketetapan piutang retribusi, artinya piutang retribusi diakui pada saat di terbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan terhadap retribusi yang belum di lunasi sampai dengan batas yang ditentukan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
2. Pengakuan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi, dan piutang retribusi disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) di kecualikan untuk Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari BPJS;
3. Seluruh piutang retribusi yang dimiliki per 31 Desember 2025 masih dalam pengurusan dan penguasaan pemerintah daerah, artinya belum ada yang diserahkan atau dilimpahkan pengurusan penagihannya kepada instansi lain; dan
4. Berikut rincian piutang retribusi daerah berdasarkan umur piutang retribusi untuk mengetahui tingkat kolektabilitas piutang retribusi sebagai berikut.



Tabel 5.84 Rincian Piutang Retribusi Menurut Umur Piutang

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Kategori Piutang Tahun 2025				Jumlah Nilai Penyisihan
			Lancar (<1 bulan)	Kurang Lancar (1 s.d. 3 Bulan)	Diragukan (3 s.d. 12 Bulan)	Macet (>12 Bulan)	
			1%	10%	50%	100%	
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	570.394.800,00	588.830,00	0,00	0,00	155.670.000,00	156.258.830,00
2	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	293.247.045,00	0,00	0,00	0,00	293.247.045,00	293.247.045,00
3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	505.890.983,33	0,00	0,00	0,00	505.890.983,33	505.890.983,33
4	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	20.466.000,00	0,00	0,00	4.048.500,00	12.369.000,00	16.417.500,00
5	Piutang Retribusi Pasar Grosir Pertokoan	1.204.493.491,00	0,00	0,00	0,00	1.204.493.491,00	1.204.493.491,00
Jumlah		2.594.492.319,33	588.830,00	0,00	4.048.500,00	2.171.670.519,33	2.176.307.849,33

5. Berikut penjelasan dari masing-masing rincian Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 5.85 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Piutang Puskesmas Praya	0,00	0,00
2	Piutang Puskesmas Puyung	0,00	0,00
3	Piutang Puskesmas Aikmual	0,00	0,00
4	Piutang Puskesmas Janapria	0,00	0,00
5	Piutang Puskesmas Aik Darek	0,00	0,00
6	Piutang Puskesmas Bagu	0,00	0,00
7	Piutang Puskesmas Batujai	0,00	56.988.750,00
8	Piutang Puskesmas Batunyala	0,00	0,00
9	Piutang Puskesmas Batu Jangkih	0,00	0,00
10	Piutang Puskesmas Bonjeruk	0,00	52.276.100,00
11	Piutang Puskesmas Darek	0,00	63.625.100,00
12	Piutang Puskesmas Ganti	49.308.000,00	0,00
13	Piutang Puskesmas Kopang	105.158.600,00	0,00
14	Piutang Puskesmas Kuta	0,00	0,00
15	Piutang Puskesmas Langko	0,00	0,00
16	Piutang Puskesmas Mangkung	0,00	195.437.000,00
17	Piutang Puskesmas Mantang	0,00	0,00
18	Piutang Puskesmas Mujur	0,00	0,00
19	Piutang Puskesmas Muncan	0,00	37.929.000,00

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
20	Piutang Puskesmas Pengadang	0,00	0,00
21	Piutang Puskesmas Penujak	0,00	38.304.400,00
22	Piutang Puskesmas Pringgarata	0,00	0,00
23	Piutang Puskesmas Sengkol	1.260.000,00	0,00
24	Piutang Puskesmas Tanak Beak	0,00	0,00
25	Piutang Puskesmas Teratak	52.769.000,00	54.884.000,00
26	Piutang Puskesmas Teruwai	66.438.000,00	0,00
27	Piutang Puskesmas Ubung	0,00	0,00
28	Piutang Puskesmas Wajageseng	0,00	51.600.000,00
29	Piutang Puskesmas Pelabuhan Awang	22.025.200,00	0,00
Jumlah		296.958.800,00	551.044.350,00

Terdapat penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada FKTP yang bersumber dari reklasifikasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah senilai Rp55.563.000,00, reklasifikasi ini didasarkan pada ketentuan PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 27 dan Pasal 137, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 62 ayat (1) dimana pendapatan yang berasal dari kegiatan pelayanan terkait objek retribusi sesuai dengan jenis retribusinya baik yang dilakukan oleh OPD maupun BLUD/Lembaga lain yang memiliki kerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga pendapatan dari klaim BPJS Non Kapitasi BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD di akui sebagai Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- b. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.86 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Piutang UTD pada RSI YATOFA	155.670.000,00	344.820.000,00
2	RS Mandalika	0,00	51.412.000,00
3	RS Cahaya Medika	0,00	22.089.000,00
4	RS Adikarsa	0,00	11.138.000,00
5	RS Anggoro	117.766.000,00	16.933.000,00
Jumlah		273.466.000,00	446.392.000,00

- c. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp20.466.000,00 dan Rp51.260.000,00. Piutang ini bersumber dari fasilitas pelayanan pembuangan akhir yang dikelola oleh UTD Persampahan;
- d. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp293.247.045,00 dan Rp293.247.045,00. Nilai Piutang posisi per 31 Desember 2025 masih sama dengan posisi per 31 Desember 2024. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mulai Tahun 2024 sudah tidak lagi menjadi objek pendapatan retribusi daerah setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

e. Piutang Retribusi Jasa Usaha dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp522.940.983,33 terdiri dari Piutang Retribusi Sewa Tanah senilai Rp473.415.983,33 dan Piutang Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan Rp49.525.000,00. Piutang Retribusi Sewa Tanah merupakan kontribusi atas sewa tanah pemerintah yang berada di Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp473.415.983,33 dan Rp473.415.983,33 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.87 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Tanah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Sewa Tanah Komplek Orient	300.114.583,33	300.114.583,33
2	Sewa Tanah Terminal Praya	58.000.000,00	58.000.000,00
3	Sewa Tanah Kompleks Pertokoan Praya	10.000.000,00	10.000.000,00
4	Sewa Tanah Batu Bungus	150.000,00	150.000,00
5	Sewa Tanah Pasar Sengkol	180.000,00	180.000,00
6	Sewa Tanah Pasar Mujur Dalam	3.600.000,00	3.600.000,00
7	Sewa Tanah Pasar Mujur Luar	1.500.000,00	1.500.000,00
8	Sewa Tanah Pasar Bonjeruk	230.000,00	230.000,00
9	Sewa Tanah Pasar Pengadang	780.000,00	780.000,00
10	Sewa Tanah -Pringgarata	3.264.000,00	3.264.000,00
11	Sewa Tanah Pasar Renteng	16.515.000,00	16.515.000,00
12	Sewa Tanah Pasar Sengkol Utara	320.000,00	320.000,00
13	Sewa Tanah Gudang Sinar Terang	0,00	0,00
14	Sewa Tanah Pasar Teratak	0,00	0,00
15	Sewa Tanah Pasar Tenganan	7.200.000,00	7.200.000,00
16	Sewa Tanah Di Pasar Selatan Pasar Puyung	500.000,00	500.000,00
17	Sewa Tanah Pasar Ubung	11.822.400,00	11.822.400,00
18	Sewa Tanah -Kauman	4.000.000,00	4.000.000,00
19	Sewa Tanah Kompleks BSI	36.200.000,00	36.200.000,00
20	Sewa Tanah Blakang Bioskop Praya	5.040.000,00	5.040.000,00
21	Sewa Tanah Warung Murah	0,00	0,00
22	PT Sinar Tiga Pilar-Raja Hotel	0,00	0,00
23	Sewa Tanah Kp Jaw - Rent Car	14.000.000,00	14.000.000,00
Jumlah		473.415.983,33	473.415.983,33

- 2) Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2025 senilai Rp49.525.000,00 merupakan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan atas sewa rumah dinas yang berlokasi di Kelurahan Leneng yang disewakan kepada PNS, Non PNS dan pensiunan. Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sejak pengalihan kewenangan dari Bapenda kepada SKPD pengelola aset tersebut pada Tahun 2024, yang tidak didukung berita acara serah terima dokumen sebagai dasar penagihan. Namun, pada Tahun 2026 BKAD selaku SKPD penerima telah melakukan identifikasi, penelusuran, serta konfirmasi kepada penyewa yang dituangkan dalam berita acara sebagai. Selain itu, BKAD juga telah melakukan *appraisal* untuk menetapkan tarif sewa pada SKRD berikutnya;

- 3) Piutang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp1.204.493.491,00 dan Rp1.204.493.491,00. Piutang ini bersumber dari pertokoan milik pemerintah daerah yang tersebar di Bulayak, Mantang, pusat pertokoan Praya dan lain-lain. Tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas piutang Piutang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan sejak pengalihan kewenangan pengelolaan retribusi yang sebelumnya dikelola oleh Bapenda kepada SKPD yang pengelola aset tersebut pada Tahun 2024, yang tidak didukung berita acara serah terima dokumen sebagai dasar penagihan. Pada Tahun 2026 BKAD telah membuat perjanjian sewa baru dengan penyewa pertokoan sesuai hasil *appraisal* dari KJPP dengan metode pembayaran sewa pertahun untuk menimalisir adanya tunggakan pembayaran sewa. Daftar Mutasi Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 8b. Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2025**

5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tanggal Neraca, tidak terdapat saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pengakuan piutang atas bagian laba/deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dituangkan dalam berita acara RUPS masing-masing BUMD. Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, BUMD belum melaksanakan RUPS untuk penetapan penggunaan laba Tahun Buku 2024, sehingga pemerintah daerah belum dapat mengakui adanya piutang deviden.

5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut.

Tabel 5.88 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan		375.457.600,77	375.457.600,77	0,00	0,00
	Pembangunan Kantor Camat	BPKAD	370.009.922,77	370.009.922,77	0,00	0,00
	Pembangunan Fasilitas Pariwisata	BPKAD	5.447.678,00	5.447.678,00	0,00	0,00
2	Piutang Denda Pajak	Bappenda	96.065.539,74	96.065.539,74	0,00	0,00
	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	Bappenda	8.751.826,36	8.751.826,36	0,00	0,00
	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minumuan	Bappenda	12.063.713,38	12.063.713,38	0,00	0,00
	Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bappenda	75.250.000,00	75.250.000,00	0,00	0,00
3	Piutang Denda Retribusi		145.580.648,08	145.580.648,08	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Uraian	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
	Kolam Renang Praya	BPKAD	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	Izin Mendirikan Bangunan	DPMTSP	4.154.300,00	4.154.300,00	0,00	0,00
	Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	140.626.348,08	140.626.348,08	0,00	0,00
4	Piutang BLUD		5.892.466.315,00	21.248.500.430,00	(15.356.034.115,00)	(72,27)
	Jasa Pelayanan	RSUD	5.767.780.515,00	21.056.937.430,00	(15.289.156.915,00)	(72,61)
	Jasa Pelayanan	Dikes	0,00	55.563.000,00	(55.563.000,00)	(100,00)
	Kerja sama pihak ketiga	RSUD	124.685.800,00	136.000.000,00	(11.314.200,00)	(8,32)
5	Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		87.156.730,00	176.481.990,00	(89.325.260,00)	(50,61)
	Piutang Keterlambatan Pembayaran Gaji Pegawai yang Pensiun/Pindah/Meninggal	BPKAD	82.447.130,00	171.772.390,00	(21.739.091,00)	(12,66)
	ESF	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.709.600,00	4.709.600,00	0,00	0,00
JUMLAH			6.596.726.833,59	22.042.086.208,59	(15.445.359.375,00)	(70,07)

Penjelasan:

- Piutang denda keterlambatan pekerjaan per 31 Desember 2025 dan per 2024 masing-masing senilai Rp375.457.600,77 dan Rp375.457.600,77 selama Tahun 2025 tidak ada penyetoran atas piutang pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- Piutang pendapatan denda pajak per 31 Desember 2025 dan per 2024 masing-masing senilai Rp96.065.539,74 dan Rp96.065.539,74 terdiri dari:
 - Piutang Denda Pajak Hotel senilai Rp8.751.826,36 merupakan piutang atas masa pajak Tahun 2022. Selama Tahun 2025 tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas Piutang Denda Pajak Hotel;
 - Piutang Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman senilai Rp12.063.713,38 merupakan piutang atas masa pajak Tahun 2022. Selama Tahun 2025 tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas Piutang Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman; dan
 - Piutang Denda Keterlambatan Penyampaian Laporan pada Bapenda sebesar Rp75.250.000,00 merupakan piutang atas denda keterlambatan penyampaian laporan PPAT sebesar Rp86.500.000,00 yang sampai dengan tanggal pelaporan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp11.250.000,00, sehingga masih terdapat sisa piutang sebesar Rp75.250.000,00.
- Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp145.580.648,08 dan Rp145.580.648,08. Rincian Piutang Denda Retribusi sebagai berikut.
 - Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi senilai Rp140.626.348,08, merupakan piutang atas masa retribusi Tahun 2022, tidak terdapat penambahan dan pengurang piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara selama Tahun 2025, hal ini

disebabkan karena Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi bukan lagi Objek Pendapatan Retribusi setelah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang merupakan atas pengelolaan Kolam Renang Praya senilai Rp800.000,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun pengurangan piutang Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kolam Renang Praya selama Tahun 2025; dan
 - c. Piutang Denda Persetujuan Bangunan Gedung atas Keterlambatan Penyetoran PBG senilai Rp4.154.300,00 selama Tahun 2025 tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas Piutang Denda Persetujuan Bangunan Gedung.
4. Piutang Pendapatan BLUD terdiri dari Piutang BLUD dari Jasa Layanan dan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.89 Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Pendapan BLUD)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Piutang BLUD dari Jasa Layanan	5.767.780.515,00	21.112.500.430,00
2	BLUD RSUD	5.767.780.515,00	21.056.937.430,00
3	BLUD Puskesmas	0,00	55.563.000,00
4	Puskesmas Praya	0,00	0,00
5	Puskesmas Puyung	0,00	55.563.000,00
6	Puskesmas Aikmual	0,00	0,00
9	Piutang BLUD dari Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	124.685.800,00	136.000.000,00
10	BLUD RSUD	124.685.800,00	136.000.000,00
Jumlah		5.892.466.315,00	21.248.500.430,00

- d. Piutang BLUD dari Jasa Layanan pada puskesmas berupa Piutang Jasa Layanan yang bersumber dari dana nonkapitasi telah dilakukan reklasifikasi penyajiannya ke piutang retribusi senilai Rp55.563.000,00;
 - e. Piutang BLUD dari Kerja Sama dengan Pihak Ketiga pada Tahun 2025 senilai Rp124.685.000,00 merupakan pendapatan BLUD RSUD Praya yang bersumber dari hasil pengelolaan lahan parkir RSUD Praya, penyewaan lahan koperasi RSUD dan Piutang KSO Laundry unit CSSD.
5. Piutang atas kelebihan pembayaran gaji per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp176.481.990,00 dan Rp176.481.990,00. Piutang ini terdiri dari:
- a. Lebih bayar gaji pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp6.709.600,00 kepada ESF, ST NIP.1986XXXXXX2 010 Pangkat III/c yang pindah ke Pemerintah Provinsi NTB. Lebih bayar tersebut timbul karena pembayaran gaji harusnya sudah dihentikan per Agustus 2018 sesuai dengan SKPP Nomor 991/209/SKPP/2019 tanggal 30 Juli 2018, namun masih dibayarkan hingga bulan Oktober 2018. Atas kelebihan bayar bulan Agustus 2018 telah diterima di Kas Daerah. Terhadap Piutang tersebut, yang bersangkutan telah menyetor senilai Rp2.000.000,00 pada tanggal 21 Januari 2019, namun sejak Tahun 2022 s.d. Tahun 2025 tidak ada penyetoran. Sehingga per 31 Desember 2025 masih tersisa senilai Rp4.709.600,00; dan

- b. Piutang atas kelebihan bayar gaji pada beberapa pegawai yang telah memasuki masa pensiun per 31 Desember 2025 senilai Rp87.156.730,00 dari posisi saldo awal senilai Rp171.772.390,00 tertagih sepanjang 2025 senilai Rp114.325.260,00 dan penambahan piutang pegawai Tahun 2025 senilai Rp25.000.000,00.

Daftar Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah dan Daftar Mutasi Piutang BLUD RSUD dapat dilihat pada **Lampiran 8c. Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2025** dan **Lampiran 8d. Mutasi Piutang BLUD RSUD Per 31 Desember 2025**.

5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Berikut merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Transfer Pemerintah Pusat per tanggal neraca dengan rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing Piutang Transfer Pusat sebagai berikut.

Tabel 5.90 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Selain saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025, terdapat Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp103.113.841.000,00 yang terdiri atas:

1. Piutang DBH Pajak senilai Rp37.341.203.000; dan
2. Piutang DBH Sumber Daya Alam senilai Rp65.772.638.000.

Piutang tersebut merupakan selisih antara alokasi definitif DBH yang ditetapkan pemerintah pusat dengan realisasi penyaluran yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

5.3.1.1.2.6 Piutang Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Transfer Antar Daerah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Transfer antar Daerah sebagai berikut.

Tabel 5.91 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	1.907.732.718,00	(1.907.732.718,00)	(100,00)
2	Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	2.532.434.816,00	(2.532.434.816,00)	(100,00)
3	Piutang DBH – PBBKB	2.474.260.094,00	8.169.381.124,00	(5.695.121.030,00)	(69,71)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
4	Piutang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	22.386.873,00	7.404.426,00	14.982.447,00	202,34
5	Piutang Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.496.646.967,00	12.616.953.084,00	(10.120.306.117,00)	(80,21)

Penjelasan :

1. Penetapan nilai Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 didasarkan kepada Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-160 Tahun 2026 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Triwulan IV dan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal 23 Januari 2026;
2. Nilai Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Per 31 Desember 2024 senilai Rp12.616.953.084,00 seluruhnya telah di setor ke RKUD Kabupaten Lombok Tengah pada Tanggal 18 Maret dan 21 Maret Tahun 2025; dan
3. Nilai Piutang DBH-PBBKB senilai Rp2.474.260.094,00 merupakan selisih dari DBH-PBBKB sesuai SK Difinitif dikurangi dengan Nilai salur DBH-PBBKB di Tahun 2025 Rp2.474.260.094,00 (Rp64.457.916.159,00 - Rp61.983.656.065,00) sedangkan nilai Piutang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Rp22.386.873,00 di peroleh dari Nilai DBH Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sesuai SK Definitif dikurangi dengan Nilai Salur DBH Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Tahun 2025 Rp22.386.873,00 (Rp95.187.022,00-Rp72.800.149,00).

Daftar Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 8e. Daftar Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Per 31 Desember 2025.**

5.3.1.1.2.7 Piutang Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.92 Rincian Piutang Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	114.037.000,00	(100,00)	(100,00)
2	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa /Uang Muka Kerja CV AY	63.712.000,00	63.712.000,00	0,00	0,00
Jumlah		63.712.000,00	177.749.000,00	0,00	0,00

Penjelasan :

1. Nilai Piutang Lainnya senilai Rp114.037.000,00 merupakan piutang atas pengembalian kurang volume pekerjaan sebanyak 21 paket pekerjaan berdasarkan hasil audit LKPD Tahun 2024 yang sudah sudah memiliki SKTJM dan lunas dibayarkan oleh pihak ketiga di Tahun 2025 pada saat proses pelaksanaan audit berlangsung; dan
2. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp63.712.000,00 terdiri dari Piutang Lainnya-Uang Muka Kerja CV AY atas Pekerjaan Pengadaan Uji Kincup (*side slip*) senilai Rp53.757.000,00 dan jaminan pelaksanaan senilai Rp9.955.000,00 pada Dinas Perhubungan. Sejak Tahun 2021 hingga 31 Desember 2025 sampai dengan laporan ini disajikan belum tertagih disebabkan karena Direktur CV AY telah meninggal dunia sesuai surat keterangan dari RSPAD.

Daftar Mutasi Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 8f. Daftar Piutang Lainnya Per 31 Desember 2025.**

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca yaitu Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Penyisihan Piutang sebagai berikut.

Tabel 5.93 Rincian Penyisihan Piutang

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Piutang	Penyisihan	Piutang Netto	Lampiran
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	118.222.457.099,59	73.006.461.914,92	45.215.995.184,67	Lampiran 8a
1.1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	106.470.878.979,67	70.830.154.065,59	35.640.724.914,08	Lampiran 8a
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	35.731.666,67	1.047.908,33	34.683.758,34	Lampiran 8a
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	102.000,00	510,00	101.490,00	Lampiran 8a
	Penyisihan Piutang PBBP2	106.435.045.313,00	70.829.105.647,26	35.605.939.665,74	Lampiran 8a
1.2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	2.594.492.319,33	2.176.307.849,33	418.184.470,00	Lampiran 8b
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	570.394.800,00	156.258.830,00	414.135.970,00	Lampiran 8b
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	293.247.045,00	293.247.045,00	0,00	Lampiran 8b
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	32.475.000,00	32.475.000,00	0,00	Lampiran 8b
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	473.415.983,33	473.415.983,33	0,00	Lampiran 8b



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Piutang	Penyisihan	Piutang Netto	Lampiran
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	20.466.000,00	16.417.500,00	4.048.500,00	Lampiran 8b
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.204.493.491,00	1.204.493.491,00	0,00	Lampiran 8b
1.3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	6.596.726.833,59	0,00	6.596.726.833,59	Lampiran 8c
1.4	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	2.496.646.967,00	0,00	2.496.646.967,00	Lampiran 8e
1.5	Penyisihan Piutang Lainnya	63.712.000,00	0,00	63.712.000,00	Lampiran 8f
Jumlah		118.222.457.099,59	73.006.461.914,92	45.215.995.184,67	

Penjelasan:

Piutang Lain-Lain PAD yang sah tidak dilakukan penyisihan karena jenis dan bentuk Piutang Lain-Lain PAD yang sah di peroleh dari berbagai bentuk perikatan, hal ini mengacu pada buletin teknis tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06 Tentang Akuntansi Piutang.

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Penyisihan Piutang pendapatan sebagaimana terdapat dalam ***lampiran 8a. Daftar Piutang Pajak Daerah dan Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2025 dan 8b. Daftar Piutang Retribusi Daerah dan Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2025.***

5.3.1.1.4 Beban dibayar dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Beban dibayar dimuka yang merupakan Beban Barang dan Jasa dibayar dimuka dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.94 Beban dibayar dimuka

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Pekerjaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Kominfo	Langganan <i>Broadband</i> Internet selama 1 Tahun (rinc. sesuai Kontrak)	288.000.000,00	264.800.000,00	23.200.000,00	8,06
2	Dinas Kominfo	SEWA LAYANAN CALL CENTER 112	99.012.000,00	0,00	99.012.000,00	100,00
3	Dinas Kominfo	<i>Lisensi Windows Server</i> Indosat <i>Windows Server Standart</i>	16.875.000	0,00	16.875.000,00	100,00
4	Dinas Kominfo	<i>Hosting Website</i> Utama (lomboktengahkab.go.id)	587.500	0,00	587.500,00	100,00
5	RSUD	Beban Dibayar Dimuka- Bunga Pinjaman Lembaga Keuangan Bank	102.386.641,58	101.851.932,53	534.709,05	0,52
6	SETDA	Sewa <i>Colocation Server</i> LPSE	12.432.000,00	31.250.000,00	(18.818.000,00)	(60,22)
Jumlah			519.293.141,58	397.901.932,53	121.391.209,05	30,51

Penjelasan:

1. Sekretariat Daerah atas pembayaran sewa Colocation Server LPSE sesuai dengan Bukti Kuitansi Pengadaan Barang Nomor 04.3/SPK-BPBJ/2024 senilai Rp37.296.000,00 pada PT Optimus Teknologi Pro. Jasa diterima selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2025 hingga 21 Feb 2026. Sehingga terdapat beban dibayar dimuka atas periode 1 Januari sampai dengan 21 Feb 2026 senilai Rp12.432.000,00;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai kontrak Rp198.024.000,00 berdasarkan Surat Pesanan kepada PT Jasnita Telekomindo untuk Langganan Sewa Layanan Call Center 112 selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan 10 Juni 2026. Atas penyediaan bulan Januari sampai dengan 10 Juni 2026 dicatat sebagai beban dibayar dimuka senilai Rp99.012.000,00;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai kontrak Rp864.000.000,00 untuk Langganan *Broadband* Internet selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 30 April 2026. Atas penyediaan bulan Januari sampai dengan 30 April 2026 dicatat sebagai beban dibayar dimuka senilai Rp288.000.000,00;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai kontrak Rp22.500.000,00 untuk Lisensi Windows Server Indosat *Windows Server Standart* selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 17 September 2025 sampai dengan 17 September 2026. Atas penyediaan bulan Januari sampai dengan 17 September 2026 dicatat sebagai beban dibayar dimuka senilai Rp16.875.000,00;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai kontrak Rp7.050.000,00 untuk *Hosting Website* Utama (lomboktengahkab.go.id) selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan 23 Januari 2026. Atas penyediaan bulan 1 Januari 2026 sampai dengan 23 Januari 2026 dicatat sebagai beban dibayar dimuka senilai Rp587.500,00 dan;
6. BLUD RSUD atas Pembayaran Bunga pinjaman jangka pendek kepada Bank BSI untuk Pembayaran Ujroh/Bunga atas Penerimaan Pembiayaan Tahap 6 (tanggal mulai 12 November 2025 dan Tanggal Jatuh Tempo 12 Februari 2026) sehingga terdapat beban bunga di bayar dimuka senilai Rp24.368.076,78 dan Ujroh/Bunga atas Penerimaan Pembiayaan Tahap 7 Tahun 2025 (tanggal mulai 08 Desember 2026 dan Jatuh tempo 08 Maret 2026) sehingga terdapat beban di bayar dimuka senilai Rp78.018.564,80, sehingga jumlah beban dibayar dimuka pada RSUD Praya senilai Rp102.386.641,58 (Rp24.368.076,78 + Rp78.018.564,80)

Rincian Perhitungan Beban dibayar dimuka dapat lihat pada **Lampiran 9. Daftar Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025.**

5.3.1.1.5 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Persediaan yang merupakan Persediaan Barang Pakai Habis sebagai berikut.

Tabel 5.95 Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	53.446.500,00	13.644.000,00
2	Bahan-Isi Tabung Gas	51.125.000,00	4.944.556,00
3	Barang yang diserahkan kepada masyarakat	6.298.419.322,00	11.610.060.252,60
4	Suku Cadang Lainnya	58.125.499,00	0,00
5	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	61.109.964,00	39.173.945,00
6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	470.861.989,00	605.499.209,00
7	Kertas dan Cover	566.400,00	0,00
8	Bahan Komputer	146.493.710,00	0,00
9	Suvenir/Cendera Mata	2.600.000,00	0,00
10	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	495.630,00	286.967.730,00
11	Alat Listrik	16.785.530,00	424.627,00
12	Obat	12.636.014.512,00	19.026.688.655,41
13	Obat-Obatan Lainnya	46.826.204,00	0,00
14	Persediaan Untuk Tujuan—strategis/Berjaga-Jaga	1.041.344.994,00	984.592.503,00
15	Bibit ternak ikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan	121.715.000,00	38.820.000,00
16	Bahan-bahan Baku	41.701.850,00	22.577.912,00
17	Bahan-bahan lainnya	11.664.312.280,00	142.334.232,00
Jumlah		32.711.944.384,00	32.775.727.622,01

Penjelasan:

- Persediaan dimaksud di atas merupakan bahan habis pakai/material yang terdiri dari alat tulis kantor, bahan komputer, kertas dan cover, barang cetakan, barang kuasi, benda pos, barang yang diserahkan kepada pihak ketiga, material/obat/alkon, bahan bakar minyak/gas, pakan ikan, bahan lainnya, bahan makanan/natura dan pakan natura, alat listrik, perabot kantor/alat kebersihan, bibit ikan, bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, dan bahan /kegiatan kantor lainnya.
- Metode pencatatan untuk jenis persediaan yang sifatnya *continuous* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan menggunakan metode perpetual. Proses tersebut sudah dilaksanakan pada RSUD Kabupaten Lombok Tengah serta Dinas Kesehatan. Untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK menggunakan metode periodik.
- Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperoleh Hibah Barang Habis Pakai dari Pemerintah Provinsi NTB berupa Barang Persediaan Non Alat dan Obat Kontrasepsi senilai Rp1.979.633.465,00, Persediaan Susu Kotak untuk pasien RSUD Praya senilai Rp34.625.000, dan hibah barang obat-obatan lainnya pada Dinas Kesehatan senilai Rp13.896.621.674,00.
- Barang yang di serahkan kepada Masyarakat terdiri dari Persediaan Obat-obatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.044.203.144,00, Alat Non Kontrasepsi pada Dinas P3AP2KB senilai Rp220.075.928,00 dan Pakan Natura berupa susu kotak pada Rumah Sakit Umum Praya senilai Rp34.140.250,00.

5. Persediaan untuk tujuan Strategis/Berjaga-Jaga senilai Rp1.041.344.994,00 merupakan persediaan dalam bentuk beras pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp942.956.874,00 dan Persediaan Bahan Makanan dan Bahan Bangunan untuk penanggulangan bencana daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp98.388.120,00 yang direalisasikan belanjanya pada akun Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.96 Persedian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga

(dalam Rupiah)

No	Nama Barang	OPD	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tempat Penyimpanan
1	Beras	Ketapang	7.910	Kg	11.000,00	87.010.000,00	Gapoktan Usaha Bersama (H. Solihin)
2	Beras	Ketapang	6.000	Kg	11.800,00	70.800.000,00	Gapoktan Usaha Bersama (H. Solihin)
3	Beras	Ketapang	5.250	Kg	11.933,33	62.649.982,50	Gapoktan Patuh Bersama (Salman, S.Pd.)
4	Beras	Ketapang	10.000	Kg	10.300,00	103.000.000,00	Gapoktan Patuh Bersama (Salman, S.Pd.)
5	Beras	Ketapang	8.850	Kg	10.250,00	90.712.500,00	Gapoktan Patuh Bersama (Salman, S.Pd.)
6	Beras	Ketapang	6.400	Kg	14.700,00	94.080.000,00	UD Zakirudin
7	Beras	Ketapang	6.400	Kg	11.800,00	75.520.000,00	UD Zakirudin
8	Beras	Ketapang	11.500	Kg	15.500,00	178.250.000,00	UD Zakirudin
9	Beras	Ketapang	520	Kg	11.933,33	6.205.331,50	UD Zakirudin
10	Beras	Ketapang	14.790	Kg	11.814,00	174.729.060,00	UD. Prina Jaya (Ahmad Zaenul)
11	Beras	BPBD	344	Pak	60.630,00	20.856.720,00	UD Alta
12	Air Mineral	BPBD	560	Dus	42.000,00	23.520.000,00	UD Alta
13	Mie Instan	BPBD	1.000	Biji	3.410,00	3.410.000,00	UD Alta
14	Air Bersih	BPBD	95	Tangki	300.000,00	28.500.000,00	PDAM Tirta Ardia Rinjani
15	Asbes	BPBD	261	Lembar	52.900,00	13.806.900,00	Gudang BPBD
16	Kayu	BPBD	50	Biji	99.890,00	4.994.500,00	Gudang BPBD
17	Semen	BPBD	44	Sak	75.000,00	3.300.000,00	Gudang BPBD
Jumlah						1.041.344.994,00	

6. Dinas Kesehatan pada Tahun 2025 melaksanakan pemusnahan/penghapusan Obat dan BMHP yang telah kedaluwarsa /rusak sesuai berita acara pemusnahan obat dan BMHP Nomor 400.7.27/1712/KES/2025 tanggal 18 Desember 2025 dengan nilai persediaan yang dimusnahkan/dihapuskan sebesar Rp362.871.921,00. Kegiatan pemusnahan tersebut Dinas Kesehatan bekerjasama dengan PT Putra Restu Abadi (PT PRIA) yang beralamatkan di Mojekerto Jawa Timur.

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan nilai persediaan per SKPD sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 10. Daftar Persediaan Masing-Masing SKPD Per 31 Desember 2025.**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut.

Tabel 5.97 Investasi Jangka Panjang

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	132.544.721.354,00	143.047.444.147,13	(10.502.722.793,13)	(7,34)
Jumlah		132.544.721.354,00	143.047.444.147,13	(10.502.722.793,13)	(7,34)

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Non Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Non Permanen sebagai berikut.

Tabel 5.98 Daftar Investasi Non Permanen

(dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	31 Desember 2025			31 Desember 2024
			Saldo Investasi	Penyisihan	Investasi Netto	
1	Perkuatan Permodalan Koperasi	Diskop	5.703.321.999,67	5.703.321.999,67	0,00	5.713.421.999,67
2	Revolving Tembakau	Distani	344.605.000,00	344.605.000,00	0,00	344.605.000,00
3	LEPP-M3 Bilelendo	Disikan	284.598.300,00	284.598.300,00	0,00	284.598.300,00
4	Kredit Modal Usaha Kelembagaan	Distani	281.282.000,00	281.282.000,00	0,00	281.282.000,00
5	Lahan Marginal	Distani	494.505.000,00	494.505.000,00	0,00	494.505.000,00
6	Sapi Fetening	Distani	111.462.500,00	111.462.500,00	0,00	111.462.500,00
7	SKIM Kredit TKI	Disnaker	1.367.799.230,00	1.367.799.230,00	0,00	1.367.799.230,00
8	GAKIN PD-BPD	DPMD	3.589.641.397,00	3.589.641.397,00	0,00	3.589.641.397,00
9	Kelompok Tani Makmur	Bag Ekonomi	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	148.000.000,00
10	DBH-CHT	Bag Ekonomi	13.771.900.000,00	13.771.900.000,00	0,00	13.771.900.000,00
Jumlah			26.097.115.426,67	26.097.115.426,67	0,00	26.107.215.426,67

Penjelasan:

- Investasi Non Permanen, merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi Non Permanen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupa Dana Bergulir merupakan bagian dari Investasi Non Permanen yang merupakan dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan UKM;

2. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupa dana bergulir disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value/NRV*). Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Dari Sepuluh jenis Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk dana bergulir hanya Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi dan UKM dalam Bentuk Perkuatan Permodalan Koperasi yang masih aktif atau masih bisa di tagih, sisanya masuk kategori macet;
4. Pada Tahun 2025 Dana Bergulir dalam bentuk Perkuatan Permodalan Koperasi terdapat pengembalian pokok nilai investasi sebesar Rp10.100.000,00. Dengan Nomor STS: 0001/BKAD/STS Pembiayaan/2025 Tanggal 29 Desember 2025, dan
5. Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2025 seluruhnya masih dalam penguasaan Pemerintah Daerah, artinya belum ada Investasi Non Permanen yang diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain atau KPKNL.

Rincian Perhitungan NRV Investasi Non Permanen dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 11. Daftar Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Per 31 Desember 2025.**

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Permanen sebagai berikut.

Tabel 5.99 Daftar Investasi Permanen / Penyertaan Modal

(dalam Rupiah)

No	Uraian	% Kepemilikan	Metode Penilaian Investasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	PDAM Lombok Tengah	100%	Ekuitas	59.294.721.354,00	69.797.444.147,13	(10.502.722.793)	(15,05)
2	PT Bank NTB	7,12%	Biaya	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	0,00
3	PT BPR NTB	7,99%	Biaya	12.250.000.000,00	12.250.000.000,00	0,00	0,00
4	PT Jamkrida NTB	3,05%	Biaya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah				132.544.721.354,00	143.047.444.147,13	(10.502.722.793,13)	(7,34)

Penjelasan:

1. Nilai investasi permanen per 31 Desember 2025 disajikan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD yang telah diaudit (*audited*). Audit atas Laporan Keuangan BUMD tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
2. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Penggunaan metode mengacu pada porsi kepemilikan pada BUMD sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%. atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

3. Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Lombok Tengah

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah adalah 100%, maka metode penilaian penyertaan modal pada PDAM dinilai dengan metode ekuitas (*Equity Method*). Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2025 (*audited*), jumlah ekuitas PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah senilai Rp59.294.721.354,00 sehingga nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah senilai Rp59.294.721.354,00. Terdapat Penurunan nilai ekuitas/kekayaan bersih pada PDAM sesuai Laporan Keuangan *audited* per 31 Desember 2025 sebesar 15,05% dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2024 disebabkan karena adanya kurang saji pengakuan utang iuran pensiun pegawai PDAM Tirta Ardhia Rinjani kepada Dapenma selaku perusahaan penjamin dana pensiun. Berikut rincian posisi ekuitas PDAM Tirta Ardhia Rinjani Per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.100 Nilai Investasi pada PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Modal Hibah dari Kementerian PU berupa 2 unit mobil Tangki Tahun 2019	931.496.866,00
2	Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	87.453.419.284,00
3	Akumulasi Kerugian Tahun sebelumnya	(31.696.398.374)
4	Laba/Rugi Tahun Berjalan	2.606.203.578,00
Jumlah		59.294.721.354,00

4. PT Bank NTB Syariah

Penyertaan Modal pada PT Bank NTB Syariah dinilai dengan metode biaya senilai Rp60.000.000.000,00 yang merupakan akumulasi penyetoran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT Bank NTB Syariah sampai dengan 31 Desember 2025. Dalam Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak menambah penyertaan modal di PT Bank NTB Syariah.

5. PT BPR NTB

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar 7,99% pada PT BPR NTB sehingga penilaian investasi menggunakan metode biaya senilai Rp12.250.000.000,00.

6. PT JAMKRIDA NTB BERSAING

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar 3,05% pada PT JAMKRIDA NTB BERSAING sehingga penilaian investasi menggunakan metode biaya senilai Rp1.000.000.000,00.

Sedangkan jumlah modal disetor Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada beberapa BUMD per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.101 Daftar Modal di Setor

(dalam Rupiah)

No	Nama BUMD	Dasar Hukum Penyertaan	Jumlah Penyertaan Modal Seharusnya	Modal Disetor per 31 Desember 2025	Modal Disetor per 31 Desember 2024
1	PDAM	Perda No 4 Tahun 2016	97.963.243.900,31	87.453.419.283,31	87.453.419.283,31

No	Nama BUMD	Dasar Hukum Penyertaan	Jumlah Penyertaan Modal Seharusnya	Modal Disetor per 31 Desember 2025	Modal Disetor per 31 Desember 2024
2	PT Bank NTB	Perda No 4 Tahun 2016	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00
3	PD BPR NTB	Perda No 4 Tahun 2016	12.250.000.000,00	12.250.000.000,00	12.250.000.000,00
4	PT Jamkrida	Perda No 4 Tahun 2016	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah			172.213.243.900,31	160.703.419.283,31	160.703.419.283,31

Daftar Nilai Investasi Permanen dan Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada **Lampiran 12. Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah Per 31 Desember 2025**

5.3.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.102 Daftar Nilai Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tanah	913.138.402.492,66	913.866.030.409,53	(727.627.916,87)	(0,08)
2	Peralatan dan Mesin	940.402.560.377,57	848.040.000.440,25	92.362.559.937,32	10,89
3	Gedung dan Bangunan	2.084.771.565.762,88	1.828.258.831.779,79	256.512.733.983,09	14,03
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.477.057.338.389,62	2.357.145.716.776,02	119.911.621.613,60	5,09
5	Aset Tetap Lainnya	100.329.155.550,23	97.256.168.835,23	3.072.986.715,00	3,16
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	4.155.951.000,00	7.528.505.993,00	(3.372.554.993,00)	(44,80)
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan	6.519.854.973.572,96	6.052.095.254.233,82	467.759.719.339,14	7,73
7	Akumulasi Penyusutan	(2.697.298.326.593,71)	(2.339.469.829.142,01)	(357.828.497.451,70)	15,30
	Jumlah Bersih	3.822.556.646.979,25	3.712.625.425.091,81	109.931.221.887,44	2,96

Penjelasan:

Gambar: Komposisi Aset Tetap Per 31 Desember 2025



1. Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang kodefikasi BMD.
2. Sesuai Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Bahwa Aset Tetap dinilai berdasarkan Biaya perolehan yaitu sebesar kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Jika tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Salah satu kriteria dalam pengakuan aset tetap di antaranya nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Kapitalisasi BMD, dimana Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi:
 - a. Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin, alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00;
 - b. Pengelura untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00;
 - c. Pengeluaran untuk buku bacaan yang sama atau lebih dari Rp100.000,00; dan
 - d. Pengeluaran untuk pengadaan aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi tidak ditetapkan batas nilai kapitalisasi, artinya setiap pengeluaran atau belanja dalam rangka pengadaan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar itu dicatat sebagai nilai perolehan.
4. Metode yang digunakan dalam Penyusutan Aset Tetap dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Methode*) nilai penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu dan dihitung dari nilai perolehan.
5. Penatausahaan dan Pelaporan BMD Kabupaten Lombok Tengah mulai Tahun 2025 telah menggunakan aplikasi e-BMD.

5.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Tanah serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.103 Daftar Nilai Aset Tetap Tanah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Tetap Tanah	913.138.402.492,66	913.866.030.409,53	(727.627.916,87)	(0,08)

Penjelasan:

1. Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 433.a tahun 2024 Tentang Penetapan Status Jalan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Per 31 Desember 2025 memiliki panjang ruas jalan sepanjang 810.800 km sedangkan luas tanah yang berada pada bawah jalan seluas 4.856.434,81 m²;
2. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.104 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
I	Saldo Awal	913.866.030.409,53
II	Penambahan	
1	Belanja Modal	1.261.109.152,00
2	Hibah	1.357.705.000,00
3	Appraisal Nilai Aset Tetap	704.315.100,13
4	Mutasi Aset Tetap Tanah Antar SKPD	281.800.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah	3.604.929.252,13
III	Pengurangan	
1	Hibah Aset Tetap Tanah	3.666.496.017,00
2	Mutasi Aset Tetap Tanah Antar SKPD	281.800.000,00
3	Reklasifikasi Ke Aset Properti Investasi	263.152.000,00
4	Reklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa	121.109.152,00
	Jumlah Mutasi Kurang	4.332.557.169,00
IV	Saldo Akhir	913.138.402.492,66

3. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penambahan nilai aset tetap tanah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terdapat Belanja modal tanah pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah senilai Rp1.261.109.152,00.
 - b. Penambahan aset tetap tanah yang bersumber dari penerimaan hibah Aset Tetap Tanah senilai Rp1.357.705.000,00 yang berasal dari hibah Badan Riset Inovasi Nasional Berupa Tanah Stasiun Penelitian di Kecamatan Praya sesuai BAST Nomor: B-2148/II.2/PL.02.01/5/2025, Nomor: 030/257/BKAD/2025 dan saat ini tanah tersebut tercatat sebagai aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Penambahan dari *appraisal* dan taksiran nilai Aset Tetap Tanah sesuai dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 189 Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025 tentang Penetapan Nilai Taksiran Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Jalan yang masih memiliki Nilai Rp0,00 (Nol) untuk menyusun Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dengan Rincian sebagai berikut.

Tabel 5.105 Penambahan Aset Tetap Tanah dari Nilai Appraisal

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Tanah Untuk Jalan Kabupaten Ruas Jalan Capung - Kakek Leping	277.323.628,93
	Tanah Untuk Jalan Kabupaten Ruas Jalan Taman Biao	93.229.111,08
	Tanah Untuk Jalan Kabupaten Ruas Jalan Dalam Kota Kecamatan Praya Tengah	281.764.179,69
	Tanah Untuk Jalan Kabupaten Ruas Jalan Sulin Pelabuh	51.998.180,43
	Jumlah	704.315.100,13

d. Mutasi Aset Tetap Tanah antar SKPD dengan Rincian sebagai berikut.

Tabel 5.106 Penambahan Aset Tetap Tanah dari Mutasi Antar SKPD

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ SKPD Asal
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	208.000.000,00	
	Tanah Kantor Pemerintah ex Kantor Kesehatan Hewan Praya Tengah	20.000.000,00	Pindahan dari Dinas Pertanian
	Tanah Pasar Ketara	42.000.000,00	Pindahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Tanah Eks PKM Teratak, Tanah Eks PKM Ganti dan Poskesdes Lajut	146.000.000,00	Pindahan dari Dinas Kesehatan
2	Dinas Kesehatan	73.800.000,00	
	Tanah Rumdis SD Pengadang untuk perluasan Puskesmas Pengadang	73.800.000,00	Pindahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah		281.800.000,00	

4. Mutasi pengurangan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

a. Hibah Aset Tetap Tanah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.107 Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Hibah

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Intansi Penerima
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.241.757.450,00	
	Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Kabupaten Lombok Tengah berupa aset tanah personil, pendanaan, sarana/prasarana dan dokumen kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa tanah SMKN Janapria Sesuai No SK 249.a /th 2025	1.641.600.000	Pemerintah Provinsi NTB
	Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Kabupaten Lombok Tengah berupa aset tanah personil, pendanaan, sarana/prasarana dan dokumen kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa tanah SMKN 1 Pujut Sesuai No SK 249.a /th 2025	1.600.157.450	Pemerintah Provinsi NTB
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	424.738.567,00	
	Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Kabupaten Lombok Tengah berupa aset tanah personil, pendanaan, sarana/prasarana dan dokumen kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa tanah SMAN 2 Praya Sesuai No SK 249.a /th 2025	424.738.567,00	Pemerintah Provinsi NTB
Jumlah		3.666.496.017,00	

b. Mutasi Aset Tetap Tanah antar SKPD senilai Rp281.800.000.00, penjelasan rinciannya sebagaimana pada Tabel 5.105 di atas.

c. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Properti Investasi dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.108 Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	Nomor Perjanjian
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	Sewa Tanah Eks. Pasar Kuta seluas 2.105 M2 untuk Tempat Pembangunan Restoran Lokasi di Jalan Raya Kuta Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah	153.152.000,00	Nomor 029/776/BKAD/2024. Nomor 001/009/NTB/2024
2	Dinas Perhubungan		
	Sewa Tanah seluas 9.45 M2 untuk Tempat Usaha Lokasi Desa Janapria Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah	50.000.000,00	Nomor 503/439/BKAD/2024
3	BKAD		
	Sewa Tanah seluas 9.45 M2 untuk Tempat Usaha Lokasi Desa Janapria Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah	60.000.000,00	Nomor 503/1474/BKAD/2025
Jumlah		263.152.000,00	

5. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Beban Barang dan Jasa senilai Rp121.109.152,00 merupakan nilai ganti rugi pembebasan tanah warga/masyarakat berupa aset warga/masyarakat dalam bentuk pohon dan aset non fisik tanah pada Dinas Permukiman;
6. Nilai aset tetap tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp913.138.402.492,66 atau sebanyak 2.018 Persil yang telah bersertifikat sebanyak 1.081 Persil, sehingga masih terdapat 937 Persil yang masih belum memiliki sertifikat, sedangkan aset tetap tanah yang berstatus sengketa per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.109 Aset Tetap Tanah dalam status sengketa

(dalam Rupiah)

No	Nama Aset	Luas M2	Nilai	Permasalahan saat ini	Tindaklanjut	Keterangan
1	Gugatan PMH atas tanah Lapangan Bhakti Puyung Kecamatan Jonggat	16.987,00	2.717.920.000,00	Diklaim Ahli Waris	Masuk Proses Peradilan	Proses persidangan di Tingkat PN. Praya
2	Tanah Puskesmas Aik Darek	2.934,00	300.000.000,00	Diklaim Ahli Waris	Masuk Proses Peradilan	Gugatan di Tolak
3	Tanah BPP Lajut	10000,00	3.000.000,00	Diklaim Ahli Waris	Masuk Proses Peradilan	Gugatan di Tolak
4	Tanah Pasar Selong Belanak	30.000,00	360.000.000,00	Diklaim Ahli Waris	Masuk Proses Peradilan	Mediasi antara pemda dengan ahliwaris terkait cara perolehan
5	Tanah Pertanian di Desa Beber Kecamatan Kecamatan Pringgara	99.620,00	1.992.400.000,00	Diklaim Ahli Waris	Mediasi Oleh Dinas Pertanian	
Jumlah		149.541,00	5.373.320.000,00			

7. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meminjamkan sebagian Barang Milik Daerah kepada instansi pemerintah pusat dan/atau instansi vertikal lainnya. Barang yang dipinjamkan berupa aset tanah untuk mendukung tugas dan fungsi instansi pengguna. Barang Milik Daerah yang dipinjam pakaikan tersebut tetap diakui dan disajikan sebagai aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam Neraca, karena

hak kepemilikan tidak berpindah. Pihak pengguna hanya diberikan hak pemanfaatan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian pinjam pakai yang berlaku. Rincian objek dan instansi pengguna pinjam pakai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.110 Rincian Aset Tetap Tanah yang Dipinjam Pakai

No	Nama Instansi/ Pemda Lain sebagai Pengguna Aset	Jenis dan Obyek Pinjam Pakai	BAST
1	Polres Lombok Tengah	Tanah dan bangunan Rumdis Puskesmas Ubung	029/939/BKAD/2025
2	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Tanah dan bangunan Eks. Kantor Dinas Lingkungan Hidup	900/146/BKAD/2025
3	PUPR Provinsi NTB	Tanah dan bangunan Eks. Kantor Bupati Lama	-
4	KPU Lombok Tengah	Tanah dan bangunan Disperindag (Samping Pendopo Wapub)	029/464/BPKAD/2021

8. Terdapat perbedaan antara SK Bupati Lombok Tengah tentang Penetapan Status Ruas Jalan Tahun 2024 dengan data pada KIB A, dimana dalam SK Bupati tercatat 268 ruas jalan kabupaten, sedangkan dalam KIB A tercatat 271 bidang tanah jalan kabupaten, sehingga terdapat selisih tiga bidang tanah yang tidak tercantum dalam SK penetapan status ruas jalan. Ketiga bidang tanah tersebut memiliki luas masing-masing sebesar 40.800 m² yang berlokasi di Kuta-Ponggos (Pujut), 32.000 m² yang berlokasi di Piongék-Gerupuk (Pujut), dan 251,00 m² yang berlokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Praya Kecamatan Praya. Ketiga bidang tanah dimaksud telah dikeluarkan dari SK Bupati tentang Status Ruas Jalan sejak tahun 2017, namun masih tercatat dalam KIB A sebagai tanah jalan kabupaten.

Selain itu, dalam KIB A juga masih tercatat 19 bidang tanah untuk jalan nasional dan tiga bidang tanah untuk jalan provinsi yang tidak termasuk dalam SK penetapan status jalan kabupaten. Hal ini disebabkan proses sertifikasi atas tanah-tanah tersebut belum seluruhnya selesai, sehingga belum dapat dilakukan hibah kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Pengurus Barang Bidang Bina Marga Dinas PUPR dan Pejabat Fungsional Bidang Aset Daerah BKAD menjelaskan bahwa khusus untuk tiga bidang tanah yang tidak tercantum dalam SK status ruas jalan, aset tersebut berada di kawasan KEK ITDC dan direncanakan akan dilakukan perubahan klasifikasi dari tanah jalan kabupaten menjadi tanah biasa pada KIB A.

Rincian mutasi tambah kurang dan penyesuaian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 13a. Datar Mutasi Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025**

5.3.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.111 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	940.402.560.377,57	848.040.000.440,25	92.362.559.937,32	10,89

Penjelasan:

1. Metode yang digunakan dalam Penyusutan Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Methode*) nilai penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu dan dihitung dari nilai perolehan.
2. Rincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin selama Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.112 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
I	Saldo Awal	848.040.000.440,25
II	Penambahan	
1	Belanja Modal	95.235.979.101,00
2	Nilai Taksiran	0,00
3	Mutasi antar SKPD	721.750.391,68
4	Reklasifikasi Antar KIB	1.916.583.547,15
5	Aset yang yang diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa	110.371.400,00
6	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00
7	Aset Tetap Yang diperoleh dai Hibah	0,00
8	Koreksi kesalahan pengakuan aset tetap peralatan dan mesin yang sebelumnya tercatat sebagai aset tetap gedung dan bangunan tahun perolehan 2024	615.357.070,00
	Jumlah Mutasi Tambah	98.600.041.509,83
III	Pengurangan	
1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke masyarakat	1.739.509.046,00
2	<i>Extracomptable</i>	2.042.493.882,50
3	Dihibahkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	990.047.956,33
4	Reklas ke KIB Lainnya	425.921.295,00
5	Mutasi antar SKPD	721.750.391,68
6	Kurang Volume	4.232.000,00
7	Belanja Modal Tahun Berkenaan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang sudah diakui tahun sebelumnya melalui Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	313.527.000,00
8	Koreksi akibat pembulatan Sistem e- BMD	1,00
	Jumlah Mutasi Kurang	6.237.481.572,51
IV	Saldo Akhir	940.402.560.377,57

3. Penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Penambahan dari Belanja Modal pada semua SKPD senilai Rp95.235.979.101,00 merupakan nilai belanja modal peralatan dan mesin pada LRA Tahun 2025; dan
 - b. Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.113 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun/Mutasi antar SKPD 2025

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ SKPD Asal
1	Sekretariat Daerah	602.636.750,00	
	Mutasi Kendaraan dinas Roda 4 Mini Bus	403.211.750,00	BKAD
	DR 1334 V Toyota Kijang Inova Venture		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ SKPD Asal
	Tenda sarnaval/kerucut	199.425.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	119.113.641,68	
	Kendaraan Roda Dua sebanyak 10 Unit	119.113.641,68	Bapenda
	Jumlah	721.750.391,68	

c. Reklas Antar KIB Aset pada dua SKPD yaitu:

Tabel 5.114 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Reklas antar KIB Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
1	Dinas Kesehatan	423.828.521,51	
	Belanja Compressor nebu dll	159.740.369,00	Reklas dari Aset Tetap Lainnya (KIB E)
	Puskesmas Pengembur	82.735.014,20	Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)
	Unit Transfusi Darah	91.400.452,00	Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)
	Puskesmas Pengadang	59.803.600,31	Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)
	Puskesmas Muncan	30.149.086,00	Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)
2	Rumah Sakit Umum Daerah	671.200.075,64	
	RSUD	671.200.075,64	Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)
3	Dinas PUPR	156.000.000,00	
	Venue MTQ Dinas PUPR	156.000.000,00	Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.875.000,00	
	pemeliharaan Coll center Partisi	13.875.000,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan (KIB C)
5	Sekretariat Daerah	639.679.950,00	
	Alat-Alat Drumband	639.679.950,00	Reklas dari Aset Tetap Lainnya (KIB E)
6	Badan pendapatan Daerah	12.000.000,00	
	Tenda	12.000.000,00	Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan KIB C)
	Jumlah	1.916.583.547,15	

d. Terdapat reklasifikasi dari belanja barang/jasa ke aset peralatan dan mesin senilai Rp110.371.400,00 dengan kondisi bahwa aset tersebut memenuhi nilai kapitalisasi sebagai aset tetap. Rincian aset tetap peralatan dan mesin yang di peroleh dari belanja barang/jasa sebagai berikut:

Tabel 5.115 Rincian Reklasifikasi Barang/Jasa Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan
1	Kantor Camat Kopang	9.451.400,00	
	1 Unit Meja Pinpong	9.451.400,00	Dikapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Peralatan dan Mesin/ Meja Pinpong
2	Inspektorat	100.920.000,00	
	Pengadaan 5 Unit Scanner ADF pada	100.920.000,00	Dikapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa pada akun 5.1.02.01.01.0020 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan
	Inspektorat Kab. Loteng TA 2025		seharusnya di anggarkan pada akun belanja modal Peralatan dan Mesin
	Jumlah	110.371.400,00	

- e. Koreksi kesalahan pengakuan aset tetap peralatan dan mesin yang sebelumnya tercatat sebagai aset tetap gedung dan bangunan tahun perolehan 2023 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116 Rincian Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang sebelumnya di catat sebagai aset Gedung dan Bangunan atas nilai perolehan Tahun 2023 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
1	Lebkesda	65.010.000,00	Koreksi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)
	Pompa Air	8.030.000,00	
	Penangkal Petir	7.865.000,00	
	A.C. Split	6.270.000,00	
	A.C. Split	10.450.000,00	
	A.C. Split	10.450.000,00	
	A.C. Split	10.450.000,00	
	Treng Air/Tandon Air	11.495.000,00	
2	BLUD Peringgarata	100.137.880,00	Koreksi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)
	Pompa Air	12.899.060,00	
	A.C. Sentral	22.244.780,00	
	Treng Air/Tandon Air	11.860.770,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain	53.133.270,00	
3	BLUD Aik Mual	89.263.500,00	Koreksi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)
	DRAY Chemical, ABC SERVVO POWDER P 600 Kap 6,0 Kg (APAR)	47.553.040,00	
	PROFIL TANK 5,000 Liter	11.207.220,00	
	Pompa Transfer GROUNDFOOSH	12.652.930,00	
	Pompa Transfer GROUNDFOOSH	12.652.930,00	
	PENANGKAL PETIR KURN R-80	5.197.380,00	
4	BLUD Teruai	51.945.690,00	Koreksi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)
	Penangkal Petir	5.137.640,00	
	Tandon	11.860.770,00	
	Pompa Air	12.899.060,00	
	Pompa Air	12.899.060,00	
	Alat Pemadam Kebakaran	3.049.720,00	
	Alat Pemadam Kebakaran	3.049.720,00	
	Alat Pemadam Kebakaran	3.049.720,00	
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	309.000.000,00	Koreksi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)
	Pompa Air	120.000.000,00	
	Pompa Lain-Lain	9.000.000,00	
	Tangki Air	5.500.000,00	

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
	Pompa Air	80.000.000,00	
	Pompa Air	60.000.000,00	
	Pompa Air	7.500.000,00	
	Tabung Apar Pemadam Kebakaran	27.000.000,00	
Jumlah		615.357.070,00	

4. Pengurang nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 senilai Rp6.237.481.572,51 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direklas sebagai Beban Barang habis pakai berupa alat kebersihan dan Barang diserahkan kepada masyarakat karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan masa manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan pada beberapa SKPD yaitu:

Tabel 5.117 Rincian Reklasifikasi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Belanja Barang Jasa Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.227.019.000,00	
	Barang diserahkan ke masyarakat/Pihak Ketiga Berupa Alat Praga Praktik Sekolah yang diserahkan ke Sekolah Swasta	1.177.019.000,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
	Belanja Sewa Server Aplikasi Penerimaan Siswa Baru	50.000.000,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
2	Dinas Kesehatan	6.690.000,00	
	Belanja Non Aset Berupa Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran pada PKM Langko dan PKM Ubung	6.690.000,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
3	RSUD Praya	41.612.546,00	
	Kelebihan Biaya Ongkos Kirim atas Pengadaan Belanja Modal Alat Kesehatan	41.612.546,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.410.000,00	
	Pengadaan Stiker	1.410.000,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
3	Dinas Lingkungan Hidup	187.000.000,00	
	Biaya Pemeliharaan Komputer	187.000.000,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.200.000,00	
	Kain Pelapis Kursi	10.200.000,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	57.600.000,00	
	Untuk pemeliharaan komputer 7.850.000 , jasa bongkar tower 10 kecamatan 49.750.000	57.600.000,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
6	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	8.400.000,00	
	Kunci Sloc Etalasi	8.400.000,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
7	Sekretariat Daerah	80.741.000,00	
	Baju drumband 80.000.000 dan kabel HDMI 741.000	80.741.000,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
8	Kantor Camat Praya	3.706.500,00	
	Pengadaan Umbul-Umbul dan Bendera di Kelurahan Panjisari	3.706.500,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	26.800.000,00	
	Stiker dinding	26.800.000,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	77.500.000,00	
	Berupa Pengadaan lesensi SQL dan Server e-BMD	77.500.000,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.830.000,00	
	Pendaan isi ulang tabung pemadam kebakaran	10.830.000,00	Direklasifikasi Ke Beban Barang dan Jasa
Jumlah		1.739.509.046,00	

- b. Penyesuaian dari Belanja Modal tahun berjalan yang tidak memenuhi batas kapitalisasi nilai aset tetap dan masuk sebagai kategori barang *extracomptable* pada beberapa SKPD:

Tabel 5.118 Rincian Reklasifikasi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptable Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.593.626.940,00
2	Dinas Kesehatan	225.549.252,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	13.191.359,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.570.811,50
5	Dinas Lingkungan Hidup	14.339.000,00
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.148.000,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.485.000,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	37.775.000,00
9	Sekretariat DPRD	20.750.000,00
10	Kantor Camat Praya	14.609.000,00
11	Kantor Camat Praya Tengah	7.725.000,00
12	Kantor Camat Peringarata	3.008.000,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	89.910.000,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.806.520,00
Jumlah		2.042.493.882,50

- c. Pengurangan karena Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena dihibahkan pada beberapa SKPD yaitu:

Tabel 5.119 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dihibahkan Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29.119.883,33
	Hibah Kendaraan dinas roda dua DR 3141 V Ke Yayasan Bina Warga Desa Bangket Parak Kec Pujut Dan DR 5279 V ke Yayasan Pondok Pesantren Darul Mahrun Aisyah Desa Tembung Kekek Kec Batukliang Utara	29.119.883,33
2	Sekretariat Daerah	351.928.073,00
	hibah ke yayasan ponpes tahfiz darul mustofa berupa mobil hillux toyota	351.928.073,00
3	Kantor Camat Praya Tengah	148.000.000,00
	Hibah kendaraan minibus Terios DR 57 V ke Yayasan Ponpes Darul Miftah	148.000.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.000.000,00
	Hibah aset tetap peralatan dan mesin yang di hibahkan berupa Kendaraan roda 2 ke Yayasan Ponpes Sirul Asror NW Muje	17.000.000,00
5	Kantor Camat Pujut	148.000.000,00

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai
	minibus terios DR 47 V ke yayasan ponpes al muttahisin NW batugulung	148.000.000,00
6	Kantor Camat Batukliang Utara	148.000.000,00
	Hibah mobil DR 65 V ke yayasan fatahillah NW Teratak	148.000.000,00
7	Kantor Camat Peringgarata	148.000.000,00
	Mobil Dinas Terios DR 63V ke LPPD Desa peringerate	148.000.000,00
Jumlah		990.047.956,33

d. Reklas Antar KIB pada beberapa SKPD:

Tabel 5.120 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang direklasifikasi ke KIB Lainnya Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	117.929.000,00	
	Gazebo	35.900.000,00	Reklas Ke Gedung dan Bangunan (KIB C)
	Buku Umum	82.029.000,00	Reklas Ke Aset Tetap Lainnya (KIB E)
2	Dinas Kesehatan	205.897.000,00	
	PKM Pringgarata dan ubung, dari B ke C, berupa penataan halaman	205.897.000,00	Reklas Ke Gedung dan Bangunan (KIB C)
3	RSUD	76.295.295,00	
	Reklas Ke D berupa jaringan pembuangan intalasi AC	76.295.295,00	Reklas Ke Jalan,Jaringan dan Irigasi (KIB D)
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.600.000,00	
	Gazebo	8.600.000,00	Reklas Ke Gedung dan Bangunan (KIB C)
5	Kator Camat Praya	17.200.000,00	
	Reklas dari B ke C berupa Berugak/Gazebo di Kelurahan Gerunung dan Kelurahan Praya senilai masing-masing Rp8.600.000	17.200.000,00	Reklas Ke Gedung dan Bangunan (KIB C)
Jumlah		425.921.295,00	

- e. Mutasi aset peralatan dan mesin antar SKPD senilai Rp721.750.391,68 penjelasannya sama dengan mutasi tambah aset peralatan dan mesin antar SKPD.
- f. Kurang volume pekerjaan pada kegiatan pengadaan *sprimbeed* Dinas Koperasi dan UKM senilai Rp4.232.000,00;
- g. Aset tetap yang sudah diakui sebelumnya melalui utang belanja modal Tahun 2024 yang di bayarkan pada Tahun 2025 senilai Rp313.527.000,00. Berupa pengadaan mebel ruang kelas dan ruang perpustakaan SDN 1 Lajut dan Pengadaan Kamera pada bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- h. Koreksi lebih catat akibat nomerasi pada aplikasi e-BMD pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp1,00.
5. Pada Tahun 2025 masih terdapat penguasaan aset peralatan dan mesin yang di kuasai oleh pihak lain berupa satu unit kendaraan dinas bermotor dengan nilai perolehan Rp8.000.000,00 , nomor Polisi DR 2506 V. Aset tersebut dikuasai oleh Tarum, S.Pd pensiunan PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Korwil Praya Timur dan aset kendaraan bermotor tersebut masih tercatat pada Neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Berdasarkan penelusuran KIB B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tercatat sebanyak 95 unit kendaraan bermotor roda dua. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan inventarisasi oleh BPK RI Perwakilan NTB dalam rangka audit LKPD Tahun 2025, Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya dapat menunjukkan sebanyak 70 unit kendaraan roda dua. Dengan demikian, terdapat 25 unit kendaraan roda dua yang belum dapat ditemukan keberadaan fisiknya. Kondisi tersebut terjadi karena proses inventarisasi aset belum dilaksanakan secara tertib dan belum tuntas.
7. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meminjamkan sebagian Barang Milik Daerah kepada instansi pemerintah pusat dan/atau instansi vertikal lainnya. Barang yang dipinjamkan berupa kendaraan dinas operasional untuk mendukung tugas dan fungsi instansi pengguna. Barang Milik Daerah yang dipinjam pakai tetap diakui dan disajikan sebagai aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam Neraca, karena hak kepemilikan tidak berpindah. Pihak pengguna hanya diberikan hak pemanfaatan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian pinjam pakai yang berlaku. Rincian objek dan instansi pengguna pinjam pakai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.121 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Dipinjam Pakai

No	Nama Instansi/ Pemda Lain sebagai Pengguna Aset	Jenis dan Obyek Pinjam Pakai Nilai	BAST
1	BPKP	Kendaraan Dinas Roda 4	029/407/BKAD/2023
2	Pengadilan Agama Lombok Tengah	Kendaraan Dinas Roda 4	024/03/UM/2016
3	Polres Lombok Tengah	Kendaraan Dinas Roda 4	024/149/Umum/2012
4	Polres Lombok Tengah	Kendaraan Dinas Roda 4	024/149/Umum/2012
5	Komando Distrik Militer 1620/Lombok Tengah	Kendaraan Dinas Roda 4	024/ /Umum2012
6	Ketua Pengadilan Negeri Praya	Kendaraan Dinas Roda 4	024/ /Umum2012
7	Kepala Kejaksaan Negeri Praya	Kendaraan Dinas Roda 4	024/ /Umum2012
8	Badan Amil Zakat Nasional	Kendaraan Dinas Roda 4	-

8. Nilai aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp940.402.560.377,57 belum termasuk nilai aset tetap peralatan dan mesin yang di peroleh dari bantuan pemerintah pusat melalui program digitalisasi pendidikan berupa 1 unit *Interactive Flat Panel* Merah Putih dan 1 unit laptop pada masing-masing satuan pendidikan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang sampai dengan laporan ini disajikan belum di input pada Aplikasi E-BMD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan belum di ketahui nilai perolehannya. Rincian Bantuan Program Digitalisasi Pendidikan untuk masing-masing satuan pendidikan sebagaimana terdapat pada **Lampiran 13b. Daftar Bantuan Program Digitalisasi Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Per 31 Desember 2025.**

Rincian mutasi tambah/kurang dan penyesuaian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 13c. Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025.**

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.122 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.084.771.565.762,88	1.828.258.831.779,79	256.512.733.983,09	14,03

Penjelasan:

1. Metode yang digunakan dalam Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan menggunakan metode garis lurus (*Straigh Line Methode*) nilai penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu dan dihitung dari nilai perolehan;
2. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.123 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
I	Saldo Awal	1.828.258.831.779,79
II	Penambahan	
1	Belanja Modal	145.657.436.123,60
2	Mutasi antar SKPD	3.598.635.265,00
3	Reklasifikasi Dari KIB Lainnya	767.241.032,02
4	Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa	24.950.000,00
5	Aset yang diperoleh dari Hibah	125.122.177.530,00
	Jumlah Mutasi Tambah	275.170.439.950,62
III	Pengurangan	
1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dihapus	3.046.443.511,55
2	Aset Tetap yang di serahkan ke Masyarakat (Atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang di peroleh pada tahun berkenaan "N")	948.451.000,00
3	Extracompatable	439.350.693,00
4	Mutasi antar SKPD	3.598.635.265,00
5	Aset Tetap yang sudah diakui Tahun sebelumnya melalui Utang Kepada Pihak Ketiga	8.060.255.650,00
6	Reklasifikasi ke KIB Lainnya	1.419.507.127,77
7	Kurvol	336.388.000,00
8	Koreksi	808.674.720,21
	Jumlah Mutasi Kurang	18.657.705.967,53
IV	Saldo Akhir	2.084.771.565.762,88

3. Mutasi Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Penambahan dari Belanja Modal Tahun 2025 senilai Rp145.657.436.123,60 pada beberapa SKPD (penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di penjelasan pos-pos LRA); dan
 - b. Mutasi tambah kurang aset tetap gedung dan bangunan antar SKPD pada beberapa SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.124 Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Mutasi antar SKPD Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ SKPD Asal
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.712.752.265,00	
	Pindah dari Pertanian berupa bangunan kantor UPT HPT Pertanian Peraya Tengah, Batunya	146.636.200,00	Pindahan dari Dinas Pertanian
	Pindahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa bangunan eks pasar ketara untuk pembangunan TK Negeri	79.950.000,00	Pindahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Pindahan dari Dinas Kesehatan Berupa Bangunan Eks PKM Ganti, Teratak dan Poskesdes Lajut sebagai lokasi pembangunan TK Negeri	1.486.166.065,00	Pindahan dari Dinas Kesehatan
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.860.883.000,00	
	Rehab Bangunan Gedung DPRD	1.860.883.000,00	Pindahan dari Sekretariat DPRD
3	Dinas Pariwisata	25.000.000,00	
	Pembangunan Patung Mandalika	25.000.000,00	Pindahan dari Dinas PUPR
Jumlah		3.598.635.265,00	

- c. Penambahan dari Reklasifikasi antar jenis aset tetap pada beberapa SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.125 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi antar KIB Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.900.000,00	
	Gazebo	35.900.000,00	Reklas Dari peralatan dan Mesin (KIB B)
2	Dinas Kesehatan	270.507.000,00	
	Spandek Pasir Pada PKM Ubung	155.775.000,00	Reklas Dari peralatan dan Mesin (KIB B)
	Paving Halaman Kantor Pada PKM Peringerate	50.122.000,00	Reklas Dari peralatan dan Mesin (KIB B)
	Pagar dan Tanaman PKM Kopang	64.610.000,00	Reklas Dari Aset Tetap Lainnya (KIB E)
3	RSUD	360.424.032,02	
	Pompa dan Tandon	360.424.032,02	Reklas Dari Jalan, Jaringan dan Irigasi (KIB D)
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.600.000,00	
	Gazebo	8.600.000,00	Reklas Dari peralatan dan Mesin (KIB B)
5	Dinas Pertanian	74.610.000,00	
	Penataan Taman	74.610.000,00	Reklas Dari Jalan, Jaringan dan Irigasi (KIB D)
6	Kantor Camat Praya	17.200.000,00	
	Reklas dari B ke C berupa Berugak/Gazebo di Kelurahan	17.200.000,00	Reklas Dari peralatan dan Mesin (KIB B)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
	Gerung dan Kelurahan Praya senilai masing-masing 8.600.000		
Jumlah		767.241.032,02	

- d. Reklasifikasi dari Barang dan Jasa senilai Rp24.950.000,00 pada Dinas Pertanian berupa biaya konsultan perencana dan pengawasan yang dianggarkan dan direalisasikan melalui belanja barang dan jasa.
- e. Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari hibah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.126 Mutasi Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari penerimaan hibah Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	No BAST/Tanggal	Instansi Pemberi hibah
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	124.791.815.530,00		
	Penerimaan hibah bangunan pasar renteng	124.791.815.530,00	030/880/2025 Tanggal 09/10/2025	Hibah dari Badan Riset Nasional Dan Inovasi Nasional
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	330.362.000,00		
	Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	330.362.000,00	030/257/BKAD/2025 Tanggal 22/05/2025	Hibah dari Badan Riset Dan Inovasi Nasional
Jumlah		125.122.177.530,00		

4. Mutasi Pengurangan nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 senilai Rp16.129.891.119,76 dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Pengurangan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan atas penghapusan aset tetap gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.127 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Penghapusan Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Nomor SK
1	Dinas Kesehatan	2.558.119.128,00	
	Penghapusan bangunan eks Dinas Kesehatan	1.693.886.330,00	No SK 263 Th 2025
	Penghapusan Bangunan Puskesmas Muncan dan Bangunan Puskesmas Pengadang	864.232.798,00	No 229.a Th 2025
2	Sekretariat Daerah	488.324.383,55	
	Bangunan Tempat Ibadah/Pendopo Wabub	241.730.300,00	
	Bangunan Rumah Negara Golongan 1	246.594.083,55	
Jumlah		3.046.443.511,55	

- b. Pengurangan nilai aset tetap Gedung dan bangunan atas hibah atau di serahkan ke masyarakat/Instansi Lainnya senilai Rp948.451.000,00 berupa hibah ke yayasan Masjid Agung Praya, Berupa Biaya Konsultan DED Renovasi Masjid Agung;
- c. Reklas ke *extracomtable* senilai Rp411.450.693,00 pada beberapa SKPD yaitu:

Tabel 5.128 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan *extracomtable* Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.900.000,00
2	Dinas Kesehatan	347.101.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	9.935.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.587.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.902.150,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.600.000,00
8	Kantor Camat Praya	26.325.543,00
Jumlah		439.350.693,00

- d. Mutasi Pengurangan aset gedung dan bangunan antar SKPD senilai Rp3.598.635.265,00 penjelasannya sama dengan mutasi tambah aset gedung dan bangunan antar SKPD;
- e. Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang telah diakui pada tahun sebelumnya melalui utang belanja kepada pihak ketiga senilai Rp8.060.255.650,00 pada dinas pendidikan dan kebudayaan atas pekerjaan beberapa paket kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan bangunan sekolah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dan dibayar kepada pihak ketiga di Tahun 2025;
- f. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar jenis aset tetap pada beberapa SKPD diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.129 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Reklasifikasi antar aset tetap Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
1	Dinas PUPR	1.016.880.475,26	
	Venue MTQ Dinas Pekerjaan Umum	671.200.075,64	Reklas Ke Peralatan dan Mesin (KIB B)
	Venue MTQ Dinas Pekerjaan Umum	345.680.399,62	Reklas Ke Jalan Jaringan dan Irigasi (KIB D)
2	Dinas Kesehatan	376.751.652,51	
	Puskesmas Muncan	23.000.000,00	Reklas Ke Jalan Jaringan dan Irigasi (KIB D)
	Puskesmas Muncan	30.149.086,00	Reklas Ke Peralatan dan Mesin (KIB B)
	Puskesmas Pengadang	59.803.600,31	Reklas Ke Peralatan dan Mesin (KIB B)
	Puskesmas Pengadang	28.750.000,00	Reklas Ke Jalan Jaringan dan Irigasi (KIB D)
	Unit Transfusi Darah	91.400.452,00	Reklas Ke Peralatan dan Mesin (KIB B)
	Unit Transfusi Darah	40.213.500,00	Reklas Ke Jalan Jaringan dan Irigasi (KIB D)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
	Puskesmas Pengembur	82.735.014,20	Reklas Ke Peralatan dan Mesin (KIB B)
	Puskesmas Pengembur	20.700.000,00	Reklas Ke Peralatan dan Mesin (KIB B)
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.875.000,00	
	Reklas Ke Peralatan dan Mesin berupa pemeliharaan cool center partisi lemari, papan tulis/white board).	13.875.000,00	Reklas Ke Peralatan dan Mesin (KIB B)
4	Badan Pendapatan Daerah	12.000.000,00	
	Reklas ke Peralatan dan Mesin Berupa pengadaan Tenda	12.000.000,00	Reklas Ke Peralatan dan Mesin (KIB B)
Jumlah		1.419.507.127,77	

- g. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan yang disebabkan karena kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian Spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai temuan pemeriksaan tim BPK RI Perwakilan NTB dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.130 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Kekurangan Volume Pekerjaan Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai
1	Dinas Kesehatan	92.139.000,00
	Koreksi atas kekurangan volume gedung dan bangunan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Puskesmas Pengembur CV. Dyas Karya Konstruksi	40.865.000,00
	Koreksi atas kekurangan volume gedung dan bangunan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Puskesmas Pengadang CV Filar Mandiri	24.513.000,00
	Koreksi atas kekurangan volume gedung dan bangunan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Puskesmas Muncan PT Sinar Emas Samudra	10.292.000,00
	Koreksi atas kekurangan volume gedung dan bangunan Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN GEDUNG UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) LOMBOK TENGAH PT. INDAH BERJAYA UTAMA	16.469.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82.276.000,00
	Koreksi atas kekurangan volume gedung dan bangunan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Beraim CV Luan Karunia Utama	471.000,00
	Koreksi atas kekurangan volume gedung dan bangunan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 praya CV Hijrah Purnama Abadi	972.000,00
	Koreksi atas kekurangan volume gedung dan bangunan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1Gemel CV Abadi Purnama Abadi	4.372.000,00
	Koreksi atas kekurangan volume gedung dan bangunan Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMP NEGERI SATU ATAP 1 BATUKLIANG CV Abadi Purnama Abadi	2.876.000,00
	Koreksi atas kekurangan volume gedung dan bangunan Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN RUANG TATA USAHA BESERTA PERABOTNYA SMP NEGERI SATU ATAP 1 BATUKLIANG CV Sandia Jaya	10.247.000,00
	Koreksi atas kekurangan volume gedung dan bangunan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RKB dan Toilet TKN 12 Pujut Cv Karya Dadap	10.326.000,00
	Koreksi atas kekurangan volume gedung dan bangunan Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat SDN Montong Are CV Mamas Bangun Nusa	11.071.000,00
	Koreksi atas kekurangan volume gedung dan bangunan Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas Sekolah SD NEGERI MENEMENG Cv Gigih Giat Bersaudara	11.323.000,00
	Koreksi atas kekurangan volume gedung dan bangunan PekerjaanPembangunan Ruang Kelas Baru beserta prabotnya SMP NEGERI SATU ATAP 1 BATUKLIANG Cv Limbu Indah	499.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai
	Koreksi atas kekurangan volume gedung dan bangunan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta prabotnya SMP NEGERI SATU ATAP 1 BATUKLIANG Cv Limbu Indah	30.119.000,00
3	Dinas PUPR	123.827.000,00
	Koreksi atas kekurangan volume gedung dan bangunan Pembangunan Utama MTQ Kab Lombok Tengah PT Damai Indah Utama	123.827.000,00
4	RSUD	32.428.000,00
	Koreksi atas kekurangan volume gedung dan bangunan LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG POLIKLINIK DAN RAWAT JALAN CV Putra Menara Pratama	32.428.000,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.718.000,00
	Koreksi atas kekurangan volume gedung Rehabilitasi Gedung Olahraga Lombok Tengah CV Garuda Mas Permata	5.718.000,00
Jumlah		336.388.000,00

- h. Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa kelebihan pengakuan, kesalahan pengakuan atas perolehan aset tetap gedung dan bangunan tahun sebelumnya dan nomerasi nilai aset tetap gedung dan bangunan pada aplikasi e-BMD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.131 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Kesalahan Pengakuan dan lebih saji Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Koreksi dari/Pencatatan sebelumnya
A	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap Gedung dan Bangunan	38.780.000,00	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.300.000,00	
	Kelebihan pengakuan aset tetap gedung dan bangunan berupa biaya perencanaan dan pengawasan pembangunan sekolah swasta Tahun 2024	35.300.000,00	Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan
2	Dinas Kesehatan	3.480.000,00	
	Lebih pengakuan aset gedung dan bangunan berupa utang belanja modal yang telah dibayarkan pada Tahun 2024 sesuai Nomor SP2D 52.02/04.0/000416/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/1 1/2024 Tanggal 11 November 2024	3.480.000,00	Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan
B	Koreksi salah akun penyajian nilai gedung dan bangunan yang merupakan aset tetap peralatan dan mesin atas perolehan tahun 2024	769.894.720,00	
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	392.365.000,00	
	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	309.000.000,00	Reklas Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B)
	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	83.365.000,00	Reklas Ke Aset Tetap JIJ (KIB D)
2	Lebkesda	65.010.000,00	
	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	65.010.000,00	Reklas Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B)
3	BLUD Peringgarata	131.097.030,00	
	Bangunan Klinik/Puskesmas	100.137.880,00	Reklas Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B)
	Bangunan Klinik/Puskesmas	30.959.150,00	Reklas Ke Aset Tetap JIJ (KIB D)
4	BLUD Aik Mual	89.263.500,00	
	Bangunan Klinik/Puskesmas	89.263.500,00	Reklas Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B)
5	BLUD Teruai	92.159.190,00	

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ dari/Pencatatan sebelumnya	Koreksi
	Bangunan Klinik/Puskesmas	51.945.690,00	Reklas Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B)	
	Bangunan Klinik/Puskesmas	40.213.500,00	Reklas Ke Aset Tetap JIJ (KIB D)	
C	Koreksi Nomerasi Sistem E-BMD	0,21		
1	Dinas PUPR	0,17		
2	Dinas Perhubungan	0,04		
Jumlah		808.674.720,21		

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 senilai Rp2.084.771.565.762,88 belum termasuk aset tetap gedung dan bangunan yang diterima dari pemerintah pusat melalui program revitalisasi sarana pendidikan tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran. Bantuan tersebut diterima oleh masing-masing satuan pendidikan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang di peruntukan untuk revitalisasi sarana pendidikan senilai Rp58.140.864.446,00 yang dikerjakan dengan sekema swakelola. Atas perolehan aset tersebut belum diakui sebagai penambah nilai aset tetap gedung dan bangunan pada neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Per 31 Desember 2025. Rincian satuan pendidikan penerima bantuan revitalisasi pendidikan Tahun 2025 sebagaimana terdapat pada **Lampiran 13d. Daftar Rincian Penerimaan Dana Revitalisasi Pendidikan yang Diterima Satuan Pendidikan Per 31 Desember 2025**

Rincian mutasi tambah/kurang dan penyesuaian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 13e. Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025**.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi serta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.132 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.477.057.338.389,62	2.357.145.716.776,02	119.911.621.613,60	5,09

Penjelasan:

- Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 433.a Tahun 2024 Tentang Penetapan Status Jalan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Per 31 Desember 2025 memiliki panjang ruas jalan sepanjang 810.800 KM sedangkan luas tanah yang berada pada bawah jalan seluas 4.856.434,81m²;
- Berdasarkan hasil identifikasi ruas jalan kabupaten pada KIB D yang dilakukan oleh Dinas PUPR, menunjukkan ruas jalan kabupaten yang tercatat di KIB D sebanyak 496 Ruas jalan Kabupaten Arteri. Dari 496 ruas jalan tersebut, terdapat 212 ruas jalan

kabupaten arteri yang telah sesuai dengan SK status ruas jalan Kabupaten, namun sisa ruas jalan sebanyak 284 ruas jalan kabupaten arteri yang tidak tercantum dalam SK status ruas jalan kabupaten arteri. Hal tersebut disebabkan ruas jalan telah mengalami perubahan nama, penggabungan, pemecahan, naik status ke jalan nasional dan naik status ke jalan provinsi maupun perubahan hasil pengukuran di lapangan. Atas 212 ruas jalan yang sesuai SK Bupati tersebut, terdapat 45 ruas jalan yang tercatat pada KIB D tidak memuat informasi nilai luasan hanya terdapat informasi nilai perolehan.

3. Metode yang digunakan dalam Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan menggunakan metode garis lurus (*StraightLine Methode*) nilai penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu dan dihitung dari nilai perolehan; dan
4. Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi selama Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.133 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
I	Saldo Awal	2.357.145.716.776,02
II	Penambahan	
1	Belanja Modal	89.360.624.558,00
2	Penilaian Aset Tetap	28.251.000.000,00
3	Utang Kepada Pihak Ketiga	701.768.500,00
4	Reklas antar aset tetap	7.746.190.803,62
5	Reklas dari belanja barang dan jasa	24.916.000,00
6	Penerimaan Hibah	329.044.034,00
7	Koreksi Nilai Perolehan Tahun sebelumnya	154.537.650,00
	Jumlah Mutasi Tambah	126.568.081.545,62
III	Pengurangan	
1	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	4.835.847.032,02
2	Tidak memenuhi Kriteria aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	1.273.414.900,00
3	Kurvol	547.198.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang	6.656.459.932,02
IV	Saldo Akhir	2.477.057.338.389,62

5. Mutasi Penambahan nilai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 senilai Rp126.413.543.895,62 diuraikan sebagai berikut.
 - a. Belanja Modal senilai Rp89.360.624.558,00 pada beberapa SKPD (rincian dapat dilihat pada penjelasan pos LRA-Belanja Modal);
 - b. Penambahan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang di peroleh dari hasil appraisal senilai Rp28.251.000.000,00 Sesuai Dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 189 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Taksiran Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Jalan yang masih memiliki nilai Rp0,00 untuk menyusun neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.
 - c. Utang Belanja Modal Kepada Pihak ketiga berupa pembangunan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (Sumur Bor) pada RSUD Praya senilai Rp291.550.000,00 dan utang belanja modal kepada pihak ketiga atas Pengerjaan Ruas Jalan Pengembur Mawun (Lanjutan) dan Biaya Konsultan Pengawas Sesuai Berita Acara Pembayaran No 620/1042/PPK-BM/PNK/2025 pada Dinas PUPR senilai Rp410.218.500,00;

d. Reklas antar jenis aset tetap pada tiga SKPD yaitu:

Tabel 5.134 Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Mutasi antar KIB

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
1	Dinas Kesehatan	112.663.500,00	
	Puskesmas Pengembur	20.700.000,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan (KIB B)
	UTD	40.213.500,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan (KIB B)
	Puskesmas Prngadang	28.750.000,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan (KIB B)
	Puskesmas Muncan	23.000.000,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan (KIB B)
2	RSUD Praya	76.295.295,00	
	Penambahan Reklas dari Peralatan dan Mesin (KIB B) ke Jalan, Jaringan dan Irigasi (KIB D) senilai Rp7.200.000,00 berupa Sumur Bor).	76.295.295,00	Reklas dari Peralatan dan Mesin (KIB B)
3	Dinas PUPR	7.557.232.008,62	
	Reklas dari Kusntruksi dalam pengerjaan atas selesainya pembangunan jembatan ngerapak	7.211.551.609,00	Reklas dari KDP (KIB F)
	Venue MTQ Dinas PUPR	345.680.399,62	Reklas Dari Gedung dan Bangunan (KIB B)
Jumlah		7.746.190.803,62	

- e. Penambahan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa berupa biaya konsultan pengawasan atas pembangunan penataan RTH pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp24.916.000,00 yang di anggarkan dan direalisasikan pada akun belanja barang dan jasa.
- f. Penerimaan Hibah aset jalan senilai Rp329.044.034,00 yang merupakan hibah dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk lokasi batujai salva residen (fasum).
- g. Koreksi nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang disebabkan karena kesalahan pengakuan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang sebelumnya tercatat pada aset tetap Gedung dan Bangunan atas nilai perolehan Tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.135 Penambahan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dari koreksi kesalahan pengakuan tahun sebelumnya

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
1	BLUD Peringarata	30.959.150,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan (KIB B)
	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	30.959.150,00	
2	BLUD Teruai	40.213.500,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan (KIB B)
	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	40.213.500,00	
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	83.365.000,00	Reklas Dari Gedung dan Bangunan (KIB B)
	Sumur Bor	61.365.000,00	
	Instalasi Penangkal Petir Lain - Lain	17.000.000,00	
	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	3.500.000,00	

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	1.500.000,00	
Jumlah		154.537.650,00	

6. Mutasi pengurangan terhadap nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp5.592.837.900,00 bersumber dari:
- a. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang disebabkan karena mutasi antar jenis aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136 Pengurangan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Reklasifikasi antar aset tetap Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah>Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
1	RSUD	516.424.032,02	
	berupa pompa dan tandon	516.424.032,02	Reklas ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi (KIB D)
2	Dinas PUPR	4.244.813.000,00	
	Pembangunan jalan ruas pengembur mawun lanjutan yang belum selesai pengerjaannya per 31 desember 2025	4.244.813.000,00	Reklas ke KDP (KIB F)
3	Dinas Pertanian	74.610.000,00	
	Pengerjaan Taman	74.610.000,00	Reklas ke Aset Gedungn dan Bangunan (KIB C)
Jumlah		4.835.847.032,02	

- b. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang disebabkan karena tidak memenuhi Kriteria aset tetap yaitu belanja pemeliharaan instalasi udara IBS pada RSUD Praya senilai Rp1.255.000.000,00 dan Belanja alat-alat listrik berupa Cok Lampu, Kabel sebanyak 35 Paket pada Dinas Ketahanan Pangan Rp18.414.900,00 yang di reklas ke belanja barang dan jasa dan;
- c. Kekurangan volume pekerjaan atas pengadaan pompa air, tandon dan pengadaan Sumur Bor pada RSUD Praya senilai Rp547.198.000,00.

Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 13f. Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2025.**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.137 Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Tetap Lainnya	100.329.155.550,23	97.256.168.835,23	3.072.986.715,00	3,16

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.138 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
I	Saldo Awal	97.256.168.835,23
II	Penambahan	
1	Belanja Modal	13.629.611.321,00
2	Reklas antar KIB	82.029.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah	13.711.640.321,00
III	Pengurangan	
1	Ekstracomtabel	9.774.623.287,00
2	Reklas antar jenis aset tetap	864.030.319,00
	Jumlah Mutasi Kurang	10.638.653.606,00
IV	Saldo Akhir	100.329.155.550,23

2. Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya senilai Rp13.629.611.321,00 terdiri dari :
 - a. Belanja modal senilai Rp13.629.611.321,00 (rincian dapat dilihat pada penjelasan pos LRA-Belanja Modal);
 - b. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin berupa buku umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp82.029.000,00 yang pengadaannya melalui belanja modal peralatan dan mesin di tahun berkenaan.
3. Pengurangan nilai aset tetap lainnya senilai Rp10.638.653.606,00 terdiri dari:
 - a. Barang *extracomtable* pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa buku pelajaran dan bahan bacaan senilai Rp179.355.000,00 dan Barang *extracomtable* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp9.595.268.287,00
 - b. Reklasifikasi antar Jenis Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.139 Pengurangan Aset Tetap Lainnya Berupa reklas antar KIB Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah/Nama Aset	Nilai	Keterangan/ Reklasifikasi dari/Pencatatan sebelumnya
1	Dinas Kesehatan	224.350.369,00	
	Belanja Compressor nebu dll	159.740.369,00	Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B)
	Pagar dan Tanaman PKM Kopang	64.610.000,00	Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)
2	Sekretariat Daerah	639.679.950,00	
	Alat-Alat Drumband	639.679.950,00	Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B)
	Jumlah	864.030.319,00	

Rincian mutasi tambah/kurang dan penyesuaian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 13g. Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025.**

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.140 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	4.155.951.000,00	7.528.505.993,00	(3.372.554.993,00)	(44,80)

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.141 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
I	Saldo Awal	7.528.505.993,00
II	Penambahan	
1	Reklas Dari aset jalan, jaringan dan irigasi atas realisasi belanja modal pembangunan ruas jalan pengembur mawun (lanjutan)	4.244.813.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah	4.244.813.000,00
III	Pengurangan	
1	Reklas ke aset tetap jalan, jaringan dan irigasi atas selesainya pembangunan jembatan ngerapak desa kidang yang dilaksanakan mulai tahun 2024	7.211.551.609,00
2	Utang Belanja Modal atas selisih realisasi fisik dan Keuangan Pembangunan Jembatan Ngerapak	316.954.384,00
3	Kurang volume atas pengerjaan pembangunan ruas jalan pengembur mawun (lanjutan)	88.862.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang	7.617.367.993,00
IV	Saldo Akhir	4.155.951.000,00

2. Jembatan Ngerapak yang berlokasi di Bangket Parak Desa Kidang dibangun dengan sumber pendanaan PAD Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh CV PMP dengan Nomor Kontrak 620/114/PPK-BM/PAD/DPUPR/2024 masa kerja awal 210 hari kalender (14 Mei s/d 9 Desember 2024), Nilai Kontrak Rp7.041.370.000,00, dengan persentase realisasi fisik per 31 Desember 2024 sebesar 79,82%. Dalam pelaksanaannya Pihak Pelaksana telah tiga kali mengajukan Adendum, terakhir Adendum dengan masa pengerjaan 40 Hari (29 Januari 2025 sampai dengan 9 Maret 2025) dan dengan selesainya pembangunan jembatan tersebut sesuai dengan BAST Nomor: 620/02/BA-FHO.T/PPK-BM/PAD.J/NGR.1/2025 tanggal 10 Maret 2025 telah direklasifikasi ke aset tetap jalan, jaringan dan irigasi;
3. Nilai KDP senilai Rp4.244.813.000,00 merupakan pengerjaan jalan ruas pengembur mawun lanjutan dengan nomor kontrak 620/890/PPK-BM/DPU-PR/2025 dengan masa pengerjaan 13 Oktober sampai dengan 22 Desember 2025 dengan nilai kontrak Rp4.170.000.000,00, terdapat adendum kontrak dengan nomor 620/130/PPK-BM/CCO.02-Add.02/PGR.MWN-L/2025 tanggal 22 Desember 2025, dengan masa pengerjaan 100 hari (13 Oktober 2025 s.d. 20 Januari 2026). Sampai dengan 31 Desember 2025 realisasi keuangan nya senilai Rp3.797.188.000,00 sehingga terdapat utang belanja senilai Rp372.812.000,00 (4.170.000.000,00-3.797.188.000,00). Sedangkan realisasi keuangan atas konsultan pengawas senilai Rp37.406.500,00 dari

nilai kontrak 74.813.000,00 sehingga terdapat utang belanja senilai Rp37.406.500,00 (74.813.000,00-37.406.500,00)

4. Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai pengurangan nilai KDP atas paket pengerjaan ruas jalan pengembur mawun (*lanjutan*) senilai Rp88.862.000,00 sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Mataram terhadap LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025;

Rincian mutasi tambah/kurang dan penyesuaian Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 13h. Daftar Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025.**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.142 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	727.788.535.291,10	589.639.008.007,05	138.149.527.284,05	23,43
3	Gedung dan Bangunan	372.210.767.333,35	308.922.164.653,89	63.288.602.679,46	20,49
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.597.299.023.969,26	1.440.908.656.481,07	156.390.367.488,19	10,85
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	KDP	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.697.298.326.593,71	2.339.469.829.142,01	357.828.497.451,70	15,30

Penjelasan:

1. Metode yang digunakan dalam Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Methode*) nilai penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu dan dihitung dari nilai perolehan;
2. Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak dilakukan penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur tentang Akuntansi Aset Tetap; dan
3. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.143 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
I	Saldo Awal	2.339.469.829.142,01
II	Penambahan	
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	124.930.227.649,31
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	43.960.062.214,56
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	125.183.393.493,44



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Nilai
4	Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	14.367.477.087,75
5	Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.991.595.509,74
6	Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	31.206.973.994,75
	Jumlah Mutasi Tambah	360.639.729.949,55
III	Pengurangan	
1	Reklas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dihibahkan	990.047.956,33
2	Reklas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dihapus	727.482.069,58
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	158.129.496,68
4	Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	935.572.975,26
5	Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	Jumlah Mutasi Kurang	2.811.232.497,85
IV	Saldo Akhir	2.697.298.326.593,71

5.3.1.4 Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Properti Investasi per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Properti Investasi serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.144 Properti Investasi

(dalam Rupiah)

Uraian	Bentuk Kerja sama	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah BBI Gerunung	Sewa	43.116.000,00	43.116.000,00	0,00	0,00
Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage Hotel Tastura	BGS	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage Aerotel Mandalika (Wisma Mandalika)	KSP	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	Sewa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan (Komplek Pertokoan Orient)	KSP	1.736.400.000,00	1.736.400.000,00	0,00	0,00
Tanah Eks. Pasar Kuta seluas 2.105 M2 untuk Tempat Pembangunan Restoran Lokasi di Jalan Raya Kuta Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah	BGS	153.152.000,00	0,00	0,00	0,00
Tanah seluas 9.45 M2 untuk Tempat Usaha Lokasi Desa Janapria Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah	Sewa	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tanah dan Bangunan seluas 1500 M2 untuk Tempat Membangun Villa Lokasi Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah	BGS	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan Wisma Mandalika (Aerotel) Praya	KSP	18.417.825.383,00	18.417.825.383,00	0,00	0,00
Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen.	KSP	4.640.000.004,00	4.640.000.004,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Bentuk Kerja sama	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen: Komplek Toko Orient	KSP	999.899.994,00	999.899.994,00	0,00	0,00
Jumlah Nilai Perolehan		31.290.393.381,00	31.027.241.381,00	0,00	0,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		(6.088.330.651,00)	(5.641.088.895,00)	0,00	0,00
Jumlah Nilai Netto Aset Properti Investasi		25.202.062.730,00	25.386.152.486,00	0,00	0,00

Penjelasan:

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bahwa properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan;
2. Metode yang digunakan dalam Penyusutan Aset Properti investasi dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Methode*) nilai penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu dan dihitung dari nilai perolehan;
3. Menurut Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bahwa Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran;
4. Kerjasama Pemanfaatan dalam bentuk BGS atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan PT STP dengan Nomor Perjanjian 01/PTSP/KT.RK/X/2019 dengan jangka waktu Kerjasama selama 30 Tahun. Dalam Perjanjian Kerja sama tersebut Pihak Kedua akan memberikan Kontribusi dengan tahapan untuk tahun pertama yaitu 2019 dan 2020 sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama yaitu pada masa Pembangunan tidak ada pemberian kontribusi. Pihak Kedua akan memberikan kontribusi pada tahun ketiga sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama yaitu tahun 2021 sebesar Rp700.000.000,00, dan tahun kedua beroperasi dan seterusnya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00;
5. Dari nilai Aset Properti Investasi yang dimiliki pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, masih terdapat aset properti investasi yang kontribusinya pada peningkatan PAD dengan menggunakan tarif retribusi daerah, pada Tahun 2025 telah dilakukan *appraisal* oleh penilai publik untuk penentuan tarif sewa toko komplek pertokoan praya yang tarifnya mulai berlaku di tahun 2026, disamping itu masih terdapat aset properti investasi yang masih dalam proses lelang untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu Tanah dan Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage Aerotel Mandalika (Wisma Mandalika);
6. Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp7.232.668.000,00 dan Rp6.969.516.000,00. Properti Investasi Tanah Per 31 Desember 2025 terdiri dari:
 - a. Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage Hotel Tastura Senilai Rp5.000.000.000,00;
 - b. Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage Aerotel Mandalika (Wisma Mandalika) senilai Rp170.000.000,00;
 - c. Tanah BBI Gerunung Rp43.116.000,00;

- d. Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I Rp20.000.000,00;
 - e. Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan (Komplek Pertokoan Orient Rp1.736.400.000,00.
 - f. Tanah Eks. Pasar Kuta seluas 2.105 M2 untuk Tempat Pembangunan Restoran Lokasi di Jalan Raya Kuta Desa Kuta Kec. Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan nilai perolehan Rp153.152.000,00;
 - g. Tanah seluas 9.45 M2 untuk Tempat Usaha Lokasi Desa Janapria Kec. Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan nilai perolehan Rp50.000.000,00;
 - h. Tanah dan Bangunan seluas 1500 M2 untuk Tempat Membangun Villa Lokasi Desa Kuta Kec. Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan nilai perolehan Rp60.000.000,00.
7. Properti Investasi Gedung dan Bangunan senilai Rp24.057.725.381,00 yang terdiri dari Properti Investasi Gedung dan Bangunan Wisma Mandalika (Aerotel) Praya senilai Rp18.417.825.383,00 dan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen senilai Rp5.639.899.998,00; dan
 8. Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi
Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.088.330.651,00, terdapat penambahan nilai akumulasi penyusutan properti investasi tahun berkenaan senilai Rp447.241.756,00.
 9. Rincian mutasi penambahan dan pengurangan nilai properti investasi per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam **Lampiran 14**.

5.3.1.5 Dana Cadangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Dana Cadangan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Dana Cadangan sebagai berikut.

Tabel 5.145 Daftar Dana Cadangan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.6 Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.146 Daftar Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	Tagihan Jangka Panjang	11.990.417.737,16	9.529.420.079,83	2.460.997.657,33	25,83
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aset Tidak Berwujud	143.600.000,00	0,00	143.600.000,00	100,00
4	Aset Lain-lain	32.889.604.503,96	32.901.104.503,96	(11.500.000,00)	(0,03)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan	%
5	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		45.069.622.241,12	42.476.524.583,79	2.593.097.657,33	6,10

5.3.1.6.1 Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Tagihan Jangka Panjang/TGR per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Tagihan Jangka Panjang/TGR serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.147 Daftar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	11.990.417.737,16	9.529.420.079,83	2.460.997.657,33	25,83

Penjelasan:

1. Nilai Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi NTB dan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang telah memiliki ketetapan/SKTJM;
2. Penyajian Nilai Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah didasarkan pada hasil rekonsiliasi jumlah nilai ketetapan dan jumlah nilai yang ditindaklanjuti dalam periode pelaporan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.148 Daftar Mutasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-24	Tambahan Selama Tahun 2024	Tindak Lanjut Selama Tahun 2024	Koreksi (-)	31-Des-25
1	PNS Non Bendahara	607.054.490,00	1.207.814.541,00	208.718.754,00	0,00	1.606.150.277,00
2	Pihak III	8.922.365.589,83	2.911.994.295,76	1.425.970.316,43	24.122.109,00	10.384.267.460,16
Jumlah		9.529.420.079,83	4.119.808.836,76	1.634.689.070,43	24.122.109,00	11.990.417.737,16

Mutasi rincian TGR dapat dilihat pada **Lampiran 15a, 15b dan 15c**.

5.3.1.6.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 tidak ada transaksi yang menyebabkan timbulnya pencatatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga, karena pada tahun 2023 nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga seluruhnya direklas menjadi aset properti investasi.

5.3.1.6.3 Aset Tidak Berwujud (ATB)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud (ATB) per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tidak Berwujud (ATB) serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.149 Daftar Aset Tidak Berwujud

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Aset Tidak Berwujud	143.600.000,00	0,00	143.600.000,00	100

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan 31 Desember 2024 belum ada menyajikan aset tidak berwujud, sedangkan pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyajikan Aset Tak Berwujud (ATB) senilai Rp143.000.000,00. Aset Tidak Berwujud tersebut merupakan Aplikasi SIMADU yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dengan nilai perolehan awal pada Tahun 2024 sebesar Rp34.750.000,00 dan nilai pengembangan Aplikasi SIMADU pada tahun 2025 yang dianggarkan melalui belanja barang dan jasa senilai Rp108.850.000,00.

5.3.1.6.4 Aset Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lain-lain per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lain-Lain serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.150 Daftar Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Aset Rusak Berat/Usang	18.193.334.880,96	18.204.834.880,96	(11.500.000,00)	(0,06)
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	14.696.269.623,00	14.696.269.623,00	0,00	0,00
Jumlah		32.889.604.503,96	32.901.104.503,96	(11.500.000,00)	(0,03)

Penjelasan:

1. Aset Rusak Berat/Usang

- Nilai Aset rusak berat per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.204.834.880,96 merupakan aset yang sudah dihentikan penggunaannya dalam operasional Pemerintah Daerah. Aset Rusak Berat/Usang disajikan sebesar nilai bersih setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan;
- Pada Tahun 2025 terdapat pengurangan/penghapusan aset rusak berat pada Sekretariat Daerah senilai Rp11.500.000 berupa hibah kendaraan dinas nopol polisi DR 2045 V dan DR 2697 V ke Yayasan Darul Abror NW Kuta dengan No SK 251 Tahun 2025;

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan proses pengusulan lelang dan penghapusan terhadap aset dalam kondisi rusak/usang bekerjasama dengan Kantor KPKNL Mataram dan sudah sampai pada tahapan Pengajuan Permohonan Lelang ke KPKNL Mataram;

Rincian nilai bersih dan nilai akumulasi penyusutan aset rusak berat/usang sebagai berikut.

Tabel 5.151 Daftar Aset Lain-lain Rusak Ringan/Berat

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Aset Rusak Berat	59.676.219.397,70	59.676.219.397,70	0,00	0,00
	Akumulasi	(41.471.384.516,74)	(41.471.384.516,74)	0,00	0,00
2	Penyusutan Aset Rusak Berat				
	Aset Rusak Berat Netto	18.204.834.880,96	18.204.834.880,96	0,00	0,00

- c. Aset Rusak Berat per SKPD beserta nilai penyusutannya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.152 Daftar Aset Lain-lain Rusak Ringan/Berat per SKPD

(dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan	24.967.288.404,17	10.771.795.222,39	14.195.493.181,78
2	Dinas Kesehatan	1.604.087.182,00	585.548.005,93	1.018.539.176,07
3	Rumah Sakit Umum Daerah	22.203.282.197,39	21.586.086.118,00	617.196.079,39
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	562.035.000,00	562.035.000,00	0,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	107.070.000,00	107.070.000,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	244.965.000,00	166.939.500,00	78.025.500,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	139.959.000,00	139.959.000,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	2.133.431.182,00	2.065.587.842,00	67.843.340,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	59.451.000,00	25.642.700,00	33.808.300,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00

No	Nama SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
24	Dinas Pertanian	1.957.259.800,00	151.300.000,00	1.805.959.800,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	110.890.000,00	69.490.000,00	41.400.000,00
26	PPKD	0,00	0,00	0,00
27	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
29	Sekretariat Daerah	3.510.785.925,97	3.227.193.592,97	283.592.333,00
30	Sekretariat DPRD	724.633.302,00	724.478.286,00	155.016,00
31	Kantor Camat Praya	17.974.000,00	17.974.000,00	0,00
32	Kantor Camat Praya Tengah	0,00	0,00	0,00
33	Kantor Camat Praya Barat	0,00	0,00	0,00
34	Kantor Camat Praya Barat Daya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
35	Kantor Camat Praya Timur	0,00	0,00	0,00
36	Kantor Camat Pujut	3.800.000,00	2.345.835,00	1.454.165,00
37	Kantor Camat Janapria	71.564.000,00	57.017.440,00	14.546.560,00
38	Kantor Camat Kopang	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
39	Kantor Camat Batukliang	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
40	Kantor Camat Batukliang Utara	0,00	0,00	0,00
41	Kantor Camat Pringgarata	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
42	Kantor Camat Jonggat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
43	Inspektorat Daerah	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00
44	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	152.700.000,00	152.700.000,00	0,00
45	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	257.923.404,17	222.601.974,45	35.321.429,72
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	379.470.000,00	379.470.000,00	0,00
47	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
48	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		59.664.719.397,70	41.471.384.516,74	18.193.334.880,96

2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Nilai sebesar Rp14.696.269.623,00 merupakan aset yang merupakan saldo nilai buku aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan akan dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada pihak Pihak Ketiga/Dihapus sesuai dengan mekanisme penghapusan BMD per 31 Desember 2025. Nilai tersebut di atas disajikan berdasarkan nilai buku aset tetap, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.153 Daftar Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah					
1	Aset Dalam Proses TGR	477.071.922,00	477.071.922,00	0,00	0,00
2	Akumulasi Penyusutan aset dalam proses TGR	(51.938.214,00)	(51.938.214,00)	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Aset Lain-Lain Netto dalam Proses TGR	425.133.708,00	425.133.708,00	0,00	0,00
3	DED	2.246.212.600,00	2.246.212.600,00	0,00	0,00
4	Akumulasi Penyusutan DED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nilai Netto DED	2.246.212.600,00	2.246.212.600,00	0,00	0,00
5	Aset dalam proses penghapusan	31.618.307.568,49	31.618.307.568,49	0,00	0,00
6	Aset dalam proses penghapusan berupa Piutang Retribusi dalam Proses Penghapusan	152.122.350,00	152.122.350,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset dalam proses penghapusan	(19.669.445.428,49)	(19.669.445.428,49)	0,00	0,00
8	Akumulasi Penyusutan Aset dalam proses penghapusan berupa Piutang Retribusi dalam Proses Penghapusan	(76.061.175,00)	(76.061.175,00)	0,00	0,00
	Aset dalam proses penghapusan Netto	12.024.923.315,00	12.024.923.315,00	0,00	0,00
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Netto	14.696.269.623,00	14.696.269.623,00	0,00	0,00

Penjelasan:

a. Aset Dalam Proses TGR

Nilai Netto Aset Dalam Proses TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai bersih Rp425.133.708,00 dan Rp425.133.708,00. Nilai ini merupakan aset dalam Proses TGR;

b. *Detail Engineering Design* (DED)

Nilai Neto DED yang merupakan bagian dari Aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp2.246.212.600,00 dan Rp2.246.212.600,00. Berikut rincian DED:

Tabel 5.154 Daftar *Detail Engineering Design* (DED)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Perencanaan Pembangunan Kantor Disdik	Disdik	87.905.400,00	87.905.400,00
2	Perencanaan Penataan Halaman SMP 1 Praya Timur	Didik	6.000.000,00	6.000.000,00
3	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Batunyal	Dikes	0,00	0,00
4	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Batujangk	Dikes	0,00	0,00
5	Perencanaan Pemb/pustu	Dikes	45.416.000,00	45.416.000,00
6	Perencanaan PJU	Dinas Perkim	91.979.000,00	91.979.000,00
7	Perencanaan Pembangunan Gedung Workshop BLK	Dinas Tenaga Kerja	154.030.800,00	154.030.800,00
8	Perencanaan Jalan Desa Bile Tengah	Dinas Perhubungan	31.650.000,00	31.650.000,00
9	Rehab Gedung Sekolah	BPBD	0,00	0,00

No	Uraian	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
10	Rehab Jembatan Wage Ngolak	BPBD	0,00	0,00
11	Perencanaan Rehab Balai Penyuluh	Pertanian	79.952.400,00	79.952.400,00
12	Pembangunan Balai Penyuluh KB-Pratim	BP2KB	37.246.000,00	37.246.000,00
13	Perencanaan Mall Pelayanan Publik	PU-PR	1.712.033.000,00	1.712.033.000,00
Jumlah			2.246.212.600,00	2.246.212.600,00

Nilai DED tersebut Sebagian besar merupakan biaya perencanaan pembangunan gedung dan bangunan yang tidak jadi dilaksanakan mengingat adanya *refocusing/efisiensi* anggaran sehingga bangunan induknya tidak jadi dilaksanakan;

3. Aset Dalam Proses Penghapusan

Nilai Neto Aset Dalam Proses Penghapusan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai bersih Rp12.024.923.315,00 dan Rp12.024.923.315,00, Nilai Aset Dalam Proses Penghapusan per 31 Desember 2025 dapat dirincikan sebagai berikut.

- Dari Nilai Aset Neto sebesar Rp12.024.923.315,00 terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.886.934.000,00 merupakan aset gedung yang akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi NTB yang berlokasi di Barabali sampai dengan 31 Desember 2025 SK Hibah masih dalam proses penetapan dan telah ditetapkan SK Hibahnya di Tahun 2026 dengan Nomor SK 73 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan Kantor UTD. BPSD Tanaman Perkebunan Propinsi NTB di Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan PKM Teruai senilai bersih d Rp841.105.093,00 (Rp1.103.003.747,00-Rp261.898.654,00) dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan PKM Pringgarata senilai bersih dan Rp883.869.940,00 (Rp1.115.268.390,00-Rp231.398.450,00) yang telah dibongkar namun belum dihapus dari pencatatan neraca karena SK Bongkaran atas aset tersebut masih belum ditetapkan.
- Piutang Retribusi dalam Proses Penghapusan Neto per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai bersih Rp76.061.175,00 dan Rp76.061.175,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sampai dengan pelaporan 31 Desember 2022 tidak bisa diidentifikasi wajib retribusinya sehingga harus direklas ke aset lain-lainnya; dan
- Nilai Neto sebesar Rp8.336.953.107,00 merupakan Aset pada beberapa SKPD yang masih dalam proses verifikasi dan identifikasi keberadaanya.

Rincian mutasi tambah/kurang Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 16a. Daftar Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025, 16b sampai dengan 16e.**

5.3.1.6.5 Kas yang Dibatasi Penggunaanya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas yang dibatasi Penggunaannya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Kas yang dibatasi Penggunaanya serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.155 Kas yang dibatasi Penggunaannya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kas yang dibatasi Penggunaannya/Uang Jaminan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Kas yang dibatasi penggunaannya	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00

Penjelasan:

Berupa uang jaminan keberlangsungan sewa atas penyewaan tanah areal parkir Pasar Renteng yang telah disetor ke RKUD oleh pihak penyewa sesuai perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Penyetoran uang jaminan sewa ini tidak disajikan sebagai pendapatan dilaporan realisasi anggaran (LRA) dan disajikan sebagai Aset Lainnya pada Akun Kas yang dibatasi penggunaannya sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sampai dengan perjanjian sewa tersebut berakhir dan dikembalikan ke pihak penyewa.

5.3.1.6.6 Dana Transfer – Dana Bagi Hasil TDF

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Dana Transfer- Dana Bagi Hasil TDF per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Dana Transfer- Dana Bagi Hasil TDF serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.156 Daftar Dana Transfer-Dana Bagi Hasil TDF

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Transfer-Dana Bagi Hasil TDF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Netto TDF	0,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan:

Tidak terdapat transaksi Dana Transfer – Dana Bagi Hasil TDF pada Tahun 2025,

5.3.2 KEWAJIBAN

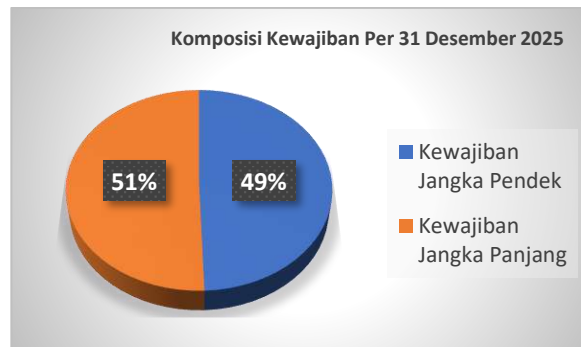
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut.

Tabel 5.157 Rincian Kewajiban

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Kewajiban Jangka Pendek	100.139.639.216,12	100.306.950.067,79	(167.310.851,67)	(0,17)
2	Kewajiban Jangka Panjang	102.517.249.810,00	133.697.947.150,00	(31.180.697.340,00)	(23,32)
	Jumlah	202.656.889.026,12	234.004.897.217,79	(40.275.503.575,26)	(17,21)

Komposisi perbandingan jumlah nilai kewajiban sebagaimana disajikan pada gambar diagram sebagai berikut:



5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Tabel 5.158 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.050.747.719,00	742.851.465,77	307.896.253,23	41,45
2	Utang pinjaman dari Bank BUMN/Jangka pendek	8.028.121.000,00	4.950.317.300,00	3.077.803.700,00	62,17
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31.180.697.340,00	31.180.697.340,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.179.355.749,99	738.647.818,00	440.707.931,99	59,66
5	Utang Belanja dan Transfer	58.654.717.407,13	62.648.436.144,02	(3.993.718.736,89)	(6,37)
6	Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		100.139.639.216,12	100.306.950.067,79	(167.310.851,67)	(0,17)

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.159 Daftar Utang PFK per SKPD Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	SKPD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	212.700.331,00	52.423.942,77	160.276.388,23	305,73
2	Dinas Kesehatan	25.049.024,00	13.180.433,00	11.868.591,00	90,05
3	Rumah Sakit Umum Daerah Praya	812.998.364,00	677.247.090,00	135.751.274,00	20,04
Jumlah		1.050.747.719,00	742.851.465,77	307.896.253,23	41,45

Penjelasan:

1. Nilai sebesar Rp1.050.747.719,00 merupakan pajak pusat yang belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku Wajib Pungut Pajak, berikut rincian penyetoran PFK Tahun 2025 yang disetor di Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 5.160 Daftar Penyetoran Utang PFK Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Di Setor Sebelum Tanggal 15 Januari 2026	Di Setor Setelah Tanggal 15 Januari 2026	Belum Disetor	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	TK Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
	SD Negeri	17.169.161,00	66.426.047,00	0,00	83.595.208,00
	SMP Negeri	32.438.989,00	96.666.134,00	0,00	129.105.123,00
2	BLUD Puskesmas	0,00	25.049.024,00	0,00	25.049.024,00
3	BLUD RSUD	0,00	812.998.364,00	0,00	812.998.364,00
Jumlah		49.608.150,00	1.001.139.569,00	0,00	1.050.747.719,00

2. Nilai PFK Tahun 2024 senilai Rp742.851.465,77 telah dilimpahkan/disetorkan seluruhnya sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 ke RKUN. Daftar Mutasi Utang PFK dapat dilihat pada **Lampiran 17. Daftar Utang PFK Per 31 Desember 2025**.
3. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah atas pungutan dan/atau potongan pajak yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai pemungut atau pemotong pajak (wajib pungut), yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetorkan dan/atau belum dilaporkan kepada negara melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

Pada Tahun 2025, Bendahara Pengeluaran telah melakukan penyetoran pajak melalui mekanisme deposit pajak, namun belum dilakukan pelaporan SPT Masa pada Aplikasi Coretax DJP atas 45 SKPD sebesar Rp28.679.180.660,00, yang tercermin dalam saldo deposit pajak per 31 Desember 2025. Atas kondisi tersebut, Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2026 akan melaksanakan pelaporan SPT Masa atas pajak-pajak dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

5.3.2.1.2 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek serta penjelasannya sebagai berikut.



Tabel 5.161 Daftar Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank-Jangka Pendek

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	8.028.121.000,00	4.950.317.300,00	3.077.803.700,00	62,17
Jumlah		8.028.121.000,00	4.950.317.300,00	3.077.803.700,00	62,17

Penjelasan:

1. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman jangka pendek BLUD RSUD Praya kepada pihak Bank BSI KCP Praya dengan Saldo Pinjaman per 30 Desember 2024 senilai Rp4.950.317.300,00;
2. Pihak RSUD Praya melakukan penambahan pinjaman selama Tahun 2025 senilai Rp26.526.811.190,00;
3. Pihak RSUD Praya telah melakukan pelunasan pinjaman dalam Tahun 2025 senilai Rp 23.449.007.490,00 sehingga per 31 Desember 2025 masih terdapat saldo pinjaman senilai Rp8.028.121.000,00 (Rp4.950.317.300 + Rp26.526.811.190,00 - Rp23.449.007.490,00);
4. Jangka waktu Pinjaman tersebut rata-rata direncanakan selama tiga bulan dengan pembebanan Bunga/Ujroh didepan, yang dicairkan pada saat realisasi pinjaman; dan
5. Pinjaman tersebut diperuntukkan untuk memenuhi likuiditas dan Pemenuhan Biaya Operasional BLUD RSUD Praya.

Daftar Mutasi Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank dapat dilihat pada **Lampiran 18. Daftar Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank Per 31 Desember 2025.**

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.162 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	31.180.697.340,00	31.180.697.340,00	0,00	0,00
Jumlah		31.180.697.340,00	31.180.697.340,00	0,00	0,00

Penjelasan:

1. Nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 merupakan Bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo pada Tahun 2026 dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan pada PT Sarana Multi Infrastruktur/PT SMI;
2. Nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang senilai Rp31.180.697.340,00 merupakan pembayaran pokok utang untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026 masing-masing perbulannya senilai Rp2.598.391.445,00; dan
3. Perhitungan ini didasarkan pada Berita Acara Rekonsiliasi Utang antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan PT SMI.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan diterima dimuka per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Pendapatan diterima dimuka serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.163 Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		15.000.000,00	27.000.000,00	(12.000.000,00)	(44,44)
A						
1	Retribusi Sewa Tanah Desa Mantang	BPKAD	7.500.000,00	13.500.000,00	(6.000.000,00)	(44,44)
2	Retribusi Sewa Tanah Desa Aik Darek	BPKAD	7.500.000,00	13.500.000,00	(6.000.000,00)	(44,44)
	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan		781.491.266,66	286.109.750,00	495.381.516,66	173,14
B						
1	Retribusi pemakaian kekayaan daerah-ATM Bank NTB Syariah-Kantor Bupati	BPKAD	0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)
2	Retribusi pemakaian kekayaan daerah-ATM Bank NTB Syariah-PKM Kuta	BPKAD	3.937.500,00	10.687.500,00	(6.750.000,00)	(63,16)
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Kolam Ikan	Dislutkan	0,00	20.833.333,33	(20.833.333,33)	(100,00)
4	Retribusi Sewa Toko IB	BPKAD	4.975.333,33	8.487.333,33	(3.512.000,00)	(41,38)
5	Retribusi Sewa Toko emas A	BPKAD	1.913.916,67	3.264.916,67	(1.351.000,00)	(41,38)
6	Lain-Lain PAD yg sah Sewa Lahan ATM Mandiri	RSUD	0,00	5.062.500,00	(5.062.500,00)	(100,00)
7	Sewa Tanah Lahan ATM Bank NTB	BPKAD	25.833.333,33	35.833.333,33	(10.000.000,00)	(27,91)
8	Sewa Tanah Milik Pemkab Lombok Tengah, Jln. Jendral Sudirman Semayan	BPKAD	5.600.000,00	7.520.000,00	(1.920.000,00)	(25,53)
9	Sewa Tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian point of	BPKAD	9.916.666,67	13.416.666,66	(3.499.999,99)	(26,09)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	SKPD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	<i>fresence (POP)</i> <i>Container Infrastruktur</i> <i>Internet</i>					
10	Sewa Tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian <i>point of fresence (POP)</i> <i>Container Infrastruktur</i> <i>Internet</i>	BPKAD	9.916.666,67	13.416.666,67	(3.500.000,00)	(26,09)
11	Sewa Tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian <i>point of fresence (POP)</i> <i>Container Infrastruktur</i> <i>Internet</i>	BPKAD	9.916.666,67	13.416.666,67	(3.500.000,00)	(26,09)
12	Sewa Tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian <i>point of fresence (POP)</i> <i>Container Infrastruktur</i> <i>Internet</i>	BPKAD	9.916.666,67	13.416.666,67	(3.500.000,00)	(26,09)
13	Sewa Tanah di Janapria	BPKAD	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
14	Sewa Tanah Samping Kantor Desa Kuta	BPKAD	0,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(100,00)
15	Sewa Tanah Eks Kominfo	BPKAD	0,00	7.254.166,67	(7.254.166,67)	(100,00)
16	Sewa Tanah BBI Pemepek	Dislutkan	75.000.000,00	102.500.000,00	(27.500.000,00)	(26,83)
17	Sewa Tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian <i>point of fresence (POP)</i> <i>Container Insfratraktur</i> <i>Internet</i>	BKAD	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	100,00
18	Sewa Tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian <i>point of fresence (POP)</i> <i>Container Insfratraktur</i> <i>Internet</i>	BKAD	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
19	Sewa Tanah di Desa Kuta Untuk Pembangunan Vila	BKAD	351.000.000,00	0,00	351.000.000,00	100,00
20	Sewa Tanah di Desa Sengkol (Warung Ayam Bakar)	BKAD	23.333.333,33	0,00	23.333.333,33	100,00
21	Sewa Kolam Renang Matra	BKAD	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00
22	Sewa Tanah Gelondong Kelurahan Panjisari	BKAD	2.687.500,00	0,00	2.687.500,00	100,00
23	Sewa Tanah Gelondong Kelurahan Panjisari	BKAD	3.299.100,00	0,00	3.299.100,00	100,00
24	Sewa Tanah yang berlokasi di Desa Barabali	Pertanian	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00	100,00
25	Sewa Tanah Lahan Parkir Pasar Renteng	Disperindag	137.614.583,33	0,00	137.614.583,33	100,00
C	Pendapatan di terima di muka atas pajak reklame	Bapenda	382.864.483,33	425.538.068,00	(42.673.584,67)	(10,03)
	Jumlah		1.179.355.749,99	738.647.818,00	440.707.931,99	59,66

Penjelasan:

1. Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 merupakan Utang yang timbul karena Pemerintah Daerah menerima penerimaan pembayaran dimuka atas

penyerahan barang/jasa dari pihak lain yang periode sewanya belum dilaksanakan oleh pihak ketiga; dan

- Perhitungan Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 didasarkan pada periode waktu perjanjian sewa disesuaikan dengan periode pelaporan keuangan.

Daftar mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 19. Daftar Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2025.**

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Belanja serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.164 Rincian Utang Belanja

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31-Des-24	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Pegawai	11.853.991.621,20	13.368.017.330,05	(1.514.025.708,85)	(11,33)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	37.677.681.006,91	34.710.065.782,16	2.967.615.224,75	8,55
3	Utang Belanja Modal	701.774.460,00	8.729.522.994,00	(8.027.748.534,00)	(91,96)
4	Utang Belanja Transfer	8.421.270.319,02	5.840.830.037,81	2.580.440.281,21	44,18
Jumlah		58.654.717.407,13	62.648.436.144,02	(3.993.718.736,89)	(6,37)

Penjelasan:

- Utang Belanja Pegawai Senilai Rp11.853.991.621,20 merupakan utang belanja pegawai berupa Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN, Gaji PPPK, dan belanja pegawai BLUD yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.165 Rincian Utang Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Bertambah /Berkurang	%
1	Utang Gaji dan Tunjangan	179.137.859,00	152.622.146,00	26.515.713,00	17,37
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	2.689.308.866,00	8.039.725.593,00	(5.350.416.727,00)	(66,55)
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.985.544.896,20	774.365.319,60	8.211.179.576,60	1.060,38
4	Utang Jasa Pelayanan/Pegawai BLUD	0,00	4.401.304.271,45	(4.401.304.271,45)	(100,00)
Jumlah		11.853.991.621,20	13.368.017.330,05	(1.514.025.708,85)	(11,33)



2. Utang Belanja Barang dan Jasa:

- a. Utang Belanja Barang dan Jasa senilai Rp37.677.681.006,91 merupakan utang belanja barang dan jasa yang terdiri dari utang belanja barang, utang belanja jasa dan utang belanja pemeliharaan, dan utang belanja perjalanan dinas;
- b. Berikut ini adalah rincian utang belanja barang dan jasa sebagai berikut.

Tabel 5.166 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A	Utang Belanja Barang	32.089.777.246,91	32.453.417.349,16	(363.640.102,25)	(1,12)
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	1.464.081.205,00	2.106.630.000,00	(642.548.795,00)	(30,50)
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan Baku	1.032.984.109,00	0,00	1.032.984.109,00	100,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	10.364.652.919,75	1.212.120,00	10.363.440.799,75	854.984,72
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.517.367.378,66	196.115.000,00	3.321.252.378,66	1.693,52
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	2.113.730.932,50	827.298.639,00	1.286.432.293,50	155,50
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan	13.459.745.075,00	13.186.038.147,00	273.706.928,00	2,08
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya	0,00	9.644.801.199,16	(9.644.801.199,16)	(100,00)
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	104.093.877,00	17.291.300,00	86.802.577,00	502,00
9	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	33.121.750,00	6.448.785.944,00	(6.415.664.194,00)	(99,49)
10	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	25.245.000,00	(25.245.000,00)	(100,00)
B	Utang Belanja Jasa	5.400.862.370,00	2.256.648.433,00	3.144.213.937,00	139,33
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	736.327.700,00	0,00	736.327.700,00	100,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	170.427.400,00	0,00	170.427.400,00	100,00
3	Utang Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	160.182.500,00	(160.182.500,00)	(100,00)
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	53.547.896,00	45.899.930,00	7.647.966,00	16,66
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	469.680.611,00	1.387.347.435,00	(917.666.824,00)	(66,15)
6	Utang Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	46.383.900,00	18.926.278,00	27.457.622,00	145,08
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	1.215.826.753,00	40.691.756,00	1.175.134.997,00	2.887,89
10	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	601.452.014,00	601.452.014,00	0,00	0,00
11	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya	2.148.520,00	2.148.520,00	0,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Darah	38.720.000,00	0,00	0,00	100,00
	Utang Belanja Jasa Umum Pelayanan Kesehatan	1.816.057.576,00	0,00	0,00	100,00
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	100,00
12	Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika				
C	Utang Belanja Pemeliharaan	179.541.390,00	0,00	179.541.390,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	179.541.390,00	0,00	179.541.390,00	100,00
2	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Utang Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
D	Utang Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
1	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
	Jumlah	37.677.681.006,91	34.710.065.782,16	2.967.615.224,75	8,55

Nilai utang Belanja Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Praya masih terdapat utang belanja Tahun 2025 yang belum terkonfirmasi, hal ini didasarkan pada hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh BLUD RSUD Praya dengan masing-masing penyedia. Hasil analisis selanjutnya menunjukkan adanya sisa nilai utang yang tidak dapat dikonfirmasi sebesar Rp106.242.397,00 (Rp24.080.190.140,20 - Rp8.261.185.740,00 - Rp15.712.762.003,20). Hal tersebut disebabkan nilai utang tidak dapat ditelusuri dengan catatan pembukuan BLUD RSUD Praya serta tidak adanya informasi dari penyedia. Selain itu, Belanja Jasa Pelayanan (Jaspel) yang bersumber dari klaim BPJS bulan Oktober dan November 2025 yang telah diterima pada rekening BLUD namun belum dibayarkan kepada pegawai, masing-masing sebesar Rp2.130.249.436,00 dan Rp1.593.219.200,00.

Di samping itu, terdapat utang Belanja Jasa Pelayanan Umum untuk periode Agustus 2024 sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp1.816.057.576,00. Hasil pemeriksaan BPK juga menemukan adanya utang belanja terkait iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp601.452.014,00. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan BPJS, kewajiban iuran sebesar 4% yang menjadi beban pemberi kerja belum diperhitungkan

sejak September 2023 sampai dengan 31 Desember 2025, sehingga nilai utang tersebut belum mencerminkan seluruh kewajiban iuran 4% yang seharusnya menjadi beban pemberi kerja.

3. Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025 senilai Rp701.774.460,00 merupakan utang belanja modal Peralatan dan Mesin, utang belanja modal gedung dan bangunan, serta utang belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada beberapa SKPD yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum di bayarkan kepada pihak ketiga Berikut disajikan rincian utang belanja modal sebagai berikut.

Tabel 5.167 Rincian Utang Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
A	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	DIKBUD	50,00	313.527.050,00	(313.527.000,00)	(100,00)
1	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	DIKBUD	0,00	68.050.000,00	(68.050.000,00)	(100,00)
2	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	DIKBUD	0,00	6.080.000,00	(6.080.000,00)	(100,00)
3	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	DIKBUD	0,00	221.080.000,00	(221.080.000,00)	(100,00)
4	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	DIKBUD	50,00	18.317.050,00	(18.317.000,00)	(100,00)
B	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		291.555.910,00	8.099.041.560,00	(7.807.485.650,00)	(96,40)
1	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DIKBUD	0,00	8.095.561.560,00	(8.095.561.560,00)	(100,00)
2	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	DIKES	0,00	3.480.000,00	(3.480.000,00)	(100,00)
3	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	DIKBUD	0,00	1.024.207.400,00	(1.024.207.400,00)	(100,00)
4	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	RSUD	291.550.000,00	0,00	291.550.000,00	100,00
5	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	DIKBUD	0,00	203.770.000,00	(203.770.000,00)	(100,00)
6	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	DIKBUD	5.910,00	5.665.320.760,00	(5.665.314.850,00)	(100,00)
7	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	DIKBUD	0,00	101.703.400,00	(101.703.400,00)	(100,00)

No	Uraian	SKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
8	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	DIKBUD	0,00	368.025.000,00	(368.025.000,00)	(100,00)
9	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda- Pagar	DIKBUD	0,00	291.125.000,00	(291.125.000,00)	(100,00)
B	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		410.218.500,00	316.954.384,00	93.264.116,00	29,43
1	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	PUPR	410.218.500,00	316.954.384,00	93.264.116,00	29,43
	Jumlah		701.774.460,00	8.729.522.994,00	(8.027.748.534,00)	(91,96)

Daftar Utang Belanja Pegawai, Utang Barang dan Jasa, dan Utang Belanja Modal serta Utang Belanja BLUD RSUD dapat dilihat pada **Lampiran 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 20g, dan 20h**.

- BPK melakukan konfirmasi utang belanja secara uji petik kepada 61 penyedia dan menemukan adanya perbedaan nilai utang antara catatan BLUD RSUD Praya dengan nilai yang diakui oleh penyedia. Atas kondisi tersebut, BLUD RSUD Praya menindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi dan rekonsiliasi kepada 85 penyedia. Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa sebanyak 38 penyedia dengan nilai utang sebesar Rp8.261.185.740,00 telah sesuai antara catatan BLUD RSUD Praya dengan hasil konfirmasi penyedia, sedangkan 47 penyedia dengan nilai utang sebesar Rp15.712.762.003,20 masih menunjukkan perbedaan antara nilai utang pada Neraca per 31 Desember 2025 dengan catatan utang BLUD RSUD Praya. Atas perbedaan tersebut, BLUD RSUD Praya telah melakukan rekonsiliasi dengan masing-masing penyedia. Hasil analisis menunjukkan masih terdapat sisa utang yang tidak dapat dikonfirmasi sebesar Rp106.242.397,00, yang disebabkan nilai utang tidak dapat ditelusuri dalam catatan pembukuan BLUD RSUD Praya serta tidak tersedianya informasi pendukung dari pihak penyedia.
- Utang Transfer timbul karena adanya kurang salur Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa. Utang Belanja Transfer Ke Desa per 31 Desember 2025 belum diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang kurang salur Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa karena masih dalam tahap verifikasi alokasi masing-masing Desa penghasil. Berikut rincian Utang Transfer ke desa untuk Tahun 2025.

Tabel 5.168 Rincian Utang DBH Ke Desa

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Utang DBH Tahun 2025	Utang DBH Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pajak daerah	7.125.143.562,02	5.019.134.566,75	2.106.008.995,27	41,96
2	Reribusi Daerah	1.296.126.757,00	821.695.471,06	474.431.285,94	57,74
	Jumlah	8.421.270.319,02	5.840.830.037,81	2.580.440.281,21	44,18

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek Lainnya per tanggal Neraca yaitu sebesar Rp46.000.000,00, merupakan uang jaminan keberlangsungan sewa atas penyewaan tanah area parkir Pasar Renteng yang telah disetor ke RKUD oleh pihak penyewa sesuai

perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Penyetoran uang jaminan sewa ini tidak disajikan sebagai pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan disajikan sebagai Aset Lainnya pada Akun Kas yang dibatasi penggunaannya dan disajikan sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut.

Tabel 5.169 Daftar Utang Jangka Panjang pada PT SMI-PEN

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	102.517.249.810,00	133.697.947.150,00	(31.180.697.340,00)	(18,91)
Jumlah		102.517.249.810,00	133.697.947.150,00	(31.180.697.340,00)	(18,91)

Penjelasan:

1. Nilai Kewajiban Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2024 merupakan pinjaman kepada PT SMI untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19 dicatat dan diakui sesuai dengan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-206/SMI/1221 tanggal 29 Desember 2021 telah diubah melalui Perjanjian Perubahan Pertama terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 16 tanggal 19 Mei 2022 antara Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) dengan Bupati Lombok Tengah. Melalui perjanjian tersebut telah disepakati bahwa PT SMI memberikan pinjaman senilai Rp200.000.000.000,00 dengan jangka waktu delapan tahun atau 96 bulan terhitung sejak tanggal pencairan pertama. Masa pencairan pinjaman (*availability Period*) adalah sejak tanggal pencairan pertama yaitu tanggal 27 April 2022 senilai Rp50.000.000.000 sampai dengan 30 September 2022 sesuai dengan Perjanjian perubahan pertama. Namun perkembangan selanjutnya, pemberian pinjaman yang dapat dicairkan hingga September 2022 senilai Rp187.084.169.050,00. Pada Tahun 2023 terjadi pengurangan nilai pinjaman senilai Rp1.418.393.000,00 yang disebabkan karena terdapat selisih HPS dengan nilai kontrak dalam pengerjaan infrastruktur yang didanai dari pinjaman PT SMI. Sehingga nilai seluruhnya realisasi pinjaman Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT SMI per 31 Desember 2023 senilai Rp185.665.776.050,00. Penarikan Pinjaman dari PT SMI sebagai berikut.

Tabel 5.170 Daftar Penarikan Utang Jangka Panjang pada PT SMI-PEN

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	Jumlah	Tanggal Penarikan
1	Penarikan I	50.000.000.000,00	27 April 2022
2	Penarikan II	90.000.000.000,00	12 September 2022
3	Penarikan III	47.084.169.050,00	30 September 2022
4	Koreksi Atas Kelebihan Salur Utang oleh PT SMI	(1.418.393.000,00)	28 Februari 2023
Jumlah		185.665.776.050,00	

2. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan reklasifikasi angsuran pokok utang ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp31.180.697.340,00 untuk angsuran pokok periode bulan Januari sampai dengan Desember 2026; dan
3. Berikut Disajikan Mutasi Utang Jangka Panjang kepada PT SMI sebagai berikut.

Tabel 5.171 Mutasi Utang Jangka Panjang

(dalam Rupiah)

Periode	Mulai	Akhir	Kewajiban Pokok Tahun 2025	Sisa Pokok
1	Saldo Utang Jangka Panjang s.d Periode Ketiga			133.697.947.150,00
2	30/11/2025	31/12/2025	2.598.391.445,00	131.099.555.705,00
3	31/12/2025	31/01/2026	2.598.391.445,00	128.501.164.260,00
4	31/01/2026	28/02/2026	2.598.391.445,00	125.902.772.815,00
5	28/02/2026	31/03/2026	2.598.391.445,00	123.304.381.370,00
6	31/03/2026	30/04/2026	2.598.391.445,00	120.705.989.926,00
7	30/04/2026	31/05/2026	2.598.391.445,00	118.107.598.480,00
8	31/05/2026	30/06/2026	2.598.391.445,00	115.509.207.035,00
9	30/06/2026	31/07/2026	2.598.391.445,00	112.910.815.590,00
10	31/07/2026	31/08/2026	2.598.391.445,00	110.312.424.145,00
11	31/08/2026	30/09/2026	2.598.391.445,00	107.714.032.700,00
12	30/09/2026	31/10/2026	2.598.391.445,00	105.115.641.255,00
13	31/10/2026	30/11/2026	2.598.391.445,00	102.517.249.810,00
Sisa Pokok			31.180.697.340,00	102.517.249.810,00

Daftar Mutasi Utang Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 21. Daftar Mutasi Utang Jangka Panjang Per 31 Desember 2025.**

5.3.3 EKUITAS

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 5.172 Nilai Ekuitas

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Ekuitas	4.096.693.095.601,76	3.928.911.099.331,97	167.781.996.269,79	4,27
Jumlah		4.096.693.095.601,76	3.928.911.099.331,97	167.781.996.269,79	4,27

Penjelasan:

1. Nilai Ekuitas tersebut adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal pelaporan; dan
2. Nilai Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam penjelasan atas Pos-Pos LPE pada **Poin 5.6.4.**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN OPERASIONAL

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dan Tahun 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1 PENDAPATAN DAERAH - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan pada **Lampiran 22** dan tabel sebagai berikut.

Tabel 5.173 Rincian Pendapatan – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Asli Daerah – LO	535.832.457.139,72	322.125.333.930,16
Pendapatan Transfer – LO	2.156.877.100.461,00	2.073.944.463.028,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	168.387.895.357,00	77.336.083.729,27
Jumlah	2.861.097.452.957,72	2.473.405.880.687,43

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.174 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Pajak Daerah – LO	335.782.630.171,29	190.681.563.492,75
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	39.495.599.933,33	29.210.384.887,66
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	15.544.738.125,00	2.745.795.422,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	145.009.488.910,10	99.487.590.127,75
Jumlah	535.832.457.139,72	322.125.333.930,16

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



Tabel 5.175 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	0,00	8.208.720.449,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	43.260.423.326,00	0,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu [PBJT]-LO	164.996.438.197,20	81.789.065.301,36
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	36.450.538.450,00	0,00
Pajak Hotel – LO	0,00	15.001.978.695,61
Pajak Restoran – LO	0,00	14.694.027.768,03
Pajak Hiburan – LO	0,00	4.333.375.502,50
Pajak Reklame – LO	2.072.283.381,34	2.215.411.061,25
Pajak Parkir – LO	0,00	596.325.789,00
Pajak Air Tanah – LO	391.158.607,00	496.125.399,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	500.000,00	4.350.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	4.770.677.876,75	3.549.329.804,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	21.944.376.332,00	24.090.802.640,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	61.896.234.001,00	35.702.051.083,00
Jumlah	335.782.630.171,29	190.681.563.492,75

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
 - a. Pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan adanya objek pajak baru yang menjadi sumber pendapatan daerah yaitu pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penambahan objek pajak baru tersebut merupakan implementasi dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun peraturan pendukung mulai berlaku di Tahun 2024, penyesuaian teknis seringkali membuat dampaknya baru terimplementasi penuh dalam APBD Tahun 2025;
 - b. Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu-LO mengalami kenaikan di sebabkan oleh :
 - 1) Meningkatnya kunjungan wisata ke Lombok Tengah, berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata RI per bulan Mei 2025 terjadi lonjakan kunjungan wisatawan Nusantara mencapai 89,57% dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2024;
 - 2) Peningkatan pembayaran listrik dikarenakan terdapat sosialisasi pembayaran pajak oleh PLN;
 - 3) Perubahan nomenklatur Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan menjadi PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, dan PBJT-Jasa Parkir sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga pendapatan dari PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT Makanan



- dan/atau Minuman, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, dan PBJT-Jasa Parkir tercatat secara terpisah dalam laporan keuangan Tahun 2024;
- 4) Kenaikan disebabkan oleh meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, jumlah penonton pada event MotoGP Tahun 2025 juga mengalami peningkatan sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dibandingkan Tahun 2024;
 - c. Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan adanya objek pajak baru yang menjadi sumber pendapatan daerah yaitu pendapatan opsen PKB. Penambahan objek pajak baru tersebut merupakan implementasi dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Pendapatan Pajak Hotel-LO, Pajak Restoran-LO, Pajak Hiburan-LO dan Pajak Parkir-LO, mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur dari Pajak Hotel menjadi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan menjadi PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, dan PBJT-Jasa Parkir sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disahkan pada tanggal 19 Januari 2024;
 - e. Pendapatan Pajak Reklame-LO mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah pemasangan reklame baru baik berupa papan iklan, spanduk atau media digital dan meningkatnya efektivitas dalam pemungutan pajak oleh pemerintah daerah;
 - f. Pendapatan Pajak Air Tanah-LO mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2024 karena menurunnya volume penggunaan air tanah pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, antara lain karena adanya penutupan usaha serta peralihan sebagian pengguna ke sumber air lainnya, seperti jaringan air bersih milik pemerintah daerah;
 - g. Pendapatan pajak Sarang Burung Walet-LO mengalami penurunan di bandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini di sebakn karena penurunan realisasi pendapatan yang di sebakkn penurunan produksi wallet pada Tahun 2025. Selain itu kesadaran pengusaha sarang burung wallet untuk membayar pajak masih rendah dan dari hasil penelusuran ke wajib pajak, para pengusaha sarang burung wallet mengaku tidak ada wallet yang bersarang di Gedung milik pengusaha;
 - h. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO mengalami kenaikan di bandingkan Tahun 2024 hal ini di sebakkn adanya SKK (Surat Kuasa Khusus) dengan Kejaksanaan Negeri Lombok Tengah sejak Tahun 2024, sehingga Bapenda memperoleh dukungan dalam pelaksanaan penagihan Pajak MBLB. Pemberian SKK tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pada Tahun 2025;
 - i. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO mengalami kenaikan hal ini disebabkan meningkatnya jumlah peralihan hak atas tanah dan bangunan pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024. Selain itu, perkembangan ekonomi dan pembangunan yang pesat di KEK Mandalika turut mendorong kenaikan harga tanah dan bangunan, sehingga nilai Pendapatan BPHTB juga meningkat;



- j. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan kepala dusun dan kepala lingkungan meningkatkan pola penagihan PBB dalam hal penagihan pajak PBBP2 di wilayah masing-masing.
2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp5.095.317.898,34 (Rp335.782.630.171,29 - Rp330.687.312.272,95). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.176 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	5.095.317.898,34
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	107.435.915.958,67
Piutang Pajak Reklame Tahun 2025	35.731.666,67
Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025	102.000,00
Piutang Pajak PBB Tahun 2025	106.974.544.224,00
Pendapatan di terima di muka pajak reklame Tahun 2024	425.538.068,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	102.340.598.060,33
Piutang Pajak Reklame Tahun 2024	33.693.750,00
Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2024	22.596.200,00
Piutang Pajak PBB Tahun 2024	86.321.727.662,07
Pendapatan di terima di muka pajak reklame Tahun 2025	382.864.483,33
Koreksi atas kurang saji Piutang PBBP2 dari tahun 2012 s.d tahun 2024	15.579.715.964,93
Jumlah Penjelasan Selisih	5.095.317.898,34

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.177 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Retribusi Jasa Umum – LO	28.860.957.102,00	22.651.463.106,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	26.222.164.102,00	20.391.845.498,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	725.662.000,00	483.205.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	224.391.000,00	251.980.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.688.740.000,00	1.494.343.675,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0,00	30.088.933,00
Retribusi Jasa Usaha - LO	4.085.329.583,33	3.074.978.666,66
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	2.750.613.983,33	2.041.041.666,66
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	887.879.000,00	688.364.000,00



Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	15.988.000,00	19.448.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO	132.200.000,00	156.600.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	298.648.600,00	169.525.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	6.549.313.248,00	3.483.943.115,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	5.199.590.376,00	2.626.981.115,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	1.349.722.872,00	856.962.000,00
Jumlah	39.495.599.933,33	29.210.384.887,66

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
 - a. Retribusi Jasa Umum-LO
 - 1) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh:
 - a) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO mengalami kenaikan di dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan pada Tahun 2025 seluruh puskesmas sudah di tetapkan menjadi BLUD. Pada Tahun 2025 rincian pendapatan untuk retribusi pelayanan kesehatan bersumber dari tiga jenis penerimaan yaitu jasa pelayanan terhadap pasien umum, klaim BPJS Non-Kapitasi dan Pendapatan UPTD unit Transfusi Darah, sedangkan pada Tahun 2024 realisasi pendapatan klaim BPJS Non-Kapitasi di catat pada LLPAD (pendapatan BLUD);
 - b) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan penurunan angka kunjungan pasien dengan status pasien umum sebagai dampak dari pemberlakuan *Universal Healt Coverage* (UHC) pada Kabupaten Lombok Tengah, sehingga sebagian besar pasien yang dilayani oleh RSUD Praya adalah pasien PBI Daerah yang dijamin oleh BPJS Kesehatan;
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh optimalisasi penarikan retribusi kepada perusahaan yang membuang sampah ke TPA, peningkatan pencatatan volume sampah masuk melalui jembatan timbang, serta upaya meminimalkan tunggakan melalui penyampaian surat penagihan kepada pihak ketiga yang menunggak pembayaran retribusi;
 - 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh:
 - a) Ketidakpatuhan pihak ketiga selaku koordinator parkir di beberapa kecamatan, khususnya Kecamatan Praya, karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah ditetapkan, sehingga realisasi setoran retribusi parkir tidak mencapai target;
 - b) Setoran dari forum kaling dan kelompok masyarakat tidak sepenuhnya disetorkan dan tidak sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan; dan



- c) Belum tersusunnya regulasi teknis pengelolaan parkir sebagai pedoman operasional dan dasar hukum dalam pengawasan serta penindakan terhadap penyimpangan pengelolaan parkir.
 - 4) Retribusi Pelayanan Pasar–LO mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh :
 - a) Optimalisasi pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan aplikasi yang memudahkan juru pungut untuk melakukan pengecekan jumlah pendapatan harian atas penarikan Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - b) Adanya penyesuaian tarif atau pungutan yang dikenakan kepada para pedagang di pasar, yang diiringi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar.
 - 5) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi mengalami penurunan hal ini disebabkan sejak Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika tidak lagi melakukan pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Adapun pendapatan yang tercatat pada Tahun 2024 merupakan pembayaran piutang retribusi dari tahun sebelumnya;
- b. Retribusi Jasa Usaha-LO
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena:
 - a) Rusunawa kembali beroperasi sejak Mei Tahun 2025 setelah dilakukan rehabilitasi dan perbaikan gedung, sehingga retribusi sewa tanah dan bangunan mengalami peningkatan;
 - b) Pemenuhan kontribusi setoran PT Lombok Capital Ventures sesuai dengan kontrak yang di sepakati yaitu berupa sewa tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian *Point of Presence* (POP) *Container Insfratraktur Internet*, sewa tanah di Desa Kuta untuk pembangunan vila dan sewa Kolam Renang Matra.
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan–LO mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena:
 - a) Adanya penyesuaian tarif atau pungutan yang dikenakan kepada para pedagang di pasar grosir maupun pertokoan, kenaikan tersebut diiringi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar; dan
 - b) Terdapat aplikasi yang memudahkan juru pungut untuk melakukan pengecekan jumlah pendapatan harian atas penarikan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
 - 3) Retribusi Rumah Potong Hewan-LO mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh:
 - a) Sarana dan prasarana Pasar Hewan Gerantung dan Barabali belum memadai, seperti kondisi pasar yang becek dan kotor, drainase minim, area jual beli tidak tertata, serta kurangnya papan informasi tarif retribusi;



- b) Rendahnya kesadaran peternak dalam memenuhi kewajiban pembayaran tiket/karcis masuk ternak sehingga menyulitkan petugas dalam pemungutan retribusi; dan
 - c) Aktivitas jagal tidak dilakukan secara rutin, karena pemotongan hewan hanya dilakukan pada waktu tertentu dan berdasarkan pesanan.
 - 4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh munculnya tempat olahraga dan rekreasi milik swasta yang lebih menarik dapat mengurangi kunjungan ke fasilitas milik pemerintah. Tidak terdapat biaya operasional dan *maintanance* untuk pengelolaan DTW (Daya Tarik Wisata).
 - 5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap budidaya perikanan yang didukung kondisi cuaca relatif stabil, optimalisasi pengelolaan unit produksi melalui peningkatan kapasitas dan perbaikan distribusi, serta meningkatnya kualitas dan produktivitas benih/bibit tanaman yang mendorong permintaan dari petani.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu-LO
 - 1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO mengalami kenaikan yang disebabkan oleh tingginya kegiatan usaha sehingga permohonan Persetujuan Bangunan Gedung pada fungsi usaha meningkat sangat signifikan terutama pada pembangunan sektor akomodasi pariwisata;
 - 2) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO mengalami kenaikan yang disebabkan meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja sehingga penerimaan retribusi penggunaan TKA turut meningkat.
2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp1.001.842.566,67 (Rp39.495.599.933,33 - Rp40.497.442.500,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.178 Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(1.001.842.566,67)
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	2.919.589.569,33
Pendapatan diterima di muka retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun 2024	308.047.250,00
Piutang retribusi pelayanan kesehatan Tahun 2025	570.394.800,00
Piutang retribusi pelayanan persampahan Tahun 2025	20.466.000,00
Piutang retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2025	293.247.045,00



Uraian	Nilai
Koreksi penghapusan piutang atas piutang rumah dinas pasar lama yang asetnya telah di hibahkan ke Yayasan Masjid Jamiq Praya pada Bappenda	17.050.000,00
Piutang retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2025	505.890.983,33
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.204.493.491,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	3.921.432.136,00
Piutang retribusi pelayanan kesehatan Tahun 2024	997.436.350,00
Piutang retribusi pelayanan persampahan Tahun 2024	51.260.000,00
Piutang retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2024	293.247.045,00
Piutang retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2024	522.940.983,33
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.204.493.491,00
Pendapatan diterima di muka retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun 2025	796.491.266,67
Reklas Piutang Lain- Lain PAD yang sah	55.563.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(1.001.842.566,67)

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.179 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN – LO	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	14.664.803.673,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO	59.573.884,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LO	820.360.568,00	2.745.795.422,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah) – LO	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	0,00	0,00





Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) – LO		
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta – LO	0,00	0,00
Jumlah	15.544.738.125,00	2.745.795.422,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
 - Pemerintah daerah telah mengeluarkan regulasi terkait dengan pemberian/pembagian dividen dan kontribusi terhadap laba bersih BUMD; dan
 - Tahun 2025 terdapat penerimaan laba atas penyertaan modal pada Perumdam Tiara Loteng dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - Rincian bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – LO sebagai berikut :
 - Pendapatan bagian laba PT Bank NTB Syariah sebesar Rp11.363.369.253,00 diakui berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 Bank NTB Syariah Tanggal 30 Juni 2025 dalam bentuk Akta Notaris;
 - Pendapatan bagian laba PT PBR NTB sebesar Rp1.515.591.410,00 diakui berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR NTB (Perseroda) tanggal 25 Juni 2025;
 - Pendapatan bagian laba PT Jamkrida NTB Bersaing sebesar Rp59.573.884,00 yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban PT Jamkrida NTB Syariah Tahun 2024 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2025 pada 25 Juni 2025;
 - Bagian Laba Bersih PDAM Tirta Ardha Rinjani untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp245.080.750,00 diakui berdasarkan surat Bupati Lombok Tengah selaku kuasa pemilik modal No. 500/08/EKO/2025 dan berdasarkan Laporan Keuangan Audited PDAM Tirta Ardha Rinjani Tahun Buku 2025.
- Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp2.361.122.828,00 (Rp15.544.738.125,00 - Rp13.183.615.297,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.180 Penjelasan Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	2.361.122.829,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	2.606.203.578,00



Uraian	Nilai
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-2025	2.030.923.760,00
Koreksi atas kurang saji Laba PDAM TB 2025	575.279.818,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	245.080.750,00
Pembayaran Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-2024	245.080.750,00
Jumlah Penjelasan Selisih	2.361.122.828,00

5.4.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut

Tabel 5.181 Rincian Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Jasa Giro – LO	3.491.654.244,90	1.791.092.003,99
Pendapatan Bunga – LO	4.414.194.118,83	2.244.946.521,53
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	2.658.650.977,24	3.344.520.138,51
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	1.113.784.566,65	758.893.603,44
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	163.127.564,05	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	969.886.417,13	795.163.493,55
Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian – LO	3.273.845.244,26	884.489.193,37
Pendapatan BLUD – LO	128.885.960.862,04	89.668.485.173,36
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	38.384.915,00	0,00
Jumlah	145.009.488.910,10	99.487.590.127,75

Penjelasan:

- Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
 - Pendapatan Jasa Giro mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh frekuensi atau volume transaksi perbankan meningkat, baik itu transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan, atau transaksi lainnya yang melibatkan rekening giro, maka pendapatan dari biaya-biaya transaksi juga meningkat;
 - Pendapatan Bunga mengalami kenaikan di badingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebakan oleh dana yang ditempatkan (deposito) meningkat dari tahun sebelumnya sehingga pendapatan bunga juga meningkat;
 - Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan meningkatnya penyelesaian kasus kerugian



daerah, baik melalui pembayaran langsung maupun angsuran oleh pihak yang bertanggung jawab, serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan dalam penyelesaian kewajiban pengembalian kerugian daerah.

- d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain mengalami kenaikan karena penerimaan yang masuk ke kas daerah masih banyak yang belum dapat diidentifikasi jenis pendapatannya. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya konfirmasi dari pihak penyetor serta ketiadaan keterangan yang memadai pada uraian transfer;
- e. Pendapatan Denda Pajak Daerah mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan adanya wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak, termasuk wajib pajak restoran yang membayar melebihi jatuh tempo; dan
- f. Pendapatan BLUD mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan terdapat peningkatan terhadap Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum yang memiliki jaminan kesehatan dari lembaga penjamin seperti BPJS Kesehatan dan Jasa Raharja.

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2025 ini **lebih kecil** dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp16.453.944.404,43 (Rp145.009.488.910,10 - Rp161.463.433.314,53). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.182 Penjelasan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(16.453.944.404,43)
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	7.351.257.874,59
Pendapatan diterima dimuka Tahun 2025	5.062.500,00
Piutang lain lain PAD yang sah Tahun 2025	6.596.726.833,59
Reklas ke Piutang Retribusi	55.563.000,00
Ketetapan TGR aset lainnya Tahun 2025	693.905.541,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	23.805.202.279,02
Penyetoran TGR 2022 di 2025 sebagai pengurang aset lainnya.	1.763.116.070,43
Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah 2024	22.042.086.208,59
Jumlah Penjelasan Selisih	(16.453.944.404,43)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.183 Rincian Pendapatan Transfer – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	2.045.677.119.256,00	1.947.658.744.050,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	111.199.981.205,00	126.285.718.978,00
Jumlah	2.156.877.100.461,00	2.073.944.463.028,00

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.184 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Perimbangan – LO	0,00	1.923.949.968.050,00
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	0,00	100.451.016.000,00
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	0,00	1.248.441.289.000,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	0,00	202.489.811.306,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	0,00	372.567.851.744,00
Dana Insentif Daerah – LO	7.888.237.000,00	23.708.776.000,00
Insentif Fiskal – LO	7.888.237.000,00	23.708.776.000,00
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	177.896.979.100,00	0,00
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.375.586.130.050,00	0,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)	484.305.773.106,00	0,00
Jumlah	2.045.677.119.256,00	1.947.658.744.050,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan oleh kebijakan perhitungan alokasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus-DAK Fisik maupun Dana Alokasi Khusus-DAK Non Fisik pada Tahun 2025 sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dengan besaran penetapan alokasi masing-masing pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025, dan disesuaikan dengan terbitnya KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2025 ini **lebih kecil** dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA Tahun 2025



sebesar Rp162.209.204.800,00 (Rp2.045.677.119.256,00-Rp2.207.886.324.056,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.185 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(162.209.204.800,00)
Penjelasan Selisih:	
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	162.209.204.800,00
Dana Desa tidak diakui sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Laporan Operasional	162.209.204.800,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(162.209.204.800,00)

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.186 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Bagi Hasil – LO	111.045.981.205,00	126.285.718.978,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	0,00	19.768.462.835,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	0,00	25.258.177.237,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	64.866.558.254,00	36.287.995.067,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	95.187.022,00	85.941.333,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	46.084.235.929,00	44.885.142.506,00
Bantuan Keuangan – LO	154.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	154.000.000,00	0,00
Jumlah	111.199.981.205,00	126.285.718.978,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
 - Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1-143 Tahun 2025 Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak untuk Kabupaten Lombok Tengah 2024 sebesar Rp62.490.227.494,00; dan berdasarkan SK Gubernur no.100.3.3.1-60 Tahun 2026 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Triwulan IV sebesar Rp22.386.873,00 dan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 sebesar Rp111.045.991.205,00;



- b. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2024 yang dibayarkan Tahun 2025 lebih kecil dari Piutang Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 yang dibayarkan Tahun 2024. Sehingga realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Laporan Realisasi Anggaran meningkat.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2025 lebih kecil dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp10.120.306.117,00 (Rp111.199.981.205,00 - Rp121.320.287.322,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.187 Penjelasan Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(10.120.306.117,00)
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025	2.496.646.967,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.474.260.094,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	22.386.873,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah- Bagi Hasil pajak 2024	12.616.953.084,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.907.732.718,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.532.434.816,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.169.381.124,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7.404.426,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(10.120.306.117,00)

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.188 Rincian Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Hibah – LO	142.063.374.064,00	21.914.611.961,60
Dana Darurat – LO	0,00	0,00
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO	26.324.521.293,00	55.421.471.767,67
Jumlah	168.387.895.357,00	77.336.083.729,27



5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.189 Rincian Pendapatan Hibah – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	141.927.502.864,00	810.980.965,60
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	20.580.720.496,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	135.871.200,00	522.910.500,00
Jumlah	142.063.374.064,00	21.914.611.961,60

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Hibah–LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
 - a. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperoleh Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp141.927.502.864,00 yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Hibah Aset Tanah dari Badan Riset Inovasi Nasional berupa tanah stasiun penelitian di Kecamatan Praya sebesar Rp1.357.705.000,00;
 - 2) Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan dari Badan Riset Inovasi Nasional berupa gedung kantor permanen dan gedung semi permanen sebesar Rp330.362.000,00;
 - 3) Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan dari Kementerian PUPR berupa Bangunan Pasar Renteng sebesar Rp124.791.815.530,00;
 - 4) Pendapatan Hibah dari Provinsi NTB ke Dinas Kesehatan berupa Buffer Stock sebesar Rp13.104.317.835,00;
 - 5) Pendapatan Hibah dari Provinsi NTB ke Dinas DPPKB berupa Alat Kontrasepsi sebesar Rp1.979.633.465,00;
 - 6) Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat LO pada RSUD Praya berupa susu sebesar Rp34.625.000,00; dan
 - 7) Pendapatan Hibah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari kementerian PUPR untuk lokasi batujai salva residen sebesar Rp329.044.034,00.
 - b. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperoleh Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebesar Rp135.871.200,00 yang terdiri dari:
 - 1) Sumbangan pihak ketiga melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Djarum atau Djarum Foundation sebesar Rp67.871.200,00;
 - 2) Sumbangan pihak ketiga melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Alliance One Indonesia (AOI) dalam bentuk infrastruktur air bersih untuk masyarakat dan petani mitra sebesar Rp10.000.000,00;



- 3) Sumbangan Pihak Ketiga melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT SADHANA ARIF NUSA di antaranya berupa pembelian tembakau oven dan rajangan dari petani lokal, yang bertindak sebagai pembina/mitra sebesar Rp30.000.000,00; dan
- 4) Terdapat kontribusi dari Koperasi Usaha Kecil Menengah yang berada di wilayah Lombok Tengah berupa Dana Pembangunan Daerah Kerja (PDK) Koperasi sebesar Rp28.000.000,00.

Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2025 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp141.927.502.864,00 (Rp142.063.374.064,00 - Rp135.871.200,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.190 Penjelasan Selisih Pendapatan Hibah LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	141.927.502.864,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	141.927.502.864,00
Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Provinsi NTB Cq Dinas Kesehatan Berupa <i>Buffer stock</i>	13.104.317.835,00
Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Provinsi NTB Cq Dinas KB Berupa Alat Kontrasepsi	1.979.633.465,00
Pendapatan Hibah Pemerintah pusat-LO berupa susu pada RSUD	34.625.000,00
Pendapatan hibah dari aset	126.808.926.564,00
Jumlah Penjelasan Selisih	141.927.502.864,00

5.4.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.191 Rincian Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Lain-Lain Pendapatan-LO	0,00	34.759.393.827,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	34.759.393.827,00
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Baru Bara – LO	26.324.521.293,00	20.662.077.940,67
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi-LO	26.324.521.293,00	20.662.077.940,67
Jumlah	26.324.521.293,00	55.421.471.767,67



Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
 - a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP mengalami penurunan. Hal ini disebabkan Pada Tahun 2025 seluruh Puskesmas sudah ditetapkan menjadi BLUD sehingga Pendapatan Dana Kapitasi JKN diakui dan dicatat langsung sebagai Pendapatan BLUD (pendapatan jasa layanan), bukan lagi sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan). Dana ini masuk dalam rekening BLUD dan digunakan langsung untuk operasional serta Jasa Pelayanan; dan
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara mengalami penurunan. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara merupakan pembayaran bersih izin usaha pertambangan khusus-operasi produksi (IUPK-OP) PT Amman Nusa Tenggara kepada Pemerintah Propinsi masing-masing Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat Tahun Buku 2024 didasarkan pada Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerintah Propinsi NTB dengan PT Amman Nusa Tenggara pada hari senin 5 Mei 2025. Pada tanggal 1 Agustus 2025 PT AMNT melakukan pelimpahan ke RKUD Kabupaten Lombok Tengah senilai 1.597.071 USD atau setara dengan Rp26.324.521.293,00.
2. Pengakuan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam LRA Tahun 2025.

5.4.2 Beban Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.192 Rincian Beban Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Operasional	2.443.914.808.658,61	2.213.696.685.382,91
Beban Transfer	190.812.005.410,21	161.278.604.553,69
Jumlah	2.634.726.814.068,82	2.374.975.289.936,60

5.4.2.1 Beban Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 diuraikan pada **Lampiran 23** dan tabel sebagai berikut.

Tabel 5.193 Rincian Beban Operasional – LO*(dalam Rupiah)*

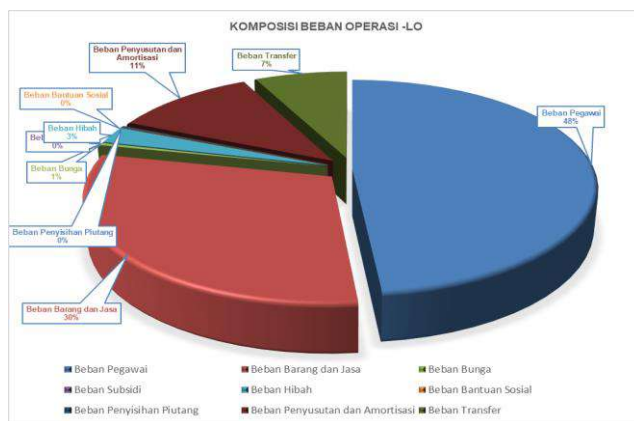
Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Pegawai	1.273.914.067.410,77	1.132.436.367.267,50



Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Barang dan Jasa	792.222.763.474,17	728.873.016.825,94
Beban Bunga	9.811.821.142,95	11.302.707.488,00
Beban Subsidi	0,00	0,00
Beban Hibah	67.020.375.362,00	107.746.181.707,47
Beban Bantuan Sosial	626.400.000,00	540.000.000,00
Beban Penyisihan Piutang	5.798.456.155,41	13.012.698.219,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	294.520.925.113,31	219.785.713.875,00
Jumlah	2.443.914.808.658,61	2.213.696.685.382,91

Penjelasan:

Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.194 Rincian Beban Pegawai LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	771.550.684.700,21	734.547.607.098,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	399.630.902.379,48	113.117.685.592,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	225.644.347.354,46
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	26.963.662.691,00	23.759.407.930,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	333.334.680,00	168.309.702,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	826.800.000,00	791.000.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan MRP	0,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	0,00	0,00
Beban Pegawai BOS	0,00	0,00
Beban Pegawai BOSP	0,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	74.608.682.960,08	34.408.009.591,04
Jumlah	1.273.914.067.410,77	1.132.436.367.267,50

Penjelasan:



1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
 - a. Penambahan pegawai melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.641 orang tenaga honorer yang dilaksanakan pada Juli Tahun 2025, sehingga berdampak pada meningkatnya Belanja Pegawai Tahun 2025;
 - b. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi Guru PNSD yang merupakan kewajiban Tahun Anggaran 2024 namun direalisasikan pembayarannya pada Tahun 2025; dan
 - c. Kenaikan pangkat dan/atau golongan pegawai yang berdampak pada peningkatan hak keuangan pegawai.
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp1.892.063.793,61 (Rp1.273.914.067.410,77 - Rp1.275.806.131.204,38). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.195 Penjelasan Selisih Beban Pegawai – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	-1.892.063.793,61
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	11.853.991.621,20
Utang Gaji dan Tunjangan Tahun 2025	179.137.859,00
Utang Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025	9.165.630.172,20
Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025	2.509.223.590,00
Pengurangan Beban LO:	13.746.055.414,81
Utang Gaji dan Tunjangan Tahun 2024	152.631.537,00
Utang Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2024	8.814.081.521,60
Utang jasa pelayanan BLUD Tahun 2024	4.401.304.271,45
Aset lainnya TGR yang mengurangi beban pegawai	378.038.084,76
Jumlah Penjelasan Selisih	-1.892.063.793,61

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.196 Rincian Beban Barang dan Jasa – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Barang	468.410.138.357,26	372.539.250.674,08
Beban Jasa	278.300.172.097,90	214.961.533.911,31
Beban Pemeliharaan	10.471.755.825,01	7.109.347.169,83
Beban Perjalanan Dinas	30.270.704.494,00	30.474.081.581,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	4.769.992.700,00	25.654.164.678,00
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	78.134.638.811,72
Jumlah	792.222.763.474,17	728.873.016.825,94

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
 - Peningkatan belanja barang pakai habis dan jasa kantor pada Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh meningkatnya aktivitas operasional serta kebutuhan perlengkapan kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Selain itu, terdapat penyesuaian harga barang di pasaran yang turut mempengaruhi nilai pengeluaran barang pakai habis; dan
 - Terdapat perubahan klasifikasi dan kodefikasi Belanja dari Belanja Barang dan Jasa BOS menjadi Belanja Barang dan Jasa BOSP, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2025 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp31.277.599.612,26 (Rp792.222.763.474,17- Rp760.945.163.861,91). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.197 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	31.277.599.612,26
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	101.289.566.343,42
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	37.677.681.006,91
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2024	296.050.000,00
Pendapatan Hibah Berupa Barang Persediaan Habis pakai dari Pemerintah Provinsi NTB /Pemerintah Pusat	15.118.576.300,00
Persediaan Tahun 2024	32.775.727.622,01
Koreksi Persediaan Tahun 2024 pada Dinas Kelautan dan perikanan	72.643.000
Reklas Belanja Aset Tetap Ke Beban barang dan Jasa	15.348.888.414,50
Pengurangan Beban LO:	70.011.966.731,16
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024	34.710.065.782,16
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	416.906.500,00
Persediaan Barang Tahun 2025	32.711.944.384,00
Reklas Belanja Barang dan Jasa ke Ke Aset Tetap	160.237.400,00
Kekurangan volume hasil pekerjaan wallpaper dinding belanja barang habis pakai	9.806.000,00
Reklas Belanja barang dan jasa ke aset tak berwujud	108.850.000,00
Aset Lainnya TGR Beban Barang dan Jasa	1.894.156.665,009
Jumlah Penjelasan Selisih	31.277.599.612,26





5.4.2.1.3 Beban Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.198 Rincian Beban Bunga LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	9.449.712.191,00	11.302.707.488,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	362.108.951,95	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
Jumlah	9.811.821.142,95	11.302.707.488,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bunga Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
 - a. Bunga dan Pokok Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebesar sebesar Rp9.449.712.191,00 merupakan pembayaran bunga pinjaman kepada PT SMI berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Kewajiban Pinjaman Reguler dan Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Daerah Tahun 2021(PEN APBD Tahun 2021) Kabupaten Lombok Tengah Nomor BA-17/SMI/DPPPP/DPPU1/2024 yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemotongan langsung melalui Pendapatan DAU Umum oleh Pemerintah Pusat. Dan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) BUMN Jangka Pendek sebesar Rp362.108.951,95 merupakan pembayaran bunga pinjaman Rumah Sakit Umum Daerah kepada PT BSI (Bank Syariah Indonesia) senilai Rp23.443.793.589,00. Jangka waktu pinjaman adalah tiga bulan per kali pencairan, dengan suku bunga 8,1% dibayar dimuka pada saat realisasi pencairan pinjaman tersebut. Pinjaman tersebut diikat dengan Perjanjian Nomor 04/017.3/SF.BPJS/ACB Denpasar tentang perjanjian *line facility* pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tertanggal 30 Desember 2024.
 - b. Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2025 **lebih kecil** dari saldo Belanja Bunga dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp5.748.610,05 (Rp9.811.821.142,95- Rp9.817.569.753,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.199 Rincian Penambahan/Pengurangan Beban Bunga LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	-5.748.610,05
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	101.851.932,53
Beban Bunga di bayar dimuka Tahun 2024	101.851.932,53





Uraian	Nilai
Pengurangan Beban LO:	107.600.542,58
Koreksi lebih saji beban bunga pada RSUD	5.213.901,00
Beban Bunga di bayar dimuka Tahun 2025	102.386.641,58
Jumlah Penjelasan Selisih	-5.748.610,05

5.4.2.1.4 Beban Subsidi

Beban Subsidi untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.2.1.5 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.200 Rincian Beban Hibah – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	28.476.375.550,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.666.496.017,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.339.951.000,00	28.679.699.185,47
Belanja Hibah Dana BOS	0,00	49.686.020.600,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.002.532.502,00	904.086.372,00
Belanja Hibah Dana BOSP	47.011.395.843,00	0,00
Jumlah	67.020.375.362,00	107.746.181.707,47

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
 - Terdapat penurunan Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 terdapat pemberian hibah kepada Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum untuk dukungan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;
 - Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian hibah kepada Satuan pendidikan dasar, dan/atau menengah selama Tahun 2025 yang didasarkan pada Permedikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis juknis BOS BOSP 2024-2025 menggantikan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan dana alokasi khusus non fisik.
- Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2025 **lebih besar** dari saldo Belanja Hibah dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp4.486.447.017,00 (Rp67.020.375.362,00 -



Rp62.533.928.345,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.201 Penjelasan Selisih Beban Hibah

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	4.486.447.017,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO :	4.626.447.017,00
Hibah Aset Tanah SMKN Janapria sebesar Rp1.641.600.00,00 dan SMKN 1 Pujut sebesar Rp1.600.157.450,00	3.241.757.450,00
Hibah Aset Tanah SMAN 2 Praya sebesar Rp424.738.567,00 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	424.738.567,00
Hibah Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Sekretariat Daerah	11.500.000,00
Hibah kepada yayasan Masjid Agung Praya berupa biaya Konsultan DED Renovasi Masjid Agung	948.451.000,00
Pengurangan Beban LO :	140.000.000,00
Aset Lainnya TGR beban hibah	140.000.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	4.486.447.017,00

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.202 Rincian Beban Bantuan Sosial – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	626.400.000,00	540.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00
Jumlah	626.400.000,00	540.000.000,00

Penjelasan:

1. Terjadi kenaikan realisasi Beban Bantuan Sosial dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah penerima bantuan sosial dari 300 orang pada Tahun 2024 menjadi 354 orang pada Tahun 2025, dengan nominal bantuan tetap sebesar Rp300.000,00 per bulan. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 tersebut merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada buruh pabrik rokok. Pemberian Bantuan Sosial diatas, sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2025 tentang petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana Bagi hasil Cukai Tembakau 2025.
2. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA Tahun 2025 Rp0,00 (Rp626.400.000,00 - Rp626.400.000,00).



5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.203 Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.787.411.335,41	12.453.711.859,33
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	11.044.820,00	558.986.359,67
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	5.798.456.155,41,00	13.012.698.219,00

Penjelasan:

1. Perubahan penurunan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
 - a. Terdapat pembayaran piutang pajak reklame yang telah dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan di bayar pada tahun berkenaan;
 - b. Terdapat pembayaran piutang pajak air tanah yang telah dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan di bayar pada tahun berkenaan;
 - c. Adanya koreksi nilai penyisihan Piutang Pajak PBB-P2 yang di sebabkan karena adanya penambahan atau koreksi nilai piutang tahun sebelumnya sehingga berpengaruh terhadap nilai penyisihan piutang pajak PBB-P2;
 - d. Terdapat pembayaran piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun sebelumnya di Tahun 2025 sehingga mempengaruhi penurunan beban penyisihan piutang piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
2. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2025 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.046.370.762,49 [(Rp73.006.461.914,92 - Rp54.161.634.997,02) - Rp5.798.456.155,41]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut.



Tabel 5.204 Penjelasan Selisih Penyisihan Piutang – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	13.585.869.673,49
Penjelasan Selisih:	
Penambahan penyisihan Piutang :	13.257.078.168,49
Koreksi atas kurang saji penyisihan piutang PBBP2 dari tahun 2012 s.d 2024	13.257.078.168,49
Pengurangan Penyisihan Piutang:	210.707.406,00
Koreksi penghapusan piutang atas piutang rumah dinas pasar lama yang asetnya telah dihiabihkan ke Yayasan Masjid Jamiq Praya	17.050.000,00
Surplus penyisihan piutang pajak pada badan pendapatan daerah	112.471,00
Surplus penyisihan piutang retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas kesehatan	189.657.860,00
Surplus penyisihan piutang retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup	3.887.074,99
Jumlah Penjelasan Selisih	13.585.869.673,49

5.4.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.205 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	124.930.227.649,31	84.027.742.636,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	43.960.062.214,56	37.481.162.703,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	125.183.393.493,44	97.829.566.780,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	447.241.756,00	447.241.756,00
Jumlah	294.520.925.113,31	219.785.713.875,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
 - Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal pada semua SKPD senilai Rp95.235.979.101,00;
 - Penambahan Aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal pada semua SKPD senilai Rp 145.657.436.123,60;
 - Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Belanja Modal senilai Rp89.360.624.558,00; dan
 - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperoleh hibah aset tanah, peralatan mesin dan aset gedung dan bangunan.
- Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2025 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2024 ke



Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada **Poin 5.3.1.3.7**.

Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing SKPD telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada **Poin 5.4.2.8**, dan juga dapat dilihat pada **Lampiran 13c, Lampiran 13e, Lampiran 13f**.

5.4.2.2 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.206 Rincian Beban Transfer LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	35.055.636.077,21	20.840.644.093,69
Beban Transfer Bantuan Keuangan	155.756.369.333,00	140.437.960.460,00
Jumlah	190.812.005.410,21	161.278.604.553,69

5.4.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.207 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	32.750.064.032,27	18.232.815.715,79
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.305.572.044,94	2.607.828.377,90
Jumlah	35.055.636.077,21	20.840.644.093,69

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 yang berpengaruh terhadap proporsi jumlah dana transfer bagi hasil ke desa dan pembayaran hutang dana bagi hasil ke desa Tahun 2024 yang di bayarkan Tahun 2025; dan
2. Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2025 ini lebih besar dari saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp2.580.440.281,00 (Rp35.055.636.077,00 - Rp32.475.195.796,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut.



Tabel 5.208 Penjelasan Selisih Beban Transfer bagi Hasil Pendapatan – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	2.580.440.281,21
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	8.421.270.319,02
Utang Transfer Bagi Hasil Ke Desa Atas Kurang Salur Ke Desa	8.421.270.319,02
Pengurangan Beban LO:	5.840.830.037,81
Pembayaran Utang Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Desa	5.840.830.037,81
Jumlah Penjelasan Selisih	2.580.440.281,21

5.4.2.2.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.209 Rincian Transfer Bantuan Keuangan – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	145.472.907.333,00	131.363.260.460,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	10.283.462.000,00	9.074.700.000,00
Jumlah	155.756.369.333,00	140.437.960.460,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut.
 - Terdapat peningkatan Pendapatan Realisasi Dana Bagi Hasil dibandingkan dengan Tahun 2024 sehingga formasi perhitungan anggaran sekurang-kurangnya 10% dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil juga mengalami peningkatan; dan
 - Tahun 2025 tidak terdapat bantuan kendaraan operasional Kepala Dusun pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus jika di bandingkan dengan realisasi belanja tahun sebelumnya.
- Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dengan saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp162.209.204.800,00 (Rp155.756.369.33,00 - Rp317.965.574.133,00).
Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan Dana Desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.



5.4.3 Surplus Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.210 Surplus Non – Operasional LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	203.757.406,00	976.835.821,48
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO (Surplus Penyisihan Dana Bergulir)	0,00	0,00
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
Jumlah	203.757.406,00	976.835.821,48

Penjelasan:

Perubahan nilai Surplus Non-Operasional Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan karena terdapat nilai piutang tahun sebelumnya yang sudah disisihkan dan terbayar pada Tahun 2025.

5.4.4 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2025 dan Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.211 Defisit Non–Operasional

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	2.318.961.441,97	365.201.283,00
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
Jumlah	2.318.961.441,97	365.201.283,00

Penjelasan:

Selisih nilai perolehan dengan nilai sisa buku Aset Gedung dan Bangunan atas bongkaran gedung pendopo wakil bupati kondisi aset rusak berat pada sekretariat daerah senilai Rp440.784.129,55 dan Selisih nilai perolehan dengan nilai sisa buku Aset Gedung dan Bangunan eks Dinas Kesehatan, Bangunan PKM Muncan dan PKM Pengadang yang dihapus sesuai SK Penghapusan Nomor 263 Tahun 2025 dan SK penghapusan Nomor 229.a Tahun 2025 senilai Rp1.878.177.312,42.

5.4.5 Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan Tahun 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.



Tabel 5.212 Pos Luar Biasa – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Luar Biasa		
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		
Beban Tidak Terduga	8.959.925.740,00	2.069.890.667,00
Beban Luar Biasa Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	8.959.925.740,00	2.069.890.667,00

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pos Luar Biasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan karena pada Tahun 2025 terdapat:
 - Penyesuaian atas potongan salur DAKNF Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang di salrkan atas sisa DAKNF 2024 sebesar Rp4.742.440.142,00;
 - Penyesuaian atas potongan salur DAKNF Dana Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp1.356.583.350,00;
 - Penyesuaian atas potongan salur DAKNF–Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian atas sisa 2024 sebesar Rp73.649.336,00; dan
 - Penyesuaian potongan salur DAKNF–Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang di salurkan atas sisa 2024.
- Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2025 ini sama dengan saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp0,00 (Rp8.959.925.740,00 - Rp8.959.925.740,00).

5.4.6 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.213 Rincian Surplus/(Defisit) – LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Daerah – LO	2.861.097.452.957,72	2.473.405.880.687,43
Pendapatan Asli Daerah – LO	535.832.457.139,72	322.125.333.930,16
Pendapatan Transfer – LO	2.156.877.100.461,00	2.073.944.463.028,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	168.387.895.357,00	77.336.083.729,27
Beban Daerah	2.634.726.814.068,82	2.374.975.289.936,60
Beban Operasi	2.443.914.808.658,61	2.213.696.685.382,91
Beban transfer	190.812.005.410,21	161.278.604.553,69
Surplus Non-Operasional	203.757.406,00	976.835.821,48
Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	203.757.406,00	976.835.821,48
Defisit Non-Operasional	2.318.961.441,97	365.201.283,00
Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	2.318.961.441,97	365.201.283,00
Beban Luar Biasa	8.959.925.740,00	2.069.890.667,00
Jumlah	215.295.509.112,93	96.972.334.622,31

Jumlah saldo Surplus/(Defisit)-LO diatas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit)-LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada **Poin 5.6.2**.





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN ARUS KAS

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 dan Tahun 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama Tahun 2025 dan Tahun 2024, yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.214 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2.901.498.807.255,48	2.729.660.115.585,25
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	2.469.129.888.833,29	2.333.675.334.199,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	432.368.918.422,19	395.984.781.385,93

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

Tabel 5.215 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penerimaan Pajak Daerah	330.687.312.272,95	182.328.157.865,50
Pajak Hotel	0,00	261.843.932,00
Pajak Restoran	0,00	673.886.229,91
Pajak Hiburan	0,00	3.806.500,00
Pajak Reklame	2.027.571.880,00	1.947.094.265,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
Pajak Parkir	0,00	176.927.675,00
Pajak Air Tanah	413.652.807,00	487.944.413,00
Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	4.350.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.770.677.876,75	3.549.329.804,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	16.871.275.735,00	16.013.894.795,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
(PBBP2)		
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	61.896.234.001,00	35.702.051.083,00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	61.216.195.443,76	40.558.956.651,69
PBJT-Tenaga Listrik	31.951.028.651,00	31.282.324.551,00
PBJT-Jasa Perhotelan	64.230.328.659,04	45.255.519.994,40
PBJT-Jasa Parkir	1.612.445.039,00	1.449.087.453,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	5.986.440.404,40	4.961.140.518,50
Opsen PKB	36.450.538.450,00	0,00
Opsen BBNKB	43.260.423.326,00	0,00
Penerimaan Retribusi Daerah	40.497.442.500,00	31.058.523.271,00
Retribusi Jasa Umum	29.374.355.652,00	23.439.213.656,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	26.704.768.652,00	21.230.856.048,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	756.456.000,00	431.945.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	224.391.000,00	251.980.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.688.740.000,00	1.494.343.675,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	30.088.933,00
Retribusi Jasa Usaha	4.573.773.600,00	4.135.366.500,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.239.058.000,00	3.101.429.500,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	887.879.000,00	687.389.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	15.988.000,00	19.448.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	132.200.000,00	156.600.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	298.648.600,00	169.525.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	975.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	6.549.313.248,00	3.483.943.115,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.199.590.376,00	2.626.981.115,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.349.722.872,00	856.962.000,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.183.615.297,00	12.741.149.852,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13.183.615.297,00	12.741.149.852,00
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	161.463.433.314,53	104.932.016.842,75
Jasa Giro	3.491.654.244,90	1.791.092.003,99
Pendapatan Bunga	4.414.194.118,83	2.244.946.521,53
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.727.861.506,67	1.817.049.169,51
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.113.784.566,65	758.893.603,44
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	163.127.564,05	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	969.886.417,13	795.163.493,55
Pendapatan dari Pengembalian	3.363.170.504,26	906.228.284,37
Pendapatan BLUD	144.181.369.477,04	96.618.643.766,36
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	38.384.915,00	0,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	2.207.886.324.056,00	2.165.107.290.050,00
Dana Perimbangan	2.037.788.882.256,00	1.956.376.802.050,00
Dana Desa	162.209.204.800,00	185.021.712.000,00
Insentif Fiskal	7.888.237.000,00	23.708.776.000,00
Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah	121.320.287.322,00	124.177.070.916,00
Pendapatan Bagi Hasil	121.166.287.322,00	124.177.070.916,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.105.631.778,00	21.253.972.468,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.743.177.851,00	26.805.188.548,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	70.153.037.189,00	31.146.940.872,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	80.204.575,00	85.826.522,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	46.084.235.929,00	44.885.142.506,00
Bantuan Keuangan	154.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	154.000.000,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	26.460.392.493,00	109.315.906.788,00
Penerimaan Hibah	135.871.200,00	266.910.500,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	135.871.200,00	266.910.500,00
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.324.521.293,00	109.048.996.288,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	26.324.521.293,00	109.048.996.288,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	34.759.393.827,00
Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara	26.324.521.293,00	74.289.602.461,00
Jumlah	2.901.498.807.255,48	2.729.660.115.585,25

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

Tabel 5.216 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembayaran Belanja Pegawai	1.275.806.131.204,38	1.156.476.918.161,76
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	771.833.417.891,00	734.793.209.114,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	396.770.130.138,88	112.907.215.219,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	244.890.528.535,56
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.963.662.691,00	23.759.407.930,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	333.334.680,00	168.309.702,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	826.800.000,00	791.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	79.078.785.803,50	39.167.247.661,20
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	760.945.163.861,91	715.146.946.996,56
Belanja Barang	347.728.722.839,00	319.198.797.580,50
Belanja Jasa	228.869.964.785,00	197.200.408.855,64
Belanja Pemeliharaan	4.543.906.307,00	5.067.068.633,83
Belanja Perjalanan Dinas	19.071.847.487,00	29.717.328.031,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.237.766.500,00	25.260.797.478,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	76.162.621.892,00	78.134.638.811,72
Belanja Barang dan Jasa BLUD	80.330.334.051,91	60.567.907.605,87
Pembayaran Belanja Bunga	9.817.569.753,00	11.302.707.488,00
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	9.817.569.753,00	11.302.707.488,00
Pembayaran Belanja Hibah	62.533.928.345,00	95.072.375.022,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	28.476.375.550,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	14.520.000.000,00	16.005.892.500,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.002.532.502,00	904.086.372,00
Belanja Hibah Dana BOSP	47.011.395.843,00	49.686.020.600,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	626.400.000,00	540.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	626.400.000,00	540.000.000,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga	8.959.925.740,00	8.838.353.947,00
Belanja Tak Terduga	8.959.925.740,00	8.838.353.947,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil	32.475.195.796,00	20.838.360.124,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	30.644.055.037,00	18.146.089.922,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.831.140.759,00	2.692.270.202,00
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan	317.965.574.133,00	325.459.672.460,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	317.965.574.133,00	325.459.672.460,00
Jumlah	2.469.129.888.833,29	2.333.675.334.199,32

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi pemerintah dan menghasilkan pendapatan yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama Tahun 2025 dan Tahun 2024, yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.217 Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	345.144.760.255,60	283.920.793.925,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(345.144.760.255,60)	(283.920.793.925,66)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Pada TA 2025 tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

Tabel 5.218 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Perolehan Tanah	1.261.109.152,00	0,00
Belanja Modal Tanah	1.261.109.152,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	95.235.979.101,00	91.727.573.671,12
Belanja Modal Alat Besar	1.191.421.648,00	5.927.141.139,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Belanja Modal Alat Angkutan	14.595.459.782,00	9.264.109.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	286.290.000,00	22.780.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	145.822.450,00	25.815.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.959.077.905,00	6.380.373.626,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	692.119.400,00	871.162.505,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	22.929.053.040,00	21.304.161.241,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	14.130.409.319,00	20.449.453.613,00
Belanja Modal Komputer	8.597.628.291,00	9.616.296.715,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	15.231.000,00	95.741.640,00
Belanja Modal Produksi Lainnya	266.532.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	41.600.000,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	1.137.000.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	138.108.087,00	101.597.218,12
Belanja Modal Peralatan Olahraga	220.512.196,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	13.687.675.999,00	14.349.693.120,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.380.637.984,00	2.140.648.854,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	145.657.436.123,60	142.704.330.558,54
Belanja Modal Bangunan Gedung	144.698.624.853,60	141.955.915.438,59
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	525.938.270,00	447.972.931,95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	432.873.000,00	300.442.188,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.360.624.558,00	38.965.281.078,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	65.556.996.341,00	20.547.605.759,00
Belanja Modal Bangunan Air	9.669.984.410,00	12.609.332.740,00
Belanja Modal Instalasi	7.678.694.553,00	5.596.453.900,00
Belanja Modal Jaringan	705.996.398,00	211.888.679,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	5.748.952.856,00	0,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	13.629.611.321,00	10.513.658.618,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.232.072.500,00	74.944.600,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	980.963.950,00	374.466.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	11.192.224.502,00	10.064.248.018,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	224.350.369,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	9.950.000,000
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software	0,00	9.950.000,00
Jumlah	345.144.760.255,60	283.920.793.925,66

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama Tahun 2025 dan Tahun 2024, yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.219 Aktivitas Pendanaan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	26.536.911.190,00	4.979.917.300,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	54.624.490.929,00	20.787.131.560,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(28.087.579.739,00)	(15.807.214.260,00)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

Tabel 5.220 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➤ Penerimaan Pinjaman Daerah	26.526.811.190,00	4.950.317.300,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	26.526.811.190,00	4.950.317.300,00
➤ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.100.000,00	29.600.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	10.100.000,00	29.600.000,00
Jumlah	26.536.911.190,00	4.979.917.300,00

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

Tabel 5.221 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23.443.793.589,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	23.443.793.589,00	0,00
➤ Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	31.180.697.340,00	20.787.131.560,00
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah	31.180.697.340,00	20.787.131.560,00
Jumlah	54.624.490.929,00	20.787.131.560,00

5.5.4 Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk TA 2025. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama Tahun 2025 dan Tahun 2024, yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.222 Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	279.078.109.723,76	292.455.063.321,54
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	279.820.961.189,53	292.246.310.306,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(742.851.465,77)	208.753.015,26

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

Tabel 5.223 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	118.445.070.551,00	136.771.898.553,00
Iuran Wajib Pegawai	33.939.498.881,00	42.245.545.603,00
Pajak Penghasilan	84.505.571.670,00	94.526.352.950,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	156.735.544.296,00	155.305.693.569,20
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	156.735.544.296,00	155.305.693.569,20
Kiriman Uang Masuk	3.897.494.876,76	377.471.199,34
Kiriman Uang Masuk	3.897.494.876,76	377.471.199,34
Jumlah	279.078.109.723,76	292.455.063.321,54

Untuk Tahun 2025, Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD pada RSUD maupun pada Puskesmas dan sekolah-sekolah pengelola dana BOS.

Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran terdiri dari total SPJ UP/GU/TU selama TA 2025, total STS pengembalian UP/GU/TU tahun berjalan, dan pengembalian UP/GU/TU Tahun 2024.

Kiriman Uang Masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp3.897.494.876,76 terdiri dari pelimpahan antar Kas Daerah dari Bank Mandiri ke Bank NTB Syariah sebesar Rp3.893.553.738,76, terdapat pengembalian sisa kas beberapa sekolah yang ditutup dan merger senilai Rp941.138,00 (rekas dari Kas Dana BOSP-BOS ke Kas Daerah) dan sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 yang masih berada di Rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.000.000,00.

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

Tabel 5.224 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	119.187.922.016,77	136.771.898.553,00
Iuran Wajib Pegawai	33.939.498.881,00	42.245.545.603,00
Pajak Penghasilan	84.505.571.670,00	94.526.352.950,00
PFK Non-BUD (Kas Lainnya)	742.851.465,77	0,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pemberian Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran	156.738.544.296,00	155.293.023.158,00
Pemberian Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran	156.738.544.296,00	155.293.023.158,00
Kiriman Uang Keluar	3.894.494.876,76	181.388.595,28
Kiriman Uang Keluar	3.894.494.876,76	181.388.595,28
Jumlah	279.820.961.189,53	292.246.310.306,28

Untuk Tahun 2025, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD pada RSUD maupun Puskesmas dan sekolah-sekolah pengelola Dana BOSP.

Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran merupakan jumlah SP2D UP/GU Tahun 2025 sebesar Rp156.738.544.296,00, sedangkan Kirim Uang Keluar pada aktivitas transitoris sebesar Rp3.894.494.876,76 terdiri dari dari pelimpahan antar Kas Daerah dari Bank Mandiri ke Bank NTB Syariah sebesar Rp3.893.553.738,76, dan pengembalian sisa kas sekolah yang ditutup dan merger sebesar Rp941.138,00 (rekas dari Kas Dana BOSP-BOS ke Kas Daerah)

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan diatas dengan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.225 Kenaikan/(Penurunan) Kas

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	432.368.918.422,19	395.984.781.385,93
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(345.144.760.256,00)	(283.920.793.926)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(28.087.579.739,00)	(15.807.214.260)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(742.851.466,00)	208.753.015,26
Jumlah	58.393.726.961,82	96.465.526.215,53

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.226 Saldo Awal Kas

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	118.820.191.873,99	22.555.286.973,55
Kas di Bendahara Penerimaan	20.473.794,00	0,00
Kas di BLUD	9.005.264.738,26	4.652.784.282,97
Kas Dana BOS	644.439.673,71	647.168.714,71
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.861.379.536,80	3.760.180.961,00
Kas Dana BOK Puskesmas	4.989.670.827,00	7.260.473.296,00
Kas Lainnya	742.851.465,77	0,00
Jumlah	136.084.271.909,53	38.875.894.228,23

5.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.227 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
koreksi saldo awal pada Kas Daerah	952.022,91	0,00
Jumlah	952.022,91	0,00

Terdapat koreksi saldo awal pada Kas Daerah senilai Rp952.022,91 yang merupakan Kurang Catat Saldo Awal Kas BOSP Tahun 2025.

5.5.8 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD) Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.228 Saldo Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD)

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya	1.050.747.719,00	742.851.465,77
Jumlah	1.050.747.719,00	742.851.465,77

Kas Lainnya merupakan Utang PFK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp212.700.331,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp25.049.024,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp812.998.364,00.

5.5.9 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5.229 Saldo Akhir Kas

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	180.928.348.923,69	118.820.191.873,99
Kas di Bendahara Penerimaan	31.772.500,00	20.473.794,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.000.000,00	0,00
Kas di BLUD	9.268.276.507,69	9.005.264.738,26
Kas Dana BOSP	944.187.940,88	644.439.673,71
Kas Dana Kapitasi di FKTP	0,00	1.861.379.536,80
Kas Dana BOK Puskesmas	3.303.365.022,00	4.989.670.827,00
Kas Lainnya	1.050.747.719,00	742.851.465,77
Jumlah	195.529.698.613,26	136.084.271.909,53

Di dalam Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada **Poin 5.1.4** di atas.



Saldo akhir kas sebesar Rp195.529.698.613,26 telah memperhitungkan saldo Kas Lainnya sebesar Rp1.050.747.719,00 sehingga Saldo Akhir Kas pada LAK sama dengan Kas dan Setara Kas pada Neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.230 Ekuitas Awal-LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	3.928.911.099.331,98	3.816.068.873.789,83

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2024 dan Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2 Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.231 Surplus/(Defisit)-LO

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/(Defisit)-LO	215.295.509.112,93	96.972.334.622,31

Pada Tahun 2025 dan Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada **point 5.4.6**.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5.232 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar	1.856.733.908,36	2.000.000,00
Koreksi Ekuitas atas Investasi Jangka Panjang	(12.863.845.621,13)	142.742.206,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	(36.555.809.021,38)	10.281.812.861,77
Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	10.627.891,00	(51.437.139,93)
Koreksi Ekuitas atas Kewajiban Jangka Pendek	38.780.000,00	5.494.772.992,00
Jumlah Dampak Kumulatif	(47.513.512.843,15)	15.869.890.919,84

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban di antaranya yaitu:

5.6.3.1 Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar

Koreksi Ekuitas Aset Lancar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Jumlah Rp2.000.000,00 sebagai kurang saji dengan rincian dan Penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.233 Rincian Koreksi Ekuitas Piutang

(dalam Rupiah)

Uraian	Koreksi 2025	Koreksi 2024
Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan	72.643.000,00	0,00
Koreksi Ekuitas Kas di Bendahara BOSP	952.022,91	0,00
Koreksi Ekuitas Piutang Lain Lain PAD yang Sah	0,00	2.000.000,00
Koreksi Piutang PBBP2	1.783.138.885,44	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi	0,01	0,00
	1.856.733.908,36	2.000.000,00

Koreksi-koreksi tersebut pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi kurang saji nilai persediaan Tahun 2024 sebesar Rp72.643.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang disebabkan adanya kekeliruan penginputan nilai persediaan bahan bibit ternak/bibit ikan pada empat BBI tetapi hanya satu BBI yang dilaporkan terdapat sisa persediaannya.
2. Koreksi kurang saji nilai kas di Bendahara BOSP senilai Rp952.022,91 yang merupakan kurang saji Saldo Awal Kas BOSP Per 1 Januari Tahun 2025 untuk jenjang sekolah SDN senilai (Rp 25.999,08) dan jenjang SMPN senilai (Rp 496,12) dan TK Negeri senilai Rp 978.518,11.
3. Koreksi nilai piutang PBB-P2 atas kurang saji Piutang PBB-P2 dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.783.138.885,44 dengan nilai yang tercatat pada aplikasi E-PAD/Smartgrov.

5.6.3.2 Koreksi Ekuitas atas Investasi Jangka Panjang

Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai (Rp12.863.845.621,13) dan Rp142.742.206,00 sebagai lebih saji. Koreksi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.234 Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Koreksi 2025	Koreksi 2024
1	Pengalihan Laba Tahun sebelumnya	0,00	0,00
2	Akumulasi Kerugian PDAM 2020	0,00	0,00
3	Koreksi laba ditahan-PDAM	(12.863.845.615,13)	142.742.206,00
4	Laba	0,00	0,00
5	Penyertaan Modal dari Hibah pempus-PDAM	0,00	0,00

No	Uraian	Koreksi 2025	Koreksi 2024
6	Penyesuaian nilai Ekuitas PDAM	(6,00)	0,00
Jumlah		(12.863.845.621,13)	142.742.206,00

Koreksi Ekuitas Nilai Investasi sebesar Rp6,00 merupakan koreksi nilai Ekuitas atas lebih saji nilai Investasi pada PDAM dengan Laporan Perubahan Ekuitas PDAM. Koreksi ini dilakukan untuk menyesuaikan nilai investasi pada PDAM dengan menggunakan metode ekuitas, dimana penambahan maupun pengurangan nilai Investasi dipengaruhi oleh perubahan nilai ekuitas akhir perusahaan. Adapun koreksi nilai Investasi pada PDAM sebesar Rp12.863.845.615,13 merupakan penyesuaian ekuitas PDAM Tahun Buku 2025, yang disebabkan oleh adanya kurang saji utang iuran pensiun pegawai PDAM Tirta Ardhia Rinjani kepada PENMA selaku penyelenggara dana pensiun, yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2025.

5.6.3.3 Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap

Koreksi Ekuitas Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai (Rp36.555.809,021,38) dan Rp10.281.812.861,77. Hasil perhitungan terhadap Koreksi Ekuitas Aset Tetap sebagai berikut.

Tabel 5.235 Koreksi Ekuitas Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Koreksi 2025	Koreksi 2024
A	Koreksi Nilai Aset Tetap	28.916.535.098,92	10.281.812.861,77
1	Tanah	704.315.100,13	5.168.222.331,00
2	Peralatan dan Mesin	(1,00)	297.480,00
3	Gedung dan Bangunan	(38.780.000,21)	5.113.293.050,78
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	28.251.000.000,00	(0,01)
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
B	Koreksi Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap	(65.472.344.120,30)	0,00
1	Koreksi akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin	(14.209.347.591,07)	0,00
2	Koreksi akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(20.056.022.534,48)	0,00
3	Koreksi akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(31.206.973.994,75)	0,00
Jumlah		(36.555.809.021,38)	10.281.812.861,77

Penjelasan dari masing-masing Koreksi Nilai Aset Tetap sebagai berikut.

1. Koreksi Ekuitas Aset Tetap Tanah

Koreksi Ekuitas Tanah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 Rp704.315.100,13,00. Koreksi ini merupakan koreksi kurang saji atas penambahan nilai Aset Tetap Tanah yang sebelumnya bernilai nol berdasarkan hasil *appraisal* dari Tim Penilaian Aset yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 189 Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025. Rincian koreksi kurang saji aset tetap tanah per SKPD sebagai berikut.



Tabel 5.236 Koreksi Ekuitas Aset Tetap Tanah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Dinas PUPR	704.315.100,13
Jumlah		704.315.100,13

2. Koreksi Ekuitas Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Koreksi Ekuitas Tetap Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 senilai (Rp1,00). Koreksi ini merupakan koreksi lebih saji atas penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan oleh numerasi nilai pada aplikasi e-BMD. Rincian koreksi kurang saji aset tetap Peralatan dan Mesin per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.237 Koreksi Ekuitas Aset Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Dinas Kesehatan	(0,99)
2	Dinas Lingkungan Hidup	(0,01)
Jumlah		(1,00)

3. Koreksi Ekuitas Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Koreksi Ekuitas Tetap Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 senilai (Rp38.780.000,21). Koreksi ini merupakan koreksi lebih saji aset tetap gedung dan bangunan pada dinas pendidikan dan kebudayaan senilai Rp35.300.000,00 berupa aset gedung dan bangunan sekolah swasta yang diakui sebagai aset tetap gedung dan bangunan sekolah negeri. Koreksi lebih saji senilai Rp3.480.000,00 pada dinas kesehatan atas pembayaran utang belanja modal tahun 2023 di tahun 2024. Atas transaksi tersebut diakui sebagai penambah aset tetap gedung dan bangunan seharusnya sebagai transaksi pengurangan nilai aset tetap gedung dan bangunan karena nilai aset tetap gedung dan bangunannya sudah diakui di tahun 2023. Koreksi lebih saji atas numerasi nilai di e-BMD pada dinas PUPR senilai Rp0,17 dan di dinas perhubungan senilai Rp0,04 Rincian koreksi kurang saji dan lebih saji aset tetap Gedung dan Bangunan per SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.238 Koreksi Ekuitas Aset Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.300.000,00
2	Dinas Kesehatan	3.480.000,00
3	Dinas PUPR	0,17
4	Dinas Perhubungan	0,04
Jumlah		38.780.000,21

4. Koreksi Ekuitas Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Koreksi Ekuitas Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp28.251.000,00. Koreksi ini merupakan koreksi kurang saji pada dinas PUPR atas penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang sebelumnya bernilai nol berdasarkan hasil *appraisal* dari Tim Penilaian Aset yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 189 Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025.

5. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap senilai (Rp65.472.344.120,30) yang disebabkan karena perbedaan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada saat menggunakan aplikasi SIMDA – BMD dengan nilai akumulasi penyusutan setelah menggunakan aplikasi e-BMD.

5.6.3.4 Koreksi Ekuitas atas Perubahan Aset Lainnya

Koreksi Ekuitas Atas Perubahan Aset Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp10.627.891,00. Koreksi ini merupakan koreksi lebih saji nilai TGR yang telah ditindaklanjuti namun belum dicatat sebagai pengurang nilai TGR di tahun sebelumnya.

5.6.3.5 Koreksi Ekuitas atas Kewajiban Jangka Pendek

Koreksi Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp38.780.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.239 Rincian Koreksi Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.300.000,00	Koreksi lebih saji utang belanja modal gedung dan bangunan berupa barang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga
2	Dinas Kesehatan	3.480.000,00	Lebih saji utang belanja modal gedung dan bangunan yang sudah lunas di bayar di tahun 2024
Jumlah		38.780.000,00	

5.6.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel 5.240 Rincian Ekuitas Akhir

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Ekuitas Akhir	4.096.693.095.601,76	3.928.911.099.331,98

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada **point 5.3.3**.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

VI PENUTUP

BAB VI PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan.

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP., M.AP



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
REKAPITULASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Satuan Kerja	ANGGARAN								Pembiayaan penerimaan		Jumlah Pendapatan dan Transfer		REALISASI				Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		Pembiayaan Penerimaan	Jumlah Realisasi Pendapatan & Transfer
		Pendapatan Asli Daerah				Pendapatan Transfer		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah						Pendapatan Transfer							
		Pajak	Retribusi	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD yang sah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan BOS										-									-	
2	Dinas Kesehatan dan RSUD - BLUD dan Kapitasi		11.565.688.091,89		185.979.703.491,00					18.498.690.190,00	216.044.081.773,49		26.704.768.652,00		144.181.369.477,04				26.526.811.190,00	197.412.949.319,04	
4	Dinas PUPR		348.981.000,00								348.981.000,00		245.201.500,00							245.201.500,00	
5	Dinas Penunahan dan Kawasan Pemukiman		90.000.000,00								90.000.000,00		69.430.000,00							69.430.000,00	
6	Badan kesatuan Bangsa dan Politik										-									-	
7	Satuan Polisi Pamong Praja										-									-	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah										-									-	
9	Dinas Sosial										-									-	
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		897.884.000,00								897.884.000,00		1.349.722.872,00							1.349.722.872,00	
11	DPPPPAPKB										-									-	
12	Dinas Ketahanan Pangan										-									-	
13	Dinas Lingkungan Hidup		399.074.000,00								399.074.000,00		758.590.500,00							758.590.500,00	
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil										-									-	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa										-									-	
16	Dinas Perhubungan		671.100.000,00								671.100.000,00		224.391.000,00							224.391.000,00	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika										-									-	
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah							27.000.000,00			27.000.000,00						28.000.000,00			28.000.000,00	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu		3.717.486.222,00								3.717.486.222,00		5.199.590.376,00							5.199.590.376,00	
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga										-									-	
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan										-									-	
22	Dinas Kelautan dan Perikanan		388.540.400,00								388.540.400,00		196.548.600,00							196.548.600,00	
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		237.600.000,00								237.600.000,00		132.200.000,00							132.200.000,00	
24	Dinas Pertanian		245.640.000,00					275.000.000,00			520.640.000,00		138.903.000,00				107.871.200,00			246.774.200,00	
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		5.471.292.603,00								5.471.292.603,00		2.724.589.000,00							2.724.589.000,00	
26	PPKD										-									-	
27	Dinas Pemadam Kebakaran										-									-	
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										-									-	
29	Sekretariat Daerah										-									-	
30	Sekretariat DPR										-									-	
31	Kantor Camat Praya										-									-	
32	Kantor Camat Praya Tengah										-									-	
33	Kantor Camat Praya Barat										-									-	
34	Kantor Camat Praya Barat Daya										-									-	
35	Kantor Camat Praya Timur										-									-	
36	Kantor Camat Pujut										-									-	
37	Kantor Camat Janapria										-									-	
38	Kantor Camat Kopang										-									-	
39	Kantor Camat Batuikling										-									-	
40	Kantor Camat Batuikling Timur										-									-	



No.	Satuan Kerja	Pendapatan Asli Daerah				Pendapatan Transfer		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		Pembayaran penerimaan	Jumlah Pendapatan dan Transfer	Pendapatan Asli Daerah				Pendapatan Transfer		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		Pembayaran Penerimaan	Jumlah Realisasi Pendapatan & Transfer
		Pajak	Retribusi	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD yang sah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			Pajak	Retribusi	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD yang sah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21
41	Kantor Camat Pringgipata										-										-
42	Kantor Camat Jonggat										-										-
43	Inspektoral Daerah										-										-
44	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah										-										-
45	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	276.329.157.274,00									276.329.157.274,00	330.687.312.272,95			2.103.232.941,78						332.790.544.614,73
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		1.931.600.000,00	13.183.615.297,00	3.150.000.000,00	2.180.462.176.000,00	114.295.711.953,00		26.324.521.293,00		2.339.347.624.543,00		2.753.507.000,00	13.183.615.297,00	15.178.831.495,71	2.207.886.324.056,00	121.320.287.322,00		26.324.521.293,00	10.100.000,00	2.386.657.186.463,71
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia										-										-
	JUMLAH	276.329.157.274,00	25.964.886.316,89	13.183.615.297,00	189.129.703.491,60	2.180.462.176.000,00	114.295.711.953,00	302.000.000,00	26.324.521.293,00	18.488.690.190,00	2.844.490.461.815,49	330.687.312.272,95	40.497.442.500,00	13.183.615.297,00	161.463.433.314,53	2.207.886.324.056,00	121.320.287.322,00	135.871.200,00	26.324.521.293,00	26.536.911.190,00	2.928.035.718.445,48



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
REKAPITULASI BELANJA, TRANSFER, DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Satuan Kerja	ANGGARAN										REALISASI (Rp)									
		Belanja Operasional					Belanja Transfer					Belanja Operasional					Belanja Transfer				
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Transfer Bagi Hasil	Transfer Bantuan Keuangan	Pengeluaran Pembayaran	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Transfer Bagi Hasil	Transfer Bantuan Keuangan	Pengeluaran Pembayaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan BOS	687.645.015.374,88	138.711.586.375,29		54.245.000.000,00		105.207.082.824,00					995.808.684.574,17	696.292.249.782,88	141.443.763.949,00		54.221.399.843,00		100.391.139.461,00			992.348.539.035,88
2	Dinas Kesehatan - BLUD dan Kapitasi	136.624.072.855,99	195.581.299.115,44		200.000.000,00		66.973.869.215,46					461.379.241.186,89	188.216.344.467,50	178.554.433.129,48		200.000.000,00		62.156.499.782,00			430.127.271.368,98
3	Rumah Sakit Umum Daerah BLUD	66.570.499.907,00	66.840.842.795,00	367.857.562,00			31.913.924.193,83				23.449.007.498,00	21.140.032.947,85	78.325.082.080,00	67.277.944.799,43	367.857.562,00			29.461.155.292,46		23.442.793.588,00	188.696.343.302,89
4	Dinas PUPR	15.777.885.378	76.852.205.595,25				109.412.991.547,00					202.043.182.520,15	15.449.306.731,00	75.051.301.965,00				106.265.235.688,00			196.766.844.384,00
5	Dinas Pemukiman dan Kawasan Perkotaan	9.707.001.124,96	49.890.499.097,00				5.123.798.332,00					59.881.298.503,96	5.896.061.041,00	48.797.444.008,00				5.084.138.952,00			59.579.642.001,00
6	Badan kesehatan Bangsa dan Politik	2.487.122.252,00	3.865.294.384,00		1.092.532.502,00		509.532.003,00					7.914.501.343,00	2.462.607.522,00	3.762.186.621,00	1.062.532.502,00			506.491.500,00			7.773.827.148,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	10.570.118.306,00	3.940.902.095,00									14.718.668.684,00	10.395.177.775,00	3.192.699.776,00				206.728.000,00			13.794.605.551,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.030.508.351,59	1.612.267.110,00				1.058.878.893,00					5.701.654.354,59	2.871.022.356,00	1.428.568.174,00				931.448.400,00			5.231.038.930,00
9	Dinas Sosial	2.721.137.812,39	3.144.824.789,10		780.000.000,00	758.000.000,00	484.325.960,00					7.876.498.344,49	2.578.915.281,00	2.967.180.542,00		720.000.000,00	626.400.000,00	457.728.350,00			7.351.204.179,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.126.082.550,12	4.532.755.450,00				481.767.832,00					11.140.605.832,12	6.091.713.381,00	4.357.054.422,00				480.149.000,00			10.928.116.803,00
11	DPP/PAP/KB	3.153.223.865,54	11.626.085.161,98				888.761.705,00					15.648.070.732,50	3.080.912.046,00	11.219.138.174,00				803.316.998,00			15.103.367.216,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	2.303.957.978,00	3.410.499.400,50				537.189.682,00					6.251.627.060,50	2.278.691.377,00	3.253.517.904,00				530.349.900,00			6.082.558.781,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	6.111.175.095,00	6.485.133.570,00				694.301.344,00					13.190.610.009,00	5.969.636.770,00	5.763.615.793,00				590.478.500,00			12.301.731.063,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	3.976.234.185,84	1.969.582.428,00				609.064.429,00					6.954.881.022,84	3.822.074.563,00	1.724.384.902,00				565.965.097,00			6.112.424.552,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.181.134.205,25	5.695.141.058,65				280.879.432,00					9.157.154.695,90	3.161.839.244,25	5.526.542.376,00				280.377.610,00			8.968.755.230,25
16	Dinas Pembumihutan	4.989.293.049,75	16.352.789.230,00				1.132.827.887,00					22.474.914.168,75	4.732.761.398,00	15.174.010.127,00				1.143.099.071,00			21.049.860.304,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.286.641.916,92	4.007.574.819,96				997.475.052,00					8.291.691.788,88	3.250.427.312,00	3.832.648.974,00				965.390.000,00			8.046.456.286,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	3.126.554.676,20	10.602.107.319,70		200.000.000,00		87.740.045,00					14.016.402.040,90	3.112.102.623,00	10.534.242.605,00	200.000.000,00			87.623.650,00			13.933.968.878,00
19	Dinas Perencanaan, Model dan Kebijakan Terpadu	3.438.233.581,00	1.643.951.721,00				657.170.343,00					5.739.395.645,00	3.369.823.857,00	1.477.548.834,00				649.782.288,00			5.497.154.979,00
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.195.042.197,24	16.910.772.746,87		1.000.000.000,00		1.402.380.305,00					21.688.195.249,11	2.136.987.051,00	16.767.898.530,00		1.000.000.000,00		1.583.832.800,00			21.490.148.371,00
21	Dinas Perputuskaan dan Kearsangan	3.973.923.888,90	3.146.289.782,00				1.216.695.389,00					8.336.909.059,90	3.973.721.458,00	3.099.851.127,00				1.302.666.000,00			8.278.238.585,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.719.821.796,00	5.469.920.950,55				184.081.094,00					10.373.827.840,55	4.679.522.343,00	5.238.030.965,00				182.994.050,00			10.100.547.358,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.019.931.416,00	2.819.714.460,00				326.764.468,00					8.166.410.344,00	4.967.917.987,00	2.601.181.383,00				325.324.000,00			7.894.423.370,00
24	Dinas Perikanan	28.989.865.399,00	50.467.137.858,45				1.586.274.698,00					81.022.277.903,45	28.923.497.271,00	49.074.618.734,00				1.489.875.000,00			79.487.891.005,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.616.502.502,88	14.240.787.116,00				5.004.608.723,00					24.061.896.341,88	4.279.862.313,00	13.052.907.491,00				4.831.587.946,00			22.154.357.750,00
27	Dinas Pemadam Kebakaran	6.424.293.839,50	1.825.805.971,00				1.677.594.166,00					9.957.020.976,50	5.365.569.372,00	1.589.469.439,00				1.950.400.000,00			9.615.496.822,00
29	Selektanan Daerah	13.984.143.895,00	13.472.894.335,99		5.180.000.000,00		6.206.109.822,00					38.644.932.062,99	13.763.125.196,00	12.427.147.878,00		5.140.000.000,00		6.086.076.160,00			37.406.349.034,00
30	Selektanan DPR	32.193.024.387,00	27.990.247.886,00				3.159.338.724,00					63.343.511.077,00	31.710.558.821,00	26.992.652.141,00				3.011.882.500,00			61.715.093.462,00
31	Kantor Camat Praya	10.028.405.859,60	10.297.952.441,48				1.599.707.554,74					21.886.265.456,02	9.994.284.959,00	9.980.862.774,00				1.510.518.029,80			21.510.655.762,80
32	Kantor Camat Praya Tengah	4.467.933.836,00	3.910.351.763,00				629.162.993,00					8.997.448.532,00	4.413.889.630,00	3.661.572.957,00				622.161.850,00			8.697.004.437,00
33	Kantor Camat Praya Barat	1.953.711.424,00	831.238.817,00				88.232.077,00					2.873.182.313,00	1.918.579.565,00	793.308.642,00				88.088.000,00			2.798.976.197,00
34	Kantor Camat Praya Barat Daya	1.838.467.072,64	734.574.634,00				391.688.057,00					2.962.739.763,88	1.813.098.885,00	680.387.301,00				387.810.132,00			2.891.296.828,00
35	Kantor Camat Praya Timur	1.830.974.469,00	868.688.907,00				298.896.758,00					2.796.559.134,00	1.576.790.577,25	800.093.030,00				285.214.212,34			2.682.060.719,59
36	Kantor Camat Pajaj	2.437.044.921,00	919.616.209,00				175.835.424,00					3.532.496.154,00	2.438.806.655,00	860.143.142,00				174.910.173,00			3.443.858.970,00
37	Kantor Camat Sangap	1.923.586.180,00	720.494.300,00				209.449.781,00					2.853.532.261,00	1.988.980.149,00	689.699.803,00				206.096.000,00			2.765.045.952,00
38	Kantor Camat Kapatang	2.252.758.571,00	862.504.753,00				1.858.169,00					3.157.121.484,00	2.234.262.975,00	768.029.320,00				50.959.500,00			3.053.251.795,00
39	Kantor Camat Batakalang	1.399.715.265,00	791.185.018,00				90.413.146,00					2.281.313.429,00	1.379.267.095,00	769.026.156,00				89.095.000,00			2.238.286.251,00
40	Kantor Camat Batakalang Utara	1.333.616.999,00	784.819.745,00				253.963.912,00					2.372.400.656,00	1.270.244.420,00	722.621.853,00				249.752.000,00			2.242.618.273,00
41	Kantor Camat Ponggota	1.911.011.826,25	894.384.201,00									3.067.600.331,25	1.891.855.043,25	854.368.498,00				246.818.000,00			2.993.041.541,25
42	Kantor Camat Jongga	1.826.197.711,34	968.752.455,00				69.575.771,00					2.854.525.937,34	1.783.614.898,00	900.967.427,00				68.460.000,00			2.794.032.268,00



No.	Satuan Kerja	ANGGARAN										REALISASI (Rp)											
		Belanja Operasional					Belanja Modal		Belanja Tidak Tertinggi		Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah Anggaran Belanja & Transfer	Belanja Operasional					Belanja Modal	Belanja Tidak Tertinggi	Belanja Transfer		Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah Belanja & Transfer
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan			Transfer Bagi Hasil	Transfer Bantuan Keuangan			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan			Transfer Bagi Hasil	Transfer Bantuan Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
43	Inspektoral Daerah	10.932.047.851,00	5.940.227.253,04				3.900.628.439,00					20.772.903.343,04	10.893.388.965,00	5.448.318.046,00				3.723.922.953,00					20.065.629.964,00
44	Badan Perencanaan, Pembangunan, Ris et dan Inovasi Daerah	6.314.503.322,36	6.021.541.803,99				490.274.300,00					12.786.319.426,35	6.110.479.861,25	5.847.915.086,00				446.042.300,00					12.404.437.247,25
45	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	22.868.025.288,42	4.887.438.953,00				2.703.409.924,00					30.458.874.165,42	18.833.403.946,00	4.197.870.296,00				2.620.531.768,00					25.651.806.010,00
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	65.999.866.102,01	6.095.988.705,09	9.449.712.191,00			1.995.138.611,00	19.556.796.096,12	34.913.665.518,19	333.416.542.560,00	31.180.697.340,00	502.608.467.123,41	59.710.698.667,00	4.908.557.578,00	9.449.712.191,00			1.836.376.029,00	8.959.925.740,00	32.475.195.796,00	317.965.574.133,00	31.180.697.340,00	466.486.737.474,00
47	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.866.738.333,00	3.436.395.216,00				590.346.256,00					8.893.479.803,00	4.772.019.694,00	2.878.378.299,00				598.277.310,00					8.238.675.293,00
	JUMLAH	1.398.876.185.409,60	793.214.912.805,31	9.817.569.753,00	62.657.532.902,00	796.000.000,00	361.992.972.794,03	19.556.796.096,12	34.913.665.518,19	333.416.542.560,00	54.629.704.836,00	2.979.831.882.259,25	1.275.806.131.204,38	760.945.163.861,91	9.817.569.753,00	62.533.928.345,00	626.400.000,00	345.144.760.255,69	8.959.925.740,00	32.475.195.796,00	317.965.574.133,00	54.624.489.929,00	2.868.899.140.017,89



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
REKAP BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama OPD	URAIAN KEGIATAN	Jumlah/unit	Nilai (Rp)	Pihak Yang Menerima	BAST	
						No	Tanggal
1	2	3	4	5,00	6	7	8
1	Dinas Sosial	Asistensi Rehabilitasi Sosial Untuk Disabilitas		30.000.000,00	Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKSPD) Asmaul Husna Lombok Tengah		
2	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak		30.000.000,00	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bangun Sejahtera Lombok Tengah		
3	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Luar Panti		30.000.000,00	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ikhlas Karya Lombok Tengah		
4	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak		30.000.000,00	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Irsyadul Ibad Lombok Tengah		
5	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Luar Panti		30.000.000,00	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Istana Anak Indonesia Lombok Tengah		
6	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Luar Panti		30.000.000,00	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Literasi Ulul Azmi Lombok Tengah		
7	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak		30.000.000,00	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) YPI Generasi Sholeh Lombok Tengah		
8	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar lanjut Usia		30.000.000,00	Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Al Bukhari Lombok Tengah		
9	Dinas Sosial	Permohonan Bantuan Hibah		30.000.000,00	Yayasan Aliqro Asem Jurang Are		
10	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Luar Panti		30.000.000,00	Yayasan Darul Mukti Lombok Tengah		
11	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak		30.000.000,00	Yayasan Darunnurul Muslimin Lombok Tengah		
12	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Luar Panti		30.000.000,00	Yayasan Generasi Pemerhati Pendidikan dan Sosial Lombok Tengah		
13	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Luar Panti		30.000.000,00	Yayasan Harapan Baru Muhajirin		
14	Dinas Sosial	Subsidi Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak		30.000.000,00	Yayasan Muhaeminul Akhyar Lombok Tengah		
15	Dinas Sosial	Permohonan Bantuan Hibah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak dan Lansia		30.000.000,00	Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Nahdlatul Ulama Seang		
16	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Luar Panti		30.000.000,00	Yayasan Pendidikan Nasirudin Al Misbah NU Lombok Tengah		
17	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Luar Panti		30.000.000,00	Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat "Sejahtera" (YPP-EMAS)		
18	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak		30.000.000,00	Yayasan Ponpes Darul Haytham Lombok Tengah		
19	Dinas Sosial	Subsidi Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak		30.000.000,00	Yayasan Shiroothol Mustaqim		
20	Dinas Sosial	Permohonan Bantuan Dana Subsidi Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak		30.000.000,00	Yayasan Sosial Pendidikan Nurul Haq		
21	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar lansia		30.000.000,00	Yayasan Taklimul Qur'an Lombok Tengah		
22	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Luar Panti		30.000.000,00	Yayasan Yusuf Bin Mustofa Lombok Tengah		
23	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak		30.000.000,00	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Mujahidah Lombok Tengah		
24	Dinas Sosial	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Luar Panti		30.000.000,00	Yayasan Ittihadul Ikhlas Aikmual Lombok Tengah		



No	Nama OPD	URAIAN KEGIATAN	Jumlah/unit	Nilai (Rp)	Pihak Yang Menerima	BAST	
						No	Tanggal
1	2	3	4	5,00	6	7	8
25	Dinas Kesehatan	Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kab Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 (DAK Non Fisik)		100.000.000,00	DPD-PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (DPD-PPNI) KAB. LOMBOK TENGAH		
26	Dinas Kesehatan	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan-Palang Merah Indonesia (PMI) Kab Lombok Tengah TA 2025 (PAD Yang Sah)		100.000.000,00	H. L. Pathul Bahri, SIP., M. AP		
27	Bagian Kesra (Sekretaris Daerah)	Program dan biaya operasional Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025		700.000.000,00	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Tengah	450/02/KESRA/2025	03 Februari 2025
28	Bagian Kesra (Sekretaris Daerah)	Pembiayaan kegiatan LPTQ Tahun 2025		4.000.000.000,00	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Lombok Tengah	450/01/KESRA/2025	08 Januari 2025
29	Bagian Kesra (Sekretaris Daerah)	kegiatan operasional Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025		100.000.000,00	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lombok Tengah	450/03/KESRA/2025	03 Februari 2025
30	Bagian Kesra (Sekretaris Daerah)	kelangsungan pembangunan menara Masjid Fathul Muqim		10.000.000,00	Yayasan Masjid Fathul Muqim	450/11/KESRA/2025	24 April 2025
31	Bagian Kesra (Sekretaris Daerah)	kelangsungan pembangunan Masjid Al-Ittihad Lajut		50.000.000,00	Yayasan Masjid Al Ittihad	450/05/KESRA/2025	28 April 2025
32	Bagian Kesra (Sekretaris Daerah)	Pembiayaan Pembangunan Masjid		50.000.000,00	Yayasan Masjid Jamiq Al Muttaqin Mangkung	450/09/KESRA/2025	24 April 2025
33	Bagian Kesra (Sekretaris Daerah)	Merenovasi Masjid Darul Falah		50.000.000,00	Yayasan Masjid Darul Falah	450/07/KESRA/2025	17 April 2025
34	Bagian Kesra (Sekretaris Daerah)	kelangsungan pembangunan Masjid Al-Ittihad Lajut		50.000.000,00	Yayasan Masjid Jamiq Al Muttaqin Lajut	450/06/KESRA/2025	28 April 2025
35	Bagian Kesra (Sekretaris Daerah)	pembangunan dan perluasan bangunan Masjid Darussalam Nyiur Ende		10.000.000,00	Yayasan Masjid Darussalam	450/14/KESRA/2025	24 April 2025
36	Bagian Kesra (Sekretaris Daerah)	pembangunan Masjid Nurul Huda		10.000.000,00	Yayasan Masjid Nurul Huda Darwis	450/13/KESRA/2025	28 April 2025
37	Bagian Kesra (Sekretaris Daerah)	pembangunan masjid pada lantai dua dan pemasangan pintu serta keramik lantai dua		100.000.000,00	Yayasan Masjid Al Mukhtar Rancak	450/04/KESRA/2025	11 Februari 2025
38	Bagian Kesra (Sekretaris Daerah)	Rehabilitasi gedung Yayasan Majid Nurul Ihsan		10.000.000,00	Yayasan Masjid Nurul Ihsan Penandak	450/12/KESRA/2025	28 April 2025
39	Dinas Pendidikan dan Olahraga	Belanja Hibah Uang untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lombok Tengah	1	500.000.000,00	KONI	-	-
			TOTAL	6.560.000.000,00			

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
REKAP BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Pihak Yang Menerima	Jenis	BAST	
					No	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan	50.000.000,00	Yayasan Hidayatul Ummah Areguling Desa Tumpak Kec. Pujut	Uang	900.1.4.3/539/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Miftahul Khair Lingkok Lendang Desa Bebuak Kec. Kopang	Uang	900.1.4.3/559/Disbud	
		50.000.000,00	MTs. As-Syatariyah NW Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Utara	Uang	900.1.4.3/539/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Al Amirul Muminin Desa Tampak Siring Kec. Batukliang	Uang	900.1.4.3/541/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Ponpes Asy-Syahriyah Dasan Baru Jabon Desa Pringgarata Kec. Pringgarata	Uang	900.1.4.3/515/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Arif Rahman Hakim Selakan Desa Sintung Kec. Pringgarata	Uang	900.1.4.3/457/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Pendidikan dan Sosial Al Azhar Dua Wates Desa Pringgarata Kec. Pringgarata	Uang	900.1.4.3/495/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Al Ilham NW/MA NW Selusuh Desa Mas-Mas Kec. Batukliang Utara	Uang	900.1.4.3/560/Disbud	
		30.000.000,00	MTs. Rabithatuss'adah Desa Selebung Kec. Batukliang	Uang		
		100.000.000,00	MTs. Al Abror Asy Syafiyah NW Selak Desa Ketare Kecamatan Pujut	Uang	900.1.4.3/439/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Al Ijtihad Raodhatul Thalibin Pucung Desa Selebung Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/451/Disbud	
		100.000.000,00	Yayasan Nurul Mustafa Bungan Tapen Kelurahan Gerunung Kec. Praya	Uang		
		50.000.000,00	MTs. Nurul Islam Dasan Baru Desa Murbaye Kec. Pringgarata	Uang	900.1.4.3/435/Disbud	
		30.000.000,00	MTs. Ruhama Jambik Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut	Uang	900.1.4.3/438/Disbud	
		30.000.000,00	SMP Islam Riyadhul Mukhlisin Tenges Enges Desa Sukaraja Kec. Praya Timur	Uang	900.1.4.3/538/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Ibni Abdillah As Syafiyah Al Mubarak Montong Dao Desa Teratak Kec. Batukliang Utara	Uang	900.1.4.3/476/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Ponpes Darussalimin NW Sengkol Mantang Desa Aik Darek Kec. Batukliang	Uang	900.1.4.3/516/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Al Muttaqin Lekong Desa Pendem Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/552/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Al Ikhlis Al Islamy Kaliaji Desa Monggas Kec. Kopang	Uang	900.1.4.3/546/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Al Mansyuriyah NU Sinah Desa Pengembur Kec. Pujut	Uang		
		50.000.000,00	Yayasan Pendidikan Islam Atimul badriah NW Lingkok Bunut Desa Lekor Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/556/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Gubuk Edukasi Arjangka Desa Arjangka Kec. Pringgarata	Uang	900.1.4.3/472/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Nurul Ijtihad Montong Balas Desa Pengembur Kec. Pujut	Uang	900.1.4.3/488/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Pondok Pesantren Abul madaris Wal Masjid NW Mekar Berkah Desa Tanak BeakKec. Batukliang Utara	Uang	900.1.4.3/511/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Ziadatul Ikhlis Gelogor Desa Pemepek Kec. Pringgarata	Uang	900.1.4.3/509/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Al Hasany Lekor Timur Desa Lekor Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/549/Disbud	
		100.000.000,00	Yayasan Nurul Huda Penyengak Desa Presak Kec. Batukliang	Uang	900.1.4.3/487/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Pendidikan Al Maarif At Taklim Tebuak Desa Tumpak Kec. Pujut	Uang	900.1.4.3/494/Disbud	
		100.000.000,00	SMP Islam Darussalam Desa Kopang Rembige Kec. Kopang	Uang	900.1.4.3/528/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Pondok Pesantren Nurul Yaqin Kelanjur Desa Montong Sapah Kec. Praya Barat Daya	Uang	900.1.4.3/520/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Darunnajah Samarkaton Desa Sisik Kec. Pringgarata	Uang	900.1.4.3/468/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Khaerul Insaani Selojan Desa Presak Kec. Batukliang	Uang	900.1.4.3/444/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Darut Taqwa Desa Tanak Awu Kec. Pujut	Uang	900.1.4.3/469/Disbud	
		50.000.000,00	kepada Yayasan Taupiqurrahman Bodak Rau Desa Montong Terep Kec. Praya	Uang	900.1.4.3/505/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Ponpes As Siddiqien Kesah Desa Lantan Kec. Batukliang Utara	Uang	900.1.4.3/514/Disbud	
		50.000.000,00	SMP Islam Al Maarif Pampang Desa Kabul Kec. Praya Barat Daya	Uang	900.1.4.3/444/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Nurul Huda Kalong Desa Selebung Rembige Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/486/Disbud	
		100.000.000,00	Yayasan Husein Akar Madani Jantuk Desa Mantang Kec. Batukliang	Uang	900.1.4.3/524/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Al Fatih Pusok Desa Bakan Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/548/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Pendidikan dan Sosial Darussalam Taken Aken Desa Lekor Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/555/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Riyadlul Hamidin Aik Jaa Desa Jago Kec. Praya	Uang	900.1.4.3/510/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Al Kholily Desa Selebung Kecamatan Batukliang	Uang	900.1.4.3/453/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Nusantara Abadi Selak Aik Bawak Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara	Uang	900.1.4.3/492/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Bintang Sembilan Jabon Desa Selong Belanak Kec. Praya Barat	Uang	900.1.4.3/464/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Harapan Bangsa Al Hidayah Jabon Desa Selong Belanak Kec. Praya Barat	Uang	900.1.4.3/473/Disbud	
		100.000.000,00	Yayasan Al Muhammadiyah langko Dusun Jebak langko Desa Langko Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/522/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Pendidikan dan Sosial As Syamsi Aik Bukak Desa Aik Bukak Kec. Batukliang Utara	Uang	900.1.4.3/496/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Al Islahu; Athfal Lendek Desa Lelong Kec. Praya Tengah	Uang		
		50.000.000,00	Yayasan An Nur Aik Darek Desa Aik Darek Kec. Batukliang	Uang	900.1.4.3/456/Disbud	
		100.000.000,00	MTs. Majidul Wathani Sekilat Desa Ganti Kec. Praya Timur	Uang	900.1.4.3/440/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Baitul Atqia Desa kateng Kec. Praya Barat	Uang	900.1.4.3/461/Disbud	
		100.000.000,00	Yayasan Pendidikan dan Sosial Al Qadriyah Benteng Desa Taman Indah Kec. Pringgarata	Uang	900.1.4.3/526/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Ponpes Al Hidayah Tanggor Desa Beraim Kec. Praya Tengah	Uang		
		30.000.000,00	Yayasan Minhajul Ulum/MTs Minhajul Ulum Desa Ketare Kec. Pujut	Uang	900.1.4.3/498/Disbud	
		100.000.000,00	Yayasan Ibnu Sulaiman Gunung Mujur Desa Bujak Kec. Batukliang	Uang	900.1.4.3/477/Disbud	



No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Pihak Yang Menerima	Jenis	BAST	
					No	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7
		50.000.000,00	Yayasan Ar Rahim Sana Lombok Bakan Lauk Desa Bakan Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/553/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Ponpes NU Riyadlul Ulum As Syafiyah Embung Tangar Desa Banyu Urip Kec. Praya Barat	Uang	900.1.4.3/557/Dikbud	
		30.000.000,00	Yayasan Al Ittihad Montong Tangar Desa Bonjeruk Kec. Jonggat	Uang	900.1.4.3/452/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Pendidikan Darushilihin Lingkok Lime Desa Setiling Kec. Batukliang Utara	Uang	900.1.4.3/497/Dikbud	
		50.000.000,00	Yayasan Al Mukminin NW/MI NW Penimpoh	Uang	900.1.4.3/542/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Darul Ulum Ibrahimiy Banyu Urip Desa Banyu Urip Kec. Praya Barat	Uang	900.1.4.3/467/Dikbud	
		100.000.000,00	Yayasan Nurul Azmi Desa Setute Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/483/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Hidayatul Muhtadiy Bujak Daye Desa Presak Kec. Batukliang	Uang	900.1.4.3/474/Dikbud	
		50.000.000,00	Yayasan Pendidikan Al Muhtadi Bakan Tengah Desa Bakan Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/550/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Baitul Hidayah Desa Pandan Indah Kec. Praya Barat Daya	Uang	900.1.4.3/462/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Usmaniyah Aik Gering Desa Presak Kec. Batukliang	Uang		
		30.000.000,00	SMP Islam Umariyah Buntimbe Desa Persiapan Masjuring Kec. Praya Barat	Uang	900.1.4.3/445/Dikbud	
		50.000.000,00	Yayasan Ponpes Madinatul Ulum NW Mumbang Desa Montong Gamang Kec. Kopang	Uang	900.1.4.3/501/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Al Amanah Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang	Uang	900.1.4.3/547/Disbud	
		100.000.000,00	Yayasan Zeinta El Haram Baraca Dasan Cermen Desa Aik Darek Kec. Batukliang	Uang	900.1.4.3/531/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Ponpes Al Maarif Mujur Desa Mujur Kecamatan Praya Timur	Uang	900.1.4.3/513/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Pondok Pesantren Ihyia Ulumudin al Maarif Tegu Desa Kabul Kec. Praya Barat Daya	Uang	900.1.4.3/518/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Mandalika Kuta Desa Kuta Kecamatan Pujut	Uang		
		100.000.000,00	Yayasan Diniyah Mahdhotul Ulum Dusun Semaye Desa Bunut Baik Kec. Praya	Uang	900.1.4.3/471/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Nurul Jihad Taman Baru Desa Pemepek Kec. Pringgarata	Uang	900.1.4.3/489/Dikbud	
		30.000.000,00	Yayasan Yasin Al Mubarak Lilin II Desa Bebuak Kec. Kopang	Uang	900.1.4.3/508/Disbud	
		100.000.000,00	Yayasan Ponpes Sabiul Hayat Jango Desa Jango Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/530/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Diniyah Islamiah Al Anshor Guwi Desa Pendem Kec. Janapria	Uang		
		30.000.000,00	Yayasan Nurul Mu'tamad Repok Menemeng Desa Pemepek Kec. Pringgarata	Uang		
		50.000.000,00	Yayasan Najmul Huda Desa Ketara Kecamatan Pujut	Uang	900.1.4.3/482/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Al Khair NW Lambah Olot Desa Janapria Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/539/Dikbud	
		50.000.000,00	Yayasan Ponpes Miftahussaadah NW Lingkok Godak Desa WajaGeseng Kec. Kopang	Uang	900.1.4.3/519/Dikbud	
		30.000.000,00	Yayasan Mandalika Lombok BTN Bonter Kelurahan Tiwugalih Kec. Praya	Uang		
		30.000.000,00	Yayasan Atttaqi Al Jalilu Dasan Teres Desa Selebung Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/460/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan At Tuhatul Monggasyah Mertaq Nao Desa Monggas Kec. Kopang	Uang	900.1.4.3/459/Dikbud	
		50.000.000,00	Yayasan Islam As Salam Lombok Prampuan Desa Tanak Beak Kec. Batukliang Utara	Uang	900.1.4.3/478/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Nurul Hidayah Desa Labulia Kec. Jonggat	Uang	900.1.4.3/443/Disbud	
		50.000.000,00	MTs. Plus Nurul Madinah NW Repok Asmari Desa Monggas Kec. Kopang	Uang	900.1.4.3/557/Disbud	
		100.000.000,00	Yayasan Riadhul Jannah NW Batrata Desa Ubung Kec. Jonggat	Uang	900.1.4.3/527/Disbud	
		100.000.000,00	Yayasan Ponpes Hidayatul Ummah NW Bagek Nunggal Desa Ubung Kec. Jonggat	Uang	900.1.4.3/500/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Tiga Bersatu Tojong Ojong Desa Selebung Kec. Batukliang	Uang	900.1.4.3/537/Dikbud	
		30.000.000,00	Yayasan Al Mansyuriah/MA Mansyuriah Kereak Desa Pandan Indah Kec. Praya Barat Daya	Uang		
		30.000.000,00	Yayasan Sosial dan Pendidikan Al Mubarak Numpeng Desa Jago Kec. Praya	Uang		
		100.000.000,00	Yayasan Al Akhyar Lombok Peduli Desa Penujak Kec. Praya Barat	Uang		
		50.000.000,00	Yayasan Nurul Mufidah Penginem Daye Desa Setiling Kec. Batukliang Utara	Uang	900.1.4.3/490/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Nurul Furqon Rarung Desa Pemepek Kec. Pringgarata	Uang	900.1.4.3/484/Disbud	
		100.000.000,00	Yayasan Az Zikra Lendang Siluman Desa Dasan Baru Kec. Kopang	Uang	900.1.4.3/529/Dikbud	
		30.000.000,00	MTs. Al Ishlah dasan Agung Desa Tanak Beak Kec. Batukliang Utara	Uang	900.1.4.3/540/Dikbud	
		100.000.000,00	Yayasan Al Qadir Menemeng Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata	Uang	900.1.4.3/521/Dikbud	
		30.000.000,00	Yayasan Nurul Hikmah NW Lendang Kelor Dusun Kekalek Desa Murbaya Kec. Pringgarata	Uang		
		50.000.000,00	Yayasan Ponpes Al Hasanayah NW Tudung Desa Mantang Kecamatan Batukliang	Uang		
		50.000.000,00	Yayasan Pendidikan dan Sosial Darul Mustafa Punikasih Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara	Uang	900.1.4.3/536/Dikbud	
		50.000.000,00	MTs. Miftahul Ali Lendang Pengkores Desa Wajageseng Kecamatan Kopang	Uang	900.1.4.3/434/Dikbud	
		30.000.000,00	Yayasan Al Ghafur Jontlak Desa Monggas Kecamatan Kopang	Uang		
		30.000.000,00	MTs. Nurul Jihad Desa Aik Bual Kecamatan Kopang	Uang	900.1.4.3/436/Disbud	
		50.000.000,00	kepada Yayasan Baitul Qurro NTB batu Beson Desa Jago Kec. Praya	Uang	900.1.4.3/463/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Ibadurrahman Batu Mulik Kec. Praya	Uang	900.1.4.3/475/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Maqoshidul Hasanah Yamaha Jabon Tenten Desa Bagu Kec. Pringgarata	Uang	900.1.4.3/481/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Al Hidayatullah Lembak Desa Selebung Rembiga Kec. Janapria	Uang		
		30.000.000,00	Yayasan Al Asmaul Husna NW Tanak Beak Desa Tanak Beak Kec. Batukliang Utara	Uang	900.1.4.3/458/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Ponpes Al Ikhlis Pandan Tinggang Kec. Praya Barat Daya	Uang	900.1.4.3/499/Disbud	



No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Pihak Yang Menerima	Jenis	BAST	
					No	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7
		50.000.000,00	Yayasan Raudhatul Islam Bun Putri Sepit Desa Kerame Jati Kec. Pujut	Uang	900.1.4.3/502/Dikbud	
		30.000.000,00	Yayasan Darul Mustofa Pesantek Lauk Desa Setiling Kec. Batukliang Utara	Uang	900.1.4.3/466/Dikbud	
		50.000.000,00	Yayasan Al Maarif Hidayatul Ulum Desa Tanak Awu Kec. Pujut	Uang	900.1.4.3/454/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Al Muslimin NW Kesela Desa Pendem Kecamatan Janapria	Uang	900.1.4.3/551/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Pendidikan Al Kahpi Abdul Aziz Runtak Desa Montong Terep Kec. Praya	Uang	900.1.4.3/493/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Tulus Ikhlas Langko Lauk Desa Langko Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/506/Disbud	
		30.000.000,00	MTs. Al Fathiyah yasin Dasan Baru Jabon Selatan Desa Pringgarata Kec. Pringgarata	Uang	900.1.4.3/433/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Ponpes Al Jamil Bare Eleh Desa Aik Bual Kec. Kopang	Uang	900.1.4.3/446/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Ponpes Faris Abdul Majid Loang Maka Desa Loang Maka Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/517/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Al Azhar Quranic School Sadah Desa Janapria Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/447/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Pendidikan Lingua Pratama Janapria Desa Janapria Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/533/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Ittihadul Khairi Pengadok Desa Mantang Kec. Batukliang	Uang	900.1.4.3/479/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Al Ihsan NW Gelondong Desa Pendem Kec. Janapria	Uang	900.1.4.3/450/Disbud	
		30.000.000,00	Yayasan Daarul Khair Semarang Kelurahan Perapen Kecamatan Praya	Uang	900.1.4.3/465/Disbud	
		100.000.000,00	Yayasan Baitul Misbah Lombok Lingkungan Lingkok Kudung Kelurahan Gerantung Kecamatan Praya Tengah	Uang	900.1.4.3/554/Disbud	
		50.000.000,00	Yayasan Ponpes Ishlahun Anam Desa Aik Darek Kec. Batukliang	Uang		
		30.000.000,00	Yayasan Raudhatul Jannah Al Gahfuriyah Desa Muncan Kec. Kopang	Uang	900.1.4.3/503/Dikbud	
		30.000.000,00	MI NW Kebun Mulia Dusun Kebun Mulia Desa Selebung Kecamatan Batukliang	Uang	421.2/475/Dikbud	
		50.000.000,00	MI Nurussalam NW Lendang Dode Desa Barebali Kec. Batukliang	Uang	421.2/473/Dikbud	
		100.000.000,00	MI NW Kekale Desa Sengkol Kecamatan Pujut	Uang	421.2/483/Dikbud	
		30.000.000,00	Sekolah Dasar Islam Al-Huda Ma'arif Dusun Lender Desa Kabul Kec. Praya Barat Daya	Uang	421.2/489/Dikbud	
		30.000.000,00	MI Maraqitta'imat Bakan Montong Lekong Dusun Bakan Lauq Desa Bakan Kec. Janapria	Uang	421.2/490/Dikbud	
		30.000.000,00	MI Miftahul Ma'arif Plambik Desa Plambik Kec. Praya Barat Daya	Uang	421.2/485/Dikbud	
		30.000.000,00	MI Nurul Alimin Lengusik Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya	Uang	421.2/487/Dikbud	
		30.000.000,00	MI Nurul Ijtihad NW Tenang Desa Segala Anyar Kec. Pujut	Uang	421.2/481/Dikbud	
		30.000.000,00	MI Darul Mujahidin Uluan Desa Prabu Kec. Pujut	Uang	421.2/480/Dikbud	
		50.000.000,00	MI Al Mujahidin Al Ma'arif Pepereq Dusun Pepereq Desa Batujangkih Kec. Praya Barat Daya	Uang	421.2/486/Dikbud	
		50.000.000,00	MI Al Anwariyah NW Pagah Desa Barabali Kecamatan Batukliang	Uang	421.2/474/Dikbud	
		30.000.000,00	MI Al Ma'arif Al Ijtihad Tumpak Desa Tumpak Kec. Pujut	Uang	421.2/484/Dikbud	
		30.000.000,00	MI Al Baladul Amin Sebuta	Uang	421.2/482/Dikbud	
		30.000.000,00	MI Al Adamiyah Bagik Pituk Dusun Bagik Pituk Desa Plambik Kec. Praya Barat Daya	Uang	421.2/488/Dikbud	
		30.000.000,00	MI Ulul Azmi Terentem	Uang	421.2/478/Dikbud	
		50.000.000,00	MI Fatahillah NW Teratak Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara	Uang	421.2/477/Dikbud	
		20.000.000,00	MI Nurul Hidayah NW Lendang Kekah	Uang		
		30.000.000,00	MI Nurul Hidayah NW Lendang Kekah	Uang		
	TOTAL	7.210.000.000,00				



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
REKAP BELANJA HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Pihak Yang Menerima	Jenis	BAST	
					No	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7
1	Dispora	100.000.000,00	PRAMUKA	hibah uang untuk Gerakan Pramuka Kwarcab Lombok Tengah		-
		75.000.000,00	KARANG TARUNA	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		-
		50.000.000,00	PERSATUAN PEMUDA PATIH ANGGARA	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		-
	TOTAL	225.000.000,00				



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
REKAP BELANJA HIBAH KEPADA KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Pihak Yang Menerima	Jenis	BAST	
					No	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100.000.000	Koperasi Konsumen Syariah Bima Sakti Utama Mandiri	Hibah Uang	518/41/Diskopum/2025	04 Februari 2025
2	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100.000.000	Koperasi Konsumen Syariah Silaturrahim Sempat Barokah	Hibah Uang	518/42/Diskopum/2025	04 Februari 2025
	TOTAL	200.000.000,00				



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
REKAP BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT YANG BERBADAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Pihak Yang Menerima	Jenis	BAST	
					No	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lombok Tengah	50.000.000,00	LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA (LVRI)	Hibah Uang	900.1.3/14/BAP/VIII/BKBP/2025	11 Agustus 2025
2	Dinas Pendidikan dan Olahraga	100.000.000,00	KORMI	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	KORMI	-
		75.000.000,00	KPOTI	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	KPOTI	-
		100.000.000,00	KNPI	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	KNPI	-
	TOTAL	325.000.000,00				



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
REKAP BELANJA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Pihak Yang Menerima	Jenis	BAST/BAP (Berita Acara Pembayaran)	
					No	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. LOMBOK TENGAH	124.742.552,00	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	Hibah Uang	01/BAP/VIII/BKBP/2025	22 Agustus 2025
2		116.988.781,00	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	Hibah Uang	02/BAP/VIII/BKBP/2025	22 Agustus 2025
3		113.027.423,00	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	Hibah Uang	03/BAP/VIII/BKBP/2025	22 Agustus 2025
4		110.535.082,00	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	Hibah Uang	04/BAP/VIII/BKBP/2025	22 Agustus 2025
5		110.518.992,00	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	Hibah Uang	05/BAP/VIII/BKBP/2025	22 Agustus 2025
6		103.888.303,00	PARTAI DEMOKRAT	Hibah Uang	06/BAP/VIII/BKBP/2025	22 Agustus 2025
7		96.564.135,00	NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	Hibah Uang	07/BAP/VIII/BKBP/2025	22 Agustus 2025
8		42.385.887,00	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	Hibah Uang	08/BAP/VIII/BKBP/2025	22 Agustus 2025
9		41.822.737,00	PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN (PDIP)	Hibah Uang	09/BAP/VIII/BKBP/2025	22 Agustus 2025
10		40.879.863,00	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	Hibah Uang	10/BAP/VIII/BKBP/2025	22 Agustus 2025
11		25.246.819,00	HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	Hibah Uang	11/BAP/VIII/BKBP/2025	22 Agustus 2025
12		42.820.317,00	PARTAI PERINDO	Hibah Uang	12/BAP/VIII/BKBP/2025	22 Agustus 2025
13		33.111.611,00	PARTAI GELORA	Hibah Uang	13/BAP/VIII/BKBP/2025	22 Agustus 2025
	TOTAL	1.002.532.502,00				

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
REKAPITULASI PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KE DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Desa	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 1 2025	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 2 2025	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 3 2025	Total Penyaluran	Nama Bendahara	No. Rekening
1	KEC. PUJUT						
1	Desa Kuta	1.961.835.791,48	1.975.930.104,38	951.845.761,95	4.889.611.657,81	BENDH DS KUTE	003.22.76244.01-5
2	Desa Mertak	90.745.723,68	128.505.509,02	41.272.607,21	260.523.839,91	BEND DS MERTAK	003.22.70826.01-4
3	Desa Sengkol	168.601.999,96	154.296.378,38	55.328.019,50	378.226.397,84	BEND DS SENGKOL	003.22.70827.01-2
4	Desa Bangket Parak	65.957.281,64	67.261.978,18	25.667.411,52	158.886.671,34	BENDH DS BANGKET PARAK	003.22.76211.01-2
5	Desa Rembitan	93.597.397,92	89.724.040,30	25.892.449,45	209.213.887,67	BENDH DESA REMBITAN	003.22.70815.01-0
6	Desa Pengembur	74.585.870,56	72.039.590,86	25.622.691,98	172.248.153,40	BENDH DESA PENGEMBUR	003.22.70931.01-7
7	Desa Teruwai	72.200.183,80	75.073.319,42	26.020.259,94	173.293.763,16	BEND DS TERUWAI	003.22.70819.01-1
8	Desa Kawo	76.313.087,60	76.826.321,30	26.132.012,62	179.271.421,51	BENDAHARA DESA KAWO	003.22.49245.01-8
9	Desa Ketara	69.898.071,80	129.149.615,38	37.144.739,99	236.192.427,16	BENDH DS KETARA	003.22.70787.01-6
10	Desa Tanak Awu	166.706.613,60	133.354.317,18	63.162.369,55	363.223.300,33	BENDH DESA TANAK AWU	003.22.70914.01-7
11	Desa Tumpak	164.990.120,48	160.768.622,82	38.844.141,88	364.602.885,18	BENDH DESA TUMPAK	003.22.70813.01-4
12	Desa Prabu	116.857.961,92	116.944.784,86	40.721.137,42	274.523.884,20	BEND DS PRABU	003.22.70840.01-1
13	Desa Sukadana	96.595.080,88	87.560.832,34	57.815.832,37	241.971.745,59	BEND DS SUKADANA	003.22.70777.01-0
14	Desa Segala Anyar	67.387.482,56	65.541.092,18	25.093.607,70	158.022.182,44	BENDH DESA SEGALA A	003.22.70770.01-5
15	Desa Pengengat	68.860.323,12	69.353.466,70	26.106.062,42	164.319.852,24	BENDH DESA PENGENGAT	003.22.70796.01-5
16	Desa Gapura	66.666.898,00	65.431.462,38	24.965.954,49	157.064.314,87	BENDH DESA GAPURA	003.22.70860.01-4
17	Desa Dadap	59.444.096,52	60.125.253,50	24.872.261,78	144.441.611,79	BENDH DS Dadap	510.02.00059.06-5
18	Desa Kerame Jati	59.332.540,52	60.771.723,50	24.840.175,06	144.944.439,07	BENDH DS Kerame Jati	510.02.00061.06-0
2	KEC. PRAJA						
1	Desa Bunut Baik	70.207.165,72	72.867.856,26	28.220.920,33	171.295.942,30	BENDH DS BUNUT B	003.22.70765.01-7
2	Desa Jago	70.182.783,52	73.577.138,14	25.298.691,92	169.058.613,57	BENDH DESA JAGO	003.22.70783.01-5
3	Desa Aik Mual	67.435.572,76	67.903.648,10	26.007.708,34	161.346.929,19	BENDH.DESA AIK MUAL	003.22.76425.01-1
4	Desa Montong Terep	68.563.540,56	71.296.593,30	24.683.392,51	164.543.526,37	BENDH DS MONOTONG TEREK	003.22.70763.01-2
5	Desa Mertak Tombok	66.419.661,64	67.544.960,30	25.604.781,32	159.569.403,25	Bendes Mertak Tombok	003.22.70762.01-4
6	Desa Mekar Damai	63.473.359,44	64.578.709,46	24.424.261,84	152.476.330,73	BEND DS MEKAR DAMAI	003.22.76102.01-7
3	KEC. PRAJA TENGAH						
1	Desa Lajut	75.304.947,48	74.406.646,58	27.473.745,79	177.185.339,85	BENDH DESA LAJUT	003.22.70798.01-1

No.	Nama Desa	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 1 2025	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 2 2025	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 3 2025	Total Penyaluran	Nama Bendahara	No. Rekening
2	Desa Batunyal	72.863.109,88	75.038.544,94	18.145.454,90	166.047.109,72	BEND DESA BATUNYALA	003.22.01503.02-2
3	Desa Pejanggih	69.382.266,28	68.176.803,98	25.108.545,70	162.667.615,95	BENDH DESA PEJANGGIK	003.22.70837.01-8
4	Desa Kelebu	69.667.866,20	70.999.913,98	24.626.177,28	165.293.957,45	BENDH DS KELEBUH	003.22.70832.01-0
5	Desa Beraim	69.122.154,12	68.054.012,46	24.392.693,28	161.568.859,86	BENDAHARA DESA BERAIM	003.22.70775.01-4
6	Desa Pengadang	74.614.951,32	82.519.374,14	30.045.794,45	187.180.119,91	BEND DS PENGADANG	003.22.70776.01-2
7	Desa Jurang Jaler	65.567.931,28	67.709.462,02	24.526.269,02	157.803.662,32	BENDH DESA JURANG JALER	003.22.70808.01-6
8	Desa Prai Meke	62.261.077,84	67.215.864,42	25.994.898,49	155.471.840,74	BEND. DESA PRAI MEKE	003.22.76196.01-8
9	Desa Dakung	62.331.196,20	63.526.707,02	23.965.309,19	149.823.212,40	BENDH DESA DAKUNG	003.22.76210.01-4
10	Desa Lelong	59.332.540,52	60.184.791,26	24.712.178,50	144.229.510,27	BENDH DS Lelong	003.02.01042.06-4
4	KEC. PRAYA TIMUR						
1	Desa Semoyang	69.661.227,84	70.569.507,62	26.836.657,78	167.067.393,24	BEND DS SEMOYANG	003.22.70786.01-8
2	Desa Ganti	76.001.841,92	77.154.034,54	25.895.759,17	179.051.635,63	BENDH DESA GANTI	003.22.70940.01-6
3	Desa Mujur	79.046.831,00	80.010.223,22	29.304.364,67	188.361.418,88	BENDH DESA MUJUR	003.22.73344.01-7
4	Desa Sengkerang	73.105.090,92	72.612.415,94	25.895.884,46	171.613.391,32	BENDH DESA SENGKERANG	003.22.70814.01-2
5	Desa Beleke	67.835.589,84	68.162.807,66	24.877.103,15	160.875.500,65	BENDH DESA BELEKA	003.22.70941.01-4
6	Desa Sukaraja	64.522.493,20	64.275.056,10	24.718.914,39	153.516.463,68	BENDH DESA SUKARAJA	003.22.70871.01-8
7	Desa Kidang	71.340.909,88	70.686.680,46	25.293.960,32	167.321.550,66	BENDH DESA KIDANG	003.22.70946.01-3
8	Desa Landah	66.468.880,76	67.005.883,50	25.896.467,88	159.371.232,14	BENDH DS LANDAH	003.22.73603.01-0
9	Desa Bilelendo	64.632.574,84	66.835.802,66	24.621.842,78	156.090.220,28	BENS DS BILELANDO	003.22.70952.01-8
10	Desa Marong	70.243.838,08	69.144.392,18	25.749.868,49	165.138.098,75	BEND DS MARONG	003.22.70843.01-4
11	Desa Beleke Daye	59.363.292,52	60.091.853,50	24.484.678,26	143.939.824,27	BENDH DS Beleke Daye	005.02.0102.06-2
12	Desa Beleke Lebe Sane	59.332.540,52	60.639.053,50	24.579.738,98	144.551.332,99	BENDH DS Beleke Lebe Sane	003.02.01048.06 - 3
13	Desa Pengonak	59.410.076,52	60.198.708,94	24.802.581,34	144.411.366,79	BENDH DS Pengonak	003.02.01025.06-1
14	Desa Jero Puri	59.386.780,52	60.358.593,50	24.608.756,02	144.354.130,03	BENDH DS Jero Puri	003.02.01043.06-5

No.	Nama Desa	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 1 2025	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 2 2025	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 3 2025	Total Penyaluran	Nama Bendahara	No. Rekening
5	KEC. JANAPRIA						
1	Desa Loang Make	71.102.043,92	71.150.573,14	26.318.017,17	168.570.634,22	BENDH DESA LOANG MAK	003.22.70773.01-8
2	Desa Lekor	67.413.420,80	70.035.974,02	26.193.654,10	163.643.048,92	BENDH DESA LEKOR	015.22.33189.02-8
3	Desa Saba	70.328.194,96	70.402.004,74	25.188.124,43	165.918.324,13	BENDES SABA	015.22.03085.01-2
4	Desa Janapria	78.605.212,72	83.197.044,70	26.378.616,32	188.180.873,73	BENDH DESA JANAPRIA	015.22.33181.02-6
5	Desa Pendem	66.679.301,80	68.235.030,42	25.098.363,74	160.012.695,95	BENDH DESA PENDEM	015.22.33204.02-2
6	Desa Durian	62.813.275,00	63.451.138,34	24.711.460,94	150.975.874,27	BENDH.DESA DUARIAN	015.22.33179.02-2
7	Desa Langko	65.611.375,60	66.446.796,78	25.091.052,36	157.149.224,73	BENDH DESA LANGKO	003.22.70767.01-3
8	Desa BAKAN	63.982.133,36	65.855.703,54	24.852.566,77	154.690.403,66	BENDH DESA BAKAN	015.22.33180.02-8
9	Desa Selebung Rembiga	65.077.882,64	66.938.312,06	25.066.152,63	157.082.347,33	BENDH DESA SELEBUNG RBG	003.22.73236.01-1
10	Desa Kerembong	68.899.153,32	66.460.644,66	24.807.656,27	160.167.454,24	BENDH DESA KEREMBONG	015.22.33186.02-5
11	Desa Jango	62.913.103,36	64.133.869,78	24.517.056,62	151.564.029,76	DESA JANGO	003.22.76079.01-3
12	Desa Setuta	62.694.952,72	63.276.033,58	24.551.904,76	150.522.891,06	BENDES STUTA	015.22.34561.01-0
13	Desa Prako	59.332.540,52	60.600.886,74	24.616.336,26	144.549.763,51	BENDH DS Prako	015.02.01501.27-3
14	Desa Tibu Sisok	59.367.325,96	60.374.850,70	24.700.221,82	144.442.398,47	BENDH DS Tibu Sisok	003.02.01050.06-5
15	Desa Janggawana	59.332.540,52	60.601.612,26	24.809.765,46	144.743.918,23	BENDH DS Jangawana	015.02.01446.27-4
16	Desa Lingkok Berenge	59.412.748,52	60.304.333,50	24.781.369,10	144.498.451,11	BENDH DS Lingkok Berenge	015.02.01500.27-2
6	KEC. KOPANG		-		-		
1	Desa Muncan	66.794.589,72	68.260.442,30	25.579.989,94	160.635.021,95	BENDH DESA MUNCAN	015.22.33202.02-6
2	Desa Monggas	68.343.511,36	68.496.192,22	25.391.169,94	162.230.873,51	BENDH DESA MONGGAS	003.22.70834.01-5
3	Desa Darmaji	69.497.316,52	71.759.568,02	25.950.254,80	167.207.139,33	BENDH DESA DARMAJI	015.22.33184.02-0
4	Desa Dasan Baru	70.808.123,64	72.376.102,42	25.520.506,87	168.704.732,93	BEND DESA DASAN BARU	015.02.00110.21-3
5	Desa Kopang Rembiga	86.198.859,84	86.112.141,74	30.411.288,96	202.722.290,54	BENDH DESA KOPANG	015.22.03389.01-6
6	Desa Montong Gamang	79.657.661,40	78.499.348,90	27.023.329,92	185.180.340,22	BENDH DESA MTG GAMANG	015.22.33201.02-8
7	Desa Lendang Are	63.436.677,00	64.989.516,62	24.982.337,43	153.408.531,04	BENDES LENDANG ARE	015.22.33196.02-2
8	Desa Bebuak	65.313.059,84	66.756.832,78	25.650.495,46	157.720.388,08	BENDH DESA BEBUAK	015.22.33197.02-0
9	Desa Wajegeseng	69.409.639,56	70.464.239,46	26.629.144,47	166.503.023,49	BENDH DESA WAJAGESENG	015.22.33207.02-5
10	Desa Semparu	62.368.960,68	62.880.512,30	25.481.483,02	150.730.956,00	BENDES SEMPARU	015.22.34565.01-1
11	Desa Aik Bual	61.618.044,04	62.480.697,98	24.592.442,85	148.691.184,86	BENDES AIK BUAL	015.22.34564.01-3
12	Desa Brinding	59.333.180,52	60.106.707,10	24.986.702,78	144.426.590,39	BENDH DS Brinding	015.02.01457.27-1
13	Desa Pajangan	59.332.540,52	60.278.740,22	24.773.505,22	144.384.785,95	BENDH DS Pajangan	015.0201448.27-6
7	KEC. PRINGGARATA						

No.	Nama Desa	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 1 2025	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 2 2025	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 3 2025	Total Penyaluran	Nama Bendahara	No. Rekening
1	Desa Pringgarata	77.104.921,88	76.686.414,90	27.058.912,21	180.850.248,98	BENDH DESA PR RATA	003.22.70877.01-5
2	Desa Bilebante	65.581.878,24	68.402.724,18	26.244.824,95	160.229.427,36	BEND DS BILEBANTE	003.22.70823.01-1
3	Desa Bagu	69.589.881,64	70.345.649,98	25.963.870,60	165.899.402,21	BEND. DS BAGU	003.22.70824.01-8
4	Desa Sintung	69.390.857,28	70.369.439,02	24.930.432,26	164.690.728,55	BENDH DS SINTUNG	003.22.01456.01-0
5	Desa Murbaya	65.084.989,52	65.782.320,70	24.866.097,89	155.733.408,10	BENDH DESA MURBAYA	003.22.70863.01-7
6	Desa Pemepek	69.854.810,16	70.575.176,86	33.341.170,33	173.771.157,35	BEND DS PEMEPEK	003.22.70836.01-1
7	Desa Sepakek	71.308.314,12	68.636.011,38	25.391.096,60	165.335.422,09	BENDH DESA SEPAKEK	003.22.70859.01-7
8	Desa Arjangka	65.644.361,08	66.167.698,62	25.434.480,85	157.246.540,55	BNDH DESA ARJANGKA	003.22.76236.01-4
9	Desa Taman Indah	67.665.554,24	63.539.662,26	25.112.126,32	156.317.342,81	BEND.DS TAMAN INDAH	003.22.76241.01-2
10	Desa Sisik	63.694.974,12	65.631.924,30	25.053.104,66	154.380.003,07	BENDH DS SISIK	003.22.76228.01-3
11	Desa Menemeng	65.555.678,80	66.051.722,54	25.571.855,38	157.179.256,71	BENDH DS MENEMENG	003.22.76234.01-8
8	KEC. JONGGAT						
1	Desa Jelantik	73.661.050,24	79.058.145,14	28.025.072,42	180.744.267,79	BENDH DESA JELANTIK	003.22.70855.01-6
2	Desa Labulia	78.984.287,28	78.995.566,70	28.343.496,25	186.323.350,22	BENDH DESA LABULIA	003.22.70780.01-2
3	Desa Sukarare	76.605.912,60	84.833.195,02	29.738.002,50	191.177.110,11	BENDH DS SUKARARA	003.22.70820.01-7
4	Desa Puyung	97.513.991,88	94.491.753,42	44.736.957,19	236.742.702,49	BENDH DESA PUYUNG	003.22.70769.01-8
5	Desa Nyerot	71.441.220,72	69.065.241,74	26.355.918,92	166.862.381,37	BENDH DESA NYEROT	003.22.70799.01-8
6	Desa Batutulis	63.512.450,24	66.797.997,02	25.173.543,09	155.483.990,34	BENDH DS BATU TULIS	003.22.70861.01-2
7	Desa Ubung	76.556.672,48	76.535.388,14	27.225.882,55	180.317.943,16	BEND DS UBUNG	003.22.70839.01-4
8	Desa Bonjeruk	75.998.976,28	76.145.044,46	28.283.260,54	180.427.281,28	BENDH DESA BONJERUK	003.22.70851.01-5
9	Desa Perina	65.716.089,44	68.996.834,18	26.297.711,00	161.010.634,61	BEND DS PERINA	003.22.70788.01-4
10	Desa Barejulat	71.690.350,68	71.516.107,02	25.956.547,56	169.163.005,25	BENDH DESA BAREJULAT	003.22.70816.01-7
11	Desa Pongenjek	73.026.437,52	72.853.967,46	26.326.387,01	172.206.791,99	BENDH DESA PENGENJEK	003.22.70930.01-0
12	Desa Bunkate	65.083.244,80	66.582.266,46	26.621.137,79	158.286.649,04	BENDH DESA BUNKATE	003.22.70800.01-4
13	Desa Gemel	64.645.614,96	67.159.270,50	25.124.271,23	156.929.156,69	BEND DS GEMEL	003.22.70778.01-7

No.	Nama Desa	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 1 2025	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 2 2025	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 3 2025	Total Penyaluran	Nama Bendahara	No. Rekening
9	KEC. BATUKLIANG						
1	Desa Mantang	82.208.713,76	74.838.707,94	27.279.379,48	184.326.801,17	BENDH DESA MANTANG	015.22.33194.02-6
2	Desa Beber	70.310.578,48	68.323.460,94	25.636.470,84	164.270.510,25	BENDH DESA BEBER	015.22.33191.02-3
3	Desa Pagutan	67.518.903,56	68.200.175,66	25.574.050,03	161.293.129,24	BENDH DESA PAGUTAN	015.22.33182.02-4
4	Desa Barabali	75.585.610,92	76.346.153,38	25.798.327,50	177.730.091,79	Bendaharawan Desa Barabali	015.22.33198.02-7
5	Desa Bujak	70.855.804,52	71.952.198,94	25.820.831,93	168.628.835,39	BENDH DESA BUJAK	015.22.33190.02-5
6	Desa Peresak	66.882.336,40	68.871.319,18	25.137.449,40	160.891.104,97	BENDH DESA PRESAK	015.22.33192.02-1
7	Desa Selebung	69.558.197,00	68.642.849,38	24.923.452,99	163.124.499,37	BENDH DESA SELEBUNG	015.22.33183.02-2
8	Desa Aik Darek	72.877.762,80	74.430.474,58	27.870.246,55	175.178.483,92	BENDH DESA AIK DAREK	015.22.33185.02-7
9	Desa Tampak Siring	64.377.476,12	65.802.296,22	25.242.017,71	155.421.790,05	Bends. Ds Tampak Siring	015.22.33195.02-4
10	Desa Mekar Bersatu	61.404.177,24	63.067.507,58	24.819.982,62	149.291.667,44	BENDES MEKAR BERSATU	015.22.34560.01-2
11	Desa Lendang Tampel	59.387.036,52	60.564.259,10	25.072.534,54	145.023.830,15	BENDH DS Lendang Tampel	015.02.01.373.27-1
10	KEC. BATUKLIANG UTARA						
1	Desa Teratak	72.645.981,80	73.565.855,58	26.672.798,22	172.884.635,60	BEND DS TERATAK	003.22.70784.01-3
2	Desa Aik Berik	70.758.892,52	68.242.753,26	25.501.230,57	164.502.876,35	BEND DS AIK BERIK	003.22.70915.01-5
3	Desa Aik Bukak	69.157.691,64	72.920.615,74	25.129.340,07	167.207.647,44	BENDH DESA AIK BUKAQ	015.22.03053.01-9
4	Desa Tanak Beak	65.892.622,00	70.057.120,66	26.507.679,25	162.457.421,90	BEND DESA TANAK BEAK	003.22.70809.01-4
5	Desa Karang Sidemen	68.432.243,52	66.517.409,38	25.125.895,13	160.075.548,02	BENDH DS KARANG SIDE	003.22.70906.01-6
6	Desa Lantan	64.741.665,00	64.745.054,58	25.722.305,02	155.209.024,59	Bend. Desa Lantan	003.22.70811.01-8
7	Desa Mas mas	64.055.007,80	67.192.841,14	24.795.045,07	156.042.894,01	BENDH DESA MAS MAS	003.22.70866.01-1
8	Desa Seteling	66.453.633,32	65.928.936,86	25.607.302,48	157.989.872,65	BENDH DS SETILING	003.22.70766.01-5
11	KEC. PRAYA BARAT						
1	Desa Batujai	103.245.975,16	111.427.565,38	46.058.687,44	260.732.227,98	BENDH DESA BATUJAI	003.22.70868.01-6
2	Desa Penujak	121.707.674,40	119.523.525,86	48.667.161,05	289.898.361,30	BENDH DESA PENUJAK	003.22.70852.01-3
3	Desa Mangkung	80.260.132,36	79.972.302,98	26.438.336,07	186.670.771,40	BEND DS MANGKUNG	003.22.70901.01-7
4	Desa Kateng	76.662.802,96	82.139.400,98	25.031.996,27	183.834.200,21	BENDH DESA KATENG	003.22.70948.01-8
5	Desa Bonder	74.786.045,64	74.749.619,78	25.119.254,63	174.654.920,05	BENDH DESA BONDER	003.22.70869.01-4
6	Desa Setanggor	66.966.082,28	69.672.571,10	24.860.163,52	161.498.816,90	BENDH DSSETANGGOR	003.22.70806.01-1
7	Desa Banyu Urip	65.931.634,60	67.428.164,02	24.885.128,07	158.244.926,68	BEND DS BANYU URIP	003.22.70911.01-4
8	Desa Mekar Sari	245.716.167,00	243.847.715,10	86.834.422,33	576.398.304,43	BENDH DESA MEKAR SARI	003.22.70939.01-0
9	Desa Selong Belanak	324.373.760,60	481.060.508,94	136.759.419,75	942.193.689,28	BEND DS SELONG BELANAK	003.22.70841.01-8
10	Desa Tanak Rarang	61.050.139,72	62.423.992,86	24.834.775,41	148.308.907,98	BEND.DESA TANAK RARANG	003.22.76207.01-2

No.	Nama Desa	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 1 2025	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 2 2025	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Tahap 3 2025	Total Penyaluran	Nama Bendahara	No. Rekening
12	KEC. PRAYA BARAT DAYA						
1	Desa Montong Sapah	66.224.841,76	66.716.453,66	25.021.076,10	157.962.371,52	BNDH DESA MT SAPAH	003.22.78623.01-5
2	Desa Kabul	68.018.031,44	66.930.207,34	25.089.454,30	160.037.693,07	BENDH DESA KABUL	003.22.70950.01-3
3	Desa Pelambik	65.058.897,04	69.112.463,98	25.576.226,36	159.747.587,38	BENDH DESA PLAMBIK	003.22.70947.01-1
4	Desa Ranggagata	65.220.449,56	65.734.500,34	25.376.071,65	156.331.021,54	BEND DS RANGGAGATA	003.22.70902.01-5
5	Desa Ungga	68.845.718,24	70.387.191,50	26.585.544,53	165.818.454,27	BEND DESA UNGGA	003.22.44067.01-9
6	Desa Darek	71.961.550,52	73.083.307,90	27.357.087,39	172.401.945,80	BENDH DESA DAREK	003.22.70943.01-0
7	Desa Teduh	61.813.844,80	62.623.596,50	24.439.063,65	148.876.504,94	BEND.DS TEDUH	003.22.76226.01-7
8	Desa Batujangkih	66.456.065,80	69.908.556,66	27.413.097,90	163.777.720,36	BEND DS BATU JANGKIH	003.22.70849.01-1
9	Desa Serage	65.127.370,72	64.911.987,58	24.589.672,06	154.629.030,35	BEND. DS SERAGE	003.22.00567.01-9
10	Desa Montong Ajan	178.477.352,52	233.430.817,70	82.494.579,84	494.402.750,06	BENDH DESA M AJAN	003.22.70928.01-5
11	Desa Pandan Indah	63.315.030,08	65.448.902,66	24.896.760,83	153.660.693,56	BEND DESA PANDAN INDAH	003.22.70772.01-1
12	Desa Pandan Tinggang	59.332.540,52	60.122.421,10	24.594.149,46	144.049.111,07	BENDH DS Pandan Tinggang	510.02.00060.06-6
JUMLAH		12.621.904.951,87	13.003.015.589,20	5.019.134.495,79	30.644.055.036,86		

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
REKAPITULASI PENYALURAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI KE DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

N O	NAMA DESA	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap 1 2025	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap II 2025	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap III 2025	Total Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi ke Desa	Nama Bendahara	No. Rekening
1	KEC. PUJUT						
1	Desa Kuta	84.296.289,60	81.528.709,64	75.773.037,17	241.598.036,42	BENDH DS KUTE	003.22.76244.01-
2	Desa Mertak	2.756.593,52	2.272.295,44	10.392.475,43	15.421.364,40	BEND DS MERTAK	003.22.70826.01-4
3	Desa Sengkol	9.489.145,96	8.858.820,88	15.406.453,13	33.754.419,98	BEND DS SENGKOL	003.22.70827.01-
4	Desa Bangket Parak	2.590.952,44	2.287.495,44	3.552.322,35	8.430.770,23	BENDH DS BANGKET	003.22.76211.01-
5	Desa Rembitan	2.526.952,44	2.526.835,44	3.754.732,08	8.808.519,96	BENDH DESA REMBITAN	003.22.70815.01-
6	Desa Pengembur	2.628.616,28	2.726.075,44	3.891.814,23	9.246.505,96	BENDH DESA PENGEMBUR	003.22.70931.01-
7	Desa Teruwai	2.554.646,92	3.192.224,64	10.018.270,43	15.765.142,00	BEND DS TERUWAI	003.22.70819.01-
8	Desa Kawo	3.177.221,96	2.260.215,44	3.505.368,05	8.942.805,46	BENDAHARA DESA KAWO	003.22.49245.01-
9	Desa Ketara	2.526.952,44	2.239.495,44	3.507.509,05	8.273.956,94	BENDH DS KETARA	003.22.70787.01-
10	Desa Tanak Awu	2.725.152,44	2.383.495,44	3.527.073,65	8.635.721,54	BENDH DESA TANAK AWU	003.22.70914.01-
11	Desa Tumpak	4.394.048,72	6.333.363,52	3.708.824,08	14.436.236,33	BENDH DESA TUMPAK	003.22.70813.01-
12	Desa Prabu	2.526.952,44	3.836.503,44	4.340.349,43	10.703.805,32	BEND DS PRABU	003.22.70840.01-
13	Desa Sukadana	2.718.582,24	3.068.602,56	3.601.890,87	9.389.075,68	BEND DS SUKADANA	003.22.70777.01-
14	Desa Segala Anyar	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDH DESA SEGALA A	003.22.70770.01-
15	Desa Pengengat	2.739.682,52	2.443.575,44	3.500.787,42	8.684.045,39	BENDH DESA PENGENGAT	003.22.70796.01-
16	Desa Gapura	2.635.512,44	2.306.455,44	3.514.239,10	8.456.206,99	BENDH DESA GAPURA	003.22.70860.01-
17	Desa Dadap	2.639.944,44	2.239.495,44	3.711.851,97	8.591.291,86	BENDH DS Dadap	510.02.00059.06-
18	Desa Kerame Jati	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDH DS Kerame Jati	510.02.00061.06-
2	KEC. PRAYA	-	-		-		
1	Desa Bunut Baik	3.570.158,84	2.545.356,84	3.548.470,34	9.663.986,03	BENDH DS BUNUT B	003.22.70765.01-
2	Desa Jago	2.526.952,44	2.984.355,04	3.515.524,20	9.026.831,69	BENDH DESA JAGO	003.22.70783.01-
3	Desa Aik Mual	5.513.019,64	2.593.786,64	8.810.479,31	16.917.285,59	BENDH.DESA AIK MUAL	003.22.76425.01-
4	Desa Montong Terep	2.604.952,44	3.039.495,44	4.091.062,85	9.735.510,74	BENDH DS MONOTONG	003.22.70763.01-

N O	NAMA DESA	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap 1 2025	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap II 2025	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap III 2025	Total Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi ke Desa	Nama Bendahara	No. Rekening
5	Desa Mertak Tombok	2.546.219,64	2.727.543,56	3.584.011,80	8.857.775,01	Bendes Mertak Tombok	003.22.70762.01-
6	Desa Mekar Damai	2.526.952,44	2.263.775,44	3.533.570,07	8.324.297,96	BEND DS MEKAR DAMAI	003.22.76102.01-
3	KEC. PRAYA TENGAH	-	-		-		
1	Desa Lajut	2.880.820,68	2.606.938,64	3.550.794,66	9.038.553,99	BENDH DESA LAJUT	003.22.70798.01-
2	Desa Batunyala	3.050.708,56	2.932.040,00	10.699.626,80	16.682.375,37	BEND DESA BATUNYALA	003.22.01503.02-
3	Desa Pejanggih	3.126.952,44	3.142.015,44	3.500.787,42	9.769.755,31	BENDH DESA PEJANGGIK	003.22.70837.01-
4	Desa Kelebu	2.631.792,44	2.311.615,44	3.680.130,89	8.623.538,78	BENDH DS KELEBUH	003.22.70832.01-
5	Desa Beraim	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDAHARA DESA BERAIM	003.22.70775.01-
6	Desa Pengadang	2.854.309,00	3.039.890,92	10.956.558,36	16.850.758,28	BEND DS PENGADANG	003.22.70776.01-
7	Desa Jurang jaler	2.526.952,44	2.300.577,04	3.503.205,89	8.330.735,38	BENDH DESA JURANG	003.22.70808.01-
8	Desa Prai Meke	2.526.952,44	2.288.450,16	3.502.098,14	8.317.500,75	BEND. DESA PRAI MEKE	003.22.76196.01-
9	Desa Dakung	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDH DESA DAKUNG	003.22.76210.01-
10	Desa Lelong	2.526.952,44	2.239.513,92	3.500.787,42	8.267.253,79	BENDH DS Lelong	003.02.01042.06-
4	KEC. PRAYA TIMUR	-	-		-		
1	Desa Semoyang	2.526.952,44	2.239.495,44	3.597.361,83	8.363.809,72	BEND DS SEMOYANG	003.22.70786.01-
2	Desa Ganti	2.953.152,44	2.378.695,44	11.378.972,18	16.710.820,07	BENDH DESA GANTI	003.22.70940.01-
3	Desa Mujur	4.296.474,12	3.130.881,44	10.912.839,06	18.340.194,63	BENDH DESA MUJUR	003.22.73344.01-7
4	Desa Sengkerang	2.848.672,44	2.773.012,32	3.631.881,47	9.253.566,24	BENDH DESA	003.22.70814.01-
5	Desa Beleke	2.971.340,40	2.322.055,44	3.656.651,15	8.950.047,00	BENDH DESA BELEKA	003.22.70941.01-
6	Desa Sukaraja	2.526.952,44	2.299.259,44	3.523.784,66	8.349.996,55	BENDH DESA SUKARAJA	003.22.70871.01-
7	Desa Kidang	2.526.952,44	2.514.366,88	3.922.437,16	8.963.756,49	BENDH DESA KIDANG	003.22.70946.01-
8	Desa Landah	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDH DS LANDAH	003.22.73603.01-
9	Desa Bilelando	2.526.952,44	2.366.555,44	3.500.787,42	8.394.295,31	BENS DS BILELANDO	003.22.70952.01-
10	Desa Marong	2.561.430,04	2.239.495,44	3.715.781,95	8.516.707,43	BEND DS MARONG	003.22.70843.01-
11	Desa Beleke Daye	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDH DS Beleke Daye	005.02.0102.06-2
12	Desa Beleke Lebe Sane	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDH DS Beleke Lebe Sane	003.02.01048.06 -
13	Desa Pengonak	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDH DS Pengonak	003.02.01025.06-
14	Desa Jero Puri	2.526.952,44	2.239.495,44	3.706.547,87	8.472.995,76	BENDH DS Jero Puri	003.02.01043.06-

N O	NAMA DESA	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap 1 2025	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap II 2025	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap III 2025	Total Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi ke Desa	Nama Bendahara	No. Rekening
5	KEC. JANAPRIA	-	-	-	-		
1	Desa Loang Make	2.526.952,44	2.453.144,56	3.521.321,49	8.501.418,50	BENDH DESA LOANG MAK	003.22.70773.01-
2	Desa Lekor	2.770.292,36	2.304.669,52	3.508.891,47	8.583.853,36	BENDH DESA LEKOR	015.22.33189.02-
3	Desa Saba	3.361.470,04	2.239.495,44	3.500.787,42	9.101.752,91	BENDES SABA	015.22.03085.01-
4	Desa Janapria	3.260.396,52	3.148.173,44	5.295.448,77	11.704.018,74	BENDH DESA JANAPRIA	015.22.33181.02-
5	Desa Pendem	3.202.992,44	2.633.295,44	4.496.307,27	10.332.595,16	BENDH DESA PENDEM	015.22.33204.02-
6	Desa Durian	2.526.952,44	2.251.695,44	3.503.158,87	8.281.806,76	BENDH.DESA DUARIAN	015.22.33179.02-
7	Desa Langko	2.652.552,44	2.408.215,44	10.616.807,78	15.677.575,67	BENDH DESA LANGKO	003.22.70767.01-
8	Desa BAKAN	2.526.952,44	2.377.774,24	3.500.787,42	8.405.514,11	BENDH DESA BAKAN	015.22.33180.02-
9	Desa Selebung Rembige	2.526.952,44	2.251.695,44	3.523.676,55	8.302.324,44	BENDH DESA SELEBUNG	003.22.73236.01-
10	Desa Kerembong	2.684.233,52	2.437.515,44	3.514.082,55	8.635.831,52	BENDH DESA KEREMBONG	015.22.33186.02-
11	Desa Jango	2.526.952,44	2.290.835,44	3.500.787,42	8.318.575,31	DESA JANGO	003.22.76079.01-
12	Desa Setuta	3.369.289,64	2.331.495,44	3.500.787,42	9.201.572,51	BENDES STUTA	015.22.34561.01-
13	Desa Prako	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDH DS Prako	015.02.01501.27-
14	Desa Tibu Sisok	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDH DS Tibu Sisok	003.02.01050.06-
15	Desa Janggawana	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDH DS Jangawana	015.02.01446.27-
16	Desa Lingkok Berenge	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDH DS Lingkok Berenge	015.02.01500.27-
6	KEC. KOPANG	-	-	-	-		
1	Desa Muncan	2.545.292,92	2.246.895,44	10.424.980,41	15.217.168,78	BENDH DESA MUNCAN	015.22.33202.02-
2	Desa Monggas	2.526.952,44	2.263.835,44	3.500.787,42	8.291.575,31	BENDH DESA MONGGAS	003.22.70834.01-
3	Desa Darmaji	3.091.352,44	2.314.055,44	3.500.787,42	8.906.195,31	BENDH DESA DARMAJI	015.22.33184.02-
4	Desa Dasan Baru	2.526.952,44	2.315.115,44	3.510.764,86	8.352.832,74	BEND DESA DASAN BARU	015.02.00110.21-
5	Desa Kopang Rembiga	29.288.552,44	18.929.913,44	48.943.386,59	97.161.852,48	BENDH DESA KOPANG	015.22.03389.01-
6	Desa Montong Gamang	3.326.952,44	2.653.762,64	3.502.180,20	9.482.895,29	BENDH DESA MTG GAMANG	015.22.33201.02-
7	Desa Lendang Are	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDES LENDANG ARE	015.22.33196.02-
8	Desa Bebuak	2.526.952,44	2.239.495,44	3.505.207,95	8.271.655,84	BENDH DESA BEBUAK	015.22.33197.02-
9	Desa Wajegeseng	2.679.177,08	2.458.295,44	10.678.302,43	15.815.774,96	BENDH DESA	015.22.33207.02-
10	Desa Semparu	2.985.578,44	2.444.295,44	4.160.367,52	9.590.241,41	BENDES SEMPARU	015.22.34565.01-

N O	NAMA DESA	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap 1 2025	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap II 2025	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap III 2025	Total Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi ke Desa	Nama Bendahara	No. Rekening
11	Desa Aik Bual	2.526.952,44	2.239.495,44	3.512.286,04	8.278.733,93	BENDES AIK BUAL	015.22.34564.01-
12	Desa Brinding	3.233.778,00	2.239.495,44	3.500.787,42	8.974.060,87	BENDH DS Brinding	015.02.01457.27-
13	Desa Pajangan	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDH DS Pajangan	015.0201448.27-6
7	KEC. PRINGGARATA	-	-	-	-		
1	Desa Pringgarata	4.728.681,52	3.995.939,28	13.893.116,43	22.617.737,24	BENDH DESA PR RATA	003.22.70877.01-
2	Desa Bilebante	3.126.952,44	2.257.975,44	3.505.544,90	8.890.472,79	BEND DS BILEBANTE	003.22.70823.01-
3	Desa Bagu	2.526.952,44	2.251.495,44	10.517.818,30	15.296.266,19	BEND. DS BAGU	003.22.70824.01-
4	Desa Sintung	2.526.952,44	2.285.765,20	3.528.576,99	8.341.294,63	BENDH DS SINTUNG	003.22.01456.01-
5	Desa Murbaya	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDH DESA MURBAYA	003.22.70863.01-
6	Desa Pemepek	2.526.952,44	3.403.854,16	9.040.476,35	14.971.282,96	BEND DS PEMEPEK	003.22.70836.01-
7	Desa Sepakek	2.526.952,44	2.295.495,44	3.500.787,42	8.323.235,31	BENDH DESA SEPAKEK	003.22.70859.01-
8	Desa Arjangka	2.526.952,44	2.401.615,56	3.531.105,86	8.459.673,87	BNDH DESA ARJANGKA	003.22.76236.01-
9	Desa Taman Indah	2.526.952,44	2.239.495,44	3.501.713,35	8.268.161,24	BEND.DS TAMAN INDAH	003.22.76241.01-
10	Desa Sisik	2.646.952,44	2.239.495,44	3.512.286,04	8.398.733,93	BENDH DS SISIK	003.22.76228.01-
11	Desa Menemeng	2.543.087,32	2.313.415,44	3.710.906,32	8.567.409,09	BENDH DS MENEMENG	003.22.76234.01-
8	KEC. JONGGAT	-	-	-	-		
1	Desa Jelantik	2.526.952,44	2.239.495,44	3.503.680,52	8.270.128,41	BENDH DESA JELANTIK	003.22.70855.01-
2	Desa Labulia	3.326.952,44	2.251.695,44	3.504.175,44	9.082.823,33	BENDH DESA LABULIA	003.22.70780.01-
3	Desa Sukarare	2.642.432,44	2.485.935,44	3.704.093,00	8.832.460,89	BENDH DS SUKARARA	003.22.70820.01-
4	Desa Puyung	3.372.028,60	3.598.816,32	5.227.820,46	12.198.665,38	BENDH DESA PUYUNG	003.22.70769.01-
5	Desa Nyerot	2.526.952,44	2.395.495,44	3.500.787,42	8.423.235,31	BENDH DESA NYEROT	003.22.70799.01-
6	Desa Batutulis	2.526.952,44	2.239.495,44	3.506.392,23	8.272.840,12	BENDH DS BATU TULIS	003.22.70861.01-
7	Desa Ubung	3.345.024,84	2.633.186,56	10.404.070,35	16.382.281,76	BEND DS UBUNG	003.22.70839.01-
8	Desa Bonjeruk	3.082.957,44	3.361.192,96	11.502.727,21	17.946.877,62	BENDH DESA BONJERUK	003.22.70851.01-
9	Desa Perina	2.642.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.383.235,31	BEND DS PERINA	003.22.70788.01-
10	Desa Barejulat	2.526.952,44	2.266.936,48	3.525.191,76	8.319.080,68	BENDH DESA BAREJULAT	003.22.70816.01-
11	Desa Pengenjek	3.326.952,44	2.257.975,44	3.717.447,62	9.302.375,51	BENDH DESA PENGENJEK	003.22.70930.01-
12	Desa Bunkate	2.692.312,44	2.278.935,44	3.614.610,78	8.585.858,67	BENDH DESA BUNKATE	003.22.70800.01-

N O	NAMA DESA	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap 1 2025	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap II 2025	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap III 2025	Total Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi ke Desa	Nama Bendahara	No. Rekening
13	Desa Gemel	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BEND DS GEMEL	003.22.70778.01-
9	KEC. BATUKLIANG	-	-	-	-		
1	Desa Mantang	2.825.123,96	2.351.975,44	13.734.382,01	18.911.481,42	BENDH DESA MANTANG	015.22.33194.02-
2	Desa Beber	2.669.424,52	2.463.895,44	3.500.787,42	8.634.107,39	BENDH DESA BEBER	015.22.33191.02-
3	Desa Pagutan	2.526.952,44	2.257.975,44	3.501.916,76	8.286.844,65	BENDH DESA PAGUTAN	015.22.33182.02-
4	Desa Barabali	5.993.559,80	5.041.724,24	8.198.914,46	19.234.198,51	Bendaharawan Desa Barabali	015.22.33198.02-
5	Desa Bujak	2.588.337,24	2.660.032,96	3.500.787,42	8.749.157,63	BENDH DESA BUJAK	015.22.33190.02-
6	Desa Peresak	2.662.112,44	2.492.735,44	3.502.514,90	8.657.362,79	BENDH DESA PRESAK	015.22.33192.02-
7	Desa Selebung	2.549.028,04	3.961.008,52	3.683.290,98	10.193.327,54	BENDH DESA SELEBUNG	015.22.33183.02-
8	Desa Aik Darek	2.526.952,44	2.239.495,44	3.526.017,99	8.292.465,88	BENDH DESA AIK DAREK	015.22.33185.02-
9	Desa Tampak Siring	2.526.952,44	2.239.495,44	3.527.478,29	8.293.926,18	Bends. Ds Tampak Siring	015.22.33195.02-
10	Desa Mekar Bersatu	2.997.380,24	2.239.495,44	3.500.787,42	8.737.663,11	BENDES MEKAR BERSATU	015.22.34560.01-
11	Desa Lendang Tampel	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDH DS Lendang Tampel	015.02.01.373.27-
10	KEC. BATUKLIANG UTARA	-	-	-	-		
1	Desa Teratak	3.308.060,36	2.804.140,88	12.575.211,01	18.687.412,26	BEND DS TERATAK	003.22.70784.01-
2	Desa Aik Berik	2.526.952,44	2.239.495,44	3.513.553,51	8.280.001,40	BEND DS AIK BERIK	003.22.70915.01-
3	Desa Aik Bukak	6.475.127,52	5.859.939,44	4.578.745,76	16.913.812,73	BENDH DESA AIK BUKAQ	015.22.03053.01-
4	Desa Tanak Beak	2.712.540,52	2.441.661,80	9.789.657,44	14.943.859,77	BEND DESA TANAK BEAK	003.22.70809.01-
5	Desa Karang Sidemen	3.360.931,20	2.239.495,44	3.502.098,14	9.102.524,79	BENDH DS KARANG SIDE	003.22.70906.01-
6	Desa Lantan	2.526.952,44	2.239.495,44	3.503.688,29	8.270.136,18	Bend. Desa Lantan	003.22.70811.01-
7	Desa Mas mas	2.632.368,44	2.239.495,44	3.502.058,84	8.373.922,73	BENDH DESA MAS MAS	003.22.70866.01-
8	Desa Seteling	2.526.952,44	2.239.495,44	4.600.000,48	9.366.448,37	BENDH DS SETILING	003.22.70766.01-
11	KEC. PRAYA BARAT	-	-	-	-		
1	Desa Batujai	9.197.572,12	3.762.871,68	10.851.825,53	23.812.269,34	BENDH DESA BATUJAI	003.22.70868.01-
2	Desa Penujak	3.244.537,44	2.479.335,44	11.009.733,58	16.733.606,47	BENDH DESA PENUJAK	003.22.70852.01-
3	Desa Mangkung	2.626.952,44	2.565.016,56	11.481.069,97	16.673.038,97	BEND DS MANGKUNG	003.22.70901.01-
4	Desa Kateng	2.558.698,28	2.239.495,44	3.516.860,70	8.315.054,43	BENDH DESA KATENG	003.22.70948.01-
5	Desa Bonder	2.526.952,44	2.302.915,44	3.529.286,88	8.359.154,77	BENDH DESA BONDER	003.22.70869.01-

N O	NAMA DESA	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap 1 2025	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap II 2025	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Tahap III 2025	Total Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi ke Desa	Nama Bendahara	No. Rekening
6	Desa Setanggor	2.526.952,44	2.239.495,44	3.519.835,77	8.286.283,66	BENDH DSSETANGGOR	003.22.70806.01-
7	Desa Banyu Urip	2.720.413,96	2.265.695,44	3.503.184,30	8.489.293,71	BEND DS BANYU URIP	003.22.70911.01-
8	Desa Mekar Sari	4.396.251,48	3.683.602,56	6.473.751,81	14.553.605,85	BENDH DESA MEKAR SARI	003.22.70939.01-
9	Desa Selong Belanak	12.225.532,88	8.420.109,00	5.498.643,32	26.144.285,20	BEND DS SELONG BELANAK	003.22.70841.01-
10	Desa Tanak Rarang	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BEND.DESA TANAK	003.22.76207.01-
12	KEC. PRAYA BARAT DAY	-	-	-	-		
1	Desa Montong Sapah	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BNDH DESA MT SAPAH	003.22.78623.01-
2	Desa Kabul	2.526.952,44	2.319.876,32	3.693.400,00	8.540.228,77	BENDH DESA KABUL	003.22.70950.01-
3	Desa Pelambik	2.526.952,44	2.323.635,44	3.542.844,21	8.393.432,10	BENDH DESA PLAMBIK	003.22.70947.01-
4	Desa Ranggagata	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BEND DS RANGGAGATA	003.22.70902.01-
5	Desa Ungga	2.543.439,48	2.270.175,44	3.500.787,42	8.314.402,35	BEND DESA UNGGA	003.22.44067.01-
6	Desa Darek	2.803.192,44	2.494.960,12	12.013.383,33	17.311.535,90	BENDH DESA DAREK	003.22.70943.01-
7	Desa Teduh	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BEND.DS TEDUH	003.22.76226.01-
8	Desa Batujangkih	2.628.912,44	3.906.215,44	10.558.591,73	17.093.719,62	BEND DS BATU JANGKIH	003.22.70849.01-
9	Desa Serage	2.526.952,44	2.460.893,64	3.500.787,42	8.488.633,51	BEND. DS SERAGE	003.22.00567.01-
10	Desa Montong Ajan	6.024.259,88	8.315.147,48	3.822.061,43	18.161.468,80	BENDH DESA M AJAN	003.22.70928.01-
11	Desa Pandan Indah	2.526.952,44	2.239.495,44	3.512.259,02	8.278.706,91	BEND DESA PANDAN INDAH	003.22.70772.01-
12	Desa Pandan Tinggang	2.526.952,44	2.239.495,44	3.500.787,42	8.267.235,31	BENDH DS Pandan Tinggang	510.02.00060.06-
JUMLAH		534.208.208,90	475.237.079,00	821.695.470,90	1.831.140.758,80		

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
REKAPITULASI REALISASI BELANJA ALOKASI DANA DESA DAN SILTAP
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA DESA	SILTAP	ADD	Total Penyaluran
1	2	3	4	5
1	Mertak Tombok	629.724.000,00	145.615.200,00	775.339.200,00
2	Aik Mual	680.940.000,00	156.597.200,00	837.537.200,00
3	Montong Terep	834.588.000,00	191.519.200,00	1.026.107.200,00
4	Jago	904.216.000,00	287.084.380,00	1.191.300.380,00
5	Bunut Baik	911.412.000,00	222.613.200,00	1.134.025.200,00
6	Mekar Damai	750.780.000,00	219.323.000,00	970.103.000,00
7	Barejulat	674.948.000,00	218.757.100,00	893.705.100,00
8	Ubung	759.122.000,00	218.657.350,00	977.779.350,00
9	Jelantik	808.980.000,00	202.080.200,00	1.011.060.200,00
10	Labulia	655.332.000,00	253.919.200,00	909.251.200,00
11	Batu Tulis	465.794.000,00	205.875.980,00	671.669.980,00
12	Perina	529.620.000,00	129.073.600,00	658.693.600,00
13	Pengenjek	860.196.000,00	208.844.200,00	1.069.040.200,00
14	Puyung	834.588.000,00	338.337.000,00	1.172.925.000,00
15	Nyerot	555.228.000,00	131.346.600,00	686.574.600,00
16	Sukarara	680.940.000,00	208.701.200,00	889.641.200,00
17	Gemel	615.174.000,00	161.843.650,00	777.017.650,00
18	Bonjeruk	783.372.000,00	199.243.200,00	982.615.200,00
19	Bunkate	502.848.000,00	189.406.100,00	692.254.100,00
20	Bujak	900.984.000,00	235.013.000,00	1.135.997.000,00
21	Selebung	808.980.000,00	315.851.200,00	1.124.831.200,00
22	Peresak	808.980.000,00	174.467.200,00	983.447.200,00
23	Mantang	894.340.000,00	204.627.400,00	1.098.967.400,00
24	Aik Darek	728.664.000,00	218.207.100,00	946.871.100,00
25	Tampak Siring	680.940.000,00	181.278.680,00	862.218.680,00
26	Barabali	964.140.000,00	300.505.870,00	1.264.645.870,00
27	Beber	608.772.000,00	193.606.200,00	802.378.200,00
28	Lendang Tampil	529.620.000,00	126.035.600,00	655.655.600,00
29	Pagutan	808.980.000,00	200.085.200,00	1.009.065.200,00
30	Mekar Bersatu	550.232.000,00	180.497.880,00	730.729.880,00
31	Sengkol	937.020.000,00	270.584.200,00	1.207.604.200,00
32	Segala Anyar	708.876.000,00	129.691.800,00	838.567.800,00
33	Sukadana	860.196.000,00	169.695.200,00	1.029.891.200,00
34	Teruwai	911.412.000,00	319.127.800,00	1.230.539.800,00
35	Pengengat	683.268.000,00	147.360.800,00	830.628.800,00
36	Dadap	860.196.000,00	225.364.000,00	1.085.560.000,00
37	Kawo	632.052.000,00	157.146.760,00	789.198.760,00
38	Gapura	962.628.000,00	248.834.200,00	1.211.462.200,00
39	Rembitan	937.020.000,00	291.657.200,00	1.228.677.200,00

NO	NAMA DESA	SILTAP	ADD	Total Penyaluran
1	2	3	4	5
40	Kuta	783.372.000,00	204.029.200,00	987.401.200,00
41	Pengembur	808.980.000,00	419.567.680,00	1.228.547.680,00
42	Krame Jati	1.039.452.000,00	341.816.200,00	1.381.268.200,00
43	Tumpak	661.540.000,00	176.914.800,00	838.454.800,00
44	Mertak	834.588.000,00	227.273.200,00	1.061.861.200,00
45	Prabu	768.822.000,00	160.496.200,00	929.318.200,00
46	Tanak Awu	885.804.000,00	302.970.200,00	1.188.774.200,00
47	Ketara	521.166.000,00	125.591.150,00	646.757.150,00
48	Bangket Parak	649.706.000,00	75.261.600,00	724.967.600,00
49	Bonder	920.724.000,00	264.806.518,00	1.185.530.518,00
50	Banyu Urip	629.724.000,00	266.474.600,00	896.198.600,00
51	Mangkung	917.814.000,00	407.197.070,00	1.325.011.070,00
52	Kateng	911.412.000,00	287.175.200,00	1.198.587.200,00
53	Setanggor	746.916.000,00	165.437.760,00	912.353.760,00
54	Penujak	885.804.000,00	324.081.000,00	1.209.885.000,00
55	Selong Belanak	706.548.000,00	229.174.200,00	935.722.200,00
56	Mekar Sari	635.932.000,00	262.478.000,00	898.410.000,00
57	Batujai	911.412.000,00	339.942.200,00	1.251.354.200,00
58	Tanak Rarang	462.108.000,00	235.482.600,00	697.590.600,00
59	Sukaraja	632.052.000,00	159.590.600,00	791.642.600,00
60	Beleka	606.444.000,00	137.696.600,00	744.140.600,00
61	Beleka Daye	988.236.000,00	256.832.200,00	1.245.068.200,00
62	Beleka Labesane	962.628.000,00	253.189.200,00	1.215.817.200,00
63	Semoyang	777.552.000,00	166.813.200,00	944.365.200,00
64	Mujur	905.010.000,00	260.534.200,00	1.165.544.200,00
65	Landah	708.294.000,00	149.009.600,00	857.303.600,00
66	Sengkerang	639.424.000,00	215.239.790,00	854.663.790,00
67	Bilelando	962.628.000,00	241.782.200,00	1.204.410.200,00
68	Ganti	776.268.000,00	254.981.000,00	1.031.249.000,00
69	Pengonak	549.990.000,00	139.337.450,00	689.327.450,00
70	Jero puri	524.382.000,00	134.450.750,00	658.832.750,00
71	Marong	396.342.000,00	130.683.450,00	527.025.450,00
72	Kidang	575.058.000,00	134.362.770,00	709.420.770,00
73	Lekor	1.255.836.000,00	231.748.200,00	1.487.584.200,00
74	Langko	706.548.000,00	160.297.200,00	866.845.200,00
75	Janapria	1.013.844.000,00	192.023.200,00	1.205.867.200,00
76	Loang Maka	632.052.000,00	154.152.800,00	786.204.800,00
77	Prako	646.990.000,00	138.270.800,00	785.260.800,00
78	Tibu Sisok	817.710.000,00	165.961.200,00	983.671.200,00
79	Saba	648.930.000,00	129.485.600,00	778.415.600,00
80	Jangawana	935.080.000,00	161.248.400,00	1.096.328.400,00
81	Lingkok Berenge	774.836.000,00	159.572.200,00	934.408.200,00
82	Bakan	1.010.253.100,00	175.533.800,00	1.185.786.900,00
83	Durian	830.320.100,00	144.691.600,00	975.011.700,00



NO	NAMA DESA	SILTAP	ADD	Total Penyaluran
1	2	3	4	5
84	Pendem	674.732.000,00	161.962.320,00	836.694.320,00
85	Selebung Rembiga	597.520.000,00	84.288.600,00	681.808.600,00
86	Kerembong	526.516.000,00	84.275.600,00	610.791.600,00
87	Jango	535.634.000,00	95.890.850,00	631.524.850,00
88	Setuta	547.274.000,00	75.163.000,00	622.437.000,00
89	Pringgarata	808.980.000,00	188.394.200,00	997.374.200,00
90	Sepakek	706.548.000,00	181.788.200,00	888.336.200,00
91	Murbaya	604.116.000,00	161.374.200,00	765.490.200,00
92	Bagu	732.156.000,00	150.110.200,00	882.266.200,00
93	Sintung	706.548.000,00	181.192.160,00	887.740.160,00
94	Bilebante	587.044.000,00	143.821.200,00	730.865.200,00
95	Pemepek	834.588.000,00	225.423.200,00	1.060.011.200,00
96	Menemeng	655.332.000,00	117.012.400,00	772.344.400,00
97	Arjanka	680.940.000,00	158.010.150,00	838.950.150,00
98	Taman Indah	632.052.000,00	148.502.600,00	780.554.600,00
99	Sisik	655.332.000,00	159.060.200,00	814.392.200,00
100	Lendang Are	578.508.000,00	133.930.200,00	712.438.200,00
101	Monggas	578.508.000,00	222.177.200,00	800.685.200,00
102	Muncan	680.940.000,00	163.469.200,00	844.409.200,00
103	Bebuak	732.156.000,00	233.978.520,00	966.134.520,00
104	Kopang Rembiga	683.268.000,00	247.691.380,00	930.959.380,00
105	Berinding	655.332.000,00	162.109.200,00	817.441.200,00
106	Dasan Baru	860.196.000,00	213.717.200,00	1.073.913.200,00
107	Pajangan	577.247.000,00	227.696.200,00	804.943.200,00
108	Montong Gamang	732.156.000,00	292.461.200,00	1.024.617.200,00
109	Darmaji	580.836.000,00	151.477.600,00	732.313.600,00
110	Wajageseng	529.620.000,00	117.522.600,00	647.142.600,00
111	Aik Bual	417.100.000,00	147.484.600,00	564.584.600,00
112	Semparu	442.708.000,00	135.155.600,00	577.863.600,00
113	Jurang Jaler	580.836.000,00	112.788.600,00	693.624.600,00
114	Beraim	860.196.000,00	152.783.200,00	1.012.979.200,00
115	Batunyala	691.416.000,00	248.561.600,00	939.977.600,00
116	Lajut	680.940.000,00	219.111.000,00	900.051.000,00
117	Pengadang	911.412.000,00	205.045.200,00	1.116.457.200,00
118	Kelebuh	648.348.000,00	165.313.600,00	813.661.600,00
119	Lelong	744.059.200,00	226.063.400,00	970.122.600,00
120	Pejanggik	597.132.000,00	195.025.800,00	792.157.800,00
121	Dakung	606.876.000,00	139.706.960,00	746.582.960,00
122	Prai Meke	498.774.000,00	156.713.450,00	655.487.450,00
123	Montong Sapah	760.092.000,00	274.270.800,00	1.034.362.800,00
124	Ungga	604.116.000,00	173.205.000,00	777.321.000,00
125	Kabul	706.548.000,00	188.451.200,00	894.999.200,00
126	Pelambik	839.340.000,00	276.950.360,00	1.116.290.360,00
127	Darek	732.156.000,00	216.753.200,00	948.909.200,00

NO	NAMA DESA	SILTAP	ADD	Total Penyaluran
1	2	3	4	5
128	Ranggagata	680.940.000,00	159.472.200,00	840.412.200,00
129	Pandan Indah	706.548.000,00	171.117.200,00	877.665.200,00
130	Serage	658.452.000,00	172.784.160,00	831.236.160,00
131	Montong Ajan	885.804.000,00	202.476.200,00	1.088.280.200,00
132	Batu Jangkih	809.448.000,00	124.864.480,00	934.312.480,00
133	Pandan Tinggang	485.485.000,00	192.150.600,00	677.635.600,00
134	Teduh	421.950.000,00	148.776.450,00	570.726.450,00
135	Lantan	680.940.000,00	411.550.200,00	1.092.490.200,00
136	Setiling	757.764.000,00	382.389.200,00	1.140.153.200,00
137	Tanak Beak	644.080.000,00	239.914.860,00	883.994.860,00
138	Aik Bukaq	757.764.000,00	196.364.200,00	954.128.200,00
139	Teratak	732.156.000,00	192.339.200,00	924.495.200,00
140	Aik Berik	768.822.000,00	410.174.680,00	1.178.996.680,00
141	Mas-mas	689.506.000,00	174.071.360,00	863.577.360,00
142	Karang Sidemen	775.166.000,00	373.703.000,00	1.148.869.000,00
Jumlah		102.624.586.400,00	28.710.163.378,00	131.334.749.778,00

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
REKAPITULASI BELANJA TRANTIB
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	TOTAL
1	2	3	4
1	Praya	Mertak Tombok	27.600.000,00
2	Praya	Aik Mual	41.400.000,00
3	Praya	Montong Terep	41.400.000,00
4	Praya	Jago	41.400.000,00
5	Praya	Bunut Baok	41.400.000,00
6	Praya	Mekar Damai	27.600.000,00
7	Jonggat	Barejulut	27.600.000,00
8	Jonggat	Ubung	41.400.000,00
9	Jonggat	Jelantik	27.600.000,00
10	Jonggat	Labulia	27.600.000,00
11	Jonggat	Batu Tulis	27.600.000,00
12	Jonggat	Perina	27.600.000,00
13	Jonggat	Pengenjek	27.600.000,00
14	Jonggat	Puyung	41.400.000,00
15	Jonggat	Nyerot	27.600.000,00
16	Jonggat	Sukarara	41.400.000,00
17	Jonggat	Gemel	27.600.000,00
18	Jonggat	Bonjeruk	27.600.000,00
19	Jonggat	Bunkate	27.600.000,00
20	Batukliang	Bujak	27.600.000,00
21	Batukliang	Selebung	27.600.000,00
22	Batukliang	Peresak	27.600.000,00
23	Batukliang	Mantang	27.600.000,00
24	Batukliang	Aik Darek	27.600.000,00
25	Batukliang	Tampak Siring	27.600.000,00
26	Batukliang	Barabali	27.600.000,00
27	Batukliang	Beber	27.600.000,00
28	Batukliang	Pagutan	27.600.000,00
29	Batukliang	Mekar Bersatu	27.600.000,00
30	Batukliang	Lendang Tampil	27.600.000,00
31	Pujut	Sengkol	41.400.000,00
32	Pujut	Segala Anyar	27.600.000,00
33	Pujut	Sukadana	27.600.000,00
34	Pujut	Teruwai	41.400.000,00
35	Pujut	Pengengat	41.400.000,00
36	Pujut	Kawo	41.400.000,00
37	Pujut	Gapura	27.600.000,00
38	Pujut	Rembitan	27.600.000,00
39	Pujut	Kuta	27.600.000,00
40	Pujut	Pengembur	27.600.000,00
41	Pujut	Tumpak	41.400.000,00
42	Pujut	Mertak	41.400.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	TOTAL
43	Pujut	Prabu	27.600.000,00
44	Pujut	Tanak Awu	27.600.000,00
45	Pujut	Ketara	27.600.000,00
46	Pujut	Bangket Parak	41.400.000,00
47	Pujut	Dadap	27.600.000,00
48	Pujut	Krame Jati	27.600.000,00
49	Praya Barat	Bonder	27.600.000,00
50	Praya Barat	Banyu Urip	27.600.000,00
51	Praya Barat	Mangkung	27.600.000,00
52	Praya Barat	Kateng	27.600.000,00
53	Praya Barat	Setanggor	27.600.000,00
54	Praya Barat	Penujak	41.400.000,00
55	Praya Barat	Selong Belanak	27.600.000,00
56	Praya Barat	Mekar Sari	27.600.000,00
57	Praya Barat	Batujai	41.400.000,00
58	Praya Barat	Tanak Rarang	27.600.000,00
59	Praya Timur	Sukaraja	27.600.000,00
60	Praya Timur	Beleka	27.600.000,00
61	Praya Timur	Semoyang	27.600.000,00
62	Praya Timur	Mujur	27.600.000,00
63	Praya Timur	Landah	27.600.000,00
64	Praya Timur	Sengkerang	27.600.000,00
65	Praya Timur	Bilelando	27.600.000,00
66	Praya Timur	Ganti	27.600.000,00
67	Praya Timur	Marong	27.600.000,00
68	Praya Timur	Kidang	27.600.000,00
69	Praya Timur	Beleka Daye	-
70	Praya Timur	Beleka Labesane	-
71	Praya Timur	Pengonak	27.600.000,00
72	Praya Timur	Jero puri	27.600.000,00
73	Janapria	Lekor	27.600.000,00
74	Janapria	Langko	27.600.000,00
75	Janapria	Janapria	27.600.000,00
76	Janapria	Loang Maka	27.600.000,00
77	Janapria	Saba	27.600.000,00
78	Janapria	Bakan	27.600.000,00
79	Janapria	Durian	27.600.000,00
80	Janapria	Pendem	27.600.000,00
81	Janapria	Selebung Rembiga	27.600.000,00
82	Janapria	Kerembong	27.600.000,00
83	Janapria	Jango	27.600.000,00
84	Janapria	Setuta	27.600.000,00
85	Janapria	Prako	-
86	Janapria	Tibu Sisok	-
87	Janapria	Janggawana	-
88	Janapria	Lingkok Berenge	-
89	Pringgarata	Pringgarata	27.600.000,00
90	Pringgarata	Sepakek	27.600.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	TOTAL
91	Pringgarata	Murbaya	27.600.000,00
92	Pringgarata	Bagu	27.600.000,00
93	Pringgarata	Sintung	27.600.000,00
94	Pringgarata	Bilebante	27.600.000,00
95	Pringgarata	Pemepek	27.600.000,00
96	Pringgarata	Menemeng	27.600.000,00
97	Pringgarata	Arjanka	27.600.000,00
98	Pringgarata	Taman Indah	27.600.000,00
99	Pringgarata	Sisik	27.600.000,00
100	Kopang	Lendang Are	27.600.000,00
101	Kopang	Monggas	27.600.000,00
102	Kopang	Muncan	27.600.000,00
103	Kopang	Bebuak	27.600.000,00
104	Kopang	Kopang Rembiga	27.600.000,00
105	Kopang	Dasan Baru	27.600.000,00
106	Kopang	Montong Gamang	27.600.000,00
107	Kopang	Darmaji	27.600.000,00
108	Kopang	Wajageseng	27.600.000,00
109	Kopang	Aik Bual	27.600.000,00
110	Kopang	Semparu	27.600.000,00
111	Kopang	Berinding	-
112	Kopang	Pajangan	-
113	Praya Tengah	Jurang Jaler	27.600.000,00
114	Praya Tengah	Beraim	27.600.000,00
115	Praya Tengah	Batunyala	27.600.000,00
116	Praya Tengah	Lajut	27.600.000,00
117	Praya Tengah	Pengadang	27.600.000,00
118	Praya Tengah	Kelebu	27.600.000,00
119	Praya Tengah	Pejanggik	27.600.000,00
120	Praya Tengah	Dakung	27.600.000,00
121	Praya Tengah	Prai Meke	27.600.000,00
122	Praya Tengah	Lelong	27.600.000,00
123	Praya Barat Daya	Montong Sapah	27.600.000,00
124	Praya Barat Daya	Ungga	27.600.000,00
125	Praya Barat Daya	Kabul	27.600.000,00
126	Praya Barat Daya	Pelambik	27.600.000,00
127	Praya Barat Daya	Darek	27.600.000,00
128	Praya Barat Daya	Ranggagata	27.600.000,00
129	Praya Barat Daya	Pandan Indah	27.600.000,00
130	Praya Barat Daya	Serage	27.600.000,00
131	Praya Barat Daya	Montong Ajan	27.600.000,00
132	Praya Barat Daya	Batu Jangkih	27.600.000,00
133	Praya Barat Daya	Teduh	27.600.000,00
134	Praya Barat Daya	Pandan Tinggang	-
135	Batukliang Utara	Lantan	27.600.000,00
136	Batukliang Utara	Setiling	27.600.000,00
137	Batukliang Utara	Tanak Beak	27.600.000,00
138	Batukliang Utara	Aik Bukaq	27.600.000,00
139	Batukliang Utara	Teratak	27.600.000,00
140	Batukliang Utara	Aik Berik	27.600.000,00
141	Batukliang Utara	Mas-mas	27.600.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	TOTAL
142	Batukliang Utara	Karang Sidemen	27.600.000,00
	JUMLAH		3.891.600.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
REKAPITULASI BELANJA UNTUK MARBOT
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Marbot	Jumlah/perbulan	JUMLAH TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1	Praya	Mertak Tombok	12	200.000,00	28.800.000,00
2	Praya	Aik Mual	7	200.000,00	16.800.000,00
3	Praya	Montong Terep	17	200.000,00	40.800.000,00
4	Praya	Jago	17	200.000,00	40.800.000,00
5	Praya	Bunut Baik	18	200.000,00	43.200.000,00
6	Praya	Mekar Damai	11	200.000,00	26.400.000,00
7	Jonggat	Barejulut	14	200.000,00	33.600.000,00
8	Jonggat	Ubung	17	200.000,00	40.800.000,00
9	Jonggat	Jelantik	15	200.000,00	36.000.000,00
10	Jonggat	Labulia	15	200.000,00	36.000.000,00
11	Jonggat	Batu Tulis	4	200.000,00	9.600.000,00
12	Jonggat	Perina	2	200.000,00	4.800.000,00
13	Jonggat	Pengenjek	7	200.000,00	16.800.000,00
14	Jonggat	Puyung	13	200.000,00	31.200.000,00
15	Jonggat	Nyerot	8	200.000,00	19.200.000,00
16	Jonggat	Sukarara	12	200.000,00	28.800.000,00
17	Jonggat	Gemel	10	200.000,00	24.000.000,00
18	Jonggat	Bonjeruk	9	200.000,00	21.600.000,00
19	Jonggat	Bunkate	3	200.000,00	7.200.000,00
20	Batukliang	Bujak	20	200.000,00	48.000.000,00
21	Batukliang	Selebung	15	200.000,00	36.000.000,00
22	Batukliang	Peresak	12	200.000,00	28.800.000,00
23	Batukliang	Mantang	16	200.000,00	38.400.000,00
24	Batukliang	Aik Darek	10	200.000,00	24.000.000,00
25	Batukliang	Tampak Siring	11	200.000,00	26.400.000,00
26	Batukliang	Barabali	21	200.000,00	50.400.000,00
27	Batukliang	Beber	7	200.000,00	16.800.000,00
28	Batukliang	Pagutan	12	200.000,00	28.800.000,00
29	Batukliang	Mekar Bersatu	5	200.000,00	12.000.000,00
30	Batukliang	Lendang Tampil	10	200.000,00	24.000.000,00
31	Pujut	Sengkol	16	200.000,00	38.400.000,00
32	Pujut	Segala Anyar	3	200.000,00	7.200.000,00
33	Pujut	Sukadana	11	200.000,00	26.400.000,00
34	Pujut	Teruwai	6	200.000,00	14.400.000,00
35	Pujut	Pengengat	6	200.000,00	14.400.000,00
36	Pujut	Kawo	7	200.000,00	16.800.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Marbot	Jumlah/perbulan	JUMLAH TRANSFER
1	2	3	4	5	6
37	Pujut	Gapura	4	200.000,00	9.600.000,00
38	Pujut	Rembitan	9	200.000,00	21.600.000,00
39	Pujut	Kuta	11	200.000,00	26.400.000,00
40	Pujut	Pengembur	12	200.000,00	28.800.000,00
41	Pujut	Tumpak	11	200.000,00	26.400.000,00
42	Pujut	Mertak	14	200.000,00	33.600.000,00
43	Pujut	Prabu	8	200.000,00	19.200.000,00
44	Pujut	Tanak Awu	13	200.000,00	31.200.000,00
45	Pujut	Ketara	4	200.000,00	9.600.000,00
46	Pujut	Bangket Parak	6	200.000,00	14.400.000,00
47	Pujut	Dadap	5	200.000,00	12.000.000,00
48	Pujut	Kerame Jati	11	200.000,00	26.400.000,00
49	Praya Barat	Bonder	13	200.000,00	31.200.000,00
50	Praya Barat	Banyu Urip	8	200.000,00	19.200.000,00
51	Praya Barat	Mangkung	23	200.000,00	55.200.000,00
52	Praya Barat	Kateng	11	200.000,00	26.400.000,00
53	Praya Barat	Setanggor	9	200.000,00	21.600.000,00
54	Praya Barat	Penujak	8	200.000,00	19.200.000,00
55	Praya Barat	Selong Belanak	11	200.000,00	26.400.000,00
56	Praya Barat	Mekar Sari	9	200.000,00	21.600.000,00
57	Praya Barat	Batujai	15	200.000,00	36.000.000,00
58	Praya Barat	Tanak Rarang	3	200.000,00	7.200.000,00
59	Praya Timur	Sukaraja	8	200.000,00	19.200.000,00
60	Praya Timur	Beleka	2	200.000,00	4.800.000,00
61	Praya Timur	Semoyang	17	200.000,00	40.800.000,00
62	Praya Timur	Mujur	5	200.000,00	12.000.000,00
63	Praya Timur	Landah	12	200.000,00	28.800.000,00
64	Praya Timur	Sengkerang	13	200.000,00	31.200.000,00
65	Praya Timur	Bilelando	9	200.000,00	21.600.000,00
66	Praya Timur	Ganti	4	200.000,00	9.600.000,00
67	Praya Timur	Marong	6	200.000,00	14.400.000,00
68	Praya Timur	Kidang	14	200.000,00	33.600.000,00
69	Praya Timur	Pengonak	5	200.000,00	4.800.000,00
70	Praya Timur	Jero puri	8	200.000,00	4.800.000,00
71	Praya Timur	Beleke Daye	2	200.000,00	12.000.000,00
72	Praya Timur	Beleke Lebe Sane	2	200.000,00	19.200.000,00
73	Janapria	Lekor	13	200.000,00	31.200.000,00
74	Janapria	Langko	7	200.000,00	16.800.000,00
75	Janapria	Janapria	18	200.000,00	43.200.000,00
76	Janapria	Loang Maka	7	200.000,00	16.800.000,00
77	Janapria	Saba	6	200.000,00	14.400.000,00



No.	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Marbot	Jumlah/perbulan	JUMLAH TRANSFER
1	2	3	4	5	6
78	Janapria	Bakan	10	200.000,00	24.000.000,00
79	Janapria	Durian	8	200.000,00	19.200.000,00
80	Janapria	Pendem	19	200.000,00	45.600.000,00
81	Janapria	Selebung Rembiga	10	200.000,00	24.000.000,00
82	Janapria	Kerembong	15	200.000,00	36.000.000,00
83	Janapria	Jango	7	200.000,00	16.800.000,00
84	Janapria	Setuta	9	200.000,00	21.600.000,00
85	Janapria	Prako	4	200.000,00	9.600.000,00
86	Janapria	Tibu Sisok	5	200.000,00	12.000.000,00
87	Janapria	Janggawana	5	200.000,00	12.000.000,00
88	Janapria	Lingkok Berenge	4	200.000,00	9.600.000,00
89	Pringgarata	Pringgarata	9	200.000,00	21.600.000,00
90	Pringgarata	Sepakek	12	200.000,00	28.800.000,00
91	Pringgarata	Murbaya	6	200.000,00	14.400.000,00
92	Pringgarata	Bagu	8	200.000,00	19.200.000,00
93	Pringgarata	Sintung	10	200.000,00	24.000.000,00
94	Pringgarata	Bilebante	12	200.000,00	28.800.000,00
95	Pringgarata	Pemepek	14	200.000,00	33.600.000,00
96	Pringgarata	Menemeng	9	200.000,00	21.600.000,00
97	Pringgarata	Arjanka	10	200.000,00	24.000.000,00
98	Pringgarata	Taman Indah	9	200.000,00	21.600.000,00
99	Pringgarata	Sisik	9	200.000,00	21.600.000,00
100	Kopang	Lendang Are	4	200.000,00	9.600.000,00
101	Kopang	Monggas	13	200.000,00	31.200.000,00
102	Kopang	Muncan	10	200.000,00	24.000.000,00
103	Kopang	Bebuak	13	200.000,00	31.200.000,00
104	Kopang	Kopang Rembiga	10	200.000,00	24.000.000,00
105	Kopang	Dasan Baru	15	200.000,00	36.000.000,00
106	Kopang	Montong Gamang	18	200.000,00	43.200.000,00
107	Kopang	Darmaji	9	200.000,00	21.600.000,00
108	Kopang	Wajageseng	12	200.000,00	28.800.000,00
109	Kopang	Aik Bual	7	200.000,00	16.800.000,00
110	Kopang	Semparu	4	200.000,00	9.600.000,00
111	Kopang	Brinding	6	200.000,00	14.400.000,00
112	Kopang	Pajangan	8	200.000,00	19.200.000,00
113	Praya Tengah	Jurang Jaler	7	200.000,00	16.800.000,00
114	Praya Tengah	Beraim	7	200.000,00	16.800.000,00
115	Praya Tengah	Batunyala	13	200.000,00	31.200.000,00
116	Praya Tengah	Lajut	12	200.000,00	28.800.000,00
117	Praya Tengah	Pengadang	17	200.000,00	40.800.000,00
118	Praya Tengah	Kelebu	10	200.000,00	24.000.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Marbot	Jumlah/perbulan	JUMLAH TRANSFER
1	2	3	4	5	6
119	Praya Tengah	Pejanggik	7	200.000,00	16.800.000,00
120	Praya Tengah	Dakung	7	200.000,00	16.800.000,00
121	Praya Tengah	Prai Meke	8	200.000,00	19.200.000,00
122	Praya Tengah	Lelong	7	200.000,00	16.800.000,00
123	Praya Barat Daya	Montong Sapah	6	200.000,00	14.400.000,00
124	Praya Barat Daya	Ungga	4	200.000,00	9.600.000,00
125	Praya Barat Daya	Kabul	13	200.000,00	31.200.000,00
126	Praya Barat Daya	Pelambik	6	200.000,00	14.400.000,00
127	Praya Barat Daya	Darek	5	200.000,00	12.000.000,00
128	Praya Barat Daya	Ranggagata	9	200.000,00	21.600.000,00
129	Praya Barat Daya	Pandan Indah	9	200.000,00	21.600.000,00
130	Praya Barat Daya	Serage	9	200.000,00	21.600.000,00
131	Praya Barat Daya	Montong Ajan	15	200.000,00	36.000.000,00
132	Praya Barat Daya	Batu Jangkih	8	200.000,00	19.200.000,00
133	Praya Barat Daya	Teduh	2	200.000,00	4.800.000,00
134	Praya Barat Daya	Pandan Tingang	2	200.000,00	4.800.000,00
135	Batukliang Utara	Lantan	10	200.000,00	24.000.000,00
136	Batukliang Utara	Setiling	13	200.000,00	31.200.000,00
137	Batukliang Utara	Tanak Beak	12	200.000,00	28.800.000,00
138	Batukliang Utara	Aik Bukaq	14	200.000,00	33.600.000,00
139	Batukliang Utara	Teratak	11	200.000,00	26.400.000,00
140	Batukliang Utara	Aik Berik	17	200.000,00	40.800.000,00
141	Batukliang Utara	Mas-mas	8	200.000,00	19.200.000,00
142	Batukliang Utara	Karang Sidemen	12	200.000,00	28.800.000,00
	JUMLAH		1.388,00	28.400.000,00	3.331.200.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK RUKUN TETANGGA SE-
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Honor Perbulan/(Rp)	Jumlah
1	Praya	Mertak Tombok	100.000,00	19.800.000,00
2	Praya	Aik Mual	100.000,00	20.400.000,00
3	Praya	Montong Terep	100.000,00	45.000.000,00
4	Praya	Jago	100.000,00	49.800.000,00
5	Praya	Bunut Baik	100.000,00	49.800.000,00
6	Praya	Mekar Damai	100.000,00	32.400.000,00
7	Jonggat	Barejulat	100.000,00	18.000.000,00
8	Jonggat	Ubung	100.000,00	39.600.000,00
9	Jonggat	Jelantik	100.000,00	43.800.000,00
10	Jonggat	Labulia	100.000,00	43.200.000,00
11	Jonggat	Batu Tulis	100.000,00	14.400.000,00
12	Jonggat	Perina	100.000,00	-
13	Jonggat	Pengenjek	100.000,00	42.000.000,00
14	Jonggat	Puyung	100.000,00	40.200.000,00
15	Jonggat	Nyerot	100.000,00	19.200.000,00
16	Jonggat	Sukarara	100.000,00	30.000.000,00
17	Jonggat	Gemel	100.000,00	22.800.000,00
18	Jonggat	Bonjeruk	100.000,00	27.600.000,00
19	Jonggat	Bunkate	100.000,00	6.000.000,00
20	Batukliang	Bujak	100.000,00	64.800.000,00
21	Batukliang	Selebung	100.000,00	43.200.000,00
22	Batukliang	Peresak	100.000,00	29.400.000,00
23	Batukliang	Mantang	100.000,00	39.600.000,00
24	Batukliang	Aik Darek	100.000,00	42.600.000,00
25	Batukliang	Tampak Siring	100.000,00	27.600.000,00
26	Batukliang	Barabali	100.000,00	69.000.000,00
27	Batukliang	Beber	100.000,00	27.000.000,00
28	Batukliang	Pagutan	100.000,00	40.200.000,00
29	Batukliang	Mekar Bersatu	100.000,00	13.800.000,00
30	Batukliang	Lendang Tampel	100.000,00	26.400.000,00
31	Pujut	Sengkol	100.000,00	-
32	Pujut	Segala Anyar	100.000,00	20.400.000,00
33	Pujut	Sukadana	100.000,00	36.000.000,00
34	Pujut	Teruwai	100.000,00	34.200.000,00
35	Pujut	Pengengat	100.000,00	24.600.000,00
36	Pujut	Kawo	100.000,00	46.800.000,00
37	Pujut	Gapura	100.000,00	16.800.000,00
38	Pujut	Rembitan	100.000,00	42.600.000,00
39	Pujut	Kuta	100.000,00	37.800.000,00
40	Pujut	Pengembur	100.000,00	-
41	Pujut	Tumpak	100.000,00	37.800.000,00
42	Pujut	Mertak	100.000,00	63.000.000,00
43	Pujut	Prabu	100.000,00	24.000.000,00
44	Pujut	Tanak Awu	100.000,00	21.000.000,00
45	Pujut	Ketara	100.000,00	27.000.000,00
46	Pujut	Bangket Parak	100.000,00	63.000.000,00
47	Pujut	Dadap	100.000,00	18.000.000,00
48	Pujut	Krame Jati	100.000,00	9.600.000,00
49	Praya Barat	Bonder	100.000,00	-
50	Praya Barat	Banyu Urip	100.000,00	25.200.000,00
51	Praya Barat	Mangkung	100.000,00	51.600.000,00

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Honor Perbulan/(Rp)	Jumlah
52	Praya Barat	Kateng	100.000,00	8.400.000,00
53	Praya Barat	Setanggor	100.000,00	19.200.000,00
54	Praya Barat	Penujak	100.000,00	53.400.000,00
55	Praya Barat	Selong Belanak	100.000,00	13.200.000,00
56	Praya Barat	Mekar Sari	100.000,00	12.600.000,00
57	Praya Barat	Batujai	100.000,00	49.200.000,00
58	Praya Barat	Tanak Rarang	100.000,00	4.800.000,00
59	Praya Timur	Sukaraja	100.000,00	12.600.000,00
60	Praya Timur	Beleka	100.000,00	-
61	Praya Timur	Semoyang	100.000,00	25.800.000,00
62	Praya Timur	Mujur	100.000,00	13.800.000,00
63	Praya Timur	Landah	100.000,00	12.600.000,00
64	Praya Timur	Sengkerang	100.000,00	25.800.000,00
65	Praya Timur	Bilelendo	100.000,00	11.400.000,00
66	Praya Timur	Ganti	100.000,00	-
67	Praya Timur	Marong	100.000,00	19.200.000,00
68	Praya Timur	Kidang	100.000,00	30.600.000,00
69	Praya Timur	Beleka Daye	100.000,00	12.000.000,00
70	Praya Timur	Beleka Labesane	100.000,00	-
71	Praya Timur	Pengonak	100.000,00	2.400.000,00
72	Praya Timur	Jero puri	100.000,00	8.400.000,00
73	Janapria	Lekor	100.000,00	19.200.000,00
74	Janapria	Langko	100.000,00	19.200.000,00
75	Janapria	Janapria	100.000,00	-
76	Janapria	Loang Maka	100.000,00	12.600.000,00
77	Janapria	Saba	100.000,00	15.600.000,00
78	Janapria	Bakan	100.000,00	28.800.000,00
79	Janapria	Durian	100.000,00	11.400.000,00
80	Janapria	Pendem	100.000,00	32.400.000,00
81	Janapria	Selebung Rembiga	100.000,00	-
82	Janapria	Kerembong	100.000,00	28.800.000,00
83	Janapria	Jango	100.000,00	-
84	Janapria	Setuta	100.000,00	19.800.000,00
85	Janapria	Prako	100.000,00	12.600.000,00
86	Janapria	Tibu Sisok	100.000,00	8.400.000,00
87	Janapria	Janggawana	100.000,00	20.400.000,00
88	Janapria	Lingkok Berenge	100.000,00	10.800.000,00
89	Pringgarata	Pringgarata	100.000,00	37.200.000,00
90	Pringgarata	Sepakek	100.000,00	22.800.000,00
91	Pringgarata	Murbaya	100.000,00	17.400.000,00
92	Pringgarata	Bagu	100.000,00	24.000.000,00
93	Pringgarata	Sintung	100.000,00	25.800.000,00
94	Pringgarata	Bilebante	100.000,00	12.600.000,00
95	Pringgarata	Pemepek	100.000,00	34.800.000,00
96	Pringgarata	Menemeng	100.000,00	22.800.000,00
97	Pringgarata	Arangka	100.000,00	22.800.000,00
98	Pringgarata	Taman Indah	100.000,00	18.600.000,00
99	Pringgarata	Sisik	100.000,00	12.600.000,00
100	Kopang	Lendang Are	100.000,00	13.800.000,00
101	Kopang	Monggas	100.000,00	27.000.000,00
102	Kopang	Muncan	100.000,00	30.600.000,00
103	Kopang	Bebuak	100.000,00	16.800.000,00
104	Kopang	Kopang Rembiga	100.000,00	31.800.000,00
105	Kopang	Dasan Baru	100.000,00	20.400.000,00
106	Kopang	Montong Gamang	100.000,00	18.000.000,00
107	Kopang	Darmaji	100.000,00	4.200.000,00
108	Kopang	Wajageseng	100.000,00	36.000.000,00
109	Kopang	Aik Bual	100.000,00	21.000.000,00



No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Honor Perbulan/(Rp)	Jumlah
110	Kopang	Semparu	100.000,00	9.000.000,00
111	Kopang	Berinding	100.000,00	13.800.000,00
112	Kopang	Pajangan	100.000,00	7.200.000,00
113	Praya Tengah	Jurang Jaler	100.000,00	18.600.000,00
114	Praya Tengah	Beraim	100.000,00	25.200.000,00
115	Praya Tengah	Batunyala	100.000,00	39.000.000,00
116	Praya Tengah	Lajut	100.000,00	29.400.000,00
117	Praya Tengah	Pengadang	100.000,00	48.000.000,00
118	Praya Tengah	Kelebu	100.000,00	13.200.000,00
119	Praya Tengah	Pejanggik	100.000,00	22.200.000,00
120	Praya Tengah	Dakung	100.000,00	20.400.000,00
121	Praya Tengah	Prai Meke	100.000,00	18.000.000,00
122	Praya Tengah	Lelong	100.000,00	9.600.000,00
123	Praya Barat Daya	Montong Sapah	100.000,00	8.400.000,00
124	Praya Barat Daya	Ungga	100.000,00	30.000.000,00
125	Praya Barat Daya	Kabul	100.000,00	9.600.000,00
126	Praya Barat Daya	Pelambik	100.000,00	19.800.000,00
127	Praya Barat Daya	Darek	100.000,00	22.800.000,00
128	Praya Barat Daya	Ranggagata	100.000,00	9.000.000,00
129	Praya Barat Daya	Pandan Indah	100.000,00	13.200.000,00
130	Praya Barat Daya	Serage	100.000,00	10.200.000,00
131	Praya Barat Daya	Montong Ajan	100.000,00	12.600.000,00
132	Praya Barat Daya	Batu Jangkih	100.000,00	22.200.000,00
133	Praya Barat Daya	Teduh	100.000,00	6.600.000,00
134	Praya Barat Daya	Pandan Tinggang	100.000,00	6.000.000,00
135	Batukliang Utara	Lantan	100.000,00	36.000.000,00
136	Batukliang Utara	Setiling	100.000,00	32.400.000,00
137	Batukliang Utara	Tanak Beak	100.000,00	34.800.000,00
138	Batukliang Utara	Aik Bukaq	100.000,00	36.600.000,00
139	Batukliang Utara	Teratak	100.000,00	43.800.000,00
140	Batukliang Utara	Aik Berik	100.000,00	39.000.000,00
141	Batukliang Utara	Mas-mas	100.000,00	22.800.000,00
142	Batukliang Utara	Karang Sidemen	100.000,00	35.400.000,00
	JUMLAH			3.358.200.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI DANA BERGULIR
PERKUATAN MODAL KOPERASI
PER 31 DESEMBER 2025

No	Nama KUKM Penerima	Alamat	Jumlah Investasi (Rp)	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pelaporan	Jumlah Tahun	Jumlah Pengembalian								
								s.d. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
1	KUD. Karya Batur	Sukarara	150.000.000	05/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	123.500.000,00	-							123.500.000
2	KUD. Embual Kayun	Aik Mual	25.000.000	11/01/2011	31/01/2012	31/12/2023	12,98	25.000.000,00	-							25.000.000
3	KUD. Sinar Harapan	Mujur	125.000.000	05/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	95.683.159,00	2.600.000	1.000.000	5.000.000	6.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	118.283.159
4	KUD. Sederhana	Truwai	50.000.000	03/05/2006	15/12/2006	31/12/2023	17,67	23.210.000,00	2.000.000							25.210.000
5	KUD. Utama	Kopang	75.000.000	05/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	-	-							-
6	KUD. Bina Karya	Pancordao	100.000.000	06/08/2012	07/12/2013	31/12/2023	11,41	-	-							-
7	KUD. Beriuk Bakti	Nyerot	50.000.000	07/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	3.896.000,00	-							3.896.000
8	KUD. Siwaq Karya	Janapria	50.000.000	05/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	28.000.000,00	-							28.000.000
9	Koppas. Dharma Sari	Puyung	67.000.000	24/08/2009	30/09/2010	31/12/2023	14,36	39.000.000,00	22.000.000			500.000				61.500.000
10	KUD. Bhakti Karya	Mantang	50.000.000	14/01/2011	31/01/2012	31/12/2023	12,97	31.253.000,00	-	5.500.000						36.753.000
11	Kopwan. Ibadatul Abidi	Kawo	50.000.000	21/07/2008	21/07/2009	31/12/2023	15,45	24.000.000,00	-							24.000.000
12	Kopinkra. Jagat Bersatu	Beleka	250.000.000	05/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	149.235.141,00	4.050.000		300.000	1.000.000	500.000	500.000		155.585.141
13	KSU. Mandiri	Kidang	110.000.000	05/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	56.356.000,00	-							56.356.000
14	KSU. Kuncup Mekar	Semoyang	75.000.000	14/02/2007	15/02/2008	31/12/2023	16,89	72.000.000,00	-							72.000.000
15	KSU. Kuncup Mekar	Semoyang	150.000.000	21/07/2008	21/07/2009	31/12/2023	15,45	-	-							-
16	Kopinkra. Jati Suara	Serage	30.000.000	05/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	3.000.000,00	-							3.000.000
17	Kopti. Al-Ikhlis	Puyung	25.000.000	06/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	5.000.000,00	-							5.000.000
18	KSU. Bumi Gora	Suka Dane	150.000.000	05/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	88.000.000,00	-				20.000.000			108.000.000
19	KUD. Tara	Puyung	200.000.000	01/02/2001	02/02/2002	31/12/2023	22,93	47.000.000,00	-							47.000.000
20	UD. Tiga Bersaudara	Nyerot	30.000.000	18/06/2005	31/12/2005	31/12/2023	18,55	11.930.000,00	-							11.930.000
21	UD. Nilam Indah	Sanggeng	100.000.000	03/05/2006	15/12/2006	31/12/2023	17,67	-	-							-
22	UD. Lestari	Langko	110.000.000	19/07/2008	31-4-2009	31/12/2023	15,46	-	-							-
23	CV. Urip Tani	Pengendong	75.000.000	12/05/2008	30/04/2009	31/12/2023	15,65	3.500.000,00	1.400.000	750.000						5.650.000
24	UD. Maju Bersama	Mangkung	25.000.000	03/05/2006	15/12/2006	31/12/2023	17,67	9.000.000,00	-							9.000.000
25	KSU. Permata Karya	Tanak Beak	100.000.000	06/08/2012	07/08/2013	31/12/2023	11,41	-	-							-
26	UD. Bhakti	Puyung	25.000.000	25/04/2011	31/05/2012	31/12/2023	12,69	650.000,00	-			500.000	500.000			1.650.000
27	UD. Sakinah	Praya	21.000.000	03/04/2012	04/04/2013	31/12/2023	11,75	4.000.000,00	-							4.000.000
28	UD. Setia Kawan	Braim	25.000.000	21/02/2011	31/03/2012	31/12/2023	12,87	-	-							-
29	UD. Hamba	Pengadang	20.000.000	30/04/2008	30/04/2009	31/12/2023	15,68	5.000.000,00	-							5.000.000
30	UD. Andri	Ganti	20.000.000	02/05/2008	30/04/2009	31/12/2023	15,67	7.500.000,00	-							7.500.000
31	CV. Karya Pelangi	Praya	50.000.000	02/05/2008	30/04/2009	31/12/2023	15,67	20.630.000,00	3.000.000	1.000.000	1.000.000				2.000.000	27.630.000
32	UD. Tika Putri	Kidang	50.000.000	02/05/2008	30/04/2009	31/12/2023	15,67	-	-							-
33	CV. Ki Mas Mirah	Pejanggik	18.000.000	07/12/2009	30/09/2010	31/12/2023	14,07	-	-							-
34	UD. Bina Artha	Renteng	100.000.000	04/11/2013	04/11/2014	31/12/2023	10,16	28.700.000,00	5.000.000	2.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	2.000.000	2.500.000	63.200.000
35	UD. Suryatin	Jelantik	90.000.000	04/11/2013	04/11/2014	31/12/2023	10,16	33.216.000,00	10.000.000	2.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	2.000.000	2.500.000	72.716.000
36	UD. Intan	Labulia	15.000.000	07/11/2008	05/11/2009	31/12/2023	15,16	6.850.000,00	-							6.850.000
37	KUD. Rukun	Ubung	87.000.000	01/02/2012	02/03/2013	31/12/2023	11,92	-	-				2.000.000			2.000.000
38	Koppontren. Darul Kamilin	Bakan	50.000.000	21/07/2008	21/07/2009	31/12/2023	15,45	14.000.000,00	-							14.000.000
39	KSU. Satu Dua Satu	Praya	50.000.000	21/07/2008	21/07/2009	31/12/2023	15,45	30.000.000,00	-							30.000.000
40	KSU. Tunas Ejeng	Bilelendo	60.000.000	21/10/2009	21/11/2010	31/12/2023	14,20	-	-							-
41	Koptren. Rabiatussahadah	Batukeliang	40.000.000	21/07/2008	21/07/2009	31/12/2023	15,45	4.428.000,00	-							4.428.000
42	Koptan. Pantang Mundur	Segala Anyar	25.000.000	08/12/2010	31/12/2011	31/12/2023	13,07	10.000.000,00	-							10.000.000
43	UD. Mandiri Praya	Renteng	15.000.000	17/09/2008	18/09/2009	31/12/2023	15,30	-	-							-
44	Koptan. Bina Sejahtera	Kidang	25.000.000	29/12/2008	28/12/2009	31/12/2023	15,01	3.000.000,00	-							3.000.000
45	Kospin. Saling Tulung	Barejulat	100.000.000	21/07/2008	21/07/2009	31/12/2023	15,45	-	-							-
46	UD Rezeki	Saba	25.000.000	03/05/2006	15/12/2006	31/12/2023	17,67	25.000.000,00	-							25.000.000



No	Nama KUKM Penerima	Alamat	Jumlah Investasi (Rp)	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pelaporan	Jumlah Tahun	Jumlah Pengembalian								
								s.d. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
47	KUD. Akwa	Kawo	10.000.000	17/07/2012	18/07/2013	31/12/2023	11,46	-	-							-
48	KUD Mekar Sari	Ganti	25.000.000	17/07/2012	18/07/2013	31/12/2023	11,46	25.000.000,00	-							25.000.000
49	UD. Tunas Mulya	Praya	25.000.000	01/09/2009	01/10/2010	31/12/2023	14,34	25.000.000,00	-							25.000.000
50	UD. Iwan Jaya	Mangkung	25.000.000	21/07/2008	21/07/2008	31/12/2023	15,45	-	-							-
51	UD. Hasanah	Kateng	25.000.000	21/07/2008	21/07/2009	31/12/2023	15,45	-	-							-
52	UD Putera Satria	Kawo	25.000.000	01/09/2009	01/10/2010	31/12/2023	14,34	25.000.000,00	-							25.000.000
53	UD. Irlia Mandiri	Semoyang	15.000.000	21/07/2008	21/07/2009	31/12/2023	15,45	-	-							-
54	UD. Chandra Gorden	Tampar-ampar	10.000.000	17/12/2008	17/12/2009	31/12/2023	15,05	-	400.000							400.000
55	UD Harapan Maju	Saba	25.000.000	03/05/2006	15/12/2006	31/12/2023	17,67	25.000.000,00	-							25.000.000
56	UD. Shinta	Leneng	10.000.000	17/12/2008	17/12/2009	31/12/2023	15,05	-	-							-
57	UD. Geary Marmer	Bunut Baik	12.000.000	26/01/2009	05/01/2010	31/12/2023	14,94	-	-							-
58	KUD Karya	Darmaji	100.000.000	26/01/2009	05/01/2010	31/12/2023	14,94	100.000.000,00	-							100.000.000
59	UD. Karya Bersama	Penaban	25.000.000	18/08/2009	18/08/2010	31/12/2023	14,38	25.000.000,00	-							25.000.000
60	UD. Menik	Praya	25.000.000	02/05/2011	31/05/2012	31/12/2023	12,67	8.670.000,00	3.000.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	15.170.000
61	KUD Mertaguna	Gerunung	75.000.000	06/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	75.000.000,00	-							75.000.000
62	UD. Perkasa	Braim	25.000.000	17/01/2011	31/01/2012	31/12/2023	12,96	-	-							-
63	UD. Thania	Bagek Rende	25.000.000	12/06/2009	31/07/2010	31/12/2023	14,56	10.000.000,00	-							10.000.000
64	KSU. Waringin	Turuwai	15.000.000	15/06/2009	31/07/2010	31/12/2023	14,55	-	-							-
65	KUD Pusaka Batur	Bilebante	50.000.000	06/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	50.000.000,00	-							50.000.000
66	UD. Hendra Indah	Labulia	10.000.000	22/06/2009	31/01/2010	31/12/2023	14,53	-	-							-
67	KPRI. Sejahtera	Ubung	25.000.000	06/01/2012	07/01/2013	31/12/2023	11,99	25.000.000,00	-							25.000.000
68	KUD Siyiwak Karya	Janapria	50.000.000	18/06/2005	31/12/2005	31/12/2023	18,55	50.000.000,00	-							50.000.000
69	KSU GEMMA Juring	Juring	25.000.000	18/08/2009	30/09/2010	31/12/2023	14,38	24.000.000,00	-							24.000.000
70	Primkoppad	Praya	50.000.000	18/08/2009	30/09/2010	31/12/2023	14,38	50.000.000,00	-							50.000.000
71	UD. Kelapa Gading	Pengadang	25.000.000	01/07/2013	30/06/2014	31/12/2023	10,51	25.000.000,00	-							25.000.000
72	UD. Maya Pada	Praya	25.000.000	18/08/2009	30/09/2010	31/12/2023	14,38	10.000.000,00	-							10.000.000
73	UD. Bobby Motor	Barejulat	40.000.000	23/12/2009	20/12/2010	31/12/2023	14,03	9.100.000,00	-							9.100.000
74	UD. Rizky Aulia	Penujak	20.000.000	28/12/2009	20/12/2010	31/12/2023	14,02	20.000.000,00	-							20.000.000
75	UD. Alby	Praya	60.000.000	11/12/2012	13/12/2013	31/12/2023	11,06	-	-							-
76	Ni Nyoman Nadiyawati	Praya	50.000.000	11/12/2012	13/12/2013	31/12/2023	11,06	50.000.000,00	-							50.000.000
77	UD. Sumber Rasa	Mantang	25.000.000	23/11/2009	15/12/2010	31/12/2023	14,11	25.000.000,00	-							25.000.000
78	KPRI-Sejahtera		40.000.000					40.000.000,00	-							40.000.000
79	Kios Kembang Lekong	Beber	15.000.000	07/01/2010	30/01/2011	31/12/2023	13,99	15.000.000,00	-							15.000.000
80	UD. Favorit	Bunut Baik	10.000.000	11/01/2010	30/01/2011	31/12/2023	13,98	-	-							-
81	UD. Nanda	Praya	20.000.000	13/01/2011	31/12/2011	31/12/2023	12,97	14.200.000,00	-							14.200.000
82	UD. Nanda Aldi	Leneng	10.000.000	20/01/2010	20/01/2011	31/12/2023	13,95	10.000.000,00	-							10.000.000
83	Kios Mini	Tiwuase	10.000.000	03/02/2010	30/01/2011	31/12/2023	13,92	-	-							-
84	UD. Darussalimin	Kateng	10.000.000	05/02/2010	30/01/2011	31/12/2023	13,91	-	-							-
85	UD. Cahaya Rezeki	Ketejer	10.000.000	18/02/2010	30/01/2011	31/12/2023	13,87	-	-							-
86	KSU Muda Mandiri	Ubung	100.000.000	05/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	100.000.000,00	-							100.000.000
87	UD. Lestari	Praya	10.000.000	28/06/2010	31/07/2011	31/12/2023	13,52	10.000.000,00	-							10.000.000
88	UD. Insang Flora	Praya	25.000.000	04/04/2011	30/04/2012	31/12/2023	12,75	-	-							-
89	KUD Akwa	Kawo	50.000.000	05/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	50.000.000,00	-							50.000.000
90	CV. Tuhu Insan Lombok	Desa Mas-mas	10.000.000	16/06/2010	30/06/2011	31/12/2023	13,55	-	250.000							250.000
91	UD. Melati	Praya	25.000.000	21/07/2010	31/07/2011	31/12/2023	13,45	-	-							-
92	KUD Bakti Karya	Mantang	30.000.000	05/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	30.000.000,00	-			500.000				30.500.000
93	UD. Perdana	Praya	25.000.000	26/07/2010	31/08/2011	31/12/2023	13,44	5.000.000,00	-							5.000.000
94	KPRI. Optimis	Pengadang	25.000.000	27/11/2011	28/11/2012	31/12/2023	12,10	8.500.000,00	-							8.500.000
95	KPN Dahlia	Praya	28.000.000	06/06/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,58	28.000.000,00	-							28.000.000
96	UD. Wahyu	Barebali	25.000.000	19/12/2011	20/12/2012	31/12/2023	12,04	3.750.000,00	1.300.000			500.000				5.550.000
97	UD. Anditya	Beremis	10.000.000	18/10/2010	30/11/2011	31/12/2023	13,21	10.000.000,00	-							10.000.000

No	Nama KUKM Penerima	Alamat	Jumlah Investasi (Rp)	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pelaporan	Jumlah Tahun	Jumlah Pengembalian								
								s.d. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
98	UD. Kasta	Barejulat	20.000.000	08/12/2011	09/12/2012	31/12/2023	12,07	500.000,00	-							500.000
99	UD Lestari Langko	Langko	100.000.000	19/07/2008	31-04-2009	31/12/2023	15,46	100.000.000,00	-							100.000.000
100	UD. Wira Lestari	Barejulat	20.000.000	28/12/2010	31/01/2012	31/12/2023	13,02	20.000.000,00	-							20.000.000
101	Kopwan Teratai	Praya	25.000.000	05/01/2010	05/01/2011	31/12/2023	13,99	25.000.000,00	-							25.000.000
102	Amie Salon	Praya	10.000.000	14/06/2010	30/06/2011	31/12/2023	13,56	600.000,00	-							600.000
103	UD. Jari	Tengari	60.000.000	13/08/2009	30/09/2010	31/12/2023	14,39	20.000.000,00	-							20.000.000
104	KSU. Trasna "Gerupuk"	Grupuk	20.000.000	01/11/2010	30/11/2011	31/12/2023	13,17	20.000.000,00	-							20.000.000
105	CV. Canaya Nusantara Vision	Praya	10.000.000	03/11/2010	30/11/2011	31/12/2023	13,17	10.000.000,00	-							10.000.000
106	UD. Armando Tailor	Grunung	10.000.000	28/12/2010	31/01/2011	31/12/2023	13,02	7.800.000,00	2.100.000							9.900.000
107	UD. Mekar Sari	Leneng	15.000.000	11/01/2011	31/12/2011	31/12/2023	12,98	2.000.000,00	-					1.600.000	1.600.000	5.200.000
108	UD. Ramadani	Ranggagata	25.000.000	21/02/2011	21/02/2012	31/12/2023	12,87	-	-							-
109	KJUB Pusaka	Praya	25.000.000	21/07/2008	21/07/2009	31/12/2023	15,45	25.000.000,00	-							25.000.000
110	UD. Erita	Kmpng. Jawa	20.000.000	13/01/2011	31/12/2011	31/12/2023	12,97	-	-							-
111	Kios Karya Mandiri	Kopang	5.000.000	28/12/2010	31/01/2012	31/12/2023	13,02	-	-							-
112	UD. Zian Shop	Panjisari	10.000.000	27/01/2011	29/02/2012	31/12/2023	12,93	-	-							-
113	UD. Adi Celluler	Barejulat	4.000.000	21/02/2011	21/02/2012	31/12/2023	12,87	4.000.000,00	-							4.000.000
114	UD. Sejati	Praya	10.000.000	03/03/2011	03/03/2012	31/12/2023	12,84	-	-							-
115	UD Adrikna	Pelambik	10.000.000	16/03/2011	16/03/2012	31/12/2023	12,80	-	-							-
116	Kios Raehanah	Dakung	5.000.000	14/04/2011	31/05/2012	31/12/2023	12,72	-	-							-
117	KSU Rukun Warga	Bakan	10.000.000	14/04/2011	30/04/2012	31/12/2023	12,72	10.000.000,00	-							10.000.000
118	Sari Yuni Pramanti	Praya	5.000.000	21/04/2011	30/04/2012	31/12/2023	12,70	5.000.000,00	-							5.000.000
119	UD Berlian 31	Waker	10.000.000	25/04/2011	31/05/2012	31/12/2023	12,69	-	-							-
120	Kopinkra Tastura	Pringgarata	25.000.000	21/07/2008	21/07/2009	31/12/2023	15,45	25.000.000,00	-							25.000.000
121	Pelita Cell	Penajak	7.500.000	27/04/2011	31/05/2012	31/12/2023	12,69	-	-							-
122	KSU Kopaja	Gunung Kedul	10.000.000	03/05/2011	31/05/2012	31/12/2023	12,67	2.000.000,00	-							2.000.000
123	UD Jatayu	Bremis	20.000.000	05/05/2011	31/05/2012	31/12/2023	12,67	-	-							-
124	UD Kelapa Gading	Pengadabg	15.000.000	13/08/2009	13/08/2010	31/12/2023	14,39	15.000.000,00	-							15.000.000
125	KSU Insan Sejahtera	Janapria	7.000.000	18/05/2011	31/05/2012	31/12/2023	12,63	7.000.000,00	-							7.000.000
126	Madya Depot	Praya	10.000.000	21/06/2011	31/07/2012	31/12/2023	12,54	10.000.000,00	-							10.000.000
127	UD Estu Jaya	Tengari	5.000.000	15/07/2011	31/07/2012	31/12/2023	12,47	1.000.000,00	-							1.000.000
128	UD Hufzon	Bagu	25.000.000	21/07/2008	21/07/2009	31/12/2023	15,45	25.000.000,00	-							25.000.000
129	UD. Dita	Panjisari	15.000.000	27/01/2011	29/02/2012	31/12/2023	12,93	2.300.000,00	500.000							2.800.000
130	UD. Engguda	Mispalah	20.000.000	27/07/2011	29/02/2012	31/12/2023	12,44	-	-							-
131	Primkoppad	Praya	25.000.000	21/07/2008	21/07/2009	31/12/2023	15,45	25.000.000,00	-							25.000.000
132	UD Cahaya	Aik Muai	15.000.000	23/02/2012	24/02/2013	31/12/2023	11,86	15.000.000,00	-							15.000.000
133	KSU Merah Putih	Praya	50.000.000	02/05/2008	30/04/2009	31/12/2023	15,67	50.000.000,00	-							50.000.000
134	KSU Keluarga Bersatu	Leneng	20.000.000	29/08/2012	30/08/2013	31/12/2023	11,35	-	-							-
135	H. Sukrawardi	Kopang	7.500.000	11/04/2012	12/04/2013	31/12/2023	11,73	-	-							-
136	Kios Kembang	Lekong Empat	15.000.000	27/07/2011	29/02/2012	31/12/2023	12,44	15.000.000,00	-							15.000.000
137	Kopkar Trasne	Aik Darek	100.000.000	06/08/2012	07/08/2013	31/12/2023	11,41	-	-							-
138	UD. Putra Satria	Kawo	25.000.000	27/07/2011	29/02/2012	31/12/2023	12,44	25.000.000,00	-							25.000.000
139	UD. Agus Salim	Puyung	50.000.000	01/09/2009	01/10/2010	31/12/2023	14,34	50.000.000,00	-							50.000.000
140	Kelompok Pemuda	Kulakagik	3.000.000	22/11/2012	22/11/2013	31/12/2023	11,11	-	-							-
141	KUD Sederhana	Teruwai	125.000.000	05/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	125.000.000,00		1.500.000	1.500.000					128.000.000
142	KUD Mekar Sari	Ganti	25.000.000	30/05/2006	15/12/2006	31/12/2023	17,60	25.000.000,00	-							25.000.000
143	Koptan Rantai Mas	Ganti	40.000.000	03/05/2006	15/12/2006	31/12/2023	17,67	40.000.000,00	-							40.000.000
144	KUD Ikhtiar	Jurang Jaler	70.000.000	02/05/2006	15/12/2006	31/12/2023	17,68	70.000.000,00	-							70.000.000
145	UD. Harapan Maju	Saba	25.000.000	27/07/2011	29/02/2012	31/12/2023	12,44	25.000.000,00	-							25.000.000
146	UD Hayat	Bermis	25.000.000	04/04/2011	30/04/2012	31/12/2023	12,75	-	-							-
147	Koppas Dharma Sari	Puyung	100.000.000	06/07/2007	20/06/2008	31/12/2023	16,50	100.000.000,00	-							100.000.000
148	UD. RizkiAmalia	Mertak Tombok	20.000.000	03/05/2006	15/12/2006	31/12/2023	17,67	20.000.000,00	-							20.000.000

Lampiran 6

Hal. 4 dari 4

No	Nama KUKM Penerima	Alamat	Jumlah Investasi (Rp)	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pelaporan	Jumlah Tahun	Jumlah Pengembalian								
								s.d. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
149	UD. Rezeki	Saba	25.000.000	03/05/2006	15/12/2006	31/12/2023	17,67	25.000.000,00	-							25.000.000
150	UD Tunas Mulya	Praya	25.000.000	02/05/2006	15/12/2006	31/12/2023	17,68	25.000.000,00	-							25.000.000
151	UD. Hidup Baru	Jago	200.000.000	03/05/2006	15/12/2006	31/12/2023	17,67	200.000.000,00	-							200.000.000
152	KSU Batu Bulan	Janapria	10.000.000	03/05/2013	15/12/2014	31/12/2023	10,67	-	-							-
153	UD. Rahmah Berkah	Gemel	25.000.000	03/05/2006	15/12/2006	31/12/2023	17,67	25.000.000,00	-							25.000.000
154	UD. Saribumi	Kelebeh	20.000.000	02/05/2006	15/12/2006	31/12/2023	17,68	20.000.000,00	-							20.000.000
155	Aji Husodo	Mataram	30.000.000	29/08/2012	29/08/2013	31/12/2023	11,35	-	-							-
156	KSU Rukun Warga	Bakan	15.000.000	08/03/2013	09/03/2014	31/12/2023	10,82	-	-	-						-
157	UD Kartika	Praya	25.000.000	28/12/2013	31/01/2014	31/12/2023	10,01	4.500.000,00	12.500.000	3.500.000		4.000.000				24.500.000
158	Sri Ratnawati	Lantan	5.000.000	24/03/2013	25/03/2014	31/12/2023	10,78	5.000.000,00	-							5.000.000
159	KUD Badar	Batujai	5.000.000	21/05/2013	22/05/2014	31/12/2023	10,62	-	-							-
160	Kopwan Mandiri	Kopang	12.500.000	08/03/2013	09/03/2014	31/12/2023	10,82	4.000.000,00	5.000.000							9.000.000
161	UD Darul Khaer	Semarang-Prapen	10.000.000	13/12/2013	14/12/2014	31/12/2023	10,05	-	-							-
162	Kopwan Melati	Meteng	15.000.000	05/01/2014	06/01/2015	31/12/2023	9,99	-	-							-
163	Usaha Lebah Madu	Mangkung	10.000.000	13/02/2014	14/02/2015	31/12/2023	9,88	-	-							-
164	UD Zul	Praya	15.000.000	13/02/2014	14/02/2015	31/12/2023	9,88	-	-							-
165	KUD Sederhana (Gudang)	Teruwai	140.000.000	01/02/2005	02/02/2007	31/12/2023	18,92	-	-							-
166	KUD Mekar Sari (Gudang)	Ganti	140.000.000	01/02/2005	02/02/2007	31/12/2023	18,92	-	-							-
167	KUD Karya Batur (Gudang)	Sukarara	137.025.000	01/02/2005	02/02/2007	31/12/2023	18,92	-	-							-
	Jumlah		6.766.525.000					3.243.457.300,00	75.100.000	18.750.000	23.300.000	28.500.000	23.000.000	29.600.000	10.100.000	3.451.807.300

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SALDO KAS BOSP PER 31 DESEMBER 2025

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal		Pendapatan	Belanja	Pelimpahan Ke RKUD	Saldo Akhir	
				Bank	Tunai				Bank	Tunai
1	69772865	TK NEGERI PEMBINA PEDESAAN KOPANG	KOPANG	114.287,79	-	41.429.052,32	41.490.000,00	-	53.340,11	-
2	69770118	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PRAYA TIMUR	PRAYA TIMUR	55.641,91	-	17.475.023,64	17.490.000,00	-	40.665,55	-
3	69772918	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PRINGGARATA	PRINGGARATA	28.762,15	-	40.823.469,24	40.590.000,00	-	262.231,39	-
4	69772907	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN JONGGAT	JONGGAT	50.579,75	-	57.062.316,44	57.090.000,00	-	22.896,19	-
5	69770087	TK NEGERI 2 LOMBOK TENGAH	PRAYA	53.977,10	-	83.465.764,40	83.490.000,00	-	29.741,50	-
6	69770250	TK NEGERI PEMBINA KEC. BATUKLIANG	BATUKLIANG	83.146,89	-	45.722.314,36	45.690.000,00	-	115.461,25	-
7	P9962863	SKB LOMBOK TENGAH (PAUD/TKN)	JONGGAT	156.330,34	-	27.643.799,79	27.690.000,00	-	110.130,13	-
8	69772897	TK NEGERI PEMBINA PRAYA	PRAYA	100.000,00	-	33.600.000,00	33.600.000,00	-	100.000,00	-
9	69770133	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN JANAPRIA	JANAPRIA	335.792,18	-	27.733.121,01	27.842.500,00	-	226.413,19	-
10	P9962863	SKB LOMBOK TENGAH (Kesetaraan)	JONGGAT	-	-	72.900.000,00	72.900.000,00	-	-	-
A. JENJANG PAUD/TKN				978.518,11	-	447.854.861,20	447.872.500,00	-	960.879,31	-
1	50201199	SD NEGERI TOJONG - OJONG	Batukliang	1.601.910,00	-	204.840.258,00	189.880.000,00	-	16.562.168,00	-
2	50205131	SD NEGERI DASAN BARU TAMPAKSIRING	Batukliang	270.095,00	-	120.320.000,00	120.320.000,00	-	270.095,00	-
3	50200978	SD NEGERI BENENG	Batukliang	1.023.323,00	-	201.120.000,00	200.220.000,00	-	1.923.323,00	-
4	50201462	SD NEGERI PAJANGAN	Batukliang	1.744.836,00	-	255.547.000,00	254.740.000,00	-	2.551.836,00	-
5	50201358	SD NEGERI SURABAYA	Batukliang	2.125.996,00	-	151.693.517,06	149.460.000,00	-	4.359.513,06	-
6	50201051	SD NEGERI GUNUNG AMUK	Batukliang	1.938.104,00	-	243.820.000,00	243.460.000,00	-	2.298.104,00	-
7	50201952	SD NEGERI 1 MANTANG	Batukliang	4.905.711,00	-	106.220.000,00	106.220.000,00	-	4.905.711,00	-
8	50201536	SD NEGERI PERESAK	Batukliang	861.382,00	-	226.995.536,00	223.660.000,00	-	4.196.918,00	-
9	50201325	SD NEGERI TUNDUNG	Batukliang	1.087.073,00	-	89.300.000,00	89.300.000,00	-	1.087.073,00	-
10	50201465	SD NEGERI Otak Desa	Batukliang	1.301.994,00	-	142.880.000,00	142.880.000,00	-	1.301.994,00	-
11	50201312	SD NEGERI TANAK EMBANG	Batukliang	1.223.007,00	-	243.161.500,00	230.300.000,00	-	14.084.507,00	-
12	50201004	SD NEGERI KEMBANG KERANG	Batukliang	799.104,00	-	141.000.000,00	141.000.000,00	-	799.104,00	-
13	50200954	SD NEGERI BEBER	Batukliang	898.585,00	-	200.220.000,00	200.220.000,00	-	898.585,00	-
14	50201548	SD NEGERI PENAKAK	Batukliang	2.139.278,00	-	132.540.000,00	132.540.000,00	-	2.139.278,00	-
15	50201463	SD NEGERI PAGUTAN	Batukliang	1.304.049,00	-	96.760.000,00	96.760.000,00	-	1.304.049,00	-
16	50200961	SD NEGERI BATU LUMBUNG	Batukliang	931.236,00	-	117.500.000,00	117.500.000,00	-	931.236,00	-
17	50201476	SD NEGERI 1 LENDANG TAMPEL	Batukliang	797.464,00	-	236.880.000,00	236.880.000,00	-	797.464,00	-
18	50201963	SD NEGERI 1 SANGKAWANA	Batukliang	898.088,00	-	234.000.000,00	234.000.000,00	-	898.088,00	-
19	50201103	SD NEGERI 2 LENDANG TAMPEL	Batukliang	480.209,00	-	98.700.000,00	98.700.000,00	-	480.209,00	-
20	50201174	SD NEGERI 3 MANTANG	Batukliang	811.885,00	-	89.300.000,00	89.300.000,00	-	811.885,00	-
21	50201468	SD NEGERI MERTAK PAOK	Batukliang	892.000,00	-	146.640.000,00	146.640.000,00	-	892.000,00	-
22	50201060	SD NEGERI 2 SANGKAWANA	Batukliang	582.517,00	-	121.260.000,00	121.260.000,00	-	582.517,00	-
23	50201486	SD NEGERI MERTAK KESAMBIK	Batukliang	1.866.270,00	-	121.436.000,00	121.260.000,00	-	2.042.270,00	-
24	50200940	SD NEGERI DASAN LEKONG	Batukliang	400.818,00	-	79.900.000,00	79.900.000,00	-	400.818,00	-
25	50201481	SD NEGERI LEKONG MADI	Batukliang	94.145,00	-	151.340.000,00	151.341.500,00	-	92.645,00	-
26	50201448	SD NEGERI MERTAK WARENG	Batukliang	933.916,00	-	128.780.000,00	128.780.000,00	-	933.916,00	-
27	50201080	SD NEGERI 2 TUNJANG	Batukliang	1.298.008,00	-	155.100.000,00	155.100.000,00	-	1.298.008,00	-
28	50201510	SD NEGERI REPOK PUYUNG	Batukliang	703.722,00	-	139.060.000,00	139.060.000,00	-	703.722,00	-
29	50201540	SD NEGERI PENYENGAK	Batukliang	340.034,00	-	79.840.000,00	79.840.000,00	-	340.034,00	-
30	50201163	SD NEGERI AIK DAREK	Batukliang	744.458,00	-	121.260.000,00	121.260.000,00	-	744.458,00	-
31	50201460	SD NEGERI PAOK KUNING	Batukliang	573.107,00	-	140.060.000,00	140.060.000,00	-	573.107,00	-
32	50201532	SD NEGERI SAPIT	Batukliang	916.778,00	-	33.840.000,00	33.840.000,00	-	916.778,00	-
33	50201505	SD NEGERI SADE	Batukliang	473.702,00	-	131.540.000,00	131.491.000,00	-	472.702,00	50.000,00
34	50201054	SD NEGERI BARABALI	Batukliang	134.522,00	-	361.560.000,00	360.960.000,00	-	734.522,00	-
35	50201130	SD NEGERI 2 MANTANG	Batukliang	1.678.588,00	-	359.778.000,00	359.080.000,00	-	2.376.588,00	-
36	50201479	SD NEGERI LENDANG DODA	Batukliang	638.304,00	-	103.400.000,00	103.400.000,00	-	638.304,00	-
37	50201153	SD NEGERI BAJUR	Batukliang	245.559,00	-	217.053.387,00	215.260.000,00	-	2.038.946,00	-
38	50201563	SD NEGERI PONDOK PANDE	Batukliang	712.528,00	-	104.340.000,00	104.340.000,00	-	712.528,00	-
39	50201353	SD NEGERI TAMPAK SIRING	Batukliang	1.063.908,00	-	109.980.000,00	109.980.000,00	-	1.063.908,00	-
40	50201914	SD NEGERI 1 TUNJANG	Batukliang	742.582,00	-	164.500.000,00	164.500.000,00	-	742.582,00	-
41	50201474	SD NEGERI Lendang Terong	Batukliang	2.263.352,00	-	155.250.000,00	155.100.000,00	-	2.413.352,00	-
42	50201363	SD NEGERI SUBAHNALA	Batukliang	3.251.035,00	-	182.462.790,00	182.360.000,00	-	3.353.825,00	-
43	50201442	SD NEGERI MONTONG GERIA	Batukliang	1.073.190,00	-	132.540.000,00	132.540.000,00	-	1.073.190,00	-
44	50201960	SD NEGERI 1 SELEBUNG	Batukliang	1.191.796,00	-	189.820.000,00	189.820.000,00	-	1.191.796,00	-
45	50201057	SD NEGERI 2 SELEBUNG	Batukliang	1.080.280,00	-	97.700.000,00	97.700.000,00	-	1.080.280,00	-
46	50201303	SD NEGERI TERATAK	Batukliang Utara	7.782.620,45	-	364.870.000,00	360.022.000,00	-	12.630.620,45	-
47	50201530	SD NEGERI SEGANTENG	Batukliang Utara	271.362,00	-	206.647.000,00	192.701.000,00	-	14.217.362,00	-
48	50201008	SD NEGERI KUMBAK	Batukliang Utara	623.755,00	-	116.989.000,00	114.621.000,00	-	2.991.755,00	-
49	69761923	SD NEGERI RANGKEP	Batukliang Utara	133.099,00	-	101.521.000,00	101.521.000,00	-	132.099,00	-
50	50201550	SD NEGERI PERSIL	Batukliang Utara	297.467,00	-	134.420.000,00	134.421.500,00	-	295.967,00	-
51	50201331	SD NEGERI TANAK BEAK	Batukliang Utara	160.965,00	-	143.820.000,00	143.823.500,00	-	157.465,00	-

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal		Pendapatan	Belanja	Pelimpahan Ke RKUD	Saldo Akhir	
				Bank	Tunai				Bank	Tunai
52	50200993	SD NEGERI KARANG SIDEMEN	Batukliang Utara	285.634,00	-	228.070.000,00	226.542.000,00		1.813.634,00	-
53	50201568	SD NEGERI PEMOTOH TENGAH	Batukliang Utara	437.049,00	-	136.300.000,00	136.301.500,00		435.549,00	-
54	50201523	SD NEGERI SELEWAT	Batukliang Utara	849.694,00	-	157.920.000,00	157.920.500,00		849.194,00	-
55	50201433	SD NEGERI PEMOTOH BARAT	Batukliang Utara	105.963,00	-	62.980.000,00	62.980.000,00		105.963,00	-
56	50201013	SD NEGERI KETANGGA	Batukliang Utara	117.988,00	-	119.380.000,00	119.381.000,00		116.988,00	-
57	50201040	SD NEGERI JENGGUAR	Batukliang Utara	147.027,00	-	80.840.000,00	80.841.000,00		146.027,00	-
58	50201334	SD NEGERI REPUK SINTUNG BARAT	Batukliang Utara	89.497,00	-	73.320.000,00	73.320.500,00		88.997,00	-
59	50201453	SD NEGERI PEMASIR	Batukliang Utara	440.490,00	-	186.120.000,00	186.121.000,00		439.490,00	-
60	50201565	SD NEGERI PETIKUS	Batukliang Utara	285.703,00	-	78.960.000,00	78.961.500,00		284.203,00	-
61	50201149	SD NEGERI AIK BERIK	Batukliang Utara	319.346,00	-	183.769.500,00	181.420.500,00		2.668.346,00	-
62	50200949	SD NEGERI DAPUR	Batukliang Utara	230.506,00	-	135.700.100,00	135.361.500,00		569.106,00	-
63	50201025	SD NEGERI GELOGOR	Batukliang Utara	2.155.018,00	-	152.280.000,00	152.282.000,00		2.153.018,00	-
64	50201515	SD NEGERI REBAN BURUNG	Batukliang Utara	201.180,00	-	104.340.000,00	104.340.500,00		200.680,00	-
65	50219768	SD NEGERI GUNUNG BOROK	Batukliang Utara	1.981.049,00	-	75.200.000,00	75.200.500,00		1.980.549,00	-
66	50201049	SD NEGERI GUBUK MAKAM	Batukliang Utara	265.682,00	-	143.820.000,00	143.822.000,00		263.682,00	-
67	50201500	SD NEGERI LANTAN	Batukliang Utara	551.971,00	-	318.753.850,00	310.200.000,00		9.105.821,00	-
68	50201496	SD NEGERI MAS MAS	Batukliang Utara	453.254,00	-	122.200.000,00	122.201.500,00		451.754,00	-
69	50201471	SD NEGERI LINGKOK LIMA	Batukliang Utara	2.609.941,00	-	154.100.000,00	154.101.000,00		2.608.941,00	-
70	50201529	SD NEGERI SEKEDEK	Batukliang Utara	1.008.922,00	-	150.400.000,00	150.401.500,00		1.007.422,00	-
71	50201346	SD NEGERI SENURUS	Batukliang Utara	127.458,00	-	90.240.000,00	90.240.500,00		126.958,00	-
72	50201527	SD NEGERI SELAK AIK	Batukliang Utara	626.717,00	-	172.960.000,00	172.961.500,00		625.217,00	-
73	69761922	SD NEGERI RERANTEK	Batukliang Utara	147.995,00	-	21.620.000,00	21.621.000,00		146.995,00	-
74	50201338	SD NEGERI SETILING	Batukliang Utara	5.450.268,00	-	197.400.000,00	197.401.500,00		5.448.768,00	-
75	50201330	SD NEGERI TANAK BENGAN	Batukliang Utara	100.121,00	-	58.280.000,00	58.281.000,00		99.121,00	-
76	60729225	SD NEGERI TAMBING KEKEQ	Batukliang Utara	100.550,00	-	48.880.000,00	48.880.000,00		100.550,00	-
77	69770317	SD NEGERI REPOK MONTE	Batukliang Utara	168.090,00	-	31.020.000,00	31.021.500,00		166.590,00	-
78	50201447	SD NEGERI MESORAN	Batukliang Utara	98.992,00	-	104.280.000,00	104.282.000,00		96.992,00	-
79	50201961	SD NEGERI 1 SELEBUNG	Janapria	612.074,00	-	151.280.000,00	151.280.000,00		612.074,00	-
80	50201506	SD NEGERI SADAH	Janapria	688.074,00	-	196.185.000,00	195.520.000,00		1.353.074,00	-
81	50201869	SD NEGERI 1 JEMBE	Janapria	1.077.323,00	-	141.000.000,00	141.000.000,00		1.077.323,00	-
82	50201858	SD NEGERI 1 LANGKO	Janapria	534.939,00	-	149.460.000,00	149.460.000,00		534.939,00	-
83	50201909	SD NEGERI 2 BAKAN	Janapria	2.483.307,00	-	146.640.000,00	146.640.000,00		2.483.307,00	-
84	50201855	SD NEGERI 1 JANAPRIA	Janapria	1.158.070,00	-	66.740.000,00	66.740.000,00		1.158.070,00	-
85	50205133	SD NEGERI JANGO	Janapria	2.367.257,00	-	157.920.000,00	157.920.000,00		2.367.257,00	-
86	50200991	SD NEGERI KEBON SANGKOR	Janapria	2.058.718,00	-	155.100.000,00	155.100.000,00		2.058.718,00	-
87	50200977	SD NEGERI BERANI	Janapria	1.483.539,00	-	113.740.000,00	113.740.000,00		1.483.539,00	-
88	50201058	SD NEGERI 2 SELEBUNG	Janapria	287.536,00	-	133.480.000,00	133.480.000,00		287.536,00	-
89	50200962	SD NEGERI BATU KEMBAR	Janapria	464.034,00	-	62.040.000,00	62.040.000,00		464.034,00	-
90	50201892	SD NEGERI 1 BAKAN	Janapria	1.209.157,00	-	121.260.000,00	121.260.000,00		1.209.157,00	-
91	50201546	SD NEGERI PENANDAK	Janapria	500.450,00	-	153.160.000,00	153.160.000,00		500.450,00	-
92	50201142	SD NEGERI 2 BERANGAH	Janapria	837.135,00	-	95.820.000,00	95.820.000,00		837.135,00	-
93	50201019	SD NEGERI KEMIRI	Janapria	2.370.209,00	-	220.840.000,00	220.840.000,00		2.370.209,00	-
94	50201919	SD NEGERI SONDO	Janapria	250.552,00	-	69.560.000,00	69.560.000,00		250.552,00	-
95	50200974	SD NEGERI BILE PENANGGAK	Janapria	669.459,00	-	160.740.000,00	160.740.000,00		669.459,00	-
96	50201864	SD NEGERI 1 KEREMBONG	Janapria	2.149.194,00	-	94.000.000,00	94.000.000,00		2.149.194,00	-
97	50201547	SD NEGERI PENAMBONG	Janapria	561.150,00	-	91.180.000,00	91.180.000,00		561.150,00	-
98	50201549	SD NEGERI PERIGI	Janapria	499.070,00	-	85.480.000,00	85.480.000,00		499.070,00	-
99	50201926	SD NEGERI 2 JANAPRIA	Janapria	1.643.023,00	-	282.880.000,00	282.880.000,00		1.643.023,00	-
100	50201092	SD NEGERI 2 Langko	Janapria	1.127.592,00	-	198.340.000,00	198.340.000,00		1.127.592,00	-
101	50201091	SD NEGERI 2 Lektor	Janapria	659.605,00	-	127.780.000,00	127.780.000,00		659.605,00	-
102	50200951	SD NEGERI DURIAN	Janapria	335.580,00	-	228.060.000,00	224.662.000,00		3.733.580,00	-
103	50201941	SD NEGERI 1 PENDEM	Janapria	2.125.750,00	-	172.020.000,00	172.020.000,00		2.125.750,00	-
104	50201569	SD NEGERI 2 JEMBE	Janapria	140.106,00	-	66.740.000,00	66.740.500,00		139.606,00	-
105	50201451	SD NEGERI NUNANG	Janapria	1.060.628,00	-	101.520.000,00	101.520.000,00		1.060.628,00	-
106	50205132	SD NEGERI DASAN TERES	Janapria	637.105,00	-	78.020.000,00	78.020.000,00		637.105,00	-
107	50201490	SD NEGERI MENYIUH	Janapria	492.744,00	-	64.860.000,00	64.860.000,00		492.744,00	-
108	50201484	SD NEGERI LOANG MAKA	Janapria	687.484,00	-	174.780.000,00	174.780.000,00		687.484,00	-
109	50201561	SD NEGERI PRAKO	Janapria	1.202.047,00	-	114.680.000,00	114.680.000,00		1.202.047,00	-
110	50201042	SD NEGERI JANGKA	Janapria	626.946,00	-	140.060.000,00	140.060.000,00		626.946,00	-
111	50201152	SD NEGERI BANGKA	Janapria	431.402,00	-	78.960.000,00	78.960.000,00		431.402,00	-
112	50201470	SD NEGERI LINGKUK BUAK	Janapria	678.271,00	-	70.500.000,00	70.500.000,00		678.271,00	-
113	50201302	SD NEGERI TIBU SISOK	Janapria	830.191,00	-	182.300.000,00	182.300.000,00		830.191,00	-
114	50201446	SD NEGERI MONTONG BAGEK	Janapria	806.595,00	-	160.740.000,00	160.740.000,00		806.595,00	-
115	50201472	SD NEGERI LINGKOK BUNUT	Janapria	830.733,00	-	153.220.000,00	153.220.000,00		830.733,00	-
116	50201108	SD NEGERI 2 PENDEM	Janapria	574.932,00	-	76.140.000,00	76.140.000,00		574.932,00	-
117	50201439	SD NEGERI MONTONG TANGIS	Janapria	627.749,00	-	77.080.000,00	77.080.000,00		627.749,00	-



No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal		Pendapatan	Belanja	Pelimpahan Ke RKUD	Saldo Akhir	
				Bank	Tunai				Bank	Tunai
118	50201028	SD NEGERI JANGGAWANA	Janapria	885.246,00	-	175.780.000,00	175.780.000,00		885.246,00	-
119	50201356	SD NEGERI TAKEN AKEN	Janapria	1.116.482,00	-	104.280.000,00	104.280.000,00		1.116.482,00	-
120	50201455	SD NEGERI PEMANTEK	Janapria	1.837.511,00	-	148.565.000,00	148.520.000,00		1.882.511,00	-
121	50201001	SD NEGERI JURING	Janapria	514.687,00	-	117.500.000,00	117.500.000,00		514.687,00	-
122	50201364	SD NEGERI STUTA	Janapria	1.164.792,00	-	160.680.000,00	160.680.000,00		1.164.792,00	-
123	50201098	SD NEGERI 2 KEREMBONG	Janapria	963.916,00	-	202.255.000,00	200.220.000,00		2.998.916,00	-
124	50201160	SD NEGERI AMBAT	Janapria	883.543,00	-	166.380.000,00	166.380.500,00		883.043,00	-
125	50201483	SD NEGERI LIWUNG	Janapria	550.402,00	-	219.020.000,00	219.020.000,00		550.402,00	-
126	50201857	SD NEGERI 1 LEKOR	Janapria	913.664,00	-	169.200.000,00	169.200.000,00		913.664,00	-
127	50201347	SD NEGERI SENGKEREK	Janapria	535.543,00	-	133.480.000,00	133.480.000,00		535.543,00	-
128	50201016	SD NEGERI KENYALU	Janapria	124.589,00	-	93.060.000,00	93.061.000,00		123.589,00	-
129	50201970	SD NEGERI 1 PERINA	Jonggat	687.535,00	-	135.360.000,00	135.360.000,00		687.535,00	-
130	50201933	SD NEGERI 2 BONJERUK	Jonggat	809.696,00	-	71.440.000,00	71.440.000,00		809.696,00	-
131	50200956	SD NEGERI BATUTULIS	Jonggat	341.174,00	-	92.120.000,00	92.120.000,00		341.174,00	-
132	50201162	SD NEGERI AIK AMPAT	Jonggat	1.019.154,00	-	144.760.000,00	144.760.000,00		1.019.154,00	-
133	50201846	SD NEGERI 1 BONJERUK	Jonggat	602.836,00	-	163.560.000,00	163.560.000,00		602.836,00	-
134	50201039	SD NEGERI JERENENG	Jonggat	675.641,00	-	151.340.000,00	151.340.000,00		675.641,00	-
135	50201180	SD NEGERI 3 PUYUNG	Jonggat	481.881,00	-	153.220.000,00	153.220.000,00		481.881,00	-
136	50201928	SD NEGERI 2 GEMEL	Jonggat	1.081.089,00	-	194.580.000,00	194.580.000,00		1.081.089,00	-
137	50200938	SD NEGERI DASAN SEBELEK	Jonggat	673.021,00	-	162.620.000,00	162.620.000,00		673.021,00	-
138	50201464	SD NEGERI OTAK DESA	Jonggat	225.068,00	-	109.980.000,00	109.980.000,00		225.068,00	-
139	50201913	SD NEGERI 1 UBUNG	Jonggat	2.544.225,00	-	208.266.000,00	197.402.000,00		13.408.225,00	-
140	50201535	SD NEGERI PERESAK	Jonggat	141.890,00	-	74.200.000,00	74.200.000,00		141.890,00	-
141	50200929	SD NEGERI BUNCALANG	Jonggat	538.275,00	-	40.420.000,00	40.420.000,00		538.275,00	-
142	50200922	SD NEGERI BUNSAMBANG	Jonggat	1.014.127,00	-	147.580.000,00	147.580.000,00		1.014.127,00	-
143	50201487	SD NEGERI MERTAK	Jonggat	799.846,00	-	201.100.000,00	201.100.000,00		799.846,00	-
144	50201170	SD NEGERI 3 NYEROT	Jonggat	714.921,00	-	145.700.000,00	145.700.000,00		714.921,00	-
145	50201301	SD NEGERI TIMUK GAWAH	Jonggat	1.166.046,00	-	121.200.000,00	121.200.000,00		1.166.046,00	-
146	50200939	SD NEGERI Dasan Lekong	Jonggat	857.032,00	-	130.660.000,00	130.660.000,00		857.032,00	-
147	50201870	SD NEGERI 1 JELANTIK	Jonggat	555.547,00	-	117.500.000,00	117.500.000,00		555.547,00	-
148	50201907	SD NEGERI 2 JELANTIK	Jonggat	514.470,00	-	39.480.000,00	39.480.000,00		514.470,00	-
149	50201079	SD NEGERI 2 UBUNG	Jonggat	320.803,00	-	121.260.000,00	121.260.000,00		320.803,00	-
150	50201106	SD NEGERI 2 PENGENJEK	Jonggat	1.774.286,00	-	199.280.000,00	199.280.000,00		1.774.286,00	-
151	50201034	SD NEGERI EMBUNG DUDUK	Jonggat	1.132.226,00	-	135.360.000,00	135.360.000,00		1.132.226,00	-
152	50201310	SD NEGERI TANDEK	Jonggat	371.490,00	-	191.760.000,00	191.760.000,00		371.490,00	-
153	50200919	SD NEGERI BUNPEDEK	Jonggat	722.236,00	-	162.560.000,00	162.560.000,00		722.236,00	-
154	50201840	SD NEGERI 1 GEMEL	Jonggat	1.874.299,00	-	263.200.000,00	263.200.000,00		1.874.299,00	-
155	50201357	SD NEGERI SURABAYA	Jonggat	726.929,00	-	149.460.000,00	149.460.000,00		726.929,00	-
156	50200948	SD NEGERI DASAN BARU	Jonggat	819.022,00	-	130.660.000,00	130.660.000,00		819.022,00	-
157	50201337	SD NEGERI SETUMBAK	Jonggat	542.811,00	-	98.700.000,00	98.700.000,00		542.811,00	-
158	50201361	SD NEGERI SULIN	Jonggat	744.412,00	-	84.600.000,00	84.600.000,00		744.412,00	-
159	50201069	SD NEGERI 2 PERINA	Jonggat	841.757,00	-	109.040.000,00	109.040.000,00		841.757,00	-
160	50201497	SD NEGERI MANGGONG	Jonggat	661.803,00	-	176.720.000,00	176.720.000,00		661.803,00	-
161	50200966	SD NEGERI 3 BAREJULAT	Jonggat	545.629,00	-	61.980.000,00	61.980.000,00		545.629,00	-
162	50200923	SD NEGERI BUN SUMPAK	Jonggat	614.472,00	-	114.680.000,00	114.680.000,00		614.472,00	-
163	50200953	SD NEGERI BEBER	Jonggat	434.365,00	-	210.153.160,00	207.740.000,00		2.847.525,00	-
164	50201932	SD NEGERI 2 BUNKATE	Jonggat	1.331.531,00	-	137.180.000,00	137.180.000,00		1.331.531,00	-
165	50201093	SD NEGERI 2 LABULIA	Jonggat	871.012,00	-	119.320.000,00	119.320.000,00		871.012,00	-
166	50200959	SD NEGERI BATU TINGGANG	Jonggat	1.024.191,00	-	176.720.000,00	176.720.000,00		1.024.191,00	-
167	50201944	SD NEGERI 1 NYEROT	Jonggat	140.652,00	-	144.700.000,00	144.700.000,00		140.652,00	-
168	50201485	SD NEGERI LOANG TUNA	Jonggat	894.318,00	-	58.280.000,00	58.280.000,00		894.318,00	-
169	50200934	SD NEGERI BURHANA	Jonggat	363.954,00	-	98.700.000,00	98.700.000,00		363.954,00	-
170	50200963	SD NEGERI BATU ENTEK	Jonggat	137.566,00	-	56.400.000,00	56.400.500,00		137.066,00	-
171	50201918	SD NEGERI 1 SUKARARA	Jonggat	801.349,00	-	125.020.000,00	125.020.000,00		801.349,00	-
172	50201908	SD NEGERI 2 BAREJULAT	Jonggat	835.115,00	-	206.740.000,00	206.740.000,00		835.115,00	-
173	50201148	SD NEGERI AIK ARA	Jonggat	615.530,00	-	112.800.000,00	112.800.000,00		615.530,00	-
174	50201121	SD NEGERI 2 NYEROT	Jonggat	157.692,00	-	205.860.000,00	205.860.000,00		157.692,00	-
175	50201845	SD NEGERI 1 BUNKATE	Jonggat	680.395,00	-	152.280.000,00	152.280.000,00		680.395,00	-
176	50200975	SD NEGERI BILAKERE	Jonggat	445.907,00	-	128.780.000,00	128.781.500,00		444.407,00	-
177	50200976	SD NEGERI BEREMBENG	Jonggat	639.732,00	-	149.525.000,00	148.520.000,00		1.644.732,00	-
178	50200941	SD NEGERI DASAN KETUJUR	Jonggat	181.354,00	-	47.000.000,00	47.000.000,00		181.354,00	-
179	50201526	SD NEGERI SELANGET	Jonggat	894.140,00	-	206.740.000,00	206.740.000,00		894.140,00	-
180	50201084	SD NEGERI 2 SUKARARA	Jonggat	444.482,00	-	32.900.000,00	32.900.000,00		444.482,00	-
181	50201956	SD NEGERI 1 PENGENJEK	Jonggat	922.522,00	-	231.240.000,00	231.240.000,00		922.522,00	-
182	50201064	SD NEGERI 2 PUYUNG	Jonggat	533.237,00	-	140.060.000,00	140.060.000,00		533.237,00	-
183	50200981	SD NEGERI BEJELO	Jonggat	131.690,00	-	86.480.000,00	86.482.000,00		129.690,00	-



No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal		Pendapatan	Belanja	Pelimpahan Ke RKUD	Saldo Akhir	
				Bank	Tunai				Bank	Tunai
184	50201029	SD NEGERI GALANG BULAN	Jonggat	751.870,00	-	195.420.000,00	191.700.000,00		4.471.870,00	-
185	50200943	SD NEGERI DASAN BENGKEL	Jonggat	247.462,00	-	83.660.000,00	83.660.000,00		247.462,00	-
186	50201872	SD NEGERI 1 BAREJULAT	Jonggat	2.909.245,00	-	235.780.000,00	235.000.000,00		3.689.245,00	-
187	50201323	SD NEGERI WAKER	Jonggat	618.451,00	-	138.180.000,00	138.180.000,00		618.451,00	-
188	50201965	SD NEGERI 1 PUYUNG	Jonggat	872.888,00	-	250.040.000,00	250.040.000,00		872.888,00	-
189	50201860	SD NEGERI 1 LABULIA	Jonggat	1.525.508,00	-	280.060.000,00	280.060.000,00		1.525.508,00	-
190	50201187	SD NEGERI MUMBANG	Kopang	574.104,00	-	106.220.000,00	106.220.000,00		574.104,00	-
191	50201514	SD NEGERI RENGUNG	Kopang	1.907.397,00	-	284.760.000,00	284.760.000,00		1.907.397,00	-
192	50201125	SD NEGERI 2 MONTONG GAMANG	Kopang	630.980,00	-	122.200.000,00	122.200.000,00		630.980,00	-
193	50201445	SD NEGERI Montong Batu	Kopang	2.024.447,00	-	186.120.000,00	186.120.000,00		2.024.447,00	-
194	50201513	SD NEGERI RENGKAK	Kopang	346.425,00	-	100.580.000,00	100.580.000,00		346.425,00	-
195	50201435	SD NEGERI Muncan	Kopang	554.362,00	-	154.100.000,00	154.100.000,00		554.362,00	-
196	50200984	SD NEGERI BARE ELEH	Kopang	3.349.340,00	-	82.720.000,00	82.720.000,00		3.349.340,00	-
197	50200942	SD NEGERI DASAN JONTAK	Kopang	801.813,00	-	212.938.594,00	210.560.000,00		3.180.407,00	-
198	50201006	SD NEGERI KWANG RASE	Kopang	963.643,00	-	70.500.000,00	70.500.000,00		963.643,00	-
199	50201969	SD NEGERI 1 Peseng	Kopang	1.311.084,00	-	75.200.000,00	75.200.000,00		1.311.084,00	-
200	50201440	SD NEGERI MONTONG TANGGAK	Kopang	798.091,00	-	206.740.000,00	206.740.000,00		798.091,00	-
201	50201949	SD NEGERI 1 Monggas	Kopang	519.327,00	-	125.020.000,00	125.020.000,00		519.327,00	-
202	50200955	SD NEGERI BEBAK	Kopang	1.358.393,00	-	104.340.000,00	104.340.000,00		1.358.393,00	-
203	50201552	SD NEGERI PUYUNG	Kopang	396.486,00	-	70.500.000,00	70.500.000,00		396.486,00	-
204	50200931	SD NEGERI BUAL	Kopang	552.227,00	-	65.800.000,00	65.800.000,00		552.227,00	-
205	50201033	SD NEGERI EMBUNG KARUNG	Kopang	443.826,00	-	258.440.000,00	258.440.000,00		443.826,00	-
206	50201501	SD NEGERI SEMPURU	Kopang	713.499,00	-	231.240.000,00	231.240.000,00		713.499,00	-
207	50201018	SD NEGERI KENAWA	Kopang	967.090,00	-	139.120.000,00	139.120.000,00		967.090,00	-
208	50200983	SD NEGERI BEBUAK	Kopang	371.363,00	-	118.380.000,00	118.380.000,00		371.363,00	-
209	50200998	SD NEGERI JURIT	Kopang	780.299,00	-	160.740.000,00	160.740.000,00		780.299,00	-
210	50201566	SD NEGERI PETEMON	Kopang	370.881,00	-	138.180.000,00	138.180.000,00		370.881,00	-
211	50201046	SD NEGERI GUNUNG GATEP	Kopang	1.409.583,00	-	188.000.000,00	188.000.000,00		1.409.583,00	-
212	50201324	SD NEGERI 1 Wajegesang	Kopang	720.669,00	-	179.540.000,00	179.540.000,00		720.669,00	-
213	50201512	SD NEGERI REPOK BIJANG	Kopang	488.838,00	-	92.120.000,00	92.120.000,00		488.838,00	-
214	50201127	SD NEGERI 2 MONGGAS	Kopang	688.362,00	-	188.880.000,00	188.880.000,00		688.362,00	-
215	50201095	SD NEGERI 2 KOPANG	Kopang	1.081.134,00	-	164.500.000,00	164.500.000,00		1.081.134,00	-
216	50201068	SD NEGERI 2 Peseng	Kopang	3.399.214,00	-	187.060.000,00	187.060.000,00		3.399.214,00	-
217	50201947	SD NEGERI 1 MONTONG GAMANG	Kopang	731.700,00	20.000,00	157.900.000,00	157.920.000,00		731.700,00	-
218	50200952	SD NEGERI BISOK BOKAH	Kopang	542.330,00	-	113.740.000,00	113.740.000,00		542.330,00	-
219	50201475	SD NEGERI LENDANG TELAGA	Kopang	663.211,00	-	114.620.000,00	114.620.000,00		663.211,00	-
220	50201469	SD NEGERI LINGKUNG	Kopang	653.225,00	-	155.100.000,00	155.100.000,00		653.225,00	-
221	50201929	SD NEGERI 2 DARMAJI	Kopang	1.061.198,00	-	122.200.000,00	122.200.000,00		1.061.198,00	-
222	50201189	SD NEGERI 4 KOPANG	Kopang	1.247.225,00	-	374.120.000,00	374.120.000,00		1.247.225,00	-
223	50200992	SD NEGERI KARANG TENGAH	Kopang	924.177,00	-	189.880.000,00	189.880.000,00		924.177,00	-
224	50201537	SD NEGERI PRESAK BEBUAK	Kopang	538.344,00	-	173.900.000,00	173.900.000,00		538.344,00	-
225	50201842	SD NEGERI 1 DARMAJI	Kopang	300.190,00	-	171.080.000,00	171.080.000,00		300.190,00	-
226	50201862	SD NEGERI 1 KOPANG	Kopang	1.887.960,00	-	321.480.000,00	321.480.000,00		1.887.960,00	-
227	50201521	SD NEGERI SEMALANG	Kopang	547.516,00	-	166.380.000,00	166.380.000,00		547.516,00	-
228	50201175	SD NEGERI 3 KOPANG	Kopang	835.335,00	-	68.620.000,00	68.620.000,00		835.335,00	-
229	50201542	SD NEGERI Penimpoh	Kopang	409.661,00	-	101.520.000,00	101.520.000,00		409.661,00	-
230	50201443	SD NEGERI MONTONG BUAK	Kopang	568.825,00	-	170.140.000,00	170.140.000,00		568.825,00	-
231	50201480	SD NEGERI LENDANG ARA	Kopang	651.328,00	-	189.880.000,00	189.880.000,00		651.328,00	-
232	50200947	SD NEGERI DASAN BARU	Kopang	1.032.062,00	-	158.860.000,00	158.860.000,00		1.032.062,00	-
233	50201360	SD NEGERI Sombek	Kopang	429.383,00	-	112.800.000,00	112.800.000,00		429.383,00	-
234	50201007	SD NEGERI KWANGPATI	Kopang	973.819,00	-	169.200.000,00	169.200.000,00		973.819,00	-
235	50201558	SD NEGERI PRESAK DARMAJI	Kopang	1.118.708,00	-	107.160.000,00	107.160.000,00		1.118.708,00	-
236	50201507	SD NEGERI RETOT	Kopang	866.403,00	-	194.580.000,00	194.580.000,00		866.403,00	-
237	50201854	SD NEGERI 1 GERUNUNG	Praya	765.313,00	-	148.520.000,00	148.520.000,00		765.313,00	-
238	50201467	SD NEGERI MERTAK TOMBOK	Praya	109.707,00	-	93.060.000,00	93.060.000,00		109.707,00	-
239	50201147	SD NEGERI 22 PRAYA	Praya	13.155.764,00	-	507.642.422,00	499.670.000,00		21.128.186,00	-
240	50201359	SD NEGERI SUNDIL	Praya	311.248,00	-	162.620.000,00	162.620.000,00		311.248,00	-
241	50201050	SD NEGERI GONJAK	Praya	208.658,00	-	172.960.000,00	172.960.000,00		208.658,00	-
242	50201104	SD NEGERI 2 LENENG	Praya	381.173,00	-	235.516.000,00	228.420.000,00		7.477.173,00	-
243	50201911	SD NEGERI 1 WAKUL	Praya	867.270,00	-	124.080.000,00	124.080.000,00		867.270,00	-
244	50201893	SD NEGERI 1 AIKMUAL	Praya	346.643,00	-	177.008.000,00	172.960.000,00		4.394.643,00	-
245	50201931	SD NEGERI 2 BUNUT BAKO	Praya	830.264,00	-	34.780.000,00	34.780.000,00		830.264,00	-
246	50201138	SD NEGERI 7 PRAYA	Praya	1.138.742,00	-	52.640.000,00	52.640.000,00		1.138.742,00	-
247	50201056	SD NEGERI 2 SEMAYAN	Praya	1.320.485,00	-	73.320.000,00	73.320.000,00		1.320.485,00	-
248	50201309	SD NEGERI TANGGAK	Praya	945.874,00	-	129.720.000,00	129.720.000,00		945.874,00	-
249	50200928	SD NEGERI BUNdua	Praya	2.009.474,99	-	140.560.000,00	135.360.000,00		7.209.474,99	-



No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal		Pendapatan	Belanja	Pelimpahan Ke RKUD	Saldo Akhir	
				Bank	Tunai				Bank	Tunai
250	50201300	SD NEGERI TIWU ASEM	Praya	459.108,00	-	79.900.000,00	79.900.000,00		459.108,00	-
251	50201946	SD NEGERI 1 MONTONG TEREP	Praya	907.363,00	-	139.120.000,00	139.120.000,00		907.363,00	-
252	50201910	SD NEGERI 2 AIKMUAL	Praya	385.197,00	-	161.450.000,00	160.740.000,00		1.095.197,00	-
253	50200935	SD NEGERI BUSE	Praya	735.658,00	-	102.400.000,00	102.400.000,00		735.658,00	-
254	50201927	SD NEGERI 2 GERUNUNG	Praya	178.283,00	-	112.800.000,00	112.800.000,00		178.283,00	-
255	50201306	SD NEGERI TELAGA WARU	Praya	1.226.331,00	-	188.000.000,00	188.000.000,00		1.226.331,00	-
256	50201134	SD NEGERI 11 PRAYA	Praya	1.079.445,00	-	184.240.000,00	184.240.000,00		1.079.445,00	-
257	50201962	SD NEGERI 1 SEKUNYIT	Praya	224.458,00	-	88.360.000,00	88.360.000,00		224.458,00	-
258	50201059	SD NEGERI 2 SEKUNYIT	Praya	1.909.232,00	-	92.060.000,00	92.060.000,00		1.909.232,00	-
259	50201166	SD NEGERI 3 PRAYA	Praya	1.355.460,00	-	219.960.000,00	219.960.000,00		1.355.460,00	-
260	50201043	SD NEGERI JAGO	Praya	906.579,00	-	216.200.000,00	216.200.000,00		906.579,00	-
261	50201848	SD NEGERI 1 BODAK	Praya	493.708,00	-	132.540.000,00	132.540.000,00		493.708,00	-
262	50201161	SD NEGERI AIKJA	Praya	7.378.169,00	-	168.155.000,00	166.380.000,00		9.153.169,00	-
263	50201005	SD NEGERI KWANGRUNDUN	Praya	1.254.967,00	-	163.060.000,00	156.040.000,00		8.274.967,00	-
264	50201498	SD NEGERI MAKAM	Praya	3.016.147,00	-	162.620.000,00	162.620.000,00		3.016.147,00	-
265	50205134	SD NEGERI MERTAK UMBAK	Praya	2.454.123,00	-	234.060.000,00	234.060.000,00		2.454.123,00	-
266	50201916	SD NEGERI 1 TENGARI	Praya	968.714,00	-	240.640.000,00	240.640.000,00		968.714,00	-
267	50201037	SD NEGERI GERINTUK	Praya	135.639,00	-	122.200.000,00	122.200.500,00		135.139,00	-
268	50201082	SD NEGERI 2 TENGARI	Praya	268.877,00	-	-	-	268.877,00	-	-
269	50201177	SD NEGERI 3 GERUNUNG	Praya	1.232.258,00	-	147.580.000,00	147.580.000,00		1.232.258,00	-
270	50201184	SD NEGERI 4 PRAYA	Praya	183.062,00	-	573.180.000,00	561.180.000,00		12.183.062,00	-
271	50201554	SD NEGERI PUNIK	Praya	1.263.115,00	-	122.107.727,00	118.440.000,00		4.930.842,00	-
272	50201024	SD NEGERI Gelondong Baru	Praya	1.263.320,00	-	110.100.000,00	108.100.000,00		3.263.320,00	-
273	50201179	SD NEGERI 3 BODAK	Praya	1.079.516,00	-	255.680.000,00	255.680.000,00		1.079.516,00	-
274	50201077	SD NEGERI 2 WAKUL	Praya	300.058,00	-	151.340.000,00	151.340.000,00		300.058,00	-
275	50201461	SD NEGERI PAOK TAWAH	Praya	881.548,00	-	93.940.000,00	93.940.000,00		881.548,00	-
276	50201066	SD NEGERI 2 PRAYA	Praya	1.613.090,00	-	123.140.000,00	123.140.000,00		1.613.090,00	-
277	50201139	SD NEGERI 6 PRAYA	Praya	254.226,00	-	111.860.000,00	111.860.000,00		254.226,00	-
278	50200968	SD NEGERI BEBIE	Praya	874.860,00	-	106.220.000,00	106.220.000,00		874.860,00	-
279	50201488	SD NEGERI MERANG BARU	Praya	866.500,00	-	92.120.000,00	92.120.000,00		866.500,00	-
280	50201137	SD NEGERI 8 PRAYA	Praya	-	-	-	-		-	-
281	50201341	SD NEGERI SERENGAT	Praya	607.801,00	-	193.640.000,00	193.640.000,00		607.801,00	-
282	50201849	SD NEGERI 1 BERAIM	Praya	153.838,00	-	144.700.000,00	144.700.000,00		153.838,00	-
283	50201011	SD NEGERI KETEJER	Praya	1.419.781,00	-	254.320.000,00	254.320.000,00		1.419.781,00	-
284	50201967	SD NEGERI 1 PRAYA	Praya	1.397.701,00	-	112.800.000,00	112.800.000,00		1.397.701,00	-
285	50201076	SD NEGERI 3 AIK MUAL	Praya	680.155,00	-	80.840.000,00	80.840.000,00		680.155,00	-
286	50201124	SD NEGERI 2 MONTONG TEREP	Praya	817.114,00	-	128.780.000,00	128.780.000,00		817.114,00	-
287	50200921	SD NEGERI BUNSAKAL	Praya	834.891,00	-	216.860.000,00	215.260.000,00		2.434.891,00	-
288	50201144	SD NEGERI 5 PRAYA	Praya	1.684.562,00	-	224.819.000,00	222.780.000,00		3.723.562,00	-
289	50200989	SD NEGERI KEKERE	Praya	896.260,00	-	213.535.000,00	210.560.000,00		3.871.260,00	-
290	50201559	SD NEGERI PRAYITNA	Praya	167,00	-	250.980.000,00	250.980.000,00		167,00	-
291	50201935	SD NEGERI 2 BODAK	Praya	983.654,00	-	159.800.000,00	159.800.000,00		983.654,00	-
292	50200933	SD NEGERI BOGAK	Praya	643.486,00	-	163.560.000,00	163.560.000,00		643.486,00	-
293	50200970	SD NEGERI BILE PAIT	Praya	1.386.234,00	-	193.805.000,00	192.700.000,00		2.491.234,00	-
294	50200958	SD NEGERI BATUBANGKA	Praya	1.383.152,00	-	185.180.000,00	185.180.000,00		1.383.152,00	-
295	50201844	SD NEGERI 1 BUNUT BAOK	Praya	1.432.798,00	-	197.750.000,00	195.460.000,00		3.722.798,00	-
296	50201193	SD NEGERI 4 BATUJAI	Praya Barat	460.267,00	-	107.160.000,00	107.160.000,00		460.267,00	-
297	50201087	SD NEGERI 2 PENUJAK	Praya Barat	106.504,00	-	220.900.000,00	220.900.000,00		106.504,00	-
298	50201921	SD NEGERI 1 SETANGGOR	Praya Barat	679.547,00	-	98.700.000,00	98.700.000,00		679.547,00	-
299	50201085	SD NEGERI 2 SETANGGOR	Praya Barat	127.724,00	-	87.420.000,00	87.420.000,00		127.724,00	-
300	50201922	SD NEGERI 2 BATU BEDUK	Praya Barat	139.781,00	-	160.680.000,00	160.680.000,00		139.781,00	-
301	50201053	SD NEGERI EMBOAN	Praya Barat	902.092,00	-	170.140.000,00	170.140.000,00		902.092,00	-
302	50201314	SD NEGERI TOMANG OMANG	Praya Barat	1.318.644,00	-	178.540.000,00	178.540.000,00		1.318.644,00	-
303	50201311	SD NEGERI TANAK RARANG	Praya Barat	521.756,00	-	137.180.000,00	137.180.000,00		521.756,00	-
304	50201017	SD NEGERI KENTAWANG	Praya Barat	4.138.781,00	-	136.300.000,00	136.300.000,00		4.138.781,00	-
305	50201150	SD NEGERI BANGKET MOLO	Praya Barat	129.202,00	-	98.700.000,00	98.700.000,00		129.202,00	-
306	50201105	SD NEGERI 2 MANGKUNG	Praya Barat	412.090,00	-	153.220.000,00	153.220.000,00		412.090,00	-
307	50201539	SD NEGERI Pepakat	Praya Barat	246.006,00	-	158.800.000,00	158.800.000,00		246.006,00	-
308	50201002	SD NEGERI KELOKA	Praya Barat	725.859,00	-	103.400.000,00	103.400.000,00		725.859,00	-
309	50201852	SD NEGERI 1 BATUJAI	Praya Barat	1.024.074,00	-	246.280.000,00	246.280.000,00		1.024.074,00	-
310	50201438	SD NEGERI MONTONG WARU	Praya Barat	1.061.178,00	-	124.080.000,00	124.080.000,00		1.061.178,00	-
311	50201466	SD NEGERI OROK GENDANG	Praya Barat	456.563,00	-	88.360.000,00	88.360.000,00		456.563,00	-
312	50200986	SD NEGERI KELING	Praya Barat	100.000,00	-	124.080.000,00	124.080.000,00		100.000,00	-
313	50201156	SD NEGERI BAREBELIK	Praya Barat	1.615.929,99	-	145.700.000,00	145.700.000,00		1.615.929,99	-
314	50200973	SD NEGERI BILE TENGAK	Praya Barat	429.140,00	-	114.680.000,00	114.680.000,00		429.140,00	-
315	50201014	SD NEGERI Ketangga	Praya Barat	1.476.277,56	-	54.520.000,00	54.520.000,00		1.476.277,56	-



No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal		Pendapatan	Belanja	Pelimpahan Ke RKUD	Saldo Akhir	
				Bank	Tunai				Bank	Tunai
316	50201953	SD NEGERI 1 MANGKUNG	Praya Barat	148.205,00	-	173.440.000,00	172.960.500,00		627.705,00	-
317	50201074	SD NEGERI 3 BATUJAI	Praya Barat	1.784.973,00	-	137.180.000,00	137.180.000,00		1.784.973,00	-
318	50200932	SD NEGERI BONDER	Praya Barat	100.100,00	-	210.460.000,00	209.560.000,00		1.000.100,00	-
319	50201329	SD NEGERI TONGKER	Praya Barat	850.952,00	-	43.240.000,00	43.240.000,00		850.952,00	-
320	50201495	SD NEGERI MASJURING	Praya Barat	87.749,00	-	167.996.599,00	154.160.000,00		13.924.348,00	-
321	50201866	SD NEGERI 1 Kateng	Praya Barat	1.585.838,00	-	146.640.000,00	146.640.000,00		1.585.838,00	-
322	50201140	SD NEGERI 6 PENUJAK	Praya Barat	1.342.269,00	-	136.300.000,00	136.300.000,00		1.342.269,00	-
323	50201145	SD NEGERI 5 PENUJAK	Praya Barat	841.552,00	-	64.860.000,00	64.860.000,00		841.552,00	-
324	50201031	SD NEGERI EMBUNG TANGAR	Praya Barat	126.376,00	-	186.120.000,00	186.120.000,00		126.376,00	-
325	50201167	SD NEGERI 3 PENUJAK	Praya Barat	100.193,00	-	234.820.000,00	234.060.000,00		860.193,00	-
326	50201522	SD NEGERI SELONG BELANAK	Praya Barat	1.514.564,00	-	230.240.000,00	230.240.000,00		1.514.564,00	-
327	50201186	SD NEGERI 4 PENUJAK	Praya Barat	82.500,00	-	170.140.000,00	170.140.000,00		82.500,00	-
328	50201871	SD NEGERI 1 BATUBEDUK	Praya Barat	91.976,00	-	100.580.000,00	100.580.000,00		91.976,00	-
329	50201044	SD NEGERI JABON BARAT	Praya Barat	460.486,00	-	88.360.000,00	88.360.000,00		460.486,00	-
330	50201491	SD NEGERI MENTOKOK	Praya Barat	54.139,00	-	167.725.000,00	167.260.000,00		519.139,00	-
331	50201560	SD NEGERI PRAPAK	Praya Barat	1.613.154,00	-	162.620.000,00	162.620.000,00		1.613.154,00	-
332	50201924	SD NEGERI 2 BATUJAI	Praya Barat	106.959,00	-	122.665.000,00	122.200.000,00		571.959,00	-
333	50201847	SD NEGERI 1 BOMBAS	Praya Barat	572.963,00	-	66.740.000,00	66.740.000,00		572.963,00	-
334	50201934	SD NEGERI 2 BOMBAS	Praya Barat	630.261,00	42.000,00	-	-	672.261,00	-	-
335	50201551	SD NEGERI PETAK	Praya Barat	785.213,00	-	94.000.000,00	94.000.000,00		785.213,00	-
336	50200926	SD NEGERI BUNKLOTOK	Praya Barat	57.662,00	-	140.060.000,00	140.060.000,00		57.662,00	-
337	50201971	SD NEGERI 1 PENUJAK	Praya Barat	518.151,00	-	86.420.000,00	86.420.000,00		518.151,00	-
338	50201856	SD NEGERI 1 JANGKIH JAWA	Praya Barat	116.451,00	-	132.480.000,00	132.480.000,00		116.451,00	-
339	50201925	SD NEGERI 2 JANGKIH JAWA	Praya Barat	922.786,00	-	221.840.000,00	221.841.000,00		921.786,00	-
340	50201354	SD NEGERI TAMPAH	Praya Barat	445.127,00	-	234.000.000,00	234.000.000,00		445.127,00	-
341	50200987	SD NEGERI KELEBUH	Praya Barat	167.323,00	-	50.760.000,00	50.760.000,00		167.323,00	-
342	50201100	SD NEGERI 2 KATENG	Praya Barat	456.210,00	-	50.760.000,00	50.760.000,00		456.210,00	-
343	50201181	SD NEGERI 2 RANGGAGATA	Praya Barat Daya	148.743,00	-	86.480.000,00	86.480.000,00		148.743,00	-
344	50201164	SD NEGERI 3 UNGGA	Praya Barat Daya	319.257,00	-	146.640.000,00	146.640.000,00		319.257,00	-
345	50201126	SD NEGERI PONDOK DALAM	Praya Barat Daya	171.087,00	-	93.060.000,00	93.060.000,00		171.087,00	-
346	50205129	SD NEGERI 1 KELANJUR	Praya Barat Daya	175.256,00	-	90.180.000,00	90.180.000,00		175.256,00	-
347	50201120	SD NEGERI KELAMBI	Praya Barat Daya	1.196.376,00	-	56.400.000,00	56.400.000,00		1.196.376,00	-
348	50201178	SD NEGERI MENTOKAN	Praya Barat Daya	103.017,00	-	66.740.000,00	66.740.000,00		103.017,00	-
349	50201968	SD NEGERI PLAMBIK	Praya Barat Daya	1.152.125,00	-	55.460.000,00	55.460.000,00		1.152.125,00	-
350	50201075	SD NEGERI 2 BATU JANGKIH	Praya Barat Daya	1.445.251,00	-	70.500.000,00	70.500.000,00		1.445.251,00	-
351	50201194	SD NEGERI BATU BOLONG	Praya Barat Daya	1.726.212,00	-	95.880.000,00	95.880.000,00		1.726.212,00	-
352	50201067	SD NEGERI SELANGIT	Praya Barat Daya	548.006,00	-	49.820.000,00	49.820.000,00		548.006,00	-
353	50201192	SD NEGERI 3 DAREK	Praya Barat Daya	1.079.611,00	-	57.340.000,00	57.340.000,00		1.079.611,00	-
354	50201327	SD NEGERI TUDUH	Praya Barat Daya	1.133.849,00	-	143.321.000,00	142.880.000,00		1.574.849,00	-
355	50201912	SD NEGERI 1 UNGGA	Praya Barat Daya	690.164,00	-	131.661.000,00	131.600.000,00		751.164,00	-
356	50219604	SD NEGERI KANGAS	Praya Barat Daya	139.644,00	-	84.600.000,00	84.600.000,00		139.644,00	-
357	50201923	SD NEGERI 1 BATU JANGKIH	Praya Barat Daya	129.143,00	-	32.900.000,00	32.900.000,00		129.143,00	-
358	50205135	SD NEGERI TOROK AIK BELEK	Praya Barat Daya	329.714,00	-	77.080.000,00	77.080.000,00		329.714,00	-
359	50201078	SD NEGERI 2 UNGGA	Praya Barat Daya	1.052.602,00	-	162.560.000,00	162.560.000,00		1.052.602,00	-
360	69786358	SD NEGERI Pandan Sari	Praya Barat Daya	1.045.172,00	-	35.720.000,00	35.720.000,00		1.045.172,00	-
361	50201520	SD NEGERI SEMAYE	Praya Barat Daya	979.853,00	-	81.830.000,00	81.780.000,00		1.029.853,00	-
362	50201063	SD NEGERI KUMBAK	Praya Barat Daya	230.712,00	-	87.420.000,00	87.420.000,00		230.712,00	-
363	50201943	SD NEGERI KENDING SAMPI	Praya Barat Daya	104.783,00	-	74.260.000,00	74.260.000,00		104.783,00	-
364	50201441	SD NEGERI 1 MONTONG SAPAH	Praya Barat Daya	537.691,00	-	56.400.000,00	56.400.000,00		537.691,00	-
365	50201172	SD NEGERI 2 KELANJUR	Praya Barat Daya	2.545.280,00	-	66.740.000,00	66.740.000,00		2.545.280,00	-
366	50219606	SD NEGERI RENTUNG	Praya Barat Daya	139.099,00	-	85.480.000,00	85.480.500,00		138.599,00	-
367	50200997	SD NEGERI 1 KABUL	Praya Barat Daya	902.681,00	-	43.240.000,00	43.240.000,00		902.681,00	-
368	50201141	SD NEGERI TENARU	Praya Barat Daya	182.337,00	-	27.260.000,00	27.260.000,00		182.337,00	-
369	50200967	SD NEGERI BEBERIK-PLAMBIK	Praya Barat Daya	78.748,00	-	60.100.000,00	60.100.000,00		78.748,00	-
370	50201101	SD NEGERI PAMPANG	Praya Barat Daya	143.122,00	-	59.220.000,00	59.220.000,00		143.122,00	-
371	50201169	SD NEGERI BATU RENONG	Praya Barat Daya	172.354,00	-	32.900.000,00	32.900.000,00		172.354,00	-
372	50201036	SD NEGERI GERINTUK	Praya Barat Daya	130.583,00	-	47.000.000,00	47.000.000,00		130.583,00	-
373	50201146	SD NEGERI 4 DAREK	Praya Barat Daya	689.885,00	-	76.080.000,00	76.080.000,00		689.885,00	-
374	50205130	SD NEGERI 1 RANGGAGATA	Praya Barat Daya	414.325,00	-	89.240.000,00	89.240.000,00		414.325,00	-
375	50201518	SD NEGERI SAPE	Praya Barat Daya	90.829,00	-	47.000.000,00	47.000.000,00		90.829,00	-
376	50219605	SD NEGERI SUARE	Praya Barat Daya	463.518,00	-	34.780.000,00	34.780.000,00		463.518,00	-
377	50201449	SD NEGERI NGABOK	Praya Barat Daya	146.345,00	-	34.780.000,00	34.780.000,00		146.345,00	-
378	50201930	SD NEGERI 2 DAREK	Praya Barat Daya	262.487,00	-	55.460.000,00	55.460.000,00		262.487,00	-
379	50222383	SD NEGERI Gerunung	Praya Barat Daya	107.329,00	-	84.600.000,00	84.600.000,00		107.329,00	-
380	50201843	SD NEGERI 1 DAREK	Praya Barat Daya	546.201,00	-	100.580.000,00	100.580.000,00		546.201,00	-
381	50201853	SD NEGERI PANDAN TINGGANG	Praya Barat Daya	147.561,00	-	118.894.000,00	117.500.000,00		1.541.561,00	-



No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal		Pendapatan	Belanja	Pelimpahan Ke RKUD	Saldo Akhir	
				Bank	Tunai				Bank	Tunai
382	50201948	SD NEGERI Montong Ajan	Praya Barat Daya	552.289,00	-	75.200.000,00	75.200.000,00		552.289,00	-
383	50201185	SD NEGERI 4 PLAMBIK (BAGEK DEWE)	Praya Barat Daya	153.631,00	-	90.240.000,00	90.240.000,00		153.631,00	-
384	50201494	SD NEGERI MEKA	Praya Tengah	1.106.957,00	-	175.416.000,00	173.900.000,00		2.622.957,00	-
385	50201339	SD NEGERI SESAKE	Praya Tengah	3.481.339,00	-	131.600.000,00	131.600.000,00		3.481.339,00	-
386	50201102	SD NEGERI 2 JURANG JALER	Praya Tengah	644.133,00	-	112.740.000,00	112.740.000,00		644.133,00	-
387	50201090	SD NEGERI 2 LEONG	Praya Tengah	1.071.013,00	-	89.300.000,00	89.300.000,00		1.071.013,00	-
388	50201524	SD NEGERI SELEBUNG	Praya Tengah	1.369.080,00	-	129.720.000,00	129.720.000,00		1.369.080,00	-
389	50200950	SD NEGERI DAKUNG	Praya Tengah	956.922,00	-	97.760.000,00	97.760.000,00		956.922,00	-
390	50201851	SD NEGERI 1 BATUNYALA	Praya Tengah	1.940.566,00	-	77.080.000,00	77.080.000,00		1.940.566,00	-
391	50201938	SD NEGERI 2 BATUNYALA	Praya Tengah	551.207,00	-	215.200.000,00	215.200.000,00		551.207,00	-
392	50201197	SD NEGERI 3 BERAIM	Praya Tengah	309.544,00	-	205.885.200,00	204.920.000,00		1.274.744,00	-
393	50201061	SD NEGERI 2 SANGGENG	Praya Tengah	712.919,00	-	107.300.000,00	105.280.000,00		2.732.919,00	-
394	50201089	SD NEGERI 2 LENDANG KUNYIT	Praya Tengah	779.518,00	-	129.720.000,00	129.720.000,00		779.518,00	-
395	50201955	SD NEGERI 1 PENGADANG	Praya Tengah	1.381.414,00	-	201.135.000,00	199.280.000,00		3.236.414,00	-
396	50201021	SD NEGERI JORONG	Praya Tengah	2.780.946,00	-	133.781.785,00	128.780.000,00		7.782.731,00	-
397	50201107	SD NEGERI 2 PENGADANG	Praya Tengah	135.727,00	-	84.600.000,00	84.600.000,00		135.727,00	-
398	50201541	SD NEGERI PENIMPOH	Praya Tengah	588.682,00	-	165.300.000,00	164.500.000,00		1.388.682,00	-
399	50201972	SD NEGERI 1 LENDANG KUNYIT	Praya Tengah	500.599,00	-	105.280.000,00	105.280.000,00		500.599,00	-
400	50201340	SD NEGERI SEREWA PRAYA TENGAH	Praya Tengah	1.168.321,00	-	196.460.000,00	196.460.000,00		1.168.321,00	-
401	50201942	SD NEGERI 1 PEJANGGIK	Praya Tengah	1.543.917,00	-	78.960.000,00	78.960.000,00		1.543.917,00	-
402	50201867	SD NEGERI 1 JURANG JALER	Praya Tengah	486.716,00	-	189.237.335,00	187.940.000,00		1.784.051,00	-
403	50201168	SD NEGERI 3 PEJANGGIK	Praya Tengah	2.618.123,00	-	168.260.000,00	168.260.000,00		2.618.123,00	-
404	50201352	SD NEGERI TAMPAR AMPAR	Praya Tengah	99.070,00	-	333.487.928,00	323.300.000,00		10.286.998,00	-
405	50201048	SD NEGERI GUNTUR	Praya Tengah	146.377,00	-	152.280.000,00	152.280.000,00		146.377,00	-
406	50201073	SD NEGERI 3 BATUNYALA	Praya Tengah	704.194,00	-	142.880.000,00	142.880.000,00		704.194,00	-
407	50201109	SD NEGERI 2 PEJANGGIK	Praya Tengah	624.238,00	-	84.600.000,00	84.600.000,00		624.238,00	-
408	50201859	SD NEGERI 1 LAJUT	Praya Tengah	3.793.848,00	-	214.320.000,00	214.320.000,00		3.793.848,00	-
409	50201131	SD NEGERI 2 JONTLAK	Praya Tengah	465.414,00	-	62.980.000,00	62.980.000,00		465.414,00	-
410	50200996	SD NEGERI KARANG BARU	Praya Tengah	562.335,00	-	69.560.000,00	69.560.000,00		562.335,00	-
411	50201023	SD NEGERI GERANTUNG	Praya Tengah	942.066,00	-	154.160.000,00	154.160.000,00		942.066,00	-
412	50201022	SD NEGERI GERENENG	Praya Tengah	167.094,00	-	104.340.000,00	104.340.000,00		167.094,00	-
413	50201937	SD Negeri 2 Beraim	Praya Tengah	2.100.196,00	-	165.840.000,00	165.840.000,00		2.500.196,00	-
414	50201136	SD NEGERI 9 PRAYA	Praya Tengah	229.825,00	-	92.120.000,00	92.120.000,00		229.825,00	-
415	50201035	SD NEGERI EMBUNG BELEK	Praya Tengah	1.209.786,00	-	62.040.000,00	62.040.000,00		1.209.786,00	-
416	50201868	SD NEGERI 1 JONTLAK	Praya Tengah	3.988.228,00	-	191.918.144,00	189.820.000,00		6.086.372,00	-
417	50201502	SD NEGERI 1 SANGGENG	Praya Tengah	273.962,00	-	126.900.000,00	126.900.000,00		273.962,00	-
418	50201839	SD NEGERI 1 LEONG	Praya Tengah	611.804,00	-	89.300.000,00	89.300.000,00		611.804,00	-
419	50200971	SD NEGERI BILELANDO	Praya Timur	1.379.910,00	-	90.240.000,00	90.240.000,00		1.379.910,00	-
420	50201349	SD NEGERI SONGKOK	Praya Timur	890.759,00	-	157.873.387,00	156.040.000,00		2.724.146,00	-
421	50201492	SD NEGERI MENGKUDU	Praya Timur	2.020.438,00	-	130.500.000,00	126.900.000,00		5.620.438,00	-
422	50200988	SD NEGERI KELANJUH	Praya Timur	595.685,91	-	63.920.000,00	63.920.000,00		595.685,91	-
423	50201096	SD NEGERI SEMOYONG	Praya Timur	538.710,00	-	213.380.000,00	213.380.000,00		538.710,00	-
424	50201003	SD NEGERI KELONGKONG	Praya Timur	699.707,00	-	79.660.000,00	78.960.000,00		1.399.707,00	-
425	50201122	SD NEGERI 2 MUJUR	Praya Timur	1.138.704,00	-	137.930.000,00	137.930.000,00		1.138.704,00	-
426	50201344	SD NEGERI SEPAKAT	Praya Timur	1.200.051,00	-	101.566.000,00	100.580.000,00		2.186.051,00	-
427	50201188	SD NEGERI NYAMPE PRAYA TIMUR	Praya Timur	90.072,00	-	141.000.000,00	141.000.000,00		90.072,00	-
428	50201951	SD NEGERI 1 MARONG	Praya Timur	1.221.656,00	-	156.920.000,00	156.920.000,00		1.221.656,00	-
429	50201195	SD NEGERI LENGKAH	Praya Timur	622.984,00	-	109.980.000,00	109.980.000,00		622.984,00	-
430	50201482	SD NEGERI Legu	Praya Timur	1.191.295,00	-	75.200.000,00	75.200.000,00		1.191.295,00	-
431	50201010	SD NEGERI KIDANG	Praya Timur	1.178.966,00	-	271.210.000,00	266.960.000,00		5.428.966,00	-
432	50201362	SD NEGERI Sukaraja	Praya Timur	972.209,00	-	109.040.000,00	109.040.000,00		972.209,00	-
433	50201936	SD NEGERI 2 BELEKA	Praya Timur	1.527.014,00	-	84.030.000,00	82.720.000,00		2.837.014,00	-
434	50201545	SD NEGERI PENANGSAK	Praya Timur	439.267,00	-	58.220.000,00	58.220.000,00		439.267,00	-
435	50201499	SD NEGERI LOKON	Praya Timur	1.363.755,00	-	203.980.000,00	203.980.000,00		1.363.755,00	-
436	50201489	SD NEGERI MENYOSOK	Praya Timur	754.949,00	-	76.880.000,00	76.140.000,00		1.494.949,00	-
437	50201070	SD NEGERI 2 SEMOYANG	Praya Timur	1.306.607,00	-	139.380.000,00	138.180.000,00		2.506.607,00	-
438	50201026	SD NEGERI 2 GANTI	Praya Timur	275.153,01	-	134.420.000,00	134.420.000,00		275.153,01	-
439	50201129	SD NEGERI 2 MARONG	Praya Timur	823.083,00	-	70.500.000,00	70.500.000,00		823.083,00	-
440	50201350	SD NEGERI SOSAK	Praya Timur	1.137.809,00	-	58.280.000,00	58.280.000,00		1.137.809,00	-
441	50200979	SD NEGERI BELEKA	Praya Timur	826.102,00	-	63.920.000,00	63.920.000,00		826.102,00	-
442	50205128	SD NEGERI BERANGAH	Praya Timur	2.843.808,00	-	133.480.000,00	133.480.000,00		2.843.808,00	-
443	50200957	SD NEGERI BATURINTANG	Praya Timur	1.511.478,00	-	287.580.000,00	287.580.000,00		1.511.478,00	-
444	50201173	SD NEGERI 3 MARONG	Praya Timur	794.270,00	-	201.995.000,00	199.280.000,00		3.509.270,00	-
445	50201183	SD NEGERI NYANGGET	Praya Timur	790.396,00	-	83.660.000,00	83.660.000,00		790.396,00	-
446	50200985	SD NEGERI Landah	Praya Timur	194.520,00	-	118.440.000,00	118.440.000,00		194.520,00	-
447	50201538	SD NEGERI PERAS	Praya Timur	557.713,99	-	88.360.000,00	88.360.000,00		557.713,99	-



No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal		Pendapatan	Belanja	Pelimpahan Ke RKUD	Saldo Akhir	
				Bank	Tunai				Bank	Tunai
448	50201171	SD NEGERI 3 MUJUR	Praya Timur	1.747.850,00	-	152.280.000,00	152.280.000,00		1.747.850,00	-
449	50200969	SD NEGERI BEBILE	Praya Timur	148.444,00	-	136.240.000,00	136.240.000,00		148.444,00	-
450	50201055	SD NEGERI 3 BELEKA	Praya Timur	869.477,00	-	195.520.000,00	195.520.000,00		869.477,00	-
451	50201182	SD NEGERI TELOK	Praya Timur	251.289,00	-	127.465.000,00	125.960.000,00		1.756.289,00	-
452	50201850	SD NEGERI 1 BELEKA	Praya Timur	942.436,00	-	185.526.700,00	180.480.000,00		5.989.136,00	-
453	50201009	SD NEGERI KULEM	Praya Timur	1.333.404,00	-	170.080.000,00	170.080.000,00		1.333.404,00	-
454	50201959	SD NEGERI 1 Semoyang	Praya Timur	1.346.137,00	-	58.220.000,00	58.220.000,00		1.346.137,00	-
455	50201945	SD NEGERI 1 MUJUR	Praya Timur	436.946,00	-	137.800.000,00	136.300.000,00		1.936.946,00	-
456	50201841	SD NEGERI 1 GANTI	Praya Timur	1.138.471,00	-	118.775.000,00	116.560.000,00		3.353.471,00	-
457	50201155	SD NEGERI BAGIK KERONGKONG	Praya Timur	800.662,00	-	138.260.000,00	137.180.000,00		1.880.662,00	-
458	50201958	SD NEGERI 1 SENGKERANG	Praya Timur	1.995.577,00	-	219.710.500,00	216.200.000,00		5.506.077,00	-
459	50201508	SD NEGERI REPOK TUNJANG	Pringgarata	143.325,00	-	141.940.000,00	141.940.000,00		143.325,00	-
460	50201434	SD NEGERI MURBAYA	Pringgarata	1.186.410,00	-	170.140.000,00	170.140.000,00		1.186.410,00	-
461	50201020	SD NEGERI JURANG SATE	Pringgarata	1.164.227,00	-	148.520.000,00	148.520.000,00		1.164.227,00	-
462	50201966	SD NEGERI 1 PRINGGARATA	Pringgarata	910.675,00	-	162.620.000,00	162.620.000,00		910.675,00	-
463	50201332	SD NEGERI SINTUNG TIMUR	Pringgarata	884.541,00	-	220.840.000,00	220.840.000,00		884.541,00	-
464	50201920	SD NEGERI SISIK TIMUR	Pringgarata	3.459.144,00	-	152.280.000,00	152.280.000,00		3.459.144,00	-
465	50201030	SD NEGERI ESOT	Pringgarata	1.695.738,00	-	203.040.000,00	203.040.000,00		1.695.738,00	-
466	50201553	SD NEGERI PUSPALAYA	Pringgarata	1.236.878,00	-	228.420.000,00	228.420.000,00		1.236.878,00	-
467	50201478	SD NEGERI LENDANG KELOR	Pringgarata	136.470,00	-	73.320.000,00	73.320.000,00		136.470,00	-
468	50201307	SD NEGERI TAPON	Pringgarata	561.449,00	-	121.200.000,00	121.200.000,00		561.449,00	-
469	50201335	SD NEGERI SINTUNG BARAT	Pringgarata	905.493,00	-	153.160.000,00	153.160.000,00		905.493,00	-
470	50201154	SD NEGERI BAGU	Pringgarata	155.782,00	-	175.780.000,00	175.780.000,00		155.782,00	-
471	50201564	SD NEGERI PIDADA	Pringgarata	1.577.840,00	-	158.860.000,00	158.860.000,00		1.577.840,00	-
472	50201452	SD NEGERI PEMEPEK	Pringgarata	986.466,00	-	192.700.000,00	192.700.000,00		986.466,00	-
473	50201086	SD NEGERI 2 SEPAKEK	Pringgarata	885.506,00	-	90.240.000,00	90.240.000,00		885.506,00	-
474	50201556	SD NEGERI PRINGGARATA TIMUR	Pringgarata	899.586,00	-	154.440.000,00	150.400.000,00		4.939.586,00	-
475	50201957	SD NEGERI 1 PENJANGKA	Pringgarata	601.125,00	-	153.220.000,00	153.220.000,00		601.125,00	-
476	50201088	SD NEGERI 2 PENJANGKA	Pringgarata	282.213,00	-	135.360.000,00	135.360.000,00		282.213,00	-
477	50201557	SD NEGERI PRINGGARATA BARAT	Pringgarata	524.693,00	-	59.160.000,00	59.160.000,00		524.693,00	-
478	50201348	SD NEGERI SISIK BARAT	Pringgarata	712.698,00	-	92.120.000,00	92.120.000,00		712.698,00	-
479	50201504	SD NEGERI SALAM SUKUR	Pringgarata	569.005,00	-	170.140.000,00	170.140.000,00		569.005,00	-
480	50201132	SD NEGERI BANTENG KESELET	Pringgarata	567.616,00	-	97.760.000,00	97.760.000,00		567.616,00	-
481	50201158	SD NEGERI ARJANGKA	Pringgarata	943.446,00	-	266.020.000,00	266.020.000,00		943.446,00	-
482	50200944	SD NEGERI Dasan Baru Inpres	Pringgarata	432.626,00	-	125.020.000,00	125.020.000,00		432.626,00	-
483	50200946	SD NEGERI DASAN BARU NON INPRES	Pringgarata	3.475.225,00	-	109.980.000,00	109.980.000,00		3.475.225,00	-
484	50201047	SD NEGERI GUNUNG AGUNG	Pringgarata	1.029.937,00	-	236.880.000,00	236.880.000,00		1.029.937,00	-
485	50201437	SD NEGERI MONTONG ARA	Pringgarata	1.488.111,00	-	242.160.000,00	240.640.000,00		3.008.111,00	-
486	50200994	SD NEGERI KARANG KEBON	Pringgarata	485.005,00	-	95.880.000,00	95.880.000,00		485.005,00	-
487	50200990	SD NEGERI KEKALEK	Pringgarata	1.162.673,00	-	193.640.000,00	193.640.000,00		1.162.673,00	-
488	50201355	SD NEGERI TAMAN BALI	Pringgarata	234.582,00	-	76.140.000,00	76.140.000,00		234.582,00	-
489	50201939	SD NEGERI 1 SEPAKEK	Pringgarata	361.457,00	-	158.860.000,00	158.860.000,00		361.457,00	-
490	50201493	SD NEGERI MENEMENG	Pringgarata	1.682.526,00	-	278.240.000,00	278.240.000,00		1.682.526,00	-
491	50201533	SD NEGERI RARUNG	Pringgarata	133.929,00	-	78.960.000,00	78.960.000,00		133.929,00	-
492	69900095	SD NEGERI Pempek Barat	Pringgarata	192.373,00	-	74.260.000,00	74.260.000,00		192.373,00	-
493	50200972	SD NEGERI BILEBANTE	Pringgarata	876.823,00	-	86.480.000,00	86.480.000,00		876.823,00	-
494	50201950	SD NEGERI 1 MEDAS	Pringgarata	414.048,00	-	58.280.000,00	58.280.000,00		414.048,00	-
495	50200995	SD NEGERI KARANG JANGKONG	Pringgarata	2.507.398,00	-	125.300.000,00	125.020.000,00		2.787.398,00	-
496	50201128	SD NEGERI 2 MEDAS	Pringgarata	841.105,00	-	158.860.000,00	158.860.000,00		841.105,00	-
497	50201531	SD NEGERI SEDAU TIMUR	Pringgarata	850.832,00	-	109.980.000,00	109.980.000,00		850.832,00	-
498	50201511	SD NEGERI REPOK PIDENDANG	Pringgarata	649.424,00	-	103.400.000,00	103.400.000,00		649.424,00	-
499	50201509	SD NEGERI REPOK SINTUNG	Pringgarata	1.022.395,00	-	138.180.000,00	138.180.000,00		1.022.395,00	-
500	50200936	SD NEGERI CERORONG	Pringgarata	387.955,00	-	80.840.000,00	80.840.000,00		387.955,00	-
501	50201432	SD NEGERI SEMPOJA	Pringgarata	905.426,00	-	163.560.000,00	163.560.000,00		905.426,00	-
502	50200945	SD NEGERI DASAN BARU JABON	Pringgarata	900.913,00	-	166.380.000,00	166.380.000,00		900.913,00	-
503	50201065	SD NEGERI 2 PRINGGARATA	Pringgarata	675.257,00	-	90.240.000,00	90.240.000,00		675.257,00	-
504	50201143	SD NEGERI 5 SENGKOL	Pujut	119.295,00	-	172.020.000,00	172.021.000,00		118.295,00	-
505	50201041	SD NEGERI JELATENG	Pujut	299.156,00	-	182.360.000,00	182.360.500,00		298.656,00	-
506	50201562	SD NEGERI PONGOS	Pujut	601.930,00	-	106.220.000,00	106.220.000,00		601.930,00	-
507	50200925	SD NEGERI BUNMAS	Pujut	98.851,00	-	71.380.000,00	71.380.500,00		98.351,00	-
508	50200927	SD NEGERI BUNGAWAN	Pujut	745.261,00	-	110.920.000,00	110.920.000,00		745.261,00	-
509	50201190	SD NEGERI 4 KAWO	Pujut	1.033.358,00	-	138.180.000,00	137.240.000,00		1.973.358,00	-
510	50201072	SD NEGERI 2 SENGKOL	Pujut	2.036.268,00	-	165.440.000,00	165.440.000,00		2.036.268,00	-
511	50201015	SD NEGERI KETANGAN	Pujut	276.312,00	-	94.000.000,00	94.000.500,00		275.812,00	-
512	50201458	SD NEGERI PASUNG	Pujut	779.637,00	-	107.160.000,00	107.160.000,00		779.637,00	-
513	50201157	SD NEGERI AWANG	Pujut	1.546.608,00	-	263.460.000,00	243.460.000,00		21.546.608,00	-



No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal		Pendapatan	Belanja	Pelimpahan Ke RKUD	Saldo Akhir	
				Bank	Tunai				Bank	Tunai
514	50201336	SD NEGERI SEWAR	Pujut	406.127,00	-	88.360.000,00	88.360.000,00		406.127,00	-
515	50201365	SD NEGERI SEMUNDAL	Pujut	705.848,00	-	154.160.000,00	154.160.500,00		705.348,00	-
516	50200937	SD NEGERI DONDAK	Pujut	3.342.337,00	-	161.680.000,00	161.680.000,00		3.342.337,00	-
517	50201313	SD NEGERI TOLOT-TOLOT	Pujut	222.744,00	-	107.160.000,00	107.161.000,00		221.744,00	-
518	50201436	SD NEGERI MONYEL	Pujut	1.041.470,00	-	193.580.000,00	193.580.000,00		1.041.470,00	-
519	50200920	SD NEGERI BUNPETUNG	Pujut	976.951,00	-	179.540.000,00	179.540.000,00		976.951,00	-
520	50200924	SD NEGERI BUNUT BAKO	Pujut	259.300,00	-	92.120.000,00	92.120.000,00		259.300,00	-
521	50201305	SD NEGERI TELUK BULAN	Pujut	869.591,00	-	148.460.000,00	148.460.000,00		869.591,00	-
522	50201503	SD NEGERI SAMBAK DUI	Pujut	100.105,00	-	124.960.000,00	124.961.500,00		98.605,00	-
523	50201861	SD NEGERI 1 KUTA	Pujut	2.369.276,00	-	348.172.374,00	345.920.000,00		4.621.650,00	-
524	50200930	SD NEGERI BUMBANG	Pujut	4.360.690,00	-	255.680.000,00	255.680.000,00		4.360.690,00	-
525	50201516	SD NEGERI SANGGENG	Pujut	605.783,00	-	35.720.000,00	35.720.000,00		605.783,00	-
526	50201454	SD NEGERI PEMASAH	Pujut	470.536,00	-	128.720.000,00	128.720.000,00		470.536,00	-
527	50200980	SD NEGERI BELAR	Pujut	652.035,00	-	60.160.000,00	60.160.000,00		652.035,00	-
528	50201543	SD NEGERI Pengengat	Pujut	2.642.644,00	-	135.360.000,00	135.360.000,00		2.642.644,00	-
529	50201457	SD NEGERI PEJERUK	Pujut	226.102,00	-	115.620.000,00	115.620.500,00		225.602,00	-
530	50201151	SD NEGERI BANGKANG	Pujut	1.056.769,00	-	229.300.000,00	229.300.000,00		1.056.769,00	-
531	69894290	SD NEGERI Montong Gerantung	Pujut	108.322,00	-	113.740.000,00	113.740.000,00		108.322,00	-
532	50201176	SD NEGERI 3 KAWO	Pujut	2.789.018,00	-	190.760.000,00	190.760.000,00		2.789.018,00	-
533	50201328	SD NEGERI TUBAN	Pujut	928.468,00	-	107.160.000,00	107.160.000,00		928.468,00	-
534	50201304	SD NEGERI TEMPIT	Pujut	532.445,00	-	113.740.000,00	113.740.000,00		532.445,00	-
535	50201459	SD NEGERI PAPAK	Pujut	817.885,00	-	126.900.000,00	126.902.000,00		815.885,00	-
536	50201326	SD NEGERI TUMPAK	Pujut	1.026.899,00	-	131.600.000,00	131.601.500,00		1.025.399,00	-
537	50201917	SD NEGERI 1 TANAK AWU	Pujut	634.749,00	-	97.760.000,00	97.760.000,00		634.749,00	-
538	50201342	SD NEGERI SERENENG	Pujut	171.978,00	-	109.980.000,00	109.981.000,00		170.978,00	-
539	50201308	SD NEGERI TANSANG-ANSANG	Pujut	342.204,00	-	158.800.000,00	158.801.000,00		341.204,00	-
540	50201863	SD NEGERI 1 KETARA	Pujut	471.839,10	-	148.520.000,00	148.520.000,00		471.839,10	-
541	50201159	SD NEGERI AREGULING	Pujut	213.093,00	-	81.780.500,00	81.780.500,00		212.593,00	-
542	50201519	SD NEGERI SEMPALAN	Pujut	592.027,00	-	94.940.000,00	94.940.000,00		592.027,00	-
543	50201315	SD NEGERI TONJER	Pujut	893.921,00	-	118.440.000,00	118.440.000,00		893.921,00	-
544	50201094	SD NEGERI 2 KUTA	Pujut	1.494.106,00	-	273.540.000,00	273.540.000,00		1.494.106,00	-
545	50201351	SD NEGERI TAMPING	Pujut	128.608,00	-	118.380.000,00	118.381.000,00		127.608,00	-
546	50201099	SD NEGERI 2 KAWO	Pujut	750.453,00	-	101.520.000,00	101.520.000,00		750.453,00	-
547	50201940	SD NEGERI 1 SENGKOL	Pujut	632.930,00	-	75.200.000,00	75.200.000,00		632.930,00	-
548	50200960	SD NEGERI BATU PEDANG	Pujut	1.043.504,00	-	203.920.000,00	203.920.000,00		1.043.504,00	-
549	50201081	SD NEGERI 2 TERUWAI	Pujut	688.785,00	-	94.000.000,00	94.000.000,00		688.785,00	-
550	50201027	SD NEGERI GANTANG	Pujut	1.198.737,00	-	142.880.000,00	142.880.000,00		1.198.737,00	-
551	50220625	SD NEGERI 3 REMBITAN	Pujut	1.384.605,00	-	189.880.000,00	189.880.500,00		1.384.105,00	-
552	50200982	SD NEGERI BEDUS	Pujut	865.918,00	-	166.380.000,00	166.381.500,00		864.418,00	-
553	50201038	SD NEGERI GERUPUK	Pujut	1.187.441,00	-	202.551.000,00	196.460.000,00		7.278.441,00	-
554	50201343	SD NEGERI SERENANG	Pujut	843.563,00	-	180.480.000,00	180.480.000,00		843.563,00	-
555	50201865	SD NEGERI 1 Kawo	Pujut	408.313,00	-	189.820.000,00	189.821.000,00		407.313,00	-
556	50201525	SD NEGERI SELAWANG	Pujut	1.074.143,00	-	200.160.000,00	200.160.000,00		1.074.143,00	-
557	50201322	SD NEGERI WARENG	Pujut	353.293,00	-	109.980.000,00	109.980.500,00		352.793,00	-
558	50200965	SD NEGERI BARELANTAN	Pujut	225.171,00	-	77.980.000,00	77.080.500,00		1.124.671,00	-
559	50201196	SD NEGERI 3 SENGKOL	Pujut	802.052,00	-	154.160.000,00	154.160.000,00		802.052,00	-
560	50201062	SD NEGERI 2 REMBITAN	Pujut	1.274.690,00	-	195.460.000,00	195.460.000,00		1.274.690,00	-
561	50201517	SD NEGERI SANGI	Pujut	104.771,00	-	89.240.000,00	89.240.000,00		104.771,00	-
562	50201915	SD NEGERI 1 TERUWAI	Pujut	109.023,00	-	160.680.000,00	160.680.500,00		108.523,00	-
563	50201032	SD NEGERI EMBUNG RUNGKAS	Pujut	494.366,00	-	89.300.000,00	89.300.000,00		494.366,00	-
564	50201528	SD NEGERI SEKEMBANG	Pujut	526.173,00	-	127.840.000,00	127.840.000,00		526.173,00	-
565	50201083	SD NEGERI 2 TANAK AWU	Pujut	1.335.625,00	-	264.080.000,00	264.080.000,00		1.335.625,00	-
566	50201052	SD NEGERI GILIK	Pujut	834.396,00	-	60.160.000,00	60.160.000,00		834.396,00	-
567	50201544	SD NEGERI PENGEMBUR	Pujut	829.289,00	-	118.440.000,00	118.440.000,00		829.289,00	-
568	50201477	SD NEGERI LENDANG LANTAN	Pujut	1.363.241,00	-	96.820.000,00	96.820.000,00		1.363.241,00	-
569	50201964	SD NEGERI 1 REMBITAN	Pujut	4.886.724,00	-	323.360.000,00	323.360.000,00		4.886.724,00	-
570	50201450	SD NEGERI NGOLANG	Pujut	1.579.927,00	-	150.400.000,00	150.400.000,00		1.579.927,00	-
571	50200964	SD NEGERI BAREPAOK	Pujut	1.004.425,00	-	148.520.000,00	148.520.000,00		1.004.425,00	-
572	50201097	SD NEGERI 2 KETARA	Pujut	818.077,00	-	139.120.000,00	139.120.000,00		818.077,00	-
573	50201534	SD NEGERI RAJAN	Pujut	1.636.820,00	-	82.660.000,00	82.660.000,00		1.636.820,00	-
574	50201165	SD NEGERI 4 SENGKOL	Pujut	948.196,00	-	207.740.000,00	207.740.000,00		948.196,00	-
575	50201473	SD NEGERI LENTEK	Pujut	3.097.233,00	-	133.480.000,00	133.482.000,00		3.095.233,00	-
B. JUMLAH JENJANG SD				535.721.472,00	62.000,00	80.175.592.293,06	79.900.703.500,00	941.138,00	809.681.127,06	50.000,00
1	50201317	SMP NEGERI 1 BATUKLIANG	Batukliang	2.645.508,00	-	697.816.449,00	693.881.000,00		6.580.957,00	
2	50201407	SMPN 2 BATUKLIANG	Batukliang	1.523.696,00	-	363.414.000,00	361.921.500,00		3.016.196,00	
3	50201418	SMP NEGERI 4 BATUKLIANG	Batukliang	152.273,00	-	167.040.000,00	167.042.500,00		149.773,00	



No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal		Pendapatan	Belanja	Pelimpahan Ke RKUD	Saldo Akhir	
				Bank	Tunai				Bank	Tunai
4	69759255	SMPN 5 BATUKLIANG	Batukliang	808.411,00	-	218.310.000,00	218.080.000,00		1.038.411,00	
5	50201429	SMP NEGERI 3 BATUKLIANG	Batukliang	360.230,00	-	244.920.000,00	244.922.000,00		358.230,00	
6	50205173	SMP NEGERI SATU ATAP 2 BATUKLIANG	Batukliang	769.047,15	-	109.040.000,00	109.041.500,00		767.547,15	
7	50205171	SMP NEGERI SATU ATAP 1 BATUKLIANG	Batukliang	137.475,89	-	183.993.000,00	180.962.500,00		3.167.975,89	
8	50220240	SMP-SD SATU ATAP LANTAN	Batukliang Utara	134.014,00	-	126.847.000,00	120.640.000,00		6.341.014,00	
9	50201406	SMP NEGERI 2 BATUKLIANG UTARA	Batukliang Utara	476.864,00	-	204.160.000,00	204.160.000,00		476.864,00	
10	50201417	SMP NEGERI 4 BATUKLIANG UTARA	Batukliang Utara	96.517,00	-	139.200.000,00	139.200.000,00		96.517,00	
11	50201428	SMP NEGERI 3 BATUKLIANG UTARA	Batukliang Utara	1.237.087,00	315.220,00	150.484.780,00	151.125.500,00		911.587,00	
12	50220245	SMP NEGERI SATAP REPUK SINTUNG	Batukliang Utara	166.299,40	-	59.855.500,00	59.856.000,00		165.799,40	
13	50201316	SMP NEGERI 1 BATUKLIANG UTARA	Batukliang Utara	1.193.426,00	-	331.760.000,00	331.761.500,00		1.191.926,00	
14	69987307	SMP NEGERI 7 SATU ATAP BATUKLIANG UTARA	Batukliang Utara	413,41	-	10.440.000,00	10.440.000,00		413,41	
15	50201198	SMP NEGERI 1 JANAPRIA	Janapria	1.448.445,40	-	447.850.500,00	446.261.500,00		1.448.445,40	1.589.000,00
16	50201399	SMP NEGERI 4 JANAPRIA	Janapria	1.039.101,00	-	273.534.000,00	272.170.000,00		2.403.101,00	
17	50201405	SMP NEGERI 2 JANAPRIA	Janapria	2.297.760,00	-	180.960.000,00	180.961.000,00		2.296.760,00	
18	50201427	SMP NEGERI 3 JANAPRIA	Janapria	750.390,00	-	164.568.000,00	163.560.000,00		1.758.390,00	
19	50220287	SMP NEGERI 5 JANAPRIA	Janapria	770.431,00	-	114.478.408,00	114.478.408,00		770.431,00	
20	69946504	SMPN 6 JANAPRIA	Janapria	277.844,00	-	77.720.000,00	77.720.000,00		277.844,00	
21	50201377	SMP NEGERI 5 JONGGAT	Jonggat	5.618.628,00	-	257.348.649,00	257.348.649,00		5.618.628,00	
22	50201426	SMP NEGERI 3 JONGGAT	Jonggat	260.358,00	-	332.546.500,00	332.547.000,00		259.858,00	
23	50201431	SMP NEGERI 1 JONGGAT	Jonggat	1.987.085,00	-	666.040.000,00	666.040.000,00		1.987.085,00	
24	50201404	SMP NEGERI 2 JONGGAT	Jonggat	5.306.767,00	-	486.502.576,00	486.502.576,00		5.306.767,00	
25	69815400	SMPN 6 JONGGAT	Jonggat	90.133,00	-	60.320.000,00	60.320.000,00		90.133,00	
26	50201398	SMP NEGERI 4 JONGGAT	Jonggat	909.770,00	-	240.120.000,00	240.120.000,00		909.770,00	
27	50201413	SMP NEGERI 1 KOPANG	Kopang	2.207.459,00	-	732.547.000,00	728.480.500,00		6.273.959,00	
28	50201425	SMP NEGERI 3 KOPANG	Kopang	1.505.283,00	-	518.847.042,00	517.362.000,00		2.990.325,00	
29	50201376	SMP NEGERI 5 KOPANG	Kopang	534.310,00	-	372.560.000,00	372.561.500,00		532.810,00	
30	50201380	SMP NEGERI 4 KOPANG	Kopang	426.127,50	-	271.440.000,00	271.441.000,00		425.127,50	
31	50201403	SMP NEGERI 2 KOPANG	Kopang	97.089,00	-	464.200.000,00	464.200.000,00		97.089,00	
32	50219608	SMP NEGERI 6 KOPANG	Kopang	5.268.632,00	-	374.231.988,00	372.562.000,00		6.938.620,00	
33	50201375	SMP NEGERI 5 PRAYA	Praya	460.115,00	-	274.510.000,00	273.760.000,00		1.210.115,00	
34	50201379	SMP NEGERI 4 PRAYA	Praya	130.876,00	-	169.200.000,00	169.200.000,00		130.876,00	
35	50201402	SMP NEGERI 2 PRAYA	Praya	1.982.589,00	17.500,00	849.120.000,00	849.137.500,00		1.982.589,00	
36	50201412	SMPN 1 PRAYA	Praya	617.627,00	-	1.381.110.000,00	1.378.080.500,00		3.647.127,00	
37	50201424	SMP NEGERI 3 PRAYA	Praya	1.365.182,00	-	412.960.000,00	412.960.000,00		1.365.182,00	
38	50219611	SMP NEGERI 6 PRAYA	Praya	2.623.059,00	-	75.410.000,00	77.844.000,00		189.059,00	
39	50205169	SMP NEGERI 1 PRAYA BARAT	Praya Barat	3.094.470,00	-	528.960.000,00	528.960.000,00		3.094.470,00	
40	50219613	SMP NEGERI 4 PRAYA BARAT	Praya Barat	1.077.980,00	-	184.426.000,00	184.426.000,00		1.077.980,00	
41	50219615	SMP NEGERI 6 Satu Atap Praya Barat	Praya Barat	1.443.133,00	-	42.920.000,00	42.920.000,00		1.443.133,00	
42	50220239	SMPN SATU ATAP EMBOAN	Praya Barat	1.593.242,04	-	70.760.000,00	70.760.000,00		1.593.242,04	
43	69762790	SMPN 8 SATAP PRAYA BARAT	Praya Barat	146.923,00	-	110.400.000,00	110.400.000,00		146.923,00	
44	50201401	SMP NEGERI 2 PRAYA BARAT	Praya Barat	170.233,00	-	69.600.000,00	69.600.500,00		169.733,00	
45	50219612	SMP NEGERI 3 PRAYA BARAT	Praya Barat	141.829,00	-	97.495.000,00	96.480.000,00		1.156.829,00	
46	69816345	SMPN 10 PRAYA BARAT	Praya Barat	376.792,00	-	127.600.000,00	127.600.000,00		376.792,00	
47	69896882	SMP NEGERI 9 PRAYA BARAT	Praya Barat	106.500,00	-	34.800.000,00	34.800.000,00		106.500,00	
48	50219614	SMP NEGERI SATU ATAP 5 PRAYA BARAT	Praya Barat	534.110,13	-	15.080.000,00	15.080.000,00		534.110,13	
49	50201400	SMP NEGERI 2 PRAYA BARAT DAYA	Praya Barat Daya	640.666,00	-	67.280.000,00	67.280.000,00		640.666,00	
50	50201423	SMP NEGERI 3 PRAYA BARAT DAYA	Praya Barat Daya	488.235,00	-	46.400.000,00	46.400.000,00		488.235,00	
51	50205170	SMP NEGERI 1 PRAYA BARAT DAYA	Praya Barat Daya	787.543,00	-	124.603.000,00	124.603.000,00		787.543,00	
52	50219616	SMP NEGERI 4 PRAYA BARAT DAYA	Praya Barat Daya	3.864.179,00	-	72.414.000,00	76.179.000,00		99.179,00	
53	50220237	SMP NEGERI Satu Atap Kumbak	Praya Barat Daya	151.301,15	-	56.989.900,00	57.040.000,00		101.201,15	
54	69767765	SMP NEGERI 6 Satu Atap Praya Barat Daya	Praya Barat Daya	171.941,00	-	12.760.000,00	12.760.000,00		171.941,00	
55	69821213	SD-SMPN SATAP 7 PRAYA BARAT DAYA	Praya Barat Daya	93.798,00	-	44.080.000,00	44.080.000,00		93.798,00	
56	50201422	SMP NEGERI 3 PRAYA TENGAH	Praya Tengah	2.437.710,00	-	127.840.760,00	127.840.760,00		2.437.710,00	
57	50201414	SMP NEGERI 2 PRAYA TENGAH	Praya Tengah	4.501.873,00	-	42.092.256,00	40.600.000,00		5.994.129,00	
58	50219617	SMP NEGERI 4 PRAYA TENGAH	Praya Tengah	532.994,00	-	53.360.000,00	53.360.000,00		532.994,00	
59	50201411	SMPN 1 PRAYA TENGAH	Praya Tengah	1.537.599,00	-	358.440.000,00	358.440.000,00		1.537.599,00	
60	50201378	SMP Negeri 4 PRAYA TIMUR	Praya Timur	214.629,00	-	177.750.000,00	177.750.500,00		214.129,00	
61	50201410	SMP NEGERI 1 PRAYA TIMUR	Praya Timur	1.486.607,00	-	551.600.000,00	551.602.500,00		1.484.107,00	
62	50201415	SMP NEGERI 2 PRAYA TIMUR	Praya Timur	443.792,00	1.000,00	292.316.000,00	292.319.000,00		441.792,00	
63	50205176	SMP NEGERI 6 PRAYA TIMUR	Praya Timur	791.832,00	-	435.200.000,00	435.200.000,00		791.832,00	
64	50220238	SMP NEGERI SATU ATAP BATURINTANG	Praya Timur	383.359,62	-	162.600.000,00	162.600.000,00		383.359,62	
65	50201421	SMP NEGERI 3 PRAYA TIMUR	Praya Timur	2.457.380,00	-	121.800.000,00	121.800.000,00		2.457.380,00	
66	50219618	SD-SMP NEGERI SATU ATAP 7 PRAYA TIMUR	Praya Timur	91.682,00	-	46.400.000,00	46.400.000,00		91.682,00	
67	50219619	SMP NEGERI SATU ATAP 8 PRAYA TIMUR	Praya Timur	608.637,00	-	96.480.000,00	96.480.000,00		608.637,00	
68	50222385	SMP NEGERI 10 Satu Atap Praya Timur	Praya Timur	139.580,00	-	63.800.000,00	63.800.000,00		139.580,00	
69	50205175	SMP NEGERI 5 PRAYA TIMUR	Praya Timur	338.025,00	-	38.280.000,00	38.280.000,00		338.025,00	



No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Awal		Pendapatan	Belanja	Pelimpahan Ke RKUD	Saldo Akhir	
				Bank	Tunai				Bank	Tunai
70	50201409	SMP NEGERI 1 PRINGGARATA	Pringgarata	3.841.375,00	-	756.320.000,00	756.320.500,00		3.840.875,00	
71	50201420	SMP NEGERI 3 PRINGGARATA	Pringgarata	6.719.236,00	499.800,00	242.140.200,00	242.640.000,00		6.719.236,00	
72	50201416	SMP NEGERI 2 PRINGGARATA	Pringgarata	835.140,00	-	142.680.000,00	142.680.000,00		835.140,00	
73	50222366	SMPN 4 PRINGGARATA SATAP REPUK TUNJANG	Pringgarata	473.937,40	-	41.760.000,00	41.760.000,00		473.937,40	
74	50201374	SMP NEGERI 5 PUJUT	Pujut	1.957.836,00	-	276.080.000,00	276.080.000,00		1.957.836,00	
75	50201408	SMP NEGERI 1 PUJUT	Pujut	4.553.932,00	-	628.720.000,00	628.720.500,00		4.553.432,00	
76	50201419	SMP NEGERI 3 PUJUT	Pujut	3.428.959,00	-	515.040.000,00	515.040.500,00		3.428.459,00	
77	50205172	SMP NEGERI 9 SATU ATAP PUJUT	Pujut	698.857,83	-	98.600.000,00	98.601.500,00		697.357,83	
78	50205177	SMP NEGERI 7 PUJUT	Pujut	1.861.955,00	-	363.080.000,00	363.082.000,00		1.859.955,00	
79	50205178	SMP NEGERI 8 PUJUT	Pujut	345.593,00	-	196.092.613,00	196.040.500,00		397.706,00	
80	69786355	SMP NEGERI 12 Satu Atap Pujut	Pujut	122.125,00	-	59.360.000,00	59.360.000,00		122.125,00	
81	50201373	SMPN 6 PUJUT	Pujut	1.299.800,00	-	117.360.000,00	117.361.500,00		1.298.300,00	
82	50205174	SMP NEGERI 4 PUJUT	Pujut	882.446,00	-	116.000.000,00	116.000.000,00		882.446,00	
83	50220463	SMPN 10 PUJUT	Pujut	62.310,00	-	114.840.000,00	114.840.500,00		61.810,00	
84	69759254	SMP NEGERI 13 Satu Atap Pujut	Pujut	132.319,00	-	33.640.000,00	33.640.000,00		132.319,00	
85	69812065	SMPN 11 PUJUT	Pujut	387.500,00	-	56.840.000,00	56.841.500,00		386.000,00	
86	69896877	SMP NEGERI 15 PUJUT	Pujut	99.807,00	-	68.440.000,00	68.441.000,00		98.807,00	
87	50201430	SMP NEGERI 2 PUJUT	Pujut	1.168.608,00	-	320.160.000,00	320.162.000,00		1.166.608,00	
88	69761727	SMP NEGERI Satu Atap Bangkang	Pujut	399.552,59	-	91.727.500,00	91.841.000,00		286.052,59	
C. JUMLAH JENJANG SMP				107.796.186,51	833.520,00	20.718.812.621,00	20.693.946.393,00	-	131.906.934,51	1.589.000,00
JUMLAH A+B+C				644.496.176,62	895.520,00	101.342.259.775,26	101.042.522.393,00	941.138,00	942.548.940,88	1.639.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

NO	Nama Wajib Pajak	OPD Penanggung jawab	Tanggal Pengakuan Piutang	Tanggal Pelaporan	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang Awal	Nilai Piutang Per Tanggal Pelaporan (31 DESEMBER 2025)	Penambahan Piutang (Debet)		Pengurangan Piutang (Kredit)		Nilai Piutang Per N-1 Tanggal Pelaporan (31 Desember 2024)	Penyisihan Piutang (Kategori)				Nilai Penyisihan	NRV
								(SKP/SKR-TBP)	Koreksi	STS/TBP / LRA	Koreksi		Lancar (<1 th)	Kurang Lancar (1 s.d.3 th)	Diragukan (3 s.d.5 th)	Macet (>5 th)		
													0,005	0,1	0,5	1		
1 1 03	Piutang Pajak Daerah						106.470.878.979,67	8.953.937.556,67	15.040.217.053,93	3.774.865.726,00	126.427.517,00	86.378.017.612,07	89.198.987,79	870.612.501,30	10.054.613.831,50	59.815.728.745,00	70.830.154.065,59	35.640.724.914,07
1 1 03 06	Piutang Pajak Hotel						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 03 09	Piutang Pajak Reklame	Bapenda					35.731.666,67	17.787.916,67	-	15.750.000,00	-	33.693.750,00	132.908,33	915.000,00	-	-	1.047.908,33	34.683.758,33
1 1 03 09 01	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	Bapenda			-		35.731.666,67	17.787.916,67	-	15.750.000,00	-	33.693.750,00	132.908,33	915.000,00	-	-	1.047.908,33	34.683.758,33
	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	Bapenda			-		35.731.666,67	17.787.916,67	-	15.750.000,00	-	33.693.750,00	132.908,33	915.000,00	-	-	1.047.908,33	34.683.758,33
1 1 03 09 01 0																		
	Nipon Paint (5 Berkas)		31/12/2022	31/12/2025	3,00		-						-	-	-	-	0,00	-
	PT Nipon Paint (5 Berkas)		31/12/2022	31/12/2025	3,00		-						-	-	-	-	0,00	-
	Toko Sukses		31/12/2022	31/12/2025	3,00		-						-	-	-	-	0,00	-
	Reklame Kain						-						-	-	-	-	0,00	-
	Reklame Melekap/Stiker						-						-	-	-	-	0,00	-
	Pegadaian Syariah		31/12/2023	31/12/2025	2,00		-						-	-	-	-	0,00	-
	Gadai Mas		31/12/2023	31/12/2025	2,00	5.400.000,00						5.400.000,00	-	540.000	-	0,00	540.000,00	4.860.000,00
	Fren Beach Hotel		31/12/2023	31/12/2025	2,00	900.000,00						900.000,00	-	90.000	-	0,00	90.000,00	810.000,00
	Le To Much		31/12/2023	31/12/2025	2,00	750.000,00						750.000,00	-	75.000	-	0,00	75.000,00	675.000,00
	Aldis Bungalows		31/12/2023	31/12/2025	2,00	600.000,00						600.000,00	-	60.000	-	0,00	60.000,00	540.000,00
	PT. Kuta Indah Central (El Tropico Kuta)		31/12/2023	31/12/2025	2,00	-						-	-	-	-	-	0,00	-
	Elgarito		31/12/2023	31/12/2025	2,00	900.000,00						900.000,00	-	90.000	-	0,00	90.000,00	810.000,00
	Maharani		31/12/2023	31/12/2025	2,00	300.000,00						300.000,00	-	30.000	-	0,00	30.000,00	270.000,00
	Kenza		31/12/2023	31/12/2025	2,00	300.000,00						300.000,00	-	30.000	-	0,00	30.000,00	270.000,00
	Raja Hotel Kuta Mandalika		31/12/2023	31/12/2025	2,00	-						-	-	-	-	-	0,00	-
	Privet Sanctuary		31/12/2023	31/12/2025	2,00	-						-	-	-	-	-	0,00	-
	PT. Indomarco Prismatama-Kuta		31/12/2023	31/12/2025	2,00	-						-	-	-	-	-	0,00	-
	PT. Indomarco Prismatama-Kuta		31/12/2023	31/12/2025	2,00	-						-	-	-	-	-	0,00	-
	PT. Indomarco Prismatama-Semayan		31/12/2023	31/12/2025	2,00	-						-	-	-	-	-	0,00	-
	PT. Indomarco Prismatama-Semayan		31/12/2023	31/12/2025	2,00	-						-	-	-	-	-	0,00	-
	PT. Indomarco Prismatama-Basuki Rahmat		31/12/2023	31/12/2025	2,00	-						-	-	-	-	-	0,00	-
	PT. Indomarco Prismatama-Basuki Rahmat		31/12/2023	31/12/2025	2,00	-						-	-	-	-	-	0,00	-
	Bank Mandiri		31/12/2023	31/12/2025	2,00	-						-	-	-	-	-	0,00	-
	Bank Mandiri		31/12/2023	31/12/2025	2,00	-						-	-	-	-	-	0,00	-
	Bank Mandiri		31/12/2023	31/12/2025	2,00	-						-	-	-	-	-	0,00	-
	Polaris		31/12/2023	31/12/2025	2,00	-						-	-	-	-	-	0,00	-
	Link Media		31/12/2023	31/12/2025	2,00	-						-	-	-	-	-	0,00	-
	PT SINAR SOSRO		31/12/2023	31/12/2025	2,00	-						-	-	-	-	-	0,00	-
	CV. KUBUS MEDIA ADVERTISAMA		31/12/2024	31/12/2025	1,00	-			6.750.000,00			6.750.000,00	-	-	-	-	0,00	-
	CV. KUBUS MEDIA ADVERTISAMA		31/12/2024	31/12/2025	1,00	-			4.500.000,00			4.500.000,00	-	-	-	-	0,00	-
	CV. KUBUS MEDIA ADVERTISAMA		31/12/2024	31/12/2025	1,00	-			4.500.000,00			4.500.000,00	-	-	-	-	0,00	-
	Three-C Multimedia Advertising (Lombok dot com)		31/12/2024	31/12/2025	1,00	4.287.500,00						4.287.500,00	21.437,50	-	-	-	0,00	21.437,50
	Three-C Multimedia Advertising (Primajaya Computer)		31/12/2024	31/12/2025	1,00	1.793.750,00						1.793.750,00	8.968,75	-	-	-	0,00	8.968,75
	Three-C Multimedia Advertising (Mutiara Computer)		31/12/2024	31/12/2025	1,00	2.450.000,00						2.450.000,00	12.250,00	-	-	-	0,00	12.250,00
	Three-C Multimedia Advertising (Central Computer)		31/12/2024	31/12/2025	1,00	262.500,00						262.500,00	1.312,50	-	-	-	0,00	1.312,50
	Three-C Multimedia Advertising (Lombok dot com)		31/12/2025	31/12/2025	-	375.000,00	375.000,00					-	1.875,00	-	-	-	0,00	1.875,00
	Three-C Multimedia Advertising (Lombok dot com)		31/12/2025	31/12/2025	-	937.500,00	937.500,00					-	4.687,50	-	-	-	0,00	4.687,50
	Three-C Multimedia Advertising (Lombok dot com)		31/12/2025	31/12/2025	-	250.000,00	250.000,00					-	1.250,00	-	-	-	0,00	1.250,00
	Three-C Multimedia Advertising (Lombok dot com)		31/12/2025	31/12/2025	-	1.500.000,00	1.500.000,00					-	7.500,00	-	-	-	0,00	7.500,00
	Three-C Multimedia Advertising (Lombok dot com)		31/12/2025	31/12/2025	-	625.000,00	625.000,00					-	3.125,00	-	-	-	0,00	3.125,00
	Three-C Multimedia Advertising (Lombok dot com)		31/12/2025	31/12/2025	-	656.250,00	656.250,00					-	3.281,25	-	-	-	0,00	3.281,25
	Three-C Multimedia Advertising (Lombok dot com)		31/12/2025	31/12/2025	-	1.000.000,00	1.000.000,00					-	5.000,00	-	-	-	0,00	5.000,00
	Three-C Multimedia Advertising (Lombok dot com)		31/12/2025	31/12/2025	-	750.000,00	750.000,00					-	3.750,00	-	-	-	0,00	3.750,00
	Three-C Multimedia Advertising (Lombok dot com)		31/12/2025	31/12/2025	-	187.500,00	187.500,00					-	937,50	-	-	-	0,00	937,50
	PT. MUHAMMAD SYAHRI PURNAMA		31/12/2025	31/12/2025	-	1.666.666,67	1.666.666,67					-	8.333,33	-	-	-	0,00	8.333,33
	PT. MUHAMMAD SYAHRI PURNAMA		31/12/2025	31/12/2025	-	2.000.000,00	2.000.000,00					-	10.000,00	-	-	-	0,00	10.000,00
	PT. MUHAMMAD SYAHRI PURNAMA		31/12/2025	31/12/2025	-	1.666.666,67	1.666.666,67					-	8.333,33	-	-	-	0,00	8.333,33
	PT. MUHAMMAD SYAHRI PURNAMA		31/12/2025	31/12/2025	-	1.200.000,00	1.200.000,00					-	6.000,00	-	-	-	0,00	6.000,00
	PT. MUHAMMAD SYAHRI PURNAMA		31/12/2025	31/12/2025	-	1.333.333,33	1.333.333,33					-	6.666,67	-	-	-	0,00	6.666,67
	PT. MUHAMMAD SYAHRI PURNAMA		31/12/2025	31/12/2025	-	2.500.000,00	2.500.000,00					-	12.500,00	-	-	-	0,00	12.500,00
	PT. MUHAMMAD SYAHRI PURNAMA		31/12/2025	31/12/2025	-	312.500,00	312.500,00					-	1.562,50	-	-	-	0,00	1.562,50
	PT. MUHAMMAD SYAHRI PURNAMA		31/12/2025	31/12/2025	-	312.500,00	312.500,00					-	1.562,50	-	-	-	0,00	1.562,50
	PT. MUHAMMAD SYAHRI PURNAMA		31/12/2025	31/12/2025	-	312.500,00	312.500,00					-	1.562,50	-	-	-	0,00	1.562,50



NO	Nama Wajib Pajak	OPD Penanggung jawab	Tanggal Pengakuan Piutang	Tanggal Pelaporan	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang Awal	Nilai Piutang Per Tanggal Pelaporan (31 DESEMBER 2025)	Penambahan Piutang (Debet)		Pengurangan Piutang (Kredit)		Nilai Piutang Per N-1 Tanggal Pelaporan (31 Desember 2024)	Penyisihan Piutang (Kategori)				Nilai Penyisihan	NRV	
								(SKP/SKR-TBP)	Koreksi	STS/TBP / LRA	Koreksi		Lancar (<1 th)	Kurang Lancar (1 s.d. 3 th)	Diragukan (3 s.d. 5 th)	Macet (>5 th)			
													0,005	0,1	0,5	1			
	PT. MUHAMMAD SYAHRI PURNAMA		31/12/2025	31/12/2025	-		202.500,00	202.500,00					1.012,50		-	-	0,00	1.012,50	201.487,50
1 1 03 15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2	Bapenda					106.435.045.313,00	8.936.149.640,00	15.040.217.053,93	3.736.621.526,00	126.427.517,00	86.321.727.662,07	89.065.569,46	869.697.501,30	10.054.613.831,50	59.815.728.745,00	70.829.105.647,26	35.605.939.665,74	
1 1 03 15 01	Piutang PBBP2	Bapenda					106.435.045.313,00	8.936.149.640,00	15.040.217.053,93	3.736.621.526,00	126.427.517,00	86.321.727.662,07	89.065.569,46	869.697.501,30	10.054.613.831,50	59.815.728.745,00	70.829.105.647,26	35.605.939.665,74	
1 1 03 15 01 0	Piutang PBBP2	Bapenda					106.435.045.313,00	8.936.149.640,00	15.040.217.053,93	3.736.621.526,00	126.427.517,00	86.321.727.662,07	89.065.569,46	869.697.501,30	10.054.613.831,50	59.815.728.745,00	70.829.105.647,26	35.605.939.665,74	
	PAJAK PBB Tahun 2011	Bapenda	31/12/2011	31/12/2025	14,01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	PAJAK PBB Tahun 2012	Bapenda	31/12/2012	31/12/2025	13,01		4.282.953.777,00		1.702.739.577,00	105.267.086,00		2.685.481.286,00	-	-	-	4.282.953.777,00	4.282.953.777,00	-	-
	PAJAK PBB Tahun 2013	Bapenda	31/12/2013	31/12/2025	12,01		4.984.167.777,00		2.085.379.033,00	132.921.610,00		3.031.710.354,00	-	-	-	4.984.167.777,00	4.984.167.777,00	-	-
	PAJAK PBB Tahun 2014	Bapenda	31/12/2014	31/12/2025	11,01		3.590.107.309,00		1.449.181.605,00	95.349.879,00		2.236.275.583,00	-	-	-	3.590.107.309,00	3.590.107.309,00	-	-
	PAJAK PBB Tahun 2015	Bapenda	31/12/2015	31/12/2025	10,01		6.007.163.565,00		2.622.314.895,00	118.574.157,00		3.503.422.827,00	-	-	-	6.007.163.565,00	6.007.163.565,00	-	-
	PAJAK PBB Tahun 2016	Bapenda	31/12/2016	31/12/2025	9,01		8.376.096.258,00		783.024.718,00	250.562.500,00		7.843.634.040,00	-	-	-	8.376.096.258,00	8.376.096.258,00	-	-
	PAJAK PBB Tahun 2017	Bapenda	31/12/2017	31/12/2025	8,01		7.843.569.810,00		1.389.991.550,00	229.763.683,00		6.683.341.943,00	-	-	-	7.843.569.810,00	7.843.569.810,00	-	-
	PAJAK PBB Tahun 2018	Bapenda	31/12/2018	31/12/2025	7,01		7.852.142.610,00		468.428.530,41	257.728.366,00		7.641.442.445,59	-	-	-	7.852.142.610,00	7.852.142.610,00	-	-
	PAJAK PBB Tahun 2019	Bapenda	31/12/2019	31/12/2025	6,01		7.750.761.448,00		594.553.204,17	260.749.503,00		7.416.957.746,83	-	-	-	7.750.761.448,00	7.750.761.448,00	-	-
	PAJAK PBB Tahun 2020	Bapenda	31/12/2020	31/12/2025	5,00		9.128.766.191,00		441.637.732,87	338.454.005,00		9.025.582.463,13	-	-	-	9.128.766.191,00	9.128.766.191,00	-	-
	PAJAK PBB Tahun 2021	Bapenda	31/12/2021	31/12/2025	4,00		11.238.420.296,00		2.739.977.431,26	355.979.276,00		8.854.422.140,74	-	-	5.619.210.148	0,00	5.619.210.148,00	5.619.210.148,00	-
	PAJAK PBB Tahun 2022	Bapenda	31/12/2022	31/12/2025	3,00		8.870.807.367,00		687.999.793,22	331.874.271,00		8.514.681.844,78	-	-	4.435.403.684	0,00	4.435.403.683,50	4.435.403.683,50	-
	PAJAK PBB Tahun 2023	Bapenda	31/12/2023	31/12/2025	2,00		8.696.975.013,00		57.513.325,00	375.967.219,00		9.015.428.907,00	-	869.697.501	-	0,00	869.697.501,30	7.827.277.511,70	-
	PAJAK PBB Tahun 2024	Bapenda	31/12/2024	31/12/2025	1,00		9.003.391.769,00		17.475.659,00	883.429.971,00		9.969.346.061,00	45.016.958,85	-	-	0,00	45.016.958,85	8.958.374.810,16	-
	PAJAK PBB Tahun 2025	Bapenda	31/12/2025	31/12/2025	-		8.809.722.123,00	8.936.149.640,00	-	-	126.427.517,00	-	44.048.610,62	-	-	0,00	44.048.610,62	8.765.673.512,39	-
1 1 03 11	Piutang Pajak Parkir	Dishub					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 03 11 01	Piutang Pajak Parkir	Dishub					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 03 11 01 0	Piutang Pajak Parkir	Dishub					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			31/12/2022	31/12/2024	2,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
			31/12/2022	31/12/2024	2,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
			31/12/2022	31/12/2024	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
1 1 03 08	Piutang Pajak Hiburan	Bapenda					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 03 08 09	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center	Bapenda					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengajaran Kesenian/Musik/Tari/Busana						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	Pajak Kontes Kecantikan, Binatang, dan Seterusnya						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
1 1 03 08 09 0	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center	Bapenda					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			31/12/2022	31/12/2023	1,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
			31/12/2022	31/12/2023	1,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
			31/12/2022	31/12/2023	1,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
1 1 03 08 10	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga	Bapenda					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 03 08 10 0	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga	Bapenda					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SPA an, Novotel		31/12/2022	31/12/2023	1,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
1 1 03 10	Piutang Pajak Penerangan Jalan	Dishub					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 03 10 02	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 03 10 02 0	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			31/12/2022	31/12/2023	1,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
1 1 03 12	Piutang Pajak Air Tanah	Bapenda					102.000,00	-	-	22.494.200,00	-	22.596.200,00	510,00	-	-	-	-	510,00	101.490,00
1 1 03 12 01	Piutang Pajak Air Tanah						102.000,00	-	-	22.494.200,00	-	22.596.200,00	510,00	-	-	-	-	510,00	101.490,00
1 1 03 12 01 0	Piutang Pajak Air Tanah						102.000,00	-	-	22.494.200,00	-	22.596.200,00	510,00	-	-	-	-	510,00	101.490,00
			31/12/2022	31/12/2024	2,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
			31/12/2022	31/12/2024	2,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
			31/12/2022	31/12/2024	2,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. Sari Guna Prima Tirta		31/12/2022	31/12/2024	2,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. Lombok Torok Development		31/12/2022	31/12/2024	2,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. Amazing Lombok REsort		31/12/2022	31/12/2024	2,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. Duta Megatama CiptaWira Hotel		31/12/2022	31/12/2024	2,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. Drop Inn		31/12/2022	31/12/2024	2,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. Serangan Resort		31/12/2023	31/12/2024	1,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. Swee Development Lombok		31/12/2023	30/09/2025	1,75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. Lombok Invest & Dev		31/12/2023	30/09/2025	1,75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. AGKASA PURA (PERSERO)		31/12/2023	30/09/2025	1,75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. NATURE DEVELOPMENT LOMBOK		31/12/2023	30/09/2025	1,75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. DROP IN		31/12/2023	30/09/2025	1,75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-



NO	Nama Wajib Pajak	OPD Penanggung jawab	Tanggal Pengakuan Piutang	Tanggal Pelaporan	Umur Piutang (Tahun)	Nilai Piutang Awal	Nilai Piutang Per Tanggal Pelaporan (31 DESEMBER 2025)	Penambahan Piutang (Debet)		Pengurangan Piutang (Kredit)		Nilai Piutang Per N-1 Tanggal Pelaporan (31 Desember 2024)	Penyisihan Piutang (Kategori)				Nilai Penyisihan	NRV
								(SKP/SKR-TBP)	Koreksi	STS/TBP / LRA	Koreksi		Lancar (<1 th)	Kurang Lancar (1 s.d. 3 th)	Diragukan (3 s.d. 5 th)	Macet (>5 th)		
													0,005	0,1	0,5	1		
	PT. SWE DEVELOPMENT LOMBOK		31/12/2023	30/09/2025	1,75		-					-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. SERANGAN INDAH RESORT		31/12/2023	30/09/2025	1,75		-					-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. LOMBOK INVEST AND DEV (SPORT CENTER)		31/12/2023	30/09/2025	1,75		-					-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. LOMBOK TOROK DEVELOPMENT		31/12/2023	30/09/2025	1,75		-					-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. AMAZING LOMBOK RESORT		31/12/2023	30/09/2025	1,75		-					-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. SARI GUNA PRIMA TIRTA		31/12/2023	30/09/2025	1,75		-					-	-	-	-	0,00	-	-
	CV. 88 AURORA		31/12/2023	30/09/2025	1,75		-					-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. DUTA MEGATAMA CIPTA/LIRA LITE HOTEL		31/12/2023	30/09/2025	1,75		-					-	-	-	-	0,00	-	-
	PT. UTAMA BETON PERKASA		31/12/2024	30/09/2025	0,75		-			4.380.000,00		4.380.000,00	-	-	-	-	0,00	-
	MANNA YOGA		31/12/2024	30/09/2025	0,75		102.000,00					102.000,00	510,00	-	-	-	0,00	510,00
	SIMA HOTEL LOMBOK		31/12/2024	30/09/2025	0,75		-			1.663.600,00		1.663.600,00	-	-	-	-	0,00	-
	PT. NATURE DEVELOPMENT LOMBOK		31/12/2024	30/09/2025	0,75		-			251.600,00		251.600,00	-	-	-	-	0,00	-
	PT. SWE DEVELOPMENT LOMBOK		31/12/2024	30/09/2025	0,75		-			542.300,00		542.300,00	-	-	-	-	0,00	-
	PT. SERANGAN INDAH RESORT		31/12/2024	30/09/2025	0,75		-			413.100,00		413.100,00	-	-	-	-	0,00	-
	PT. LOMBOK INVEST And DEV (Sport center)		31/12/2024	30/09/2025	0,75		-			372.300,00		372.300,00	-	-	-	-	0,00	-
	PT. SINAR BALI BINA KARYA		31/12/2024	30/09/2025	0,75		-			159.800,00		159.800,00	-	-	-	-	0,00	-
	PT. LOMBOK TOROK DEVELOPMENTS		31/12/2024	30/09/2025	0,75		-			1.213.800,00		1.213.800,00	-	-	-	-	0,00	-
	PT. SARI GUNA PRIMA TIRTA		31/12/2024	30/09/2025	0,75		-			6.520.800,00		6.520.800,00	-	-	-	-	0,00	-
	PT. SINAR BALI		31/12/2024	30/09/2025	0,75		-			68.000,00		68.000,00	-	-	-	-	0,00	-
	PT. SINAR BALI		31/12/2024	30/09/2025	0,75		-			98.600,00		98.600,00	-	-	-	-	0,00	-
	PT. SINAR BALI BINA KARYA		31/12/2024	30/09/2025	0,75		-			273.700,00		273.700,00	-	-	-	-	0,00	-
	PT. AMAZING LOMBOK RESORT		31/12/2024	30/09/2025	0,75		-			85.000,00		85.000,00	-	-	-	-	0,00	-
	NEMANA SERVICES INDONESIA		31/12/2024	30/09/2025	0,75		-			646.000,00		646.000,00	-	-	-	-	0,00	-
	CV. 88 AURORA		31/12/2024	30/09/2025	0,75		-			45.600,00		45.600,00	-	-	-	-	0,00	-
	PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)		31/12/2024	30/09/2025	0,75		-			5.760.000,00		5.760.000,00	-	-	-	-	0,00	-
	TOTAL						106.470.878.979,67	8.953.937.556,67	15.040.217.053,93	3.774.865.726,00	126.427.517,00	86.378.017.612,07	89.198.987,79	870.612.501,30	10.054.613.831,50	59.815.728.745,00	70.830.154.065,59	35.640.724.914,07



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024

Kode Akun	Nama Wajib Retribusi	OPD Penanggg ungjawa b	Tanggal Pengakuan Piutang	Tanggal Pelaporan	Umur Piutang (Bulan)	Nilai Piutang Per Tanggal Pelaporan (31 Desember 2025)	Penambahan Piutang (Debet)		Pengurangan Piutang (Kredit)			Nilai Piutang Per N-1 Tanggal Pelaporan (31 Desember 2024)	Penyisihan Piutang (Kategori)				Nilai Penyisihan	NRV
							(SKRD - TBP)	Reklas dari	STS/TBP / LRA (Pelunasan Piutang Atas Ketetapan Tahun Sebelumnya)	STS/TBP / LRA (Pelunasan Piutang Atas Ketetapan Tahun Berkenaan)	Koreksi BPK		Lancar (<1 bulan)	Kurang Lancar (1 s.d. 3 Bulan)	Diragukan (3 s.d. 12 Bulan)	Macet (>12 Bulan)		
													0,5%	0.01%	0.50%	100%		
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah					2.594.492.319,33	414.724.800,00	55.563.000,00	928.123.350,00	-	17.050.000,00	3.069.377.869,33	588.830,00	-	4.048.500,00	2.171.670.519,33	2.176.307.849,33	418.184.470,00
1.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum					884.107.845,00	414.724.800,00	55.563.000,00	928.123.350,00	-	-	1.341.943.395,00	588.830,00	-	4.048.500,00	461.286.045,00	465.923.375,00	418.184.470,00
1.1.04.01.01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan					570.394.800,00	414.724.800,00	55.563.000,00	897.329.350,00	-	-	997.436.350,00	588.830,00	-	-	155.670.000,00	156.258.830,00	414.135.970,00
1.1.04.01.01.0001	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Dinkes				296.958.800,00	296.958.800,00	55.563.000,00	606.607.350,00	-	-	551.044.350,00	-	-	-	-	-	244.189.800,00
1.1.04.01.01.0006	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis					273.436.000,00	117.766.000,00	-	290.722.000,00	-	-	446.392.000,00	588.830,00	-	-	155.670.000,00	156.258.830,00	117.177.170,00
1.1.04.01.02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	LH				20.466.000,00	-	-	30.794.000,00	-	-	51.260.000,00	-	-	4.048.500,00	12.369.000,00	16.417.500,00	4.048.500,00
1.1.04.01.02.0001	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	LH				20.466.000,00	-	-	30.794.000,00	-	-	51.260.000,00	-	-	4.048.500,00	12.369.000,00	16.417.500,00	4.048.500,00
1.1.04.01.13	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi					293.247.045,00	-	-	-	-	-	293.247.045,00	-	-	-	293.247.045,00	293.247.045,00	-
1.1.04.01.13.0001	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telek				-	293.247.045,00	-	-	-	-	-	293.247.045,00	-	-	-	293.247.045,00	293.247.045,00	-
1.1.04.02	Piutang Retribusi Jasa Usaha					1.710.384.474,33	-	-	-	-	17.050.000,00	1.727.434.474,33	-	-	-	1.710.384.474,33	1.710.384.474,33	-
1.1.04.02.01	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					505.890.983,33	-	-	-	-	17.050.000,00	522.940.983,33	-	-	-	505.890.983,33	505.890.983,33	-
1.1.04.02.01.0002	Piutang Retribusi sewa tanah					473.415.983,33	-	-	-	-	-	473.415.983,33	-	-	-	473.415.983,33	473.415.983,33	-
	A Kompleks Pertokoan Orient	BKAD				300.114.583,33	-	-	-	-	-	300.114.583,33	-	-	-	300.114.583,33	300.114.583,33	-
	B SEWA TANAH KOMPLEKS TERMINAL LAMA PRAYA	BKAD			-	58.000.000,00	-	-	-	-	-	58.000.000,00	-	-	-	58.000.000,00	58.000.000,00	-
	C KOMPLEKS PERTOKOAN PRAYA (BKAD)	BKAD				10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	D SEWA TANAH PASAR BATU BUNGUS JANAPRIA				-	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-
	E SEWA TANAH PASAR SENGKOL				-	180.000,00	-	-	-	-	-	180.000,00	-	-	-	180.000,00	180.000,00	-
	G SEWA TANAH PASAR MUJUR LUAR				-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	H SEWA TANAH PASAR BONJERUK					230.000,00	-	-	-	-	-	230.000,00	-	-	-	230.000,00	230.000,00	-
	I SEWA TANAH PASAR PENGADANG					780.000,00	-	-	-	-	-	780.000,00	-	-	-	780.000,00	780.000,00	-
	J SEWA TANAH PASAR PRINGGARATA					3.264.000,00	-	-	-	-	-	3.264.000,00	-	-	-	3.264.000,00	3.264.000,00	-
	K SEWA TANAH PASAR RENTENG					16.515.000,00	-	-	-	-	-	16.515.000,00	-	-	-	16.515.000,00	16.515.000,00	-
	L SEWA TANAH PASAR SENGKOL UTARA					320.000,00	-	-	-	-	-	320.000,00	-	-	-	320.000,00	320.000,00	-
	M SEWA TANAH GUDANG TOKO SINAR TERANG					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N SEWA TANAH PASAR TERATAK					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O SEWA TANAH DI PASAR TENGANAN				-	7.200.000,00	-	-	-	-	-	7.200.000,00	-	-	-	7.200.000,00	7.200.000,00	-
	Q SEWA TANAH DI UBUNG				-	11.822.400,00	-	-	-	-	-	11.822.400,00	-	-	-	11.822.400,00	11.822.400,00	-
	R SEWA TANAH DI KAUMAN UTARA PDAM	BKAD				4.000.000,00	-	-	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	S SEWA TANAH PEMDA KOMPLEK BSI					36.200.000,00	-	-	-	-	-	36.200.000,00	-	-	-	36.200.000,00	36.200.000,00	-
	T SEWA TANAH DI BELAKANG BIOSKOP HADAP SELATAN					5.040.000,00	-	-	-	-	-	5.040.000,00	-	-	-	5.040.000,00	5.040.000,00	-
	U Unidentified	BAPENDA	31/12/2021	31/12/2025	48.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V Sewa Tanah Warung Murah	BPKAD	31/12/2021	31/12/2025	48.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	W PT Sinar Tiga Pilar-Raja Hotel	BPKAD				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	X Sewa Tanah Kp Jawa - Rent Car	BPKAD	31/12/2021	31/12/2025	48.03	14.000.000,00	-	-	-	-	-	14.000.000,00	-	-	-	14.000.000,00	14.000.000,00	-
1.1.04.02.01.0001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Bapenda				32.475.000,00	-	-	-	-	17.050.000,00	49.525.000,00	-	-	-	32.475.000,00	32.475.000,00	-
	Rumah Dinas (1 sd 39)					32.475.000,00	-	-	-	-	-	49.525.000,00	-	-	-	32.475.000,00	32.475.000,00	-
1.1.04.02.02	Piutang Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan					1.204.493.491,00	-	-	-	-	-	1.204.493.491,00	-	-	-	1.204.493.491,00	1.204.493.491,00	-
1.1.04.02.02.0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas pasar/Pertokoan	Bappenda				1.204.493.491,00	-	-	-	-	-	1.204.493.491,00	-	-	-	1.204.493.491,00	1.204.493.491,00	-
	A Pertokoan Sekitar Orient					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B Pusat Pertokoan Praya Lt 1					393.749.991,00	-	-	-	-	-	393.749.991,00	-	-	-	393.749.991,00	393.749.991,00	-
	C Pusat Pertokoan Praya Lt 2					190.332.500,00	-	-	-	-	-	190.332.500,00	-	-	-	190.332.500,00	190.332.500,00	-
	D Pertokoan Karang Bulayak Belakang					104.346.000,00	-	-	-	-	-	104.346.000,00	-	-	-	104.346.000,00	104.346.000,00	-
	E Pertokoan/Kios Karang Bulayak Depan					188.794.000,00	-	-	-	-	-	188.794.000,00	-	-	-	188.794.000,00	188.794.000,00	-
	F KIOS PEMEPEK					32.189.000,00	-	-	-	-	-	32.189.000,00	-	-	-	32.189.000,00	32.189.000,00	-
	G KIOS SEMPAPU					30.047.500,00	-	-	-	-	-	30.047.500,00	-	-	-	30.047.500,00	30.047.500,00	-
	H Kios Sengkol					49.780.500,00	-	-	-	-	-	49.780.500,00	-	-	-	49.780.500,00	49.780.500,00	-
	I Kios Pringgarata					33.250.000,00	-	-	-	-	-	33.250.000,00	-	-	-	33.250.000,00	33.250.000,00	-
	J KIOS UBUNG					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K KIOS PUYUNG					46.034.000,00	-	-	-	-	-	46.034.000,00	-	-	-	46.034.000,00	46.034.000,00	-
	M KIOS/TOKO MANGKUNG					24.100.000,00	-	-	-	-	-	24.100.000,00	-	-	-	24.100.000,00	24.100.000,00	-
	N KIOS/TOKO GANTI			31/12/2025		15.050.000,00	-	-	-	-	-	15.050.000,00	-	-	-	15.050.000,00	15.050.000,00	-



Kode Akun	Nama Wajib Retribusi	OPD Penanggungjawab	Tanggal Pengakuan Piutang	Tanggal Pelaporan	Umur Piutang (Bulan)	Nilai Piutang Per Tanggal Pelaporan (31 Desember 2025)	Penambahan Piutang (Debet)		Pengurangan Piutang (Kredit)			Nilai Piutang Per N-1 Tanggal Pelaporan (31 Desember 2024)	Penyisihan Piutang (Kategori)				Nilai Penyisihan	NRV
							(SKRD -TBP)	Reklas dari	STS/TBP / LRA (Pelunasan Piutang Atas Ketetapan Tahun Sebelumnya)	STS/TBP / LRA (Pelunasan Piutang Atas Ketetapan Tahun Berkenaan)	Koreksi BPK		Lancar (<1 bulan)	Kurang Lancar (1 s.d. 3 Bulan)	Diragukan (3 s.d. 12 Bulan)	Macet (>12 Bulan)		
													0,5%	0.01%	0.50%	100%		
	Q KIOS/TOKO BATU BUNGUS					40.360.000,00	-	-	-	-	-	40.360.000,00	-	-	-	-	40.360.000,00	-
	Q KIOS/TOKO BARABALI					15.264.000,00	-	-	-	-	-	15.264.000,00	-	-	-	-	15.264.000,00	-
	R KIOS/TOKO TERATAK					400.000,00	-	-	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00	-
	S KIOS/TOKO BELAKANG ORIENT					38.396.000,00	-	-	-	-	-	38.396.000,00	-	-	-	-	38.396.000,00	-
	T KIOS/TOKO PRINGGARATA TIMUR					2.400.000,00	-	-	-	-	-	2.400.000,00	-	-	-	-	2.400.000,00	-
	TOTAL					2.594.492.319,33	414.724.800,00	55.563.000,00	928.123.350,00	-	17.050.000,00	3.069.377.869,33	588.830,00	-	4.048.500,00	2.171.670.519,33	2.176.307.849,33	418.184.470,00



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
PER 31 Desember 2025 dan 2024

Akun	Uraian	SKPD	Per 31Desember 2025	Debet				Kredit					Per 31 Des 2024
				Ketetapan Baru	Koreksi Kurang Saji	Reklasifikasi	Jumlah	Pengur Piutang th lalu	Pengur Ketetapan th berjalan	Koreksi Lebih Saji	Reklas ke**)	Jumlah	
1 1 06	Piutang Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		6.596.726.833,59	5.803.466.315,00	-	-	#####	#####	25.000.000,00	-	-	#####	#####
1 1 06 07	Piutang Pendapatan Bunga	BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 06 11	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		375.457.600,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.457.600,77
1 1 06 11 01	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		375.457.600,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.457.600,77
1 1 06 11 01 0001	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		375.457.600,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.457.600,77
	1 Pembangunan Gedung Disdik	Disdik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Direktur CV. TKU-Pembangunan Gedung Kantor Camat	PU	370.009.922,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.009.922,77
	3 Direktur CV. Nfr	Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Direktur CV. SSP	Pariwisata	5.447.678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.447.678,00
1 1 06 12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		96.065.539,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.065.539,74
1 1 06 12 06	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel		8.751.826,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.751.826,36
1 1 06 12 06 0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	Bapenda	8.751.826,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.751.826,36
	Novotel Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SH		310.029,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.029,58
	Artati Lombok Bungalows		11.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.400,00
	Bamba Hotel (PT. Swe Development)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Banyu Urip Homestay		6.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.840,00
	Jaya Domino (PT. Jaya Domino Accomodation)		177.153,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.153,70
	Join Homestay		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kuta Circle Homestay		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mad Monkey Hostel		897.068,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897.068,07
	Pipe Dream/Hummer Head		240.379,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.379,37
	Panfilia		221.707,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.707,20
	Santai Villa		6.878.128,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.878.128,44
	Yokis Bungalow		9.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.120,00
1 1 06 12 07	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran		12.063.713,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.063.713,38
1 1 06 12 07 0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	Bapenda	12.063.713,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.063.713,38
	PT Kenza Kuta Lombok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PT SCI		330.084,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.084,74
	BISTRO DELI (PT. SENTRAL RETALLINDO DEWATA)		2.169.545,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.169.545,81
	Dante Café		31.544,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.544,78
	El Bazar 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	El Bazar 2 (KRNK)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	HOTEL AMBER		9.158.574,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.158.574,29
	Lee Too Much		16.995,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.995,12
	Lesehan Jingga		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mad Monkey Hostel		126.589,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.589,77
	Nasi Balap Puyung BIL		170.528,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.528,82
	Papa Roti Lt I		25.650,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.650,05
	Sapori		34.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.200,00
1 1 06 12 16	Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		75.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.250.000,00
1 1 06 12 16 0001	Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		75.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.250.000,00
	Piutang Denda Keterlambatan Penyampaian Laporan (Sanksi kpd PPAT-LHP LKPD 2021)	Bapenda	75.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.250.000,00
	1 Retno Kusbandini		250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00
	2 Lalu Hidayatsyah		500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
	3 Dewi Lestari Goenardi		750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00
	4 Lalu Abdurrahman		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 Sri Winarni		750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00
	6 Baiq Sifiana		1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
	7 Lalu Mudi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Nikmatul Hikmah		1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00



Akun	Uraian	SKPD	Per 31Desember 2025	Debet				Kredit					Per 31 Des 2024
				Ketetapan Baru	Koreksi Kurang Saji	Reklasifikasi	Jumlah	Pengur Piutang th lalu	Pengur Ketetapan th berjalan	Koreksi Lebih Saji	Reklas ke**)	Jumlah	
	9 Muh. Afet Budi Satria		2.000.000,00				-					-	2.000.000,00
	10 Adliya Ramadansyah		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	11 Moh. Jeffry Maulidi		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	12 Nanang Fardiansyah		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	13 Ni Ketut Devy Ratna Sari		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	14 Novi Ariyanti		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	15 Suandi Yahya Alkalimi		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	16 Abdul Azizi		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	17 B Elis Dewi Pramita		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	18 Chuck Wijaya		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	19 David Gunawan		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	20 Eva Fadhliah		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	21 I Nyoman Alit		-				-					-	-
	22 Lale Amalina		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	23 Lalu Daud Nurjadi		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	24 Leke Citra Galeeria Putri		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	25 Masudi		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	26 Munawwarah		-				-					-	-
	27 Putu Ayu Cattleya		1.000.000,00				-					-	1.000.000,00
	28 Putu Dewi Susanti		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	29 Rizal Dewantana		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	30 Saharjo		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	31 Saifulbahri		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	32 Tanti Satyarini		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	33 Vermylia Decyana Dede		1.500.000,00				-					-	1.500.000,00
	34 Yonathan Riska Ariawan		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
	35 Zaenul Haq		3.000.000,00				-					-	3.000.000,00
11 06 13	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		145.580.648,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.580.648,08
11 06 13 01	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum		140.626.348,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.626.348,08
11 06 13 01 0013	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Diskominfo	140.626.348,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.626.348,08
	Piutang Denda Retribusi Pengendalian Menara Telkom (LHP LKPD 2021)		140.626.348,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.626.348,08
	1 PT MITRA LANGGENG PERKASA		7.239.330,00				-					-	7.239.330,00
	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA		10377285				-					-	10.377.285,00
	2 9PROTELINDO/P)		34.156.586,00				-					-	34.156.586,00
	3 PT IDA LOMBOK		17.756.822,00				-					-	17.756.822,00
	4 PT SOLUSI TUNAS PRATAMA		10.433.225,00				-					-	10.433.225,00
	5 PT TOWER BERSAMA		30.574.168,00				-					-	30.574.168,00
	6 PT XL AXIATA		1.203.557,32				-					-	1.203.557,32
	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA		6.017.786,60				-					-	6.017.786,60
	8 9PROTELINDO/P)		2.836.956,54				-					-	2.836.956,54
	9 PT SOLUSI TUNAS PRATAMA		6.017.786,60				-					-	6.017.786,60
	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA		2.665.019,38				-					-	2.665.019,38
	10 9PROTELINDO/P)		(0,36)				-					-	(0,36)
	11 PT KOMET INFRA NUSANTARA		1.461.462,46				-					-	1.461.462,46
	12 PT PERSADA SOKA TAMA		6.963.438,48				-					-	6.963.438,48
	13 PT DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI		-				-					-	-
	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA		0,14				-					-	0,14
	14 9PROTELINDO/P)		2.922.924,92				-					-	2.922.924,92
	15 PT TELKOMSEL		-				-					-	-
	16 PT GAMETRACO TUNGGAL		-				-					-	-
	17 PT KOMET INFRA NUSANTARA		-				-					-	-
11 06 13 02	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha		800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00
11 06 13 02 0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00
	Piutang denda retribusi pemakaian kekayaan daerah- Kolam Renar	BPKAD	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00
	Sewa Kolam Ikan Gerunung an. Sdri BR	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 06 13 03	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizininan Tertentu		4.154.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.154.300,00
11 06 13 03 0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	DPMPST	4.154.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.154.300,00
	Piutang Denda IMB atas Keterlambatan Penyetoran IMB		4.154.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.154.300,00
	LALU AMMAR FATHIN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Akun	Uraian	SKPD	Per 31Desember 2025	Debet				Kredit					Per 31 Des 2024
				Ketetapan Baru	Koreksi Kurang Saji	Reklasifikasi	Jumlah	Pengur Piutang th lalu	Pengur Ketetapan th berjalan	Koreksi Lebih Saji	Reklas ke**)	Jumlah	
	MICHAEL CHARLES MARTIN/PT. TROPIK SELONG BELANAK		1.799.100,00									-	1.799.100,00
	LALU JOHN SWIGUNA		-									-	-
	RUBEN MARTIN MOZONCILLO/PT. INDONESIAN INVESTORS GROUP		2.355.200,00									-	2.355.200,00
	ABDULBAR M. MANSOER		-									-	-
1 1 06 15	Piutang Pendapatan dari Pengembalian		87.156.730,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	89.325.260,00	25.000.000,00	-	-	114.325.260,00	176.481.990,00
1 1 06 15 03	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran		87.156.730,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	89.325.260,00	25.000.000,00	-	-	114.325.260,00	176.481.990,00
1 1 06 15 03 0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran		87.156.730,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	89.325.260,00	25.000.000,00	-	-	114.325.260,00	176.481.990,00
	1 Keterlanjuran pembayaran Gaji berdasarkan SKPP	BPKAD	82.447.130,00	25.000.000,00			25.000.000,00	89.325.260,00	25.000.000,00		-	114.325.260,00	171.772.390,00
	Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji an Esty Swastika 2 Fajarsih, ST	Diskom	4.709.600,00				-					-	4.709.600,00
1 1 06 16	Piutang Pendapatan BLUD		5.892.466.315,00	5.778.466.315,00	-	-	#####	#####	-	-	-	#####	#####
1 1 06 16 02 0001	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan		5.767.780.515,00	5.767.780.515,00	-	-	#####	#####	-	-	-	#####	#####
	1 Piutang Jasa Layanan BLUD RSUD Praya	BLUD RSUD	5.767.780.515,00	5.767.780.515,00			#####	#####				#####	#####
	2 Piutang Non Kapitasi JKN BLUD FKTP	BLUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.563.000,00	55.563.000,00
	Puskesmas Praya		-									-	
	Puskesmas Puyung		-								#####	55.563.000,00	55.563.000,00
1 1 06 16 04	Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain		124.685.800,00	10.685.800,00	-	-	10.685.800,00	22.000.000,00	-	-	-	22.000.000,00	136.000.000,00
1 1 06 16 04 0001	Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain		124.685.800,00	10.685.800,00	-	-	10.685.800,00	22.000.000,00	-	-	-	22.000.000,00	136.000.000,00
	BLUD RSUD Praya		124.685.800,00	10.685.800,00	-	-	10.685.800,00	22.000.000,00	-	-	-	22.000.000,00	136.000.000,00
	2 Kerja sama pihak ketiga	RSUD	124.685.800,00	10.685.800,00			10.685.800,00	22.000.000,00				22.000.000,00	136.000.000,00
	TOTAL		6.596.726.833,59	5.803.466.315,00	-	-	#####	#####	25.000.000,00	-	-	#####	#####

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
MUTASI PIUTANG BLUD RSUD
Sampai Dengan Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Tanggal	Keterangan	Per 31 Desember 2024	Mutasi Kurang		Tgl BKU Penerimaan	Mutasi Tambah		Per 31 Desember 2025	Ket.
				Koreksi Lebih Saji	Piutang Terbayar		Koreksi Kurang Saji	Piutang 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	PIUTANG PENDAPATAN KERJASAMA OPERASIONAL		136.000.000,00	-	22.000.000,00	-	-	10.685.800,00	124.685.800,00	
1	31/12/2025	Piutang KSO Parkir Bulan Maret 2022 pada Pengelola Lama*	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00	Putus Kontrak
2	31/12/2025	Piutang KSO Parkir Bulan April 2022 pada Pengelola Lama*	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00	Putus Kontrak
3	31/12/2025	Piutang KSO Parkir Bulan Mei 2022 pada Pengelola Lama*	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00	Putus Kontrak
4	31/12/2025	Piutang KSO Parkir Bulan Juni 2022 pada Pengelola Lama*	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00	Putus Kontrak
5	31/12/2025	Piutang KSO Parkir Bulan Juli 2022 pada Pengelola Lama*	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00	Putus Kontrak
6	31/12/2025	Piutang KSO Parkir Bulan Agustus 2022 pada Pengelola Lama*	5.000.000,00	-	-	-	-	-	5.000.000,00	Putus Kontrak
7	31/12/2025	Piutang Pemanfaatan Aset Lahan Parkir Bulan Juni 2024	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-	-	-	-	
8	31/12/2025	Piutang Pemanfaatan Aset Lahan Parkir Bulan Juli 2024	14.000.000,00	-	-	-	-	-	14.000.000,00	Putus Kontrak
9	31/12/2025	Piutang Pemanfaatan Aset Lahan Parkir Bulan Agustus 2024	14.000.000,00	-	-	-	-	-	14.000.000,00	Putus Kontrak
10	31/12/2025	Piutang Pemanfaatan Aset Lahan Parkir Bulan September 2024	14.000.000,00	-	-	-	-	-	14.000.000,00	Putus Kontrak
11	31/12/2025	Piutang Pemanfaatan Aset Lahan Parkir Bulan Oktober 2024	14.000.000,00	-	-	-	-	-	14.000.000,00	Putus Kontrak
12	31/12/2025	Piutang Pemanfaatan Aset Lahan Parkir Bulan November 2024	14.000.000,00	-	-	-	-	-	14.000.000,00	Putus Kontrak
13	31/12/2025	Piutang Pemanfaatan Aset Lahan Parkir Bulan Desember 2024	14.000.000,00	-	-	-	-	-	14.000.000,00	Putus Kontrak
14	31/12/2025	Piutang Sewa Lahan Koperasi Tahun 2023	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	-	-	
15	31/12/2025	Piutang Sewa Lahan Koperasi Tahun 2024	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	-	-	-	
16	31/12/2025	Piutang Sewa Lahan Koperasi Tahun 2024	-	-	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
17	31/12/2025	Piutang KSO Laundry unit CSSD	-	-	-	-	-	6.685.800,00	6.685.800,00	
B.	PIUTANG PENDAPATAN JASA LAYANAN		21.056.937.430,00	-	21.056.937.430,00	-	-	5.767.780.515,00	5.767.780.515,00	
1	31/12/2025	Piutang Klaim Pelayanan Pasien Covid-19 Tahun 2020 s/d 2022	14.932.602.800,00	-	14.932.602.800,00	-	-	-	-	
2	31/12/2025	Piutang Pelayanan Pasien BPJS (Klaim Reguler) Bulan Desember 2024	5.478.265.730,00	-	5.478.265.730,00	-	-	-	-	
3	31/12/2025	Piutang Pelayanan Pasien BPJS Susulan Bulan Agustus 2024	646.068.900,00	-	646.068.900,00	-	-	-	-	
4	31/12/2025	Piutang Pelayanan Pasien Rawat Jalan BPJS (Klaim Revisi) Bulan Juni 2025	-	-	-	-	-	3.222.700,00	3.222.700,00	Verified
5	31/12/2025	Piutang Pelayanan Pasien Rawat Inap BPJS (Klaim Revisi) Bulan Juli 2025	-	-	-	-	-	61.036.700,00	61.036.700,00	Verified
6	31/12/2025	Piutang Pelayanan Pasien Rawat Jalan BPJS (Klaim Revisi) Bulan Juli 2025	-	-	-	-	-	5.509.900,00	5.509.900,00	Verified
7	31/12/2025	Piutang Pelayanan Pasien Rawat Inap BPJS (Klaim Revisi) Bulan Agustus 2025	-	-	-	-	-	48.669.900,00	48.669.900,00	Verified
8	31/12/2025	Piutang Pelayanan Pasien Rawat Jalan BPJS (Klaim Revisi) Bulan Agustus 2025	-	-	-	-	-	2.774.500,00	2.774.500,00	Verified

No.	Tanggal	Keterangan	Per 31 Desember 2024	Mutasi Kurang		Tgl BKU Penerimaan	Mutasi Tambah		Per 31 Desember 2025	Ket.
				Koreksi Lebih Saji	Piutang Terbayar		Koreksi Kurang Saji	Piutang 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	31/12/2025	Piutang Pelayanan Pasien Rawat Inap BPJS (Klaim Revisi) Bulan September 2025	-	-	-	-	-	247.303.600,00	247.303.600,00	Verified
10	31/12/2025	Piutang Pelayanan Pasien Rawat Jalan BPJS (Klaim Revisi) Bulan September 2025	-	-	-	-	-	18.292.300,00	18.292.300,00	Verified
11	31/12/2025	Piutang Pelayanan Pasien Rawat Inap BPJS (Klaim Revisi) Bulan Oktober 2025	-	-	-	-	-	339.490.700,00	339.490.700,00	Verified
12	31/12/2025	Piutang Pelayanan Pasien Rawat Jalan BPJS (Klaim Revisi) Bulan Oktober 2025	-	-	-	-	-	46.187.300,00	46.187.300,00	Verified
13	31/12/2025	Piutang Pelayanan Pasien Rawat Inap BPJS (reguler) Bulan Desember 2025	-	-	-	-	-	3.308.028.300,00	3.308.028.300,00	Verified
14	31/12/2025	Piutang Pelayanan Pasien Rawat Jalan BPJS (reguler) Bulan Desember 2025	-	-	-	-	-	1.687.264.615,00	1.687.264.615,00	Verified
JUMLAH			21.192.937.430,00	-	21.078.937.430,00	-	-	5.778.466.315,00	5.892.466.315,00	

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Per 31 Des 2025	Debet		Kredit			Per 31 Des 2024
			SK Definitif 2025	Jumlah	pengur piutang th sebelumnya	Pengur Piut th Berjalan atas SK definitif TH 2025 (Penyaluran Tahun Berkenaan)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 1 08	Piutang Transfer Antar Daera	2.496.646.967,00	111.045.981.205,00	111.045.981.205,00	12.616.953.084,00	108.549.334.238,00	121.166.287.322,00	12.616.953.084,00
1 1 08 01	Piutang Bagi Hasil	2.496.646.967,00	111.045.981.205,00	111.045.981.205,00	12.616.953.084,00	108.549.334.238,00	121.166.287.322,00	12.616.953.084,00
1 1 08 01 01	Piutang Bagi Hasil Pajak	2.496.646.967,00	111.045.981.205,00	111.045.981.205,00	12.616.953.084,00	108.549.334.238,00	121.166.287.322,00	12.616.953.084,00
1 1 08 01 01 0001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	197.899.060,00	197.899.060,00	1.907.732.718,00	197.899.060,00	2.105.631.778,00	1.907.732.718,00
1 1 08 01 01 0002	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	210.743.035,00	210.743.035,00	2.532.434.816,00	210.743.035,00	2.743.177.851,00	2.532.434.816,00
1 1 08 01 01 0003	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.474.260.094,00	64.457.916.159,00	64.457.916.159,00	8.169.381.124,00	61.983.656.065,00	70.153.037.189,00	8.169.381.124,00
1 1 08 01 01 0004	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	22.386.873,00	95.187.022,00	95.187.022,00	7.404.426,00	72.800.149,00	80.204.575,00	7.404.426,00
1 1 08 01 01 0005	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	-	46.084.235.929,00	46.084.235.929,00	-	46.084.235.929,00	46.084.235.929,00	-
	TOTAL	2.496.646.967,00	111.045.981.205,00	111.045.981.205,00	12.616.953.084,00	108.549.334.238,00	121.166.287.322,00	12.616.953.084,00



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR PIUTANG LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD	Per 31 Des 2025	Penyisihan	NRV	Surplus atas penyisihan piutang tertagih	Debet			Kredit					Per 31 Des 2024
							Ketetapan Baru	Reklas dari	Jumlah	Pengur piutang tahun lalu	Koreksi	penghapusan	Reklas ke*)	Jumlah	
	PIUTANG LAINNYA														
A	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		63.712.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.712.000,00
1	Uang Muka Kerja dan Jaminan CV Aiko Yutaka	BPKAD	63.712.000,00	-		-			-	-	-	-	-	-	63.712.000,00
B	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (atas jurang volume pekerjaan yang sudah memiliki SKTJM)		-	-	-	-	-	-	-	114.037.000,00	-	-	-	-	-
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Embung Batu Bokah	DPUPR	-						-	16.263.000,00					
2	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Desa Mekar Bersatu	DPUPR	-						-	1.457.000,00					
3	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Kelurahan Panji Sari	DPUPR	-						-	1.096.000,00					
4	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Desa Mas-Mas	DPUPR	-						-	231.000,00					
5	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata	DPUPR	-						-	804.000,00					
6	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Desa Loang Maka Kecamatan Janapria	DPUPR	-						-	3.210.000,00					
7	Pembangunan Gedung PKM Pringgarata	Dinas Kesehatan	-						-	12.376.000,00					
8	Pembangunan Gedung PKM Teruwai	Dinas Kesehatan	-						-	10.954.000,00					
9	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan PKM Teruwai	Dinas Kesehatan	-						-	13.130.000,00					
10	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata - Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)	Dinas Pariwisata	-						-	6.400.000,00					
11	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata - Jalan Dalam Kawasan	Dinas Pariwisata	-						-	4.591.000,00					
12	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata Taman Wisata Tastura - Penanaman Rumpun	Dinas Pariwisata	-						-	6.072.000,00					
13	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata Taman Wisata Tastura - Gazebo	Dinas Pariwisata	-						-	5.458.000,00					

No	Uraian	SKPD	Per 31 Des 2025	Penyisihan	NRV	Surplus atas penyisihan piutang tertagih	Debet			Kredit					Per 31 Des 2024
							Ketetapan Baru	Reklas dari	Jumlah	Pengur piutang tahun lalu	Koreksi	penghapusan	Reklas ke*)	Jumlah	
14	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata Taman Wisata Kota Tastura - Media Tanam	Dinas Pariwisata	-						-	6.484.000,00					
15	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata Taman Wisata Kota Tastura - Plaza/Area Pengunjung	Dinas Pariwisata	-						-	5.408.000,00					
16	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata Taman Wisata Kota Tastura - Plaza Kuliner	Dinas Pariwisata	-						-	3.099.000,00					
17	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata - Toilet dan Perlengkapannya	Dinas Pariwisata	-						-	9.568.000,00					
18	Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata - Kios Kuliner	Dinas Pariwisata	-						-	1.979.000,00					
19	Rehab Ruang Kelas Beserta Perabotnya SMPN 1 Pujut	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-						-	2.207.000,00					
20	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SMPN 1 Pujut	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-						-	870.000,00					
21	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMPN 1 Pujut	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-						-	2.380.000,00					
			-						-						
	TOTAL		63.712.000,00	-	-	-	-	-	-	114.037.000,00	-	-	-	-	63.712.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SPK/Invoice	Tanggal Kontrak	SKPD	Pekerjaan	Nilai Kontrak	Pembayaran/SP2D			Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Pelaksana	Beban Langganan Perbulan	Beban Langganan Internet Untuk Tahun 2025 atas Sisa Kontrak Sewa Th 2024	Beban Langganan Internet Untuk Tahun 2025 Atas Kontrak sewa Th 2025	Beban Jasa dibayar dimuka per 31 Des 2025
						Tgl	No	Nilai							
1	EP-01K2K7RGB69YFJP6ZFETHB8K2	21-Aug-25	SETDA	Sewa Colocation Server LPSE	37.296.000,00				21-Aug-25	21-Feb-26	PT Optimus Teknologi Pro	6.216.000,00	31.250.000,00	24.864.000,00	12.432.000,00
2	EP-01JXCCJN606DSNE577KYWP4EJ6	25 Juni 2025	KOMINFO	SEWA LAYANAN CALL CENTER 112	198.024.000,00			198.024.000,00	12 Juni 2025	10 Juni 2026	PT JASNITA TELEKOMINDO	16.502.000,00		99.012.000,00	99.012.000,00
3	027/15/SPK/KOMINFO/2025	20 Mei 2025, Kontrak Terhitung mulai 1 Mei 2025-30 April 2026	KOMINFO	Langganan Broadband internet selama 1 Tahun (rinc sesuai Kontrak)	864.000.000,00			864.000.000,00	1 Mei 2025	30-Apr-26	PT HIPERNET INDODATA	72.000.000,00	264.800.000,00	576.000.000,00	288.000.000,00
4	EP-01K564WEQP026BHCPOX0FDXK62	24 Oktober 2025 Kontrak Terhitung Mulai 17 September 2025 sd 17 September 2026	KOMINFO	Lisensi Windows Server Indosat Windows Server Standart	22.500.000,00	02 Desember 2025	52.02/04.0/000097/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/12/2025	22.500.000,00	17-Sep-25	17-Sep-26	PT INDOSAT Tbk	1.875.000,00		5.625.000,00	16.875.000,00
5		24 Januari 2025	KOMINFO	Hosting Website Utama (lomboktengahkab.go.id)	7.050.000,00	24 Januari 2025	52.02/50.0/000029/NPD-NONPANJAR/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2025	7.050.000,00	24 Januari 2025	23 Januari 2026	BRIDGE NET	587.500,00		6.462.500,00	587.500,00
6			RSUD	Pinjaman Jangka Pendek BLUD RSUD pada Bank BSI	159.766.644,00				30-Dec-24	31-Mar-25	BSI	34.713.580,00	101.851.932,53	57.380.002,42	102.386.641,58
	JUMLAH												397.901.932,53	769.343.502,42	519.293.141,58



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR PERSEDIAAN PER SKPD
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

NO	SKPD	PERSEDIAAN HABIS PAKAI																		TOTAL
		Bahan Bangunan dan Konstruksi	Isi Tabung Gas	alkon/non alkon	Suku cadang lainnya	Alat Tulis Kantor	Kuasi/Cetak	kertas/cover	Bahan komputer	souvenir	Perabot Kantor	alat listrik	obat	Obat-obatan Lainnya	Barang untuk tujuan - strategis/berjaga-jaga	Natura dan Pakan	Bibit Ternak	Bahan Baku	Bahan-Bahan Lainnya	
1	Sekretariat Daerah					951.000,00													951.000,00	
2	Sekretariat DPRD					491.547,00				495.630,00	629.530,00								1.616.707,00	
3	Inspektorat Daerah					509.400,00													509.400,00	
4	Dinas Pendidikan					2.146.000,00													2.146.000,00	
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga					786.000,00													786.000,00	
6	Dinas Kesehatan			6.044.203.144,00								6.128.342.445,00						7.569.894.852,00	19.742.440.441,00	
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53.446.500,00				696.000,00													54.142.500,00	
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman				56.625.000,00	2.835.000,00													59.460.000,00	
9	Dinas Sosial					-													-	
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		-	
11	Dinas Perhubungan				1.500.499,00	275.000,00	147.612.300,00	566.400,00				16.156.000,00						88.375.000,00	254.485.199,00	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						48.696.000,00		146.493.710,00										195.189.710,00	
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					296.500,00				2.600.000,00									2.896.500,00	
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah					2.449.000,00													2.449.000,00	
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					342.500,00													342.500,00	
16	Dinas Pertanian					8.828.450,00							46.826.204,00						55.654.654,00	
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					559.000,00													559.000,00	
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			220.075.928,00		1.084.000,00													221.159.928,00	
19	Dinas Ketahanan Pangan					177.000,00								942.956.874,00					943.133.874,00	
20	Dinas Lingkungan Hidup					-													-	
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					349.000,00													349.000,00	
22	Dinas Komunikasi dan Informatika					759.000,00													759.000,00	
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					1.201.580,00													1.201.580,00	
24	Dinas Kelautan dan Perikanan					577.000,00										121.715.000,00			122.292.000,00	
25	Satuan Polisi Pamong Praja					710.000,00													710.000,00	
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan					-													-	
27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					5.642.000,00													5.642.000,00	
28	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah					192.000,00	274.553.689,00												274.745.689,00	
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					350.000,00													350.000,00	
30	Rumah Sakit Umum Daerah		51.125.000,00			19.159.122,00						6.507.672.067,00			34.140.250,00		41.701.850,00	4.006.042.428,00	10.659.840.717,00	
31	Kantor Camat Praya					344.000,00													344.000,00	
32	Kantor Camat Praya Tengah					4.940.000,00													4.940.000,00	
33	Kantor Camat Praya Barat					297.000,00													297.000,00	
34	Kantor Camat Praya Barat Daya					-													-	
35	Kantor Camat Praya Timur					260.000,00													260.000,00	
36	Kantor Camat Pujut					868.000,00													868.000,00	
37	Kantor Camat Janapria					266.000,00													266.000,00	
38	Kantor Camat Kopang					310.865,00													310.865,00	
39	Kantor Camat Batukliang					200.000,00													200.000,00	
40	Kantor Camat Batukliang Utara					165.000,00													165.000,00	
41	Kantor Camat Jonggat					290.000,00													290.000,00	
42	Kantor Camat Pringgabaya					116.000,00													116.000,00	
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													98.388.120,00					98.388.120,00	
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					217.000,00													217.000,00	
45	Dinas Pemadam Kebakaran dan Pertolongan					1.470.000,00													1.470.000,00	
		53.446.500,00	51.125.000,00	6.264.279.072,00	58.125.499,00	61.109.964,00	470.861.989,00	566.400,00	146.493.710,00	2.600.000,00	495.630,00	16.785.530,00	12.636.014.512,00	46.826.204,00	1.041.344.994,00	34.140.250,00	121.715.000,00	41.701.850,00	11.664.312.280,00	32.711.944.384,00



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Dana Bergulir	Per 31 Desember 2025	Penyisihan				Total Penyisihan	NRV	Pengurangan		Per 31 Desember 2024
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			Pengembalian Pokok	Koreksi	
1	Perkuatan Permodalan Koperasi	5.703.321.999,67	-	-	-	5.703.321.999,67	5.703.321.999,67	0,00	10.100.000,00		5.713.421.999,67
2	Revolving Tembakau	344.605.000,00	-	-	-	344.605.000,00	344.605.000,00	-			344.605.000,00
3	LEPP-M3 Bilelendo	284.598.300,00	-	-	-	284.598.300,00	284.598.300,00	-			284.598.300,00
4	Kredit Modal Usaha Kelembagaan	281.282.000,00	-	-	-	281.282.000,00	281.282.000,00	-			281.282.000,00
5	Lahan Marginal	494.505.000,00	-	-	-	494.505.000,00	494.505.000,00	-			494.505.000,00
6	Sapi Fetering	111.462.500,00	-	-	-	111.462.500,00	111.462.500,00	-			111.462.500,00
7	SKIM Kredit TKI	1.367.799.230,00	-	-	-	1.367.799.230,00	1.367.799.230,00	-			1.367.799.230,00
8	GAKIN PD-BPD	3.589.641.397,00	-	-	-	3.589.641.397,00	3.589.641.397,00	-			3.589.641.397,00
9	Kelompok Tani Makmur	148.000.000,00	-	-	-	148.000.000,00	148.000.000,00	-			148.000.000,00
10	DBH-CHT	13.771.900.000,00	-	-	-	13.771.900.000,00	13.771.900.000,00	-			13.771.900.000,00
	Total	26.097.115.426,67	-	-	-	26.097.115.426,67	26.097.115.426,67	0,00	10.100.000,00	-	26.107.215.426,67



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN 2025

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Jumlah penyertaan modal daerah Seharusnya (Bentuk penyertaan Modal)	Bentuk Penyerta an Modal	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan Modal Tahun ini			Jumlah Modal yang di sertakan s.d akhir tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal/Estimasi		Hasil Penyertaan Modal Yang di Tarik (Deviden)		Koreksi +/-)	Jumlah sisa investasi yang di sertakan s.d tahun ini
							Penyert aan Modal Tahun ini	Pemulihan Penyertaan Modal Dari TGR	Defisit Nilai Penyertaan Modal			Sd Tahun lalu	Tahun ini	Sd Tahun lalu	Tahun ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9-10	12=5-11	13	14	15	16	17	18=11+13+14-15-16+17
		INVESTASI PERMANEN		172.213.243.900,31		160.703.419.283,31	-	-	-	160.703.419.283,31	11.509.824.617,00	41.615.263.194,23	17.217.207.339,00	57.660.670.775,20	12.069.222.367,00	(17.220.208.598,34)	132.544.721.354,00
1	sd 2024	PDAM	Perda No. 7 Tahun 2014	97.963.243.900,31		87.453.419.283,31	-			87.453.419.283,31	10.509.824.617,00	(15.921.974.075,97)	5.351.999.000,00	123.433.505,00	245.080.750,00	(17.220.208.598,34)	59.294.721.354,00
2	sd 2024	PT BANK NTB	Perda No. 7 Tahun 2014	60.000.000.000,00		60.000.000.000,00	-			60.000.000.000,00	-	46.543.069.277,00	10.585.023.452,00	46.543.069.277,00	10.585.023.452,00		60.000.000.000,00
3	sd 2024	PD BPR NTB	Perda No. 7 Tahun 2014	12.250.000.000,00		12.250.000.000,00	-			12.250.000.000,00	-	10.858.258.728,00	1.198.051.443,00	10.858.258.728,00	1.198.051.443,00		12.250.000.000,00
4	sd 2024	PT JAMKRIDA NTB BERSAING	Perda No. 7 Tahun 2014	2.000.000.000,00		1.000.000.000,00				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	135.909.265,20	41.066.722,00	135.909.265,20	41.066.722,00		1.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR MUTASI ASET TETAP TANAH
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	PENAMBAHAN ASET TETAP TANAH				PENGURANGAN ASET TETAP TANAH			SALDO PER 31 DESEMBER 2025 sebelum penyusutan	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			Belanja Modal	Appraisal / Penilaian	Mutasi antar OPD	Aset Tetap yang di Peroleh dari Hibah	Aset Tetap yang di Hibahkan ke Masyarakat / Pihak Ke III dan Instansi Lain (Aset yang di peroleh N-1)	Mutasi antar OPD	Reklasifikasi ke Properti Investasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	169.673.074.441,00			208.000.000,00		3.241.757.450	73.800.000,00		169.673.074.441,00	172.780.631.891,00
2	Dinas Kesehatan	23.853.465.050,00			73.800.000,00			146.000.000,00		23.853.465.050,00	23.925.665.050,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3.688.737.560,00								3.688.737.560,00	3.688.737.560,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	279.625.464.352,13		704.315.100,13						279.625.464.352,13	278.921.149.252,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	30.183.300.309,00	1.261.109.152,00				121.109.152,00			30.183.300.309,00	29.043.300.309,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-							-	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-								-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-							-	-
9	Dinas Sosial	2.676.900.000,00	-							2.676.900.000,00	2.676.900.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.142.511.433,00	-				424.738.567,00			1.142.511.433,00	1.567.250.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	380.000.000,00								380.000.000,00	380.000.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	250.000.000,00								250.000.000,00	250.000.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	5.062.839.000,00								5.062.839.000,00	5.062.839.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	400.000.000,00								400.000.000,00	400.000.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	267.200.000,00								267.200.000,00	267.200.000,00
16	Dinas Perhubungan	1.702.550.000,00							50.000.000,00	1.702.550.000,00	1.752.550.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.130.500.000,00								1.130.500.000,00	1.130.500.000,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	298.243.500,00								298.243.500,00	298.243.500,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	852.900.000,00								852.900.000,00	852.900.000,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.159.850.000,00								8.159.850.000,00	8.159.850.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-								-	-
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	948.258.000,00								948.258.000,00	948.258.000,00
23	Dinas Pariwisata	14.530.000.000,00								14.530.000.000,00	14.530.000.000,00
24	Dinas Pertanian	16.924.786.449,53						20.000.000,00		16.924.786.449,53	16.944.786.449,53
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	187.086.577.948,00						42.000.000,00	153.152.000,00	187.086.577.948,00	187.281.729.948,00
26	PPKD	-								-	-
27	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-								-	-
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-								-	-
29	Sekretariat Daerah	123.356.802.450,00								123.356.802.450,00	123.356.802.450,00
30	Sekretariat DPRD	3.899.850.000,00								3.899.850.000,00	3.899.850.000,00
31	Kantor Camat Praya	5.588.310.000,00								5.588.310.000,00	5.588.310.000,00
32	Kantor Camat Praya Tengah	997.250.000,00								997.250.000,00	997.250.000,00
33	Kantor Camat Praya Barat	152.000.000,00								152.000.000,00	152.000.000,00



No	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	PENAMBAHAN ASET TETAP TANAH				PENGURANGAN ASET TETAP TANAH			SALDO PER 31 DESEMBER 2025 sebelum penyusutan	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			Belanja Modal	Appraisal / Penilaian	Mutasi antar OPD	Aset Tetap yang di Peroleh dari Hibah	Aset Tetap yang di Hibahkan ke Masyarakat / Pihak Ke III dan Instansi Lain (Aset yang di peroleh N-1)	Mutasi antar OPD	Reklasifikasi ke Properti Investasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Kantor Camat Praya Barat Daya	884.700.000,00								884.700.000,00	884.700.000,00
35	Kantor Camat Praya Timur	787.250.000,00								787.250.000,00	787.250.000,00
36	Kantor Camat Pujut	1.050.894.000,00								1.050.894.000,00	1.050.894.000,00
37	Kantor Camat Janapria	8.266.952.000,00								8.266.952.000,00	8.266.952.000,00
38	Kantor Camat Kopang	5.777.250.000,00								5.777.250.000,00	5.777.250.000,00
39	Kantor Camat Batukliang	5.221.200.000,00								5.221.200.000,00	5.221.200.000,00
40	Kantor Camat Batukliang Utara	4.063.600.000,00								4.063.600.000,00	4.063.600.000,00
41	Kantor Camat Pringgarata	199.100.000,00								199.100.000,00	199.100.000,00
42	Kantor Camat Jonggat	80.604.000,00								80.604.000,00	80.604.000,00
43	Inspektorat	-								-	-
44	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	-								-	-
45	Badan Pendapatan Daerah	400.000.000,00								400.000.000,00	400.000.000,00
46	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.575.482.000,00				1.357.705.000			60.000.000,00	3.575.482.000,00	2.277.777.000,00
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-								-	-
48	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-								-	-
	Jumlah	913.138.402.492,66	1.261.109.152,00	704.315.100,13	281.800.000,00	1.357.705.000,00	3.787.605.169,00	281.800.000,00	263.152.000,00	913.138.402.492,66	913.866.030.409,53

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
RINCIAN BANTUAN DIGITALISASI PENDIDIKAN TAHUN 2025
TAHUN 2025

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenis Barang			
				Unit Interactive Flat Panel Merah Putih	Jumlah Harga/Unit	Leptop/Unit	Jumlah Harga
1	69772865	TK NEGERI PEMBINA PEDESAAN KOPANG	KOPANG				
2	69770118	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PRAYA TIMUR	PRAYA TIMUR	1		1	
3	69772918	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PRINGGARATA	PRINGGARATA	1		1	
4	69772907	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN JONGGAT	JONGGAT	1		1	
5	69770087	TK NEGERI 2 LOMBOK TENGAH	PRAYA				
6	69770250	TK NEGERI PEMBINA KEC. BATUKLIANG	BATUKLIANG				
7	P9962863	SKB LOMBOK TENGAH (PAUD/TKN)	JONGGAT				
8	69772897	TK NEGERI PEMBINA PRAYA	PRAYA				
9	69770133	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN JANAPRIA	JANAPRIA	1		1	
10	P9962863	SKB LOMBOK TENGAH (Kesetaraan)	JONGGAT	1		1	
A. JENJANG PAUD/TKN				5	0	5	-
1	50201199	SD NEGERI TOJONG - OJONG	Batukliang	1		1	
2	50205131	SD NEGERI DASAN BARU TAMPAKSIRING	Batukliang	1		1	
3	50200978	SD NEGERI BENENG	Batukliang	1		1	
4	50201462	SD NEGERI PAJANGAN	Batukliang	1		1	
5	50201358	SD NEGERI SURABAYA	Batukliang	1		1	
6	50201051	SD NEGERI GUNUNG AMUK	Batukliang	1		1	
7	50201952	SD NEGERI 1 MANTANG	Batukliang	1		1	
8	50201536	SD NEGERI PERESAK	Batukliang	1		1	
9	50201325	SD NEGERI TUNDUNG	Batukliang	1		1	
10	50201465	SD NEGERI Otak Desa	Batukliang	1		1	
11	50201312	SD NEGERI TANAK EMBANG	Batukliang	1		1	
12	50201004	SD NEGERI KEMBANG KERANG	Batukliang	1		1	
13	50200954	SD NEGERI BEBER	Batukliang	1		1	
14	50201548	SD NEGERI PENAKAK	Batukliang	1		1	
15	50201463	SD NEGERI PAGUTAN	Batukliang	1		1	
16	50200961	SD NEGERI BATU LUMBUNG	Batukliang	1		1	
17	50201476	SD NEGERI 1 LENDANG TAMPEL	Batukliang	1		1	
18	50201963	SD NEGERI 1 SANGKAWANA	Batukliang	1		1	
19	50201103	SD NEGERI 2 LENDANG TAMPEL	Batukliang	1		1	
20	50201174	SD NEGERI 3 MANTANG	Batukliang	1		1	
21	50201468	SD NEGERI MERTAK PAOK	Batukliang	1		1	
22	50201060	SD NEGERI 2 SANGKAWANA	Batukliang	1		1	
23	50201486	SD NEGERI MERTAK KESAMBIK	Batukliang	1		1	
24	50200940	SD NEGERI DASAN LEKONG	Batukliang	1		1	
25	50201481	SD NEGERI LEKONG MADI	Batukliang	1		1	
26	50201448	SD NEGERI MERTAK WARENG	Batukliang	1		1	
27	50201080	SD NEGERI 2 TUNJANG	Batukliang	1		1	
28	50201510	SD NEGERI REPOK PUYUNG	Batukliang	1		1	
29	50201540	SD NEGERI PENYENGAK	Batukliang	1		1	
30	50201163	SD NEGERI AIK DAREK	Batukliang	1		1	
31	50201460	SD NEGERI PAOK KUNING	Batukliang	1		1	
32	50201532	SD NEGERI SAPIT	Batukliang	1		1	
33	50201505	SD NEGERI SADE	Batukliang	1		1	
34	50201054	SD NEGERI BARABALI	Batukliang	1		1	
35	50201130	SD NEGERI 2 MANTANG	Batukliang	1		1	
36	50201479	SD NEGERI LENDANG DODA	Batukliang	1		1	
37	50201153	SD NEGERI BAJUR	Batukliang	1		1	
38	50201563	SD NEGERI PONDOK PANDE	Batukliang	1		1	
39	50201353	SD NEGERI TAMPAK SIRING	Batukliang	1		1	
40	50201914	SD NEGERI 1 TUNJANG	Batukliang	1		1	
41	50201474	SD NEGERI Lendang Terong	Batukliang	1		1	
42	50201363	SD NEGERI SUBAHNALA	Batukliang	1		1	
43	50201442	SD NEGERI MONTONG GERIA	Batukliang	1		1	
44	50201960	SD NEGERI 1 SELEBUNG	Batukliang	1		1	
45	50201057	SD NEGERI 2 SELEBUNG	Batukliang	1		1	
46	50201303	SD NEGERI TERATAK	Batukliang Utara	1		1	
47	50201530	SD NEGERI SEGANTENG	Batukliang Utara	1		1	
48	50201008	SD NEGERI KUMBAK	Batukliang Utara	1		1	
49	69761923	SD NEGERI RANGKEP	Batukliang Utara	1		1	
50	50201550	SD NEGERI PERSIL	Batukliang Utara	1		1	
51	50201331	SD NEGERI TANAK BEAK	Batukliang Utara	1		1	
52	50200993	SD NEGERI KARANG SIDEMEN	Batukliang Utara	1		1	
53	50201568	SD NEGERI PEMOTOH TENGAH	Batukliang Utara	1		1	
54	50201523	SD NEGERI SELEWAT	Batukliang Utara	1		1	
55	50201433	SD NEGERI PEMOTOH BARAT	Batukliang Utara	1		1	
56	50201013	SD NEGERI KETANGGA	Batukliang Utara	1		1	
57	50201040	SD NEGERI JENGGUAR	Batukliang Utara	1		1	
58	50201334	SD NEGERI REPUK SINTUNG BARAT	Batukliang Utara	1		1	
59	50201453	SD NEGERI PEMASIR	Batukliang Utara	1		1	
60	50201565	SD NEGERI PETIKUS	Batukliang Utara	1		1	
61	50201149	SD NEGERI AIK BERIK	Batukliang Utara	1		1	
62	50200949	SD NEGERI DAPUR	Batukliang Utara	1		1	
63	50201025	SD NEGERI GELOGOR	Batukliang Utara	1		1	
64	50201515	SD NEGERI REBAN BURUNG	Batukliang Utara	1		1	

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenis Barang			
				Unit Interactive Flat Panel Merah Putih	Jumlah Harga/Unit	Leptop/Unit	Jumlah Harga
65	50219768	SD NEGERI GUNUNG BOROK	Batukliang Utara	1		1	
66	50201049	SD NEGERI GUBUK MAKAM	Batukliang Utara	1		1	
67	50201500	SD NEGERI LANTAN	Batukliang Utara	1		1	
68	50201496	SD NEGERI MAS MAS	Batukliang Utara	1		1	
69	50201471	SD NEGERI LINGKOK LIMA	Batukliang Utara	1		1	
70	50201529	SD NEGERI SEKEDEK	Batukliang Utara	1		1	
71	50201346	SD NEGERI SENURUS	Batukliang Utara	1		1	
72	50201527	SD NEGERI SELAK AIK	Batukliang Utara	1		1	
73	69761922	SD NEGERI RERANTEK	Batukliang Utara	1		1	
74	50201338	SD NEGERI SETILING	Batukliang Utara	1		1	
75	50201330	SD NEGERI TANAK BENGAN	Batukliang Utara	1		1	
76	60729225	SD NEGERI TAMBING KEKEQ	Batukliang Utara	1		1	
77	69770317	SD NEGERI REPOK MONTE	Batukliang Utara	1		1	
78	50201447	SD NEGERI MESORAN	Batukliang Utara	1		1	
79	50201961	SD NEGERI 1 SELEBUNG	Janapria	1		1	
80	50201506	SD NEGERI SADAH	Janapria	1		1	
81	50201869	SD NEGERI 1 JEMBE	Janapria	1		1	
82	50201858	SD NEGERI 1 LANGKO	Janapria	1		1	
83	50201909	SD NEGERI 2 BAKAN	Janapria	1		1	
84	50201855	SD NEGERI 1 JANAPRIA	Janapria	1		1	
85	50205133	SD NEGERI JANGO	Janapria	1		1	
86	50200991	SD NEGERI KEBON SANGKOR	Janapria	1		1	
87	50200977	SD NEGERI BERANI	Janapria	1		1	
88	50201058	SD NEGERI 2 SELEBUNG	Janapria	1		1	
89	50200962	SD NEGERI BATU KEMBAR	Janapria	1		1	
90	50201892	SD NEGERI 1 BAKAN	Janapria	1		1	
91	50201546	SD NEGERI PENANDAK	Janapria	1		1	
92	50201142	SD NEGERI 2 BERANGAH	Janapria	1		1	
93	50201019	SD NEGERI KEMIRI	Janapria	1		1	
94	50201919	SD NEGERI SONDO	Janapria	1		1	
95	50200974	SD NEGERI BILE PENANGGAK	Janapria	1		1	
96	50201864	SD NEGERI 1 KEREMBONG	Janapria	1		1	
97	50201547	SD NEGERI PENAMBONG	Janapria	1		1	
98	50201549	SD NEGERI PERIGI	Janapria	1		1	
99	50201926	SD NEGERI 2 JANAPRIA	Janapria	1		1	
100	50201092	SD NEGERI 2 Langko	Janapria	1		1	
101	50201091	SD NEGERI 2 Lekor	Janapria	1		1	
102	50200951	SD NEGERI DURIAN	Janapria	1		1	
103	50201941	SD NEGERI 1 PENDEM	Janapria	1		1	
104	50201569	SD NEGERI 2 JEMBE	Janapria	1		1	
105	50201451	SD NEGERI NUNANG	Janapria	1		1	
106	50205132	SD NEGERI DASAN TERES	Janapria	1		1	
107	50201490	SD NEGERI MENYIUH	Janapria	1		1	
108	50201484	SD NEGERI LOANG MAK	Janapria	1		1	
109	50201561	SD NEGERI PRAKO	Janapria	1		1	
110	50201042	SD NEGERI JANGKA	Janapria	1		1	
111	50201152	SD NEGERI BANGKA	Janapria	1		1	
112	50201470	SD NEGERI LINGKUK BUAK	Janapria	1		1	
113	50201302	SD NEGERI TIBU SISOK	Janapria	1		1	
114	50201446	SD NEGERI MONTONG BAGEK	Janapria	1		1	
115	50201472	SD NEGERI LINGKOK BUNUT	Janapria	1		1	
116	50201108	SD NEGERI 2 PENDEM	Janapria	1		1	
117	50201439	SD NEGERI MONTONG TANGIS	Janapria	1		1	
118	50201028	SD NEGERI JANGGAWANA	Janapria	1		1	
119	50201356	SD NEGERI TAKEN AKEN	Janapria	1		1	
120	50201455	SD NEGERI PEMANTEK	Janapria	1		1	
121	50201001	SD NEGERI JURING	Janapria	1		1	
122	50201364	SD NEGERI STUTA	Janapria	1		1	
123	50201098	SD NEGERI 2 KEREMBONG	Janapria	1		1	
124	50201160	SD NEGERI AMBAT	Janapria	1		1	
125	50201483	SD NEGERI LIWUNG	Janapria	1		1	
126	50201857	SD NEGERI 1 LEKOR	Janapria	1		1	
127	50201347	SD NEGERI SENGKEREK	Janapria	1		1	
128	50201016	SD NEGERI KENYALU	Janapria	1		1	
129	50201970	SD NEGERI 1 PERINA	Jonggat	1		1	
130	50201933	SD NEGERI 2 BONJERUK	Jonggat	1		1	
131	50200956	SD NEGERI BATUTULIS	Jonggat	1		1	
132	50201162	SD NEGERI AIK AMPAT	Jonggat	1		1	
133	50201846	SD NEGERI 1 BONJERUK	Jonggat	1		1	
134	50201039	SD NEGERI JERENENG	Jonggat	1		1	
135	50201180	SD NEGERI 3 PUYUNG	Jonggat	1		1	
136	50201928	SD NEGERI 2 GEMEL	Jonggat	1		1	
137	50200938	SD NEGERI DASAN SEBELEK	Jonggat	1		1	
138	50201464	SD NEGERI OTAK DESA	Jonggat	1		1	
139	50201913	SD NEGERI 1 UBUNG	Jonggat	1		1	
140	50201535	SD NEGERI PERESAK	Jonggat	1		1	
141	50200929	SD NEGERI BUNCALANG	Jonggat	1		1	
142	50200922	SD NEGERI BUNSAMBANG	Jonggat	1		1	
143	50201487	SD NEGERI MERTAK	Jonggat	1		1	
144	50201170	SD NEGERI 3 NYEROT	Jonggat	1		1	
145	50201301	SD NEGERI TIMUK GAWAH	Jonggat	1		1	



No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenis Barang			
				Unit Interactive Flat Panel Merah Putih	Jumlah Harga/Unit	Leptop/Unit	Jumlah Harga
146	50200939	SD NEGERI Dasan Lekong	Jonggat	1		1	
147	50201870	SD NEGERI 1 JELANTIK	Jonggat	1		1	
148	50201907	SD NEGERI 2 JELANTIK	Jonggat	1		1	
149	50201079	SD NEGERI 2 UBUNG	Jonggat	1		1	
150	50201106	SD NEGERI 2 PENGENJEK	Jonggat	1		1	
151	50201034	SD NEGERI EMBUNG DUDUK	Jonggat	1		1	
152	50201310	SD NEGERI TANDEK	Jonggat	1		1	
153	50200919	SD NEGERI BUNPEDEK	Jonggat	1		1	
154	50201840	SD NEGERI 1 GEMEL	Jonggat	1		1	
155	50201357	SD NEGERI SURABAYA	Jonggat	1		1	
156	50200948	SD NEGERI DASAN BARU	Jonggat	1		1	
157	50201337	SD NEGERI SETUMBAK	Jonggat	1		1	
158	50201361	SD NEGERI SULIN	Jonggat	1		1	
159	50201069	SD NEGERI 2 PERINA	Jonggat	1		1	
160	50201497	SD NEGERI MANGGONG	Jonggat	1		1	
161	50200966	SD NEGERI 3 BAREJULAT	Jonggat	1		1	
162	50200923	SD NEGERI BUN SUMPAK	Jonggat	1		1	
163	50200953	SD NEGERI BEBER	Jonggat	1		1	
164	50201932	SD NEGERI 2 BUNKATE	Jonggat	1		1	
165	50201093	SD NEGERI 2 LABULIA	Jonggat	1		1	
166	50200959	SD NEGERI BATU TINGGANG	Jonggat	1		1	
167	50201944	SD NEGERI 1 NYEROT	Jonggat	1		1	
168	50201485	SD NEGERI LOANG TUNA	Jonggat	1		1	
169	50200934	SD NEGERI BURHANA	Jonggat	1		1	
170	50200963	SD NEGERI BATU ENTEK	Jonggat	1		1	
171	50201918	SD NEGERI 1 SUKARARA	Jonggat	1		1	
172	50201908	SD NEGERI 2 BAREJULAT	Jonggat	1		1	
173	50201148	SD NEGERI AIK ARA	Jonggat	1		1	
174	50201121	SD NEGERI 2 NYEROT	Jonggat	1		1	
175	50201845	SD NEGERI 1 BUNKATE	Jonggat	1		1	
176	50200975	SD NEGERI BILAKERE	Jonggat	1		1	
177	50200976	SD NEGERI BEREMBENG	Jonggat	1		1	
178	50200941	SD NEGERI DASAN KETUJUR	Jonggat	1		1	
179	50201526	SD NEGERI SELANGLET	Jonggat	1		1	
180	50201084	SD NEGERI 2 SUKARARA	Jonggat	1		1	
181	50201956	SD NEGERI 1 PENGENJEK	Jonggat	1		1	
182	50201064	SD NEGERI 2 PUYUNG	Jonggat	1		1	
183	50200981	SD NEGERI BEJELO	Jonggat	1		1	
184	50201029	SD NEGERI GALANG BULAN	Jonggat	1		1	
185	50200943	SD NEGERI DASAN BENGKEL	Jonggat	1		1	
186	50201872	SD NEGERI 1 BAREJULAT	Jonggat	1		1	
187	50201323	SD NEGERI WAKER	Jonggat	1		1	
188	50201965	SD NEGERI 1 PUYUNG	Jonggat	1		1	
189	50201860	SD NEGERI 1 LABULIA	Jonggat	1		1	
190	50201187	SD NEGERI MUMBANG	Kopang	1		1	
191	50201514	SD NEGERI RENGUNG	Kopang	1		1	
192	50201125	SD NEGERI 2 MONTONG GAMANG	Kopang	1		1	
193	50201445	SD NEGERI Montong Batu	Kopang	1		1	
194	50201513	SD NEGERI RENGKAK	Kopang	1		1	
195	50201435	SD NEGERI Muncan	Kopang	1		1	
196	50200984	SD NEGERI BARE ELEH	Kopang	1		1	
197	50200942	SD NEGERI DASAN JONTAK	Kopang	1		1	
198	50201006	SD NEGERI KWANG RASE	Kopang	1		1	
199	50201969	SD NEGERI 1 Peseng	Kopang	1		1	
200	50201440	SD NEGERI MONTONG TANGGAK	Kopang	1		1	
201	50201949	SD NEGERI 1 Monggas	Kopang	1		1	
202	50200955	SD NEGERI BEBAK	Kopang	1		1	
203	50201552	SD NEGERI PUYUNG	Kopang	1		1	
204	50200931	SD NEGERI BUAL	Kopang	1		1	
205	50201033	SD NEGERI EMBUNG KARUNG	Kopang	1		1	
206	50201501	SD NEGERI SEMPAPU	Kopang	1		1	
207	50201018	SD NEGERI KENAWA	Kopang	1		1	
208	50200983	SD NEGERI BEBUAK	Kopang	1		1	
209	50200998	SD NEGERI JURIT	Kopang	1		1	
210	50201566	SD NEGERI PETEMON	Kopang	1		1	
211	50201046	SD NEGERI GUNUNG GATEP	Kopang	1		1	
212	50201324	SD NEGERI 1 Wajegesang	Kopang	1		1	
213	50201512	SD NEGERI REPOK BIJANG	Kopang	1		1	
214	50201127	SD NEGERI 2 MONGGAS	Kopang	1		1	
215	50201095	SD NEGERI 2 KOPANG	Kopang	1		1	
216	50201068	SD NEGERI 2 Peseng	Kopang	1		1	
217	50201947	SD NEGERI 1 MONTONG GAMANG	Kopang	1		1	
218	50200952	SD NEGERI BISOK BOKAH	Kopang	1		1	
219	50201475	SD NEGERI LENDANG TELAGA	Kopang	1		1	
220	50201469	SD NEGERI LINGKUNG	Kopang	1		1	
221	50201929	SD NEGERI 2 DARMAJI	Kopang	1		1	
222	50201189	SD NEGERI 4 KOPANG	Kopang	1		1	
223	50200992	SD NEGERI KARANG TENGAH	Kopang	1		1	
224	50201537	SD NEGERI PRESAK BEBUAK	Kopang	1		1	
225	50201842	SD NEGERI 1 DARMAJI	Kopang	1		1	
226	50201862	SD NEGERI 1 KOPANG	Kopang	1		1	

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenis Barang			
				Unit Interactive Flat Panel Merah Putih	Jumlah Harga/Unit	Leptop/Unit	Jumlah Harga
227	50201521	SD NEGERI SEMALANG	Kopang	1		1	
228	50201175	SD NEGERI 3 KOPANG	Kopang	1		1	
229	50201542	SD NEGERI Penimpoh	Kopang	1		1	
230	50201443	SD NEGERI MONTONG BUAH	Kopang	1		1	
231	50201480	SD NEGERI LENDANG ARA	Kopang	1		1	
232	50200947	SD NEGERI DASAN BARU	Kopang	1		1	
233	50201360	SD NEGERI Sombek	Kopang	1		1	
234	50201007	SD NEGERI KWANGPATI	Kopang	1		1	
235	50201558	SD NEGERI PRESAK DARMAJI	Kopang	1		1	
236	50201507	SD NEGERI RETOT	Kopang	1		1	
237	50201854	SD NEGERI 1 GERUNUNG	Praya	1		1	
238	50201467	SD NEGERI MERTAK TOMBOK	Praya	1		1	
239	50201147	SD NEGERI 22 PRAYA	Praya	1		1	
240	50201359	SD NEGERI SUNDIL	Praya	1		1	
241	50201050	SD NEGERI GONJAK	Praya	1		1	
242	50201104	SD NEGERI 2 LENENG	Praya	1		1	
243	50201911	SD NEGERI 1 WAKUL	Praya	1		1	
244	50201893	SD NEGERI 1 AIKMUAL	Praya	1		1	
245	50201931	SD NEGERI 2 BUNUT BAK	Praya	1		1	
246	50201138	SD NEGERI 7 PRAYA	Praya	1		1	
247	50201056	SD NEGERI 2 SEMAYAN	Praya	1		1	
248	50201309	SD NEGERI TANGGAK	Praya	1		1	
249	50200928	SD NEGERI BUNDUA	Praya	1		1	
250	50201300	SD NEGERI TIWU ASEM	Praya	1		1	
251	50201946	SD NEGERI 1 MONTONG TEREP	Praya	1		1	
252	50201910	SD NEGERI 2 AIKMUAL	Praya	1		1	
253	50200935	SD NEGERI BUSE	Praya	1		1	
254	50201927	SD NEGERI 2 GERUNUNG	Praya	1		1	
255	50201306	SD NEGERI TELAGA WARU	Praya	1		1	
256	50201134	SD NEGERI 11 PRAYA	Praya	1		1	
257	50201962	SD NEGERI 1 SEKUNYIT	Praya	1		1	
258	50201059	SD NEGERI 2 SEKUNYIT	Praya	1		1	
259	50201166	SD NEGERI 3 PRAYA	Praya	1		1	
260	50201043	SD NEGERI JAGO	Praya	1		1	
261	50201848	SD NEGERI 1 BODAK	Praya	1		1	
262	50201161	SD NEGERI AIKJA	Praya	1		1	
263	50201005	SD NEGERI KWANGRUNDUN	Praya	1		1	
264	50201498	SD NEGERI MAKAM	Praya	1		1	
265	50205134	SD NEGERI MERTAK UMBAK	Praya	1		1	
266	50201916	SD NEGERI 1 TENGARI	Praya	1		1	
267	50201037	SD NEGERI GERINTUK	Praya	1		1	
268	50201082	SD NEGERI 2 TENGARI	Praya				
269	50201177	SD NEGERI 3 GERUNUNG	Praya	1		1	
270	50201184	SD NEGERI 4 PRAYA	Praya	1		1	
271	50201554	SD NEGERI PUNIK	Praya	1		1	
272	50201024	SD NEGERI Gelondong Baru	Praya	1		1	
273	50201179	SD NEGERI 3 BODAK	Praya	1		1	
274	50201077	SD NEGERI 2 WAKUL	Praya	1		1	
275	50201461	SD NEGERI PAOK TAWAH	Praya	1		1	
276	50201066	SD NEGERI 2 PRAYA	Praya	1		1	
277	50201139	SD NEGERI 6 PRAYA	Praya	1		1	
278	50200968	SD NEGERI BEBIE	Praya	1		1	
279	50201488	SD NEGERI MERANG BARU	Praya	1		1	
280	50201137	SD NEGERI 8 PRAYA	Praya				
281	50201341	SD NEGERI SERENGAT	Praya	1		1	
282	50201849	SD NEGERI 1 BERAIM	Praya	1		1	
283	50201011	SD NEGERI KETEJER	Praya	1		1	
284	50201967	SD NEGERI 1 PRAYA	Praya	1		1	
285	50201076	SD NEGERI 3 AIK MUAL	Praya	1		1	
286	50201124	SD NEGERI 2 MONTONG TEREP	Praya	1		1	
287	50200921	SD NEGERI BUNSAKAL	Praya	1		1	
288	50201144	SD NEGERI 5 PRAYA	Praya	1		1	
289	50200989	SD NEGERI KEKERE	Praya	1		1	
290	50201559	SD NEGERI PRAYITNA	Praya	1		1	
291	50201935	SD NEGERI 2 BODAK	Praya	1		1	
292	50200933	SD NEGERI BOGAK	Praya	1		1	
293	50200970	SD NEGERI BILE PAIT	Praya	1		1	
294	50200958	SD NEGERI BATUBANGKA	Praya	1		1	
295	50201844	SD NEGERI 1 BUNUT BAK	Praya	1		1	
296	50201193	SD NEGERI 4 BATUJAI	Praya Barat	1		1	
297	50201087	SD NEGERI 2 PENUJAK	Praya Barat	1		1	
298	50201921	SD NEGERI 1 SETANGGOR	Praya Barat	1		1	
299	50201085	SD NEGERI 2 SETANGGOR	Praya Barat	1		1	
300	50201922	SD NEGERI 2 BATU BEDUK	Praya Barat	1		1	
301	50201053	SD NEGERI EMBOAN	Praya Barat	1		1	
302	50201314	SD NEGERI TOMANG OMANG	Praya Barat	1		1	
303	50201311	SD NEGERI TANAK RARANG	Praya Barat	1		1	
304	50201017	SD NEGERI KENTAWANG	Praya Barat	1		1	
305	50201150	SD NEGERI BANGKET MOLO	Praya Barat	1		1	
306	50201105	SD NEGERI 2 MANGKUNG	Praya Barat	1		1	
307	50201539	SD NEGERI Pepekak	Praya Barat	1		1	

No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenis Barang			
				Unit Interactive Flat Panel Merah Putih	Jumlah Harga/Unit	Leptop/Unit	Jumlah Harga
308	50201002	SD NEGERI KELOKA	Praya Barat	1		1	
309	50201852	SD NEGERI 1 BATUJAI	Praya Barat	1		1	
310	50201438	SD NEGERI MONTONG WARU	Praya Barat	1		1	
311	50201466	SD NEGERI OROK GENDANG	Praya Barat	1		1	
312	50200986	SD NEGERI KELING	Praya Barat	1		1	
313	50201156	SD NEGERI BAREBELIK	Praya Barat	1		1	
314	50200973	SD NEGERI BILE TENGAH	Praya Barat	1		1	
315	50201014	SD NEGERI Ketangga	Praya Barat	1		1	
316	50201953	SD NEGERI 1 MANGKUNG	Praya Barat	1		1	
317	50201074	SD NEGERI 3 BATUJAI	Praya Barat	1		1	
318	50200932	SD NEGERI BONDER	Praya Barat	1		1	
319	50201329	SD NEGERI TONGKER	Praya Barat	1		1	
320	50201495	SD NEGERI MASJURING	Praya Barat	1		1	
321	50201866	SD NEGERI 1 Kateng	Praya Barat	1		1	
322	50201140	SD NEGERI 6 PENUJAK	Praya Barat	1		1	
323	50201145	SD NEGERI 5 PENUJAK	Praya Barat	1		1	
324	50201031	SD NEGERI EMBUNG TANGAR	Praya Barat	1		1	
325	50201167	SD NEGERI 3 PENUJAK	Praya Barat	1		1	
326	50201522	SD NEGERI SELONG BELANAK	Praya Barat	1		1	
327	50201186	SD NEGERI 4 PENUJAK	Praya Barat	1		1	
328	50201871	SD NEGERI 1 BATUBEDUK	Praya Barat	1		1	
329	50201044	SD NEGERI JABON BARAT	Praya Barat	1		1	
330	50201491	SD NEGERI MENTOKOK	Praya Barat	1		1	
331	50201560	SD NEGERI PRAPAK	Praya Barat	1		1	
332	50201924	SD NEGERI 2 BATUJAI	Praya Barat	1		1	
333	50201847	SD NEGERI 1 BOMBAS	Praya Barat	1		1	
334	50201934	SD NEGERI 2 BOMBAS	Praya Barat				
335	50201551	SD NEGERI PETAK	Praya Barat	1		1	
336	50200926	SD NEGERI BUNKLOTOK	Praya Barat	1		1	
337	50201971	SD NEGERI 1 PENUJAK	Praya Barat	1		1	
338	50201856	SD NEGERI 1 JANGKIH JAWA	Praya Barat	1		1	
339	50201925	SD NEGERI 2 JANGKIH JAWA	Praya Barat	1		1	
340	50201354	SD NEGERI TAMPAH	Praya Barat	1		1	
341	50200987	SD NEGERI KELEBUH	Praya Barat	1		1	
342	50201100	SD NEGERI 2 KATENG	Praya Barat	1		1	
343	50201181	SD NEGERI 2 RANGGAGATA	Praya Barat Daya	1		1	
344	50201164	SD NEGERI 3 UNGGA	Praya Barat Daya	1		1	
345	50201126	SD NEGERI PONDOK DALAM	Praya Barat Daya	1		1	
346	50205129	SD NEGERI 1 KELANJUR	Praya Barat Daya	1		1	
347	50201120	SD NEGERI KELAMBI	Praya Barat Daya	1		1	
348	50201178	SD NEGERI MENTOKAN	Praya Barat Daya	1		1	
349	50201968	SD NEGERI PLAMBIK	Praya Barat Daya	1		1	
350	50201075	SD NEGERI 2 BATU JANGKIH	Praya Barat Daya	1		1	
351	50201194	SD NEGERI BATU BOLONG	Praya Barat Daya	1		1	
352	50201067	SD NEGERI SELANGIT	Praya Barat Daya	1		1	
353	50201192	SD NEGERI 3 DAREK	Praya Barat Daya	1		1	
354	50201327	SD NEGERI TUDUH	Praya Barat Daya	1		1	
355	50201912	SD NEGERI 1 UNGGA	Praya Barat Daya	1		1	
356	50219604	SD NEGERI KANGAS	Praya Barat Daya	1		1	
357	50201923	SD NEGERI 1 BATU JANGKIH	Praya Barat Daya	1		1	
358	50205135	SD NEGERI TOROK AIK BELEK	Praya Barat Daya	1		1	
359	50201078	SD NEGERI 2 UNGGA	Praya Barat Daya	1		1	
360	69786358	SD NEGERI Pandan Sari	Praya Barat Daya	1		1	
361	50201520	SD NEGERI SEMAYE	Praya Barat Daya	1		1	
362	50201063	SD NEGERI KUMBAK	Praya Barat Daya	1		1	
363	50201943	SD NEGERI KENDING SAMPI	Praya Barat Daya	1		1	
364	50201441	SD NEGERI 1 MONTONG SAPAH	Praya Barat Daya	1		1	
365	50201172	SD NEGERI 2 KELANJUR	Praya Barat Daya	1		1	
366	50219606	SD NEGERI RENTUNG	Praya Barat Daya	1		1	
367	50200997	SD NEGERI 1 KABUL	Praya Barat Daya	1		1	
368	50201141	SD NEGERI TENARU	Praya Barat Daya	1		1	
369	50200967	SD NEGERI BEBERIK-PLAMBIK	Praya Barat Daya	1		1	
370	50201101	SD NEGERI PAMPANG	Praya Barat Daya	1		1	
371	50201169	SD NEGERI BATU RENONG	Praya Barat Daya	1		1	
372	50201036	SD NEGERI GERINTUK	Praya Barat Daya	1		1	
373	50201146	SD NEGERI 4 DAREK	Praya Barat Daya	1		1	
374	50205130	SD NEGERI 1 RANGGAGATA	Praya Barat Daya	1		1	
375	50201518	SD NEGERI SAPE	Praya Barat Daya	1		1	
376	50219605	SD NEGERI SUARE	Praya Barat Daya	1		1	
377	50201449	SD NEGERI NGABOK	Praya Barat Daya	1		1	
378	50201930	SD NEGERI 2 DAREK	Praya Barat Daya	1		1	
379	50222383	SD NEGERI Gerunung	Praya Barat Daya	1		1	
380	50201843	SD NEGERI 1 DAREK	Praya Barat Daya	1		1	
381	50201853	SD NEGERI PANDAN TINGGANG	Praya Barat Daya	1		1	
382	50201948	SD NEGERI Montong Ajan	Praya Barat Daya	1		1	
383	50201185	SD NEGERI 4 PLAMBIK (BAGEK DEWE)	Praya Barat Daya	1		1	
384	50201494	SD NEGERI MEKA	Praya Tengah	1		1	
385	50201339	SD NEGERI SESAKE	Praya Tengah	1		1	
386	50201102	SD NEGERI 2 JURANG JALER	Praya Tengah	1		1	
387	50201090	SD NEGERI 2 LELONG	Praya Tengah	1		1	
388	50201524	SD NEGERI SELEBUNG	Praya Tengah	1		1	



No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenis Barang			
				Unit Interactive Flat Panel Merah Putih	Jumlah Harga/Unit	Leptop/Unit	Jumlah Harga
389	50200950	SD NEGERI DAKUNG	Praya Tengah	1		1	
390	50201851	SD NEGERI 1 BATUNYALA	Praya Tengah	1		1	
391	50201938	SD NEGERI 2 BATUNYALA	Praya Tengah	1		1	
392	50201197	SD NEGERI 3 BERAİM	Praya Tengah	1		1	
393	50201061	SD NEGERI 2 SANGGENG	Praya Tengah	1		1	
394	50201089	SD NEGERI 2 LENDANG KUNYIT	Praya Tengah	1		1	
395	50201955	SD NEGERI 1 PENGADANG	Praya Tengah	1		1	
396	50201021	SD NEGERI JORONG	Praya Tengah	1		1	
397	50201107	SD NEGERI 2 PENGADANG	Praya Tengah	1		1	
398	50201541	SD NEGERI PENIMPOH	Praya Tengah	1		1	
399	50201972	SD NEGERI 1 LENDANG KUNYIT	Praya Tengah	1		1	
400	50201340	SD NEGERI SEREWA PRAYA TENGAH	Praya Tengah	1		1	
401	50201942	SD NEGERI 1 PEJANGGIK	Praya Tengah	1		1	
402	50201867	SD NEGERI 1 JURANG JALER	Praya Tengah	1		1	
403	50201168	SD NEGERI 3 PEJANGGIK	Praya Tengah	1		1	
404	50201352	SD NEGERI TAMPAR AMPAR	Praya Tengah	1		1	
405	50201048	SD NEGERI GUNTUR	Praya Tengah	1		1	
406	50201073	SD NEGERI 3 BATUNYALA	Praya Tengah	1		1	
407	50201109	SD NEGERI 2 PEJANGGIK	Praya Tengah	1		1	
408	50201859	SD NEGERI 1 LAJUT	Praya Tengah	1		1	
409	50201131	SD NEGERI 2 JONTLAK	Praya Tengah	1		1	
410	50200996	SD NEGERI KARANG BARU	Praya Tengah	1		1	
411	50201023	SD NEGERI GERANTUNG	Praya Tengah	1		1	
412	50201022	SD NEGERI GERENENG	Praya Tengah	1		1	
413	50201937	SD Negeri 2 Beraim	Praya Tengah	1		1	
414	50201136	SD NEGERI 9 PRAYA	Praya Tengah	1		1	
415	50201035	SD NEGERI EMBUNG BELEK	Praya Tengah	1		1	
416	50201868	SD NEGERI 1 JONTLAK	Praya Tengah	1		1	
417	50201502	SD NEGERI 1 SANGGENG	Praya Tengah	1		1	
418	50201839	SD NEGERI 1 LELONG	Praya Tengah	1		1	
419	50200971	SD NEGERI BILELANDO	Praya Timur	1		1	
420	50201349	SD NEGERI SONGKOK	Praya Timur	1		1	
421	50201492	SD NEGERI MENGKUDU	Praya Timur	1		1	
422	50200988	SD NEGERI KELANJUH	Praya Timur	1		1	
423	50201096	SD NEGERI SEMOYONG	Praya Timur	1		1	
424	50201003	SD NEGERI KELONGKONG	Praya Timur	1		1	
425	50201122	SD NEGERI 2 MUJUR	Praya Timur	1		1	
426	50201344	SD NEGERI SEPAKAT	Praya Timur	1		1	
427	50201188	SD NEGERI NYAMPE PRAYA TIMUR	Praya Timur	1		1	
428	50201951	SD NEGERI 1 MARONG	Praya Timur	1		1	
429	50201195	SD NEGERI LENGKAH	Praya Timur	1		1	
430	50201482	SD NEGERI Legu	Praya Timur	1		1	
431	50201010	SD NEGERI KIDANG	Praya Timur	1		1	
432	50201362	SD NEGERI Sukaraja	Praya Timur	1		1	
433	50201936	SD NEGERI 2 BELEKA	Praya Timur	1		1	
434	50201545	SD NEGERI PENANGSAK	Praya Timur	1		1	
435	50201499	SD NEGERI LOKON	Praya Timur	1		1	
436	50201489	SD NEGERI MENYOSOK	Praya Timur	1		1	
437	50201070	SD NEGERI 2 SEMOYANG	Praya Timur	1		1	
438	50201026	SD NEGERI 2 GANTI	Praya Timur	1		1	
439	50201129	SD NEGERI 2 MARONG	Praya Timur	1		1	
440	50201350	SD NEGERI SOSAK	Praya Timur	1		1	
441	50200979	SD NEGERI BELEKA	Praya Timur	1		1	
442	50205128	SD NEGERI BERANGAH	Praya Timur	1		1	
443	50200957	SD NEGERI BATURINTANG	Praya Timur	1		1	
444	50201173	SD NEGERI 3 MARONG	Praya Timur	1		1	
445	50201183	SD NEGERI NYANGGET	Praya Timur	1		1	
446	50200985	SD NEGERI Landah	Praya Timur	1		1	
447	50201538	SD NEGERI PERAS	Praya Timur	1		1	
448	50201171	SD NEGERI 3 MUJUR	Praya Timur	1		1	
449	50200969	SD NEGERI BEBILE	Praya Timur	1		1	
450	50201055	SD NEGERI 3 BELEKA	Praya Timur	1		1	
451	50201182	SD NEGERI TELOK	Praya Timur	1		1	
452	50201850	SD NEGERI 1 BELEKA	Praya Timur	1		1	
453	50201009	SD NEGERI KULEM	Praya Timur	1		1	
454	50201959	SD NEGERI 1 Semoyang	Praya Timur	1		1	
455	50201945	SD NEGERI 1 MUJUR	Praya Timur	1		1	
456	50201841	SD NEGERI 1 GANTI	Praya Timur	1		1	
457	50201155	SD NEGERI BAGIK KERONGKONG	Praya Timur	1		1	
458	50201958	SD NEGERI 1 SENGKERANG	Praya Timur	1		1	
459	50201508	SD NEGERI REPOK TUNJANG	Pringgarata	1		1	
460	50201434	SD NEGERI MURBAYA	Pringgarata	1		1	
461	50201020	SD NEGERI JURANG SATE	Pringgarata	1		1	
462	50201966	SD NEGERI 1 PRINGGARATA	Pringgarata	1		1	
463	50201332	SD NEGERI SINTUNG TIMUR	Pringgarata	1		1	
464	50201920	SD NEGERI SISIK TIMUR	Pringgarata	1		1	
465	50201030	SD NEGERI ESOT	Pringgarata	1		1	
466	50201553	SD NEGERI PUSPALAYA	Pringgarata	1		1	
467	50201478	SD NEGERI LENDANG KELOR	Pringgarata	1		1	
468	50201307	SD NEGERI TAPON	Pringgarata	1		1	
469	50201335	SD NEGERI SINTUNG BARAT	Pringgarata	1		1	



No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenis Barang			
				Unit Interactive Flat Panel Merah Putih	Jumlah Harga/Unit	Leptop/Unit	Jumlah Harga
470	50201154	SD NEGERI BAGU	Pringgarata	1		1	
471	50201564	SD NEGERI PIDADA	Pringgarata	1		1	
472	50201452	SD NEGERI PEMEPEK	Pringgarata	1		1	
473	50201086	SD NEGERI 2 SEPAKEK	Pringgarata	1		1	
474	50201556	SD NEGERI PRINGGARATA TIMUR	Pringgarata	1		1	
475	50201957	SD NEGERI 1 PENJANGKA	Pringgarata	1		1	
476	50201088	SD NEGERI 2 PENJANGKA	Pringgarata	1		1	
477	50201557	SD NEGERI PRINGGARATA BARAT	Pringgarata	1		1	
478	50201348	SD NEGERI SISIK BARAT	Pringgarata	1		1	
479	50201504	SD NEGERI SALAM SUKUR	Pringgarata	1		1	
480	50201132	SD NEGERI BANTENG KESELET	Pringgarata	1		1	
481	50201158	SD NEGERI ARJANGKA	Pringgarata	1		1	
482	50200944	SD NEGERI Dasan Baru Inpres	Pringgarata	1		1	
483	50200946	SD NEGERI DASAN BARU NON INPRES	Pringgarata	1		1	
484	50201047	SD NEGERI GUNUNG AGUNG	Pringgarata	1		1	
485	50201437	SD NEGERI MONTONG ARA	Pringgarata	1		1	
486	50200994	SD NEGERI KARANG KEBON	Pringgarata	1		1	
487	50200990	SD NEGERI KEKALEK	Pringgarata	1		1	
488	50201355	SD NEGERI TAMAN BALI	Pringgarata	1		1	
489	50201939	SD NEGERI 1 SEPAKEK	Pringgarata	1		1	
490	50201493	SD NEGERI MENEMENG	Pringgarata	1		1	
491	50201533	SD NEGERI RARUNG	Pringgarata	1		1	
492	69900095	SD NEGERI Pempek Barat	Pringgarata	1		1	
493	50200972	SD NEGERI BILEBANTE	Pringgarata	1		1	
494	50201950	SD NEGERI 1 MEDAS	Pringgarata	1		1	
495	50200995	SD NEGERI KARANG JANGKONG	Pringgarata	1		1	
496	50201128	SD NEGERI 2 MEDAS	Pringgarata	1		1	
497	50201531	SD NEGERI SEDAU TIMUR	Pringgarata	1		1	
498	50201511	SD NEGERI REPOK PIDENDANG	Pringgarata	1		1	
499	50201509	SD NEGERI REPOK SINTUNG	Pringgarata	1		1	
500	50200936	SD NEGERI CERORONG	Pringgarata	1		1	
501	50201432	SD NEGERI SEMPOJA	Pringgarata	1		1	
502	50200945	SD NEGERI DASAN BARU JABON	Pringgarata	1		1	
503	50201065	SD NEGERI 2 PRINGGARATA	Pringgarata	1		1	
504	50201143	SD NEGERI 5 SENGKOL	Pujut	1		1	
505	50201041	SD NEGERI JELATENG	Pujut	1		1	
506	50201562	SD NEGERI PONGOS	Pujut	1		1	
507	50200925	SD NEGERI BUNMAS	Pujut	1		1	
508	50200927	SD NEGERI BUNGAWAN	Pujut	1		1	
509	50201190	SD NEGERI 4 KAWO	Pujut	1		1	
510	50201072	SD NEGERI 2 SENGKOL	Pujut	1		1	
511	50201015	SD NEGERI KETANGAN	Pujut	1		1	
512	50201458	SD NEGERI PASUNG	Pujut	1		1	
513	50201157	SD NEGERI AWANG	Pujut	1		1	
514	50201336	SD NEGERI SEWAR	Pujut	1		1	
515	50201365	SD NEGERI SEMUNDAL	Pujut	1		1	
516	50200937	SD NEGERI DONDAK	Pujut	1		1	
517	50201313	SD NEGERI TOLOT-TOLOT	Pujut	1		1	
518	50201436	SD NEGERI MONYEL	Pujut	1		1	
519	50200920	SD NEGERI BUNPETUNG	Pujut	1		1	
520	50200924	SD NEGERI BUNUT BAK	Pujut	1		1	
521	50201305	SD NEGERI TELUK BULAN	Pujut	1		1	
522	50201503	SD NEGERI SAMBAK DUI	Pujut	1		1	
523	50201861	SD NEGERI 1 KUTA	Pujut	1		1	
524	50200930	SD NEGERI BUMBANG	Pujut	1		1	
525	50201516	SD NEGERI SANGGENG	Pujut	1		1	
526	50201454	SD NEGERI PEMASAH	Pujut	1		1	
527	50200980	SD NEGERI BELAR	Pujut	1		1	
528	50201543	SD NEGERI Pengengat	Pujut	1		1	
529	50201457	SD NEGERI PEJERUK	Pujut	1		1	
530	50201151	SD NEGERI BANGKANG	Pujut	1		1	
531	69894290	SD NEGERI Montong Gerantung	Pujut	1		1	
532	50201176	SD NEGERI 3 KAWO	Pujut	1		1	
533	50201328	SD NEGERI TUBAN	Pujut	1		1	
534	50201304	SD NEGERI TEMPIT	Pujut	1		1	
535	50201459	SD NEGERI PAPAK	Pujut	1		1	
536	50201326	SD NEGERI TUMPAK	Pujut	1		1	
537	50201917	SD NEGERI 1 TANAK AWU	Pujut	1		1	
538	50201342	SD NEGERI SERENENG	Pujut	1		1	
539	50201308	SD NEGERI TANSANG-ANSANG	Pujut	1		1	
540	50201863	SD NEGERI 1 KETARA	Pujut	1		1	
541	50201159	SD NEGERI AREGULING	Pujut	1		1	
542	50201519	SD NEGERI SEMPALAN	Pujut	1		1	
543	50201315	SD NEGERI TONJER	Pujut	1		1	
544	50201094	SD NEGERI 2 KUTA	Pujut	1		1	
545	50201351	SD NEGERI TAMPING	Pujut	1		1	
546	50201099	SD NEGERI 2 KAWO	Pujut	1		1	
547	50201940	SD NEGERI 1 SENGKOL	Pujut	1		1	
548	50200960	SD NEGERI BATU PEDANG	Pujut	1		1	
549	50201081	SD NEGERI 2 TERUWAI	Pujut	1		1	
550	50201027	SD NEGERI GANTANG	Pujut	1		1	



No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenis Barang			
				Unit Interactive Flat Panel Merah Putih	Jumlah Harga/Unit	Leptop/Unit	Jumlah Harga
551	50220625	SD NEGERI 3 REMBITAN	Pujut	1		1	
552	50200982	SD NEGERI BEDUS	Pujut	1		1	
553	50201038	SD NEGERI GERUPUK	Pujut	1		1	
554	50201343	SD NEGERI SERENANG	Pujut	1		1	
555	50201865	SD NEGERI 1 Kawo	Pujut	1		1	
556	50201525	SD NEGERI SELAWANG	Pujut	1		1	
557	50201322	SD NEGERI WARENG	Pujut	1		1	
558	50200965	SD NEGERI BARELANTAN	Pujut	1		1	
559	50201196	SD NEGERI 3 SENGKOL	Pujut	1		1	
560	50201062	SD NEGERI 2 REMBITAN	Pujut	1		1	
561	50201517	SD NEGERI SANGI	Pujut	1		1	
562	50201915	SD NEGERI 1 TERUWAI	Pujut	1		1	
563	50201032	SD NEGERI EMBUNG RUNGKAS	Pujut	1		1	
564	50201528	SD NEGERI SEKEMBANG	Pujut	1		1	
565	50201083	SD NEGERI 2 TANAK AWU.	Pujut	1		1	
566	50201052	SD NEGERI GILIK	Pujut	1		1	
567	50201544	SD NEGERI PENGEMBUR	Pujut	1		1	
568	50201477	SD NEGERI LENDANG LANTAN	Pujut	1		1	
569	50201964	SD NEGERI 1 REMBITAN	Pujut	1		1	
570	50201450	SD NEGERI NGOLANG	Pujut	1		1	
571	50200964	SD NEGERI BAREPAOK	Pujut	1		1	
572	50201097	SD NEGERI 2 KETARA	Pujut	1		1	
573	50201534	SD NEGERI RAJAN	Pujut	1		1	
574	50201165	SD NEGERI 4 SENGKOL	Pujut	1		1	
575	50201473	SD NEGERI LENTEK	Pujut	1		1	
B. JUMLAH JENJANG SD				572	0	572	0
1	50201317	SMP NEGERI 1 BATUKLIANG	Batukliang	1		1	
2	50201407	SMPN 2 BATUKLIANG	Batukliang	1		1	
3	50201418	SMP NEGERI 4 BATUKLIANG	Batukliang	1		1	
4	69759255	SMPN 5 BATUKLIANG	Batukliang	1		1	
5	50201429	SMP NEGERI 3 BATUKLIANG	Batukliang	1		1	
6	50205173	SMP NEGERI SATU ATAP 2 BATUKLIANG	Batukliang	1		1	
7	50205171	SMP NEGERI SATU ATAP 1 BATUKLIANG	Batukliang	1		1	
8	50220240	SMP-SD SATU ATAP LANTAN	Batukliang Utara	1		1	
9	50201406	SMP NEGERI 2 BATUKLIANG UTARA	Batukliang Utara	1		1	
10	50201417	SMP NEGERI 4 BATUKLIANG UTARA	Batukliang Utara	1		1	
11	50201428	SMP NEGERI 3 BATUKLIANG UTARA	Batukliang Utara	1		1	
12	50220245	SMP NEGERI SATAP REPUK SINTUNG	Batukliang Utara	1		1	
13	50201316	SMP NEGERI 1 BATUKLIANG UTARA	Batukliang Utara	1		1	
14	69987307	SMP NEGERI 7 SATU ATAP BATUKLIANG UTARA	Batukliang Utara	1		1	
15	50201198	SMP NEGERI 1 JANAPRIA	Janapria	1		1	
16	50201399	SMP NEGERI 4 JANAPRIA	Janapria	1		1	
17	50201405	SMP NEGERI 2 JANAPRIA	Janapria	1		1	
18	50201427	SMP NEGERI 3 JANAPRIA	Janapria	1		1	
19	50220287	SMP NEGERI 5 JANAPRIA	Janapria	1		1	
20	69946504	SMPN 6 JANAPRIA	Janapria	1		1	
21	50201377	SMP NEGERI 5 JONGGAT	Jonggat	1		1	
22	50201426	SMP NEGERI 3 JONGGAT	Jonggat	1		1	
23	50201431	SMP NEGERI 1 JONGGAT	Jonggat	1		1	
24	50201404	SMP NEGERI 2 JONGGAT	Jonggat	1		1	
25	69815400	SMPN 6 JONGGAT	Jonggat	1		1	
26	50201398	SMP NEGERI 4 JONGGAT	Jonggat	1		1	
27	50201413	SMP NEGERI 1 KOPANG	Kopang	1		1	
28	50201425	SMP NEGERI 3 KOPANG	Kopang	1		1	
29	50201376	SMP NEGERI 5 KOPANG	Kopang	1		1	
30	50201380	SMP NEGERI 4 KOPANG	Kopang	1		1	
31	50201403	SMP NEGERI 2 KOPANG	Kopang	1		1	
32	50219608	SMP NEGERI 6 KOPANG	Kopang	1		1	
33	50201375	SMP NEGERI 5 PRAYA	Praya	1		1	
34	50201379	SMP NEGERI 4 PRAYA	Praya	1		1	
35	50201402	SMP NEGERI 2 PRAYA	Praya	1		1	
36	50201412	SMPN 1 PRAYA	Praya	1		1	
37	50201424	SMP NEGERI 3 PRAYA	Praya	1		1	
38	50219611	SMP NEGERI 6 PRAYA	Praya	1		1	
39	50205169	SMP NEGERI 1 PRAYA BARAT	Praya Barat	1		1	
40	50219613	SMP NEGERI 4 PRAYA BARAT	Praya Barat	1		1	
41	50219615	SMP NEGERI 6 Satu Atap Praya Barat	Praya Barat	1		1	
42	50220239	SMPN SATU ATAP EMBOAN	Praya Barat	1		1	
43	69762790	SMPN 8 SATAP PRAYA BARAT	Praya Barat	1		1	
44	50201401	SMP NEGERI 2 PRAYA BARAT	Praya Barat	1		1	
45	50219612	SMP NEGERI 3 PRAYA BARAT	Praya Barat	1		1	
46	69816345	SMPN 10 PRAYA BARAT	Praya Barat	1		1	
47	69896882	SMP NEGERI 9 PRAYA BARAT	Praya Barat	1		1	
48	50219614	SMP NEGERI SATU ATAP 5 PRAYA BARAT	Praya Barat	1		1	
49	50201400	SMP NEGERI 2 PRAYA BARAT DAYA	Praya Barat Daya	1		1	
50	50201423	SMP NEGERI 3 PRAYA BARAT DAYA	Praya Barat Daya	1		1	
51	50205170	SMP NEGERI 1 PRAYA BARAT DAYA	Praya Barat Daya	1		1	
52	50219616	SMP NEGERI 4 PRAYA BARAT DAYA	Praya Barat Daya	1		1	
53	50220237	SMP NEGERI Satu Atap Kumbak	Praya Barat Daya	1		1	
54	69767765	SMP NEGERI 6 Satu Atap Praya Barat Daya	Praya Barat Daya	1		1	
55	69821213	SD-SMPN SATAP 7 PRAYA BARAT DAYA	Praya Barat Daya	1		1	



No	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenis Barang			
				Unit Interactive Flat Panel Merah Putih	Jumlah Harga/Unit	Leptop/Unit	Jumlah Harga
56	50201422	SMP NEGERI 3 PRAYA TENGAH	Praya Tengah	1		1	
57	50201414	SMP NEGERI 2 PRAYA TENGAH	Praya Tengah	1		1	
58	50219617	SMP NEGERI 4 PRAYA TENGAH	Praya Tengah	1		1	
59	50201411	SMPN 1 PRAYA TENGAH	Praya Tengah	1		1	
60	50201378	SMP Negeri 4 PRAYA TIMUR	Praya Timur	1		1	
61	50201410	SMP NEGERI 1 PRAYA TIMUR	Praya Timur	1		1	
62	50201415	SMP NEGERI 2 PRAYA TIMUR	Praya Timur	1		1	
63	50205176	SMP NEGERI 6 PRAYA TIMUR	Praya Timur	1		1	
64	50220238	SMP NEGERI SATU ATAP BATURINTANG	Praya Timur	1		1	
65	50201421	SMP NEGERI 3 PRAYA TIMUR	Praya Timur	1		1	
66	50219618	SD-SMP NEGERI SATU ATAP 7 PRAYA TIMUR	Praya Timur	1		1	
67	50219619	SMP NEGERI SATU ATAP 8 PRAYA TIMUR	Praya Timur	1		1	
68	50222385	SMP NEGERI 10 Satu Atap Praya Timur	Praya Timur	1		1	
69	50205175	SMP NEGERI 5 PRAYA TIMUR	Praya Timur	1		1	
70	50201409	SMP NEGERI 1 PRINGGARATA	Pringgarata	1		1	
71	50201420	SMP NEGERI 3 PRINGGARATA	Pringgarata	1		1	
72	50201416	SMP NEGERI 2 PRINGGARATA	Pringgarata	1		1	
73	50222366	SMPN 4 PRINGGARATA SATAP REPUK TUNJANG	Pringgarata	1		1	
74	50201374	SMP NEGERI 5 PUJUT	Pujut	1		1	
75	50201408	SMP NEGERI 1 PUJUT	Pujut	1		1	
76	50201419	SMP NEGERI 3 PUJUT	Pujut	1		1	
77	50205172	SMP NEGERI 9 SATU ATAP PUJUT	Pujut	1		1	
78	50205177	SMP NEGERI 7 PUJUT	Pujut	1		1	
79	50205178	SMP NEGERI 8 PUJUT	Pujut	1		1	
80	69786355	SMP NEGERI 12 Satu Atap Pujut	Pujut	1		1	
81	50201373	SMPN 6 PUJUT	Pujut	1		1	
82	50205174	SMP NEGERI 4 PUJUT	Pujut	1		1	
83	50220463	SMPN 10 PUJUT	Pujut	1		1	
84	69759254	SMP NEGERI 13 Satu Atap Pujut	Pujut	1		1	
85	69812065	SMPN 11 PUJUT	Pujut	1		1	
86	69896877	SMP NEGERI 15 PUJUT	Pujut	1		1	
87	50201430	SMP NEGERI 2 PUJUT	Pujut	1		1	
88	69761727	SMP NEGERI Satu Atap Bangkang	Pujut	1		1	
C. JUMLAH JENJANG SMP				88	0	88	0
JUMLAH A+B+C				665	0	665	0

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 setelah penyusutan	PENAMBAHAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN					PENGURANGAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN							SALDO PER 31 DESEMBER 2025 sebelum penyusutan	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sd Th 2025	SALDO PER 31 DESEMBER 2024		
			Belanja Modal	Mutasi antar OPD	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap / Belanja Modal	Aset Tetap yang di Hibahkan ke Masyarakat / Pihak Ke III dan Instansi Lain (Aset yang di	Aset Tetap yang di serahkan ke Masyarakat (Aset Tetap yang di peroleh pada tahun berkenaan "N")	Ekstracontebel (Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Batas Nilai Kapitalisasi Aset Tetap)	Belanja Modal yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap (Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa / Habis Pakai)	Mutasi antar OPD	Aset Tetap yang sudah di Catat pada Tahun Sebelumnya (yang dibayar kepada Pihak Ke III pada Tahun Berkenaan)	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	Reklasifikasi (ke Aset Lainnya)				Koreksi Kesalahan Tahun sebelumnya / Nomerasi Sistem E-BMD	Kurang Volume
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.457.185.040,22	29.145.475.809,00					1.177.019.000,00	1.593.626.940,00	50.000.000,00		313.527.000,00	117.929.000,00				253.635.324.910,59	199.178.139.870,37	227.741.951.041,59
2	Dinas Kesehatan	54.556.248.258,62	20.259.970.854,00		730.185.591,51				225.549.252,00	6.690.000,00			205.897.000,00		0,99		206.652.270.331,05	152.096.022.072,43	186.100.250.138,53
3	Rumah Sakit Umum Daerah	45.465.108.856,98	17.804.192.341,00		156.000.000,00				13.191.359,00				76.295.295,00	41.612.546,00			204.933.978.571,64	159.468.869.714,66	187.104.885.430,64
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.439.073.896,90	578.622.533,00	461.500.000,00	671.200.075,64				9.570.811,50								23.028.970.921,56	19.589.897.024,66	21.327.219.124,42
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.277.657.722,60	391.696.400,00														8.437.002.695,71	7.159.344.973,11	8.045.306.295,71
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	570.316.582,93	506.491.500,00														2.047.395.261,98	1.477.078.679,05	1.540.903.761,98
7	Satuan Polisi Pamong Praja	410.215.444,68	206.728.000,00														4.929.162.790,03	4.518.947.345,35	4.722.434.790,03
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.015.821.191,83	931.448.400,00														5.250.071.625,50	4.234.250.433,67	4.318.623.225,50
9	Dinas Sosial	378.395.826,15	309.030.235,00														2.533.890.200,68	2.155.494.374,53	2.224.859.965,68
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	632.438.306,30	312.110.000,00														3.721.387.034,64	3.088.948.728,34	3.409.277.034,64
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.284.251.605,28	581.509.996,00							1.410.000,00							9.863.814.946,19	7.579.563.340,91	9.283.714.950,19
12	Dinas Ketahanan Pangan	316.795.655,75	337.250.000,00														2.415.844.749,00	2.099.049.093,25	2.078.594.749,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	5.015.188.397,99	565.189.500,00						14.339.000,00	187.000.000,00	489.350.000,00				0,01		18.819.160.278,56	13.803.971.880,57	18.944.659.778,57
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	759.341.114,18	481.117.097,00				29.119.883,33										7.828.101.633,69	7.068.760.519,51	7.376.104.420,02
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	282.107.877,10	235.805.010,00							10.200.000,00							2.489.895.017,34	2.207.787.140,24	2.264.290.007,34
16	Dinas Perhubungan	2.974.768.656,36	534.569.087,00														14.922.310.378,07	11.947.541.721,71	14.387.741.291,07
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.256.822.614,08	951.515.000,00		13.875,000					57.600.000,00							6.830.523.090,43	5.573.700.476,35	5.922.733.090,43
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.545.209.474,11	87.623.650,00							8.400.000,00						4.232.000,00	4.600.289.538,93	3.055.080.064,82	4.525.297.888,93
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	601.555.574,87	141.525.000,00														3.510.014.754,49	2.908.459.179,62	3.368.489.754,49
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	397.748.444,76	393.043.800,00						4.148.000,00								1.758.953.906,48	1.361.205.461,72	1.370.058.106,48
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	337.657.683,38	333.743.000,00						1.485.000,00				8.600.000,00				2.885.664.200,00	2.548.006.516,62	2.562.006.200,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	332.047.579,69	182.994.050,00				17.000.000,00										7.612.984.977,00	7.280.937.397,31	7.446.990.927,00
23	Dinas Pariwisata	232.212.418,91	108.630.000,00														3.006.775.863,00	2.774.563.444,09	2.898.145.863,00
24	Dinas Pertanian	606.038.454,10	158.600.000,00														16.080.489.457,94	15.474.451.003,84	15.921.889.457,94
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.832.591.792,60	822.702.500,00		309.000.000,00				37.775.000,00		199.425.000,00						11.742.605.712,54	7.910.013.919,94	10.848.103.212,54
26	PPKD	-															-	-	-
27	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-															-	-	-
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-															-	-	-
29	Sekretariat Daerah	7.236.605.562,76	5.448.396.210,00	630.486.750,00	639.679.950,00		351.928.073,00			80.741.000,00							28.851.038.304,17	21.614.432.741,41	22.565.144.467,17
30	Sekretariat DPRD	1.736.960.120,99	1.150.999.500,00						20.750.000,00								10.330.631.980,44	8.593.671.859,45	9.200.382.480,44
31	Kantor Camat Praya	2.303.224.790,07	708.726.070,00						14.609.000,00	3.706.500,00			17.200.000,00				6.969.853.723,94	4.666.628.933,87	6.296.643.153,94
32	Kantor Camat Praya Tengah	860.097.620,79	280.985.450,00				148.000.000,00		7.725.000,00								2.988.874.198,00	2.128.776.577,21	2.863.613.748,00
33	Kantor Camat Praya Barat	266.951.685,45	88.088.000,00														878.764.546,00	611.812.880,55	790.676.546,00
34	Kantor Camat Praya Barat Daya	48.719.700,33	39.387.000,00														1.048.056.165,01	999.336.454,68	1.008.669.165,01
35	Kantor Camat Praya Timur	246.845.037,14	81.455.000,00														1.154.368.478,00	907.523.440,86	1.072.913.478,00
36	Kantor Camat Pujut	177.103.887,96	75.739.999,00				148.000.000,00										1.524.234.184,00	1.347.130.296,04	1.596.494.185,00
37	Kantor Camat Janapria	96.445.100,01	72.396.000,00														1.087.653.770,00	991.208.669,99	1.015.257.770,00
38	Kantor Camat Kopang	249.284.079,31	50.959.500,00			9.451.400											1.298.960.675,00	1.049.676.595,69	1.238.549.775,00
39	Kantor Camat Batukliang	320.721.470,70	89.095.000,00														1.179.244.015,00	858.522.544,30	1.090.149.015,00
40	Kantor Camat Batukliang Utara	358.316.320,34	131.695.000,00				148.000.000,00										1.111.693.930,00	753.377.609,66	1.127.998.930,00
41	Kantor Camat Pringgatan	262.545.061,93	122.818.000,00				148.000.000,00		3.008.000,00								886.146.615,00	623.601.553,07	914.336.615,00
42	Kantor Camat Jonggat	287.190.794,99	69.450.000,00														1.114.804.331,00	827.613.536,01	1.045.354.331,00
43	Inspektorat	3.991.948.366,37	3.723.922.953,00			100.920.000											8.058.523.722,75	4.066.575.356,38	8.233.680.769,75
44	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	783.623.427,32	446.042.300,00						89.910.000,00	26.800.000,00							6.338.569.002,17	5.554.945.574,85	6.009.236.702,17
45	Badan Pendapatan Daerah	2.539.664.969,61	2.212.631.768,00		12.000.000						119.113.641,68						8.389.236.930,55	5.849.571.960,94	6.283.718.804,23
46	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.920.757.745,26	1.836.376.029,00	119.113.641,68						77.500.000,00	403.211.750,00						7.826.536.444,00	4.905.778.698,74	6.351.758.523,32
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.496.772.249,52	588.277.310,00						6.806.520,00								5.442.774.432,00	3.946.002.182,48	4.861.303.642,00



		PENAMBAHAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN										PENGURANGAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN									
No	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 setelah penyusutan	Belanja Modal	Mutasi antar OPD	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap / Belanja Modal	Aset Tetap yang di Hibahkan ke Masyarakat / Pihak Ke III dan Instansi Lain (Aset yang di vans)	Aset Tetap yang di serahkan ke Masyarakat (Aset Tetap yang di peroleh pada tahun berkenaan "N")	Ekstracombetel (Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Batas Nilai Kapitalisasi Aset Tetap)	Belanja Modal yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap (Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa / Habis Pakai)	Mutasi antar OPD	Aset Tetap yang sudah di Catat pada Tahun Sebelumnya (yang dibayar kepada Pihak Ke III pada Tahun Berkeanaa)	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	Reklasifikasi (ke Aset Lainnya)	Koreksi kesalahan Tahun sebelumnya / Nomerasi Sistem E-RMD	Kurang Volume	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 sebelum penyusutan	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sd Th 2025	SALDO PER 31 DESEMBER 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
48	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.453.448.625,25	1.656.954.250,00							10.830.000,00							14.385.712.083,50	10.932.263.458,25	12.739.587.833,50		
	Jumlah	212.614.025.086,47	95.235.979.101,00	1.211.100.391,68	2.531.940.617,15	110.371.400,00	990.047.956,33	1.177.019.000,00	2.042.493.882,50	520.877.500,00	1.211.100.391,68	313.527.000,00	425.921.295,00	41.612.546,00	1,00	4.232.000,00	940.402.560.377,57	727.788.535.291,10	848.040.000.440,25		



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
REKAPITULASI PROGRAM REVITALISASI SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenjang	NPSN	Satuan Pendidikan	Nomor PKS	Tanggal PKS	Pagu Anggaran	No BAST	Tanggal BAST
1	SMP	50205169	SMP Negeri 1 Praya Barat	50205169/0115/PPK/KU-SMP/2025	12 Juli 2025	5.091.000.000,00	421.3/193/LKPP/H.05/2025	15-Dec-25
2	SMP	50201419	SMP NEGERI 3 PUJUT	50201419/0115/PPK/KU-SMP/2025	12 Juli 2025	4.143.000.000,00	425.11/193/BAST/H.04/2025	24-Nov-25
3	SMP	69812065	SMP Negeri 11 PUJUT	69812065/0115/PPK/KU-SMP/2025	12 Juli 2025	2.572.000.000,00	421.3/025/H.05/SMPN11PJT/2025	24-Nov-26
4	SMP	50201404	SMP Negeri 2 Jonggat					
5	SMP	520201414	SMP NEGERI 2 PRAYA TENGAH					
6	SMP	69762790	SMPN 8 SATAP PRAYA BARAT	69762790/0134/PPK/KU-SMP/2025	22 Agustus 2025	1.570.246.000,00		
		JUMLAH				13.376.246.000,00		
7	PAUD	69772865	TK NEGERI 1 KOPANG	025/BRPAUD/2025	01 Juli 2025	1.039.370.000,00		
		JUMLAH				1.039.370.000,00		
8	SD	50201971	SD NEGERI 1 PENUJAK	24060.15/C3.2/BP2.02/IX/PKS/2025	01 September 2025	987.256.946,00	421.2/24/G.05/2025	15 DESEMBER 2025
9	SD	50.201.966	SD NEGERI 1 PRINGGARATA	25799.1/C3.2/BP2.02/IX/PKS/2025	15 September 2025	788.144.391,00	421.2/70/G.08/2025	31 Desember 2025
10	SD	50.201.916	SD NEGERI 1 TENGARI	18272.21/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	17 Juli 2025	538.852.768,00	421.2/67/SD.45/2025	15 DESEMBER 2025
11	SD	50.201.915	SD NEGERI 1 TERUWAI	18272.20/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	22 Agustus 2025	790.355.635,00	BAST/SUBB-000707/BAST_2512	4 des 2025
12	SD	50.201.871	SD N 1 BATU BEDUK	24060.13/C3.2/BP2.02/IX/PKS/2025	01 September 2025	985.151.125,00	421.2/48/G05/2025	29 Desember 2025
13	SD	50.201.867	SD NEGERI 1 JURANG JALER	19473.1/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	28 juli 2025	841.954.856,00	421.2/179/SD.02/2025	26 des 2026
14	SD	50.201.856	SD NEGERI 1 JANGKIH JAWA	18272.18/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	17 Juli 2025	1.235.033.770,00	421.2/022/G.05/2025	27 des 2025
15	SD	50.201.853	SD NEGERI PANDAN TINGGANG	18272.17/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	17 Juli 2025	1.310.844.690,00	23/421.2/SDPT/2025	29 Desember 2025
16	SD	50.201.851	SD NEGERI 1 BATUNYALA	25723.3/C3.2/BP2.02/IX/PKS/2025	15 September 2025	742.957.237,00	421. 28 /SD.01/2025	29 Desember 2025
17	SD	50.201.850	SD NEGERI 1 BELEKA	24810.4/C3.2/BP2.02/IX/PKS/2025	08 September 2025	994.066.621,00	421.2/35/RVD/SD.04/DIKDAS/2025	22 des 2025
18	SD	50.201.565	SD NEGERI PETIKUS	24060.12/C3.2/BP2.02/IX/PKS/2025	17 September 2025	909.253.694,00	421.2/53/G.12/2025	2 Januari 2026
19	SD	50.201.546	SD NEGERI PENANDAK	42.1/07/SD.46/VIII/2025	25 agustus 2025	990.603.939,00	421.1/11/SD.46/XII/2025	15 Desember 2026
20	SD	50.201.543	SD NEGERI PENGENGAT	18272.16/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	18 Juli 2025	1.297.748.821,00		
21	SD	50.201.518	SD NEGERI SAPE	18272.15/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	17 Juli 2025	804.687.709,00	60/421.2/SD/XII/2025	25 desember 2025
22	SD	50.201.516	SD NEGERI SANGGENG	24810.2/C3.2/BP2.02/IX/PKS/2025	8 September 2025	983.638.798,00	420/12/SD.69/2025	25 desember 2025
23	SD	50.201.510	SD NEGERI REPOK PUYUNG	18272.14/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	17 Juli 2025	960.584.474,00	Nomor: 421.2/077/SD.30/2025	
24	SD	50.201.509	SD NEGERI REPOK SINTUNG	18272.13/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	18 Juli 2025	1.222.517.908,00	421.2/30/SD.29/2025	31 des 2025
25	SD	50.201.505	SD NEGERI SADE	18272.12/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	17 Juli 2025	1.011.035.114,00	421.2/26//SD.39/2025	
26	SD	50.201.502	SD N 1 SANGGENG	18272.11/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	17 Juli 2025	1.251.038.239,00	421.2/14/SD.09/2025	27-Desember-2025
27	SD	50.201.498	SD NEGERI MAKAM	24060.11/C3.2/BP2.02/IX/PKS/2025	1 september 2025	836.262.445,00	421.2/42/SD-57/2026	
28	SD	50.201.496	SD NEGERI MAS MAS	23991/C3.2/BP2.02/IX/SK/2025	01 September 2025	901.247.879,00	421.2/06/G12/2026	05-Jan-25
29	SD	50.201.495	SD NEGERI MASJURING	23991/C3.2/BP2.02/IX/SK/2025	01 September 2025	837.602.122,00	421.2/192/G.05/XII/SD/2025	24 des 2025
30	SD	50.201.464	SD NEGERI OTAK DESA	18272.10/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	17 Juli 2025	1.069.071.639,00		
31	SD	50.201.443	SD NEGERI MONTONG BUAH	24810.1/C3.2/BP2.02/IX/PKS/2025	08 September 2025	838.282.530,00	421.1.2/019/SD/2025	27 des 2025

No	Jenjang	NPSN	Satuan Pendidikan	Nomor PKS	Tanggal PKS	Pagu Anggaran	No BAST	Tanggal BAST
32	SD	50.201.435	SD NEGERI MUNCAN	18272.9/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	17 Juli 2025	1.410.808.194,00	421.2/45/SD.04/XIII/2025	25 des 2025
33	SD	50.201.433	SD NEGERI PEMOTOH BARAT	25723.2/C3.2/BP2.02/IX/SPK/2025	15 September 2025	791.925.545,00	421.2/19/SD-17/BKU/2025	31 DESEMBER 2025
34	SD	50.201.352	SD NEGERI TAMPAR AMPAR	18272.8/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	17 Juli 2025	1.943.846.005,00	421.2/4/SD.34/2025	20-Jan-25
35	SD	50.201.346	SD NEGERI SENURUS	24060.8/C3.2/BP2.02/IX/SPK/2025	01 September 2025	970.319.978,00	421.2/92/SD.24/BKU/2025	30 Desember 2025
36	SD	50.201.327	SD NEGERI TUDUH	18272.7/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	17 Juli 2025	1.191.289.312,00	026/421.2/SD-TDH/2025	27 des 2025
37	SD	50.201.166	SD NEGERI 3 PRAYA	24060.7/C3.2/RP2.02/IX/SPK/2025	01 September 2025	979.769.306,00	04/P2SP SDN 3 Praya/2026	31-Jan-25
38	SD	50.201.147	SD NEGERI 22 PRAYA	24060.6/C3.2/BP2.02/IX/SPK/2025	01 September 2025	574.852.905,00		
39	SD	50.201.144	SD NEGERI 5 PRAYA	24060.5/C3.2/BP2.02/IX/SPK/2025	1 september 2025	895.820.033,00	421.2/145/SD.17/2025	29 Desember 2025
40	SD	50.201.143	SD NEGERI 5 SENGKOL	18272.6/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	18 Juli 2025	745.909.148,00	BAST/SUBB-0007/BAST/_2512_1	30/11/2025
41	SD	50.201.129	SD NEGERI 2 MARONG	18272.5/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	18 Juli 2025	1.328.875.311,00		
42	SD	50.201.120	SD NEGERI KELAMBI	25723.1/C3.2/BP2.02/IX/SPK/2025	17 September 2025	793.523.015,00	421.2/28/G.11/2025	
43	SD	50.201.099	SD NEGERI 2 KAWO	18272.4/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	17 Juli 2025	1.185.924.324,00	421.2/65/SD.14/2025	15 des 2025
44	SD	50.201.097	SD NEGERI 2 KETARA	27503.1/C3.2/BP2.02/IX/SPK/2025	26 September 2025	758.116.239,00	421.2/16/SD.19/2025	
45	SD	50.201.066	SD NEGERI 2 PRAYA	24060.4/C3.2/BP2.02/IX/SPK/2025	1 september 2025	870.948.496,00	421.2/27/SD.03/2025	28 Desember 2025
46	SD	50.201.056	SD NEGERI 2 SEMAYAN	18272.3/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	17 Juli 2025	1.339.968.554,00	421.2/55/SD.55/2025	16 des 2025
47	SD	50.201.053	SD NEGERI EMBOAN	24060.3/C3.2/BP2.02/IX/SPK/2025	1 september 2025	749.746.987,00	BAST-Revit/SD/019	9 okt 2025
48	SD	50.201.025	SD NEGERI GELOGOR	23991/C3.2/BP2.02/IX/SPK/2025	1 september 2025	885.075.970,00	421.2/63/BKU/2025	25 Desember 2025
49	SD	50.201.003	SD NEGERI KELONGKONG	18272.2/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	17 Juli 2025	1.206.655.066,00		
50	SD	50.200.986	SD NEGERI KELING	24060.1/C3.2/BP2.02/IX/SPK/2025	1 september 2025	935.257.664,00	02/LP/KLG/Rev/2025	30 Desember 2025
51	SD	50.200.972	SD NEGERI BILEBANTE	18272.1/C3.2/BP2.01/VII/SPK/2025	17 Juli 2025	1.038.423.044,00	421/24/SD.06/2025	31-DESEMBER-2025
		JUMLAH				43.725.248.446,00		
		JUMLAH				58.140.864.446,00		

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 setelah penyusutan	PENAMBAHAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN					PENGURANGAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN								SALDO PER 31 DESEMBER 2025 sebelum penyusutan	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sd Th 2025	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			Belanja Modal	Mutasi antar OPD	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap / Belanja Modal	Aset Tetap yang di Peroleh dari Hibah	Penghapusan Aset Tetap (Pelanggaran / Penghapusan)	Aset Tetap yang di serahkan ke Masyarakat (Aset Tetap yang di peroleh pada tahun berkenaan "N")	Ekstracomtebel (Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Batas Nilai Kapitalisasi Aset Tetap)	Mutasi antar OPD	Aset Tetap yang sudah di Catat pada Tahun Sebelumnya (yang dibayar kepada Pihak Ke III pada Tahun Berkenaan)	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	Koreksi kesalahan Tahun sebelumnya / Nomerasi Sistem E-BMD	Kekurangan Volume			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	493.470.224.636,59	58.659.437.650,00	1.525.466.108,61	35.900.000,00					35.900.000,00		8.060.255.650,00		35.300.000,00	82.276.000,00	684.696.879.688,47	191.226.655.051,88	632.689.807.579,86
2	Dinas Kesehatan	251.412.387.045,46	34.661.714.000,00		270.507.000,00	8.000.000,00		2.558.119.128,00		355.101.000,00	1.298.879.908,61		754.281.372,51	3.480.000,00	92.139.000,00	284.211.208.991,62	32.798.821.946,16	254.332.988.400,74
3	Rumah Sakit Umum Daerah	154.532.359.289,32	5.911.885.095,46		360.424.032,02										32.428.000,00	182.418.355.749,60	27.885.996.460,28	176.178.474.622,12
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	418.972.039.946,88	34.497.575.750,00	1.860.883.000,00					948.451.000,00		25.000.000,00		1.016.880.475,26	0,17	123.827.000,00	473.451.291.447,16	54.479.251.500,28	439.206.991.172,59
5	Dinas Penunahan dan Kawasan Pemukiman	59.317.517.760,14	1.057.860.000,00													64.624.779.516,00	5.307.261.755,86	63.566.919.516,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	95.586.083,00														99.742.000,00	4.155.917,00	99.742.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.140.269.035,80														2.649.513.710,00	509.244.674,20	2.649.513.710,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.876.941.797,00	-													6.649.906.900,00	772.965.103,00	6.649.906.900,00
9	Dinas Sosial	2.097.057.807,80	148.698.120,00													2.660.673.070,00	563.615.262,20	2.511.974.950,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.312.745.628,08	168.039.000,00													4.212.316.833,76	899.571.205,68	4.044.277.833,76
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.217.565.850,74	221.807.000,00													5.134.393.500,00	916.827.649,26	4.912.586.500,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	2.621.393.688,34	174.685.000,00													3.382.047.000,00	760.653.311,66	3.212.297.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	4.788.998.209,40	-							9.935.000,00						6.321.346.780,00	1.552.348.570,60	6.321.346.780,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.607.395.093,84	78.043.000,00							3.902.150,00						2.179.702.550,00	572.307.456,16	2.105.561.700,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.130.535.106,67	44.572.600,00							7.587.000,00						2.711.925.100,01	581.389.993,34	2.674.939.500,01
16	Dinas Perhubungan	3.666.435.850,45												0,04		4.617.996.507,23	951.560.656,78	4.617.996.507,23
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	856.680.179,00	13.875.000,00							1.108.819.250,00			13875000			252.139.071,00	1.108.819.250,00	
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4.920.372.570,00	-													5.230.028.000,00	309.655.430,00	5.230.028.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.723.096.440,60	508.257.288,00													3.503.125.138,00	780.028.697,40	2.994.867.850,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.796.915.776,77	1.190.789.000,00												5.718.000,00	16.495.345.652,17	1.698.429.875,40	15.310.274.852,17
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	2.850.824.889,77	689.568.000,00		8.600.000,00					8.600.000,00						3.186.620.454,00	335.795.564,23	2.497.052.454,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.500.641.204,96														20.788.288.502,00	5.287.647.297,04	20.788.288.502,00
23	Dinas Pariwisata	19.429.258.785,70	216.694.000,00	25.000.000,00												22.632.118.658,80	3.202.859.873,10	22.390.424.658,80
24	Dinas Pertanian	14.806.358.263,43	1.106.965.000,00		74.610.000,00	24.950.000					146.636.200,00					19.381.487.781,00	4.575.129.517,57	18.321.598.981,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	191.651.163.035,68	1.843.107.742,00				124.791.815.530				79.950.000,00		392.365.000,00			213.089.686.543,59	21.438.523.507,91	86.927.078.271,59
26	PPKD	-														-	-	-
27	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-														-	-	-
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-														-	-	-
29	Sekretariat Daerah	8.729.214.451,73	-					488.324.383,55								12.883.694.836,45	4.154.480.384,72	13.372.019.220,00
30	Sekretariat DPRD	3.098.919.300,88	1.860.883.000,00								1.860.883.000,00					3.862.769.956,00	763.850.655,12	3.862.769.956,00
31	Kantor Camat Praya	4.945.163.621,27	826.791.959,80	17.200.000,00						26.325.543,00						5.573.777.980,68	628.614.359,41	4.756.111.563,88
32	Kantor Camat Praya Tengah	2.204.074.967,00	341.176.400,00													2.535.963.310,00	331.888.343,00	2.194.786.910,00
33	Kantor Camat Praya Barat	594.195.271,00	-													923.943.600,00	329.748.329,00	923.943.600,00
34	Kantor Camat Praya Barat Daya	871.268.162,93	348.423.132,00													1.033.122.132,00	161.853.969,07	684.699.000,00
35	Kantor Camat Praya Timur	782.501.693,63	203.761.212,34													1.125.346.022,34	342.844.328,71	921.584.810,00
36	Kantor Camat Pujut	404.100.293,38	99.170.174,00													565.247.874,00	161.147.580,62	466.077.700,00
37	Kantor Camat Janapria	901.023.255,01	133.700.000,00													1.390.873.000,00	489.849.744,99	1.257.173.000,00
38	Kantor Camat Kopang	704.966.046,00														849.260.000,00	144.293.954,00	849.260.000,00
39	Kantor Camat Batukliang	519.380.127,00														1.331.330.600,00	811.950.473,00	1.331.330.600,00
40	Kantor Camat Batukliang Utara	669.540.764,99	118.057.000,00													949.395.500,00	279.854.735,01	831.338.500,00
41	Kantor Camat Pringgara	1.165.466.664,97	124.000.000,00													1.820.318.500,00	654.851.835,03	1.696.318.500,00
42	Kantor Camat Jonggat	448.106.477,33														534.636.000,00	86.529.522,67	534.636.000,00
43	Inspektorat	-														-	-	-



No	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 setelah penyusutan	PENAMBAHAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN					PENGURANGAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN							SALDO PER 31 DESEMBER 2025 sebelum penyusutan	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sd Th 2025	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
			Belanja Modal	Mutasi antar OPD	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap / Belanja Modal	Aset Tetap yang di Peroleh dari Hibah	Penghapusan Aset Tetap (Pelanggaran / Penghapusan)	Aset Tetap yang di serahkan ke Masyarakat (Aset Tetap yang di peroleh pada tahun berkenaan "N")	Ekstracomtebel (Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Batas Nilai Kapitalisasi Aset Tetap)	Mutasi antar OPD	Aset Tetap yang sudah di Catat pada Tahun Sebelumnya (yang dibayar kepada Pihak Ke III pada Tahun Berkenaan)	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	Koreksi kesalahan Tahun sebelumnya / Nomerasi Sistem E-BMD				Kekurangan Volume
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	130.017.937,00														163.000.000,00	32.982.063,00	163.000.000,00
45	Badan Pendapatan Daerah	2.042.689.361,48	407.900.000,00										12.000.000,00			3.428.548.378,00	1.385.859.016,52	3.032.648.378,00
46	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.715.714.285,51					330.362.000									9.373.249.750,00	3.657.535.464,49	9.042.887.750,00
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-													-	-	-
48	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	859.691.773,00														989.489.000,00	129.797.227,00	989.489.000,00
	Jumlah	1.712.560.798.429,53	145.657.436.123,60	3.411.349.108,61	767.241.032,02	32.950.000,00	125.122.177.530,00	3.046.443.511,55	948.451.000,00	447.350.693,00	3.411.349.108,61	8.060.255.650,00	2.189.401.847,77	38.780.000,21	336.388.000,00	2.084.771.565.762,88	372.210.767.333,35	1.828.258.831.779,79



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR MUTASI ASET TETAP JALAN, JARINGAN IRIGASI DAN JEMBATAN
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	PENAMBAHAN ASET TETAP JALAN JARINGAN DAN JEMBATAN									SALDO PER 31 DESEMBER 2025 sebelum penyusutan	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan, Irigasi dan Jembatan sd Th 2025	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			Belanja Modal	Appraisal / Penilaian	Aset Tetap yang di peroleh dari Utang kepada Pihak Ketiga	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap / Belanja Modal	Aset Tetap yang di Peroleh dari Hibah	Belanja Modal yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap (Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa / Habis Pakai)	Kekurangan Volume Pekerjaan	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	321.902.573,22										452.566.500,00	130.663.926,78	452.566.500,00
2	Dinas Kesehatan	23.007.563.078,26	7.010.464.559,00			183.836.150,00				11.964.000,00		27.757.033.967,93	4.749.470.889,67	20.574.697.258,93
3	Rumah Sakit Umum Daerah	9.987.699.325,25	5.735.077.856,00		291.550.000,00	76.295.295,00			1.255.000.000,00	44.147.000,00	516.424.032,02	12.800.559.981,98	2.812.860.656,73	8.513.207.863,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	787.509.886.499,26	71.189.037.405,00	28.251.000.000,00	410.218.500,00	7.557.232.008,62				456.573.000,00	4.244.813.000,00	2.300.575.800.289,35	1.513.065.913.790,09	2.197.869.698.375,73
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	17.806.392.191,57	2.373.471.400,00				24.916.000,00	329.044.034,00				29.291.483.107,50	11.485.090.915,93	26.564.051.673,50
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-										-	-	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1.352.604,00										1.750.000,00	397.396,00	1.750.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	449.387.700,33	-									537.010.000,00	87.622.299,67	537.010.000,00
9	Dinas Sosial	40.318.039,00	-									59.913.500,00	19.595.461,00	59.913.500,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	798.626.245,50	-									1.096.163.820,00	297.537.574,50	1.096.163.820,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28.853.985,83										45.208.750,00	16.354.764,17	45.208.750,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	18.414.900,00						18.414.900,00			-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	263.176.916,00	25.290.000,00									492.608.000,00	229.431.084,00	467.318.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	116.543.013,88	6.805.000,00									159.998.629,00	43.455.615,12	153.193.629,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	47.121.140,67	-									16.628.632.400,00	16.581.511.259,33	16.628.632.400,00
16	Dinas Perhubungan	12.469.935.668,33	608.529.984,00									22.711.756.864,00	10.241.821.195,67	22.103.226.880,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.614.583,00										5.000.000,00	2.385.417,00	5.000.000,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3.444.448,33	-									8.000.000,00	4.555.551,67	8.000.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	111.985.762,33	-									137.701.000,00	25.715.237,67	137.701.000,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	34.389.146,00										41.970.000,00	7.580.854,00	41.970.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-										-	-	-
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.759.543.820,27										3.091.165.649,85	1.331.621.829,58	3.091.165.649,85
23	Dinas Pariwisata	2.922.717.992,18										5.773.389.105,01	2.850.671.112,83	5.773.389.105,01
24	Dinas Pertanian	18.384.318.328,07	224.310.000,00								74.610.000,00	50.162.221.761,00	31.777.903.432,93	50.012.521.761,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.388.208.532,09	2.165.777.704,00			83.365.000,00				34.514.000,00		3.061.093.704,00	672.885.171,91	846.465.000,00
26	PPKD	-										-	-	-
27	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-										-	-	-



No	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	PENAMBAHAN ASET TETAP JALAN JARINGAN DAN JEMBATAN					ENGURANGAN ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN JEMBATAN				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 sebelum penyusutan	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan, Irigasi dan Jembatan sd Th 2025	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			Belanja Modal	Appraisal / Penilaian	Aset Tetap yang di peroleh dari Utang kepada Pihak Ketiga	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap / Belanja Modal	Aset Tetap yang di Peroleh dari Hibah	Belanja Modal yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap (Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa / Habis Pakai)	Kekurangan Volume Pekerjaan	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-										-	-	-
29	Sekretariat Daerah	575.981.807,67	-									1.073.146.310,00	497.164.502,33	1.073.146.310,00
30	Sekretariat DPRD	266.196.091,00										410.513.000,00	144.316.909,00	410.513.000,00
31	Kantor Camat Praya	26.919.524,83										29.661.300,00	2.741.775,17	29.661.300,00
32	Kantor Camat Praya Tengah	42.847.199,25										59.665.950,00	16.818.750,75	59.665.950,00
33	Kantor Camat Praya Barat	3.938.154,50	-									7.187.500,00	3.249.345,50	7.187.500,00
34	Kantor Camat Praya Barat Daya	4.656.898,50										7.187.500,00	2.530.601,50	7.187.500,00
35	Kantor Camat Praya Timur	6.300.648,50										10.187.500,00	3.886.851,50	10.187.500,00
36	Kantor Camat Pujut	5.343.617,17	-									9.131.500,00	3.787.882,83	9.131.500,00
37	Kantor Camat Janapria	9.192.314,50	-									14.187.500,00	4.995.185,50	14.187.500,00
38	Kantor Camat Kopang	3.219.398,50										7.187.500,00	3.968.101,50	7.187.500,00
39	Kantor Camat Batukliang	1.479.162,67										9.687.500,00	8.208.337,33	9.687.500,00
40	Kantor Camat Batukliang Utara	4.611.976,50										7.187.500,00	2.575.523,50	7.187.500,00
41	Kantor Camat Pringgarata	12.408.128,50										17.581.550,00	5.173.421,50	17.581.550,00
42	Kantor Camat Jonggat	6.381.898,50										10.187.500,00	3.805.601,50	10.187.500,00
43	Inspektorat	-										-	-	-
44	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	-										-	-	-
45	Badan Pendapatan Daerah	172.955.063,00	-									284.666.000,00	111.710.937,00	284.666.000,00
46	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-										-	-	-
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-									-	-	-
48	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	159.900.943,40	3.445.750,00									208.945.750,00	49.044.806,60	205.500.000,00
	Jumlah	879.758.314.420,36	89.360.624.558,00	28.251.000.000,00	701.768.500,00	7.900.728.453,62	24.916.000,00	329.044.034,00	1.273.414.900,00	547.198.000,00	4.835.847.032,02	2.477.057.338.389,62	1.597.299.023.969,26	2.357.145.716.776,02

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR MUTASI ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	PENAMBAHAN ASET TETAP LAINNYA		PENGURANGAN ASET TETAP LAINNYA		SALDO PER 31 DESEMBER 2025 sebelum penyusutan	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sd Th 2025	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			Belanja Modal	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	Ekstracomtebel (Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Batas Nilai Kapitalisasi Aset Tetap)	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	93.177.914.242,19	12.586.226.002,00	82.029.000,00	9.595.268.287,00		93.177.914.242,19	-	90.104.927.527,19
2	Dinas Kesehatan	79.000.000,00	224.350.369,00			224.350.369,00	79.000.000,00	-	79.000.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	723.276.000,00					723.276.000,00	-	723.276.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.687.500,00					42.687.500,00	-	42.687.500,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	126.950.000,00					126.950.000,00	-	126.950.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	230.000,00					230.000,00	-	230.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-					-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-					-	-	-
9	Dinas Sosial	9.037.600,00					9.037.600,00	-	9.037.600,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-					-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-					-	-	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-					-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	354.877.100,00					354.877.100,00	-	354.877.100,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75.000,00					75.000,00	-	75.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-					-	-	-
16	Dinas Perhubungan	-					-	-	-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-					-	-	-
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.670.000,00	-				1.670.000,00	-	1.670.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-					-	-	-
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22.500.000,00					22.500.000,00	-	22.500.000,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.502.607.987,00	179.355.000,00		179.355.000,00		2.502.607.987,00	-	2.502.607.987,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	250.000,00					250.000,00	-	250.000,00
23	Dinas Pariwisata	116.379.000,00					116.379.000,00	-	116.379.000,00
24	Dinas Pertanian	2.185.697.720,00					2.185.697.720,00	-	2.185.697.720,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.708.000,00					1.708.000,00	-	1.708.000,00
26	PPKD	-					-	-	-
27	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-					-	-	-
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-					-	-	-
29	Sekretariat Daerah	834.318.197,04	639.679.950,00			639.679.950,00	834.318.197,04	-	834.318.197,04
30	Sekretariat DPRD	120.907.608,00					120.907.608,00	-	120.907.608,00
31	Kantor Camat Praya	945.000,00					945.000,00	-	945.000,00
32	Kantor Camat Praya Tengah	-					-	-	-
33	Kantor Camat Praya Barat	-					-	-	-
34	Kantor Camat Praya Barat Daya	-					-	-	-



No	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	PENAMBAHAN ASET TETAP LAINNYA		PENGURANGAN ASET TETAP LAINNYA		SALDO PER 31 DESEMBER 2025 sebelum penyusutan	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sd Th 2025	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			Belanja Modal	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	Ekstracomtebel (Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Batas Nilai Kapitalisasi Aset Tetap)	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Kantor Camat Praya Timur	2.070.000,00					2.070.000,00	-	2.070.000,00
36	Kantor Camat Pujut	45.000,00					45.000,00	-	45.000,00
37	Kantor Camat Janapria	-					-	-	-
38	Kantor Camat Kopang	1.425.000,00					1.425.000,00	-	1.425.000,00
39	Kantor Camat Batukliang	6.609.596,00					6.609.596,00	-	6.609.596,00
40	Kantor Camat Batukliang Utara	-					-	-	-
41	Kantor Camat Pringgarata	1.875.000,00					1.875.000,00	-	1.875.000,00
42	Kantor Camat Jonggat	250.000,00					250.000,00	-	250.000,00
43	Inspektorat	940.000,00					940.000,00	-	940.000,00
44	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	14.910.000,00					14.910.000,00	-	14.910.000,00
45	Badan Pendapatan Daerah	-	-				-	-	-
46	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-					-	-	-
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-					-	-	-
48	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-					-	-	-
	Jumlah	100.329.155.550,23	13.629.611.321,00	82.029.000,00	9.774.623.287,00	864.030.319,00	100.329.155.550,23	-	97.256.168.835,23



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR MUTASI ASET TETAP KDP
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	PENAMBAHAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	PENGURANGAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 SEBELUM PENYUSUTAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap		
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-			-	
2	Dinas Kesehatan	-			-	
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-			-	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.155.951.000,00	4.244.813.000,00	7.211.551.609,00	4.155.951.000,00	7.528.505.993,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-			-	
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-			-	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-			-	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-			-	
9	Dinas Sosial	-			-	
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-			-	
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-			-	
12	Dinas Ketahanan Pangan	-			-	
13	Dinas Lingkungan Hidup	-			-	
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-			-	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-			-	
16	Dinas Perhubungan	-			-	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-			-	
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-			-	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-			-	
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-			-	
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-			-	
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	-			-	
23	Dinas Pariwisata	-			-	
24	Dinas Pertanian	-			-	
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-			-	
26	PPKD	-			-	
27	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-			-	

No	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	PENAMBAHAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	PENGURANGAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 SEBELUM PENYUSUTAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap		
1	2	3	4	5	6	7
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			-	
29	Sekretariat Daerah	-			-	
30	Sekretariat DPRD	-			-	
31	Kantor Camat Praya	-			-	
32	Kantor Camat Praya Tengah	-			-	
33	Kantor Camat Praya Barat	-			-	
34	Kantor Camat Praya Barat Daya	-			-	
35	Kantor Camat Praya Timur	-			-	
36	Kantor Camat Pujut	-			-	
37	Kantor Camat Janapria	-			-	
38	Kantor Camat Kopang	-			-	
39	Kantor Camat Batukliang	-			-	
40	Kantor Camat Batukliang Utara	-			-	
41	Kantor Camat Pringgarata	-			-	
42	Kantor Camat Jonggat	-			-	
43	Inspektorat	-			-	
44	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	-			-	
45	Badan Pendapatan Daerah	-			-	
46	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-			-	
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-			-	
48	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-			-	
	Jumlah	4.155.951.000,00	4.244.813.000,00	7.211.551.609,00	4.155.951.000,00	7.528.505.993,00



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR PROPERTI INVESTASI
PER 31 DESEMBER 2025

No	Uraian	Bentuk Kerjasama	Lokasi	Nilai Tahun 2025	Penambahan			Pengurangan		Nilai Tahun 2024
					Beban Penyusutan	Reklas Dari Aset Tetap	Reklas Dari Aset Lainnya/Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Reklas Ke Aset Tetap	Reklas Ke Aset Lainnya	
A	Properti Investasi Tanah			7.232.668.000,00		263.152.000,00	0,00	0,00	0,00	6.969.516.000,00
1	Tanah BBI Gerunung	Sewa	Praya	43.116.000,00						43.116.000,00
2	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage Hotel Tastura	KSP	Kuta Mandalika	5.000.000.000,00						5.000.000.000,00
3	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage Aerotel Mandalika (Wisma Mandalika)	KSP	Praya	170.000.000,00						170.000.000,00
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	KSP	Jln. H.A Salim No. 2	20.000.000,00						20.000.000,00
5	Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan (Komplek Pertokoan Orient)	KSP	Praya Jln, Jend sudirman	1.736.400.000,00						1.736.400.000,00
6	Tanah Eks. Pasar Kuta seluas 2.105 M2 untuk Tempat Pembangunan Restoran Lokasi di Jalan Raya Kuta Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah	BGS	Jalan Raya Kuta Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah	153.152.000,00		153.152.000,00				
7	Tanah seluas 9.45 M2 untuk Tempat Usaha Lokasi Desa Janapria Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah	Sewa	Desa Janapria Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah	50.000.000,00		50.000.000,00				
8	Sewa Tanah dan Bangunan seluas 1500 M2 untuk Tempat Membangun Villa Lokasi Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah	BGS	Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah	60.000.000,00		60.000.000,00				
B	Properti Investasi Gedung dan Bangunan			24.057.725.381,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24.057.725.381,00
1	Gedung dan Bangunan Wisma Mandalika (Aerotel) Praya	KSP	Praya	18.417.825.383,00						18.417.825.383,00
	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen :									
2	Toko Rinjani Agung	Sewa	Praya	386.666.667,00						386.666.667,00
3	Toko Aneka Jaya	Sewa	Praya	386.666.667,00						386.666.667,00
4	Rumah Makan Ria	Sewa	Praya	386.666.667,00						386.666.667,00
5	Rumah Makan Ria	Sewa	Praya	386.666.667,00						386.666.667,00
6	JE Cellular	Sewa	Praya	386.666.667,00						386.666.667,00
7	JE Cellular	Sewa	Praya	386.666.667,00						386.666.667,00
8	Central Komputer	Sewa	Praya	386.666.667,00						386.666.667,00
9	Toko Mulla Agung	Sewa	Praya	386.666.667,00						386.666.667,00
10	Toko Muara Mas	Sewa	Praya	386.666.667,00						386.666.667,00
11	Toko Bintang	Sewa	Praya	386.666.667,00						386.666.667,00
12	Toko Bassoke	Sewa	Praya	386.666.667,00						386.666.667,00
13	Toko Sai	Sewa	Praya	386.666.667,00						386.666.667,00
	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen : Komplek Toko Orient		Praya	0,00						
14	Bangunan toko Praya Sport	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Beny Budiyo	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
15	Bangunan Toko Orient	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Agustinus Surya Kusumo Putro	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
16	Bangunan Toko Orient	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Agustinus Surya Kusumo Putro	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
17	Bangunan Toko Orient	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Agustinus Surgo Putro	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
18	Bangunan Toko Sepatu Bata	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Hidayah	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
19	Bangunan Toko Global Variasi	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Rusdiana	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
20	Bangunan Toko Global Variasi	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Rusdiana	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
21	Bagunan Toko Usaha Dagang	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Andi Gunawan Saputra	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
22	Bagunan Toko Global Jaya	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Beny Johan	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00

No	Uraian	Bentuk Kerjasama	Lokasi	Nilai Tahun 2025	Penambahan			Pengurangan		Nilai Tahun 2024
					Beban Penyusutan	Reklas Dari Aset Tetap	Reklas Dari Aset Lainnya/Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Reklas Ke Aset Tetap	Reklas Ke Aset Lainnya	
23	Bangunan Cabang PT.BAD	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Ronny Burhan wahyudi	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
24	Bangunan UD. Suzuki	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 Cahaya Wirawan Hadi	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
25	Bangunan Toko Hidayah	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Haji Umar Mulachela	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
26	Bangunan Toko Jaya Optik	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Haji Deden Assidik	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
27	Bangunan Penyewaan Sharly Montor	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Hendri Gunawan	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
28	Bangunan Toko Garuda	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Diana Sari Dewi	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
29	Bangunan UD. Suzuki	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Cahaya Wirawan Hadi	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
30	Bangunan Toko Sukses	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Tjiang Giok Haou	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
31	Bangunan Toko Gaya Baru	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Gunawan	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
32	Bangunan PT. Dinamik Aotonusa	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Koesnadi	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
33	Bangunan Toko Remaja Jaya	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Haryono Avi Putro	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
34	Bangunan Toko Remaja Jaya	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Alvin Wijaya	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
35	Bangunan PT. Bank Central Asia	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Tonni Bunafi	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
36	Bangunan PT. BRI (Persero)	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Irwandi, SE, MM	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
37	Bangunan UD. Andika Photo	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Wawan Kurniawan	Praya	39.995.994,00						39.995.994,00
38	Bangunan Toko Orient	HGB 20 tahun TMT 1 Agustus 2011 dengan Raden Markus Sunjoyo Kusumo	Praya	39.996.000,00						39.996.000,00
C	Jumlah Nilai Perolehan			31.290.393.381,00		263.152.000,00	0,00	0,00	0,00	31.027.241.381,00
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi			(6.088.330.651,00)	(447.241.756,00)					(5.641.088.895,00)
D	Jumlah Nilai Netto Aset Properti Investasi			25.202.062.730,00	(447.241.756,00)					25.386.152.486,00

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

REKAPITULASI KERUGIAN DAERAH

PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	NILAI KERUGIAN AWAL	KOREKSI NILAI KERUGIAN AWAL PER 31 DESEMBER 2025	TAMBAHAN SELAMA TAHUN 2025	TINDAK LANJUT SELAMA TAHUN 2025	KOREKSI	NILAI KERUGIAN PER 31 DESEMBER 2025
	PENILAIAN PIUTANG TGR						
A.	KERUGIAN DAERAH PNS BENDAHARA	-					
B.	KERUGIAN DAERAH PNS NON BENDAHARA	620.554.490,00		2.612.697.836,76	208.718.754,00	-	3.024.533.572,76
C.	KERUGIAN DAERAH PIHAK KETIGA	8.922.365.589,83	14.277,00	1.493.611.000,00	1.425.970.316,43	24.136.386,00	8.965.884.164,40
	TOTAL PIUTANG TGR	9.542.920.079,83	14.277,00	4.106.308.836,76	1.634.689.070,43	24.136.386,00	11.990.417.737,16

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DATA KERUGIAN DAERAH PNS NON BENDAHARA
Per 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI KERUGIAN AWAL	TAMBAHAN SELAMA SMT I TAHUN 2025	TAMBAHAN SELAMA SMT II TAHUN 2025	DI SETOR TAHUN 2025		NILAI TEMUAN PER 31 DESEMBER 2025	KET
						TANGGAL	NILAI STS		
	TAHUN 2003								
1	Adanya jabatan rangkap dan penggajian yang double (Dinas Dikpora)	Sdr. Zainal Abidin (1021859)	2.200.000,00					2.200.000,00	SKTJM 21 bulan (16 November 2015). SK Bupati No. 636 tahun 2014
	Tahun 2009		-					-	
4	TGR Kendaraan perorangan	H.L. Sidik (1022137)	850.000,00					850.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Drs. M. Sanusi Tanhar (1022149)	6.200.000,00					6.200.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
			-					-	
	Tahun 2010		-					-	
5	Terdapat pembayaran tunj. fungsional yg harus dikembalikan ke kas negara	Sdr. Nujumuddin (1022191)	6.290.000,00					6.290.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
6	Terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas keluar daerah TA. 2009 dan TA. 2010 yang fiktif	Sdr. L. Muh Saleh, S.Sos (1022205)	7.065.000,00					7.065.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. Asinah (1022207)	3.510.000,00					3.510.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. Ibnu Hajar (1022208)	10.620.000,00					10.620.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. L. Bisri Samsuri (1022213)	11.495.200,00					11.495.200,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. H. L. Gde Boh, S.Sos (1022216)	5.695.000,00					5.695.000,00	Sudah Lunas (belum masuk sikad)
		Sdr. H. Arif Rahman, S.Sos (1022222)	4.030.000,00					4.030.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. L. Mardi Azis (1022226)	3.930.000,00					3.930.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. Lely Aryan, S.Sos (1022247)	3.655.000,00					3.655.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. Solatiah, S.Ag (1022254)	4.030.000,00					4.030.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. Wirya Dharma, SH (1022257)	3.596.000,00					3.596.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. Azhar, S.IP (1022259)	5.740.000,00					5.740.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. Ir. L. M. Saleh (1022265)	3.655.000,00					3.655.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. L. Sukirman, S.Sos (1022272)	3.655.000,00					3.655.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. Ir. L. M. Amin, MM (1022273)	3.715.000,00			19 Juni 2025	1.305.000,00	2.410.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. Ahmad Fatoni (1022279)	2.010.000,00					2.010.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
			-					-	
	Tahun 2011		-					-	
7	Perjalanan dinas luar daerah dinilai tidak efektif, efisien & ekonomis Rp4.170.000,- (Dinas Dikpora)	Sdr. H. M. Rusnan Sai, S.Pd (1022300)	3.670.000,00					3.670.000,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
			-					-	
	Tahun 2013		-					-	
8	TGR Kendaraan perorangan (Kec. Praya Barat)	Misbahul Haram, S. IP. (Kec. Praya Barat) (1023631)	1.380.000,00			30 April 2025	300.000,00	1.080.000,00	1. SKTJM 12 bulan (30 Desember 2015) 2. SKTJM 1 Tahun (22 Desember 2022)
			-					-	
	Tahun 2014		-					-	
9	Kelebihan pembayaran tunj. Keluarga (UPT Dikpora Praya Timur)	Sdr. Muhamad Ripaah (1023882)	4.983.992,00					4.983.992,00	SK Bupati No 636 tahun 2014

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI KERUGIAN AWAL	TAMBAHAN SELAMA SMT I TAHUN 2025	TAMBAHAN SELAMA SMT II TAHUN 2025	DI SETOR TAHUN 2025		NILAI TEMUAN PER 31 DESEMBER 2025	KET
						TANGGAL	NILAI STS		
10	Kelebihan pembayaran tunj. keluarga (UPT Dikpora Praya Barat Daya)	Sdr. Ibrahim (1023957)	657.900,00					657.900,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. Nurisa (1023958)	391.356,00					391.356,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. Samian (1023959)	2.476.404,00					2.476.404,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. Raden Kamarudin (1023960)	1.935.038,00					1.935.038,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. Syukri Rahman (1023961)	3.072.772,00					3.072.772,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
11	Pembayaran tunjangan keluarga yang tidak didukung dengan dokumen yang lengkap (UPT Dikpora Praya Barat Daya)	Sdr. Nasir (1023964)	790.940,00					790.940,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
12	Kelebihan pembayaran tunjangan anak (UPT Dikpora Batukliang)	Sdr. Ainun Puniawati (1023970)	310.262,00					310.262,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
13	Kelebihan pembayaran tunj. anak & beras (UPT Dikpora Pujut)	Sdr. Saiful Bahri (1024065)	4.668.468,00					4.668.468,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. Lalu Ibrahim (1024076)	4.830.600,00					4.830.600,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
		Sdr. Muhur, S.Pdl (1024080)	1.665.972,00					1.665.972,00	SK Bupati No 636 tahun 2014
	Tahun 2015		-					-	
14	Terdapat kelebihan pemb. tunjangan anak (UPT Praya Barat)	Sdr. Muhdar Ahmad (1064368)	1.725.504,00					1.725.504,00	
15	Kelebihan pemb. tunjangan anak (Kantor Camat Praya Barat Daya)	Sdr. H. Kamiludin (1064806)	2.796.000,00					2.796.000,00	
		Sdr. Sentum (1064811)	1.561.928,00					1.561.928,00	
	Tahun 2016		-					-	
16	TP Guru Diterima oleh Guru yang Telah Meninggal Dunia (Dinas Dikpora)	H. Bahrin (SDN 6 Praya) (1102664)	16.097.300,00					16.097.300,00	
		Daung Andria (SDN 3 Marong) (1137765)	9.106.305,00					9.106.305,00	
		Sudirman (SDN 2 Langko) (11022666)	9.378.390,00					9.378.390,00	
		Pacah (SMPN 1 Jonggat) (1102667)	1.898.870,00					1.898.870,00	
		Hasanudin (SDN 3 Kawo) (1102668)	7.852.320,00					7.852.320,00	
		Mardi (SDN Subahnala) (1102669)	2.947.460,00					2.947.460,00	
		H. Soreng (SDN Serenang) (1102671)	6.146.690,00					6.146.690,00	
		Mardiana (SDN Kekere) (1102672)	2.227.595,00					2.227.595,00	
		H. Lalu Pasna (SDN Aik Ara) (1102673)	1.177.185,00					1.177.185,00	
		Abhar (SMPN 2 Batukliang) (1102675)	800.000,00					800.000,00	Selisih 800 dengan kerugda, sudah tidak selisih. Double pengakuan untuk STS 800 rb
			-					-	
17	TP Guru Diterima oleh Guru yang Telah Pensiun (Dinas Dikpora)	LALU ARD (SDN Gilik) (1137767)	4.894.920,00					4.894.920,00	
		Hj. BAIQ Siti Asih (SDN 2 Praya) (1102682)	2.631.020,00					2.631.020,00	SKTJM 1 Tahun (6 Maret 2018)
		Lalu Karna (UPT Dikpora Kec.Pringgarata) (1102690)	6.988.615,00					6.988.615,00	SK Pensiun No. 000005/KEP/KV/25202/14 an. Lalu Karna
			-					-	
20	TPTGR atas Kendaraan Dinas yang Hilang DPRD	Lalu Abdul Hamid (1144103)	8.900.000,00					8.900.000,00	SKTJM 3 bulan (21 Desember 2022)
			-					-	
			-					-	
			-					-	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI KERUGIAN AWAL	TAMBAHAN SELAMA SMT I TAHUN 2025	TAMBAHAN SELAMA SMT II TAHUN 2025	DI SETOR TAHUN 2025		NILAI TEMUAN PER 31 DESEMBER 2025	KET
						TANGGAL	NILAI STS		
	TAHUN 2017		-					-	
18	Penjualan angsuran kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan	Sdr. H. M. Yusuf Saleh, SH (1089424)	75.000.000,00					75.000.000,00	
		Sdr. L. Sudihartawan, SH (1089426)	46.800.000,00					46.800.000,00	
		Sdr. H. Lalu Supardan, MM (1089431)	18.918.000,00					18.918.000,00	
			-					-	
	TAHUN 2018		0					-	
19	Terdapat kelebihan pembayaran tunj.anak pada SMPN 1 Praya Timur	Sdr. Hus (1109244)	605.964,00					605.964,00	SK Bupati No. 06 Tahun 2018
			-					-	
			-					-	
	TAHUN 2019		0					-	
21	Pembayaran gaji senilai Rp.45.218.900,00 kepada ASN yang telah melewati Batas Usia Pensiun	Sdr. Abd Hasyim (1145493)	6.763.400,00					6.763.400,00	
22	Pembayaran gaji senilai Rp.79.828.300,00 kepada ASN yang telah pensiun atas permintaan sendiri	Sdr. Lalu Jamaludin (1145514)	14.810.600,00					14.810.600,00	
		Sdr.Lalu Badarudin (1145547)	15.709.800,00					15.709.800,00	
		Sdr. Lalu Jelidra (1145552)	22.593.000,00					22.593.000,00	
		Sdr. Maskanah (1145553)	15.006.000,00					15.006.000,00	
23	Kelebihan pembayaran gaji senilai Rp.52.621.400,00 kepada ASN yang telah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan	Sdr. L.Pakah (1145565)	34.811.300,00					34.811.300,00	
			-					-	
	TAHUN 2020		0					-	
24	Pembayaran gaji ASN yang telah Pensiun	Sdr. Syamsul Aidi (1220723)	10.649.800,00					10.649.800,00	SK Bupati No. 243 tahun 2020
		Sdr. Semin (1220728)	5.989.000,00					5.989.000,00	SK Bupati No. 243 tahun 2020
25	Pembayaran gaji ASN yang dikenakan pemberhentian sementara pembayaran gajinya dan pemberhentian sementara sebagai PNS	Sdr. Lalu Muhamad Hijerah (1220744)	11.999.000,00					11.999.000,00	SK Bupati No. 243 tahun 2020
26	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 19 OPD Tidak Sesuai Ketentuan Sekretariat DPRD		-					-	
		Sdr. L. Supriadi (1220882)	1.000.000,00					1.000.000,00	SK Bupati No. 243 tahun 2020
		Sdr. Didik Ariesta (1220885)	2.226.200,00					2.226.200,00	SK Bupati No. 243 tahun 2020
		Sdr. TGH. M. Jamaludin (1220887)	1.000.000,00					1.000.000,00	SK Bupati No. 243 tahun 2020
		Sdr. Noni Alam F (1220890)	2.400.000,00					2.400.000,00	SK Bupati No. 243 tahun 2020
		Sdr. Saharudin (1220891)	900.000,00					900.000,00	SK Bupati No. 243 tahun 2020
		Sdr. Sukatmi (1220894)	900.000,00					900.000,00	SK Bupati No. 243 tahun 2020
		Sdr. Burhanudin Yusuf (1220897)	1.800.000,00					1.800.000,00	SK Bupati No. 243 tahun 2020
		Sdr. Jayanti Umar (1220901)	1.100.000,00					1.100.000,00	SK Bupati No. 243 tahun 2020
		Sdr. M. Samsul Qomar (1220905)	1.100.000,00					1.100.000,00	SK Bupati No. 243 tahun 2020
		Sdr. Feridian Wijaya (1220909)	1.100.000,00					1.100.000,00	SK Bupati No. 243 tahun 2020
		Sdr.L. Muhibban (1221003)	2.500.000,00					2.500.000,00	SK Bupati No. 243 tahun 2020
		Sdr.L. Supriadi (1221010)	1.100.000,00					1.100.000,00	SK Bupati No. 243 tahun 2020
		Sdr. Zulfan Azhari (1221013)	900.000,00					900.000,00	SK Bupati No. 243 tahun 2020
	TAHUN 2022		-					-	
	Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan atas pegawai pensiun, mutasi dan meninggal dunia senilai Rp. 85.550.424,00	Lalu Mohamad Nur Disdik (1289264)	11.121.600,00					11.121.600,00	SKTJM 1 bulan (21 Juni 2022). Sk Bupati No. 177 Tahun 2022
		Muliati Janda Yusron Hafizi (disdik) (1289285)	4.532.000,00			20 Juni 2025	1.000.000,00	3.032.000,00	SKTJM 1 bulan (21 Juni 2022)
						11 November 2025	500.000,00		
28	Terdapat kelebihan/keterlambatan pembayaran tunjangan anak sebesar Rp. 26.884.120	Hartawan (20428947)	14.111.344,00					14.111.344,00	SK BUPATI NO 301 TAHUN 2022
		Sentum (20428950)	10.832.776,00					10.832.776,00	SK BUPATI NO 301 TAHUN 2022
			-					-	
	Tahun 2023		-					-	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI KERUGIAN AWAL	TAMBAHAN SELAMA SMT I TAHUN 2025	TAMBAHAN SELAMA SMT II TAHUN 2025	DI SETOR TAHUN 2025		NILAI TEMUAN PER 31 DESEMBER 2025	KET
						TANGGAL	NILAI STS		
29	Memulihkan kelebihan pembayaran belanja pegawai atas pegawai yang menerima hukuman disiplin senilai Rp7.123.708 dengan cara meyetorkan ke kas daerah	Lalu Munawir Haris	7.123.708,00					7.123.708,00	LHP BPK TA. 2022 (Tahap Informasi di SIKAD 2025
	Dijumpai Keterangan Pembayaran Tunjangan Anak sebesar Rp8.972.238,00 700/130/INS/RHS/2023/Ket	Rabihim	4.472.238,00					4.472.238,00	
	Dijumpai kelebihan pembayaran tunjangan anak/suami/istri sebesar Rp4.871.350 (700/133/INS/RHS/2023/ket (Dinas PMD))	Lale Dewi Sartika, SH 20475324	2.435.674,00			24 Maret 2025	405.946,00	-	
						15 April 2025	405.946,00		
						28 Mei 2025	405.946,00		
						28 Mei 2025	405.946,00		
						14 Februari 2025	405.946,00		
						28 Oktober 2025	405.944,00		
	Pengendalian Belanja Perjalanan Dinas pada Tiga SKPD Belum Tertib	Erna Sopiatri	-					-	
	Memproses kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan atas pegawai yang bercerai, tugas belajar dan cuti besar senilai Rp71.873.080,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.	Huswaton Hasanah, S. Kep.Ners	863.080,00			22 Desember 2025	863.080,00	-	
		Husaini (10519191)	500.000,00			22 Desember 2025	500.000,00	-	
		Muhamad supardi (10519201)	500.000,00			22 Desember 2025	500.000,00	-	
		Haryati (10519208)	600.000,00			22 Desember 2025	600.000,00	-	tahap proses d smt 1 2025
		Ahmad Fathoni Nur (10519221)	850.000,00			22 Desember 2025	850.000,00	-	tahap proses d smt 1 2025
		Nurul Hidayati (10519246)	Rp 240.000,00			22 Desember 2025	240.000,00	-	tahap proses d smt 1 2025
		Ika Febryana (10519158)	Rp 12.750.000,00			17 Oktober 2025	3.000.000,00	-	
						03 November 2025	3.000.000,00		
						11 Desember 2025	3.000.000,00		
						19 Desember 2025	3.750.000,00		
		Heru Mukti Pamungkas (10519122)	Rp 1.500.000,00			7 oktober 2025	1.500.000,00	-	
		Lalu Reza Aaldira Akbar (10519170)	Rp 2.035.000,00			7 oktober 2025	2.035.000,00	-	
		Dewi Rochmawati (10519104)	Rp 25.000.000,00			07 maret 2025	25.000.000,00	-	
								-	
								-	
	Kelebihan Pembayaran Gaji atas Pegawai Pensiun dan Mutasi Keluar	Rischa Novitasari, APT (10611334)		4.618.400,00				4.618.400,00	Seharusnya sudah lunas (sudah ada SKL) di sikad belum
		Asiyah (10611475)		5.439.800,00				5.439.800,00	
		Lale Aryani (10611517)		3.071.000,00		23 Desember 2025	500.000,00	2.571.000,00	
		Rosni Lewenussa (10611527)		5.534.700,00				5.534.700,00	Seharusnya sudah lunas (sudah ada SKL) di sikad belum
		Najamudin, A.MA (10611729)		2.505.500,00		08 Mei 2025	1.000.000,00	1.505.500,00	
		Heny Kusmawati		2.603.650,00		27 November 2025	1.500.000,00	1.103.650,00	
		Saniah, S.Pd (10611911)		5.572.460,00		27 November 2025	2.000.000,00	3.572.460,00	
	Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 4 SKPD Tidak Sesuai dengan Ketentuan	Husnan/Camat Prabarda			108.543.500,00	15 Juni 2025	8.340.000,00	48.203.500,00	
						04 Juli 2025	27.000.000,00		
						28 Oktober 2025	5.000.000,00		
						26 November 2025	10.000.000,00		
						29 November 2025	5.000.000,00		
						30 November 2025	5.000.000,00		
		Lalu Muhammad Saleh, S.Sos/Camat Prava Tengah			114.086.531,00	20 Juni 2025	42.500.000,00	22.086.531,00	



NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI KERUGIAN AWAL	TAMBAHAN SELAMA SMT I TAHUN 2025	TAMBAHAN SELAMA SMT II TAHUN 2025	DI SETOR TAHUN 2025		NILAI TEMUAN PER 31 DESEMBER 2025	KET
						TANGGAL	NILAI STS		
						08 Agustus 2025	45.000.000,00		
						06 Oktober 2025	1.500.000,00		
						25 November 2025	3.000.000,00		
	Kehilangan Kendaraan Dinas Honda Vario 125 DR 5738 V Tahun Pembuatan 2019	Mauludiyah	13.500.000,00			24 November 2025	1.000.000,00		
	Pertanggungjawaban Belanja Makan dan Minum Pasien tidak sesuai dengan kondisi kenyataannya	PUSKESMAS PUYUNG			22.312.200,00				
		PUSKESMAS MANTANG			15.623.500,00				
	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Air Bersih pada BLUD RSUD Praya tidak sesuai kontrak	RSUD			44.147.000,00				
	Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan pegawai ASN sebesar Rp322.296.510,62	DINAS PERTANIAN			309.239.512,79				
	Belanja Barang Habis Pakai pada Empat SKPD tidak sesuai bukti kenyataannya	DISNAKERTRANS			31.986.000,00				
		BKPSDM			51.651.000,00				
		DISPERINDAG			62.627.000,00				
		BAPERIDA			103.688.000,00				
	Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa BLUD tidak sesuai dengan Kondisi Kenyataannya	RSUD			76.560.000,00				
		Puskesmas Janapria			11.772.000,00				
		Puskesmas Mujur			7.262.000,00				
	Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tidak	SATPOLPP			496.905.250,00				
	Kelebihan Pembayaran Ongkos Kirim pada Lima Paket Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Praya	PT Berliando Mitra Abadi			2.214.300,00				
		PT Cobra Dental Indonesia			502.880,00				
		PT Intergast RA Nusantara			12.932.090,00				
		PT Trisolah Parahyangan Indonesia			17.362.500,00				
		PT Golden Medika Mandiri			8.600.776,00				
	Pembayaran Honor Dewan Pengawas BLUD RSUD Praya Tidak sesuai Ketentuan	LFW (ketua)			21.385.544,74				
		TPN (Anggota 1)			19.229.140,27				
		HM (Anggota 2)			19.229.140,27				
		MZ (Sekretaris)			8.954.746,69				
	Kelebihan Pembayaran atas Tiga Paket Pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi pada Diskominfo	CV. Helios (Rebuild PPID Loteng)			4.500.000,00				
		CV. Mujur Web (Pengembangan SI Inspektorat (SIMADU)			5.800.000,00				
		CV Helios (Rebuild Website PPID			1.000.000,00				
		CV Helios (Pengembangan Aplikasi Satu Data Sektoral)			1.000.000,00				
	Realisasi Belanja Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tidak Sesuai	DISDIKBUD			692.656.000,00				
	Realisasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Belanja Bimbingan Teknis Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar	KEC JANAPRIA			84.120.715,00				

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI KERUGIAN AWAL	TAMBAHAN SELAMA SMT I TAHUN 2025	TAMBAHAN SELAMA SMT II TAHUN 2025	DI SETOR TAHUN 2025		NILAI TEMUAN PER 31 DESEMBER 2025	KET
						TANGGAL	NILAI STS		
		KEC PRABAR							
	Kekurangan Volume dan Ketidaktepatan Pembebanan Biaya Umum pada Belanja Persediaan	DISPORA			39.287.000,00				
		DINAS PERTANIAN			5.638.000,00				
		DISDIKBUD			46.827.000,00				
		DINAS PUPR			2.768.000,00				
		PERKIM			8.733.000,00				
		DISPORA			8.289.000,00				
	Belanja Barang Habis Pakai pada Empat SKPD tidak sesuai bukti senyatanya Sebesar Rp110.154.000	DISNAKERTRANS			52.864.000,00				
		BKPSDM			33.359.000,00				
		DISPERPUS			2.005.000,00				
		BAPPERIDA			21.926.000,00				
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Bukti	SETDA			5.765.000,00				
	TOTAL		620.554.490,00	29.345.510,00	2.583.352.326,76		208.718.754,00	3.024.533.572,76	



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DATA KERUGIAN DAERAH PIHAK KETIGA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI KERUGIAN AWAL	KOREKSI NILAI KERUGIAN AWAL PER 31 DES 2024	TAMBAHAN SELAMA SMT I TAHUN 2025	TAMBAHAN SELAMA SMT II TAHUN 2025	TINDAK LANJUT TAHUN 2025		KOREKSI	NILAI TEMUAN PER 31 DESEMBER 2025	KET
							TANGGAL	NILAI STS			
	TAHUN 2005										
1	Terdapat kelebihan pembayaran atas pembebanan pemakaian alat dalam perhitungan harga satuan pekerjaan sebesar Rp.13.793.271,64 pada Dinas PU & ESDM	CV. Sophan (1063778)	Rp 5.293.271,64							Rp 5.293.271,64	
2	Terdapat kelebihan pembayaran atas pembebanan pemakaian alat dalam perhitungan harga satuan pekerjaan sebesar Rp13.178.459,66	CV. Mitra Sejati (1063779)	Rp 4.678.459,66							Rp 4.678.459,66	
			Rp -							Rp -	
	TAHUN 2007		Rp -							Rp -	
3	Terdapat penyimpangan/penyalahgunaan dana pendidikan oleh oknum TPK/UPK sebesar Rp14.945.750,00	TPK Desa Selong Belanak dan UPK Janapria (1063060)	Rp 8.408.750,00							Rp 8.408.750,00	
4	Adanya dana yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.17.500.000,-	Partai Merdeka (1024124)	Rp 17.500.000,00							Rp 17.500.000,00	
5	Dana bantuan partai sebesar Rp20.000.000,- belum dipertanggungjawabkan oleh pengurus partai	Partai Merdeka (1024125)	Rp 20.000.000,00							Rp 20.000.000,00	
			Rp -							Rp -	
	TAHUN 2010		Rp -							Rp -	
6	Panitia pengadaan barang/jasa kurang cermat dalam mengevaluasi penawaran jasa konsultasi perencanaan wisma pemerintah Kab. Loteng yang menyebabkan kerugian Daerah/Negara Rp148.770.000,-	CV. Karya Utama Jaya (1063145)	Rp 148.770.000,00							Rp 148.770.000,00	
			Rp -							Rp -	
	TAHUN 2011		Rp -							Rp -	
7	Dana Bergulir DBH-CHT untuk 42 unit oven dicairkan ganda (total temuan sebesar Rp160.785.000,00)	Sdr. Muhlis (1024185)	Rp 18.200.000,00							Rp 18.200.000,00	SKTJM 8 SEPT 2014 60 HARI
		Sdr. Anwar (1024187)	Rp 11.800.000,00							Rp 11.800.000,00	
		Sdr. Sukardi (1024188)	Rp 55.175.000,00							Rp 55.175.000,00	
		Sdr. M. Irfan (1024189)	Rp 4.500.000,00							Rp 4.500.000,00	
		Sdr. M. Tabrizi (1024190)	Rp 7.000.000,00							Rp 7.000.000,00	
		Sdr. Bahrain (1024191)	Rp 4.500.000,00							Rp 4.500.000,00	
		Sdr. Munawir Haris (1024192)	Rp 17.500.000,00							Rp 17.500.000,00	
8	Dana bergulir DBH-CHT tidak diterima pemilik oven dan terdapat dua pemilik oven yang fiktif	Sdr. Asmak Rohadi dan Sdr. Martono (1024193)	Rp 7.150.000,00							Rp 7.150.000,00	SKTJM 8 SEPT 2014 60 HARI
9	Dana Bergulir DBH-CHT tidak diterima pemilik oven & terdapat 2 pemilik oven fiktif.	Sdr. Asmak Rohadi (1024195)	Rp 18.000.000,00							Rp 18.000.000,00	
		Sdr. Martono (1024196)	Rp 23.200.000,00							Rp 23.200.000,00	Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2012. Surat Pernyataan 28 Juli 2021
10	Terdapat sisa tunggakan pembayaran retr. menara telekomunikasi Rp90.000.000,-	PT. Ida Lombok (1024200)	Rp 17.000.000,00							Rp 17.000.000,00	
			Rp -							Rp -	



NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI KERUGIAN AWAL	KOREKSI NILAI KERUGIAN AWAL PER 31 DES 2024	TAMBAHAN SELAMA SMT I TAHUN 2025	TAMBAHAN SELAMA SMT II TAHUN 2025	TINDAK LANJUT TAHUN 2025		KOREKSI	NILAI TEMUAN PER 31 DESEMBER 2025	KET
							TANGGAL	NILAI STS	NILAI STS		
	TAHUN 2013		Rp -							Rp -	
11	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Bantuan Sosial Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Informal TA 2012.	PKBM Intihan Desa Gemel, Jonggat (1063211)	Rp 20.062.500,00							Rp 20.062.500,00	
			Rp -							Rp -	
	TAHUN 2017		Rp -							Rp -	
12	Kekurangan volume atas 11 paket pekerjaan pada empat SKPD senilai Rp.786.766.268,30 & kelebihan pembayaran senilai Rp.29.502.558,50		Rp -							Rp -	
	Dinas Kesehatan	CV. Mustika Beringin Mas (1090145)	Rp 94.229.677,05							Rp 94.229.677,05	SKTJM 1 tahun (6 Maret 2023)
	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	CV. Ali Wisman (1090153)	Rp -							Rp -	SKTJM 1 tahun (6 Maret 2023)
		CV. Dina Utama (1090155)	Rp 21.919.985,79							Rp 21.919.985,79	SKTJM 1 tahun (6 Maret 2023)
	TAHUN 2020		Rp -							Rp -	
13	Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembuatan Sumur Bor senilai Rp.26.031.807,62 pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.	Direktur CV. Prajawata (1220995)	Rp -							Rp -	SK Bupati No. 245 Tahun 2020
		Direktur CV. Prajawata (1220996)	Rp 3.944.050,00							Rp 3.944.050,00	SK Bupati No. 245 Tahun 2020
	TAHUN 2021		Rp -							Rp -	
14	Kurang Volume 21 Paket Pekerjaan pada Tiga OPD Senilai Rp7.109.842.066,97 dan Denda Keterlambatan Empat Paket Pekerjaan pada Dua OPD Senilai Rp137.274.536,97		Rp -							Rp -	
	Dinas PU dan PR	Direktur PT. Citra Prasasti Konsorindo (1254837)	Rp 2.764.582.601,42							Rp 2.764.582.601,42	SK Bupati No. 02 Tahun 2021
		Direktur CV. Total Karya Utama	Rp -							Rp -	
		Direktur PT. Kerinci Jaya Utama (1254844)	Rp 456.310.218,29							Rp 456.310.218,29	SKTJM 10 bulan (6 Maret 2023). SK Bupati No. 02 Tahun 2021
		Direktur PT. DIL (1254848)	Rp -							Rp -	SK Bupati No. 02 Tahun 2021
	Dinas Kesehatan	Direktur PT. DKU (1254855)	Rp 170.898.609,80							Rp 170.898.609,80	SK Bupati No. 02 Tahun 2021
		Direktur PT. AJR (1254863)	Rp 137.154.897,80							Rp 137.154.897,80	SK Bupati No. 02 Tahun 2021
		Direktur PT. TZP (1254871)	Rp 60.116.157,26							Rp 60.116.157,26	SK Bupati No. 02 Tahun 2021
		Direktur CV. AP (1254876)	Rp 14.748.111,42							Rp 14.748.111,42	SK Bupati No. 02 Tahun 2021
		Direktur CV. Mitra Harapan Kontruksi (1254879)	Rp 22.568.752,85							Rp 22.568.752,85	SKTJM 2 bulan (6 Maret 2023)



NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI KERUGIAN AWAL	KOREKSI NILAI KERUGIAN AWAL PER 31 DES 2024	TAMBAHAN SELAMA SMT I TAHUN 2025	TAMBAHAN SELAMA SMT II TAHUN 2025	TINDAK LANJUT TAHUN 2025		KOREKSI	NILAI TEMUAN PER 31 DESEMBER 2025	KET
							TANGGAL	NILAI STS	NILAI STS		
	Dinas Pariwisata	Direktur CV. Cemerlang Membangun (1254885)	Rp 5.636.121,37							Rp 5.636.121,37	SK Bupati No. 02 Tahun 2021
		Direktur CV. Cahaya Al Fara (1254891)	Rp -							Rp -	SK Bupati No. 02 Tahun 2021
		Direktur CV. Berkah Doa (1254893)	Rp 1.602.191,62							Rp 1.602.191,62	SK Bupati No. 02 Tahun 2021
15	Belanja Publikasi dan Dekorasi pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan		Rp -							Rp -	
	Sekretariat Daerah	Sdr. Lalu Sofyan Aldi (Lombok TV) (1254906)	Rp 6.000.000,00				13 Februari 2025	1.000.000,00		Rp -	SKTJM 12 bulan (6 Maret 2023). SK Bupati No. 02 Tahun 2021
							01 Februari 2025	5.000.000,00			
	Sekretariat DPRD	Sdr. Lalu Sofyan Aldi (Lombok TV) (1254918)	Rp 23.000.000,00				19 Juni 2025	500.000,00		Rp -	SKTJM 3 bulan (21 Desember 2022). SK Bupati No. 02 Tahun 2021
							14 November 2025	6.000.000,00			
							01 Desember 2025	16.500.000,00			
16	Kekurangan Volume pekerjaan rehabilitasi saluran di beberapa lokasi kegiatan sebesar Rp.38.570.651,00 pada Dinas PUPR Bidang SDA Kabupaten Lombok Tengah	Direktur CV. Bulan Bintang (1254929)	Rp 3.585.595,00							Rp 3.585.595,00	SK Bupati No. 04 Tahun 2021
		Direktur CV. Pabla Bangun Perkasa (1254932)	Rp -							Rp -	SK Bupati No. 04 Tahun 2021
		Direktur CV. Global Pranata (1254936)	Rp 1.830.794,00							Rp 1.830.794,00	SK Bupati No. 04 Tahun 2021
		Direktur CV. Utami Anugrah (1254939)	Rp 1.982.054,00							Rp 1.982.054,00	SK Bupati No. 04 Tahun 2021
		Direktur CV. Palapa Graha (1254941)	Rp 7.553.050,00							Rp 7.553.050,00	SK Bupati No. 04 Tahun 2021
		Direktur CV. Kaysanindo (1254946)	Rp 9.525.359,00							Rp 9.525.359,00	SK Bupati No. 04 Tahun 2021
		Direktur CV. Re (1254950)	Rp 3.477.886,00							Rp 3.477.886,00	SK Bupati No. 04 Tahun 2021
17	Terdapat pekerjaan Pembuatan Sumur Bor di beberapa lokasi kegiatan yang tidak dikerjakan sesuai dengan kontrak/RAB senilai Rp.60.784.355,00 pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah.	Direktur CV. BO (1254981)	Rp -							Rp -	SK Bupati No. 04 Tahun 2021
		Direktur CV. Dasan Krida (1254987)	Rp 924.000,00							Rp 924.000,00	SK Bupati No. 04 Tahun 2021
		Direktur CV. Sabda Alam (1254995)	Rp 4.139.221,00							Rp 4.139.221,00	SK Bupati No. 04 Tahun 2021



NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI KERUGIAN AWAL	KOREKSI NILAI KERUGIAN AWAL PER 31 DES 2024	TAMBAHAN SELAMA SMT I TAHUN 2025	TAMBAHAN SELAMA SMT II TAHUN 2025	TINDAK LANJUT TAHUN 2025		KOREKSI	NILAI TEMUAN PER 31 DESEMBER 2025	KET
							TANGGAL	NILAI STS	NILAI STS		
	TAHUN 2022		Rp -							Rp -	
18	Kekurangan Volume Pekerjaan Senilai Rp763.539.411,50 dan Jaminan Pelaksanaan Senilai Rp580.673.350,00 Tidak Dapat Dicairkan dari Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Batunyalala dan Puskesmas Batu Jangkik	CV RM (1289290)	Rp -							Rp -	SKTJM (2022). SK No. 178 Tahun 2022
19	Kekurangan Volume pada 27 Paket Pekerjaan Senilai Rp.790.587.580,75		Rp -							Rp -	SK BUPATI NO 178 TAHUN 2022
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	CV Abdi Utama (1289409)	Rp 26.059.903,60				17 November 2025	10.000.000,00		Rp 14.559.903,60	SKTJM 2 tahun (21 Juni 2022). SK Bupati No. 178 Tahun 2022
							03 Juli 2025	1.500.000,00			
		CV Abadi (1289471)	Rp 21.323.746,18							Rp 21.323.746,18	SKTJM 2 tahun (21 Juni 2022)
		PT Lingkarjati Perkasa (1289479)	Rp 159.895.000,00							Rp 159.895.000,00	SKTJM 22 Juni 2022 SK BUPATI NO 178 TAHUN 2022
		PT Duo Alsakhi Putri (1289481)	Rp 98.168.595,53							Rp 98.168.595,53	SKTJM 22 Juni 2022 SK BUPATI NO 178 TAHUN 2022 SK BUPATI NO 178 TAHUN 2022
		PT Duo Alsakhi Putri (1289482)	Rp 99.099.166,96							Rp 99.099.166,96	SKTJM 22 Juni 2022 SK BUPATI NO 178 TAHUN 2022
		CV Silwangi (1289483)	Rp 13.358.685,39							Rp 13.358.685,39	SKTJM 22 Juni 2022 SK BUPATI NO 178 TAHUN 2022
	Dinas Pendidikan	CV Putra Bahagia Sejahtera (1289476)	Rp 7.545.803,21							Rp 7.545.803,21	SK BUPATI NO 178 TAHUN 2022
		CV Dwi Karsa (1289477)	Rp 82.712.238,71							Rp 82.712.238,71	SKTJM 4 bulan (11 Juli 2022) SK BUPATI NO 178 TAHUN 2022
		CV Benum gemilang Mandiri (1289478)	Rp 6.812.455,86							Rp 6.812.455,86	SK BUPATI NO 178 TAHUN 2022
	Dinas Kesehatan	CV Hijrah Sukses (1289492)	Rp 20.227.576,08							Rp 20.227.576,08	SK BUPATI NO 178 TAHUN 2022
		CV Manggih Rahayu (1289493)	Rp 15.621.255,65							Rp 15.621.255,65	SKTJM 9 bulan (6 Maret 2022) SK BUPATI NO 178 TAHUN 2022
		CV Sagita (1289483)	Rp 16.901.730,66							Rp 16.901.730,66	SK BUPATI NO 178 TAHUN 2022



NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI KERUGIAN AWAL	KOREKSI NILAI KERUGIAN AWAL PER 31 DES 2024	TAMBAHAN SELAMA SMT I TAHUN 2025	TAMBAHAN SELAMA SMT II TAHUN 2025	TINDAK LANJUT TAHUN 2025		KOREKSI	NILAI TEMUAN PER 31 DESEMBER 2025	KET
							TANGGAL	NILAI STS	NILAI STS		
	TAHUN 2023		Rp -							Rp -	
20	Kekurangan Volume atas 56 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tiga OPD Senilai Rp257.877.309,32										
		TIM PELAKSANAAN SWAKELOLA (10424042)	Rp 6.257.230,00				01 November 2025	836.467,00		Rp -	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER BESERTA PERABITANNYA An
							10 Desember 2025	5.420.763,00			
		TIM PELAKSANAAN SWAKELOLA (10428788)	Rp 163.533,00				11 November 2025	Rp 163.533,00		Rp -	PEMBANGUNAN RUANG UKS BESERTA PERABOTANNYA An SMPN 6 PUJUT
21	Kekurangan volume pekerjaan dengan total nilai Rp1.269.901.116,77	PT. Aria Jaya Raya (10428587)	Rp 51.925.514,54				06 Januari 2025	10.000.000,00		-Rp 0,00	Pekerjaan peningkatan jalan kabupaten Paket I PEN
							26 Maret 2025	41.925.514,54			
		PT. Aria Jaya Raya (10428645)	Rp 228.192.740,26				26 Maret 2025	20.000.000,00		Rp 198.192.740,26	Pekerjaan peningkatan jalan kabupaten Paket II PEN
							06 Januari 2025	10.000.000,00			
		CV. Benika (10428679)	Rp 104.120.923,17							Rp 104.120.923,17	Rekonstruksi/peningkatan kapasitas struktur jalan ruas kawo-teruwal
		PT. Alam Bangun Infrastruktur (10428807)	Rp 23.985.788,84							Rp 23.985.788,84	Rehabilitasi jaringan irigasi DI paskar
		CV. Oqky Putra (10428810)	Rp 19.048.746,33							Rp 19.048.746,33	Rehabilitasi jaringan irigasi DI Embung Bengak
24	Dijumpai Kelebihan Pembayaran atas Pengadaan Kelengkapan Balai Penyuluhan KB senilai Rp17.084.375 (KB)	CV. DIAN LESTRAI (20475445)	Rp 200.000,00							Rp 200.000,00	
25	Dijumpai adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp.20.762.368 700/07/INS/RHS/2024/TT (Dinas Pariwisata)	CV. Gighi Giat Bersaudara	Rp 1.660.122,00				09 September 2025	Rp 590.000,00		Rp 1.070.122,00	
26	Dijumpai kelebihan bayar kepada pihak ketiga/penyedia sebesar Rp.26.430.525,68 700/05/INS/RHS/2024/TT (Dinas Pariwisata)	CV. Algi	Rp 13.409.478,03				04 September 2025	Rp 13.409.478,03		Rp -	
27	Dijumpai kemahalan harga atas pengadaan barang bantuan sosial senilai Rp.14.417.736 (700/01/INS/RHS/2024/Ket (Dinas Sosial))	CV. ORINARA BERKAH ABADI	Rp 808.784,00				26 Mei 2025	Rp 808.784,00		Rp -	
29	Memproses kelebihan pembayaran senilai Rp415.936.000,00 dan kekurangan denda keterlambatan senilai Rp11.523.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah	CV Argo Jaya Mandiri	Rp 17.571.000,00							Rp 17.571.000,00	
		CV Cipta Karya Cemerlang (10519317)	Rp 65.872.000,00							Rp 65.872.000,00	
		PT KcAM (10519326)	Rp 74.814.000,00						10.000.000,00	Rp 64.814.000,00	Pemb. Puskesmas Darek



NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI KERUGIAN AWAL	KOREKSI NILAI KERUGIAN AWAL PER 31 DES 2024	TAMBAHAN SELAMA SMT I TAHUN 2025	TAMBAHAN SELAMA SMT II TAHUN 2025	TINDAK LANJUT TAHUN 2025		KOREKSI NILAI STS	NILAI TEMUAN PER 31 DESEMBER 2025	KET
							TANGGAL	NILAI STS			
30	Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi sebesar Rp.17.356.760 (700/17/INS/RHS/2024/Ket (Dinas Kesehatan))	CV. Hardinata Raya	Rp 1.753.001,00							Rp 1.753.001,00	
		CV. Rizki Aulia	Rp 2.765.224,00							Rp 2.765.224,00	
		CV. Tirta Samalas	Rp 2.350.571,00							Rp 2.350.571,00	
		CV. Rafitari	Rp 1.232.919,00							Rp 1.232.919,00	
		CV. Satya Jaya Putri	Rp 4.488.964,00							Rp 4.488.964,00	
		CV. Nuansa Abadi	Rp 2.080.336,00							Rp 2.080.336,00	
		CV. Rima Cemerlang Abadi	Rp 2.685.745,00							Rp 2.685.745,00	
31	Terdapat kelebihan pembayaran pembangunan sumur bor Tahun Anggaran 2023 pada Dinas PUPR sebesar 464.466.906 700/08/INS/RHS/2024/TT tgl 31 Mei 2024 (Sumur bor)	CV. Anugerah Sarana Cipta (20503141)	Rp 1.459.960,00							Rp 1.459.960,00	Rp 410.143,00
		CV. Dasan Krida (20503178)	Rp 992.270,00							Rp 992.270,00	
		CV. Karsa Sejati (20503182)	Rp 735.141,00				15 Januari 2025	735.141,00		Rp -	
		CV. Rizki Aulia (20503203)	Rp 2.141.131,00				03 Juli 2025	Rp 2.008.861,00		Rp 132.270,00	
		CV. Karya Ergio Jaya (20503223)	Rp 3.536.584,00							Rp 3.536.584,00	
		CV. Tirta Samalas (20503268)	Rp 1.229.872,00					Rp 1.168.687,00		Rp 61.185,00	
		CV. Sinar Karya Bangsa (20503523)	Rp 1.085.360,00							Rp 1.085.360,00	
		CV. Jaya Abadi Lombok (20503526)	Rp 1.945.476,00	-			15 Januari 2025	Rp 1.945.476,00		Rp -	
		CV. Cahaya Sinar Abadi (20503530)	Rp 4.444.141,00				23 Januari 2025	Rp 2.700.000,00		Rp 1.744.141,00	
		CV. Mitra Andalan Sejahtera (20503534)	Rp 2.884.449,00							Rp 2.884.449,00	
		CV. Alam Raya Rinjani (20502552)	Rp 1.696.078,00				13 Januari 2025	Rp 780.178,00		Rp 915.900,00	
		CV. Atap Abadi (20503556)	Rp 300.000,00							Rp 300.000,00	
		CV. Karisma Bimaraya (20503560)	Rp 543.420,00				13 Januari 2025	Rp 300.000,00		Rp 243.420,00	
		CV. Hardinata Raya (20503565)	Rp 3.368.262,00							Rp 3.368.262,00	
		CV. Sinar Intan (20503568)	Rp 450.000,00							Rp 450.000,00	
		CV. Karya Baru (20503571)	Rp 595.369,00							Rp 595.369,00	
		CV. Agree Indar Utama (20503579)	Rp 180.742,00						Rp 90.371,00	Rp 90.371,00	
		CV. Wenza Karya (20503591)	Rp 1.882.727,00				07 Juli 2025	322.739,00		Rp -	
							07 Juli 2025	245.185,00			
							07 Juli 2025	300.218,00			
							07 Juli 2025	802.230,00			
							07 Juli 2025	212.355,00			
		CV. Indogeo Mandiri (20503598)	Rp 691.881,00				15 Januari 2025	Rp 691.881,00		Rp -	
		CV. Cahaya Sinar Abadi (20504429)	Rp 6.841.380,00				23 Januari 2025	Rp 1.419.470,00		Rp 5.421.910,00	
		CV. Anugerah Sarana Cipta (20504443)	Rp 18.024.598,00	Rp 130.627,00			06 Januari 2025	2.420.080,00		Rp 8.894.375,00	
							13 Januari 2025	1.000.000,00			
									1.163.500,00		
							22 Januari 2025	3.257.800,00			
									1.419.470,00		
		CV. Dasan Krida (20504459)	Rp 25.061.790,00				06 Januari 2025	1.396.200,00		Rp 12.240.020,00	
							13 Januari 2025	10.029.370,00			
							06 Januari 2025	1.396.200,00			
		CV. Karsa Sejati (20504468)	Rp 7.679.100,00	Rp 116.350,00			13 Januari 2025	2.838.940,00		Rp 1.140.230,00	
							15 Januari 2025	3.583.580,00			
		CV. Rizki Aulia (20504477)	Rp 22.548.630,00				03 Juli 2025	Rp 12.775.230,00		Rp 9.773.400,00	
		CV. Karya Ergio Jaya (20504479)	Rp 8.609.900,00							Rp 8.609.900,00	
		CV. Mitra Andalan Sejahtera (20504487)	Rp 22.618.440,00							Rp 22.618.440,00	
		CV. Tirta Samalas (20504501)	Rp 23.688.860,00					Rp 3.769.740,00		Rp 19.919.120,00	
		CV. Sinar Karya Bangsa (20504516)	Rp 9.680.320,00				21 Januari 2025	Rp 8.000.000,00		Rp 1.680.320,00	



NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI KERUGIAN AWAL	KOREKSI NILAI KERUGIAN AWAL PER 31 DES 2024	TAMBAHAN SELAMA SMT I TAHUN 2025	TAMBAHAN SELAMA SMT II TAHUN 2025	TINDAK LANJUT TAHUN 2025		KOREKSI	NILAI TEMUAN PER 31 DESEMBER 2025	KET
							TANGGAL	NILAI STS			
		CV. Jaya Abadi Lombok (20504534)	Rp 11.497.890,00					Rp 3.839.550,00		Rp 7.658.340,00	
		CV. Gigh Jaya Drilling (20504543)	Rp 1.279.850,00				29 Agustus 2025	Rp 1.279.850,00		Rp -	
		CV. Alam Raya Rinjani (20504557)	Rp 5.468.450,00							Rp 5.468.450,00	
		CV. Karisma Bimaraya (20504570)	Rp 11.658.270,00				13 Januari 2025	1.000.000,00		Rp 7.992.345,00	pembayaran untuk Pembangunan Sumur Bor di Kmp Harapan Kec. Praya
							13 Januari 2025	2.665.925,00			
		CV. Atap Abadi (20504583)	Rp 1.256.580,00							Rp 1.256.580,00	
		Bintang Timur Pahu (20504591)	Rp 759.700,00							Rp 759.700,00	
		CV. Hardinata Raya (20504767)	Rp 5.352.100,00							Rp 5.352.100,00	
		CV. Trikonindo (20505268)	Rp 9.005.490,00							Rp 9.005.490,00	
		Indogeo Hamdi (20505330)	Rp 1.279.850,00				15 Januari 2025	Rp 1.279.850,00		Rp -	
		Anugerah Juna (20506402)	Rp 1.279.850,00							Rp 1.279.850,00	
		CV. Sinar Intan (20506409)	Rp 7.795.450,00							Rp 7.795.450,00	
		CV. Bintang Timur (20506410)	Rp 3.793.010,00							Rp 3.793.010,00	
		CV. Karya Baru (20506427)	Rp 9.377.810,00				15 Januari 2025	Rp 1.396.200,00		Rp 7.981.610,00	
		CV. Titik Alam Serasi (20506430)	Rp 2.536.430,00							Rp 2.536.430,00	
		CV. Wenza Karya (20506449)	Rp 18.522.920,00				07 Juli 2025	Rp 18.522.920,00		Rp -	Di STS Lebih
		CV. Double M (20506475)	Rp 1.279.850,00				13 Januari 2025	Rp 1.279.850,00		Rp -	
		CV. Indogeo Mandiri Drill (20506495)	Rp 5.561.530,00				29 Agustus 2025	5.561.530,00		Rp -	
	Mempertanggungjawabkan kelebihan penyaluran dana BOP Kesetaraan Reguler Tahun 2023 untuk 154 (seratus lima puluh empat) peserta didik senilai Rp240.300.000 dengan cara menyetorkan ke rekening daerah	PKBM Generasi Soleh	Rp 240.300.000,00				28 Februari 2025	Rp 4.000.000,00		Rp 236.300.000,00	LHP Itjen
	Mempertanggungjawabkan kelebihan penyaluran dana BOP Kesetaraan Reguler Tahun 2023 untuk 175 (seratus tujuh puluh lima) peserta didik senilai Rp275.400.000 dengan cara menyetorkan ke rekening daerah	PKBM An-Nur	Rp 275.400.000,00				28 Februari 2025	Rp 10.000.000,00		Rp 265.400.000,00	
	Mempertanggungjawabkan kelebihan penyaluran dana BOP Kesetaraan Reguler Tahun 2023 untuk 158 (seratus lima puluh delapan) peserta didik senilai Rp284.400.000 dengan cara menyetorkan ke rekening daerah	PKBM Samudra Jaya	Rp 284.400.000,00				27 Februari 2025	Rp 40.000.000,00		Rp 244.400.000,00	
	Mempertanggungjawabkan kelebihan penyaluran dana BOP Kesetaraan Reguler Tahun 2023 untuk 160 (seratus enam puluh) peserta didik senilai Rp257.100.000 dengan cara menyetorkan ke rekening daerah	PKBM Mabadi Khaira Ummah	Rp 257.100.000,00							Rp 257.100.000,00	
	Mempertanggungjawabkan kelebihan penyaluran dana BOP Kesetaraan Reguler Tahun 2023 untuk 82 (delapan puluh dua) peserta didik senilai Rp143.000.000 dengan cara menyetorkan ke rekening daerah	PKBM Pemuda Cendikia	Rp 143.000.000,00							Rp 143.000.000,00	
	Mempertanggungjawabkan kelebihan penyaluran dana BOP Kesetaraan Reguler Tahun 2023 untuk 101 (seratus satu) peserta didik senilai Rp178.800.000 dengan cara menyetorkan ke rekening daerah	PKBM Al-Bukhari	Rp 178.800.000,00				04 Maret 2025	5.000.000,00		Rp 118.800.000,00	
							03 Oktober 2025	10.000.000,00			
							27 November 2025	20.000.000,00			
							23 Mei 2025	10.000.000,00			
							20 Desember 2025	15.000.000,00			
	Mempertanggungjawabkan kelebihan penyaluran dana BOP Kesetaraan Reguler Tahun 2023 untuk 158 (seratus lima puluh delapan) peserta didik senilai Rp278.500.000 dengan cara menyetorkan ke rekening daerah	PKBM Harum Jaya	Rp 278.500.000,00				07 Oktober 2025	Rp 2.500.000,00		Rp 276.000.000,00	



NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI KERUGIAN AWAL	KOREKSI NILAI KERUGIAN AWAL PER 31 DES 2024	TAMBAHAN SELAMA SMT I TAHUN 2025	TAMBAHAN SELAMA SMT II TAHUN 2025	TINDAK LANJUT TAHUN 2025		KOREKSI	NILAI TEMUAN PER 31 DESEMBER 2025	KET
							TANGGAL	NILAI STS	NILAI STS		
	Dinas PUPR										
		3									
		4 CV. Rawe Rahwana	Rp 5.820.000,00							Rp 5.820.000,00	TP 6 dan TP 9
		5 CV Putri Jaya	Rp 5.322.000,00							Rp 5.322.000,00	TP 6 dan TP 9
		6 CV Putri Jaya	Rp 4.856.000,00							Rp 4.856.000,00	TP 6 dan TP 9
		7 CV. Rawe Rahwana	Rp 10.718.000,00							Rp 10.718.000,00	TP 6 dan TP 9
		8 CV Nirwana Utama Construction	Rp 10.387.000,00							Rp 10.387.000,00	TP 6 dan TP 9
		9 CV Pabla Bangun Perkasa	Rp 16.027.000,00							Rp 16.027.000,00	TP 6 dan TP 9
		10 CV Parak Liku Muda	Rp 8.829.000,00							Rp 8.829.000,00	TP 6 dan TP 9
		12 CV Manggh Rahayu	Rp 8.210.000,00							Rp 8.210.000,00	TP 6 dan TP 9
		13 CV Wijaya Cipta Utama	Rp 4.922.000,00							Rp 4.922.000,00	TP 6 dan TP 9
		14 CV Gigh Jaya Drilling (10584803)	Rp 28.981.000,00				10 Desember 2025	Rp 15.000.000,00		Rp 13.981.000,00	TP 6 dan TP 9
		15 CV Titik Alam Serasi	Rp 10.074.000,00							Rp 10.074.000,00	TP 6 dan TP 9
		16 CV Abadi	Rp 5.164.000,00							Rp 5.164.000,00	TP 6 dan TP 9
		17 CV Abadi	Rp 7.357.000,00							Rp 7.357.000,00	TP 6 dan TP 9
		18 CV Karsa Sejati	Rp 21.421.000,00				15 Januari 2025	1.000.000,00		Rp 19.421.000,00	TP 6 dan TP 9
							30 September 2025	1.000.000,00			
		19 CV Tirta Samales	Rp 31.805.000,00				15 Januari 2025	Rp 10.000.000,00		Rp 21.805.000,00	TP 6 dan TP 9
		20 CV Rizki Aulia	Rp 38.482.000,00							Rp 38.482.000,00	TP 6 dan TP 9
		21 CV Metro Anggraini	Rp 41.206.000,00							Rp 41.206.000,00	TP 6 dan TP 9
		22 CV Tengker Menjulung	Rp 30.608.000,00				13 Januari 2025	20.000.000,00		Rp -	TP 6 dan TP 9
							31 Januari 2025	10.608.000,00			
		23 CV Anugerah Sarana Cipta	Rp 33.549.000,00							Rp 33.549.000,00	TP 6 dan TP 9
		24 CV Mitra Karya	Rp 29.004.000,00							Rp 29.004.000,00	TP 6 dan TP 9
		25 CV Wenza Karya	Rp 26.339.000,00							Rp 26.339.000,00	TP 6 dan TP 9
		27 CV Rully Putra	Rp 38.249.000,00				31 Januari 2025	Rp 31.929.000,00		Rp 6.320.000,00	TP 6 dan TP 9
		28 CV Trikonindo	Rp 30.868.000,00				18 November 2025	Rp 2.500.000,00		Rp 28.368.000,00	TP 6 dan TP 9
		30 CV Anugrah Karya Rizqi	Rp 18.272.000,00				28 April 2025	4.000.000,00		Rp 12.272.000,00	TP 6 dan TP 9
							30 September 2025	2.000.000,00			
		31 CV Rully Putra	Rp 16.523.000,00							Rp 16.523.000,00	TP 6 dan TP 9
		32 CV Dasan Krida	Rp 16.505.000,00							Rp 16.505.000,00	TP 6 dan TP 9
		33 CV Bintang Nusantara (10584821)	Rp 7.723.000,00				16 Juli 2025	62.520.000,00		Rp -	TP 6 dan TP 9
		34 CV Bintang Nusantara	Rp 12.373.000,00				16 Juli 2025	67.433.000,00		Rp -	TP 6 dan TP 9
		35 CV Metro Anggraini	Rp 14.181.000,00							Rp -	TP 6 dan TP 9
		36 CV Metro Anggraini	Rp 11.306.000,00							Rp -	TP 6 dan TP 9
		37 CV Putri Family	Rp 16.132.000,00							Rp 16.132.000,00	TP 6 dan TP 9
		38 CV Putri Family	Rp 15.141.000,00							Rp 15.141.000,00	TP 6 dan TP 9
		39 CV Bintang Nusantara	Rp 8.944.000,00							Rp -	TP 6 dan TP 9
		40 CV Bintang Nusantara	Rp 10.960.000,00							Rp -	TP 6 dan TP 9
		41 CV Metro Anggraini	Rp 11.765.000,00							Rp -	TP 6 dan TP 9
		42 CV Metro Anggraini	Rp 9.686.000,00							Rp -	TP 6 dan TP 9
		43 CV Cahaya Fajar	Rp 26.509.000,00				23 Januari 2025	Rp 26.509.000,00		Rp -	TP 6 dan TP 9
		44 CV Metro Anggraini	Rp 10.249.000,00							Rp -	TP 6 dan TP 9
		45 CV Metro Anggraini	Rp 10.246.000,00							Rp -	TP 6 dan TP 9
		46 CV Bintang Nusantara	Rp 12.612.000,00							Rp -	TP 6 dan TP 9
		47 CV Bintang Nusantara	Rp 9.908.000,00							Rp -	TP 6 dan TP 9
		48 CV Karunia	Rp 17.990.000,00				15 Januari 2025	2.000.000,00		Rp 14.990.000,00	TP 6 dan TP 9
							30 September 2025	1.000.000,00			
		49 CV Abadi	Rp 18.204.000,00							Rp 18.204.000,00	TP 6 dan TP 9



NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI KERUGIAN AWAL	KOREKSI NILAI KERUGIAN AWAL PER 31 DES 2024	TAMBAHAN SELAMA SMT I TAHUN 2025	TAMBAHAN SELAMA SMT II TAHUN 2025	TINDAK LANJUT TAHUN 2025		KOREKSI	NILAI TEMUAN PER 31 DESEMBER 2025	KET
							TANGGAL	NILAI STS			
		CV Nusantara	Rp 4.750.000,00							Rp 4.750.000,00	TP 9
		CV Manggh Rahayu	Rp 4.750.000,00							Rp 4.750.000,00	TP 9
		CV Rizki Aulia	Rp 4.750.000,00							Rp 4.750.000,00	TP 9
		CV Sinar Perkasa	Rp 4.750.000,00							Rp 4.750.000,00	TP 9
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV Indowell	Rp 21.325.000,00				09 Oktober 2025	Rp 7.000.000,00		Rp 14.325.000,00	TP 20
	Kekurangan Volume, Ketidaktepatan Pembebanan Biaya Umum, dan Ketidaksesuaian Spesifikasi atas 32 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tiga SKPD Seluruhnya Senilai Rp382.960.000,00										
		cv Pitug Angen (10584849)								Rp -	di piutang tgr 2024 lunas, di sikad belum
	Dinas PUPR									Rp -	
		7 CV Inaq Amaq	Rp 4.831.000,00				10 Februari 2025	Rp 4.831.000,00		Rp -	TP 3 dan TP 8
		8 CV Berkat Doa	Rp 6.388.000,00							Rp 6.388.000,00	TP 3 dan TP 8
		9 CV Tunjung Mekar Indah	Rp 5.117.000,00				21 Januari 2025	Rp 2.000.000,00		Rp 3.117.000,00	TP 3 dan TP 8
		10 CV Tunjung Mekar Indah	Rp 6.132.000,00				24 Februari 2025	Rp 1.000.000,00		Rp 5.132.000,00	TP 3 dan TP 8
		11 CV Pare Pandan Indah	Rp 13.968.000,00				21 Januari 2025	Rp 2.500.000,00		Rp 11.468.000,00	TP 3 dan TP 8
		CV Inaq Amaq	Rp 4.750.000,00				10 Februari 2025	Rp 4.750.000,00		Rp -	TP 8
		CV Inaq Amaq	Rp 4.750.000,00				10 Februari 2025	Rp 4.750.000,00		Rp -	TP 8
		CV Sinar Hidup	Rp 4.750.000,00							Rp 4.750.000,00	TP 8
		CV David Konstruksi	Rp 4.750.000,00				24 Januari 2025	Rp 1.000.000,00		Rp 3.750.000,00	TP 8
		CV Pare Pandan Indah	Rp 4.750.000,00				21 Januari 2025	Rp 2.500.000,00		Rp 2.250.000,00	TP 8
		CV Pare Pandan Indah	Rp 4.750.000,00				21 Januari 2025	Rp 2.500.000,00		Rp 2.250.000,00	TP 8
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CV Artha Graha Asri	Rp 4.028.000,00							Rp 4.028.000,00	TP 4
		CV Seruni								Rp -	TP 4
		CV Fina Abadi								Rp -	TP 4
		CV Fina Abadi								Rp -	TP 4
		CV Alif Meviana								Rp -	TP 4
		CV Seruni								Rp -	TP 4
		CV Tunjung Tilah								Rp -	TP 4
		CV Abadi	Rp 3.144.000,00							Rp 3.144.000,00	TP 4
		CV Mantap Abadi								Rp -	TP 4
		CV Sabila Maju	Rp 2.531.000,00							Rp 2.531.000,00	TP 4
	Dinas Perindag	PT Bintang Perdana Lombok	Rp 56.092.727,44				08 Januari 2025	44.353.000,00		Rp -	TP 11
							22 Januari 2025	11.076.225,43			
							12 Maret 2025	663.502,01			
	DPMPTSP	PT Bintang Perdana Lombok	Rp 14.922.215,01				18 Juni 2025	3.459.170,01	11.463.045,00	Rp -	TP 11
	Sekretariat DPRD	PT Bintang Perdana Lombok	Rp 4.620.169,00				06 Maret 2025	4.619.169,00		Rp -	TP 11 (Setelah LHP)
							23 Juni 2025	1.000,00			
	Pekerjaan Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Keamanan melalui Katalog Elektronik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Belum Sesuai Ketentuan	PT Sakra Jaya Utama	Rp 43.255.474,41				10 Desember 2025	43.255.474,41		Rp -	TP 21 (setelah LHP). Perbedaan dengan TP, Terjadi perubahan nilai yang harus di setor. 137,4 juta dianggap pemborosan, tidak dilakukan penyetoran ke kas daerah
	Audit TT Pembangunan Sintang Park (700/12/INS/RHS/2024/TT	CV. Bunut Tunjang (20584950)			38.300.000,00		06 Februari 2025	2.000.000,00		Rp 35.050.000,00	
							19 Juni 2025	1.000.000,00			
							10 November 2025	250.000,00			
	Audit LK 2024 Pemeriksaan 2025	CV. Tunjung Tilah			66.113.000,00		30 Juni 2025	2.000.000,00		Rp 63.613.000,00	
							10 November 2025	500.000,00			
		CV. Satir Sarkas			21.585.000,00		06 Februari 2025	1.200.000,00		Rp 20.135.000,00	
							10 November 2025	250.000,00			
		CV. Echa Salwa			32.764.000,00		06 Februari 2025	1.500.000,00		Rp 30.014.000,00	



NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NILAI KERUGIAN AWAL	KOREKSI NILAI KERUGIAN AWAL PER 31 DES 2024	TAMBAHAN SELAMA SMT I TAHUN 2025	TAMBAHAN SELAMA SMT II TAHUN 2025	TINDAK LANJUT TAHUN 2025		KOREKSI	NILAI TEMUAN PER 31 DESEMBER 2025	KET
							TANGGAL	NILAI STS			
							19 Juni 2025	1.000.000,00			
							10 November 2025	250.000,00			
		CV. Dinamika Nusantara			37.612.000,00		06 Februari 2025	Rp 2.000.000,00		Rp 35.362.000,00	
							10 November 2025	250.000,00			
		CV. Bahana Gemilang			29.505.000,00		06 Februari 2025	Rp 1.300.000,00		Rp 27.955.000,00	
							10 November 2025	250.000,00			
		CV. Antos Pasemag			56.926.000,00		07 Februari 2025	2.500.000,00		Rp 53.926.000,00	
							10 November 2025	500.000,00			
		CV. Bunut Tunjang			24.285.000,00		06 Februari 2025	2.000.000,00		Rp 21.035.000,00	
							19 Juni 2025	1.000.000,00			
							10 November 2025	250.000,00			
		CV. Echa Salwa			36.150.000,00		06 Februari 2025	1.500.000,00		Rp 33.400.000,00	
							19 Juni 2025	1.000.000,00			
							10 November 2025	250.000,00			
	Dikbud	CV Sagita	Rp 10.826.000,00				24 Oktober 2025	Rp 10.826.000,00		Rp -	
	Dikbud	PT Tiga Tujuh Sejahtera	Rp 10.107.000,00				03 Desember 2025	1.249.000,00		Rp -	
	Dikbud	Belum memiliki SKTJM	Rp 45.367.000,00				08 Desember 2025	8.858.000,00		Rp -	
								Rp 45.367.000,00			
	Dikbud	PT Tiga Tujuh Sejahtera (10624453)	Rp 1.751.000,00				03 Desember 2025	Rp 1.751.000,00		Rp -	
	Perindag	CV. Carbonat Inti Media	Rp 29.271.000,00				09 Mei 2025	Rp 14.390.000,00		Rp -	
	Perindag	Belum memiliki SKTJM	Rp 14.390.000,00				04 Juli 2025	Rp 29.271.000,00		Rp -	
	RSUD	CV. Putra Menara Pratama	Rp 388.569.000,00				15 Juli 2025	50.000.000,00		Rp -	
	RSUD	Belum memiliki SKTJM	Rp 5.568.000,00				13 Agustus 2025	238.569.000,00		Rp -	
							14 Juli 2025	100.000.000,00		Rp -	
								Rp 5.568.000,00			
	PUPR	CV. Putra Menara Pratama	Rp 44.298.000,00				04 Desember 2025	Rp 44.298.000,00		Rp -	
	PUPR	CV Benum Gemilang Mandiri	Rp 9.410.000,00				20 Juni 2025	4.000.000,00		Rp -	
		Belum memiliki SKTJM	Rp 57.826.000,00				18 November 2025	Rp 5.410.000,00		Rp -	
								Rp 57.826.000,00			
		LKSA Nurul Mala Abadi			22.000.000,00		15 Mei 2025	15.000.000,00		Rp -	
							26 Mei 2025	5.000.000,00			
							11 Agustus 2025	2.000.000,00			
		Yayasan Tunas Mekar			48.800.000,00		15 Desember 2025	5.000.000,00		Rp 43.800.000,00	
	DPUPR	Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Belanja Modal pada Delapan SKPD				\$ 666.494.000,00				Rp 666.494.000,00	
	DIKES					\$ 104.103.000,00				Rp 104.103.000,00	
	DISDIKBUD					\$ 82.276.000,00				Rp 82.276.000,00	
	DINAS PERINDAG					\$ 34.514.000,00				Rp 34.514.000,00	
	BAPPERIDA					\$ 9.806.000,00				Rp 9.806.000,00	
	RSUD PRAYA					\$ 32.428.000,00				Rp 32.428.000,00	
	DISPORA					\$ 5.718.000,00				Rp 5.718.000,00	
	DISKOP					\$ 4.232.000,00				Rp 4.232.000,00	
	Pengembalian belanja hibah	Sekretariat Daerah				\$ 140.000.000,00				Rp 140.000.000,00	
	TOTAL		Rp 8.922.365.589,83	Rp 14.277,00	Rp 414.040.000,00	Rp 1.079.571.000,00		Rp 1.425.970.316,43	Rp 24.136.386,00	Rp 8.965.884.164,40	



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	Per 31 Des 2025 (Rp)	Penambahan/Pengurangan		Per 31 Des 2024 (Rp)
				Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7
1		Dinas Pendidikan	0,00			0,00
2		Dinas Kesehatan	0,00			
3		Rumah Sakit Umum Daerah	0,00			
4		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00			
5		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00			
6		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00			
7		Satuan Polisi Pamong Praja	0,00			
8		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00			
9		Dinas Sosial	0,00			
10		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00			
11		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00			
12		Dinas Ketahanan Pangan	0,00			
13		Dinas Lingkungan Hidup	0,00			
14		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00			
15		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00			
16		Dinas Perhubungan	0,00			
17	Aplikasi SIMADU	Dinas Komunikasi dan Informatika	91.150.000,00	91.150.000,00		
	Aplikasi SATU DATA	Dinas Komunikasi dan Informatika	32.350.000,00	32.350.000,00		
	Aplikasi Mobile /Desktop	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.050.000,00	10.050.000,00		
	Aplikasi CSRIT	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.050.000,00	10.050.000,00		
18		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	0,00			
19		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00			
20		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00			
21		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00			
22		Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00			
23		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00			
24		Dinas Pertanian	0,00			
25		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00			
26		PPKD	0,00			
27		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00			
28		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00			
29		Sekretariat Daerah	0,00			

No	Uraian	SKPD	Per 31 Des 2025 (Rp)	Penambahan/Pengurangan		Per 31 Des 2024 (Rp)
				Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7
30		Sekretariat DPRD	0,00			
31		Kantor Camat Praya	0,00			
32		Kantor Camat Praya Tengah	0,00			
33		Kantor Camat Praya Barat	0,00			
34		Kantor Camat Praya Barat Daya	0,00			
35		Kantor Camat Praya Timur	0,00			
36		Kantor Camat Pujut	0,00			
37		Kantor Camat Janapria	0,00			
38		Kantor Camat Kopang	0,00			
39		Kantor Camat Batukliang	0,00			
40		Kantor Camat Batukliang Utara	0,00			
41		Kantor Camat Pringgarata	0,00			
42		Kantor Camat Jonggat	0,00			
43		Inspektorat Daerah	0,00			
44		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00			
45		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,00			
46		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00			
47		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00			
	Jumlah		143.600.000,00		0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
RINCIAN ASET TETAP DALAM PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2025

No	Keterangan	Saldo awal			Penyusutan Per 31 Desember 2025	Saldo Akhir	
		Nilai Perolehan	Penyusutan per 31 Desember 2024	Nilai TGR Per 31 Des 2024		Saldo TGR Sebelum Penyusutan Per 31 Desember 2025	Saldo Netto TGR Per 31 Desember 2025
1	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	7.260.000,00	6.201.250,00	1.058.750,00	6.201.250,00	7.260.000,00	1.058.750,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	-	-	-	-	-
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.500.000,00	24.285.714,00	3.214.286,00	24.285.714,00	27.500.000,00	3.214.286,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-
26	PPKD	-	-	-	-	-	-
27	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-	-	-
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-
29	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-
30	Sekretariat DPRD	21.825.000,00	21.451.250,00	373.750,00	21.451.250,00	21.825.000,00	373.750,00
31	Kantor Camat Praya	-	-	-	-	-	-

No	Keterangan	Saldo awal			Penyusutan Per 31 Desember 2025	Saldo Akhir	
		Nilai Perolehan	Penyusutan per 31 Desember 2024	Nilai TGR Per 31 Des 2024		Saldo TGR Sebelum Penyusutan Per 31 Desember 2025	Saldo Netto TGR Per 31 Desember 2025
32	Kantor Camat Praya Tengah	-	-	-	-	-	-
33	Kantor Camat Praya Barat	-	-	-	-	-	-
34	Kantor Camat Praya Barat Daya	-	-	-	-	-	-
35	Kantor Camat Praya Timur	-	-	-	-	-	-
36	Kantor Camat Pujut	-	-	-	-	-	-
37	Kantor Camat Janapria	-	-	-	-	-	-
38	Kantor Camat Kopang	-	-	-	-	-	-
39	Kantor Camat Batukliang	-	-	-	-	-	-
40	Kantor Camat Batukliang Utara	-	-	-	-	-	-
41	Kantor Camat Pringgarata	-	-	-	-	-	-
42	Kantor Camat Jonggat	-	-	-	-	-	-
43	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-
44	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-
45	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	420.486.922,00	-	420.486.922,00	-	420.486.922,00	420.486.922,00
47	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	477.071.922,00	51.938.214,00	425.133.708,00	51.938.214,00	477.071.922,00	425.133.708,00

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR ASET TETAP DALAM PROSES PENGHAPUSAN
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31 Desember 2024	Penambahan		pengurangan			Saldo Per 31 Desember 2025	Penyusutan s/d 2024	Reklas Penyusutan dari Aset Tetap	Jumlah penyusutan per 31 Desember 2025	Nilai Buku Per 31 Desember 2025
			Reklas dari Aset RB	Reklas dari Aset Tetap	Penghapusan	Koreksi	Hibah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan	15.767.317.432,15						15.767.317.432,15	15.173.258.344,15		15.173.258.344,15	594.059.088,00
2	Dinas Kesehatan	2.218.272.137,00						2.218.272.137,00	493.297.104,00		493.297.104,00	1.724.975.033,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	29.600.000,00						29.600.000,00	29.600.000,00		29.600.000,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.886.934.000,00						1.886.934.000,00	-		-	1.886.934.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-						-	-		-	-
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.250.000,00						31.250.000,00	31.250.000,00		31.250.000,00	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-						-	-		-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	53.200.000,00						53.200.000,00	53.200.000,00		53.200.000,00	-
9	Dinas Sosial	-						-	-		-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	160.000.000,00						160.000.000,00	160.000.000,00		160.000.000,00	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-						-	-		-	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-						-	-		-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	10.875.000,00						10.875.000,00	10.875.000,00		10.875.000,00	-
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-						-	-		-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-						-	-		-	-
16	Dinas Perhubungan	927.886.453,00						927.886.453,00	191.437.748,00		191.437.748,00	736.448.705,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	43.725.000,00						43.725.000,00	43.725.000,00		43.725.000,00	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	-						-	-		-	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-						-	-		-	-
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-						-	-		-	-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.506.780.450,00						1.506.780.450,00	-		-	1.506.780.450,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	-						-	-		-	-
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-						-	-		-	-
24	Dinas Pertanian	5.121.706.580,00						5.121.706.580,00	275.176.166,00		275.176.166,00	4.846.530.414,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-						-	-		-	-
26	PPKD	-						-	-		-	-
27	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-						-	-		-	-
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-						-	-		-	-
29	Sekretariat Daerah	3.085.286.358,00						3.085.286.358,00	2.501.623.908,00		2.501.623.908,00	583.662.450,00
30	Sekretariat DPRD	754.003.000,00						754.003.000,00	684.531.000,00		684.531.000,00	69.472.000,00
31	Kantor Camat Praya	-						-	-		-	-
32	Kantor Camat Praya Tengah	-						-	-		-	-
33	Kantor Camat Praya Barat	-						-	-		-	-
34	Kantor Camat Praya Barat Daya	-						-	-		-	-
35	Kantor Camat Praya Timur	-						-	-		-	-
36	Kantor Camat Pujut	-						-	-		-	-
37	Kantor Camat Janapria	-						-	-		-	-
38	Kantor Camat Kopang	-						-	-		-	-
39	Kantor Camat Batukliang	-						-	-		-	-
40	Kantor Camat Batukliang Utara	-						-	-		-	-
41	Kantor Camat Pringgarata	-						-	-		-	-

NO	SKPD	Saldo Awal Per 31 Desember 2024	Penambahan		pengurangan			Saldo Per 31 Desember 2025	Penyusutan s/d 2024	Reklas Penyusutan dari Aset Tetap	Jumlah penyusutan per 31 Desember 2025	Nilai Buku Per 31 Desember 2025
			Reklas dari Aset RB	Reklas dari Aset Tetap	Penghapusan	Koreksi	Hibah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Kantor Camat Jonggat	-						-	-		-	
43	Inspektorat Daerah	-						-	-		-	
44	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-						-	-		-	
45	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	173.593.508,34						173.593.508,34	97.532.333,34		97.532.333,34	76.061.175,00
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-						-	-		-	
47	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-						-	-		-	
	JUMLAH	31.770.429.918,49	-	-	-		-	31.770.429.918,49	19.745.506.603,49	-	19.745.506.603,49	12.024.923.315,00

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	Pengurangan				Penambahan		SALDO PER 31 DESEMBER 2024
				Reklas ke Aset Tetap	Mutasi ke SKPD Lain	Koreksi	Di hibahkan	Reklas dari KIB (Aset Tetap)	DED baru, Dari Bajas dan Koreksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DINAS PENDIDIKAN	93.905.400,00								93.905.400,00
	DED perencanaan pembangunan kantor Disdik		87.905.400,00							87.905.400,00
	DED perencanaan penataan Halaman SMP 1 Praya Timur		6.000.000,00							6.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	45.416.000,00								45.416.000,00
	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Batunyalala		-							-
	Perencanaan Pembangunan Puskesmas Batujangkli		-							-
	PerencanaanPemb/pustu		45.416.000,00							45.416.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.712.033.000,00								1.712.033.000,00
	Penyusunan DED Pembangunan Mall Pelayanan Publik		1.712.033.000,00							1.712.033.000,00
	Penyusunan DED Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Paket II (2021)		-							-
	Penyusunan DED Rehab Jaringan Irigasi Paket I (2021)		-							-
	Penyusunan DED Rehab Jaringan Irigasi Paket II (2021)		-							-
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Paket I		-							-
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Paket I 2019		-							-
4	DINAS PERTANIAN	79.952.400,00								79.952.400,00
	Perencanaan Rehap Balai Penyuluh		79.952.400,00							79.952.400,00
5	DINAS PERMUKIMAN	91.979.000,00								91.979.000,00
	Perencanaan PJU		91.979.000,00							91.979.000,00
6	DINAS TENAGA KERJA	154.030.800,00								154.030.800,00
	DED Pembangunan gedung worksof BLK		154.030.800,00							154.030.800,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	31.650.000,00								31.650.000,00
	biaya perencanaan jalan desa bile tengah yang fisiknya tidak dilaksanakan karena alasan kemanan		31.650.000,00							31.650.000,00
8	KECAMATAN PRAYA	-								-
	Pembangunan di Kelurahan Perapen		-							-
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-								-
	Rehab Gedung sekolah		-	-						-
	Rehab Jembatan Wage ngolak		-	-						-
10	KB									37.246.000,00
	Biaya Perencanaan Pembangunan Balai Penyuluh KB Kec Praya Timur	37.246.000,00	37.246.000,00							37.246.000,00
	Jumlah	2.246.212.600,00	2.246.212.600,00	-	-	-	-	-	-	2.246.212.600,00

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR ASET DALAM KONDISI RUSAK BERAT
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam Rupiah)

No	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 sebelum penyusutan	Penyusutan s/d th 2024	Penyusutan s.d 2025	SALDO PER DESEMBER 2024 Audited
			Reklas dari TGR	Hibah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan	14.195.493.181,78			24.967.288.404,17	10.771.795.222,39	10.771.795.222,39	24.967.288.404,17
2	Dinas Kesehatan	1.018.539.176,07			1.604.087.182,00	585.548.005,93	585.548.005,93	1.604.087.182,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	617.196.079,39			22.203.282.197,39	21.586.086.118,00	21.586.086.118,00	22.203.282.197,39
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-			562.035.000,00	562.035.000,00	562.035.000,00	562.035.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-			107.070.000,00	107.070.000,00	107.070.000,00	107.070.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-			-	-	-	-
9	Dinas Sosial	-			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	78.025.500,00			244.965.000,00	166.939.500,00	166.939.500,00	244.965.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-			-	-	-	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-			55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	-			139.959.000,00	139.959.000,00	139.959.000,00	139.959.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-			-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(0,00)			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
16	Dinas Perhubungan	67.843.340,00			2.133.431.182,00	2.065.587.842,00	2.065.587.842,00	2.133.431.182,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-			-	-	-	-
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	-			99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-			-	-	-	-
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-			-	-	-	-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-			27.150.000,00	27.150.000,00	27.150.000,00	27.150.000,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.808.300,00			59.451.000,00	25.642.700,00	25.642.700,00	59.451.000,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-			-	-	-	-
24	Dinas Pertanian	1.805.959.800,00			1.957.259.800,00	151.300.000,00	151.300.000,00	1.957.259.800,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	41.400.000,00			110.890.000,00	69.490.000,00	69.490.000,00	110.890.000,00
26	PPKD	-			-	-	-	-
27	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-			-	-	-	-
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			-	-	-	-
29	Sekretariat Daerah	283.592.333,00		11.500.000,00	3.510.785.925,97	3.227.193.592,97	3.227.193.592,97	3.522.285.925,97
30	Sekretariat DPRD	155.016,00			724.633.302,00	724.478.286,00	724.478.286,00	724.633.302,00
31	Kantor Camat Praya	-			17.974.000,00	17.974.000,00	17.974.000,00	17.974.000,00
32	Kantor Camat Praya Tengah	-			-	-	-	-
33	Kantor Camat Praya Barat	-			-	-	-	-
34	Kantor Camat Praya Barat Daya	-			25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
35	Kantor Camat Praya Timur	-			-	-	-	-
36	Kantor Camat Pujut	1.454.165,00			3.800.000,00	2.345.835,00	2.345.835,00	3.800.000,00
37	Kantor Camat Janapria	14.546.560,00			71.564.000,00	57.017.440,00	57.017.440,00	71.564.000,00



No	SKPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 sebelum penyusutan	Penyusutan s/d th 2024	Penyusutan s.d 2025	SALDO PER DESEMBER 2024 Audited
			Reklas dari TGR	Hibah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Kantor Camat Kopang	-			6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
39	Kantor Camat Batukliang	-			16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
40	Kantor Camat Batukliang Utara	-			-	-	-	-
41	Kantor Camat Pringgarata	-			23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
42	Kantor Camat Jonggat	-			19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
43	Inspektorat Daerah	-			103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00
44	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-			152.700.000,00	152.700.000,00	152.700.000,00	152.700.000,00
45	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	35.321.429,72			257.923.404,17	222.601.974,45	222.601.974,45	257.923.404,17
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-			379.470.000,00	379.470.000,00	379.470.000,00	379.470.000,00
47	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
48	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-			-	-	-	-
	Jumlah	18.193.334.880,96	-	11.500.000,00	59.664.719.397,70	41.471.384.516,74	41.471.384.516,74	59.676.219.397,70



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR UTANG PFK
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Per 31 Des 2025	Debet				Kredit			Per 31 Des 2024
			Koreksi/Reklas ke Utang Lainnya	Penghapusan	pembayaran	Jumlah	Koreksi	Invoice/ dipersamakan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Pendidikan	212.700.331,00	-	-	52.423.942,77	52.423.942,77	-	212.700.331,00	212.700.331,00	52.423.942,77
	TKN	-				-			-	
	SDN	83.595.208,00			44.439.951,04	44.439.951,04		83.595.208,00	83.595.208,00	44.439.951,04
	SMPN	129.105.123,00			7.983.991,73	7.983.991,73		129.105.123,00	129.105.123,00	7.983.991,73
2	Dinas Kesehatan	25.049.024,00	-	-	13.180.433,00	13.180.433,00	-	25.049.024,00	25.049.024,00	13.180.433,00
	Utang PPh 21 Puskesmas	4.443.354,00	-	-	131.500,00	131.500,00	-	4.443.354,00	4.443.354,00	131.500,00
	Puskesmas Mujur	4.443.354,00				-		4.443.354,00	4.443.354,00	-
	Puskesmas Ganti	-			47.600,00	47.600,00			-	47.600,00
	Puskesmas Praya BLUD	-			83.900,00	83.900,00			-	83.900,00
	Utang PPh 22 Puskesmas	5.820.173,00	-	-	2.843.773,00	2.843.773,00	-	5.820.173,00	5.820.173,00	2.843.773,00
	Puskesmas Langko	202.201,00			1.063.550,00	1.063.550,00		202.201,00	202.201,00	1.063.550,00
	Puskesmas Tanak Beak	-			63.274,00	63.274,00			-	63.274,00
	Puskesmas Ganti	-			678.063,00	678.063,00			-	678.063,00
	Puskesmas Janapria BLUD	166.635,00			383.497,00	383.497,00		166.635,00	166.635,00	383.497,00
	Puskesmas Puyung BLUD	-			133.191,00	133.191,00			-	133.191,00
	Puskesmas Aik Darek BLUD	-			56.486,00	56.486,00			-	56.486,00
	Puskesmas Mujur	4.800.700,00			136.426,00	136.426,00		4.800.700,00	4.800.700,00	136.426,00
	Puskesmas Mangkung	650.637,00			74.554,00	74.554,00		650.637,00	650.637,00	74.554,00
	Puskesmas Teruwai	-			63.800,00	63.800,00			-	63.800,00
	Puskesmas Teratak	-			154.101,00	154.101,00			-	154.101,00
	Puskesmas Wajegeseng	-			36.831,00	36.831,00			-	36.831,00
	Utang PPh 23	142.205,00	-	-	436.025,00	436.025,00	-	142.205,00	142.205,00	436.025,00
	Puskesmas Ganti	-			436.025,00	436.025,00			-	436.025,00
	Puskesmas Mujur	142.205,00						142.205,00	142.205,00	-
	Utang PPN	14.643.292,00	-	-	9.769.135,00	9.769.135,00	-	14.643.292,00	14.643.292,00	9.769.135,00
	Puskesmas Teratak	-			1.130.077,00	1.130.077,00			-	1.130.077,00
	Puskesmas Wajegeseng	-			270.095,00	270.095,00			-	270.095,00
	Puskesmas Tanak Beak	-			464.011,00	464.011,00			-	464.011,00
	Puskesmas Aik Darek BLUD	-			414.227,00	414.227,00			-	414.227,00
	Puskesmas Puyung BLUD	-			976.731,00	976.731,00			-	976.731,00
	Puskesmas Janapria BLUD	1.221.990,00			2.812.309,00	2.812.309,00		1.221.990,00	1.221.990,00	2.812.309,00
	Puskesmas Ganti	-			1.803.601,00	1.803.601,00			-	1.803.601,00
	Puskesmas Mujur	7.167.154,00			1.000.455,00	1.000.455,00		7.167.154,00	7.167.154,00	1.000.455,00
	Puskesmas Mangkung	4.771.337,00			546.729,00	546.729,00		4.771.337,00	4.771.337,00	546.729,00



NO	Uraian	Per 31 Des 2025	Debet				Kredit			Per 31 Des 2024
			Koreksi/Reklas ke Utang Lainnya	Penghapusan	pembayaran	Jumlah	Koreksi	Invoice/ dipersamakan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Puskesmas Langko	1.482.811,00						1.482.811,00	1.482.811,00	-
	Puskesmas Teruwai	-			350.900,00	350.900,00			-	350.900,00
3	RSUD Praya	812.998.364,00	-	-	677.247.090,00	677.247.090,00	-	812.998.364,00	812.998.364,00	677.247.090,00
	Utang iuran Jamkes	-			-	-			-	-
	Utang PFK PPn	366.379.148,00			553.033.876,00	553.033.876,00		366.379.148,00	366.379.148,00	553.033.876,00
	Utang PFK PPh Pasal 21	392.255.558,00			48.202.800,00	48.202.800,00		392.255.558,00	392.255.558,00	48.202.800,00
	Utang PFK PPh Pasal 22	29.037.722,00			73.563.598,00	73.563.598,00		29.037.722,00	29.037.722,00	73.563.598,00
	Utang PFK PPh Pasal 23	25.325.936,00			2.446.816,00	2.446.816,00		25.325.936,00	25.325.936,00	2.446.816,00
		-				-			-	
	TOTAL	1.050.747.719,00	-	-	742.851.465,77	742.851.465,77	-	1.050.747.719,00	1.050.747.719,00	742.851.465,77



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR UTANG PINJAMAN DARI LEMBAGA KEUANGAN BANK (LKB)-BUMN-JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
2.1.03	Utang Pinjaman Jangka Pendek				
2.1.03.02	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)				
2.1.03.02.01	Utang Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek				
2.1.03.02.01.0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek				
	Pinjaman Jangka pendek BLUD RSUD Praya Kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cab. Praya	4.950.317.300,00			4.950.317.300,00
	Realisasi Pinjaman BLUD RSUD Periode Bulan Maret s.d Desember 2025		26.526.811.190,00		31.477.128.490,00
	Realisasi Pembayaran Pinjaman Periode Februari s.d Bulan November 2025			23.449.007.490	8.028.121.000,00
	JUMLAH	4.950.317.300,00	26.526.811.190,00	23.449.007.490,00	8.028.121.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024

KODE AKUN	URAIAN	Akun terkait	SKPD	Per 31 Des 2025	Debet			Kredit			Per 31 Des 2024
					Koreksi	Pendapatan LO	Jumlah	MoU Baru	Koreksi	Jumlah	
2.1.05.04.01.0004	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja										
	1 Sewa Tanah Desa Mantang	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	BPKAD	7.500.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00			-	13.500.000,00
	2 Sewa Tanah Desa Aik Darek	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	BPKAD	7.500.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00			-	13.500.000,00
2.1.05.04.01.0002	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan										
	1 Sewa Lahan untuk Gerai ATM an Bank NTB Syariah - Depan Kantor Bupati Baru	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	BPKAD	-		13.500.000,00	13.500.000,00			-	13.500.000,00
	2 Sewa Lahan untuk Gerai ATM an Bank NTB Syariah-Kuta	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	BPKAD	3.937.500,00		6.750.000,00	6.750.000,00			-	10.687.500,00
	3 Sewa Toko Inten Berlian (Toko)	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	BPKAD	4.975.333,33		3.512.000,00	3.512.000,00			-	8.487.333,33
	4 p	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	BPKAD	1.913.916,67		1.351.000,00	1.351.000,00			-	3.264.916,67
	5 Pendapatan di terima dimuka atas Retribusi Pemak Kekay Da Sewa Kolam Ikan (Usaha Perikanan)	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	Disikan	(0,00)		20.833.333,33	20.833.333,33		-	-	20.833.333,33
	6 Pendapatan diterima dimuka atas Lain2 PAD yg sah Sewa Lahan ATM Mandiri	Lain-lain PAD Yang Sah	RSUD	-		5.062.500,00	5.062.500,00			-	5.062.500,00
	7 Sewa Tanah Gelondong Kelurahan Panjisari	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	BPKAD	2.687.500,00		1.062.500,00	1.062.500,00	3.750.000,00		3.750.000,00	-
	8 Sewa Tanah Gelondong Kelurahan Panjisari	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	BPKAD	3.299.100,00		1.413.900,00	1.413.900,00	4.713.000,00		4.713.000,00	
	9 Penpanjangan Sewa Tanah Lahan ATM Bank NTB	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	BPKAD	25.833.333,33		10.000.000,00	10.000.000,00			-	35.833.333,33
	10 Sewa Tanah Milik Pemkab Lombok Tengah Jln Jendral Sudirman Semayan	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	BPKAD	5.600.000,00		1.920.000,00	1.920.000,00			-	7.520.000,00
	11 Sewa Tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian point of fresence (POP) Container Insfratraktur Internet	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	BPKAD	9.916.666,67		3.500.000,00	3.500.000,00			-	13.416.666,67
	12 Sewa Tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian point of fresence (POP) Container Insfratraktur Internet	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	BPKAD	9.916.666,67		3.500.000,00	3.500.000,00			-	13.416.666,67
	13 Sewa Tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian point of fresence (POP) Container Insfratraktur Internet	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	BPKAD	9.916.666,67		3.500.000,00	3.500.000,00			-	13.416.666,67
	14 Sewa Tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian point of fresence (POP) Container Insfratraktur Internet	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	BPKAD	9.916.666,67		3.500.000,00	3.500.000,00			-	13.416.666,67
	15 Sewa Tanah di Janapria	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	BPKAD	-		5.000.000,00	5.000.000,00			-	5.000.000,00
	16 Sewa Kolam Renang Matra	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	BPKAD	-		12.500.000,00	12.500.000,00			-	12.500.000,00
	17 Sewa Tanah Eks KOMINFO	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	BPKAD	-		7.254.166,67	7.254.166,67			-	7.254.166,67
	18 Sewa Tanah BBI PEMEPEK	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	BPKAD	75.000.000,00		27.500.000,00	27.500.000,00			-	102.500.000,00
	19 Sewa Tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian point of fresence (POP) Container Insfratraktur Internet	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	BPKAD	42.500.000,00		32.500.000,00	32.500.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00	
	20 Sewa Tanah untuk lokasi penempatan dan pengoperasian point of fresence (POP) Container Insfratraktur Internet	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	BPKAD	45.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00	
	21 Sewa Tanah di Desa Kuta Untuk Pembangunan Vila	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	BPKAD	351.000.000,00		234.000.000,00	234.000.000,00	585.000.000,00		585.000.000,00	
	22 Sewa Tanah di Desa Sengkol (Warung Ayam Bakar)	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	BPKAD	23.333.333,33		1.666.666,67	1.666.666,67	25.000.000,00		25.000.000,00	



KODE AKUN	URAIAN		Akun terkait	SKPD	Per 31 Des 2025	Debet			Kredit			Per 31 Des 2024
						Koreksi	Pendapatan LO	Jumlah	MoU Baru	Koreksi	Jumlah	
	23	Sewa Kolam Renang Matra	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	BPKAD	12.500.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	
	24	Sewa Tanah Lokasi Pembuatan Batako	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Pertaninan								
	25	Sewa Tanah Pemda yang berlokasi di Desa Barabali	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Pertaninan	6.630.000,00		2.210.000,00	2.210.000,00	8.840.000,00		8.840.000,00	
	26	Sewa Lahah Parkir Pasar Renteng	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Perindag	137.614.583,33		12.510.416,67	12.510.416,67	150.125.000,00		150.125.000,00	
2.1.05.04.01.0020	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam				-							-
	1	Pendapatan di terima dimuka atas Retribusi Pemak Kekay Da Sewa Lokasi Menara Telekom Aik Bukak (Alat Pemancar)	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	DISPARBUD	(0,00)		-	-		-	-	(0,00)
2.1.05.04.01.0020	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Reklame		Pajak Reklame	Bapenda	382.864.483,33		425.538.068,00	425.538.068,00	382.864.483,33		382.864.483,33	425.538.068,00
		TOTAL			1.179.355.750,00	-	899.584.551,33	899.584.551,33	1.340.292.483,33	-	1.340.292.483,33	738.647.818,00

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR UTANG BELANJA PEGAWAI
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	SKPD	PER 31 DESEMBER 2025	Debet					Jumlah	Kredit				PER 31 DESEMBER 2024	
			Invoice/ dipersamakan						Invoice/ dipersamakan					Jumlah
			Gaji	Sertifikasi	TPP	Jasa Pelayanan	Utang Pegawai BLUD		Gaji	Insentif	TPP	Jasa Pelayanan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Pendidikan	8.531.800.399,00	103.079.866,00	56.805.700,00	321.164.117,00			481.049.683,00	8.531.800.399,00				8.531.800.399,00	481.049.683,00
2	Dinas Kesehatan	581.686.096,20			1.900.803.988,00	717.550.228,60		2.618.354.216,60				581.686.096,20	581.686.096,20	2.618.354.216,60
3	Rumah Sakit Umum Daerah	8.500.943,00			835.348.461,00		4.401.304.271,45	5.236.652.732,45	8.500.943,00				8.500.943,00	5.236.652.732,45
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	798.782,00		285.438.222,00			286.237.004,00					-	286.237.004,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	355.038,00	1.861.491,00		121.418.781,00			123.280.272,00	355.038,00				355.038,00	123.280.272,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	1.736.367,00		63.102.157,00			64.838.524,00					-	64.838.524,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-	2.104.947,00		156.071.035,00			158.175.982,00					-	158.175.982,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.133,00	689.461,00		67.925.367,00			68.614.828,00	26.133,00				26.133,00	68.614.828,00
9	Dinas Sosial	-			52.781.717,00			52.781.717,00					-	52.781.717,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.130.150,00			152.178.647,00			152.178.647,00	2.130.150,00				2.130.150,00	152.178.647,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.029,00	505.496,00		70.921.977,00			71.427.473,00	19.029,00				19.029,00	71.427.473,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	-			52.988.505,00			52.988.505,00					-	52.988.505,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	2.751.208,00	616.644,00		131.816.900,00			132.433.544,00	2.751.208,00				2.751.208,00	132.433.544,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-			90.333.110,00			90.333.110,00					-	90.333.110,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.279.446,00			70.273.784,00			70.273.784,00	1.279.446,00				1.279.446,00	70.273.784,00
16	Dinas Perhubungan	-	398.417,00		95.902.075,00			96.300.492,00					-	96.300.492,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.784.958,00			67.925.450,00			67.925.450,00	6.784.958,00				6.784.958,00	67.925.450,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	4.996.928,00			78.738.193,00			78.738.193,00	4.996.928,00				4.996.928,00	78.738.193,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.929,00	700.234,00		80.126.703,00			80.826.937,00	26.929,00				26.929,00	80.826.937,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	54.420.000,00			53.453.957,00			53.453.957,00			54.420.000,00		54.420.000,00	53.453.957,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	586.968,00			94.745.229,00			94.745.229,00	586.968,00				586.968,00	94.745.229,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.554.152,00			116.656.073,00			116.656.073,00	1.554.152,00				1.554.152,00	116.656.073,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	5.868.000,00		99.742.062,00			105.610.062,00					-	105.610.062,00
24	Dinas Pertanian	15.046.853,00	6.087.002,00		592.840.300,00			598.927.302,00	15.046.853,00				15.046.853,00	598.927.302,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	1.170.084,00		107.027.856,00			108.197.940,00					-	108.197.940,00
26	Sekretariat Daerah	-	4.667.036,00		341.414.324,00			346.081.360,00					-	346.081.360,00
27	Sekretariat DPRD	-	1.029.658,00		98.062.015,00			99.091.673,00					-	99.091.673,00
28	Kantor Camat Praya	-			230.558.777,00			230.558.777,00					-	230.558.777,00
29	Kantor Camat Praya Tengah	2.396.166,00			98.291.436,00			98.291.436,00	2.396.166,00				2.396.166,00	98.291.436,00
30	Kantor Camat Praya Barat	-			39.778.550,00			39.778.550,00					-	39.778.550,00
31	Kantor Camat Praya Barat Daya	-			38.805.268,00			38.805.268,00					-	38.805.268,00
32	Kantor Camat Praya Timur	-			42.254.420,00			42.254.420,00					-	42.254.420,00
33	Kantor Camat Pujut	-			49.496.287,00			49.496.287,00					-	49.496.287,00
34	Kantor Camat Janapria	-			47.307.110,00			47.307.110,00					-	47.307.110,00
35	Kantor Camat Kopang	-	2.320.697,00		43.525.102,00			45.845.799,00					-	45.845.799,00



No	SKPD	PER 31 DESEMBER 2025	Debet						Kredit					PER 31 DESEMBER 2024
			Invoice/ dipersamakan					Jumlah	Invoice/ dipersamakan				Jumlah	
			Gaji	Sertifikasi	TPP	Jasa Pelayanan	Utang Pegawai BLUD		Gaji	Insentif	TPP	Jasa Pelayanan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	Kantor Camat Batukliang	-	461.504,00		38.504.540,00			38.966.044,00					-	38.966.044,00
37	Kantor Camat Batukliang Utara	-			35.231.254,00			35.231.254,00					-	35.231.254,00
38	Kantor Camat Pringgarata	302.990,00			42.137.441,00			42.137.441,00	302.990,00				302.990,00	42.137.441,00
39	Kantor Camat Jonggat	-			46.926.325,00			46.926.325,00					-	46.926.325,00
40	Inspektorat Daerah	464.269,00	2.009.857,00		381.346.034,00			383.355.891,00	464.269,00				464.269,00	383.355.891,00
41	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	557.140,00	4.644.288,00		159.665.219,00			164.309.507,00	557.140,00				557.140,00	164.309.507,00
42	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.509.223.590,00	244.171,00		169.253.974,00	9.391,00		169.507.536,00		2.509.223.590,00			2.509.223.590,00	169.507.536,00
43	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-			164.406.446,00			164.406.446,00					-	164.406.446,00
44	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.416.960,00			126.206.251,00			126.206.251,00	3.416.960,00				3.416.960,00	126.206.251,00
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	125.665.276,00	11.628.144,00		86.830.154,00			98.458.298,00			125.665.276,00		125.665.276,00	98.458.298,00
	Jumlah	11.853.991.621,20	152.622.146,00	56.805.700,00	8.039.725.593,00	717.559.619,60	4.401.304.271,45	13.368.017.330,05	8.582.996.659,00	2.509.223.590,00	180.085.276,00	581.686.096,20	11.853.991.621,20	13.368.017.330,05



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR UTANG BELANJA BARANG
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2025	PENGURANGAN (Debet)	PENAMBAHAN (Kredit)	Saldo Awal Per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	40.000,00	6.112.098.400,00	-	6.112.138.400,00
2	Dinas kesehatan	-	1.761.737,00	-	1.761.737,00
3	Rumah sakit umum daerah	32.056.655.496,91	16.875.742.943,00	22.972.065.071,75	25.960.333.368,16
4	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	33.081.750,00	379.183.844,00	33.081.750,00	379.183.844,00
5	Dinas perumahan dan kawasan pemukiman	-	-	-	-
6	Badan kesatuan bangsa dan politik	-	-	-	-
7	Satuan polisi pamong praja	-	-	-	-
8	Badan penanggulangan bencana daerah	-	-	-	-
9	Dinas sosial	-	-	-	-
10	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	-	-	-	-
11	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan kb	-	-	-	-
12	Dinas ketahanan pangan	-	-	-	-
13	Dinas lingkungan hidup	-	-	-	-
14	Dinas kependudukan dan catatan sipil	-	-	-	-
15	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	-	-	-	-
16	Dinas perhubungan	-	-	-	-
17	Dinas komunikasi dan informatika	-	-	-	-
18	Dinas koperasi, usaha kecil menengah	-	-	-	-
19	Dinas penanaman modal pelayanan perizinan terpadu satu pintu	-	-	-	-
20	Dinas kepemudaan dan olahraga	-	-	-	-
21	Dinas perpustakaan dan kearsipan	-	-	-	-
22	Dinas kelautan dan perikanan	-	-	-	-
23	Dinas kebudayaan dan pariwisata	-	-	-	-
24	Dinas pertanian dan peternakan	-	-	-	-
25	Dinas perindustrian dan perdagangan	-	-	-	-
26	Pejabat pengelola keuangan daerah	-	-	-	-
27	Dewan perwakilan rakyat daerah	-	-	-	-
28	Kepala daerah dan wakil kepala daerah	-	-	-	-
29	Sekretariat daerah	-	-	-	-
30	Sekretariat dprd	-	-	-	-
31	Kecamatan praya	-	-	-	-
32	Kecamatan praya tengah	-	-	-	-
33	Kecamatan praya barat	-	-	-	-
34	Kecamatan praya barat daya	-	-	-	-
35	Kecamatan praya timur	-	-	-	-
36	Kecamatan pujut	-	-	-	-
37	Kecamatan janapria	-	-	-	-

NO	SKPD	Saldo Per 31 Desember 2025	PENGURANGAN (Debet)	PENAMBAHAN (Kredit)	Saldo Awal Per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6
38	Kecamatan kopang	-	-	-	-
39	Kecamatan batukliang	-	-	-	-
40	Kecamatan batukliang utara	-	-	-	-
41	Kecamatan pringgarata	-	-	-	-
42	Kecamatan jonggat	-	-	-	-
43	inspektorat daerah	-	-	-	-
44	Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah	-	-	-	-
45	Badan pengelolaan pendapatan daerah	-	-	-	-
46	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerahpendapatan daerah	-	-	-	-
47	Badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan	-	-	-	-
48	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-
	TOTAL	32.089.777.246,91	23.368.786.924,00	23.005.146.821,75	32.453.417.349,16

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DAFTAR UTANG BELANJA JASA

PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024

NO	SKPD	SALDO Per 31 Desember 2025	PENGURANGAN (DEBET)	PENAMBAHAN (KREDIT)	Saldo Awal Per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	6.281.811,00	149.850.000,00	6.281.811,00	149.850.000,00
2	Dinas Kesehatan	122.742.650,00	72.292.865,00	122.742.650,00	72.292.865,00
3	Rumah sakit umum daerah	4.151.942.050,00	8.484.549.062,00	3.548.341.516,00	663.822.188,00
4	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	125.181.453,00	100.619.031,00	125.181.453,00	100.619.031,00
5	Dinas perumahan dan kawasan pemukiman	6.128.952,00	4.950.948,00	6.128.952,00	4.950.948,00
6	Badan kesatuan bangsa dan politik	-	-	-	-
7	Satuan polisi pamong praja	4.958.828,00	4.252.821,00	4.958.828,00	4.252.821,00
8	Badan penanggulangan bencana daerah	5.902.886,00	62.380,00	5.902.886,00	62.380,00
9	Dinas sosial	-	4.563.839,00	-	4.563.839,00
10	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	7.936.983,00	6.944.126,00	7.936.983,00	6.944.126,00
11	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan kb	-	-	-	-
12	Dinas ketahanan pangan	-	2.621.806,00	-	2.621.806,00
13	Dinas lingkungan hidup	4.044.997,00	3.916.590,00	4.044.997,00	3.916.590,00
14	Dinas kependudukan dan catatan sipil	9.433.677,00	6.970.632,00	9.433.677,00	6.970.632,00
15	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	1.310.547,00	1.129.722,00	1.310.547,00	1.129.722,00
16	Dinas perhubungan	866.288.948,00	1.007.598.440,00	866.288.948,00	1.007.598.440,00
17	Dinas komunikasi dan informatika	-	10.332.500,00	-	10.332.500,00
18	Dinas koperasi, usaha kecil menengah	3.578.400,00	3.515.970,00	3.578.400,00	3.515.970,00
19	Dinas penanaman modal pelayanan perizinan terpadu satu pintu	-	62.380,00	-	62.380,00
20	Dinas kepemudaan dan olahraga	-	7.507.194,00	-	7.507.194,00
21	Dinas perpustakaan dan kearsipan	622.000,00	588.449,00	622.000,00	588.449,00
22	Dinas kelautan dan perikanan	5.621.582,00	8.100.901,00	5.621.582,00	8.100.901,00
23	Dinas kebudayaan dan pariwisata	200.000,00	-	200.000,00	-

NO	SKPD	SALDO Per 31 Desember 2025	PENGURANGAN (DEBET)	PENAMBAHAN (KREDIT)	Saldo Awal Per 31 Desember 2024
1	2	3	4	5	6
24	Dinas pertanian dan peternakan	-	3.082.820,00	-	3.082.820,00
25	Dinas perindustrian dan perdagangan	51.151.520,00	133.296.512,00	51.151.520,00	133.296.512,00
26	Pejabat pengelola keuangan daerah	-	-	-	-
27	Dewan perwakilan rakyat daerah	-	-	-	-
28	Kepala daerah dan wakil kepala daerah	-	-	-	-
29	Sekretariat daerah	11.322.098,00	10.535.058,00	11.322.098,00	10.535.058,00
30	Sekretariat dprd	64.880,00	35.318.880,00	64.880,00	35.318.880,00
31	Kecamatan praya	200.102,00	299.597,00	200.102,00	299.597,00
32	Kecamatan praya tengah	-	687.178,00	-	687.178,00
33	Kecamatan praya barat	703.505,00	224.153,00	703.505,00	224.153,00
34	Kecamatan praya barat daya	-	-	-	-
35	Kecamatan praya timur	1.839.687,00	2.210.514,00	1.839.687,00	2.210.514,00
36	Kecamatan pujut	165.330,00	3.809.352,00	165.330,00	3.809.352,00
37	Kecamatan janapria	-	890.000,00	-	890.000,00
38	Kecamatan kopang	2.128.474,00	1.871.816,00	2.128.474,00	1.871.816,00
39	Kecamatan batukliang	1.141.622,00	-	1.141.622,00	-
40	Kecamatan batukliang utara	192.969,00	186.336,00	192.969,00	186.336,00
41	Kecamatan pringgarata	-	725.366,00	-	725.366,00
42	Kecamatan jongsat	-	49.880,00	-	49.880,00
43	inspektorat daerah	-	-	-	-
44	Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah	-	-	-	-
45	Badan pengelolaan pendapatan daerah	2.408.526,00	1.971.666,00	2.408.526,00	1.971.666,00
46	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerahpendapatan daerah	5.821.429,00	-	5.821.429,00	-
47	Badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan	1.394.059,00	1.786.523,00	1.394.059,00	1.786.523,00
48	Dinas Pemadam Kebakaran	152.405,00	-	152.405,00	-
	TOTAL	5.400.862.370,00	10.077.375.307,00	4.797.261.836,00	2.256.648.433,00

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR UTANG BELANJA PEMELIHARAAN dan UTANG BELANJA PERJALANAN DINAS
PER 31 DESEMBER 2025

NO	SKPD	SALDO Per 31 DESEMBER 2025	SALDO					PENGURANGAN	PENGURANGAN (DEBIT)					PENAMBAHAN (KREDIT)	PENAMBAHAN (KREDIT)					SALDO AWAL Per 31 Desember 2024
			Pemeliharaan Alat Angkutan- Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Reklas biaya Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan ke Utang Obat-obatan	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	
1	2	3	17	18	23	24		4	4	5	6	24	7	5	17	18	23	24		6
1	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas kesehatan	7.500.000,00	-	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	7.500.000,00	-
3	Rumah sakit umum daerah	179.541.390,00	-	-	179.541.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	179.541.390,00	-	-	179.541.390,00	-	-	-
4	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas perumahan dan kawasan pemukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan kesatuan bangsa dan politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Satuan polisi pamong praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan penanggulangan bencana daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan kb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas ketahanan pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas lingkungan hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas kependudukan dan catatan sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas komunikasi dan informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas koperasi, usaha kecil menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas penanaman modal pelayanan perizinan terpadu satu stop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas kepemudaan dan olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas perpustakaan dan kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas kebudayaan dan pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas pertanian dan peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas perindustrian dan perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Pejabat pengelola keuangan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Desan perwakilan rakyat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kepala daerah dan wakil kepala daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sekretariat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan praya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan praya tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan praya barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan praya barat daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan praya timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan pujut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan janapria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan kopang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kecamatan batukliang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan batukliang utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan pringgarata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan jongsat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Inspektoriat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Badan pengelolaan pendapatan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah/pendapatan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	187.041.390,00	-	-	179.541.390,00	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	187.041.390,00	-	-	179.541.390,00	-	7.500.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR UTANG BELANJA MODAL
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

No.	TAHUN	SKPD	Objek Belanja	Uraian	PER 31 DESEMBER 2025	Debet				Kredit			31-Dec-24
						Koreksi	Penghapusan/Kompensasi	Pembayaran	Jumlah	Koreksi	Invoice/dipersamakan/penyesuaian	Jumlah	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		DINAS PUPR			410.218.500,00	-	-	316.954.384,00	316.954.384,00	-	-	-	316.954.384,00
	Th 2020		Gedung dan Bangunan	Pekerjaan interior kantor bupati	-				-			-	
	Th 2024		Jalan, Jaringan dan Irigasi	Selisih realisasi fisik dan keuangan pembangunan jembatan ngerapak	-			316.954.384,00	316.954.384,00			-	316.954.384,00
	Th 2025		Jalan, Jaringan dan Irigasi	Pembangunan Ruas Jalan Pengembur mawun lanjutan,,	410.218.500,00						410.218.500,00	410.218.500,00	
2		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			5.960,00	-	-	8.409.082.650,00	8.409.082.650,00	-	-	-	8.409.088.610,00
				BIDANG SMP									
				UTANG BELANJA MODAL BIDANG SMP	(90,00)			6.201.998.800,00	6.201.998.800,00	-	-	-	6.201.998.710,00
				UTANG BELANJA MODAL BIDANG SD	6.000,00			2.192.056.850	2.192.056.850	-	-	-	2.192.062.850,00
				UTANG BELANJA MODAL PADA KESEKRETARIATAN	50,00			15.027.000,00	15.027.000,00	-	-	-	15.027.050,00
					-				-			-	0,00
3		DINAS KESEHATAN			-	-	-	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	-	3.480.000,00
	Th 2023	DIKES	Gedung dan Bangunan	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Posyandu Jatiswara Gunung Amuk, Batukliang	-			3.480.000,00	3.480.000,00			-	3.480.000,00
4		RSUD			291.550.000,00	-	-	-	-	-	291.550.000,00	291.550.000,00	-
	Th 2025		Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya		291.550.000,00				-		291.550.000,00	291.550.000,00	-
				Jumlah	701.774.460,00	0,00	0,00	8.729.517.034,00	8.729.517.034,00	0,00	291.550.000,00	291.550.000,00	8.729.522.994,00



KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR UTANG BELANJA TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Pajak daerah				
	Pembayaran Utang Belanja Transfer bagi hasil pajak ke Desa NO SP2D 52.02/04.0/000188/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P1/5/2025 Tanggal 28/05/2025	5.019.134.566,75	7.125.143.491,27	5.019.134.496,00	7.125.143.562,02
2	Reribusi Daerah				
	Pembayaran Utang Belanja Transfer bagi hasil Retribusi ke Desa NO SP2D 52.02/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/06/2025 Tanggal 28 Mei 2025	821.695.471,06	1.296.126.756,94	821.695.471,00	1.296.126.757,00
		5.840.830.037,81	8.421.270.248,21	5.840.829.967,00	8.421.270.319,02

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
RINCIAN MUTASI UTANG BELANJA BARANG DAN JASA BLUD RSUD
Sampai Dengan Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Nama Supplier	Saldo 31-Dec-24	Pembayaran Selama Tahun 2025	Penambahan Utang Operasional Tahun 2025	Saldo 31 desember 2025	Ket.
A	BELANJA PEGAWAI					
	Gaji dan Tunjangan Pegawai			8.500.943,00	8.500.943,00	Gaji Susulan
B	BELANJA BARANG					
I.	Belanja Bahan Farmasi					
1.1.	8.1.02.01.01.0037 - Beban Obat-Obatan-Obat					
1	PT Adya Artha Abadi	750.564.889,00	712.122.553,00	1.970.386.310,00	2.008.828.646,00	OBAT
2	PT Anugerah Pharmindho Lestari	-			-	OBAT
3	PT Anugrah Argon Medica	1.920.989.481,00	1.052.730.700,00	84.006.888,00	952.265.669,00	OBAT
4	PT Bina San Prima	351.888.347,00	351.888.184,00	582.869.662,00	582.869.825,00	OBAT
5	PT Dexa Arfindo Pratama	289.726.095,00	289.726.095,00		-	OBAT
6	PT Enseval Putera Megatrading Tbk	1.313.393.299,00	513.532.200,00		799.861.099,00	OBAT
7	PT Galoeh Husada Farma	-		190.723.750,00	190.723.750,00	OBAT
8	PT Gatra Persada			173.105.953,00	173.105.953,00	OBAT
9	PT Indofarma Global Medika	35.069.900,00	35.069.900,00		-	OBAT
10	PT Kebayoran Pharma	-		129.160.710,00	129.160.710,00	OBAT
11	PT Kimia Farma Td	2.907.293.173,00	2.980.185.844,00	109.175.318,45	36.282.647,45	OBAT
12	PT Mensa Bina Sukses	1.137.350.559,00	1.115.452.101,00	148.380.210,00	170.278.668,00	OBAT
13	PT Merapi Utama Pharma	663.578.062,49	66.608.300,00	933.304.337,51	1.530.274.100,00	OBAT
14	PT Millennium Pharmacon International	2.356.440.868,52	873.541.200,00	151.992.773,48	1.634.892.442,00	OBAT
15	PT Parit Padang Global	1.852.135.336,00	612.848.200,00	180.577.595,00	1.419.864.731,00	OBAT
16	PT Penta Valent	813.096.116,00	782.634.104,00	867.841.090,00	898.303.102,00	OBAT
17	PT Rajawali Nusindo	392.875.200,00	392.875.200,00		-	OBAT
18	PT Sapta Saritama	-			-	OBAT
19	PT Tri Sapta Jaya	-			-	OBAT
20	Adya Artha Abadi		-	7.867.347,00	7.867.347,00	
21	Dexa Arfindo Pratama		-	177.128.805,00	177.128.805,00	
22	Enseval Putera Megatrading		283,00	-	(283,00)	
23	Galoeh Husada Farma		-	304.475.000,00	304.475.000,00	
24	Kimia Farma		-	80.027.244,55	80.027.244,55	
25	Mensa Bina Sukses		-	1.074.754.134,00	1.074.754.134,00	
26	Merapi Utama Pharma		-	878,00	878,00	

No	Nama Supplier	Saldo 31-Dec-24	Pembayaran Selama Tahun 2025	Penambahan Utang Operasional Tahun 2025	Saldo 31 desember 2025	Ket.
27	Millennium Pharmacon International		-	569.191.813,00	569.191.813,00	
28	Penta Valent		-	357,00	357,00	
29	Tri Sapta Jaya		-	104.614.635,00	104.614.635,00	
30	Gatra Persada		-	505.138.134,00	505.138.134,00	
31	Kebayoran Pharma		-	92.419.710,00	92.419.710,00	
32	Anugerah Pharmindo Lestari		-	17.415.958,00	17.415.958,00	
1.2.	8.1.02.01.01.0012 - Beban Bahan-Bahan Lainnya (BMHP)					
1	CV Artha Pratama Wibawa	-			-	BMHP
2	PT Alexa Medika	776.863.137,00	95.726.178,00	94.424.592,00	775.561.551,00	BMHP
3	PT Alfarabi Nusa Mandala			39.447.033,00	39.447.033,00	BMHP
4	PT Berliando Mitra Abadi	898.557.560,00	690.178.200,00	1.109.669.599,40	1.318.048.959,40	BMHP
5	PT Bintang Shafwan	162.370.787,00	162.370.475,00	278.812.445,00	278.812.757,00	BMHP
6	PT Bintang Mandiri Medika			-	-	BMHP
7	PT Brataco	-			-	BMHP
8	PT Cahya Intan Medika	3.683.260.441,00	1.133.094.300,00	551.309.886,20	3.101.476.027,20	BMHP
9	PT Cakra Jaya Medika	331.065.048,00	331.065.048,00	368.527.400,00	368.527.400,00	BMHP
10	PT Citra Liris Farmasi			266.126.046,00	266.126.046,00	BMHP
11	PT Citra Dian Pratama			127.000.000,00	127.000.000,00	BMHP
12	PT Cobra Dental	-		307.000.000,00	307.000.000,00	BMHP
13	PT Daya Muda Agung	-		87.857.200,00	87.857.200,00	BMHP
14	PT Dena Dinar Djaya			79.920.000,00	79.920.000,00	BMHP
15	PT Dua Farma Mahakarsa			223.696.775,00	223.696.775,00	BMHP
16	PT Global Promedika Service	87.452.460,00	87.452.460,00		-	BMHP
17	PT Globalindo Nusa Abadi	-			-	BMHP
18	PT Gratia Jaya Mulya			218.000.000,00	218.000.000,00	BMHP
19	PT IDS Medical System Indonesia			57.859.000,00	57.859.000,00	BMHP
20	PT Intergastra Nusantara	196.335.071,00	196.335.071,00	267.167.102,00	267.167.102,00	BMHP
21	PT Inti Kirana Meditama	576.522.832,00	452.577.154,00	150.573.633,00	274.519.311,00	BMHP
22	PT Jayadi Mitra Sejahtera	-			-	BMHP
23	PT Karya Putra Andalan			24.250.450,00	24.250.450,00	BMHP
24	PT Kastara Teknologi Internasional			106.404.600,00	106.404.600,00	BMHP
25	PT Lestari Dini Tunggul			119.255.070,00	119.255.070,00	BMHP
26	PT Mitra Sejati Medika	-			-	BMHP
27	PT Ortho Timur	-			-	BMHP
28	PT Pancaraya Krisnamandiri Surabaya	-		4.218.000,00	4.218.000,00	BMHP
29	PT Prima Alkesindo Nusantara			33.474.000,00	33.474.000,00	BMHP

No	Nama Supplier	Saldo 31-Dec-24	Pembayaran Selama Tahun 2025	Penambahan Utang Operasional Tahun 2025	Saldo 31 desember 2025	Ket.
30	PT Pharma Lab Medika	188.700.000,00	188.700.000,00	37.740.000,00	37.740.000,00	BMHP
31	PT Ridho Ilahi Farma	112.756.400,00	112.756.400,00	15.131.550,00	15.131.550,00	BMHP
32	PT Rizki Educalab	-		553.179.409,00	553.179.409,00	BMHP
33	PT Sentrum Dentalindo	480.000,00			480.000,00	BMHP
34	PT Sumber Cahayaku Putri Griselda	924.570.600,00	412.987.950,00	836.396.300,00	1.347.978.950,00	BMHP
35	PT Surgika Alkesindo	23.659.500,00	23.659.500,00		-	BMHP
36	PT Tawada Healthcare			130.980.000,00	130.980.000,00	BMHP
37	PT Trinusa Dharma Satha	-		40.432.765,00	40.432.765,00	BMHP
38	PT Tristanisa Global Indonesia	-			-	BMHP
39	PT Trisa Likuid Farma			13.564.000,00	13.564.000,00	BMHP
40	PT United Dico Citas	84.909.080,15	81.196.500,00		3.712.580,15	BMHP
41	PT Wazu Karya			-	-	BMHP
42	PT Wahana Rizki Gumilang	-			-	BMHP
43	PT Endo Indonesia	-		17.489.113,00	17.489.113,00	Alkes Habis Pakai
44	PT Sentrum Dentalindo	5.104.000,00	5.104.000,00		-	Alkes Habis Pakai
45	PT Tristanisa Global Indonesia	480.172.067,00	480.172.067,00	571.435.068,00	571.435.068,00	BMHP Lab
46	PT Mitra Bahagia Citra Medika	536.523.059,00	536.523.059,00	330.796.909,00	330.796.909,00	BMHP Lab
47	PT Saba Indomedika	-		64.948.320,00	64.948.320,00	BMHP Lab
48	PALANG MERAH INDONESIA LOBAR			32.000.000,00	32.000.000,00	Kantong Darah
49	Berliando Mitra Abadi		-	38,21	38,21	
50	Bintang Mandiri Medika		-	273.194.817,00	273.194.817,00	
51	Cahaya Intan Medika		0,20	-	(0,20)	
52	Cakra Jaya Medika		-	12.654.148,00	12.654.148,00	
53	Cobra Dental		302.083.339,00	-	(302.083.339,00)	
54	Daya Muda Agung		-	89.446.575,00	89.446.575,00	
55	Intergastra Nusantara		-	150.138.326,00	150.138.326,00	
56	Pancaraya Krisnamandiri Surabaya		-	98.758.920,00	98.758.920,00	
57	Pharma Lab Medika		-	245.310.000,00	245.310.000,00	
58	Alfarabi Nusa Mandala		-	569.021.815,00	569.021.815,00	
59	Rizki Educalab		-	1.253.356.870,00	1.253.356.870,00	
60	Surgika Alkesindo		-	8.375.616,00	8.375.616,00	
61	Tawada Healthcare		50.580.000,00	-	(50.580.000,00)	
62	Tristanisa Global Indonesia		-	346,80	346,80	
63	United Dico Citas		-	482.273.169,85	482.273.169,85	
64	Wazu Karya		-	554.611.500,00	554.611.500,00	
65	Citra Dian Pratama		-	200.000,00	200.000,00	
66	Karya Putra Andalan		-	49.550,00	49.550,00	

No	Nama Supplier	Saldo 31-Dec-24	Pembayaran Selama Tahun 2025	Penambahan Utang Operasional Tahun 2025	Saldo 31 desember 2025	Ket.
67	Kastara Teknologi Internasional		-	127.365.003,00	127.365.003,00	
68	Ridho Ilahi Farma		-	23,00	23,00	
69	Sentrum Dentalindo		-	170.000,00	170.000,00	
II.	8.1.02.01.01.0005 - Beban Bahan-Bahan Baku (Bahan makan dan minum pasien)					
1	CV Jaya Abadi	-			-	
2	CV Zahwa Cahaya Mandiri (gizi)					
3	CV Dwi Tunggal					
4	Toko Mirota					
2	CV. KANESHA			89.865.013,00	89.865.013,00	
3	CV. SENGKOL JAYA			-	-	
2	Sengkol Jaya			101.080.175,00	101.080.175,00	
1,5	Ud Rafa			842.038.921,00	842.038.921,00	
III.	8.1.02.01.01.0010 - Beban Bahan-Isi Tabung Gas (Gas Medis)					
1	PT Bayu Bangun Sakti	2.106.630.000,00	2.106.630.000,00	301.992.000,00	301.992.000,00	
2	Bayu Bangun Sakti			1.162.089.205,00	1.162.089.205,00	
IV.	8.1.02.01.01.0024 - Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Cetak Rekam Medis)					
1	DELTA TEKNIK			104.093.877,00	104.093.877,00	
2	DWI TUNGGAL			-	-	
3	Dwi Tunggal			1.097.035.806,50	1.097.035.806,50	
V	8.1.02.02.01.0031 - Beban Jasa Tenaga Keamanan					
1	Bintang Perdana Lombok	-		170.427.400,00	170.427.400,00	
	Bintang Perdana Lombok			85.213.700,00	85.213.700,00	
VI	8.1.02.02.01.0030 - Beban Jasa Tenaga Kebersihan					
1	Cakra Yudha Gardatama	-		108.519.000,00	108.519.000,00	
2	Galih Pusaka Rinjani			108.519.000,00	108.519.000,00	
	Cakra Yudha Gardatama			217.038.000,00	217.038.000,00	
	Galih Pusaka Rinjani			217.038.000,00	217.038.000,00	
VII	8.1.02.02.04.0117 - Beban Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya (Sewa perlengkapan)					
1	PT MB Citra Medica (sewa alat praktik)	2.148.520,00			2.148.520,00	
VIII	8.1.02.02.10.0003 - Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika (Sewa aplikasi)					
1	CV. DNA Artera Tech			150.000.000,00	150.000.000,00	

No	Nama Supplier	Saldo 31-Dec-24	Pembayaran Selama Tahun 2025	Penambahan Utang Operasional Tahun 2025	Saldo 31 desember 2025	Ket.
	Dna Artera Tech			100.000.000,00	100.000.000,00	
IX	8.1.02.02.01.0069 - Beban Pengolahan Air Limbah					
1	PT Biuteknika Bina Prima (jasa angkut dan pengolahan limbah)	40.691.756,00	40.691.756,00	149.213.488,00	149.213.488,00	
2	PT Putra Restu Ibu Abadi (jasa angkut dan pengolahan limbah)	-			-	
3	PT Universal Eco			56.324.619,00	56.324.619,00	
	Biuteknika Bina Prima			87.351.510,00	87.351.510,00	
	Universal Eco			63.035.302,00	63.035.302,00	
X	8.1.02.02.01.0060 - Beban Tagihan Air					
1	Air PDAM	19.529.898,00	19.529.898,00	13.252.580,00	13.252.580,00	
2	Listrik			156.398.921,00	156.398.921,00	
	Internet			11.232.420,00	11.232.420,00	
XI	Utang Premi Auransi 4% BPJS					
1	BPJS Kesehatan	601.452.014,00			601.452.014,00	
XII	Belanja Bahan Pakaian Lapangan					
1	Sumber Rezeki Berkah			147.962.100,00	147.962.100,00	
XIII	Belanja Bahan Pengolahan Darah					
1	Sumber Rezeki Berkah			38.720.000,00	38.720.000,00	
XIV	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan					
1	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Umum Periode Bulan Agustus 2024 s.d Desember 2026			1.816.057.576,00	1.816.057.576,00	
C	BELANJA PEMELIHARAAN					
I	8.1.02.03.02.0123 - Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Home Use (Dekorasi Publik)					
1	CV Bajur Indah	-		-	-	
2	RSUD Tripat Lobar (pemeriksaan CT Scan)			-	-	
3	PT Intergastra Nusantara (Pemeliharaan Alat)			-	-	
4	Hokki Izzi Cool			179.541.390,00	179.541.390,00	
Jumlah Kewajiban		26.624.155.556,16	17.288.628.219,20	27.061.112.542,95	36.396.639.879,91	

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
REKAP PENYALURAN RKUN KE RKD DANA DESA TAHUN 2025

No	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	PAGU TAMBAHAN	NON EARMARK		EARMARK		REALISASI TAMBAHAN	TOTAL PENYALURAN	SISA DI RKUN	SILPA TAHUN 2024	PENYALURAN THN 2025 DAN SILPA THN 2024
							TAHAP I	TAHAP II	TAHAP I	TAHAP II					
1	5202122006	Aik Berik	Batukilang Utara	MANDIRI	1.283.428.000	-	225.576.000	150.384.000	544.480.800	362.987.200	-	1.283.428.000	-	6.896.155	1.290.324.155
2	5202092010	Aik Bual	Kopang	MANDIRI	1.066.412.000	-	228.109.200	-	411.738.000	274.492.000	-	914.339.200	152.072.800	47.469.017	961.808.217
3	5202122004	Aik Bukak	Batukilang Utara	MANDIRI	1.289.704.000	-	441.469.200	-	332.353.200	221.568.800	-	995.391.200	294.312.800	41.868.000	1.077.077.200
4	5202032005	Aik Darek	Batukilang	MANDIRI	1.293.243.000	-	417.536.400	278.357.600	358.409.400	238.939.600	-	1.293.243.000	-	21.135.988	1.314.379.988
5	5202012011	Aik Muai	Praya	MANDIRI	1.077.211.000	-	246.622.800	164.415.200	399.703.800	266.469.200	-	1.077.211.000	-	5.265.610	1.082.476.610
6	5202082009	Arjangka	Pringgarata	MAJU	1.219.603.000	-	294.032.400	441.048.600	290.713.200	193.808.800	-	1.219.603.000	-	2.910.057	1.222.513.057
7	5202082004	Bagu	Pringgarata	MANDIRI	1.194.142.000	-	365.909.400	243.939.600	350.575.800	233.717.200	-	1.194.142.000	-	1.107.570	1.195.249.570
8	5202072006	Bakan	Janapria	MAJU	1.363.726.000	-	181.842.000	272.763.000	545.472.600	363.648.400	-	1.363.726.000	-	600	1.363.726.600
9	5202042016	Bangkret Parak	Pujut	BERKEMBANG	1.083.790.000	-	220.814.400	331.221.600	319.052.400	212.701.600	-	1.083.790.000	-	12.750.446	1.096.540.446
10	5202052002	Banyu Urip	Praya Barat	BERKEMBANG	1.383.964.000	-	264.289.600	396.434.400	433.944.000	289.296.000	-	1.383.964.000	-	1.951.880	1.385.915.880
11	5202032007	Barabali	Batukilang	MANDIRI	1.789.677.000	-	329.127.600	219.418.400	744.678.600	496.452.400	-	1.789.677.000	-	12.500.000	1.802.177.000
12	5202022001	Barekatut	Jonggat	MAJU	1.342.735.000	-	289.654.000	434.481.000	371.160.000	247.440.000	-	1.342.735.000	-	37.680.100	1.380.415.100
13	5202112010	Batu Jangkik	Praya Barat Daya	MANDIRI	1.381.457.000	-	308.570.400	-	520.303.800	346.869.200	-	1.175.743.400	205.713.600	20.460.000	1.196.203.400
14	5202022005	Batu Tulis	Jonggat	MAJU	995.321.000	-	194.374.800	291.562.200	305.630.400	203.753.600	-	995.321.000	-	6.715.000	1.002.036.000
15	5202052009	Batujuai	Praya Barat	MANDIRI	1.791.159.000	-	530.496.400	353.665.600	544.197.000	362.798.000	-	1.791.159.000	-	60.031.722	1.851.190.722
16	5202102006	Baturayala	Praya Tengah	MANDIRI	1.242.922.000	-	192.634.800	128.423.200	553.118.400	368.745.600	-	1.242.922.000	-	15.508.000	1.258.430.000
17	5202032008	Beber	Batukilang	MAJU	1.434.769.000	-	199.428.400	299.142.600	561.718.800	374.478.200	-	1.434.769.000	-	1.561.900	1.436.330.900
18	5202092004	Bebuk	Kopang	MAJU	1.164.031.000	-	209.202.000	-	384.615.600	256.410.400	-	850.228.000	313.803.000	12.703.800	862.931.800
19	5202062002	Beleka	Praya Timur	MAJU	833.889.000	-	158.596.000	237.894.000	262.439.400	174.959.600	-	833.889.000	-	13.997.372	847.886.372
20	5202062011	Beleke Daye	Praya Timur	BERKEMBANG	955.760.000	-	240.176.000	360.264.000	213.192.000	142.128.000	-	955.760.000	-	11.503.700	967.263.700
21	5202062012	Beleke Lebe Sane	Praya Timur	BERKEMBANG	823.227.000	-	136.678.800	-	288.918.000	192.612.000	-	618.208.800	205.018.200	54.101.300	672.310.100
22	5202102005	Beram	Praya Tengah	MAJU	1.123.456.000	-	241.570.000	-	311.718.600	207.812.400	-	1.123.456.000	-	-	1.123.456.000
23	5202092012	Berinding	Kopang	BERKEMBANG	1.016.170.000	-	216.444.000	-	285.036.000	190.024.000	-	691.504.000	324.666.000	31.872.000	723.376.000
24	5202082006	Blebante	Pringgarata	MANDIRI	1.228.484.000	-	324.825.200	216.552.800	412.261.200	274.840.800	-	1.228.484.000	-	5.115.250	1.233.599.250
25	5202062007	Blelende	Praya Timur	MAJU	941.346.000	-	72.824.400	109.236.600	455.570.400	303.713.600	-	941.346.000	-	18.407.251	959.752.251
26	5202052001	Bonder	Praya Barat	MAJU	1.530.391.000	-	356.689.600	535.034.400	383.202.000	255.466.800	-	1.530.391.000	-	10.756.229	1.541.147.229
27	5202022012	Bonjeruk	Jonggat	MANDIRI	1.781.295.000	-	527.028.000	-	541.749.000	361.166.000	-	1.429.943.000	351.352.000	12.999.810	1.442.942.810
28	5202032001	Bujak	Batukilang	MAJU	1.622.760.000	-	259.760.000	389.640.000	584.016.000	389.344.000	-	1.622.760.000	-	28.151.098	1.650.911.098
29	5202022013	Bunkite	Jonggat	MAJU	968.772.000	-	203.976.800	305.965.200	269.298.000	179.532.000	-	968.772.000	-	36.380.797	995.152.797
30	5202012014	Bunut Baki	Praya	MANDIRI	1.706.076.000	-	232.252.800	-	791.392.800	527.595.200	-	1.551.240.800	154.835.200	20.275.400	1.571.516.200
31	5202042017	Dadap	Pujut	BERKEMBANG	901.212.000	-	173.042.400	259.563.600	281.163.600	187.442.400	-	901.212.000	-	125.560.000	1.026.772.000
32	5202102011	Dakung	Praya Tengah	MAJU	1.022.468.000	-	129.683.600	329.525.400	283.951.400	189.301.200	-	1.022.468.000	-	9.003.002	1.031.465.002
33	5202112005	Darek	Praya Barat Daya	MANDIRI	1.159.429.000	-	281.475.000	-	414.182.400	276.121.600	-	971.779.000	187.650.000	32.279.757	1.004.058.757
34	5202092008	Darmaj	Kopang	MANDIRI	1.195.162.000	-	384.432.600	256.288.400	332.664.600	221.776.400	-	1.195.162.000	-	7.000.000	1.202.162.000
35	5202092006	Dasan Baru	Kopang	MANDIRI	1.424.821.000	-	464.707.800	309.805.200	390.184.800	260.123.200	-	1.424.821.000	-	33.420.505	1.458.241.505
36	5202072007	Durian	Janapria	MAJU	937.526.000	-	193.557.600	290.336.400	272.179.200	181.452.800	-	937.526.000	-	10.159.546	947.685.546
37	5202062008	Ganti	Praya Timur	MANDIRI	1.021.069.000	-	336.264.000	224.176.000	276.377.400	184.251.600	-	1.021.069.000	-	653.824	1.021.722.824
38	5202042007	Gapura	Pujut	BERKEMBANG	913.844.000	-	188.104.800	-	266.149.200	177.432.800	-	631.686.800	282.157.200	39.375.767	671.062.567
39	5202022011	Gemet	Jonggat	MAJU	1.101.965.000	-	219.676.400	323.514.800	337.694.400	225.069.600	-	1.101.965.000	-	-	1.101.965.000
40	5202012013	Gege	Kopang	MANDIRI	1.472.211.000	-	459.657.000	-	423.669.600	282.445.400	-	1.165.773.000	306.438.000	64.000	1.165.837.000
41	5202072003	Janapria	Janapria	MANDIRI	1.777.983.000	-	295.382.400	196.921.600	771.407.400	514.271.600	-	1.777.983.000	-	13.652.500	1.791.635.500
42	5202072015	Jangawana	Janapria	BERKEMBANG	982.775.000	-	182.644.400	273.966.600	315.698.400	210.465.600	-	982.775.000	-	291.000	983.066.000
43	5202072011	Jango	Janapria	MANDIRI	1.255.010.000	-	502.578.600	-	250.427.400	166.951.600	-	919.957.600	335.052.400	58.275.667	978.233.267
44	5202022003	Jelantik	Jonggat	MANDIRI	1.631.739.000	-	461.848.800	-	517.194.600	344.796.400	-	1.323.839.800	307.899.200	6.320.000	1.330.159.800
45	5202062014	Jero Puri	Praya Timur	BERKEMBANG	933.443.000	-	238.321.200	357.481.800	202.584.000	135.056.000	-	933.443.000	-	1.350.000	934.793.000
46	5202102004	Jurang Jaler	Praya Tengah	MAJU	951.251.000	-	153.405.200	230.107.800	340.642.800	227.095.200	-	951.251.000	-	137.500	951.388.500
47	5202112003	Kabul	Praya Barat Daya	MAJU	1.223.158.000	-	195.653.600	-	440.412.600	293.608.400	-	926.814.000	293.480.400	27.578.812	954.393.812
48	5202122008	Karang Sidemen	Batukilang Utara	MANDIRI	1.583.776.000	-	340.684.200	-	609.581.400	406.387.600	-	1.356.653.200	227.122.800	465.730	1.357.118.930
49	5202052004	Kateng	Praya Barat	MAJU	1.481.860.000	-	127.144.800	190.717.200	698.398.800	465.599.200	-	1.481.860.000	-	3.620.987	1.485.480.987
50	5202042006	Kawo	Pujut	MANDIRI	1.331.976.000	-	180.949.200	271.423.800	527.761.800	351.841.200	-	1.331.976.000	-	114.353.628	1.446.329.628
51	5202102009	Kelebu	Praya Tengah	MAJU	1.152.280.000	-	237.099.200	355.648.800	335.719.200	223.812.800	-	1.152.280.000	-	8.360.000	1.160.640.000
52	5202042018	Kerame Jati	Pujut	BERKEMBANG	1.140.908.000	-	334.289.200	501.433.800	183.111.00						

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	PAGU TAMBAHAN	NON EARMARK		EARMARK		REALISASI TAMBAHAN	TOTAL PENYALURAN	SISA DI RKUN	SILPA TAHUN 2024	PENYALURAN THN 2025 DAN SILPA THN 2024
							TAHAP I	TAHAP II	TAHAP I	TAHAP II					
86	5202082003	Murbaya	Pringgarrata	MANDIRI	1.235.332.000	-	470.074.200	313.382.800	271.125.000	180.750.000	-	1.235.332.000	-	835.097	1.236.167.097
87	5202022009	Nyerot	Jonggat	MAJU	970.817.000	-	102.952.400	154.428.600	428.061.600	285.374.400	-	970.817.000	-	2.236.210	973.053.210
88	5202032009	Pigutan	Batukilang	MANDIRI	1.379.335.000	-	274.714.800	-	552.886.200	368.590.800	-	1.196.191.800	183.143.200	-	1.196.191.800
89	5202092013	Pelangan	Kopang	BERKEMBANG	892.228.000	-	892.228.000	134.390.800	333.751.200	222.500.800	-	892.228.000	-	16.247.500	908.471.500
90	5202112007	Pandan Indah	Praya Barat Daya	MAJU	1.234.271.000	-	234.228.000	-	375.720.600	250.480.400	-	869.429.000	364.842.000	1.411.275	870.840.275
91	5202112012	Pandan Tinggang	Praya Barat Daya	BERKEMBANG	800.613.000	-	149.877.600	224.816.400	255.551.400	170.367.600	-	800.613.000	-	-	800.613.000
92	5202062013	Pegonak	Praya Timur	BERKEMBANG	763.554.000	-	195.057.600	292.586.400	165.546.000	110.364.000	-	763.554.000	-	3.680.000	767.234.000
93	5202102010	Pelangik	Praya Tengah	MAJU	1.224.991.000	-	214.760.400	-	412.854.000	275.236.000	-	902.850.400	322.140.600	21.225.500	924.075.900
94	5202112004	Pelambik	Praya Barat Daya	MAJU	1.194.202.000	-	356.980.800	-	181.050.000	120.700.000	-	658.730.800	535.471.200	26.929.012	685.659.812
95	5202082007	Pempepek	Pringgarrata	MANDIRI	1.284.559.000	-	302.514.300	201.676.200	468.221.100	312.147.400	-	1.284.559.000	-	5.494.630	1.290.053.630
96	5202072008	Pendem	Janapria	MAJU	1.242.897.000	-	207.695.600	-	434.074.800	289.383.200	-	1.242.697.000	-	2.000.425	1.244.697.425
97	5202102008	Pengadang	Praya Tengah	MANDIRI	1.422.516.000	-	379.015.800	-	474.493.800	316.329.200	-	1.189.838.800	252.677.200	14.954.050	1.184.792.850
98	5202042010	Pengembur	Pujut	MAJU	1.279.198.000	-	280.796.400	421.194.600	346.324.200	230.882.800	-	1.279.198.000	-	90.338.880	1.369.536.880
99	5202042005	Pengengat	Pujut	BERKEMBANG	1.043.519.000	-	218.812.000	328.218.000	297.893.400	198.595.600	-	1.043.519.000	-	123.428.883	1.166.947.883
100	5202022007	Pengenjeik	Jonggat	MANDIRI	2.026.983.000	-	743.622.600	-	472.567.200	315.044.800	-	1.531.234.600	495.748.400	119.542	1.531.354.142
101	5202052006	Penujak	Praya Barat	MANDIRI	1.714.098.000	-	467.857.800	-	560.601.000	373.734.000	-	1.402.192.800	311.905.200	6.444.500	1.408.637.300
102	5202032003	Peresak	Batukilang	MAJU	1.247.836.000	-	247.768.400	371.652.600	377.049.000	251.366.000	-	1.247.836.000	-	-	1.247.836.000
103	5202022006	Perina	Jonggat	MAJU	940.709.000	-	303.535.200	202.356.800	260.890.200	173.826.800	-	940.709.000	-	3.782.000	944.491.000
104	5202042013	Prabu	Pujut	MAJU	1.159.183.000	-	153.482.000	230.223.000	465.286.800	310.191.200	-	1.159.183.000	-	5.006	1.159.188.006
105	5202102012	Prai Meke	Praya Tengah	MAJU	1.097.435.000	-	158.614.800	-	420.238.800	280.159.200	-	859.212.800	238.222.200	6.326.450	865.539.250
106	5202072013	Prako	Janapria	BERKEMBANG	940.586.000	-	196.272.400	-	269.943.000	179.962.000	-	646.177.400	294.408.600	2.295.949	648.473.349
107	5202082001	Pringgarrata	Pringgarrata	MANDIRI	1.323.009.000	-	354.007.800	-	439.797.600	293.198.400	-	1.087.003.800	236.005.200	24.648.592	1.111.652.392
108	5202022008	Puyung	Jonggat	MANDIRI	1.629.534.000	-	572.705.400	381.803.600	405.015.000	270.010.000	-	1.629.534.000	-	6.764.238	1.636.298.238
109	5202112006	Ranggajata	Praya Barat Daya	MAJU	1.199.959.000	-	272.218.000	408.327.000	311.648.400	207.765.600	-	1.199.959.000	-	20.171.000	1.220.130.000
110	5202042008	Rembilan	Pujut	BERKEMBANG	1.659.967.000	-	403.242.800	604.864.200	399.936.000	260.624.000	-	1.659.967.000	-	120.783.800	1.780.450.800
111	5202072005	Saba	Janapria	MAJU	985.750.000	-	242.137.200	-	216.244.200	144.162.800	-	602.544.200	363.205.800	1.500.000	604.044.200
112	5202042002	Segara Anyar	Pujut	MAJU	931.175.000	-	214.308.800	321.463.200	237.241.800	158.161.200	-	931.175.000	-	20.492.822	951.667.822
113	5202032002	Selebung	Batukilang	MANDIRI	1.285.873.000	-	375.080.400	-	396.443.400	264.295.600	-	1.035.819.400	250.053.600	-	1.035.819.400
114	5202072009	Selebung Rembiga	Janapria	MAJU	1.300.723.000	-	199.267.600	298.901.400	481.532.400	321.021.600	-	1.300.723.000	-	1	1.300.723.001
115	5202052007	Selong Belanak	Praya Barat	MAJU	1.181.107.000	-	70.144.400	105.216.600	603.447.600	402.298.400	-	1.181.107.000	-	3.373.936	1.184.480.936
116	5202062003	Semoyang	Praya Timur	MANDIRI	1.245.589.000	-	199.586.400	133.057.600	547.767.000	365.178.000	-	1.245.589.000	-	1.446.050	1.247.035.050
117	5202092011	Sempuru	Kopang	MANDIRI	1.143.293.000	-	321.991.200	214.680.800	363.984.600	242.696.400	-	1.143.293.000	-	28.583.185	1.171.876.185
118	5202062006	Sengkerang	Praya Timur	MANDIRI	1.130.725.000	-	288.098.400	192.065.600	390.336.600	260.224.400	-	1.130.725.000	-	-	1.130.726.800
119	5202042001	Sengkol	Pujut	MANDIRI	1.381.065.000	-	287.156.400	-	541.482.600	360.988.400	-	1.189.627.400	191.437.600	24.620.028	1.214.247.428
120	5202082002	Sepakok	Pringgarrata	MANDIRI	1.416.097.000	-	481.354.800	320.903.200	368.303.400	245.535.600	-	1.416.097.000	-	13.298.462	1.429.395.462
121	5202112008	Serage	Praya Barat Daya	MAJU	1.111.919.000	-	228.663.200	-	324.156.600	216.104.400	-	768.924.200	342.994.800	7.474.188	776.398.388
122	5202052005	Setanggor	Praya Barat	MANDIRI	980.579.000	-	242.667.600	-	345.679.800	230.453.200	-	818.800.600	161.778.400	63.730.231	882.530.831
123	5202122002	Setling	Batukilang Utara	MANDIRI	1.347.232.000	-	268.724.400	-	539.614.800	359.743.200	-	1.168.082.400	179.149.600	22.277.470	1.190.359.870
124	5202072012	Setutan	Janapria	MAJU	1.076.861.000	-	100.179.600	-	495.847.200	330.864.800	-	925.591.600	150.269.400	41.578.905	968.170.505
125	5202062005	Smitung	Pringgarrata	MANDIRI	1.377.499.000	-	387.711.000	-	438.798.400	292.525.600	-	1.119.025.000	258.474.000	3.129.000	1.122.154.000
126	5202082011	Sisk	Pringgarrata	MANDIRI	1.566.007.000	-	499.017.000	332.678.000	440.587.200	293.724.800	-	1.566.007.000	-	21.652.373	1.587.659.373
127	5202042003	Sukadana	Pujut	BERKEMBANG	1.148.221.000	-	267.401.200	-	287.830.800	191.887.200	-	747.119.200	401.101.800	201.895.860	949.015.060
128	5202062001	Sukaraja	Praya Timur	MAJU	1.197.709.000	-	126.733.200	190.099.800	528.525.600	352.350.400	-	1.197.709.000	-	75	1.197.709.075
129	5202022010	Sukarara	Jonggat	MANDIRI	1.236.162.000	-	280.618.800	-	461.078.400	307.385.600	-	1.049.082.800	187.079.200	37.616.600	1.086.699.400
130	5202082010	Taman Indah	Pringgarrata	MANDIRI	1.266.383.000	-	482.567.400	321.711.600	277.262.400	184.841.600	-	1.266.383.000	-	1.000	1.266.384.000
131	5202032006	Tampak Siring	Batukilang	MANDIRI	1.414.708.000	-	406.672.200	271.114.800	442.152.600	294.768.400	-	1.414.708.000	-	4.908.582	1.419.616.582
132	5202042014	Tanah Awu	Pujut	MANDIRI	1.437.588.000	-	440.847.000	-	421.705.800	281.137.200	-	1.143.690.000	293.898.000	29.738.675	1.172.928.675
133	5202122003	Tanah Beak	Batukilang Utara	MANDIRI	1.472.533.000	-	514.932.000	-	368.587.800	245.725.200	-	1.129.245.000	343.288.000	14.611.166	1.143.856.166
134	5202052010	Tanah Rarang	Praya Barat	BERKEMBANG	825.672.000	-	115.724.800	-	321.816.000	214.544.000	-	652.084.800	173.587.200	7.234.265	659.319.065
135	5202112011	Teduh	Praya Barat Daya	MAJU	781.938.000	-	181.385.600	272.078.400	197.084.400	131.389.600	-	781.938.000	-	52.835.050	834.773.050
136	5202122005	Teratak	Batukilang Utara	MANDIRI	1.210.012.000	-	301.345.200	-	424.662.000	283.108.000	-	1.009.115.200	200.896.800	3.793.066	1.012.908.266
137	5202042004	Teruwai	Pujut	MAJU	1.136.413.000	-	225.129.200	337.693.800	344.154.000	229.436.000	-	1.136.413.000	-	15.662.745	1.152.075.745
138	5202072014	Tibu Sisk	Janapria	BERKEMBANG	976.325.000	-	193.786.400	290.679.600	295.115.400	196.743.600	-	976.325.000	-	60.000	976.385.000
139	5202042011	Tumpek	Pujut	MAJU	1.302.196.000	-	156.786.800	235.180.200	546.137.400	364.091.600	-	1.302.196.000	-	15.976	1.302.211.976
140	5202022002	Ubung	Jonggat	MANDIRI	1.366.893.000	-	464.497.200	309.664.800	355.638.600	237.092.400	-	1.366.893.000	-	460.600	1.367.353.600
141	5202112002	Ungas	Praya Barat Daya	MAJU	1.206.541.000	-	167.032.000	260.548.000	473.376.600	315.584.400	-	1.206.541.000	-	-	1.206.541.000
142	5202092009	Wajageseng	Kopang	MANDIRI	1.467.933.000	-	372.974.400	248.649.600	507.785.400	338.523.600	-	1.467.933.000	-	3.400.000	1.471.333.000
Jumlah					176.357.457.000	-	40.721.030.500	26.228.575.300	57.155.759.400	38.103.839.600	-	162.209.204.800	14.148.252.200	2.782.803.396	164.992.008.196

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG DAN DAFTAR UTANG JANGKA PANJANG KEPADA PT SMI
Sampai Dengan Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

Periode Angsuran	Uraian	Jumlah Dana Pinjaman	Penambahan		Pengurangan			Sisa Dana Pinjaman
			Reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Menjadi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Koreksi	Reklasifikasi Utang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Pembayaran Pokok Utang	Koreksi	
A	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang							
	reklasifikasi dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan Th 2024		31.180.697.340,00					31.180.697.340,00
	SALDO BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER 2024	-	31.180.697.340,00	-	-		-	31.180.697.340,00
1	Pembayaran Pokok Utang Melalui pemotongan langsung DAU Bulan Desember 2024					2.598.391.445,00		28.582.305.895,00
2	Pembayaran Pokok Utang Melalui pemotongan langsung DAU Bulan Januari 2025					2.598.391.445,00		25.983.914.450,00
3	Pembayaran Pokok Utang Melalui pemotongan langsung DAU Bulan Feb 2025					2.598.391.445,00		23.385.523.005,00
4	Pembayaran Pokok Utang Melalui pemotongan langsung DAU Bulan Maret 2025					2.598.391.445,00		20.787.131.560,00
5	Pembayaran Pokok Utang Melalui pemotongan langsung DAU Bulan April 2025					2.598.391.445,00		18.188.740.115,00
6	Pembayaran Pokok Utang Melalui pemotongan langsung DAU Bulan Mei 2025					2.598.391.445,00		15.590.348.670,00
7	Pembayaran Pokok Utang Melalui pemotongan langsung DAU Bulan Juni 2025					2.598.391.445,00		12.991.957.225,00
8	Pembayaran Pokok Utang Melalui pemotongan langsung DAU Bulan Juli 2025					2.598.391.445,00		10.393.565.780,00
9	Pembayaran Pokok Utang Melalui pemotongan langsung DAU Bulan Agustus 2025					2.598.391.445,00		7.795.174.335,00
10	Pembayaran Pokok Utang Melalui pemotongan langsung DAU Bulan September 2025					2.598.391.445,00		5.196.782.890,00
11	Pembayaran Pokok Utang Melalui pemotongan langsung DAU Bulan Oktober 2025					2.598.391.445,00		2.598.391.445,00
12	Pembayaran Pokok Utang Melalui pemotongan langsung DAU Bulan November 2025					2.598.391.445,00		-
	Reklasifikasi dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan Th 2025		31.180.697.340,00					31.180.697.340,00
	SALDO BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER 2025 PADA PT SMI		31.180.697.340,00			31.180.697.340,00		31.180.697.340,00
B	Utang Jangka Panjang							
	Penarikan I 27 April 2022	50.000.000.000,00						50.000.000.000,00
	Penarikan II 12 September 2022	90.000.000.000,00						140.000.000.000,00
	Penarikan III 30 September 2022	47.084.169.050,00						187.084.169.050,00
	Koreksi Atas Kelebihan Salur Utang oleh PT SMI 28 Februari 2023						1.418.393.000,00	185.665.776.050,00
	reklasifikasi menjadi bagian lancar utang jangka panjang yang merupakan utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan 2023				20.787.131.560,00			164.878.644.490,00

Periode Angsuran	Uraian	Jumlah Dana Pinjaman	Penambahan		Pengurangan			Sisa Dana Pinjaman
			Reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Menjadi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Koreksi	Reklasifikasi Utang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Pembayaran Pokok Utang	Koreksi	
	Reklasifikasi menjadi bagian lancar utang jangka panjang yang merupakan utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan 2024				31.180.697.340,00			133.697.947.150,00
	Reklasifikasi menjadi bagian lancar utang jangka panjang yang merupakan utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan 2025				31.180.697.340,00			102.517.249.810,00
	SALDO UTANG JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER 2025	187.084.169.050,00	-	-	83.148.526.240,00		1.418.393.000,00	102.517.249.810,00
C	SALDO BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG + UTANG JANGKA PANJANG PER DESEMBER 2025 PADA PT SMI							133.697.947.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR PENDAPATAN OPERASIONAL DAN SURPLUS NON OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

NO	S K P D	Pendapatan Asli Daerah - LO				Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -LO	Pendapatan Transfer LO	Total Pendapatan LO	Surplus non operasional-LO
		Pajak Daerah - LO	Retribusi Daerah - LO	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang sah-LO				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3+4+5+6+7+8)	10
1	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	22.688.279.350,00	-	55.789.203.225,66	13.104.317.835,00	-	91.581.800.410,66	189.657.860,00
3	Rumah Sakit Umum daerah	-	3.533.884.752,00	-	73.096.757.636,38	34.625.000,00	-	76.665.267.388,38	-
4	PU dan Penataan Ruang	-	245.201.500,00	-	-	-	-	245.201.500,00	-
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	69.430.000,00	-	-	329.044.034,00	-	398.474.034,00	-
6	Badan kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1.349.722.872,00	-	-	-	-	1.349.722.872,00	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	1.979.633.465,00	-	1.979.633.465,00	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	-	727.796.500,00	-	-	-	-	727.796.500,00	3.887.075,00
14	Dinas Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	-	224.391.000,00	-	-	-	-	224.391.000,00	-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Koperasi	-	-	-	-	28.000.000,00	-	28.000.000,00	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	-	5.199.590.376,00	-	-	-	-	5.199.590.376,00	-
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	217.381.933,33	-	-	-	-	217.381.933,33	-
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	132.200.000,00	-	-	-	-	132.200.000,00	-
24	Dinas Pertanian	-	141.113.000,00	-	-	107.871.200,00	-	248.984.200,00	-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	2.724.589.000,00	-	-	124.791.815.530,00	-	127.516.404.530,00	-
26	Sekretariat DPR	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Camat Praya	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Camat Praya Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Camat Praya Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Camat Praya Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Camat Praya Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Camat Pujut	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Camat Janapria	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	S K P D	Pendapatan Asli Daerah - LO				Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -LO	Pendapatan Transfer LO	Total Pendapatan LO	Surplus non operasional-LO
		Pajak Daerah - LO	Retribusi Daerah - LO	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang sah-LO				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3+4+5+6+7+8)	10
35	Camat Kopang	-	-	-	-	-	-	-	
36	Camat Batukliang	-	-	-	-	-	-	-	
37	Camat Batukliang Utara	-	-	-	-	-	-	-	
38	Camat Pringgarata	-	-	-	-	-	-	-	
39	Camat Jonggat	-	-	-	-	-	-	-	
40	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	
41	Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	
42	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	335.782.630.171,29	(137.614.583,33)	-	2.097.356.725,78	-	-	337.742.372.313,73	112.471,00
43	PPKD	-	-	15.544.738.125	14.026.171.322,28	26.324.521.293,00	2.156.877.100.461,00	2.212.772.531.201,28	10.100.000,00
44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	2.379.634.233,33	-	-	1.688.067.000,00	-	4.067.701.233,33	
45	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	335.782.630.171,29	39.495.599.933,33	15.544.738.125,00	145.009.488.910,10	168.387.895.357,00	2.156.877.100.461,00	2.861.097.452.957,72	203.757.406,00

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DAFTAR BEBAN OPERASIONAL, LUAR BIASA, TRANSFER DAN DEFISIT NON OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	Beban Operasional							Beban Transfer	Jumlah Beban	Beban Luar Biasa	Defisit Non Operasional
		Beban Pegawai	Beban Barang dan Jasa	Beban Bunga	Beban Hibah	Beban Bansos	Beban Penyusutan	Beban Penyisihan Piutang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan	704.141.155.424,46	146.899.226.587,00		57.463.153.293,00		58.339.513.621,70			966.843.048.926,16		
2	Dinas Kesehatan	187.102.787.712,26	190.647.361.692,49		200.000.000,00		35.871.897.180,27	588.830,00		413.822.635.415,02		1.878.177.312,42
3	Rumah Sakit Umum daerah	73.026.117.198,58	79.976.513.344,18	367.322.852,95			34.138.089.676,46			187.508.043.072,17		-
4	PU dan Penataan Ruang	15.162.703.427,00	74.690.419.604,50		948.451.000,00		130.634.990.782,30			221.436.564.813,80		-
5	Dinas Perumahan dan Kawasan	5.575.135.807,00	48.822.877.642,00				3.447.372.735,53			57.845.386.184,53		-
6	Badan kesatuan Bangsa dan Politik	2.387.768.998,00	3.639.767.447,00		1.052.532.502,00		109.372.777,07			7.189.441.724,07		-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	10.236.818.643,00	3.170.310.283,00				187.393.257,19			13.594.522.183,19		-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.802.433.661,00	1.418.054.210,00				267.062.377,50			4.487.550.248,50		-
9	Dinas Sosial	2.527.133.564,00	2.962.596.704,00		720.000.000,00	626.400.000,00	429.145.028,05			7.265.275.296,05		-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.939.342.481,40	4.255.366.779,00		424.738.567,00		271.899.036,87			10.891.346.864,27		-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	3.009.503.602,00	13.162.515.221,00				1.067.433.014,78			17.239.451.837,78		-
12	Dinas Ketahanan Pangan	2.225.702.872,00	3.204.218.077,00				133.018.620,58			5.562.939.569,58		-
13	Dinas Lingkungan Hidup	5.829.953.434,00	5.955.767.752,00				3.097.566.102,07	10.455.990,00		14.893.743.278,07		-
14	Dinas Catatan Sipil	3.731.741.443,00	1.981.764.862,00				700.732.179,44			6.414.238.484,44		-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.092.840.906,25	5.519.379.853,00				130.525.449,57			8.742.746.208,82		-
16	Dinas Perhubungan	4.636.450.814,00	15.009.491.574,00				2.324.182.555,09			21.970.124.943,09		-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.189.286.820,00	3.623.288.724,00				544.230.739,19			7.356.806.283,19		-
18	Dinas Koperasi	3.038.361.358,00	10.541.429.035,00		200.000.000,00		783.281.791,56			14.563.072.184,56		-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	3.289.023.849,00	1.477.255.454,00				339.052.868,20			5.105.332.171,20		-
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.139.473.094,00	16.716.944.326,00		1.000.000.000,00		383.332.867,64			20.239.750.287,64		-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.878.315.797,00	3.270.363.598,00				235.999.318,85			7.384.678.713,85		-
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.564.420.422,00	5.224.253.646,00				749.462.846,93			10.538.136.914,93		-
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.862.307.925,00	2.601.241.883,00				1.419.407.908,40			8.882.957.716,40		-
24	Dinas Pertanian	28.335.951.701,54	48.967.672.544,00				1.570.791.006,74			78.874.415.252,28		-
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.170.416.973,00	12.937.563.999,00				5.750.291.736,35			22.858.272.708,35		-
26	Sekretariat DPR	31.611.467.148,00	26.977.498.256,00				815.258.811,13			59.404.224.215,13		-
27	Sekretariat Daerah	13.407.043.836,00	12.387.863.893,00		5.011.500.000,00		2.131.774.091,80			32.938.181.820,80		440.784.129,55
28	Camat Praya	9.754.243.815,93	10.025.499.322,00				1.000.849.613,45			20.780.592.751,38		-
29	Camat Praya Tengah	4.313.976.935,60	3.665.784.779,00				386.951.327,99			8.366.713.042,59		-
30	Camat Praya Barat	1.877.830.805,00	793.618.994,00				100.369.172,05			2.771.818.971,05		-
31	Camat Praya Barat Daya	1.774.293.627,00	690.509.901,00				44.369.647,85			2.509.173.175,85		-
32	Camat Praya Timur	1.534.496.157,25	800.778.103,00				104.669.427,76			2.439.943.688,01		-
33	Camat Pujut	2.359.310.368,00	857.012.120,00				130.412.130,82			3.346.734.618,82		-
34	Camat Janapria	1.821.673.039,00	688.694.803,00				137.716.977,31			2.648.084.819,31		-
35	Camat Kopang	2.188.417.176,00	758.605.605,00				152.546.048,19			3.099.568.829,19		-
36	Camat Batukliang	1.340.301.051,00	770.469.778,00				148.428.477,63			2.259.199.306,63		-

No	SKPD	Beban Operasional							Beban Transfer	Jumlah Beban	Beban Luar Biasa	Defisit Non Operasional
		Beban Pegawai	Beban Barang dan Jasa	Beban Bunga	Beban Hibah	Beban Bansos	Beban Penyusutan	Beban Penyisihan Piutang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Camat Batukliang Utara	1.235.013.166,00	722.967.486,00				141.090.532,18			2.099.071.184,18		-
38	Camat Pringgarata	1.850.020.592,25	856.596.132,00				99.790.080,60			2.806.406.804,85		-
39	Camat Jonggat	1.736.688.514,00	901.030.547,00				120.042.351,84			2.757.761.412,84		-
40	Inspektorat Daerah	10.510.497.343,00	5.293.550.396,00				622.040.641,63			16.426.088.380,63		-
41	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.945.480.094,25	5.809.422.586,00				557.004.299,96			12.311.906.980,21		-
42	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	21.171.872.600,00	4.202.341.226,00				966.524.381,40	5.787.411.335,41		32.128.149.542,81		-
43	PPKD	-	-	9.444.498.290,00			-		190.812.005.410,21	200.256.503.700,21	8.959.925.740,00	-
44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	59.546.292.221,00	4.973.522.007,00				1.480.315.714,23			66.000.129.942,23		-
45	Pemadam Kebakaran	6.392.775.351,00	1.592.607.844,00				1.618.850.981,35			9.604.234.176,35		-
46	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.647.225.643,00	2.778.744.855,00				835.874.925,81			8.261.845.423,81		-
	JUMLAH	1.273.914.067.410,77	792.222.763.474,17	9.811.821.142,95	67.020.375.362,00	626.400.000,00	294.520.925.113,31	5.798.456.155,41	190.812.005.410,21	2.634.726.814.068,82	8.959.925.740,00	2.318.961.441,97

